



Sinergi untuk **AKSELERASI** PEMBANGUNAN EKONOMI





Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Sinergi untuk **AKSELERASI** **PEMBANGUNAN EKONOMI**

Laporan Kinerja Tahun Anggaran
2025



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	8
RINGKASAN EKSEKUTIF	14

PENDAHULUAN 01

LATAR BELAKANG	28
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	31
Tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	31
Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	31
Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	32
MANDAT DAN PERAN STRATEGIS	36
SISTEMATIKA PELAPORAN	48

PERENCANAAN KINERJA 02

PERENCANAAN STRATEGIS	54
PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KERJA TAHUN 2025	58
Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025	58
Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025	60
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025	66

AKUNTABILITAS KINERJA 03

A. PENGUKURAN KINERJA	72
Pengukuran Kinerja Organisasi	72
Perhitungan Capaian IKU	73
Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) Tahun 2025	76
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025	77
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	79
B.1 Capaian Prioritas Nasional (PN)	79
B.2 Capaian Sasaran Strategis 1	106
Pertumbuhan Ekonomi	107
Biaya Logistik	127
Pembentukan Modal Tetap Bruto	138
Rasio PDB Industri Pengolahan	159
Devisa Pariwisata	174
Rasio PDB Pariwisata	191
Indeks Ketahanan Energi	202
Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	224
B.3 Capaian Sasaran Strategis 2	235
Tingkat Inflasi	235
B.4 Capaian Sasaran Strategis 3	249
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	249
Tingkat Pengangguran Terbuka	268

B.5 Capaian Sasaran Strategis 4	284
Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	284
B.6 Capaian Sasaran Strategis 5	298
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	298
B.7 Capaian Sasaran Strategis 6	305
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	305
C. Akuntabilitas Keuangan	314
Pagu dan Revisi Anggaran Tahun 2025	314
Realisasi Anggaran Tahun 2025	314
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	315
Realisasi Anggaran Pagu Prioritas Nasional	316
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Per Program	318
Realisasi Anggaran dan Capaian Kegiatan	320
Analisis Efisiensi Anggaran Anggaran Tingkat Efisiensi Anggaran	402

EVALUASI KINERJA

04



EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA	408
Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 dan Penyesuaian Target Kinerja pada Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	408
Capaian Kinerja Kementerian terhadap Target RPJMN 2025 – 2029 dan RKP 2025	411
Capaian dan Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Tahun 2025 – 2029	414
Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026	416
TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP KEMENPAN RB	418
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA	420

PENUTUP

05



LAMPIRAN	434



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sasaran Strategis dan Tujuan dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 – 2029	56
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	57
Tabel 2.3.	Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025	58
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja dalam Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025	60
Tabel 2.5.	Program Tahun Anggaran 2025	61
Tabel 2.6.	Alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	62
Tabel 2.7.	Sasaran Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025	63
Tabel 2.8.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	66
Tabel 3.1.	Kriteria Capaian NKO	72
Tabel 3.2.	Polarisasi Indikator Kinerja Tahun 2025	76
Tabel 3.3.	Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025	77
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025	107
Tabel 3.5.	Capaian Biaya Logistik Tahun 2025	128
Tabel 3.6.	Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2025	138
Tabel 3.7.	Capaian Rasio PDB Industri Pengolahan Tahun 2025	161
Tabel 3.8.	Capaian Devisa Pariwisata Tahun 2025	176
Tabel 3.9.	Capaian Rasio PDB Pariwisata Tahun 2025	193
Tabel 3.10.	Status Indeks Ketahanan Energi	202
Tabel 3.11.	Capaian Indeks Ketahanan Energi Tahun 2025	203
Tabel 3.12.	Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global Tahun 2025	224
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Tingkat Inflasi Tahun 2025	236
Tabel 3.14.	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2025	239
Tabel 3.15.	Juara TPID Award 2025	243
Tabel 3.16.	Capaian Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2025	252
Tabel 3.17.	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025	268
Tabel 3.18.	Capaian Tingkat Efektivitas SKP Kebijakan Perekonomian Tahun 2025	286
Tabel 3.19.	Capaian Bauran Tingkat Efektivitas SKP Kebijakan Perekonomian Tahun 2025	287
Tabel 3.20.	Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tahun 2025	299
Tabel 3.21.	Indeks Kepuasan Layanan Berdasarkan Kategori Layanan SKP Tahun 2025	300
Tabel 3.22.	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Tahun 2025	306
Tabel 3.23.	Target dan Proyeksi Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Tahun 2025	306
Tabel 3.24.	Target dan Proyeksi Nilai RB General Tahun 2025	307
Tabel 3.25.	Proyeksi Capaian Nilai RB Tematik Tahun 2025	309
Tabel 3.26.	Jumlah Revisi DIPA BA-035 Tahun 2025 per Satuan Kerja	314
Tabel 3.27.	Pagu Prioritas Nasional Tahun 2025	316
Tabel 3.28.	Pagu dan Realisasi Kegiatan Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Nasional	317
Tabel 3.29.	Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025	319
Tabel 3.30.	Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025	402
Tabel 4.1.	Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2025–2029	408
Tabel 4.2.	Perbandingan Target Kinerja dalam Renstra dan Renja Tahun 2025	410
Tabel 4.3.	Perbandingan Target dan Realisasi Perencanaan Kinerja Tahun 2025	411
Tabel 4.4.	Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2025	414
Tabel 4.5.	Target Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026	417

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	29
Gambar 1.2.	Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	31
Gambar 1.3.	Daftar Kementerian/ Lembaga di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	32
Gambar 1.4.	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	32
Gambar 1.5.	Visi, Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional	38
Gambar 3.1.	Proses Penghitungan NKO	73
Gambar 3.2.	Kriteria Capaian NSS	76
Gambar 3.3.	Pertumbuhan PDB beberapa Lapangan Usaha (C-to-C)(Persen), 2023-2025	109
Gambar 3.4.	Pertumbuhan PDB beberapa Komponen Pengeluaran (C-to-C)(Persen), 2023-2025	109
Gambar 3.5.	Target dan Realisasi KUR per Tahun (Rp Triliun)	114
Gambar 3.6.	Debitur KUR per Tahun (orang juta)	115
Gambar 3.7.	Penyaluran KUR Syariah Tahun 2025	115
Gambar 3.8.	Jumlah Debitur KUR Syariah Tahun 2025	116
Gambar 3.9.	Kinerja Penjaminan/Pertanggung KUR Tahun 2025 (Rp Triliun)	116
Gambar 3.10.	Debitur dan Tenaga Kerja Yang Terserap (orang)	117
Gambar 3.11.	Kinerja Klaim (Rp Triliun)	117
Gambar 3.12.	Gearing Ratio Lembaga Penjamin/Asuransi KUR Tahun 2025 (kali)	117
Gambar 3.13.	Capaian Proyek Strategis Nasional.	123
Gambar 3.14.	National Logistics Ecosystem (NLE) Biaya Logistik di Beberapa Negara	129
Gambar 3.15.	Distribusi dan Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran	139
Gambar 3.16.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi	140
Gambar 3.17.	FDI in ASEAN Member States, 2023 and 2024 (Billions of Dollars)	141
Gambar 3.18.	Menko Airlangga Temui Sekjen OECD Guna Serahkan Initial Memorandum	146
Gambar 3.19.	Indeks Ketahanan Energi (IKE)	204
Gambar 3.20.	Indeks Trilema Negara ASEAN 2024	205
Gambar 3.21.	Produksi Minyak Bumi	207
Gambar 3.22.	Produksi Gas Bumi	208
Gambar 3.23.	Capaian dan Target Sektor Migas	209
Gambar 3.24.	Total Kapasitas Terpasang EBT: 15.630 MW	213
Gambar 3.25.	Capaian Distribusi Pertamina Green dan Bioetanol 2025	214
Gambar 3.26.	Perbandingan Proporsi Pekerja Formal dan Informal 2023 – 2025	251

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Biaya Logistik Indonesia terhadap PDB (2018-2025) dan Target Penurunan	128
Grafik 3.2.	Tren Kunjungan Bulanan	181
Grafik 3.3.	Gambar Ringkasan Tingkat Inflasi Bulanan Tahun 2025	237
Grafik 3.4.	Gambar Tingkat Inflasi Inti Bulanan Tahun 2024 – 2025	238
Grafik 3.5.	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 – 2025 (dalam ribuan Rupiah)	315
Grafik 3.6.	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	315



SAMBUTAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WA- BARAKAATUH, SALAM SEJAHTERA.

Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa selama Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Pelaksanaan mandat tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud komitmen terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tahun 2025 memiliki arti yang sangat strategis karena merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pada periode ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengemban peran penting untuk memastikan kesinambungan agenda pembangunan ekonomi nasional, memperkuat fondasi transformasi struktural, serta menjaga stabilitas dan daya tahan perekonomian di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, seperti perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, tekanan inflasi, serta tuntutan percepatan transformasi ekonomi hijau dan digital, telah direspons melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian/lembaga. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

mengawal pelaksanaan sejumlah program unggulan, antara lain penguatan iklim investasi dan hilirisasi industri, pengendalian inflasi, percepatan transformasi ekonomi digital, pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan dan devisa, serta penguatan ketahanan energi nasional. Dalam konteks tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berupaya menjalankan perannya sebagai *policy integrator* untuk memastikan kebijakan di bidang perekonomian berjalan selaras, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam LAKIP ini menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari pencapaian sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memenuhi, bahkan pada beberapa indikator melampaui, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut antara lain ditunjukkan oleh terjaganya pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatnya pembentukan modal tetap bruto sebagai cerminan penguatan investasi, terkendalinya inflasi dalam rentang sasaran, membaiknya kinerja sektor industri pengolahan dan pariwisata, serta membaiknya indikator ketenagakerjaan. Pencapaian tersebut mencerminkan semakin efektifnya pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, penguatan daya saing nasional, serta penciptaan lapangan kerja. Secara lebih spesifik, capaian IKU kementerian juga tercermin pada peningkatan

daya saing ekonomi digital, penguatan ketahanan energi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dan devisa, serta peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal.

Seluruh capaian kinerja substantif, tidak terlepas dari upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan kualitas proses bisnis dan layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian. Selain itu, penguatan dalam manajemen internal yang berfokus pada peningkatan kualitas kebijakan, digitalisasi, penguatan SDM dan tata kelola lain juga menjadi faktor penyumbang capaian substantif dan menjadi salah satu narasi dalam laporan ini.

Saya berharap LAKIP Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang. Menghadapi Tahun 2026 sebagai tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2025–2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus memperkuat peran koordinatif melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan perekonomian nasional. Berbagai langkah strategis akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2025–2029 secara konsisten hingga akhir periode, sesuai dengan target dan mandat yang telah ditetapkan. Dengan memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga serta seluruh pemangku kepentingan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimis dapat berkontribusi



optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kementerian/ lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

sepanjang Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi upaya perbaikan kinerja pemerintahan dan pembangunan ekonomi nasional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dalam upaya kita mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

WASSALAM MU'ALAIKUM
WARAHMATULLAHI WA- BARAKATUH.

Jakarta, 27 Februari 2026
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

"SINERGI UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI"

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang termuat di dalam laporan tersebut menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang telah disajikan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jakarta, 27 Februari 2026
Inspektur,


Mirza Sofjanhadi Mashudi
NIP 19700118 199603 1 001



1

PERTUMBUHAN EKONOMI

1



Pertumbuhan Ekonomi (PDB)

Sepanjang 2025 terjaga di kisaran 5%
(Q4-2025: 5,11% YoY)

2



PDB-PPP

PDB-PPP tahun 2024 sebesar
USD 4.10 Triliun, peringkat
ke-8 ekonomi dunia

3



PDB Per Kapita

Mencapai **Rp 83,7 Juta**
atau setara dengan
USD 5.083,4

4



Inflasi

Terkendali dalam rentang
sasaran **2,5±1%**
(Desember 2025 : 2,92% YoY)

5



Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Terus menguat dan berada
di level **8.644,26**
(29 Desember 2025)

6



Nilai tukar rupiah

Relatif stabil di kisaran
Rp16.785 per dolar AS
(Desember 2025)

2

INDIKATOR EKONOMI MAKRO

1



PMI Manufaktur

Terus meningkat ke ke Level **51,2**
(Desember 2025) berada di Fase Ekspansi

2



Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Tetap berada di Level Optimis atau
123,5 pada Desember 2025

3



Indeks Penjualan Riel

Terus tumbuh positif,
diperkirakan **4,4% YoY** (Desember 2025)

4



Neraca Perdagangan

Mencatatkan surplus selama **68 bulan**
berturut-turut sejak Mei 2020,
sebesar **USD 41.05 Miliar** (Jan-Des 2025)

5



Cadangan Devisa

Tetap tinggi, sebesar
USD 156,5 Miliar pada Desember 2025

6



Realisasi Investasi

Mencapai **Rp 1.931,2 Triliun**
(Jan-Des 2025), tumbuh sebesar **12,7% YoY**

7



Pertumbuhan Kredit

Tetap tumbuh positif, tercatat
9,69% YoY (Desember 2025)

CAPAIAN KINERJA PEREKONOMIAN 2025

3

INDIKATOR KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

1



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Mencapai **70,95%** (November 2025),
peningkatan partisipasi angkatan kerja

2



Tingkat Pengangguran Terbuka

Terus menurun tercatat **4,74%**
(November 2025) perbaikan kondisi pasar kerja

3



Tingkat Kemiskinan

Terus menurun tercatat **8,25%** (September 2025),
mencerminkan perbaikan kesejahteraan
masyarakat

4



Tingkat kemiskinan ekstrem

Terus menurun tercatat sebesar **0,85%** (Maret
2025), mencerminkan percepatan
mendekati nol

5



Rasio Gini

Tren menurun tercatat sebesar
0,363 (September 2025), mencerminkan perbaikan
pemerataan pendapatan

4

PROGRAM STIMULUS DAN PAKET EKONOMI

1



Penguatan Sektor Riil, Penciptaan Lapangan Kerja

Program Magang lulusan PT, penyaluran
Kredit Program (KUR, Kredit Alsintan, KIPK,
Kredit Perumahan), Program Padat Karya Tunai

2



Penguatan Daya Beli Masyarakat

Bantuan Pangan dan Bantuan Kartu Sembako
tambahan (di luar bansos reguler), termasuk
BSU, serta BLTS Kesra

3



Stimulus Mobilitas Penduduk dan Pariwisata

Diskon Transportasi (Kereta Api, Pesawat Udara,
Angkutan Laut, Penyeberangan, Tarif Tol) pada
periode libur sekolah Juni-Juli dan libur Nataru

4



Dukungan bagi Industri Padat Karya

Melalui pemberian Diskon Iuran JKK (Jaminan
Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian),
dan penguatan skema KIPK

5



Insentif Fiskal

Untuk Pekerja dan UMKM, melalui
PPh Pasal 21 DTP bagi Pekerja Pariwisata dan
IPK, serta perpanjangan PPh Final UMKM

6



Deregulasi dan Debottlenecking (PP28/2025)

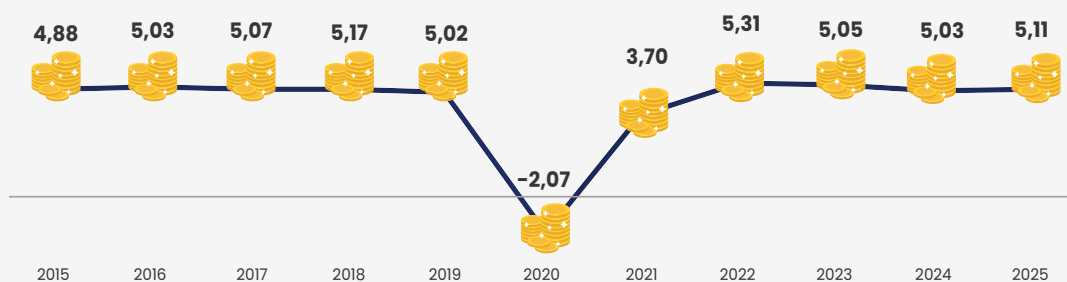
Melalui penyederhanaan regulasi, percepatan
perizinan dasar, integrasi perizinan lintas K/L
ke dalam sistem OSS



RINGKASAN EKSEKUTIF

PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB), 2015–2025 (persen)



Sumber: BPS (2026)

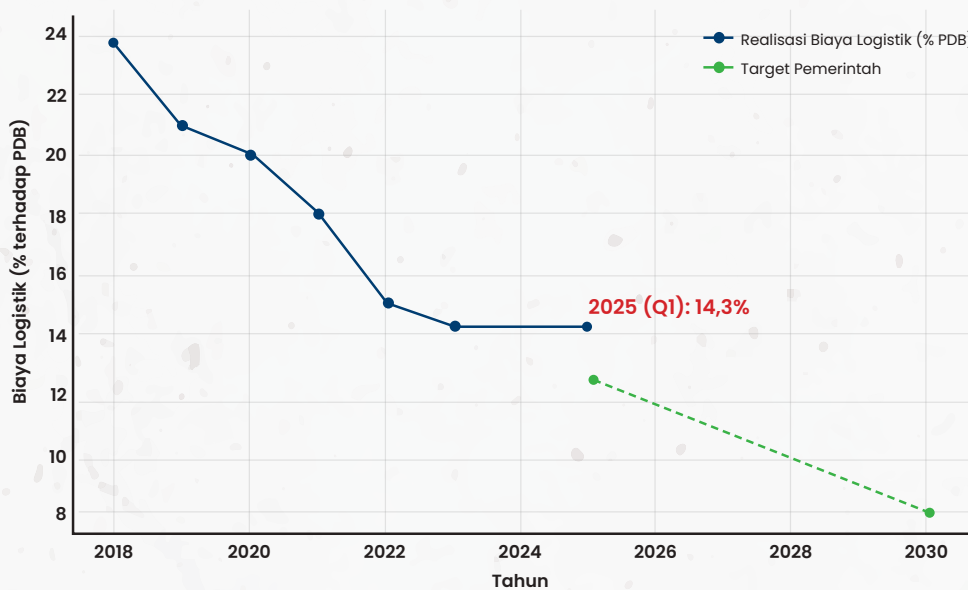
Pada Tahun 2025, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan 5,11%, meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar 5,03%. Kenaikan ini menegaskan bahwa laju pertumbuhan Indonesia tetap stabil dan terjaga, sekaligus menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi di tengah dinamika perekonomian dunia. Dengan capaian tersebut, Indonesia tidak hanya berada pada jalur pertumbuhan yang solid, tetapi juga melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan sekitar 3,2%. Artinya, kinerja ekonomi nasional relatif lebih kuat dibanding rata-rata dunia, yang saat ini masih diwarnai ketidakpastian, perlambatan permintaan, dan tekanan pada rantai perdagangan internasional. Dari perspektif perbandingan kawasan dan mitra dagang, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2025 juga tercatat lebih tinggi dibanding

beberapa negara mitra seperti Tiongkok (5,0%), Singapura (4,8%), Malaysia (4,9%), Korea Selatan (1,0%), serta Filipina (4,4%). Sementara itu, Vietnam (8,0%) berada di atas Indonesia dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, posisi Indonesia tetap kompetitif di antara negara-negara utama di kawasan, dan capaian pertumbuhan 2025 menjadi sinyal positif bahwa fondasi ekonomi domestik cukup kuat untuk mempertahankan momentum, memperluas kapasitas produksi, serta menjaga daya tarik ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang menantang.



BIAYA LOGISTIK

Biaya Logistik Indonesia terhadap PDB (2018–2025) dan Target Penurunan



Sumber: BPS (2026)

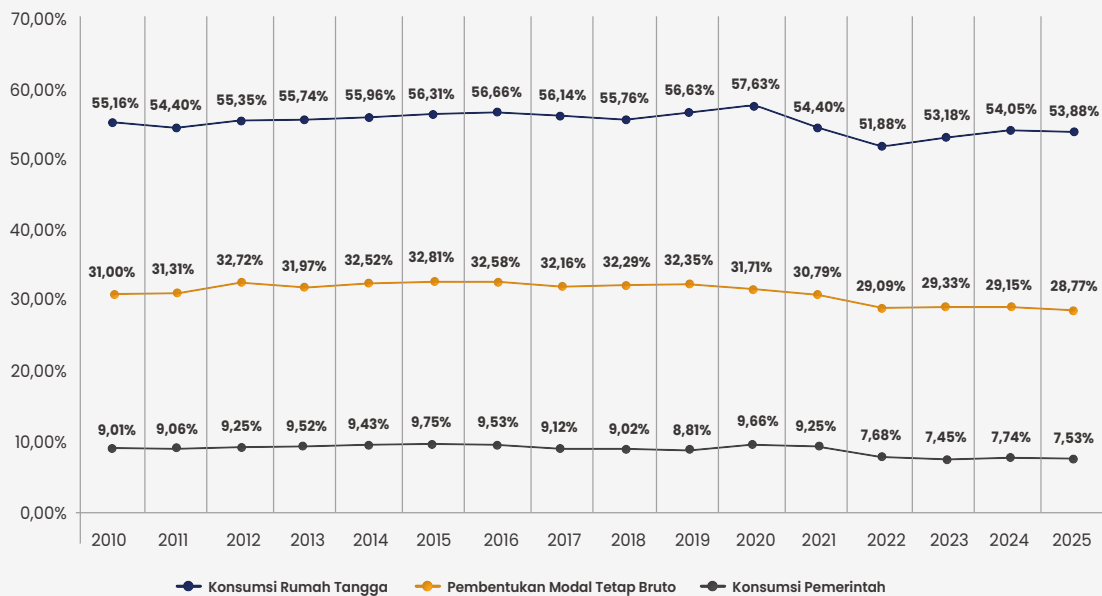
Biaya logistik nasional terhadap PDB menunjukkan perbaikan yang kuat sepanjang 2018–2025, turun dari sekitar 23,8% pada 2018 menjadi sekitar 14,3% pada 2025. Penurunan ini menggambarkan meningkatnya efisiensi sistem logistik dan perbaikan kinerja rantai pasok, sehingga biaya distribusi barang secara agregat menjadi lebih terkendali. Meski demikian, capaian 2025 masih mengindikasikan adanya ruang penguatan, khususnya pada komponen biaya transportasi, waktu tunggu, biaya penanganan dan pergudangan, serta distribusi last-mile yang masih menjadi sumber tekanan biaya. Selain itu, biaya logistik juga rentan berfluktuasi pada periode tertentu, misalnya saat pembatasan mobilitas angkutan pada momen Hari Besar Keagamaan

Nasional (HBKN) yang dapat mengganggu kelancaran distribusi, menurunkan utilisasi armada, dan meningkatkan biaya operasional. Dalam konteks ringkasan eksekutif, capaian 2025 ini menjadi sinyal positif atas penguatan efisiensi ekonomi, namun konsistensi penurunan biaya logistik perlu terus dijaga karena berdampak langsung pada daya saing harga produk, kelancaran pasokan, stabilitas harga, serta pemerataan distribusi barang antarwilayah. Secara perbandingan, biaya logistik Indonesia masih relatif lebih tinggi dibanding Tiongkok (14%), Thailand (15%), serta Singapura, hal ini mendorong Indonesia untuk terus berupaya mewujudkan penurunan biaya logistik guna memperkuat daya saing regional.



PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

PORSI KOMPONEN PENGELUARAN ATAS PDB



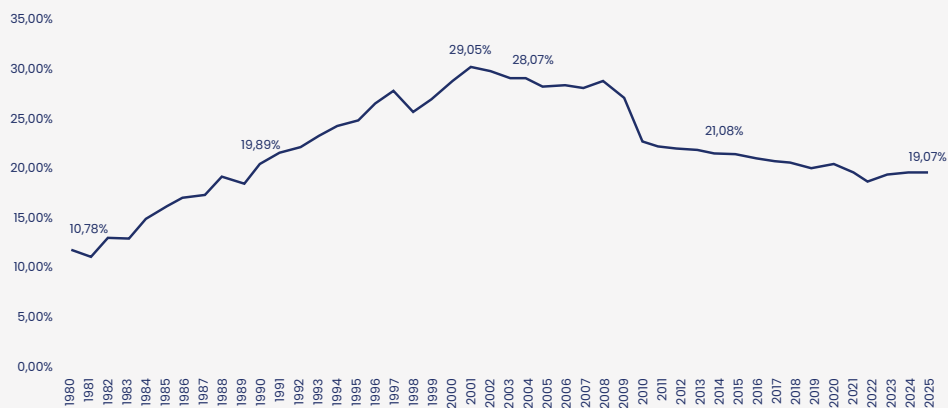
Sumber: BPS (2026)

Pada tahun 2025, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merefleksikan aktivitas investasi seperti pembangunan infrastruktur, pembelian mesin/peralatan, konstruksi, dan penambahan kapasitas produksi memiliki porsi 28,77% terhadap PDB (berdasarkan struktur pengeluaran). Angka ini menegaskan bahwa investasi tetap menjadi komponen besar kedua dalam perekonomian setelah konsumsi rumah tangga, sehingga pergerakannya sangat menentukan arah pertumbuhan ke depan, terutama dalam memperkuat kapasitas produksi dan produktivitas. Sejalan dengan porsi tersebut, pada grafik dekomposisi pertumbuhan terlihat bahwa PMTB memberikan kontribusi sekitar 1,58 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% pada 2025 sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir sepertiga laju pertumbuhan 2025 didorong oleh

investasi. Dengan demikian, meskipun konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama, kinerja PMTB pada 2025 menunjukkan peran strategis investasi sebagai pengungkit pertumbuhan yang lebih berkelanjutan baik melalui perluasan kapasitas sektor riil, peningkatan efisiensi, maupun penciptaan basis pertumbuhan yang lebih kuat pada periode berikutnya. Secara regional, arus investasi juga tercermin pada FDI di ASEAN, di mana Indonesia menjadi penerima terbesar kedua pada Tahun 2024 sebesar 24,2 miliar USD, berada di bawah Singapura (143,4 miliar USD) namun di atas Vietnam (20,2 miliar USD), Malaysia (11,4 miliar USD), dan Thailand (10,6 miliar USD). Pola ini menunjukkan posisi Indonesia relatif kuat dalam menarik investasi di kawasan, meski persaingan dan kebutuhan penguatan iklim investasi tetap penting untuk menjaga momentum.

RASIO PDB INDUSTRI PENGOLAHAN

PORSI INDUSTRI PENGOLAHAN ATAS PDB



Sumber: BPS (2026)

Pada Tahun 2025, porsi Industri Pengolahan terhadap PDB tercatat sebesar 19,07%, menunjukkan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian meskipun porsinya masih berada pada level moderat dibanding periode puncak historis. Capaian Tahun 2025 ini juga menggambarkan kecenderungan stabil dalam beberapa tahun terakhir di kisaran $\pm 19\text{--}21\%$, sehingga peran industri pengolahan relatif terjaga namun belum mengalami penguatan yang signifikan. Dengan porsi tersebut, kinerja manufaktur pada Tahun 2025 menjadi indikator penting bagi daya saing ekonomi nasional karena berkontribusi besar pada penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan basis produksi; oleh karena itu, menjaga momentum industri melalui peningkatan produktivitas, efisiensi

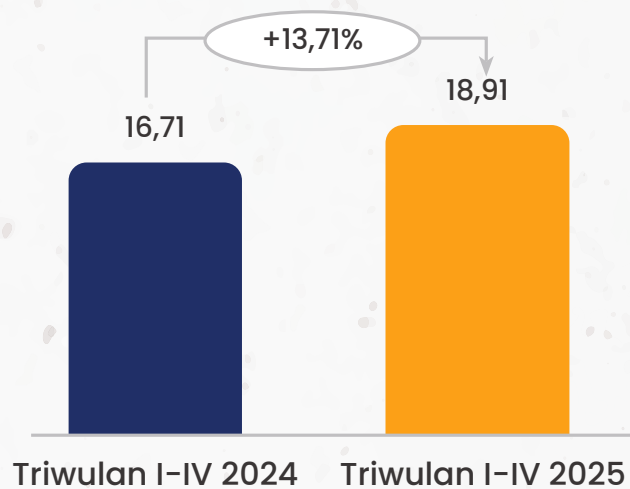
biaya, serta penguatan rantai pasok dan hilirisasi tetap menjadi agenda kunci. Secara regional, indikator aktivitas manufaktur (PMI) menempatkan Indonesia pada level 51,2, masih di bawah rata-rata ASEAN (52,7) meski demikian posisi Indonesia berada di atas Myanmar (50,6), Filipina (50,2), dan Malaysia (50,1). Capaian ini menunjukkan ekspansi manufaktur Indonesia tetap berlangsung, meski perlu didorong agar lebih kuat dibanding negara-negara di kawasan.





DEVISA PARIWISATA

Devisa Pariwisata dari Wisatawan Mancanegara (Dalam miliar dolar AS)



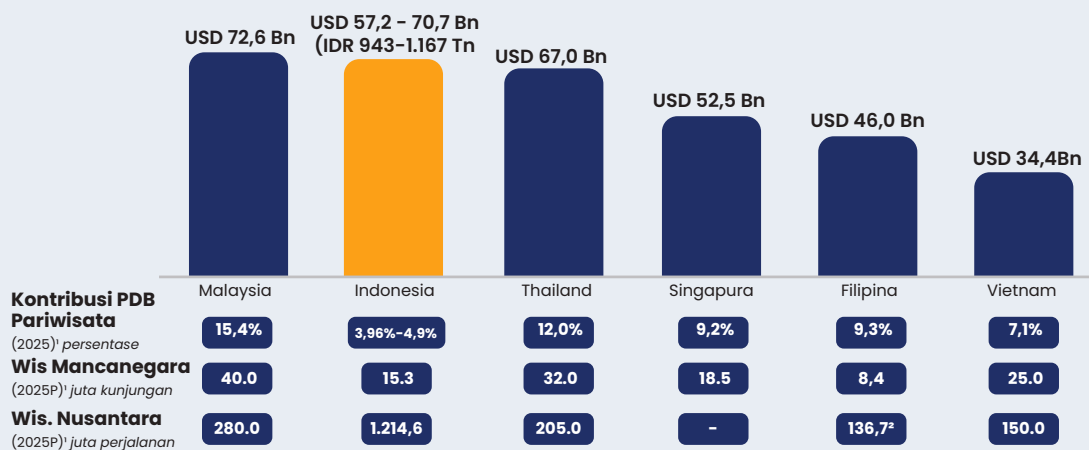
Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV 2025, devisa pariwisata dari wisatawan mancanegara meningkat menjadi USD 18,91 miliar, tumbuh 13,17% dibanding USD 16,71 miliar pada periode yang sama Tahun 2024. Kenaikan ini menegaskan bahwa kinerja pariwisata tetap solid sebagai sumber penerimaan devisa, sekaligus mencerminkan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam mendorong aktivitas ekonomi berbasis jasa. Sejalan dengan penguatan devisa tersebut, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Tahun 2025 tercatat sekitar 15,3 juta, yang menunjukkan adanya penguatan arus kunjungan

dan dukungan permintaan terhadap destinasi wisata nasional. Secara ringkas, capaian ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan pariwisata Indonesia pada 2025 berlangsung positif, dengan ruang untuk terus memperkuat kualitas layanan, konektivitas, serta pengembangan produk wisata bernilai tambah agar peningkatan devisa dapat terjaga secara berkelanjutan. Sebagai perbandingan di kawasan, jumlah kunjungan wisman Tahun 2025 di beberapa negara kawasan ASEAN seperti Malaysia yaitu sebesar 40,0 juta, Thailand 32,0 juta, Vietnam 25,0 juta, Singapura 18,5 juta, Indonesia 15,3 juta, dan Filipina 8,4 juta.

RASIO PDB PARIWISATA

Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Nasional Negara di Asia Tenggara (Estimasi/Target 2025) dalam miliar Dolar AS



Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

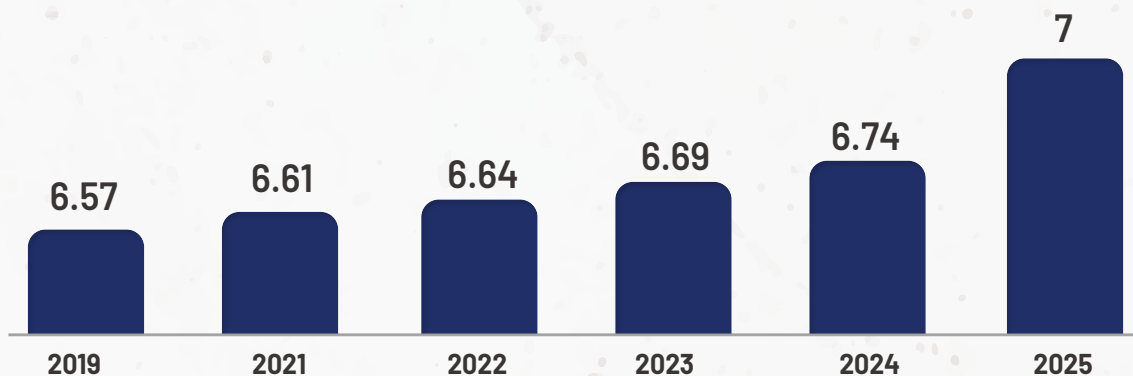
Pada Tahun 2025, kontribusi PDB pariwisata terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 3,96%–4,9%, dengan nilai ekonomi pariwisata sekitar USD 57,2–70,7 miliar (setara IDR 943–1.167 triliun). Capaian ini menunjukkan bahwa pariwisata tetap menjadi salah satu penggerak penting ekonomi nasional, dengan kontribusi yang terjaga dan potensi penguatan berkelanjutan seiring peningkatan kualitas destinasi dan layanan. Ke depan, penguatan kontribusi pariwisata dapat terus

didorong melalui peningkatan kualitas kunjungan terutama mendorong lama tinggal dan belanja per wisatawan serta penguatan konektivitas, amenitas, dan pengembangan produk wisata bernilai tambah agar peran pariwisata dalam perekonomian semakin kuat. Sebagai perbandingan kawasan, pada Tahun 2025 rasio kontribusi PDB pariwisata terhadap PDB di beberapa negara seperti Malaysia 15,4%, Thailand 12,0%, Filipina 9,3%, Singapura 9,2%, dan Vietnam 7,1%.





INDEKS KETAHANAN ENERGI



Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

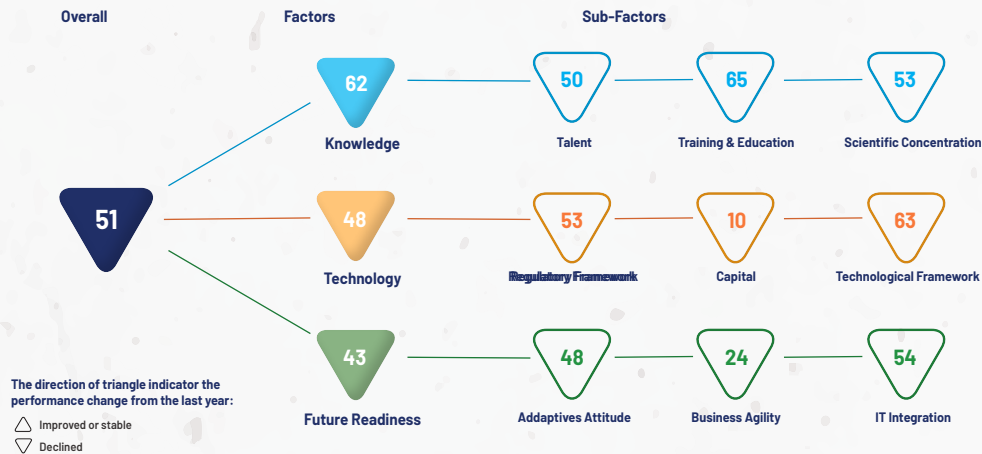
Pada Tahun 2025, Indeks Ketahanan Energi menunjukkan penguatan dengan capaian 7,0, meningkat dibanding Tahun 2024 sebesar 6,74. Kenaikan ini melanjutkan tren perbaikan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, dari 6,57 (2019) menjadi 6,81 (2021), 6,84 (2022), dan 6,89 (2023), sebelum menguat lebih lanjut pada 2024–2025. Secara ringkas, capaian Tahun 2025 menandakan bahwa ketahanan energi nasional berada pada level yang lebih baik dari

sisi ketersediaan, keandalan pasokan, maupun pengelolaan sistem sekaligus menunjukkan bahwa upaya penguatan sektor energi berjalan semakin efektif dan perlu dijaga konsistensinya untuk menopang stabilitas ekonomi dan kebutuhan energi ke depan. Sebagai perbandingan kawasan, pada Tahun 2024 Indonesia berada di peringkat ke-5 di ASEAN dalam Indeks Trilemma Energi dengan skor 60,5, skor ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Thailand (60,1) dan Filipina (56,9).



INDEKS DAYA SAING DIGITAL DI TINGKAT GLOBAL

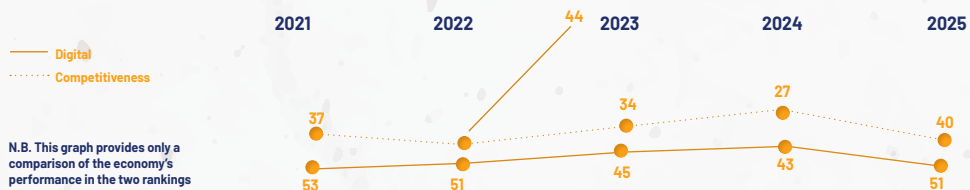
Overall Performance (69 economics)



Overall & Factors - 5 years

	2021	2022	2023	2024	2025
Overall	53	51	45	43	51
Knowledge	60	60	60	53	62
Technology	49	45	39	40	48
Future Readiness	48	52	43	30	43

Competitiveness & Digital Rankings



Peer Groups Rankings

ASIA- PACIFIC (14 economics)



POPULATIONS > 20 MILLION (32 economics)



Sumber: IMD World Competitiveness (2026)



INDEKS DAYA SAING DIGITAL DI TINGKAT GLOBAL

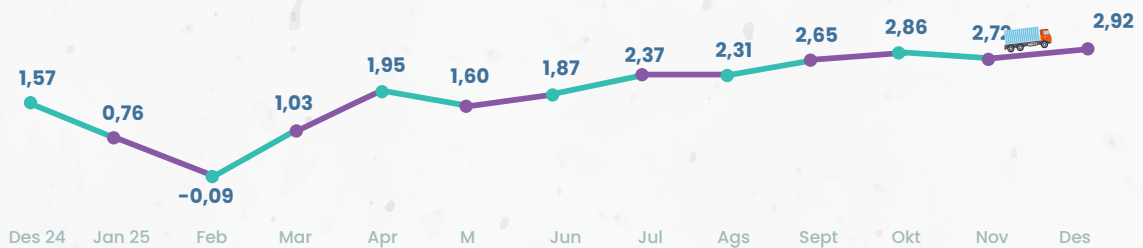
Pada Tahun 2025, posisi Indonesia dalam Indeks Daya Saing Digital yang dirilis IMD World Competitiveness Center berada di peringkat 51 dari 67 ekonomi. Secara dinamika lima tahunan, peringkat Indonesia sempat membaik dari 53 (2021) menjadi 51 (2022), lalu mencapai posisi terbaik periode tersebut pada 45 (2023) dan 43 (2024), namun melemah kembali ke 51 (2025) mengindikasikan bahwa akselerasi transformasi digital belum sepenuhnya konsisten. Dilihat dari tiga pilar penilaian, faktor Knowledge berada pada peringkat 62 (dengan komponen yang relatif menahan seperti training & education 65 dan scientific concentration 53), faktor technology berada pada peringkat 48 (ditopang kuat oleh capital 10, namun masih terbatas pada technological framework 63 meski regulatory framework 53 relatif moderat), sementara Future Readiness berada pada peringkat 43 (dengan kekuatan pada business agility 24, tetapi

masih perlu penguatan pada IT integration 54 dan adaptive attitudes 46). Dalam kelompok pembanding, Indonesia berada di peringkat 12 dari 14 negara Asia Pasifik pada Tahun 2025 dan peringkat 20 dari 22 negara berpenduduk lebih dari 20 juta, yang menegaskan bahwa skala ekonomi besar belum otomatis berbanding lurus dengan daya saing digital. Secara keseluruhan, capaian 2025 menunjukkan Indonesia memiliki titik kuat pada aspek pembiayaan/kapital dan kelincahan bisnis, namun peningkatan peringkat akan sangat ditentukan oleh penguatan kualitas talenta dan pendidikan, pematangan kerangka teknologi (infrastruktur, adopsi, ekosistem), serta percepatan integrasi TI lintas sektor agar kemajuan daya saing digital lebih merata dan berkelanjutan. Pada Tahun 2025 Singapura berada di peringkat 3, Malaysia di peringkat 34, dan Thailand di peringkat 38, sementara Filipina berada di peringkat 56.



TINGKAT INFLASI

Tingkat Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) Nasional, Desember 2024 – Desember 2025



Sumber: BPS (2026)

Pada Desember 2025, inflasi nasional (y-on-y) tercatat sebesar 2,92%, meningkat dibanding Desember 2024 sebesar 1,57% dan juga lebih tinggi dari November 2025 sebesar 2,72%. Sepanjang 2025, tren inflasi bergerak naik secara bertahap dari level rendah di awal tahun bahkan sempat mencatat deflasi pada Februari (-0,09%) kemudian menguat mulai Maret (1,03%), mencapai 1,95% pada April, dan terus meningkat hingga berada pada kisaran 2,31%-2,86% pada Agustus-Oktober, sebelum sedikit melandai pada November dan kembali naik pada Desember. Dinamika ini menggambarkan normalisasi tekanan harga seiring menguatnya permintaan dan faktor musiman, dengan tekanan yang cenderung meningkat pada paruh kedua tahun. Secara keseluruhan, capaian inflasi Desember 2025 menunjukkan inflasi berada pada level yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya namun tetap perlu dijaga agar stabil melalui konsistensi bauran

kebijakan dan penguatan koordinasi pengendalian inflasi, termasuk sinergi antara kebijakan moneter dan upaya pemerintah/daerah dalam menjaga kelancaran pasokan serta stabilitas harga pangan. Capaian inflasi ini masih lebih stabil dibandingkan dengan negara G20 lain seperti Amerika Serikat (2,7%) dan Jepang (2,9%), Indonesia juga jauh lebih stabil daripada sesama negara berkembang seperti Brasil (4,26%) atau Rusia (5,6%).

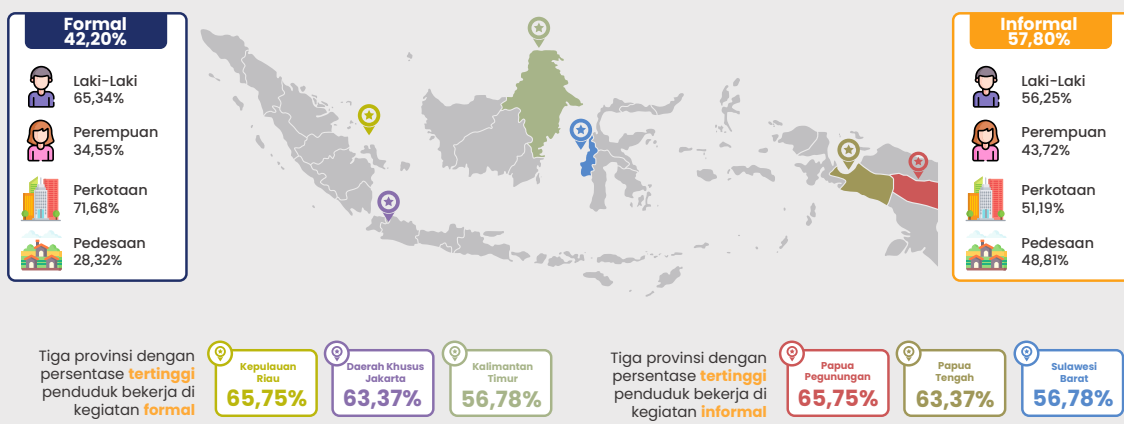




PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL

PENDUDUK BEKERJA DI KEGIATAN FORMAL/INFORMAL

Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di kegiatan informal. Pekerja informal lebih banyak pada laki-laki dan juga mereka yang tinggal di pedesaan.

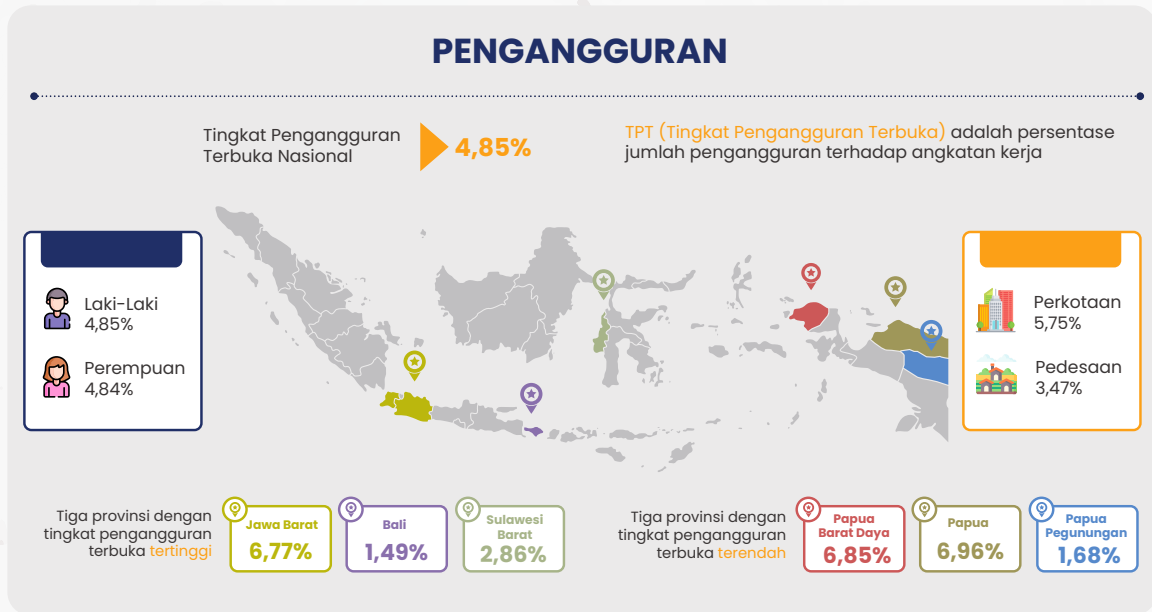


Sumber: Sakernas (2025)

Pada Tahun 2025 proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia masih lebih kecil dibanding informal, dengan porsi 42,20% dari total penduduk bekerja. Komposisi pekerja formal didominasi laki-laki (65,34%) dibanding perempuan (34,66%), serta lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (71,68%) daripada pedesaan (28,32%), yang menunjukkan bahwa kesempatan kerja formal masih banyak bertumpu pada pusat-pusat ekonomi dan sektor-sektor berorientasi jasa/industri di kota. Dari sisi sebaran wilayah, tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja formal tertinggi adalah Kepulauan Riau (65,75%), DKI Jakarta (63,37%), dan Kalimantan Timur (56,78%), yang mengindikasikan keterkaitan kuat antara basis industri, aktivitas perdagangan/jasa modern, serta konsentrasi investasi dengan pembentukan pekerjaan formal.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan perlunya penguatan penciptaan kerja formal yang lebih inklusif terutama memperluas akses bagi perempuan dan wilayah pedesaan melalui peningkatan iklim investasi, penguatan UMKM naik kelas, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar transisi dari informal ke formal semakin cepat dan merata. Dari sisi kawasan, berdasarkan perbandingan negara ASEAN dari data International Labour Organization, Indonesia mencatat rasio jumlah lapangan kerja terhadap jumlah penduduk sebesar 64,7% dan berada di atas rata-rata negara ASEAN. Indonesia masih unggul dibanding Malaysia dengan rasio 63,1%, serta lebih tinggi dibanding Brunei Darussalam (60,2%), Filipina (59,4%), dan Myanmar (53,3%).

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Sumber: Sakernas (2025)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional Tahun 2025 tercatat 4,85%, yang menggambarkan persentase penduduk dalam angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Secara gender, TPT relatif seimbang antara laki-laki 4,85% dan perempuan 4,84%, sehingga tantangan pengangguran bersifat merata. Namun dari sisi wilayah, TPT lebih tinggi di perkotaan (5,75%) dibanding pedesaan (3,47%), menunjukkan bahwa tekanan pasar kerja lebih besar di kota umumnya dipengaruhi arus pencari kerja, pergeseran struktur lapangan kerja, dan persaingan yang lebih ketat. Dari sebaran provinsi, tiga daerah dengan TPT tertinggi adalah Papua (6,96%), Papua Barat Daya (6,85%), dan Jawa Barat (6,77%), sedangkan TPT terendah tercatat di Bali (1,49%), Papua Pegunungan (1,68%), dan Sulawesi Barat (2,86%).

Secara keseluruhan, angka ini menegaskan perlunya penguatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, serta perluasan peluang kerja produktif terutama di wilayah perkotaan dan provinsi dengan TPT tinggi. TPT Nasional Indonesia 2025 berada di kisaran 4,85%, secara positif Indonesia masih menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berada pada level terkendali di tengah besarnya jumlah angkatan kerja dan dinamika ekonomi yang terus bergerak. Dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan, posisi Indonesia juga kurang lebih setara dengan Brunei Darussalam (sekitar 4,7%) dan masih berada dalam rentang yang kompetitif dibanding negara lain yang berada di kisaran menengah





01

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Mandat dan Peran Strategis
- Sistematika Laporan



01

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Tahun 2025 menandai dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan gambaran strategis pemerintah dalam menavigasi pembangunan ekonomi Indonesia. Tahun 2025 sekaligus menjadi tahun pertama kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang baru. Periode ini berlangsung di tengah dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian yang diakibatkan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, volatilitas harga energi dan pangan, serta fragmentasi ekonomi global yang mempengaruhi perdagangan dan investasi internasional. Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai entitas strategis dalam arsitektur pemerintahan tetap menjalankan peran vital sebagai penyelaras, pengarah, dan pengendali kebijakan ekonomi nasional. Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029 menunjukkan tren yang positif, tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat kementerian yang secara umum berada pada kategori memenuhi ekspektasi hingga melebihi ekspektasi, khususnya dalam efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan strategis, serta penguatan sinergi pelaksanaan program prioritas nasional di bidang perekonomian.

Dalam konteks perencanaan dan pengawalan ekonomi nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengemban beberapa indikator makroekonomi yakni pertumbuhan

ekonomi, biaya logistik, pembentukan modal tetap bruto, rasio PDB industri pengolahan, devisa pariwisata, rasio PDB pariwisata, indeks ketahanan energi, indeks daya saing digital di tingkat global, tingkat inflasi, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan tingkat pengangguran tetap menjadi instrumen yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan di bidang perekonomian. Indikator-indikator tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan dalam menggambarkan kualitas kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dan pembentukan modal tetap bruto mencerminkan dinamika ekspansi ekonomi dan kepercayaan pelaku usaha, sementara biaya logistik dan rasio PDB industri pengolahan menggambarkan efisiensi struktur ekonomi serta daya saing sektor produktif. Pada saat yang sama, indikator pariwisata, baik dari sisi devisa maupun kontribusinya terhadap PDB, menunjukkan peran sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi. Indeks ketahanan energi dan indeks daya saing digital berfungsi sebagai indikator struktural yang menggambarkan kesiapan dan resiliensi perekonomian dalam menghadapi tantangan global serta transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang.

Selain itu, indikator stabilitas dan kesejahteraan, seperti tingkat inflasi, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan tingkat pengangguran terbuka, menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat inklusif dan berkelanjutan. Inflasi yang terkendali mencerminkan stabilitas ekonomi

makro yang mendukung daya beli masyarakat, sementara peningkatan lapangan kerja formal dan penurunan tingkat pengangguran menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Penetapan indikator-indikator tersebut sebagai IKU juga dimaksudkan untuk memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara perencanaan strategis, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kinerja sebagaimana ditekankan dalam pedoman evaluasi SAKIP KemenPAN-RB. Dengan menggunakan indikator yang bersifat lintas sektor dan berorientasi pada hasil, kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat diukur tidak hanya dari aspek proses koordinasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap capaian makroekonomi dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta memastikan bahwa kebijakan perekonomian nasional selaras dengan

sasaran pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pemerintah, dengan segala elemennya, dihadapkan pada tuntutan untuk melaksanakan fungsi dan perannya dengan presisi dan efektivitas yang tinggi untuk memenuhi visi pembangunan. Hal ini tercermin dari hasil-hasil yang telah dicapai, yang tidak lepas dari komitmen dalam mendukung agenda prioritas nasional yang ditetapkan. Pada Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tema: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Tema tersebut merupakan manifestasi dari kedelapan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan, yang diharapkan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.



Gambar 1.1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025



Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, Pemerintah menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai fokus utama pembangunan nasional. Delapan prioritas tersebut mencakup penguatan ideologi Pancasila, penguatan sistem pertahanan dan ketahanan negara melalui swasembada pangan dan penguatan ekonomi, penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, hilirisasi dan pengembangan energi, pembangunan desa dan pemerataan ekonomi, penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dan toleransi antar umat beragama. Seluruh prioritas nasional ini dirancang secara komprehensif untuk memperkuat fondasi perekonomian Indonesia dari dalam, sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai upaya mewujudkan RKP Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memegang peranan strategis dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, agar seluruh program dan kegiatan pembangunan berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional. Pelaksanaan peran koordinatif tersebut dilakukan secara bijaksana, transparan, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa setiap proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penyusunan Laporan Kinerja. Proses ini juga merupakan bagian dari pemenuhan amanat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahunan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun penuh, yang bertujuan untuk merealisasikan misi dan mencapai visi dari Kementerian tersebut.

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun, sekaligus sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program yang mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2025–2029. Lebih lanjut, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan serta menjadi sumber masukan yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan, guna memperkuat peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

B TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

TUGAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian

pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, melakukan koordinasi pelaksanaan inisiatif, serta pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden, yang dilaksanakan secara inklusif dan terintegrasi, guna memastikan keterpaduan kebijakan lintas sektor di bidang perekonomian nasional.

FUNGSI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Gambar 1.2. Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

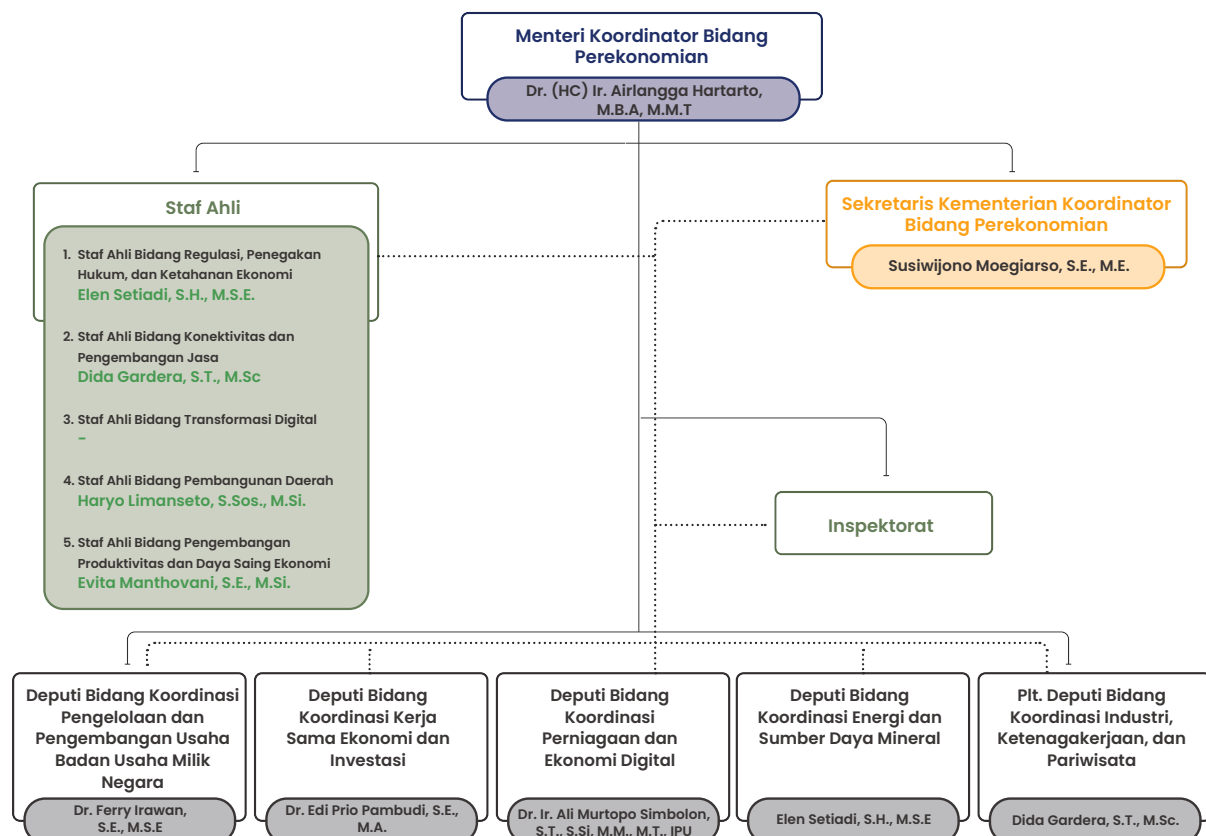
Sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024**, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kementerian dan instansi sebagai berikut:



Gambar 1.3. Daftar Kementerian/ Lembaga di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa terdapat 6 (delapan) Unit Eselon I, yaitu Sekretariat selaku unsur pembantu pemimpin; 5 (lima) Deputy selaku unsur pelaksana; dan Inspektorat selaku unsur pengawas. Selain itu, juga terdapat 5 (lima) Staf Ahli.



Gambar 1.4. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

01 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- e. koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- f. koordinasi dan penyusunan rencana, program, serta anggaran;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- h. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
- i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum;
- j. pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- k. pengelolaan data dan informasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

02 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



03 DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan kerja sama ekonomi dan investasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang kerja sama ekonomi dan investasi;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

04 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan perdagangan dan ekonomi digital. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan ekonomi digital;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang perdagangan dan ekonomi digital;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

05 DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang energi dan sumber daya mineral;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

06 DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

07 STAF AHLI

Staf Ahli merupakan unsur pembantu Menteri Koordinator di bidang keahlian tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. Berikut merupakan 5 (lima) Staf Ahli yang terdapat di dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. **Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi** yang memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi;
- b. **Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa** yang memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator

terkait dengan bidang konektivitas, pengembangan jasa, dan sumber daya alam;

- c. **Staf Ahli Bidang Transformasi Digital** yang memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang transformasi digital, kreativitas, dan sumber daya manusia;
- d. **Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah** yang memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah; **dan**
- e. **Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi** yang memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan pengembangan produktivitas dan daya saing ekonomi.



C MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam RPJMN tahun 2025–2029. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan dan mengimplementasikan berbagai strategi kebijakan ekonomi selama periode 2025–2029. Strategi-strategi ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan transformasi ekonomi yang diharapkan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bukan hanya bersifat operasional sektoral, melainkan berfokus pada fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang bersifat lintas sektoral. Melalui peran tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai *policy integrator* yang mampu menjembatani kepentingan lintas sektor, mengharmonisasikan kebijakan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan regulasi di bidang perekonomian. Hal ini menjadi krusial mengingat kompleksitas isu ekonomi yang semakin multidimensi dan saling terkait.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan perekonomian memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penguatan penciptaan

lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dalam menjalankan peran tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengedepankan pendekatan kebijakan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*), serta mendorong sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Di tengah dinamika dan ketidakpastian perekonomian global, peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian semakin penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Melalui koordinasi kebijakan yang adaptif dan responsif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memastikan perekonomian nasional tetap resilien, inklusif, dan berdaya saing.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional telah mempertegas peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengendalikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan program pembangunan nasional. Bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, serta pimpinan lembaga dan instansi terkait, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan efektivitas program dan kegiatan pembangunan. Tugas ini dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 yang menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memegang kendali dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Dalam Inpres tersebut,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan aktif dalam setiap pengambilan kebijakan bidang perekonomian sebagai berikut.

- a. Kebijakan yang merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan K/L, yang sifatnya berdampak strategis dan luas kepada masyarakat;
- b. Kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.
- c. Kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Dengan mandat dan peran strategis tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi aktor kunci dalam mengarahkan dan mengawal kebijakan ekonomi nasional agar mampu menjawab tantangan jangka pendek sekaligus meletakkan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang.





Visi

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

01 Asta Cita

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

02 Asta Cita

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

03 Asta Cita

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

04 Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

05 Asta Cita

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

06 Asta Cita

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

07 Asta Cita

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

08 Asta Cita

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 1.5. Visi, Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional



Program Prioritas

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
12. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
13. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya
14. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
15. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
16. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga



Program Hasil Terbaik Cepat

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/ POLRI, dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

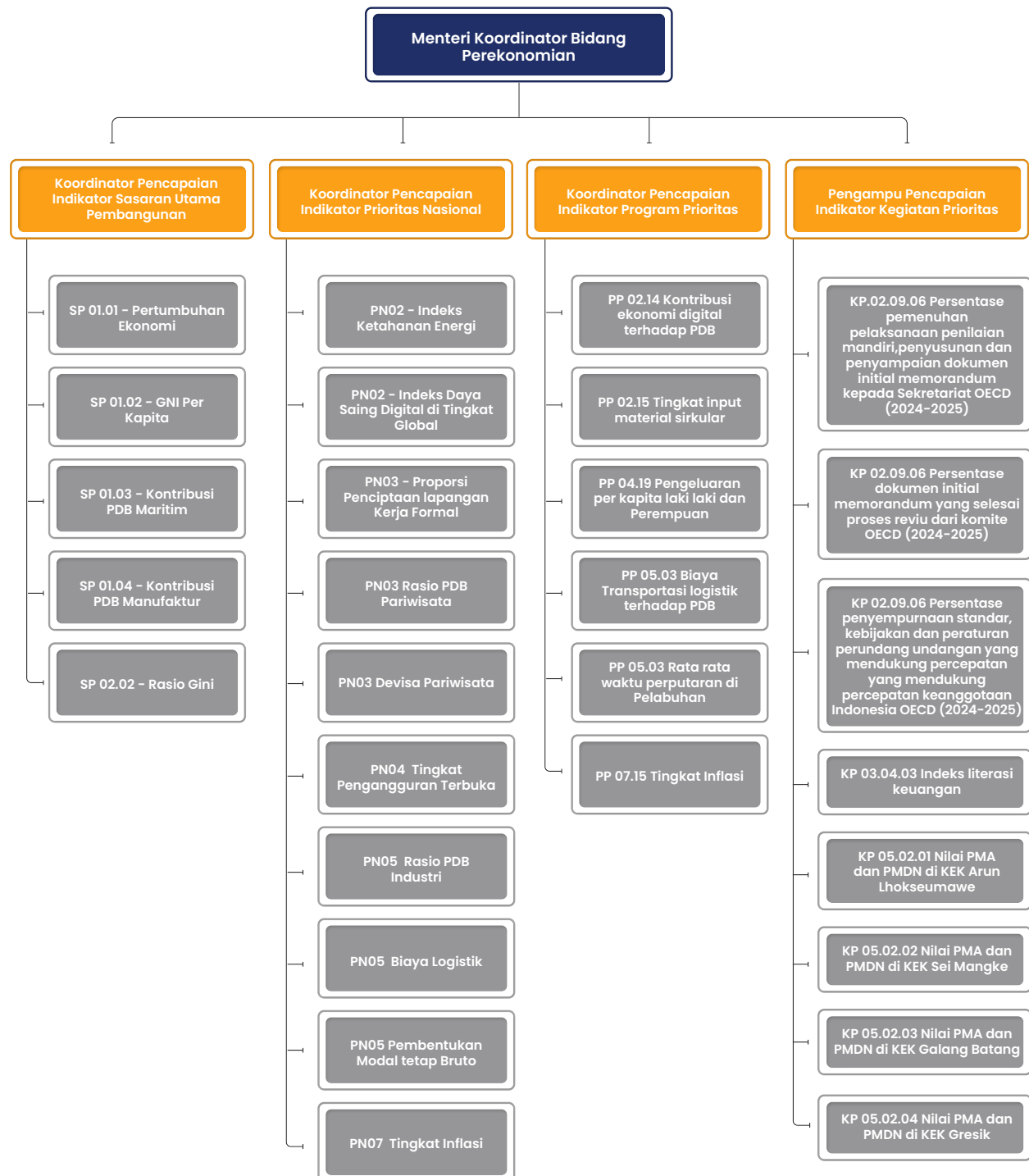


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memegang peranan strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta berperan aktif dalam mewujudkan tujuan-tujuan strategis kementerian. Melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian lintas kementerian dan lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkontribusi dalam mengakselerasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan ekonomi nasional guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah nasional.

Agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 diturunkan secara sistematis dari delapan Asta Cita Presiden ke dalam delapan Prioritas Nasional yang menjadi kerangka utama penyelenggaraan pembangunan jangka menengah. Delapan Prioritas Nasional tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran, indikator, program prioritas, serta proyek strategis nasional lintas kementerian dan lembaga. Dalam kerangka ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan serta program pembangunan ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Prioritas Nasional, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, transformasi ekonomi, dan peningkatan daya saing nasional.



Pada periode pembangunan nasional khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana yang tertuang pada Lampiran III, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengemban peran strategis dengan mengawal 5 Indikator Sasaran Utama Pembangunan, 10 Indikator Prioritas Nasional, 6 Indikator Program Prioritas dan 8 Indikator Kegiatan Prioritas.





Selain mengampu indikator perencanaan nasional di berbagai level, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berperan strategis dalam mengkoordinasikan dan mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan transformasi struktural. Peran tersebut terutama difokuskan pada Prioritas Nasional 2, Prioritas Nasional 3, Prioritas Nasional 4, Prioritas Nasional 5, dan Prioritas Nasional 7 yang berada dalam lingkup koordinasi kebijakan perekonomian lintas kementerian dan lembaga, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Upaya pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara serta penguatan kemandirian bangsa diarahkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan Prioritas Nasional 2 difokuskan pada beberapa arah kebijakan utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan melalui pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (Food–Energy–Water Nexus) melalui
 - a) Swasembada energi, yang diwujudkan melalui strategi:
 - peningkatan penyediaan energi
 - perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi
 - penguatan implementasi transisi energi yang berkeadilan.

2. Mewujudkan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi ekonomi syariah global dan domestik serta pengembangan ekonomi digital

a) Penguatan ekonomi syariah, yang diwujudkan melalui strategi:

- penguatan industri halal dan UMKM halal;
- penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional;
- penguatan ekosistem halal; serta
- penguatan keuangan syariah dan dana sosial syariah.

b) Pengembangan ekonomi digital dalam mendukung peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang diwujudkan melalui strategi kebijakan:

- penguatan faktor pendukung ekonomi digital
- penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

3. Mendorong akselerasi transformasi ekonomi hijau melalui penguatan ekonomi sirkular

a) Penguatan ekosistem ekonomi sirkular untuk mendorong peningkatan efisiensi, daya guna, serta daur ulang sumber daya dan material, melalui strategi:

- penerapan efisiensi sumber daya dan peningkatan daur ulang;
- pengelolaan susut dan sisa pangan;
- pengembangan produk ramah lingkungan; dan
- penguatan ekosistem daur ulang.

B. Prioritas Nasional 3: melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas lapangan kerja diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, mendorong kewirausahaan, serta memperluas peran UMKM, koperasi, industri kreatif, dan sektor agromaritim sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan Prioritas Nasional 3 difokuskan pada arah kebijakan sebagai berikut.

1. Mendorong peningkatan lapangan kerja yang berkualitas
 - a) Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, yang dilakukan melalui intervensi kebijakan berupa:
 - peningkatan kapasitas usaha serta akses terhadap sumber daya produktif.
2. Mendorong peningkatan total aset keuangan sektor keuangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
 - a) Pendalaman sektor keuangan, yang dilakukan melalui strategi peningkatan inklusi dan literasi keuangan, meliputi:
 - perluasan akses dan penyediaan layanan keuangan;
 - perluasan jangkauan fasilitas sistem pembayaran;
 - penyediaan produk serta kemudahan layanan keuangan yang lebih inklusif
 - optimalisasi program pembiayaan yang telah ada, antara lain Kredit

Usaha Rakyat, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, Kredit Ultra Mikro, serta program lainnya, melalui perluasan jangkauan penerima dan dukungan perbaikan basis data agar penyaluran lebih tepat sasaran.

3. Mendorong peningkatan nilai tambah sektor pariwisata
 - a) Pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, yang diwujudkan melalui strategi:
 - peningkatan kelembagaan dan tata kelola destinasi pariwisata;
 - peningkatan industri dan rantai pasok pariwisata yang inklusif;
 - penerapan prinsip Blue-Green-Circular Economy;
 - pembangunan infrastruktur hijau sebagai infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata;
 - peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
 - penguatan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab;
 - peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan;
 - pengembangan mekanisme pembiayaan serta implementasi *Indonesia Quality Tourism Fund*;
 - diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan geopark;
 - pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di destinasi pariwisata prioritas; serta
 - pengembangan destinasi pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.



C. Prioritas Nasional 4: memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja sebagai fondasi utama transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini dilaksanakan melalui penguatan pendidikan, pelatihan, serta penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan kondusif. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan Prioritas Nasional 4 difokuskan pada arah kebijakan sebagai berikut.

1. Mendorong penguatan produktivitas tenaga kerja
Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai keberlanjutan kebijakan revitalisasi vokasi, yang dilaksanakan secara holistik melalui penguatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi serta ekosistem ketenagakerjaan. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif guna mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan. Intervensi kebijakan tersebut dilakukan melalui:
 - penguatan pendidikan menengah vokasi
 - penguatan pendidikan tinggi vokasi
 - penguatan pelatihan vokasi
 - penguatan produktivitas tenaga kerja berbasis iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

D. Prioritas Nasional 5: melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Pembangunan industri diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Pendekatan ini dilakukan dengan mempercepat hilirisasi komoditas unggulan, memperkuat industri manufaktur berorientasi ekspor, serta meningkatkan integrasi ekonomi domestik dan global. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan Prioritas Nasional 5 difokuskan pada arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan
 - a) Percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor, yang diwujudkan melalui:
 - percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto dan memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan. Fokus prioritas hilirisasi tahun 2025–2029 meliputi:
 - » hilirisasi nikel;
 - » hilirisasi tembaga;
 - » hilirisasi bauksit;
 - » hilirisasi timah;
 - » hilirisasi kelapa sawit;

- » hilirisasi kelapa;
 - » hilirisasi rumput laut; serta
 - » hilirisasi sagu dan singkong.
- pengembangan industri *medium-high technology*, antara lain industri semikonduktor sebagai produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kosmetik dan farmasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, serta industri mesin dan perlengkapan;
 - penguatan produktivitas industri padat karya terampil, meliputi industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki;
 - penguatan industri dasar, termasuk industri kimia yang mencakup hilirisasi komoditas minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, serta industri logam dasar besi dan baja yang mencakup hilirisasi komoditas besi dan baja; serta
 - pengembangan sektor jasa industri sebagai *enabler* bagi pengembangan industri nasional.
- b) Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan pendukung percepatan hilirisasi, yang difokuskan pada:
- fasilitasi perizinan dan penataan ruang kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus prioritas;
 - pembangunan sarana dan prasarana di dalam dan di luar kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan perencanaan (*masterplan*) dan kebutuhan pengembangan kawasan, yang meliputi:
- » pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk aksesibilitas dan penunjang aktivitas rantai pasok;
 - » pengembangan konektivitas simpul transportasi multimoda untuk efisiensi logistik terpadu, termasuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, *dry port*, bandara utama, serta sarana dan prasarana perkeretaapian melalui sinkronisasi program pemerintah dan badan usaha;
 - » penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja di kawasan industri; dan
 - » pengembangan kemitraan usaha dan penguatan rantai pasok pada kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus prioritas.
2. Mendorong peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global
- a) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan penguatan sistem logistik nasional, yang diwujudkan melalui:
- penguatan konektivitas, layanan infrastruktur *backbone*, dan sarana penunjang logistik
 - penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik
 - peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.



b) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, yang mensyaratkan harmonisasi kebijakan, iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, pemberian insentif yang tepat sasaran, serta fasilitasi investasi. Upaya ini difokuskan pada sektor-sektor produktif dengan dampak ekonomi terbesar melalui:

- peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi;
- peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global
- peningkatan investasi pada infrastruktur konektivitas dan logistik.

c) Peningkatan perdagangan domestik, perdagangan antarwilayah, dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global, yang didorong melalui

- peningkatan keterkaitan ekonomi dan penguatan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global
- peningkatan ekspor produk berteknologi menengah-tinggi;
- peningkatan ekspor produk yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi
- peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam melalui penguatan kebijakan, promosi, serta kerja sama internasional untuk membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan;
- peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif;
- peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif, termasuk kendaraan listrik (*electric vehicle*)

- peningkatan pemanfaatan *Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta
- peningkatan kualitas produk, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan konsumen.

E. Prioritas Nasional 7: memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan.

Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan iklim pembangunan yang bersih dan berintegritas. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan pencegahan dan pemberantasan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan Prioritas Nasional 7 difokuskan pada arah kebijakan sebagai berikut.

1. Mendorong terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baik
Penguatan tata kelola BUMN diarahkan untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional melalui peningkatan produktivitas dan kinerja usaha. Upaya ini dilakukan melalui:
 - peningkatan daya saing BUMN
 - peningkatan efisiensi peran BUMN dalam pelaksanaan penugasan pemerintah.
2. Mewujudkan inflasi yang terkendali
Pengendalian inflasi difokuskan pada upaya pengendalian komponen inflasi

harga bergejolak (volatile food) guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Strategi pengendalian inflasi dilaksanakan melalui pendekatan 4K, yang meliputi:

- keterjangkauan harga
- ketersediaan pasokan
- kelancaran distribusi
- komunikasi yang efektif.

Dalam memperkuat peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan mandatnya dalam menguatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan ekonomi, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024, Presiden memberikan beberapa penugasan/mandat strategis kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Peraturan Presiden ataupun Keputusan Presiden sebagai berikut:

	Ketua Tim Satuan Tugas Pengembangan Ekspor Nasional (Satgas PEN) Keppres No.24 Tahun 2023		Ketua Pengarah Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Keppres No.3 Tahun 2021
	Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Perpres No. 114 Tahun 2020		Ketua Komite Pengarah BDPKS Perpres No. 132 Tahun 2024
	Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Keppres No.19 Tahun 2015		Ketua Tim Percepatan Pengembangan dan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Perpres No. 77 Tahun 2018
	Ketua Komite Pengarah BPDH Perpres No. 77 Tahun 2018		Koordinator Strategi Peningkatan Pendapatan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas Inpres No. 8 Tahun 2025
	Ketua Dewan Pengarah ISPO Perpres No. 16 Tahun 2025		Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Perpres No. 17 Tahun 2024
	Koordinator Pengembangan Kebijakan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) Perpres No. 79 Tahun 2024		Ketua Dewan Pengarah LNSW Perpres No. 44 Tahun 2018
	Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Keppres No.23 Tahun 2017		Pengarah dan Koordinator Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain, dan Skouw Inpres No.1 Tahun 2021
	Ketua Pengarah Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Keppres No.3 Tahun 2021		Ketua Tim Percepatan Pengembangan dan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Perpres No. 106 Tahun 2022
	Koordinator Program Pemberdayaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Inpres No. 4 Tahun 2022		Ketua Komite Privatisasi Keppres No. 2/2021
	Koordinasi Pilar Ekonomi Association of Southeast Asian Nations Perpres No. 122 Tahun 2016		Ketua Komite KPPIP Perpres 75 Tahun 2014 dan Perpres No. 122 Tahun 2016
	Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Perpres No. 122 Tahun 2016		Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Keppres No. 10 Tahun 2022
	Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Keppres No. 13 Tahun 2021		Ketua Dewan Pengawas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) PP No. 41 Tahun 2021
	Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Penataan Ekosistem Logistik Nasional Inpres No. 5 Tahun 2020		



D SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi, penjabaran mandat, serta peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

2) BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai Rencana Strategis Kementerian, Prioritas Nasional Tahun 2025, serta penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, pada bagian ini dijelaskan penetapan indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

3) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dijabarkan capaian akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri atas:

- Pengukuran Kinerja, yang menjelaskan pengelolaan dan pengukuran kinerja meliputi metode pengukuran, perhitungan nilai kinerja organisasi, polarisasi indikator kinerja program, serta perhitungan nilai sasaran strategis/NKO masing-masing unit kerja.
- Analisis Capaian Kinerja, bagian ini akan menganalisis capaian keberhasilan dari Capaian Prioritas Nasional (PN) dan capaian keberhasilan Sasaran Strategis (NSS) Tahun 2025. Analisis mencakup perbandingan antara target dan realisasi (status keberhasilan), perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah, perbandingan capaian kinerja pada tingkat nasional dan/atau internasional, analisis faktor pendukung dan penghambat, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.
- Akuntabilitas Keuangan, pada subbagian ini diuraikan mengenai pagu anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2025, keselarasan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2025.

4) BAB IV EVALUASI KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai:

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, yang mencakup evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta rekomendasi arah kebijakan Perjanjian Kinerja yang meliputi sasaran, indikator, target, rencana aksi, dan alokasi anggaran tahun selanjutnya.
- Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kementerian PANRB, yang memuat tindak lanjut rencana aksi peningkatan kinerja serta hasil evaluasi SAKIP yang telah dilakukan.
- Rencana Aksi Peningkatan Kinerja, yang berisi langkah-langkah dan rekomendasi perbaikan yang bersifat korektif dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja organisasi.

5) BAB V PENUTUP

Pada bab ini disajikan simpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama Tahun 2025 serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pada masa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi.



INDONESIA - AS SEPAKATI SUBSTANSI PERUNDINGAN PERDAGANGAN RESIPROKAL (AGREEMENTS ON RECIPROCAL TRADE)



Setelah melakukan perundingan sejak April 2025 yang lalu, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyepakati substansi yang diatur dalam dokumen perundingan perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ ART). Hal tersebut berlangsung setelah dilakukan pertemuan resmi antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer pada Senin (22/12) di Washington D.C. Pertemuan tersebut secara khusus dilakukan untuk melaksanakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menko Airlangga, untuk segera mendorong percepatan penyelesaian dokumen ART antara Indonesia dengan AS.

Sejak pengumuman Liberation Day pengenaan tarif resiprokal oleh AS pada 2 April 2025 lalu, Pemerintah Indonesia telah melakukan perundingan dan engagement yang intensif dengan Pemerintah AS, untuk mengatasi berbagai permasalahan perdagangan antar kedua negara. Hasilnya pada 22

Juli 2025 yang lalu telah diterbitkan Joint Statement yang mengumumkan penurunan tarif resiprokal bagi Indonesia dari 32% menjadi 19%. Selepas terbitnya Joint Statement, Indonesia dan AS melaksanakan perundingan yang intensif untuk menyelesaikan perjanjian dagang.

Melalui perjanjian perdagangan resiprokal, Indonesia berkomitmen untuk memberikan akses pasar untuk produk AS, mengatasi kendala isu-isu hambatan non tarif, kerja sama dalam perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan juga kerja sama komersial. Sementara itu, AS berkomitmen untuk memberikan pengecualian tarif bagi produk-produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak bisa diproduksi oleh AS seperti minyak kelapa sawit, cocoa, kopi, teh, dan lainnya. Saat ini pihak AS sedang melakukan koordinasi antara USTR dengan NSA guna mengatur waktu yang paling tepat untuk rencana pertemuan kedua Kepala Negara dan penanda tangan dokumen ART

PEMERINTAH BENTUK SATGAS PERCEPATAN PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH (P2SP) UNTUK PASTIKAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TEPAT SASARAN



Sebagai wujud implementasi komitmen dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis nasional, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu.

Dalam keterangan pers usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas P2SP akan terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking, Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

“Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program

strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Menko Airlangga. Sejumlah program Pemerintah yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Satgas P2SP mencakup Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang meliputi kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal, Program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier, isu per komoditas, dan kendala lain yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyebutkan bahwa rapat tersebut membahas secara rinci sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana disampaikan dalam Sidang Kabinet sebelumnya. Salah satu pembahasan yakni terkait persiapan 500 ribu tenaga kerja di bidang pengelasan (welder) dan hospitality. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diberikan mandat untuk dapat mengoordinasikan pelaksanaan program tersebut dengan dukungan anggaran sekitar Rp8 triliun, sehingga pelaksanaannya akan sejalan dengan program pemagangan nasional.





02

PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan Strategis
- Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2025
- Penetapan Kinerja Tahun 2025



02 PERENCANAAN KINERJA

A PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 2025 – 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025. Adapun tujuan dari penetapan Renstra ini adalah memberikan arah dan fokus kinerja, penjabaran target kinerja yang terukur, integrasi dan sinkronisasi sumber daya, dasar pelaksanaan evaluasi dan implementasi akuntabilitas kinerja serta menjamin keberlanjutan kinerja. Pembangunan kerangka kerja Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dokumen indikatif yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Dokumen ini mencakup aspek– aspek esensial seperti visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas utama kementerian, yaitu melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian guna mendukung tercapainya agenda dan sasaran pembangunan nasional.

Selaku instansi yang bertanggung jawab langsung pada presiden, maka perencanaan di level strategis harus sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2025–2029. Adapun Visi Presiden–Wakil Presiden 2025–2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang disebut “Asta Cita” sebagai berikut:

Adapun Visi Presiden–Wakil Presiden 2025–2029 diwujudkan melalui 8 (delapan)

Misi yang disebut “Asta Cita” sebagai berikut:



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2, 3, 4, 5, 6 dan 7, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat dua pilar utama yang menjadi fokus dan misi institusi ini. Pilar pertama adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya produktivitas semua sektor ekonomi sehingga berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi dimana hasil dan proses pertumbuhan tersebut

memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, adil, dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Kedua, mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang adaptif dan akuntabel. Hal ini merupakan upaya menyatukan arah, menyelaraskan pelaksanaan, serta mengendalikan berbagai kebijakan ekonomi yang akan disusun maupun yang telah disusun dan dijalankan oleh kementerian/ lembaga didalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun diluar koordinasinya agar berjalan efektif dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua sasaran ini dirancang untuk bekerja secara sinergis, di mana Kementerian berperan sebagai koordinator di antara kementerian teknis untuk menciptakan harmonisasi kebijakan dan program yang efektif dalam mencapai tujuan- tujuan tersebut.

VISI 2025–2029

“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045.”



MISI PRESIDEN 2025–2029

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sebagai Koordinator dalam pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian dalam rangka:

1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
4. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
6. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.



MISI

- Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
- Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel.



TUJUAN

- Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan.
- Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan, dan
- Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel.

Untuk mengukur pencapaian tujuan, Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan 5 (lima) Sasaran Strategis yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja. Rincian dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Tujuan dalam Renstra
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 – 2029

Sasaran Strategis dan Tujuan dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 – 2029	
Tujuan	Sasaran Strategis
1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan	Sasaran Strategis – 1: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
	Sasaran Strategis – 2: Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi
2 Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan	Sasaran Strategis – 3: Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran
3 Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel	Sasaran Strategis – 4: Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian.
	Sasaran Strategis – 5: Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas.

Keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipantau melalui empat belas Indikator Kinerja Utama (IKU), yang telah ditentukan dengan target tahunan hingga tahun 2025. Setiap IKU

ini memiliki nilai target yang spesifik, yang telah dijabarkan dalam tabel kinerja, untuk memastikan bahwa setiap aspek dari sasaran strategis tersebut dapat diukur dan dievaluasi secara objektif dan sistematis sepanjang periode Rencana Strategis.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No	Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tujuan 1: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan						
	SS.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
	IKU.1 Pertumbuhan Ekonomi	5,3	6,3	7,5	7,7	8	%
	IKU.2 Biaya Logistik	13,52	13,3	13,0	12,8	12,5	% PDB
	IKU.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,4	29,5	29,6	29,8	29,9	% PDB
	IKU.4 Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8	21,2	21,52	21,75	21,9	%
	IKU.5 Devisa Pariwisata	19,0–22,1	22,0–24,7	25,5–28,6	29,3–32,9	32,0–39,4	Miliar USD
	IKU.6 Rasio PDB Pariwisata	4,5–4,6	4,6–4,7	4,7–4,8	4,8–4,9	4,9–5,0	%
	IKU.7 Indeks Ketahanan Energi	6,77	6,82	6,86	6,91	6,95	Indeks
	IKU.8 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43	43	42	41	40	Indeks
	SS.2 Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi						
	IKU.9 Tingkat Inflasi	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	%
2	Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan						
	SS.3 Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengguran						
	IKU.10 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35,0	37,95	40,81	43,57	46,0	%
	IKU.11 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5–5,0	4,44–4,96	4,30–4,87	4,15–4,79	4,0–4,77	%
3	Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel						
	SS.4 Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian						
	IKU.12 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
	IKU.13 Indeks Kepuasan Stakeholder dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
	SS.5 Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas						
	IKU.14 Nilai Reformasi Birokrasi	90,77	91,27	91,27	92,27	92,77	Nilai



B PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran signifikan dalam mendorong Agenda Pembangunan Nasional dengan mengimplementasikan sepuluh Program Prioritas. Sepuluh program tersebut berfungsi sebagai pilar utama untuk

menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan yang tinggi, berkelanjutan serta merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Seluruh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh sepuluh Program Prioritas selanjutnya di *tagging* sebagai Rincian Output Prioritas Nasional. Tabel berikut menjabarkan hubungan kausalitas dari level output sampai dengan Prioritas Nasional.

Tabel 2.3. Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

Kode	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Rincian Output
PN.2	Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	Proses Akses Indonesia ke OECD	Penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD	Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Keanggotaan OECD
			Pengembangan Digitalisasi Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030
			Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Rekomendasi Kebijakan yang terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
PN.3	Pendalaman Sektor Keuangan	Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	Literasi dan Edukasi Keuangan	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan
PN.4	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
			Iklim Ketenagakerjaan yang mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
		Penguatan Pelatihan Vokasi	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja
				Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja

Tabel 2.3. Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

Kode	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Rincian Output
PN.5	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Pengembangan Sustainable Textile dan Tekstil Budaya Lokal	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor
		Pembangunan Industri Semikonduktor	Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor
		Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Optimalisasi Penerapan Standarisasi di Industri Logam Dasar	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi
	Optimalisasi Backbone integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik	Tata Kelola Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Logistik	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional
	Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi	Penyusunan Informasi Investasi proyek prioritas strategis pada sektor-sektor pendorong transformasi ekonomi	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru*	Pembangunan KEK Arun Lhoksumawe	Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur jalan/ jembatan dan Konektivitas simpul Transportasi (APBN dan DAK)	Rekomendasi Perencana dan Pembentukan KEK
				Rekomendasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK
				Rekomendasi Peningkatan Investasi Kerja Sama Komunikasi dan Sistem Informasi di KEK
				Pelayanan Investasi Administrator KEK Tipe B
				Administrator KEK Tipe A
PN.7	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi

* diampu oleh SATKER KEK yang pelaporan kinerjanya dilakukan terpisah



RENCANA KERJA (RENJA) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2025 telah dirancang dengan mempertimbangkan keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun yang sama serta Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Proses penyusunan Renja ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 17

Tahun 2017, yang mengatur tentang harmonisasi antara perencanaan dan penganggaran.

Dalam mengemban tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. 3 Sasaran strategis menggambarkan kondisi perekonomian makro yang ingin dicapai, 1 sasaran menggambarkan proses bisnis internal dan 1 sasaran menggambarkan aspek *governance*. Kelima sasaran tersebut yaitu:

LIMA SASARAN STRATEGIS



Tabel 2.4. Indikator Kinerja dalam Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,4%
		Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8%
		Rasio PDB Pariwisata	4,5% – 4,6%
		Devisa Pariwisata	19 – 22,10 miliar USD
		Biaya Logistik	13,52%
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43
		Indeks Ketahanan Energi	6,77

Tabel 2.4. Indikator Kinerja dalam Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
2	Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi	Tingkat Inflasi	(2,5 ± 1)%
3	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5% - 5%
4	Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
		Indeks Kepuasan Stakeholders dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
5	Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi	90,77

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, pada tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengimplementasikan dua program utama. Program pertama adalah Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, yang melibatkan serangkaian kegiatan teknis dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di sektor perekonomian. Program kedua adalah Dukungan Manajemen, yang melaksanakan fungsi-fungsi pendukung melalui sekretariat, staf ahli, dan inspektorat, yang bertugas memberikan layanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya untuk memperkuat kerangka kerja Kementerian.

Tabel 2.5. Program Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Program	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
035.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	310.570.336.000
035.WA	Program Dukungan Manajemen	261.513.294.000
Total		572.083.630.000

Berikut adalah rincian lebih detail mengenai alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mencapai Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025:



Tabel 2.6. Alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit Kerja/Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				
1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Biaya Logistik 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Rasio PDB Industri Pengolahan 5. Devisa Pariwisata 6. Rasio PDB Pariwisata 7. Indeks Ketahanan Energi 8. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan & Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara	6.224.404.000
2	Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi	Tingkat Inflasi	2. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	276.126.826.000
3	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	3. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	7.601.507.000
4	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	4. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	5.356.736.000
5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	5. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	15.260.863.000
Program Dukungan Manajemen				
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	261.513.294.000

Sasaran strategis dan Indikator strategis selanjutnya diturunkan ke dalam sasaran program dan indikator sasaran program yang penetapannya mempertimbangkan berbagai faktor seperti pemutakhiran data target nasional dalam RKP, tren aktual di lapangan, data *baseline*

dari tahun-tahun sebelumnya, serta kondisi eksternal yang relevan. Berikut ini akan diuraikan sasaran dari masing-masing program, indikator kinerja yang digunakan, serta target kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2025.

Tabel 2.7. Sasaran Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

No	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
I (035.CL) Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				
1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp Triliun	220,61
		1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase	80
		1.3 Persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN	Persentase	80
2	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran	2.1 Tingkat Inflasi	Persentase	2,5±1
3	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	3.1 Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	Persentase	92
4	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang berkualitas	4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4
		4.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	Indeks	3 dari 4
5	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	5.1 Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses OECD	Persentase	100
6	Terwujudnya Kemudahan Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	6.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	1.905,60
7	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	7.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	Persentase	82
8	Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	8.1 Persentase Rekomendasi Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang diterima Menko Perekonomian	Persentase	90
9	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	9.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4



Tabel 2.7. Sasaran Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

No	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
10	Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	10.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	8-9
		10.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persentase	21,7
		10.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB Nasional	Persentase	11,68
11	Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Terintegrasi	11.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	Persentase	8,27
		11.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Hari	1,7
12	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	12.1 Indeks Literasi Keuangan	Indeks	57,25
13	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	13.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4
14	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan	14.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	312
		14.2 Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer	Persentase	20
		14.3 Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per Tahun	0,75
15	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	15.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	Persentase	2,5-3
16	Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global	16.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Juta ton Co2-Eq	164
17	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	17.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4
18	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	18.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5
19	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	19.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,30
20	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	20.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing (KSEP)	Jumlah	4 dari 4
		20.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83

Tabel 2.7. Sasaran Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

No	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
21	Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	21.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53
		21.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	USD per Kunjungan	1.300-1.381,3
22	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Efektif	22.1 Indeks Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4
23	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	23.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	Persentase	100
24	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	24.1 Tingkat Input Material Sirkular	Persentase	9,2
		24.2 Pengeluaran Per kapita Laki-Laki dan Perempuan	Ribu Rupiah	L; 16.891 P; 9.920
II (035.WA) Program Dukungan Manajemen				
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	83,95
		1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,78
		1.3 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang dimanfaatkan	Persentase	85
2	Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	Indeks	3 dari 4
3	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	3.1 Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,58
		3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	75
		3.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai	0,5
		3.4 Opini BPK	Predikat	WTP
		3.5 Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	82
		3.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Nilai	3
		3.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Nilai	3,27



C PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 merupakan komitmen formal pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 dirancang untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan, dengan sasaran dan indikator yang memiliki keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Nasional seperti RPJMN dan RKP, Renstra 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 serta capaian tahun sebelumnya. Penetapan target kinerja yang jelas dan terukur diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, sekaligus mendorong terwujudnya budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Pada perjanjian kinerja 2025, Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berjumlah 6. Perbedaan antara Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja tahun 2026 terjadi dikarenakan adanya evaluasi atas renja yang sarasannya belum spesifik. Hal ini terjadi karena perbedaan perencanaan tingkat operasional serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, ketersediaan anggaran, dan kapasitas pelaksanaan. Renstra menetapkan arah dan sasaran strategis jangka menengah, Renja menerjemahkannya ke dalam rencana kerja tahunan, sementara Perjanjian Kinerja memuat komitmen kinerja yang lebih terfokus, terukur, dan realistis untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, tanpa mengurangi keselarasan terhadap tujuan strategis Kementerian.

Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025:

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%
		Biaya Logistik	13,52% terhadap PDB
		Pembentukan Model Tetap Bruto	29,4% terhadap PDB
		Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8%
		Devisa Pariwisata	19,00 – 22,10 miliar USD
		Rasio PDB Pariwisata	4,5% – 4,6%
		Indeks Ketahanan Energi	6,77
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43
2	Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi	Tingkat Inflasi	(2,5 ± 1) %
3	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5% – 5%

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
4	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	90,77





PEROLEH OPINI WTP 17 KALI BERTURUT-TURUT, KEMENKO PEREKONOMIAN TEGASKAN KOMITMEN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk selalu mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan anggaran, agar dapat secara akuntabel menghasilkan output dan outcome kebijakan yang berdampak positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai bentuk pelaksanaan komitmen dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kemenko Perekonomian telah melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

“Atas pemeriksaan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Alhamdulillah BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas laporan keuangan Kemenko Perekonomian, untuk yang ke-17 (tujuh belas) kalinya, sejak tahun 2008,” tutur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airangga Hartarto dalam di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (13/10).

Dengan opini WTP tersebut, dapat diartikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Perekonomian, telah disajikan dengan wajar, khususnya mencakup empat hal, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Menko Airangga juga menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terkait opini WTP, dimana masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal di setiap kegiatan yang dijalankan. Selain itu, seluruh jajaran Kemenko Perekonomian diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian opini WTP, tetapi juga berupaya memperkuat penerapan *good governance*, serta upaya identifikasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap sistem pengendalian internal.

CAPAI MOMENTUM BERSEJARAH, INDONESIA TEGASKAN POSISI DI KANCAH GLOBAL LEWAT KESEPAKATAN IEU-CEPA DAN ICA-CEPA



Selepas melalui proses perundingan panjang yang berlangsung selama beberapa tahun, Indonesia akhirnya mencatatkan pencapaian bersejarah dengan disepakatinya dua perjanjian strategis, yakni *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) dan *Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA). Kedua kesepakatan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus membuka jalan bagi peningkatan akses pasar, investasi, serta kerja sama yang lebih luas dengan mitra utama di Eropa dan Amerika Utara.

Momentum bersejarah tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan ICA CEPA yang disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Ottawa, Rabu (24/09), serta penandatanganan dan

pengumuman bersama Kesepakatan Substantif IEU-CEPA yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič di Bali, Selasa (23/09).

Uni Eropa merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa sekitar 10% dari total ekspor nasional. Sebagian besar ekspor Indonesia ke Eropa berupa komoditas strategis untuk menunjang industrialisasi dan kebutuhan pangan di kawasan tersebut, seperti mineral logam untuk industri otomotif, besi dan baja, serta elektronik, serta produk CPO dan minyak nabati lainnya yang digunakan dalam industri biofuel, pangan, dan kosmetik. Melalui IEU-CEPA, ekspor produk unggulan tersebut diproyeksikan akan semakin meningkat dan memiliki akses pasar yang lebih luas.





03

AKUNTABILITAS KINERJA

- Pengukuran Kinerja
- Analisis Capaian Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan



03 AKUNTABILITAS KINERJA

A PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja yang dilakukan menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja suatu instansi, hasil proses evaluasi terhadap

target kinerja disebut Capaian Kinerja Organisasi atau yang dikenal dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Perhitungan NKO diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi. NKO merupakan agregasi dari nilai capaian strategis yang tertuang pada perjanjian kinerja. Status pencapaian NKO diindikasikan dengan warna merah, kuning, atau hijau, sesuai dengan nilai yang dicapai oleh NKO.

Tabel 3.1. Kriteria Capaian NKO

	HIJAU	$NSS \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi
	KUNING	$80\% \leq NSS < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
	MERAH	$NSS < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

NKO mencerminkan penggabungan dari semua Nilai Sasaran Strategis (NSS), di mana NSS sendiri merupakan penggabungan dari semua pencapaian IKU dalam sasaran tersebut. NKO digunakan untuk mengevaluasi kinerja di semua tingkatan unit kerja. Oleh karena itu, komponen perhitungan NKO terdiri dari 2 unsur, yakni:

1. Capaian IKU.
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Adapun proses perhitungan NKO dapat dijelaskan dalam tahapan berikut:



Gambar 3.1. Proses Penghitungan NKO

PERHITUNGAN CAPAIAN IKU

Perhitungan pencapaian kinerja dimulai dengan menghitung pencapaian IKU berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi kinerja sesuai dengan rumusan yang tertera dalam manual IKU masing-masing. Jika pada suatu periode tertentu data realisasi belum tersedia, maka pencapaian IKU pada periode tersebut akan dianggap belum tersedia (n/a) bukan diberikan nilai 0 (nol). Selanjutnya apabila data capaian IKU sudah tersedia, akan dilakukan perhitungan pencapaian IKU dengan cara membandingkan realisasi IKU dan target setelah mempertimbangkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU:

1. Polarisasi *Maximize*: di mana nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target;
2. Polarisasi *Minimize*: di mana nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih rendah dari target; dan
3. Polarisasi *Stabilize*: di mana nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada

dalam suatu rentang tertentu dibandingkan dengan target.

Indeks pencapaian IKU kemudian dapat dikonversi menjadi skala maksimum sebesar 120%.

Setelah perhitungan pencapaian IKU selesai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme perhitungan NSS dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata pencapaian IKU dalam sasaran strategis yang sama. Jika dalam suatu periode pelaporan terdapat IKU yang tidak memiliki nilai (n/a), maka IKU tersebut tidak akan dimasukkan dalam perhitungan NSS. Perhitungan NKO dilakukan berdasarkan konsolidasi seluruh NSS dari sebuah unit organisasi.

Adapun penjelasan formula perhitungan masing-masing jenis polarisasi IKU yang telah disampaikan sebelumnya adalah sebagai berikut:



1. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh: Pertumbuhan Ekonomi.



Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, lalu dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus ($\text{target} < 0$), formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh: Persentase Biaya Logistik terhadap PDB.



Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan skala konversi sebagai berikut.

Realisasi Terbaik	Indeks Capaian IKU
0	100
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Realisasi Terburuk	0

Skala konversi dibuat dengan ketentuan:

1. Realisasi terbaik sesuai dengan target yaitu sebesar 0 dan setara dengan indeks capaian 100.
2. Realisasi terburuk adalah realisasi terendah yang dapat ditoleransi pada suatu IKU. Angka tersebut ditentukan berdasarkan data historis, hasil penelitian, atau benchmark. Angka realisasi terburuk harus dinyatakan secara jelas dalam manual IKU. Realisasi terburuk setara dengan indeks capaian 0.
3. Indeks Capaian IKU diukur dengan rumus:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{realisasi terburuk} - \text{realisasi}}{\text{realisasi terburuk}} \times 100$$

3. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Makin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun), maka kinerja makin baik. Contoh: Tingkat Inflasi. Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi *stabilize* adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Capaian	Indeks Capaian
100	120
90	100
67,5	75
45	50
22,5	25
0	0

I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya
 C_a = Capaian awal
 C_a = Realisasi/Target X 100%
 C_n = Capaian, dengan ketentuan:
a. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%
b. Apabila Realisasi < Target, maka
 $C_n = C_a$
 C_{n-1} = Capaian di bawah C_n

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 8 (delapan) IKU yang bersifat *maximize*, 2 (dua) IKU yang bersifat *minimize*, dan 4 (empat) yang bersifat *stabilize* dengan rincian sebagai berikut:

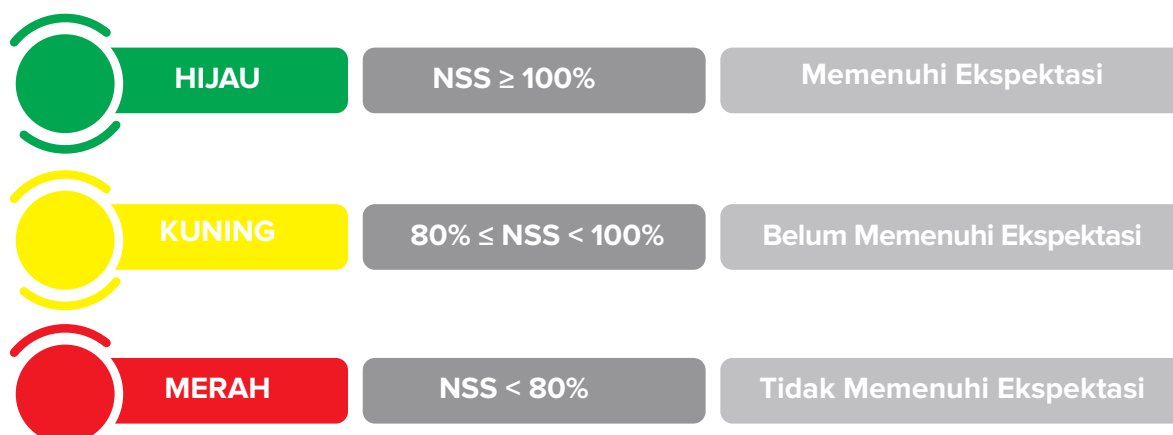


Tabel 3.2. Polarisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Polarisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	Persentase	Maximize
2	Biaya Logistik	13,52% terhadap PDB	Persentase	Minimize
3	Pembentukan Model Tetap Bruto	29,4% terhadap PDB	Persentase	Maximize
4	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8%	Persentase	Maximize
5	Devisa Pariwisata	19,00 – 22,10 miliar USD	Satuan	Stabilize
6	Rasio PDB Pariwisata	4,5% – 4,6%	Persentase	Stabilize
7	Indeks Ketahanan Energi	6,77	Indeks	Maximize
8	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43	Indeks	Minimize
9	Tingkat Inflasi	(2,5 ± 1) %	Persentase	Stabilize
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35%	Persentase	Maximize
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5% – 5%	Persentase	Stabilize
12	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4 (Baik)	Indeks	Maximize
13	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4 (Baik)	Indeks	Maximize
14	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	90,77	Nilai	Maximize

PERHITUNGAN NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS) T.A. 2025

NSS merupakan hasil dari penggabungan rata-rata seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sebuah Sasaran Strategis (SS). Prestasi NSS direpresentasikan dengan kode warna merah, kuning, atau hijau, yang didasarkan pada nilai prestasi berikut:



Gambar 3.2. Kriteria Capaian NSS

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat dari 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yang digambarkan melalui 14 Indikator Kinerja Utama. 3 Sasaran Strategis menggambarkan kondisi perekonomian makro yang hendak diciptakan, 1 sasaran strategis menggambarkan kondisi proses bisnis yang ingin diwujudkan, 1 sasaran strategis menggambarkan tingkat kepuasan atas layanan sinkronisasi, koordinasi dan sinkronisasi dan 1 sasaran strategis menggambarkan pengembangan internal yang ingin dilaksanakan. Perhitungan capaian masing-masing Sasaran Strategis yang dijanjikan pada Tahun 2025 akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2025

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 mencerminkan tingkat keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan mandat sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. NKO disusun

sebagai instrumen evaluasi kinerja yang komprehensif, mengintegrasikan capaian sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta kualitas tata kelola organisasi dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain capaian kinerja substantif, NKO Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 juga merefleksikan penguatan aspek tata kelola dan manajemen kinerja internal. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja yang lebih akuntabel telah berkontribusi positif terhadap konsistensi pencapaian sasaran strategis organisasi. Hal ini menunjukkan semakin matangnya implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang terbagi ke dalam 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), NKO Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	NSS
SS 1: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan						
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,3%	5,11%	96,41	97,17
2	Biaya Logistik	Persentase	13,52% terhadap PDB	N/A	N/A	
3	Pembentukan Model Tetap Bruto	Persentase	29,4% terhadap PDB	28,77%	97,86	
4	Rasio PDB Industri Pengolahan	Persentase	20,8%	19,07%	91,68	
5	Devisa Pariwisata	Satuan	19,00 – 22,10 miliar USD	19,50 miliar USD*	100	
6	Rasio PDB Pariwisata	Persentase	4,5% – 4,6%	4,9%*	106,52	
7	Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,77	7	103,40	
8	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Rangking	43	51	84,31	



Tabel 3.3. Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	NSS
SS 2: Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional Sesuai dengan Fundamental Ekonomi						
9	Tingkat Inflasi	Persentase	(2,5 ± 1)%	2,92%	100	100
SS 3: Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja yang Berkualitas dan Berkelanjutan						
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase	35%	42,20%	120	110
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,5% - 5%	4,85%	100	
SS 4: Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas						
12	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3,40	113,30	113,30
SS 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas						
13	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3,53	117,7	117,7
SS 6: Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas						
14	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Nilai	90,77	91,52*	100,83	100,83
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						106,5

Keterangan: (*) masih bersifat proyeksi

Pencapaian NKO Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada pada kategori memenuhi ekspektasi. yang tercermin dari capaian sebagian besar IKU yang memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai *policy integrator* semakin efektif dalam mengharmonisasikan kebijakan lintas kementerian/lembaga di bidang perekonomian termasuk didalamnya terkait pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan investasi, pengendalian inflasi, peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja.

Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 tidak hanya menggambarkan tingkat pencapaian target kinerja, tetapi juga menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi area perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) agar kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya semakin efektif, adaptif, dan berdampak nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.

B ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada periode pelaporan Tahun 2025 ini mencerminkan pelaksanaan peran strategis sebagai *policy integrator* dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan perekonomian nasional. Di tengah tekanan perlambatan ekonomi global, volatilitas geopolitik, serta ketidakpastian pasar internasional yang masih berlanjut, kinerja perekonomian nasional dan berbagai indikator strategis yang menjadi mandat koordinatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan capaian yang relatif terjaga dan kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Meskipun tidak seluruh target kinerja dapat dicapai secara optimal, berbagai capaian yang diraih mencerminkan efektivitas langkah koordinasi lintas kementerian/ lembaga, penguatan kebijakan responsif, serta kemampuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional. Pembahasan capaian kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas kelembagaan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat perbaikan kebijakan dan kinerja pada periode berikutnya guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian lintas kementerian dan lembaga. Di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, perlambatan ekonomi dunia, serta tekanan geopolitik dan perubahan struktur perdagangan internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan perannya sebagai kementerian koordinator untuk kementerian/ lembaga di bawah koordinasinya guna menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta mempercepat transformasi struktural perekonomian nasional. Berbagai capaian Prioritas Nasional pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun tidak seluruh target dapat dicapai secara optimal, kinerja perekonomian Indonesia tetap relatif terjaga dan kompetitif dibandingkan dengan banyak negara lain. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan yang adaptif dan responsif, serta sinergi lintas sektor yang terus diperkuat dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.

B.1 CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Pelaksanaan Prioritas Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada

Pada Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkontribusi pada 5 Prioritas Nasional sebagai berikut:

No	Kode PN	Prioritas Nasional
1	PN.02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2	PN.03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
3	PN.04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
4	PN.05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
5	PN.07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan



Sebagai wujud komitmen dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka telah di-*tagging* beberapa rincian output yang dianggap memiliki kontribusi langsung pada pencapaian PN sebagaimana telah disebutkan pada Bab II. Berikut ini merupakan matriks program, capaian, kendala, dan hasil keluaran 12 Rincian Output PN yang dihasilkan dari adanya proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang merupakan amanat dari Program Prioritas Nasional yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025.

Matriks ini menggambarkan keterkaitan antara perencanaan program, implementasi kebijakan, serta hasil yang dicapai melalui peran koordinatif kementerian dalam mengharmonisasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Penyusunan matriks ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta output kebijakan yang dihasilkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.





No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
1	4541.PBA.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Masih terdapat sejumlah daerah yang belum melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara optimal dan menyeluruh, termasuk untuk menyediakan ekosistem/ infrastruktur digital guna mendukung implementasi ETPD yang lebih inklusif	- Rapat Persiapan Rakornas TPID dan TP2DD dengan Bank Indonesia, Oktober–November 2025. - Dukungan Penyelenggaraan Rakornas P2DD (yang disinergikan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi) tanggal 28 November 2025 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pusat–Daerah P2DD 2025, 1 Desember 2025. - Koordinasi Awal terkait Konsep Program Katalis (Peningkatan Kapasitas, Literasi dan Sinergi) P2DD dengan BI, 9 Oktober 2025. - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal Daerah yang Mendukung Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah (Surat Menko kepada Menkeu) - Capacity Building Pemda Tahap Maju yang Berpotensi menjadi Pemda Tahap Digital, 22–23 Oktober 2025. - Refreshment Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) S–II Tahun 2025, 25 November 2025. Capacity Building dan High Level Meeting TP2DD (Bali, Kediri, Kalbar, Sumsel, Gorontalo, Tasikmalaya, DIY, Sulbar, Tegal, Bontang, Makassar, Pematang Siantar, Jateng, Depok, Maluku, Cimahi, Tangerang, Cianjur, Papua, Sulsel, Balikpapan, Jatim, Lampung) Periode Okt–Des 2025.	Presiden, Gubernur BI, dan Menko Perekonomian memberikan arahan terkait arah kebijakan P2DD, antara lain: - Presiden memberikan penekanan penyusunan kebijakan yang berfokus pada pelayanan yang cepat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, serta mendorong kemandirian dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan adil. - Rakornas P2DD 2025 menyoroti sinergi kuat untuk digitalisasi daerah sebagai kunci pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan tangguh, dengan fokus pada percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (TP2DD), penguatan literasi digital, dan kolaborasi QRIS antarnegara.	Surat Hasil Rakornas dan Rakorpusda P2DD 2025



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran	
				Arahan Rakornas ditindaklanjuti dalam forum Rakorpusda yang menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemda & K/L antara lain sebagai berikut: - Penguatan efektivitas kebijakan P2DD untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi (alignment roadmap, percepatan belanja, peningkatan local tax ratio, inovasi) - Penguatan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan P2DD (forum knowledge hub/peer learning, mendorong koordinasi rutin high level & teknis) - Penguatan ekosistem P2DD (interkoneksi perbankan daerah dengan SIPD, infrastruktur jaringan telkom, mendorong literasi)	Timeline Program Katalis P2DD 2026 Katalis P2DD diluncurkan secara resmi oleh Bank Indonesia pada Oktober 2025 (dalam acara FEKDiXIFSE) sebagai langkah nyata untuk membuat wadah sinergi lintas daerah dan knowledge hub untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah, peningkatan literasi fiskal masyarakat daerah, perluasan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Kepmenko Perekonomian Nomor 407/2025 disampaikan kepada DJPK, Kementerian Keuangan, dan selanjutnya didukung dengan Surat dari Menko Perekonomian Nomor B/EK.02.05/327/M. EKON/11/2025 sebagai salah satu bentuk rekomendasi kebijakan insentif fiskal daerah terkait P2DD pada APBN 2026. Upaya digitalisasi daerah sejalan dengan tujuan pemberian insentif fiskal dalam mendorong peningkatan kinerja daerah pada pelayanan keuangan daerah kepada masyarakat dan turut mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah.	Surat dari Menko Perekonomian Nomor B/EK.02.05/327/M.EKON/11/2025 tentang Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendukung Pengendalian Inflasi dan P2DD serta Kepmenko Perekonomian Nomor 407/2025

No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
				Sekretariat Satgas P2DD mengeluarkan Surat Rekomendasi Penguatan Ekosistem Digital Daerah yang mendorong kebijakan P2DD ke 12 Pemda Potensial, 14 November 2025. Di dalam surat tersebut memuat simulasi peningkatan skor ETPD untuk 12 Pemda spesifik. Simulasi yang disajikan menunjukkan potensi peningkatan skor hingga mencapai kategori Digital (>80%) melalui langkah-langkah spesifik, seperti: 1. penambahan elektronifikasi transaksi retribusi yang belum tercakup 2. penambahan kanal nontunai digital (seperti e-commerce dan QRIS) dan non digital (seperti ATM dan EDC) 3. konfirmasi penggunaan dan integrasi sistem keuangan daerah (SP2D Online, CMS, dan Integrasi Sistem).	Surat Asisten Deputi tentang Rekomendasi Penguatan Ekosistem Digital pada 12 TP2DD Potensial tanggal 14 November 2025
			Dari total 546 Pemda, sebanyak 501 pemda atau setara dengan 91,8% Pemda berstatus Digital. Secara regional, data persentase elektronifikasi pajak, retribusi, belanja, dan ketersediaan kanal (konvensional, nondigital, digital), SP2D online, CMS, integrasi sistem, dan sosialisasi disajikan untuk wilayah Sumatera, Jawa, Balinusra, Kalimantan, dan Sulawesi. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada minat masyarakat yang masih menjadi tantangan utama dalam perluasan implementasi ETPD, diikuti oleh infrastruktur IT dan perbankan yang belum memadai	Surat Asisten Deputi Pengembangan BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi selaku Kepala Sekretariat Satgas P2DD tentang Pelaporan Kinerja ETPD Semester II 2025	



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
Dalam rangka meningkatkan kinerja TP2DD untuk setiap daerah telah disampaikan beberapa upaya improvement yang dapat dilakukan, sesuai dengan arah kebijakan Rakornas/Rakorpusta dan akan dipantau melalui Championships P2DD 2026.					
2	4542.PBA.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	Koordinasi Pusat dan Daerah	1. Penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW III 2025 2. Monitoring Program Kerja (4K) TPIP Tahun 2025 3. Koordinasi TPIP-TPID serta GNPIP Wilayah Sulampua 4. Pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2025	1. Rekomendasi Penggunaan dan Penelaahan Rincian Output (Tagging Anggaran) yang mendukung program pengendalian inflasi. 2. Rekomendasi untuk penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam mendukung menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan untuk menjaga inflasi kelompok Volatile Food dalam rentang sasaran serta pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).	• Rakornas pada tanggal 28 November 2025 bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia • Siaran pers
Evaluasi Kinerja TPID					
Pembahasan kriteria evaluasi kinerja TPID tahun 2025 (award 2026)					
Rekomendasi kebijakan dalam penetapan kriteria evaluasi kinerja TPID Award 2026					
Pembinaan TPID melalui surat himbauan, HLM atau Capacity Building TPID					
1. Penyampaian surat himbauan kepada TPID dan/atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 2. HLM dan CB TPID Provinsi/Kab/Kota (Aceh, Bondowoso, Sumatera Utara, Lumajang, Situbondo, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, Belitung, Ciayumajukung, Lampung, Hulu Sungai Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Papua, Kalimantan Timur, Papua Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Jabar, dan Malang) Okt-Des 2025					
1. Rekomendasi kebijakan dalam HLM dan capacity building untuk pembinaan TPID dalam pengendalian inflasi daerah. 2. Penyampaian Surat Menko Perekonomian kepada Kementerian Keuangan terkait Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal Daerah yang mendukung Peningkatan Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025 berdasarkan Surat Menko Nomor B/EK.02.05/327/MEKON/11/2025 tanggal 20 November 2025.					
Pemberian insentif akan dialokasikan pada UU APBN 2026 (sedang menunggu proses penetapan)					

No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
				3. Penyampaian Surat Menko Perekonomian kepada Kementerian Perdagangan terkait Upaya Menjaga Stabilitas Harga dan Mendorong Aktivitas Ekonomi pada Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 berdasarkan Surat Menko Nomor EK.02.05/332/M.EKON/11/2025 tanggal 20 November 2025. 4. Penyampaian Surat Menko Perekonomian kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota (TPID) terkait Upaya Menjaga Stabilitas Harga dan Mendorong Aktivitas Ekonomi Pada Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 berdasarkan Surat Menko Nomor PK.TPID/333/M.EKON/11/2025 5. Penyampaian Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional terkait Upaya Menjaga Stabilitas Harga dan Mendorong Aktivitas Ekonomi Pada Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor: EK.02.05/334/M.EKON/11/2025 tanggal 20 November 2025.	



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
3	2500.PBA.001. Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	- Masih tingginya Biaya Logistik Nasional, dimana pada tahun 2022 sebesar 14,29% - Perluanya payung hukum peningkatan kinerja logistik yang baru mengingat Renaksi Perpres 26/12 telah berhenti sejak 2015 karena ditiapkannya Perpres 82/2020 yang mencabut Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) serta Rendasi Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional berakhir pada Desember 2024.	- Telah dilakukan Rapat Koordinasi Bilateral dengan Kemenhub membahas Masukan dari Kementerian Setneg atas Lampiran Final RPerpres Penguatan Logistik Nasional pada tanggal 04 November 2025; - Telah dilaksanakan Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional pada tanggal 1 Oktober 2025 yang merupakan harmonisasi final; - Menko Perekonomian telah menerima surat dari Menkum yang menyatakan selesainya proses harmonisasi RPerpres Penguatan Logistik Nasional pada 13 Oktober 2025; - Menko Perekonomian telah menyampaikan Surat Permohonan Penetapan RPerpres Penguatan Logistik Nasional dari Menko Perekonomian kepada Presiden RI pada tanggal 23 Oktober 2025; - Sejauh ini, tiga menteri yakni Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan, serta Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan dan menyampaikan surat resmi kepada Menteri Sekretaris Negara, sementara proses finalisasi masih menunggu paraf dari Menteri Perhubungan.	Rekomendasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional yang mencakup 3 (tiga) strategi utama yaitu: (i) Penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik; (ii) Penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik; dan (iii) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.	Draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional yang telah memperoleh paraf dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan, dan Kementerian Keuangan

No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
4	2491.PBA.001. Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	ASEAN Digital Economy Framework Agreement (ASEAN DEFA): - Ruang lingkup pada DEFA: Digital trade, Cross-border e-commerce, digital ID and authentication, electronic payments, talent mobility and cooperation, cooperation on emerging technologies, data protection and privacy, online safety and cybersecurity, competition policy - Perbedaan regulasi dan kesiapan antar anggota ASEAN untuk masing-masing ruang lingkup ASEAN DEFA - Konsolidasi antar K/L terkait untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan aturan global	- Rapat koordinasi persiapan 9th meeting of the ASEAN DEFA NC pada 13-14 Januari 2025 - Menghadiri dan melaksanakan relay 9th DEFA pada 5-8 Februari 2025 - Permintaan anggota DELRI pada the 26th ASEAN ACCED dan 9th Meeting of the ASEAN DEFA and Related Meetings berdasarkan surat nomor B/KWU.6/08/D.III.M.EKON.5/01/2025 - Rakor persiapan DEFA ke-10 Chapter Online Safety and Cybersecurity pada 3 Maret 2025 - Rakor persiapan DEFA ke-10 Chapter Digital ID, Talent Mobility, Emerging Tech dan Chapter XX (new articles) pada 4 Maret 2025 - Rakor persiapan DEFA ke-10 Chapter Digital Trade & Chapter Competition Policy pada 5 Maret 2025 - Rapat koordinasi DEFA Indonesia Business Roundtable pada 6 Maret 2025 - Melaksanakan relay DEFA ke-10 pada 10-14 Maret 2025 - Capacity building on Embedded Technology and Cross Border Trade pada 6 Mei 2025 - Rakor persiapan DEFA ke-II Chapter digital ID, talent mobility, emerging tech & new articles pada 6 Mei 2025 - Rakor persiapan DEFA ke-II chapters cross-border electronic commerce, data protection and privacy, dan online safety and cybersecurity pada 7 Mei 2025 - Rakor persiapan DEFA ke-II chapter digital trade dan competition policy pada 8 Mei 2025 - Permohonan DELRI pada ASEAN DEFA ke-II - Permintaan masukan terkait isu dalam perundingan DEFA kepada Dir. Perdagangan Perindustrian, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual (Kemlu) dan Dir. KSIKC (Kemenkeu) ke-II	Kemenko Perencanaan merekomendasikan: arah kebijakan terhadap 5 artikel utama yang akan menjadi dasar perundingan selanjutnya, mencakup financial services, customs duties on electronic transmission, non discriminatory treatment on digital products, telecommunication submarine cable cooperation, dan multiple flexibilities in electronic payment article. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Menko Perencanaan tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Special AECC Ministerial Meeting on ASEAN DEFA kepada: - Menteri Luar Negeri Nomor S/KWU.06.01/237/M.EKON/09/2025 - Gubernur Bank Indonesia Nomor S/KWU.06.01/238/M.EKON/09/2025 - Menteri Komunikasi dan Digital Nomor S/KWU.06.01/239/M.EKON/09/2025 - Menteri Keuangan Nomor S/KWU.06.01/240/M.EKON/09/2025 - Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S/KWU.06.01/241/M.EKON/09/2025	Surat Menko Perencanaan terkait Penyampaian Hasil Pertemuan Special AECC Ministerial Meeting on ASEAN DEFA Kertas posisi Indonesia pada ASEAN DEFA (RAHASIA)



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
			- Permintaan masukan terkait artikel ICT Products that use cryptography dalam DEFA kepada BSSN - Menghadiri dan melaksanakan relay DEFA ke-11 pada 19-23 Mei 2025 - Permohonan DELRI pada ASEAN DEFA ke-12 - Permohonan sosialisasi artikel Submarine Cable System DEFA ke-12 pada Sesi/Itjen Penataan Ruang Laut dan PIt. Dir. Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada 4 Juni 2025 - Rapat pembahasan ICT Products that Use Cryptography dengan BSSN, Komdigi, dan Kemendag pada 13 Juni 2025 - Workshop submarine cables pada 13 Juni 2025 - Menghadiri dan melaksanakan relay ASEAN DEFA ke-12 pada 24-28 Juni 2025 - Permohonan masukan pada Dir. Pengelolaan Layanan, Data Kemitraan Sekretariat LNSW terkait Paperless Trading - Permohonan DELRI ASEAN DEFA ke-13 - Rakor persiapan DEFA ke-13 terkait Digital Trade, Competition Policy, dan new articles pada 22 Juli 2025 - Rakor persiapan DEFA ke-13 terkait location of computing facilities dan fintech cooperation for financial services - Rakor persiapan DEFA ke-13 terkait cross-border electronic commerce dan data protection and privacy pada 23 Juli 2025 - Rakor persiapan DEFA ke-13 terkait new articles pada 28 Juli 2025		



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
			- Rapat pengisian Questionnaire on Financial Services pada 12 Agustus 2025 - Menghadiri dan melaksanakan relay DEFA ke-13 pada 4-8 Agustus 2025 - Special AECC Ministerial Meeting on ASEAN DEFA pada 28 Agustus 2025 secara hybrid - Rapat tindak lanjut AECC Ministerial Meeting pada 8 September 2025 - Rapat koordinasi persiapan ASEAN DEFA Ke-14 pada 1 Oktober 2025 - Pemohonan DELRI ASEAN DEFA Ke-14 di Jakarta kepada K/L terkait - Rapat persiapan teknis ASEAN DEFA Ke-14 di Jakarta pada 6 Oktober 2025 - Pelaksanaan (hosting) ASEAN DEFA Ke-14 di Jakarta pada 7 - 10 Oktober 2025 dengan menugaskan seluruh pegawai di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dengan Surat Tugas Nomor KWU.06.01/I48/D.III.M.EKON.5/09/2025 - Pelaksanaan relay ASEAN DEFA Ke-14 pada 7 - 10 Oktober 2025 - Pelaporan Hasil Pertemuan ASEAN DEFA Ke-14 kepada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital melalui ND Nomor KWU.06.01/99/D.III.M.EKON.5/08/2025 pada 15 Oktober 2025 - Menghadiri dan melaksanakan relay ASEAN DEFA Ke-15 di ASEAN Secretariat pada 25-27 November 2025 - Pemohonan DELRI ASEAN DEFA Ke-16 pada tahun 2026		



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
	Perpres Peta Jalan AI: Perkembangan AI yang pesat dan ada pandangan bahwa AI berpotensi membawa dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial. Berdasarkan survey yang dilakukan Stanford, masyarakat Indonesia berpendapat bahwa AI akan membawa lebih banyak manfaat dibanding bahaya, padahal kesiapan Indonesia menurut UNESCO masih lebih rendah dibandingkan negara barat. Terdapat 4 hal yang perlu masih kurang dan perlu dibenahi, antara lain: - Platform - Infrastruktur: kesiapan Indonesia terkait AI masih jauh tertinggal dalam sisi konektivitas, storage, LLM, dan data center. - People: perlu adanya upskilling - Policy: perlu adanya perbaikan dan tindak lanjut dari Stranas AI 2020 – 2045	- Menghadiri FGD Penyusunan Peta Jalan AI pada 8 Mei 2025 yang menghimpun masukan terhadap peta jalan penyusunan AI dan usulan untuk menjadi anggota gugus tugas peta jalan AI, sebagaimana dituangkan dalam risalah rapat Nomor KWU.06.02/01/D.III.M.EKON.5/05/2025 - Pelaporan hasil FGD Penyusunan Peta Jalan AI kepada Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan nomor nota dinas KWU.06.02/ 45 /D.III.M.EKON.5/05/2025 - Rapat koordinasi Artificial Intelligence Policy di Indonesia pada 19 Agustus 2025 dan pelaporan kepada Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital terkait hasil rapat dimaksud dengan Nota Dinas Nomor KWU.06.01/ 103 /D.III.M.EKON.5/08/ 2025 - Tanggapan terhadap rekomendasi program dan kegiatan pada Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artificial Nasional kepada Dit. Kecerdasan Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Kementerian Komdigi pada 22 Agustus 2025 dengan nomor surat B/KWU.06.01/70/D.III.M.EKON.5/08/2025	Tanggapan terhadap Rekomendasi Program dan Kegiatan pada Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artificial Nasional: - dukungan penyusunan Peta Jalan Kecerdasan Artificial (KA) Nasional dengan tetap berprinsip untuk mendorong inovasi dengan menekankan pada aspek-aspek penting seperti pengembangan talenta digital, peningkatan kapabilitas dan kapasitas teknologi, riset dan inovasi. - pengaturan pedoman etika KA dapat merujuk pada standar yang sudah ada seperti ASEAN Ethics Guideline dan Hiroshima AI Process, yang tetap mendorong inovasi dan pertumbuhan investasi. Selanjutnya, memberikan pertimbangan penerbitan (timing) peta jalan dan pedoman etika KA yang bersamaan dikawatirkan mempersempit ruang gerak inovasi dan menekan investasi yang ada dan akan datang sehingga mengusulkan penerbitan kedua kebijakan tersebut dimulai dari peta jalan dengan fokus pengembangan ekosistem dan industri, dilanjutkan penerbitan pedoman etika - mengendi bab VIII. Peran dan Tanggungjawab Para Pihak (hal. 14) dan bab IX. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi, serta Matriks Lampiran. - Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Surat Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital Nomor B/KWU.06.01/ 70 /D.III.M.EKON.5/08/2025	- Surat Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital Nomor B/KWU.06.01/70/D. III.M.EKON.5/08/2025, hal "Tanggapan terhadap Rekomendasi Program dan Kegiatan pada Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artificial Nasional" kepada Dit. Kecerdasan Artificial dan Ekosistem Baru, Kementerian Komdigi pada 22 Agustus 2025 - Surat Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital Nomor B/KWU.06.02/97/D. III.M.EKON/11/2025, hal "Tanggapan dan Masukan atas konsep pedoman etika kecerdasan artificial" kepada Dit. Kecerdasan Artificial dan Ekosistem Teknologi Baru, Kementerian Komdigi pada 10 November 2025	

No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
			- Rapat koordinasi teknis untuk memfinalisasi rencana aksi terkait AI pada RPerpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada 29 Oktober 2025 - Menyampaikan tanggapan dan masukan tertulis atas konsep pedoman etika kecerdasan artifisial kepada Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Kementerian Komdigi pada 10 November 2025 berdasarkan surat dinas Nomor B/KWU.06.02/97/D. III.M.EKON/11/2025	Masukan atas konsep pedoman etika kecerdasan artifisial: - agar prinsip pedoman etika KA nasional dapat merujuk pada ASEAN Guide on AI Governance and Ethics dan tidak menambahkan prinsip di luar pedoman tersebut untuk menjaga iklim investasi digital serta dengan kebijakan regional. - mekanisme pelaporan nasional dapat merujuk atau menyesuaikan dengan HAIP, mengingat posisi Indonesia yang sedang dalam proses aksesi sebagai anggota OECD. - mengendi bab VIII. Peran dan Tanggungjawab Para Pihak (hal. 14) dan bab IX. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi - Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Surat Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor B/KWU.06.02/97/D.III.M.EKON/11/2025	



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
		Penyusunan Roadmap Semikonduktor dan Teknologi Baru: - Gagasan ini muncul dari pimpinan Kemenko Perekonomian terkait Old Jobs (pekerjaan yang sudah ada saat ini meliputi manufaktur, agriculture, dsb) dan New Jobs. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia membutuhkan suatu engine baru, dimana perlu investasi dan inovasi untuk memunculkan new engine ini. - New engine ini meliputi semikonduktor yang menjadi basis hampir semua teknologi. Selain itu, teknologi baru mencakup AI, IoT, bioteknologi, biogenetik, biofotonik, quantum, dan sebagainya. - Diharapkan engine ekonomi yang sudah ada (existing) dapat berjalan berdampingan dengan new growth engine dalam mendorong peningkatan produktivitas nasional.	- Rapat koordinasi teknis untuk memfinalisasi rencana aksi terkait AI pada RPerpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada 29 Oktober 2025 dan penyampaian notulensi kepada K/L terkait pada 3 November 2025. - Diskusi dengan Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital pada 21 November 2025 mengenai Zero Draft Buku Putih dan RPerpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Komdigi dengan Surat Nomor 1202/DJID.2/PI.02.01/11/2025 mengenai Usulan Masukan Terkait Zero Draft Buku Putih dan RPerpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. - Masukan kepada Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, mesin, Alat Transportasi, dan Aneka, Kemenko Perekonomian mengenai Konsep Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Ekosistem Pengembangan Semikonduktor dan Teknologi Baru pada 12 Desember 2025.	- Visi competitiveness dengan indikator "kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)" disesuaikan menjadi "kontribusi ekonomi digital terhadap PDB" dengan beberapa pertimbangan, yakni Perhitungan kontribusi AI terhadap PDB sulit dilakukan secara terpisah dan Belum adanya standar internasional untuk pengukuran kontribusi AI. - Penambahan tim ahli Quantum Computing dalam struktur Satuan Tugas Ekosistem Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Nomor KWU.06.02/154/D. III.M.EKON.5/12/2025	Nota Dinas Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital kepada Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Aneka Nomor KWU.06.02/154/D. III.M.EKON.5/12/2025, hal "Masukan Target Utama dalam Konsep Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Ekosistem Pengembangan Semikonduktor dan Teknologi Baru"

No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
5	2521.PBB.001. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	Evaluasi kebijakan dan pengaturan ekspor	Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis terkait deregulasi kebijakan dan pengaturan ekspor 1. Rapat Koordinasi dengan K/L terkait kebijakan ekspor tanggal 24 Oktober 2025 2. Rapat Koordinasi dengan K/L terkait kebijakan ekspor tanggal 29 Oktober 2025 3. Rapat koordinasi dengan K/L terkait kebijakan ekspor tanggal 18 November 2025 4. Rapat koordinasi dengan K/L terkait kebijakan bea keluar ekspor tanggal 18 Desember 2025 5. Rapat koordinasi dengan K/L terkait kebijakan ekspor tanggal 19 Desember 2025.	• Diperlukan deregulasi kebijakan dan pengaturan ekspor memuat antara lain: • Penghapusan ET untuk produk timah industry • Penyempurnaan spesifikasi teknis untuk ekspor timah industry • Penyelerhaan persyaratan dan jenis ET timah murni Batangan • Relaksasi kewajiban ekspor timah industry menggunakan bahan baku timah murni batangan yang berasal dari bursa • Pengecualian perizinan berusaha untuk ekspor timah industry sebagai barang contoh • Relaksasi ketentuan ekspor batubara • Penghapusan ET untuk produk migas, kecuali eksportir yang melakukan ekspor gas melalui pipa • Penghapusan kewajiban dan sanksi pelaporan realisasi LS untuk instrumen ekspor LS saja • Menghapus persyaratan IUI atas persetujuan ekspor komoditas konsentrat ilmenit dan rutil • Penghapusan ekspor pasir hasil sedimentasi di laut • Otomatisasi perizinan ekspor beras keperluan umum oleh Perum Bulog dan BUMN/BUMD/swasta • Otomatisasi perizinan ekspor perikanan (yang termasuk dalam appendix CITES dan Non-CITES) • Perubahan nomenklatur sertifikat sanitasi produk hewan (KH-2) pada sarang burung walet (SBW) menyesuaikan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.	Draft Revisi Permendag tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
6	4539.PBA.001. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	Kebijakan DHE SDA Perlu Peningkatan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan	1. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA tanggal 10 Oktober 2025 2. Rapat Koordinasi Teknis Perkembangan Implementasi Tahapan I (Pembahasan Bentuk dan Konten) dan Tindak Lanjut Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA tanggal 16 Desember 2025	Hasil evaluasi Roadmap Tahapan I (Pembahasan Bentuk dan Konten) menunjukkan masih terdapat beberapa kendala implementasi yaitu: • Belum disepakatinya jaringan pertukaran data antara Otoritas Jasa Keuangan dengan DJBC • Perlu adanya pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Otoritas Jasa Keuangan dan DJBC • LNSW memerlukan surat mandat sebagai pemberi akses K/L terkait atas sistem informasi terintegrasi DHE SDA dari Sesmenko Bidang Perekonomian kepada Kepala LNSW • Perlu pendetailan skema penyampaian, unit penerima dan tindak lanjut K/L	1. Surat Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Nomor B/PI.02.01/48/D. II.M.EKON.3/12/2025 tentang Penyampaian dan Permohonan Tanda Tangan Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA 2. Draf Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA
			• Rakornas TPAKD 2025 di Balai Kartini pada 10 Oktober 2025 • Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 1 Edukasi Keuangan dan Pokja 5 Perlindungan Konsumen) pada 14 Oktober 2025 • Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 2 Hak Properti Masyarakat dan Pokja 7 Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan) pada 14 Oktober 2025 • Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 3 Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan) pada 15 Oktober 2025	1. Masih diperlukan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran 2. Inisiatif program yang secara spesifik menyasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan local 3. Penguatan struktur DNKI menjadi Komite Nasional terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), sehingga koordinasi lintas K/L dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terarah 4. Perlunya sinergi yang lebih maksimal antara DNKI dan stakeholders terkait peningkatan inklusi keuangan lainnya	1. Kepmenko No. 598 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan TPAKD Provinsi dan TPAKD Kabupaten/kota Tahun 2025 2. Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026-2030 3. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 4. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. SNKI/7/MEKON/01/2025 Tentang Rekomendasi Penetapan Indikator Inklusi Keuangan sebagai Kategori Kinerja Alokasi Dana Insentif Fiskal Daerah

No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
			- Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 4) pada 15 Oktober 2025 - Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 6 Kebijakan dan Regulasi dan Sekretariat DNKI) 16 Oktober 2025 - Rapat Teknis Persiapan FGD Penyusunan Strategi Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Kedua di Jakarta pada 5 November 2025 - FGD Implementasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dan Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) di Cirebon pada 31 Oktober 2025 - FGD StranasLIK Pokja 1 – Literasi Keuangan dan Pokja 2 – Inklusi Keuangan pada 11 November 2025 - FGD StranasLIK Pokja 3 – Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dan Pokja 5 – Infrastruktur dan Teknologi Informasi pada 12 November 2025 - FGD StranasLIK Pokja 4 – Kebijakan dan Regulasi dan Pokja 6 – Pelindungan Konsumen pada 13 November 2025 - FGD StranasLIK, Sekretariat pada 14 November 2025 - Rapat Pembahasan Draft Stranas LIK dan Arahkan Menko DNKK bersama MSC di Jakarta pada 4 Desember 2025; - Rapat Tindak Lanjut RPP Komnas LIK pada 5 Desember 2025		- Surat Menteri Sekretariat Negara No. B- 198 /M/D-1/HK.02.02/05/2025 Tentang Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan RPP Komnas LIK - Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan - Draft Kepmenko Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) tentang Perubahan atas Kepmenko No. 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat DNKI



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
			- Rapat Pembahasan Rancangan Strategi Nasional Kesejahteraan Keuangan (SNKK) di Jakarta pada 18 Desember 2025 - Rapat Persiapan Launching IK dan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Nasional di Jakarta pada 4 November 2025; - Rapat Persiapan Launching IK dan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Nasional di Jakarta pada 6 November 2025; - One on One Meeting membahas penyusunan Stranas LK bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta pada 20 November 2025; - Kunjungan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Syariah di lingkungan Universitas Tazkia di Bogor pada 18 Desember 2025. - FGD Peningkatan Inklusi Keuangan melalui Pondok Pesantren pada 10 November 2025; - Seminar Nasional dengan tema "Inklusi Keuangan dan Keuangan Syariah bagi Anggota Koperasi dan UMKM" di Jakarta pada 28 Oktober 2025; - Edukasi Keuangan Syariah bagi Warga Muhammadiyah di Solo pada 18 November 2025; - FGD Peningkatan Inklusi Keuangan Melalui Pesantren di Jakarta pada 10 November 2025;		



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
7	7702.PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	Menko Perekonomian melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 374 Tahun 2025 telah menetapkan Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru yang ditugaskan untuk menyusun Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru dalam bentuk Peraturan Presiden. Awalnya RPerpres ditargetkan untuk disahkan akhir tahun 2025 namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tertundanya pengajuan RPerpres, yakni diantaranya:	- FGD Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah bagi Lembaga Pendidikan dan Perdesaan di Majalengka pada 15 November 2025; - FGD Inklusi Keuangan Syariah bagi Usaha Mikro Kecil – Go Digital dan GO Export melalui dukungan Internasional Creative Exchange di Jakarta pada 12 Desember 2025 - Audiensi Diskusi terkait Lanskap Pengembangan dan Regulasi Inklusi Keuangan Tahun 2026–2029 bersama J–PAL SEA – LPEM FEB UI di Jakarta pada 20 November 2025; - Rapat Perumusan Program dan Ide Kreatif bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Desember 2025	Beberapa rekomendasi kebijakan dari rangkaian rapat koordinasi diantaranya: Beberapa kementerian seperti Kemperin, BRIN, dan Kemenkes memberikan masukan mengenai kebutuhan harmonisasi antar program seperti biogenomika dan AI, serta penyediaan cakupan investasi dan TKDN. Pelaku usaha (misalnya dari GAIKINDO dan industri otomotif) menekankan pentingnya agar Perpres menjadi payung besar yang relevan tidak hanya bagi semikonduktor, tetapi juga bagi teknologi baru lainnya. Dalam konteks human capital, pemerintah menegaskan arah pengembangan talenta di bidang STEM agar dapat mengakomodasi kebutuhan semikonduktor maupun teknologi baru seperti AI, bioteknologi, dan fotonik. Pendekatan ini mencakup pengembangan talenta untuk chip design, AI, serta bioteknologi kesehatan dan pertanian.	Dokumen First Draft Rancangan Peraturan Presiden Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
		- Beberapa K/L masih belum mengisi Rencana Aksi yang akan dilampirkan pada RPerpres khususnya terkait Kegiatan, Output, dan Target, sehingga proses penyusunan berjalan lebih lambat dikarenakan harus menunggu masukan-masukan dari K/L. - Karena keterbatasan waktu di akhir tahun, direkomendasikan oleh Kemensetneg bahwa pengajuan izin prakarsa sebaiknya di bulan Januari 2026 agar prosesnya tidak terburu-buru karena mengejar target akhir tahun.	- Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 Pembahasan Draft Rancangan Perpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada 1 Desember 2025. - Diskusi Pengembangan Industri Semikonduktor di Indonesia pada 6 Desember 2025. - Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Draft Rancangan Perpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada 8 Desember 2025.	- Bappenas menekankan bahwa industri semikonduktor telah menjadi salah satu industri prioritas nasional dalam RPJMN dengan fokus pada penguatan rantai pasok, peningkatan SDM, dan riset. Ditekankan juga perlunya integrasi kegiatan riset dan hilirisasi, dengan dukungan anggaran sekitar Rp28 miliar dalam RKP 2026. - Masukan dari Kementerian dan Lembaga mencakup: - Kementan mengusulkan agar istilah "biogenomik tanaman padi" diganti menjadi "biogenomik komoditas pertanian" agar cakupannya lebih luas dan tidak terbatas pada padi. - BSSN menyoroti pentingnya keamanan rantai pasok dan cyber security, khususnya dalam penerapan teknologi baru seperti AI dan quantum computing. - BKPM menyoroti target investasi yang terlalu tinggi dan menyarankan fokus pada peningkatan business readiness index (B-Ready) serta kemudahan berusaha sebelum menetapkan target investasi nominal. - Pentingnya memperkuat research and development (R&D) serta desain produk sebagai fondasi daya saing industri masa depan. BRIN diharapkan berperan sebagai pelaksana utama riset atas permintaan kementerian sektoral seperti Kemenperin, Kementan, dan Kemenkes.	

No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
				4. Perlunya membangun mekanisme kolaborasi industri-akademisi-pemerintah (triple helix) yang konkret, termasuk insentif untuk riset bersama, technology transfer, dan program magang industri bagi talenta semikonduktor dan AI. Pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama internasional dengan mitra strategis seperti Belanda, Inggris, dan AS untuk memperkuat kapasitas riset dan investasi di sektor ini. 5. Kemensetneg menyampaikan bahwa beberapa bagian batang tubuh masih berulang atau tidak efektif, sehingga perlu diringkaskan. Penyederhanaan redaksi akan mempermudah pembacaan, meminimalkan ambiguitas, dan mempercepat proses finalisasi.	
8	7702.PBK.002. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	Kendala pengembangan industri logam yang ditangkap selama koordinasi antara lain beberapa asosiasi seperti ISIA dan APLINDO terdampak kebijakan penghentian impor skrap besi baja dikarenakan skrap merupakan bahan baku utama industri logam di Indonesia.	1. Menko Perekonomian mendapatkan surat dari Kemenkumham perihal Rekomendasi Pembangunan Lini Propelan Merah Putih Kapasitas 100 kg kepada PT Pindad. 2. Telah dilaksanakan lanjutan koordinasi dan evaluasi isu Cesium-13 3. Telah dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 (Cs-137) dan Kesehatan Pada Masyarakat Beresiko Terdampak pada tanggal 8 Oktober 2025 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan.	Beberapa rekomendasi kebijakan dari rangkaian rapat koordinasi diantaranya: • Telah dilaksanakan penandatanganan dua perjanjian kerja sama strategis dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memperkuat pengembangan fasilitas produksi industri pertahanan melalui inisiatif "Propelan Merah Putih". • Pemerintah mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri logam selama kebijakan penghentian impor skrap diberlakukan. Keterbatasan bahan baku untuk industri dalam negeri; salah satunya dipengaruhi kebijakan larangan impor scrap besi baja untuk bahan baku industri nasional dikarenakan temuan zat Cesium-137.	Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
9	2513.PBA.001. Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Aksesi Keanggotaan OECD	Perluunya percepatan transformasi struktural di bidang ekonomi, sosial, dan tata kelola untuk mendorong pencapaian Indonesia Emas melalui keanggotaan Indonesia dalam forum internasional, salah satunya OECD	1. Pelaksanaan Proses Tinjauan Teknis (Environment): Pengisian dan Penyampaian Kuesioner oleh Timnas OECD, Kunjungan Tim OECD ke Indonesia, dan Preparation of National Action Plan 2. Pelaksanaan Proses Tinjauan Teknis (Trade): Penyampaian Kuesioner dari OECD 14. Pelaksanaan Proses Tinjauan Teknis (Digital Policy): Penyampaian Kuesioner dari OECD 3. Pelaksanaan Proses Tinjauan Teknis (Fiscal Affairs): Penyampaian Kuesioner dari OECD 4. Pelaksanaan Proses Tinjauan Teknis (Chemical): Penyampaian Kuesioner dari OECD 5. Kunjungan Deputy Secretary General OECD dan Pelaksanaan Rakor Tingkat Menteri Tim Nasional OECD: 11 Desember 2025 6. Rakor Tingkat Teknis Tim Nasional OECD: Pelaksanaan Tinjauan Teknis: 12 Desember 2025 7. Rakor Tingkat Teknis Sekretariat Tim Nasional OECD, Sekretariat OECD, dan BPKP: Pembayaran Biaya Aksesi OECD Indonesia: 12 Desember 2025 8. Hand Over INA-OECD dari Prospera kepada Sekretariat Tim Nasional OECD: 29 Desember 2025 9. Pembayaran Biaya Aksesi OECD Indonesia T.A. 2024, 2025, dan 2026: 31 Desember 2025	Dokumen Initial Memorandum Pemri: 1. Dokumen IM merupakan Penilaian Mandiri Keselarasan Kebijakan, Regulasi, dan Praktik milik Pemri dibandingkan instrumen OECD. 2. Penilaian dilakukan terhadap 240 instrumen OECD yang mencakup 32 sektor. 3. Berdasarkan penilaian mandiri, mayoritas (94,17%) kebijakan, regulasi, standar Pemri sejalan dengan instrumen OECD. 4. Sektor yang menjadi fokus Pemri: anti-korupsi, lingkungan hidup, kompetisi, investasi, dan tata kelola. Pelaksanaan Tinjauan Teknis bagi seluruh Bidang Tim Nasional OECD yang mulai dilaksanakan pada bulan September 2025 dan direncanakan hingga tahun 2026. Terdapat 5 Bidang yang telah mulai Tinjauan Teknis pada 2025, yakni: Environment, Trade, Digital Policy, Fiscal Affairs, dan Chemical.	Dokumen Initial Memorandum Pemri, Kuesioner Proses Tinjauan Teknis.



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
10	4545.PBK.003. Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	Revisi Perpres Pengalihan Prakerja ke Kemnaker belum dapat ditetapkan karena masih terdapat isu pending yang perlu diputuskan Komite	- Pelaksanaan Diskusi Internal Kemnaker Perekonomian melibatkan Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektur Kemenko Perekonomian membahas perkembangan transisi Program Kartu Prakerja dan penyelesaian pending issue tanggal 12 November 2025 untuk dilaporkan ke Pak Menko. - Pengusulan proses likuidasi satker BUN MPPKP kepada Menteri Keuangan melalui surat Bapak Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan tanggal 7 November 2025	- Pelaksanaan Rakor Komite Cipta Kerja untuk membahas pengakhiran program Kartu Prakerja. - Penyelesaian proses likuidasi entitas Satker BUN MPPKP.	Penyerahan Program ke Kemendaker
11	4545.PBK.002 Rekomendasi Hasil Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Mismatch keahlian antara demand dan supply tenaga kerja	Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi - Rapat Koordinasi Pengembangan Website TKNV oleh Kemenko PMK tanggal 16 Oktober 2025. - Rapat Koordinasi Monitoring dan Pelaporan Capaian Implementasi Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi oleh Kemenko PMK tanggal 3 November 2025. Green Jobs - Rapat Pembahasan Strategi dan Percepatan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau tanggal 1 Oktober 2025 - Lokakarya Persiapan Uji Coba Reskilling untuk Transisi Pekerjaan Hijau/Green Jobs oleh Kementerian PPN/Bappenas tanggal 29 Oktober 2025.	1. Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi - Percepatan implementasi program untuk pencapaian target 100.000 di tahun 2025 - Perluasan penyelenggaraan program tidak hanya di industri tetapi juga instansi Pemerintah - Pelaksanaan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia Bagian Timur sehingga sebaran peserta tidak berfokus di pulau Jawa 2. Penyiapan Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Welder dan Hospitality Agar kemnaker, KP2MI, dan Kementerian Pariwisata sebagai KL Utama dapat menghitung kebutuhan anggaran dan besaran unit cost per pelatihan dan juga mengidentifikasi pasar kerja luar negeri yang akan di isi.	Permenaker Nomor 11 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang ditetapkan pada 29 Oktober 2025



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
			Program Peningkatan Kapasitas SDM (Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi bagian dari Stimulus Ekonomi) • Telah dilakukan sosialisasi pemagangan dengan CDC Universitas, Kawasan Industri di Bogor, dan diseminasi di Makassar. • Monitoring pelaksanaan program oleh Bapak Menko (Telkom dan EMTEK Group) BNI Makassar, KEK Batang (PT. Matahari Tire Indonesia (MTI), Kawasan Industri Karawang (PT Astra Juoku Indonesia), dan Kawasan Industri Makassar (PT KIMA). • Telah dilaksanakan Rapat Satgas P2SP tanggal 26 November 2025 yang dipimpin oleh Bapak Menko, diputuskan pemagangan akan mendapatkan fasilitas PPh 21 Di Tanggung Pemerintah (DTP).		
			Penyiapan Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Welder dan Hospitality Telah dilaksanakan rapat tindak lanjut percepatan Program Strategis Upskilling Welder dan Welder tanggal 24 Desember 2025. Target pelatihan welder sejumlah 100 ribu orang dan hospitality sejumlah 400 ribu orang. Pelatihan dilakukan untuk mempersiapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI).		

No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
12	4545.PBK.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Upah Minimum	- Telah dilaksanakan rapat bersama dengan Prospera dalam rangka Pemaparan Hasil Survei Kajian terkait Upah Minimum tanggal 31 Oktober 2025. - Rapat Harmonisasi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tanggal 18 November 2025. - Kenaikkan Upah Minimum Provinsi tahun 2025 sebesar 6,5%. Sementara itu, untuk UMP 2026 Pemerintah memperluas rentang alfa pada formula UMP 2026 yang sebelumnya 0,1 – 0,3 menjadi 0,5 – 0,9. - Rata-rata nilai UMP di 36 Provinsi yang telah menetapkan UMP adalah Rp. 3.467.629, dengan rata-rata kenaikan yaitu 5,76% dengan kenaikan sebesar Rp. 185.897 - Provinsi dengan UMP Tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai Rp. 5.729.876 dan Provinsi dengan UMP terendah adalah Jawa Barat dengan nilai Rp. 2.317.601 - Terdapat 3 Provinsi yang menetapkan UMP tidak sesuai dengan ketentuan yakni Riau, Maluku Utara, dan Papua Barat.	- Usulan substansi agar: - Formula perhitungan upah minimum tetap menggunakan formula PP 51/2023. - Dibuat kriteria atau standar penetapan sektor tertentu serta perhitungan nilai UMS - Dilakukan percepatan penetapan RPP perubahan PP 51/2023 sebagai dasar penetapan UM 2026. Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 36/2021 tentang Pengupahan.	Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 36/2021 tentang Pengupahan.



No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		1. Rapat koordinasi bersama dengan K/L terkait, seperti Kemenko PMK dan KemenPPA dalam Pokja ekonomi perawatan untuk merumuskan kebijakan dan langkah strategis dalam memperkuat sistem ekonomi perawatan (care economy) di Indonesia. 2. Telah dilaksanakan advokasi ekonomi perawatan untuk peningkatan TPAK Perempuan oleh KemenPPA pada tanggal 21 Oktober 2025. 3. Telah dilaksanakan Workshop Perancangan Kebijakan Ketenagakerjaan Efektif Gender November Bappenas, ditindaklanjuti ang dan Responsif pada 17–18 bersama dan dengan Rapat Internal bersama Biro MKKS pada 18–19 November 2025. 4. Telah dilaksanakan rapat diskusi terkait Peta Okupasi Sektor Perawatan (caregiver) bersama Bappenas tanggal 30 Desember 2025.	1. Rancangan Perpres tentang Ekonomi Perawatan 2. Mengajukan tagging Anggaran Berbasis Gender (ARG) pada tahun 2026. 3. Kajian perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk perlindungan maternitas 4. Peta Okupasi Sektor Perawatan	Rancangan Peta Okupasi Sektor Perawatan
	Penguatan Perlindungan pada Sektor Pekerja Rentan		Telah dilaksanakan Serap Aspirasi Penyusunan Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 terkait Perlindungan Awak Kapal Perikanan tanggal 30 Oktober 2025.	Menyusun timeline ratifikasi konvensi ILO 188 Kesepakatan Bentuk Perlindungan terhadap awak kapal perikanan Adopsi rekomendasi ILO yang sesuai dengan kebijakan nasional Indonesia	Komitmen K/L untuk melakukan Ratifikasi C-188
	Perlindungan dan Pemberdayaan Platform Work		Telah dilaksanakan Rapat PAK dan Konsultasi Publik Penyusunan RPerpres Perlindungan Pekerja Transportasi Berbasis Platform Digital tanggal 5 November 2025 dan 12 November 2025.	1. Menyusun rancangan bentuk perlindungan yang diberikan kepada mitra pengemudi 2. Menyusun rancangan bentuk hukum hubungan antara mitra dengan platform digital 3. Menyusun rancangan bagi hasil antara mitra dengan platform digital	RPerpres tentang Perlindungan Pekerja Platform Sektor Transportasi Berbasis Platform Digital

No.	Rincian Output	Isu/Permasalahan	Proses Pencapaian RO PN	Rekomendasi Kebijakan	Produk Keluaran
		Mitigasi PHK Massal	Implementasi paket stimulus kebijakan ekonomi untuk meringankan beban operasional perusahaan guna memitigasi risiko PHK massal, melalui: - Perpanjangan diskon iuran JKK melalui penetapan PP 36/2025 tentang Perubahan PP 7/2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025 untuk perpanjangan masa pemberian diskon iuran JKK hingga Januari 2026. - Perluasan cakupan Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata.	- Cakupan penerima penyesuaian iuran JKK dan JKM - Penyesuaian masa berlaku pemanfaatan diskon iuran JKK dan JKM	Penetapan PP 36 tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025
	Future Jobs		- Telah dilaksanakan Diskusi Publik Pekerjaan Masa Depan tanggal 28 November 2025 di Bandung. - Telah dilaksanakan FGD Dinamika Ketenagakerjaan dan Arah Kebijakan Ke Depan pada tanggal 4 Desember 2025 di Yogyakarta.	- Pemetaan jenis pekerjaan dan skill yang dibutuhkan dimasa depan - Memetakan penyebab terjadinya perubahan lanskap ketenagakerjaan di masa depan	Tersusunnya rekomendasi arah kebijakan tentang jenis pekerjaan masa depan



B.2 Sasaran Strategis 1: **TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN**

Sasaran Strategis “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan” dalam RPJMN 2025–2029 merupakan bagian penting dari agenda pembangunan yang diusung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Fokus utama dari sasaran ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan tangguh terhadap dinamika global. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama yang mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penguatan struktur ekonomi, efisiensi sistem produksi dan distribusi, serta peningkatan daya saing nasional di tingkat global. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi secara agregat. Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut, dilakukan pengendalian dan penurunan biaya logistik sebagai upaya meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan daya saing produk domestik. Penurunan biaya logistik diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan memperluas akses pasar, baik domestik maupun internasional.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) digunakan sebagai indikator untuk mengukur peningkatan investasi produktif yang mendukung kapasitas produksi jangka panjang. Peningkatan PMTB menunjukkan adanya perbaikan iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha, yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks penguatan struktur ekonomi, rasio Produk

Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan menjadi indikator penting untuk mengukur peningkatan nilai tambah dan transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor bernilai tambah tinggi.

Sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama perekonomian yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Kinerja sektor ini diukur melalui indikator devisa pariwisata dan rasio PDB pariwisata, yang mencerminkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Peningkatan kedua indikator tersebut menunjukkan semakin kuatnya peran pariwisata sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Selain itu, keberlanjutan pembangunan ekonomi juga ditopang oleh ketahanan sektor energi dan kesiapan transformasi digital. Indeks ketahanan energi digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi dalam menjamin ketersediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan sebagai faktor pendukung utama aktivitas produksi. Sementara itu, indeks daya saing digital di tingkat global menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan ekonomi dalam memanfaatkan teknologi digital, inovasi, dan transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Melalui pencapaian indikator-indikator tersebut secara terintegrasi, sasaran strategis pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, struktur ekonomi yang kuat dan berdaya saing, serta ketahanan ekonomi jangka panjang yang mampu menghadapi tantangan global.

B.2.1**PERTUMBUHAN EKONOMI**

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui penguatan konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta optimalisasi kinerja sektor-sektor produktif. Kebijakan fiskal dan moneter dijalankan secara sinergis untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali terdapat isu dan masalah yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing sektor serta tidak dapat diselesaikan antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi saling berbenturan satu

sama lain atau *overlapping*. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diamanatkan pada RPJMN, maka diperlukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi bagian dari sebuah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam kurun periode 1 tahun.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

CAPAIAN KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2025**Tabel 3.4. Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,3	5,11	96,41%

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap solid dan resilien di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 tercatat sebesar **5,11 persen** (year-on-year) dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1



triliun dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau USD 5.083,4. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan momentum pemulihan ekonomi serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung menguat pada paruh kedua tahun. Pada triwulan I dan II, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di atas 4,8 persen, kemudian meningkat pada triwulan III dan mencapai tingkat tertinggi pada triwulan IV. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi, terutama didorong oleh konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja sektor usaha melalui ekspor barang dan jasa.

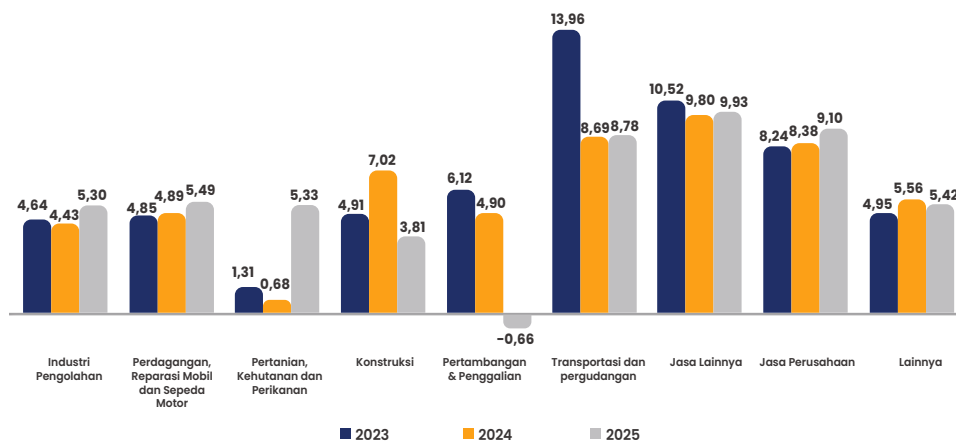
Melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,11 persen secara *C-to-C (cumulative-to-cumulative)*. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang mencapai 5,03 persen secara *C-to-C*, dengan selisih sebesar 0,08 poin persentase ini dipengaruhi oleh penguatan konsumsi domestik, aktivitas investasi yang stabil, serta kontribusi ekspor yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2025 lebih kuat dibanding 2024, mengindikasikan kesinambungan pemulihan ekonomi setelah pandemi dan kemampuan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tantangan global.

Dengan melihat kondisi perekonomian di Kawasan Asia Tenggara dibandingkan dengan negara-

negara lain, pertumbuhan Indonesia berada di posisi menengah-tinggi. Misalnya, Vietnam dan Filipina diproyeksikan tumbuh lebih cepat, masing-masing sekitar 6,5 persen dan 6,1 persen. Sementara itu, pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibanding Malaysia yang sekitar 4,5 persen, dan Thailand yang sekitar 3 persen. Artinya, Indonesia tumbuh lebih cepat daripada beberapa negara besar di kawasan, tetapi masih tertinggal dari negara-negara yang pertumbuhannya lebih agresif. Jika dilihat dari perspektif Asia Pasifik yang lebih luas, Indonesia termasuk dalam kelompok pertumbuhan menengah-tinggi. Pertumbuhan Indonesia sedikit lebih tinggi dibanding China yang diproyeksikan sekitar 4,6 persen, dan juga lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik yang sekitar 4,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia cukup kompetitif di tengah dinamika global dan Kawasan.

a. PDB Lapangan Usaha

Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Lainnya sebesar 9,93 persen; diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 9,10 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,78 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi diantaranya Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,66 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian Indonesia masing-masing tumbuh sebesar 5,30 persen dan 5,49 persen.



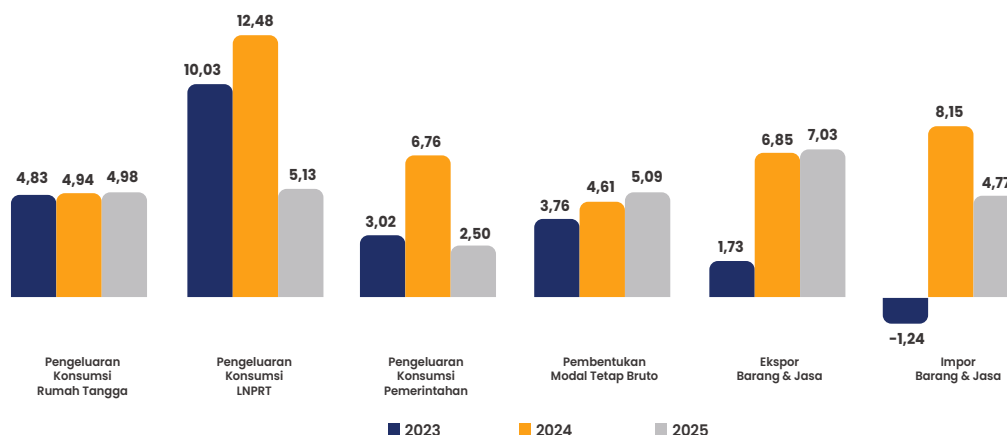
Gambar 3.3. Pertumbuhan PDB beberapa Lapangan Usaha (C-to-C)(Persen), 2023-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Secara struktur PDB Indonesia berdasar lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak terdapat perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,07 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,17 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,10 persen; Konstruksi sebesar 9,83 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,75 persen. Dari kelima sektor ini memiliki peranan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 63,92 persen.

b. PDB Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,03 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 5,13 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,98 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,50 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (faktor pengurang dalam PDB) juga tumbuh sebesar 4,77 persen.



Gambar 3.4. Pertumbuhan PDB beberapa Komponen Pengeluaran (C-to-C)(Persen), 2023-2025

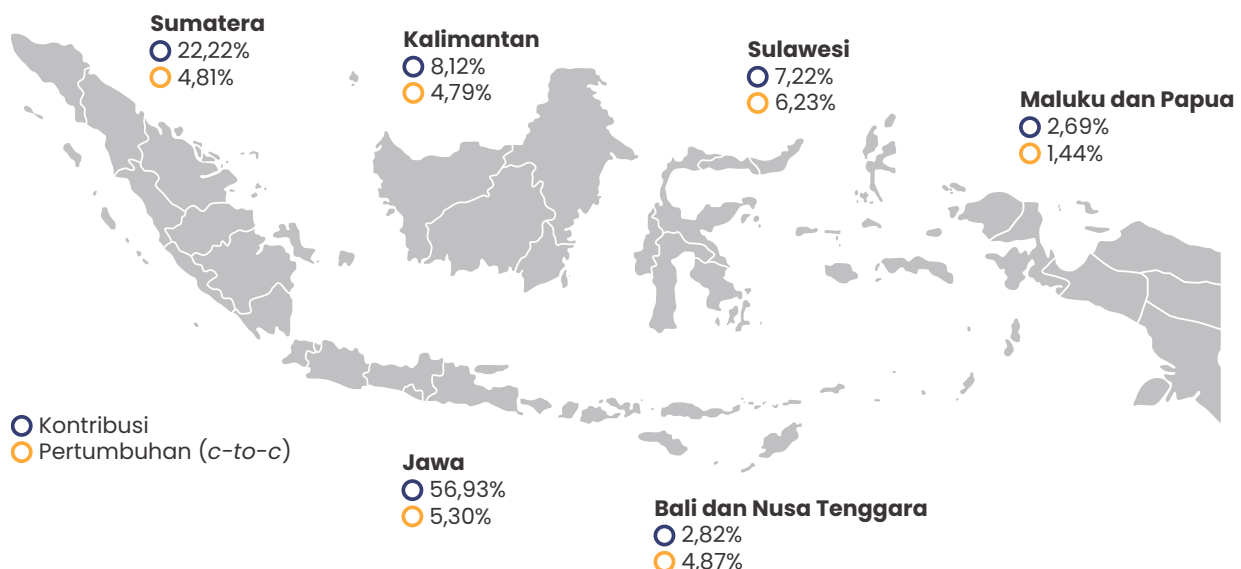
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Secara struktur PDB Indonesia berdasarkan PDB Pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih dipimpin oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 53,88 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 28,77 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,85 persen; Komponen PK-P sebesar 7,53 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,85 persen; dan Komponen PK_LNPRT sebesar 1,35 persen. Sementara itu, impor

barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang berperan sebesar 20,54 persen.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tahun 2025 pulau Jawa masih mendominasi peranan yang kuat dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar 56,93 persen. Posisi berikutnya ditempati oleh Pulau Sumatera (22,22 persen), Kalimantan (8,12 persen), Sulawesi (7,22 persen) Bali dan Nusa Tenggara (2,82 persen), serta Maluku dan Papua (2,69 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

Ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2025 menggambarkan adanya pertumbuhan pada seluruh kelompok provinsi. Pulau Sulawesi tercatat pertumbuhan (c-to-c) tertinggi sebesar 6,23 persen, diikuti Pulau Jawa (5,30 persen), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (4,87 persen), Pulau Sumatera (4,81 persen), dan Pulau Kalimantan (4,79 persen).

UPAYA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,3 persen. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan sinkronisasi, koordinasi

dan pengendalian berbagai kebijakan strategis yang terintegrasi dan terukur melalui penguatan kebijakan terkait paket stimulus ekonomi, produktivitas usaha BUMN, penguatan permodalan, penguatan nilai transaksi dan daya saing perdagangan, serta penguatan infrastruktur dan daya saing Kawasan dengan rincian sebagai berikut:

a. Implementasi Program Paket Stimulus Ekonomi

Dalam rangka menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintah pada tahun 2025 menetapkan dan melaksanakan Program Paket Ekonomi yang merupakan bagian dari kebijakan strategis fiskal dan sektor. Program ini bertujuan untuk memperkuat daya beli Masyarakat, meningkatkan aktivitas dunia usaha, serta memperluas kesempatan kerja.



Program paket ekonomi ini dirancang secara komprehensif melalui pendekatan terpadu yang mencakup dukungan terhadap rumah tangga, pelaku usaha, serta sektor-sektor produktif yang memiliki pengaruh tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Struktur paket ekonomi 2025 atau bisa disebut program 8+4+5 yang terdiri dari 8 Program akselerasi, 4 insentif utama stimulus, dan 5 program mendukung penyerapan tenaga kerja beserta capaiannya sampai desember 2025, sebagai berikut:

8 Program Akselerasi:

1. Magang nasional bagi fresh graduate dengan uang saku setara UMP selama beberapa bulan

Capaian: peserta magang 102.696 orang yang terdiri dari 62.260 magang di Perusahaan dan 40.436 magang di KL dengan penyelenggara sebanyak 5.168 perusahaan dan 2.886 Satker KL.

2. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata

Capaian: terlaksananya Implementasi PMK 72/2025 tentang Pajak Penghasilan



Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.

3. Bantuan pangan untuk keluarga penerima manfaat (beras & minyak goreng)

Capaian: tersalurkannya Beras sebanyak 348.538 Ton dan Minyak Goreng 69.707.648 Liter.

4. Subsidi iuran JKK/JKM untuk pekerja sektor informal

Capaian: telah terbitnya PP Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

5. Program pekerjaan sementara (cash-for-work) di infrastruktur

Capaian: pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp6,63 Triliun dengan Tenaga Kerja sebanyak 525.321 orang; Kementerian Perhubungan sebesar Rp1,18 Triliun dengan Tenaga Kerja sebanyak 16.971 orang.

6. Insentif housing dan biaya hidup bagi kelompok tertentu

Capaian: telah terbitnya Permenaker Nomor 12 tahun 2025, serta pemanfaatan perumahan dengan target 1.050 unit telah terealisasi sebanyak 1.076 unit.

7. Deregulasi dan kemudahan usaha bagi pelaku UMKM

Capaian: telah diluncurkan Satgas P2SP dan Kanal debottlenecking.

8. Proyek percontohan kota untuk pengembangan ekonomi lokal

Capaian: ditetapkan Pilot Project DKI Jakarta.

4 Insentif utama stimulus:

1. PPh Final 0,5% untuk UMKM dengan omset sampai batas tertentu

Capaian: telah disampaikan aturan terkait kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden.

2. PPh 21 DTP bagi pekerja di sektor padat karya/pariwisata

Capaian: telah diterbitkan PMK 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.

3. Diskon iuran JKK/JKM untuk peserta bukan penerima upah

Capaian: telah terbitnya PP Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

4. Subsidi-subsidi lain yang mendukung biaya produksi dan tenaga kerja

Capaian: telah terbitnya PMK 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun.

5 Program penyerapan tenaga kerja:

1. Pengembangan koperasi desa dan UMKM berbasis komunitas

Capaian: telah terserap sebanyak 694.591 orang tenaga kerja sebagai pengurus dan pengawas KDKMP; telah terbentuk KDKMP berbadan hukum sebanyak 83.220.

2. Replanting project dan revitalisasi sektor pertanian/kelautan

Capaian: telah terserap tenaga kerja sebanyak 261.793 orang sektor Perkebunan dengan realisasi tanam seluas 86.452 ha.

3. Kampung Nelayan Merah Putih

Capaian: telah terserap tenaga kerja sebanyak 4.875 orang dengan realisasi konstruksi Pembangunan 65 lokasi mencapai 87,26%.

4. Revitalisasi dan Modernisasi Tambak serta Kapal Nelayan

Capaian: telah ditetapkan di dalam Blue Book oleh Bappenas sebanyak 1.000 kapal 30 GT; telah terbit SK Menhut No. 736 terkait persetujuan pelepasan Kawasan hutan seluas ±14.090 Ha.

5. Pengembangan Budidaya Ikan di 500 Kab/Kota

Capaian: telah terserap tenaga kerja sebanyak 1.300 orang dengan Pembangunan budidaya tematik bioflok lele/nila di 100 titik telah selesai.

Bauran Kebijakan Memperkuat Peran Satgas P2SP

Dalam pelaksanaan pencapaian target dari pertumbuhan ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas dan hasil rapat koordinasi terbatas Menteri ditetapkan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Presiden menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan Program Paket Ekonomi, Stimulus Ekonomi, serta berbagai program strategis lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, diperlukan penguatan monitoring terhadap realisasi anggaran serta tindak lanjutnya, termasuk penyelesaian berbagai hambatan (*debottlenecking*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan usaha. Satgas P2SP dibentuk dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai upaya percepatan penyelesaian Program Strategis Pemerintah.

Sebagai penguatan dalam pelaksanaan tugas tersebut melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 606 Tahun 2025 dibentuklah 3 (tiga) kelompok

Kerja dan 1 (satu) Unit Pendukung yang terdiri dari:

- Kelompok Kerja (POKJA) I: Bidang Monitoring Realisasi Anggaran;
- Kelompok Kerja (POKJA) II: Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (*Debottlenecking*);
- Kelompok Kerja (POKJA) III: Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum;
- Unit Pendukung Sekretariat Satgas;

Pelaporan aduan kanal *debottlenecking* Satgas P2SP telah diluncurkan pada Desember 2025 dapat diakses melalui laman <https://lapor.satgasp2sp.go.id/> sebagai wadah aduan Masyarakat dimana seluruh aduan yang masuk pada laman ini akan ditindaklanjuti oleh Satgas P2SP. Kanal ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan ketentuan setiap pelapor dapat menyampaikan maksimal dua isu pengaduan yang wajib disertai dengan bukti pendukung. Hingga akhir tahun 2025 Satgas P2SP telah menyelesaikan aduan sampai tahap sidang yang dipimpin oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas P2SP sebanyak 3 (tiga) aduan dari sebanyak 19 (Sembilan belas) aduan telah diterima melalui kanal.

b. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Akses pembiayaan

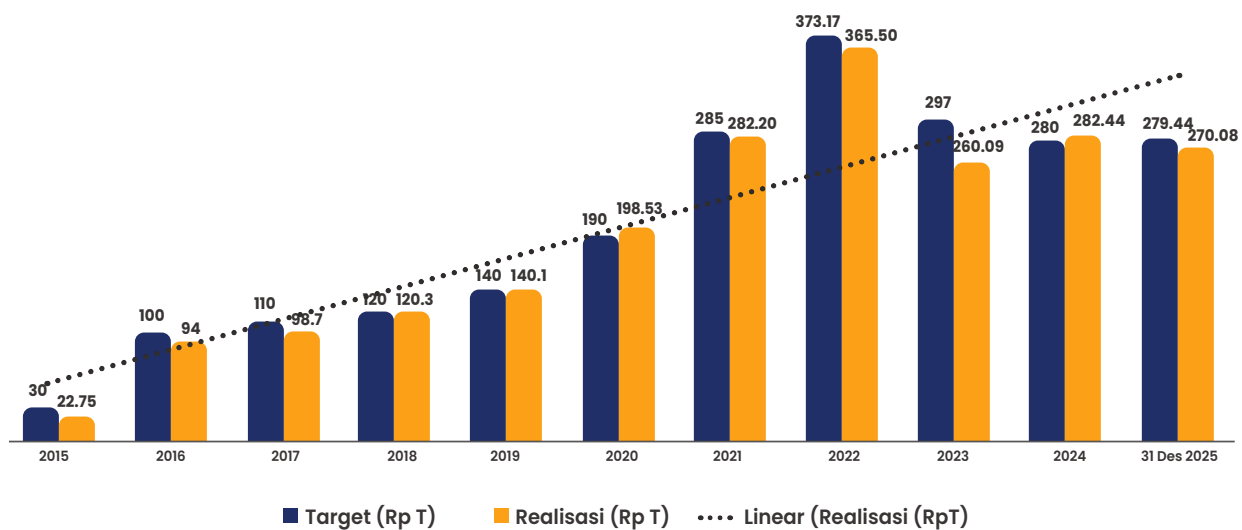
Banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memiliki bisnis yang layak (*feasible*), namun tidak punya agunan tambahan yang cukup atau belum memenuhi persyaratan teknis perbankan (*bankable*). KUR hadir sebagai solusi di mana pemerintah menjamin risiko kredit tersebut melalui perusahaan penjamin, diharapkan melalui KUR isu terkait akses pembiayaan dan modal kerja dapat berkurang secara signifikan.



Bauran Kebijakan Penguatan Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

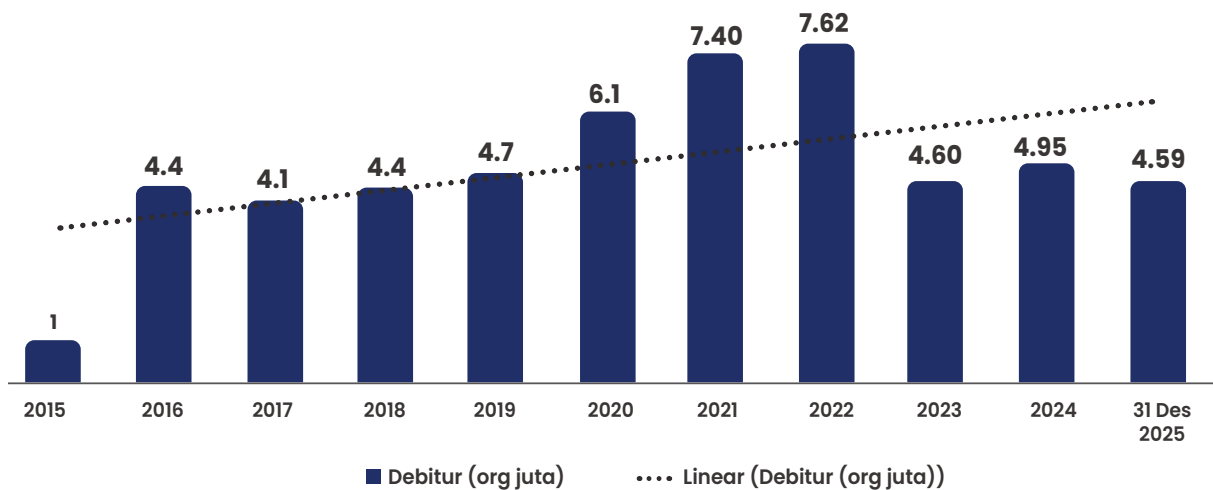
Pada Tahun 2025 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai Ketua Komite Pembiayaan UMKM yang didalam termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penyaluran KUR yang berprioritas terhadap sektor produksi sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkuat daya saing UMKM, serta menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan. Guna mendukung produktivitas pelaku industri padat karya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerbitkan Permenko Nomor 4 tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya. Pada tahun 2025, juga

dilakukan perluasan akses khususnya untuk sektor produksi melalui relaksasi kebijakan KUR yang difokuskan untuk petani tebu rakyat dan brigade pangan. Pada Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM juga menetapkan target debitur KUR baru sebesar 40% dan debitur KUR graduasi/naik kelas sebesar 20% dari total debitur KUR. Komposisi indikator tersebut diharapkan mampu menggambarkan efektivitas penyaluran KUR secara komprehensif, baik dari sisi perluasan akses, peningkatan kapasitas UMKM, maupun penguatan sektor produktif. Penyaluran KUR ini mencerminkan arah kebijakan pembiayaan UMKM yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi berkualitas.



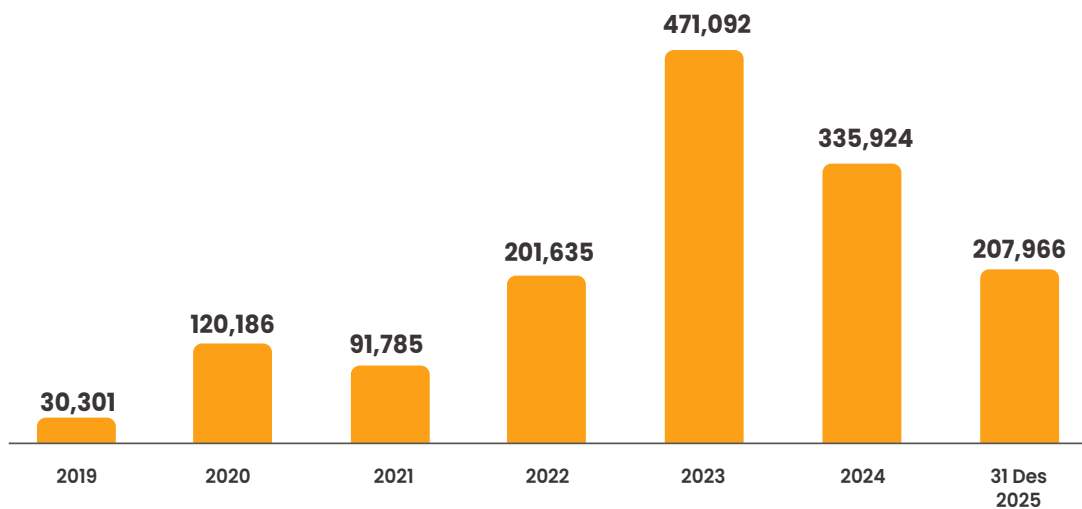
Gambar 3.5. Target dan Realisasi KUR per Tahun (Rp Triliun)

Pada periode Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR tercatat sebesar Rp 270,08 triliun (96,40% dari target tahun 2025 sebesar Rp 280,15 triliun) dan diberikan kepada 4,59 juta debitur. Berdasarkan jenis KUR, penyaluran KUR paling banyak disalurkan pada KUR Mikro (69,83%), diikuti KUR Kecil (29,98%), KUR Super Mikro (0,16%), KUR Penempatan PMI (0,03%), dan KUR Khusus (0,006%).



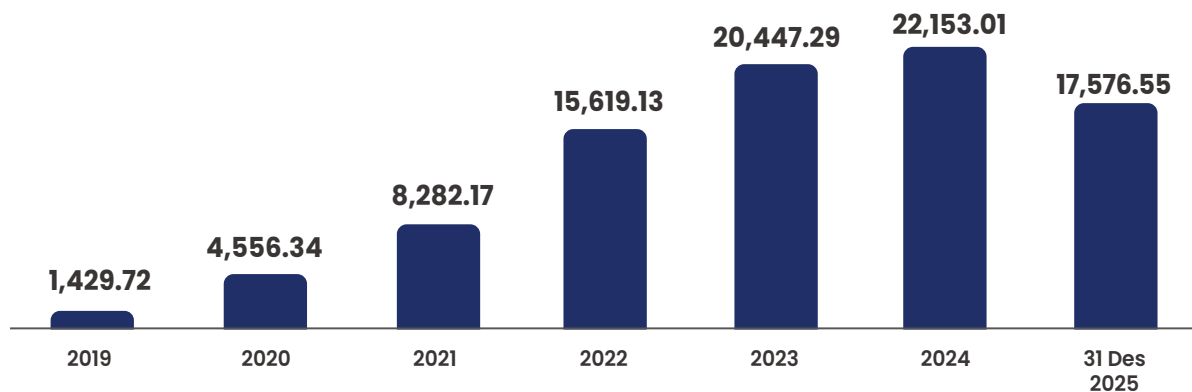
Gambar 3.6. Debitur KUR per Tahun (orang juta)

Penyaluran KUR Syariah Tahun 2025



Gambar 3.7. Penyaluran KUR Syariah Tahun 2025

Pemerintah juga mengaktifkan penyalur KUR Syariah skema subsidi margin yang aktif saat ini meliputi Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh Syariah, BJB Syariah, Bank Nano Syariah, UUS BPD Jawa Tengah, UUS BPD Kalimantan Selatan, UUS BPD Sumsel Babel, UUS BPD Sulselbar, UUS BPD Sumatera Barat, UUS BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, UUS Bank DKI, BPD Riau Kepri Syariah, UUS BPD Jatim, UUS BPD Kaltimara, UUS BPD Kalbar dan PT Pegadaian Syariah. Proporsi target penyaluran KUR Syariah sebesar 7,08% dari target penyaluran KUR nasional tahun 2025.

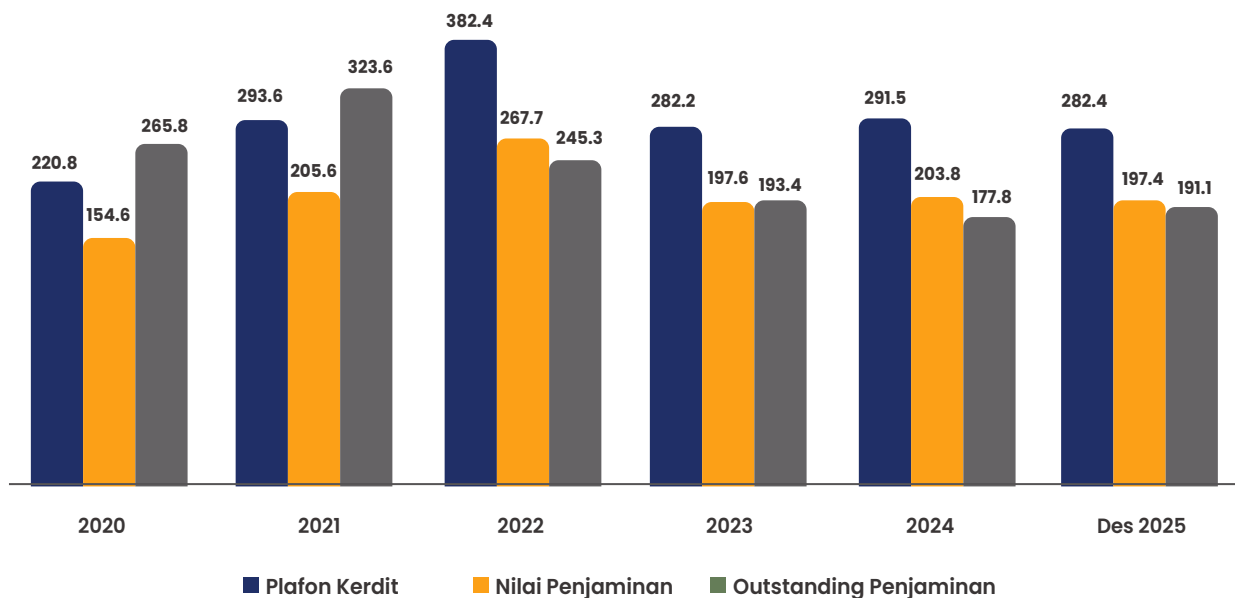


Gambar 3.8. Jumlah Debitur KUR Syariah Tahun 2025

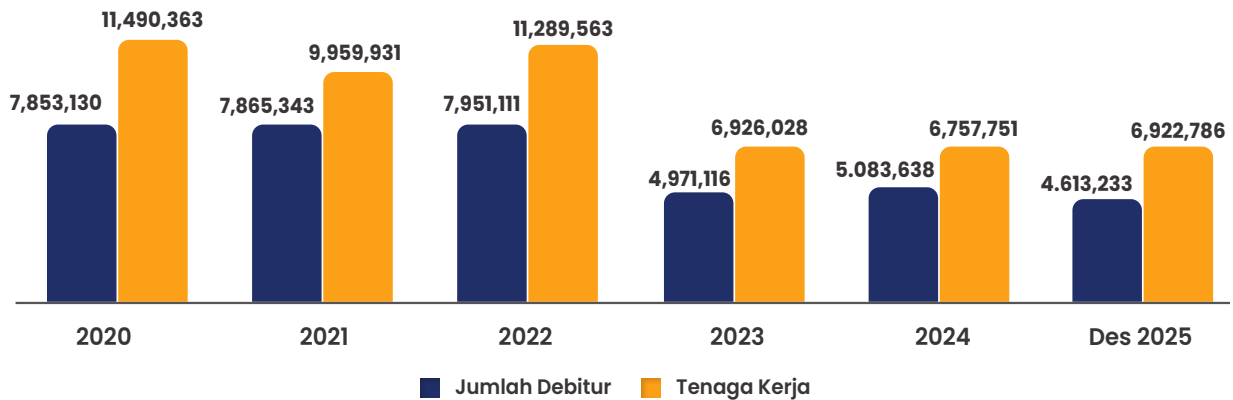
Sedangkan penyaluran KUR tahun 2025 s.d. 31 Desember 2025 senilai Rp 17,58 triliun (88,50% dari target penyaluran KUR syariah Rp19,86 triliun) kepada 207.966 debitur, dengan rincian KUR Super Mikro Rp 369,19 miliar (2,10% dari total penyaluran), KUR Mikro Rp5,99 triliun (34,07% dari total penyaluran) KUR Kecil Rp11,21 triliun (63,79% dari total penyaluran), dan KUR Penempatan PMI Rp7,63 miliar (0,043% dari total penyaluran).

Kinerja Penjaminan/Pertanggungungan KUR

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, nilai penjaminan KUR sebesar Rp 197,4 triliun dari plafon kredit sebesar Rp 282,4 triliun dengan *outstanding* penjaminan sebesar Rp191,1 triliun. **Penjaminan KUR telah diberikan kepada 4,6 juta debitur, serta telah menyerap sebesar 6,9 juta tenaga kerja.**

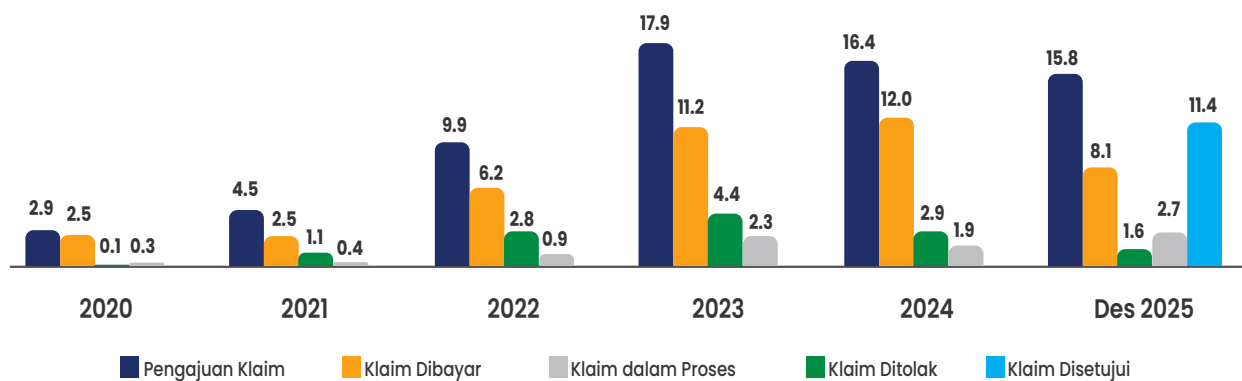


Gambar 3.9. Kinerja Penjaminan/Pertanggungungan KUR Tahun 2025 (Rp Triliun)



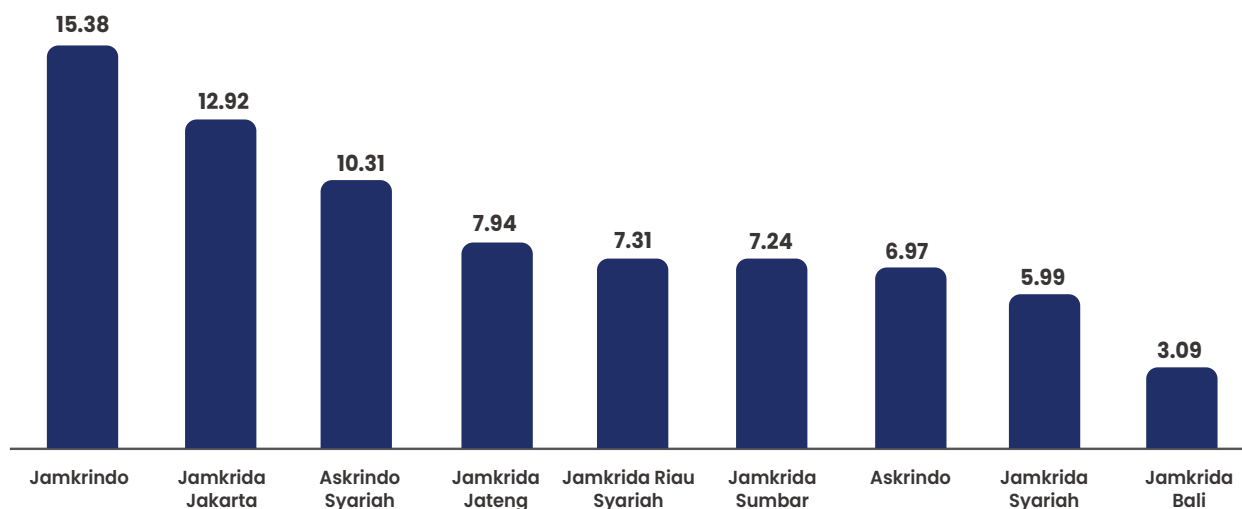
Gambar 3.10. Debitur dan Tenaga Kerja Yang Terserap (orang)

Pengajuan klaim sebesar Rp15,8 triliun dengan klaim disetujui Rp11,4 triliun, klaim dibayar Rp8,1 triliun, klaim dalam proses Rp1,6 triliun, dan klaim ditolak Rp2,7 triliun.



Gambar 3.11. Kinerja Klaim (Rp Triliun)

Seluruh *gearing ratio* penjamin KUR berada pada kisaran dibawah 40 kali, mencerminkan kapasitas penjaminan yang masih aman dan *prudent*.



Gambar 3.12. Gearing Ratio Lembaga Penjamin/Asuransi KUR Tahun 2025 (kali)



Kondisi penjaminan KUR masih terjaga terlihat dari NPG sebesar 2,8%, *claim ratio* 62,8%, dan *recovery rate* 27,8%.

Penguatan Efektivitas Penyaluran KUR

Dalam memperkuat efektivitas penyaluran KUR yang tidak hanya dilihat dari total KUR yang terealisasi, Kemenko Perekonomian menggunakan beberapa indikator lain untuk melihat efektivitas penyaluran KUR diantaranya Penyaluran KUR sektor Produksi, Debitur Baru KUR, dan Debitur KUR Graduasi. Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Desember 2025, realisasi KUR sebagai berikut:

- Persentase **penyaluran KUR di sektor produksi** sebesar **60,71%** dari total target penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp255 Triliun;
- Persentase **debitur baru KUR** sebesar **53,47%** dari total debitur selama 1 (satu) tahun sebanyak 4,59 juta debitur;
- Persentase **Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas** sebesar **28,7%** dari total debitur sebanyak 4,59 juta debitur;

c. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Strategi dalam penguatan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi hal yang penting mengingat BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan negara diluar dari Pajak. Pemerintah mendorong peningkatan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional melalui penguatan tata Kelola perusahaan (*good corporate governance*). Upaya yang dilakukan ini mencakup optimalisasi asset dan portofolio usaha, program penyalur KUR yang dilakukan oleh Bank BUMN, serta penyelesaian penugasan langsung pemerintah. Selain itu, BUMN juga diarahkan untuk memperkuat perannya sebagai agen Pembangunan

(*agent of development*) melalui penyelesaian penugasan langsung proyek strategis pemerintah.

Bauran Kebijakan Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mendorong Realisasi Belanja Modal BUMN

Sebagai salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, pemerintah merencanakan investasi total Rp7.627,13–7.694,60 triliun dan dari jumlah tersebut BUMN diharapkan dapat berkontribusi sebesar 5,48–5,73% atau sekitar Rp 417,91–440,76 triliun. Investasi BUMN ditujukan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang diarahkan pada sektor-sektor strategis yaitu Kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, Pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sektor keuangan. Terdapat 21 dari total 64 BUMN di bawah koordinasi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) yang dilakukan monitoring capaian belanja modal dengan nilai sebesar Rp 373,58 triliun atau 166,31% dari target.

Belanja modal BUMN yang dilakukan monitoring mayoritas diperuntukkan untuk pengembangan serta perawatan dari infrastruktur serta utilitas alat utama bisnis, perbaikan tata kelola Perseroan, serta peningkatan operasional untuk mencapai target perseroan.

Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Penugasan pemerintah kepada BUMN akan diarahkan agar BUMN dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti pemerataan

ekonomi, ketahanan energi, hilirisasi industri dan pengembangan infrastruktur. Penguatan fungsi BUMN melalui penugasan pemerintah juga akan membawa BUMN Indonesia sejajar dengan praktik terbaik global dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN. Sebagai berikut penugasan khusus pemerintah:

Sektor	Penugasan
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	• Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui diskon PJP2U & PJP4U • Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	• Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) • Penyediaan & Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) • Penyediaan & Pendistribusian Isi Ulang LPG Tabung 3 kg • Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran • Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Diskon 50%) • Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu) • Melaksanakan Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Pipa Gas Bumi WNTS-Pemping
Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	• Perluasan lahan tebu • Peningkatan produksi gula • Peningkatan rendemen gula
Sektor Infrastruktur dan Logistik	• Percepatan penyelesaian pembangunan berbagai seksi Jalan Tol Trans Sumatera • Diskon Tarif Tol dan Tarif Transportasi dalam Rangka HBKN Lebaran dan Periode Liburan Sekolah 2025
Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis	• Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya • Pelaksanaan penugasan pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bulion

d. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan

Penguatan nilai transaksi dan daya saing perdagangan merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan volume dan nilai transaksi perdagangan, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi produk daerah agar mampu bersaing di pasar domestik maupun regional. Upaya yang dilakukan ini mencakup optimalisasi ekonomi digital, optimalisasi

ekspor barang dan jasa, serta penguatan perdagangan besar dan eceran. Dengan demikian, diharapkan sektor perdagangan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bauran Kebijakan Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan Penguatan Ekonomi Digital

Digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional perlu terus diakselerasi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan.



Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi ekonomi-keuangan digital secara ritel penting untuk kemudahan bertransaksi sehari-hari secara cepat, mudah, dan biaya yang lebih murah, sehingga memperluas ekonomi dan keuangan inklusif untuk rakyat. Demikian pula digitalisasi sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*) perlu terus dikembangkan, termasuk eksperimentasi penerbitan *Central Bank Digital Currencies* (CBDC) dan Aset Keuangan Digital (tokenisasi aset). Kerja sama antarnegara dalam sistem pembayaran digital, termasuk konektivitas infrastruktur pembayaran (ritel dan *wholesale*), perlu terus dijalin dan diperluas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengukur sektor ekonomi digital dengan melihat melalui transaksi e-commerce, dimana tahun 2025 telah dilakukan 2,73 miliar faktur transaksi diatas target yang telah ditetapkan sebesar 2,4 miliar faktur transaksi.

Dalam rangka penguatan ekonomi digital, Indonesia menjajaki berbagai kerja sama ekonomi digital adalah satunya adalah *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA). Sampai pada akhir Tahun 2025 perkembangan terkait dengan konsep *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) telah mencapai putaran ke-15 (sementara) telah menyepakati 98 dari total 156 paragraf atau sebesar 62,8%, serta mencapai 96 dalam kategori *Substantial Conclusion* dari 131 paragraf yang ditargetkan, atau sebesar 73,28% melebihi target 70% yang ditetapkan. Terdapat 23 artikel yang sudah disepakati, dengan catatan satu artikel (*Cybersecurity Cooperation*) dibuka kembali untuk pembahasan lebih lanjut serta beberapa isu sensitif terkait aliran data lintas batas (*cross-border data flows, source code, dan location of computing facilities*) yang

masih memerlukan penyelesaian. Sebagai perbandingan pada DEFA putaran ke-14, Indonesia telah menyepakati 115 dari total 156 paragraf atau sebesar 73,71%, meningkat sebesar 12,31% dari putaran sebelumnya.

Penguatan Ekspor Barang dan Jasa

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai Dewan Pengarah Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023. Untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional. Satgas ini melakukan perumusan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan, serta menyelesaikan permasalahan yang ada agar peningkatan nilai ekspor nasional pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

Tahun 2025 adalah sebesar 22,85% dengan nilai ekspor barang dan jasa Rp5.442,3 triliun dan nilai pendapatan domestik bruto nasional sebesar Rp23.821,1 triliun. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan tren surplus selama 5 tahun terakhir yaitu sejak Mei 2020 (68 bulan berturut-turut) dengan nilai pada tahun 2025 sebesar USD 41,05 miliar. Pada tahun 2025, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03% (yoy) dengan sektor dominan adalah nonmigas (71,39%). Surplus perdagangan nonmigas sepanjang tahun 2025 sebagian besar ditopang oleh lima komoditas utama,

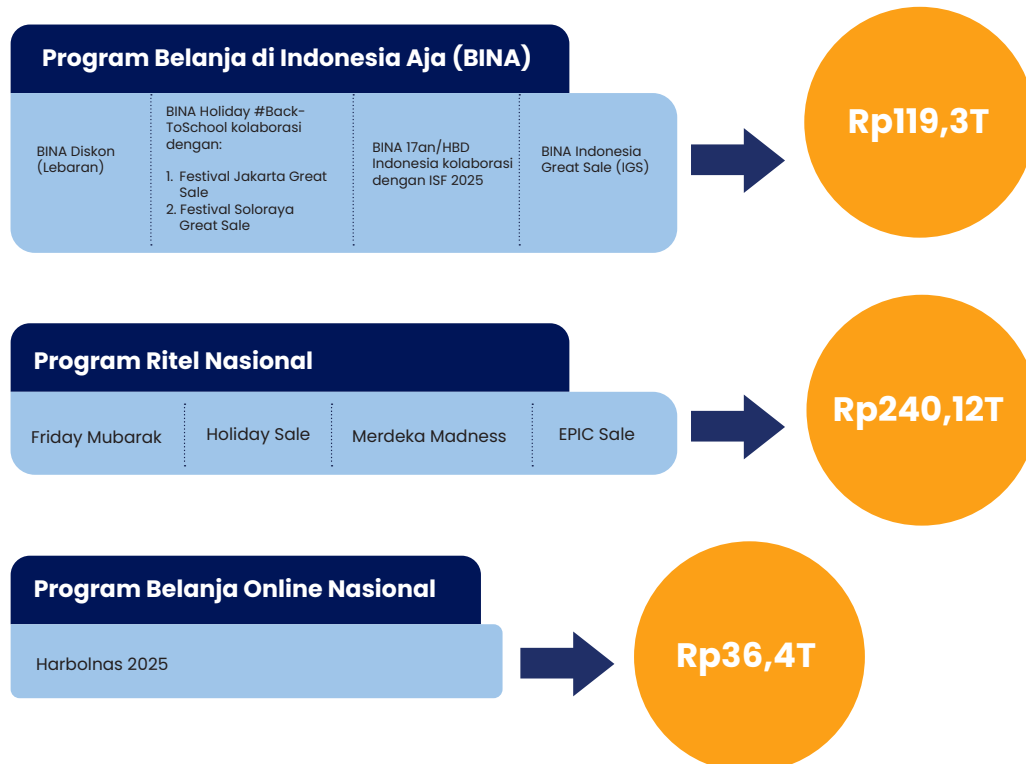
yaitu lemak dan minyak hewani/nabati (USD 34,06 miliar), bahan bakar mineral (USD 28,01 miliar), besi dan baja (USD 18,44 miliar), produk nikel dan barang daripadanya (USD 9,63 miliar), serta alas kaki (USD 6,66 miliar).

Penguatan Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor perdagangan dalam negeri adalah salah satu indikator yang memperlihatkan kemajuan suatu perekonomian terutama dalam menjaga stabilitas distribusi barang, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Perdagangan besar dan eceran bukan hanya mencerminkan aktivitas transaksi antar pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menjadi indikator vital terhadap

kinerja ekonomi daerah melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai kontribusi sektor ini menandakan semakin kuatnya daya beli masyarakat, berkembangnya jaringan distribusi, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem logistik dan niaga di wilayah tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki fokus pada sektor ini, salah satu programnya adalah Program Belanja online Nasional (Harbolnas) dimana capaiannya pada tahun 2025 sebesar Rp 36,4 triliun dengan 45,6% diantaranya merupakan produk lokal. Selain itu, juga ada juga Program Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan program Ritel Nasional (Friday Mubarak, Holiday Sale, Merdeka Madness, EPIC Sale).

Realisasi Program Belanja Nasional Tahun 2025



e. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Penguatan Daya Saing Kawasan

Dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilaksanakan kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian penguatan daya saing kawasan yang difokuskan pada percepatan pengembangan Kawasan



Strategis Ekonomi serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan perencanaan pusat dan daerah, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta percepatan penyelesaian berbagai hambatan implementasi di lapangan. Penguatan koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi berkala, fasilitasi penyelesaian permasalahan, serta pendampingan kepada pemerintah daerah dan pengelola kawasan.

Penguatan Daya Saing Kawasan

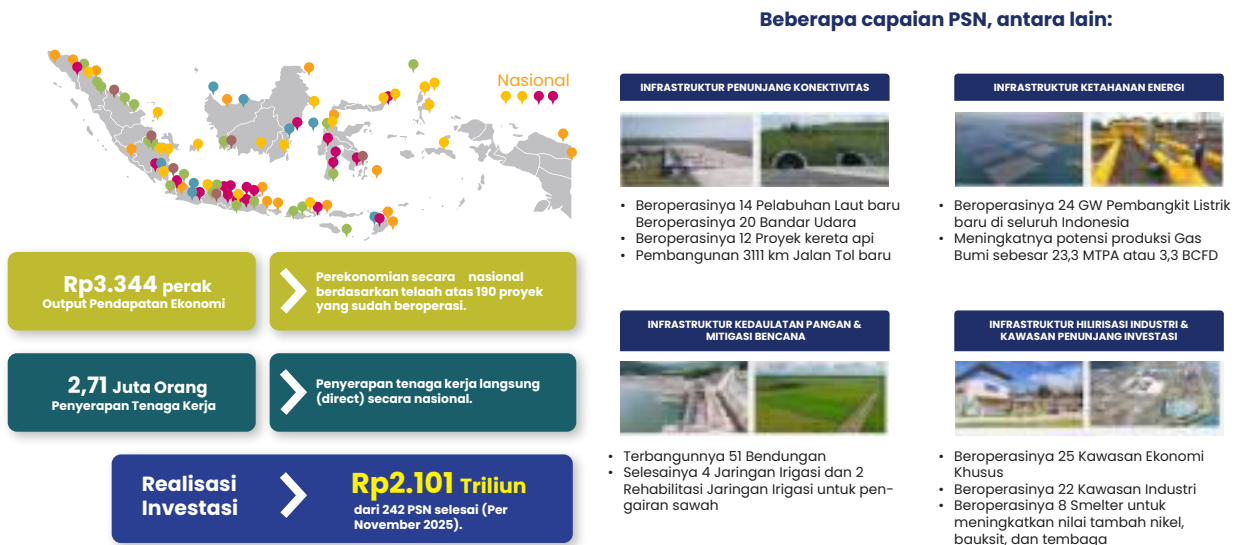
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, telah dilaksanakan program Penguatan Daya Saing Kawasan yang difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi. Pada tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelesaikan target dalam penyelesaian Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang telah memenuhi kriteria dan beroperasi secara efektif. Kawasan yang telah terselesaikan yaitu: pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik, Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, dan Kawasan Industri Konawe yang sudah dalam tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif. Capaian lainnya berhasil didorong untuk peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Batang dengan nilai investasi sebesar Rp 23 Triliun, total penyerapan tenaga kerja sebesar 16.808 orang dan total tenant industri sebanyak 39 tenant.

Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pelaksanaan dan pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini bertujuan untuk memastikan proyek-proyek prioritas nasional dapat berjalan sesuai target waktu, mutu, dan manfaat, serta memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. Penguatan daya saing melalui PSN dilakukan dengan mendorong keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peran koordinasi dan pengendalian menjadi kunci dalam memastikan tidak terjadi tumpang tindih program, serta dalam mempercepat penyelesaian berbagai hambatan, baik yang bersifat administratif, teknis, pendanaan, maupun regulasi. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis terkait. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil menyelesaikan 6 dari target 12 PSN yang telah ditetapkan dengan nilai investasi Rp63,705 Triliun. Capaian PSN di tahun 2025 ini menambah catatan keberhasilan pemerintah dalam menguatkan infrastruktur dari tahun ketahun sebagaimana tercermin pada infografis dibawah ini.

Capaian Proyek Strategis Nasional

Saat ini 242 proyek telah dibangun merata di seluruh pulau di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan searah dengan fokus Program Strategis serta Asta Cita Presiden.



Gambar 3.13. Capaian Proyek Strategis Nasional.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun pelaporan, pencapaian indikator Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan capaian yang dipengaruhi secara signifikan oleh pelaksanaan bauran kebijakan dan program pada berbagai bidang guna mendorong peningkatan produktivitas nasional, perluasan investasi, serta penciptaan nilai tambah ekonomi:

- Keberhasilan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh naiknya konsumsi rumah tangga karena konsumsi merupakan penggerak utama aktivitas ekonomi. Ketika masyarakat lebih banyak membelanjakan pendapatannya, maka roda perekonomian akan berputar lebih cepat dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal lain yang juga memperkuat konsumsi Masyarakat diantaranya adalah implementasi paket stimulus ekonomi yang mendorong daya beli Masyarakat, seperti diskon tiket pesawat.

- Keberhasilan pertumbuhan ekonomi juga dapat ditunjukkan melalui meningkatnya investasi sebagai salah satu komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan meningkatnya investasi, aktivitas ekonomi menjadi lebih dinamis. Sektor industri, konstruksi, dan infrastruktur mengalami pertumbuhan yang pada akhirnya memperkuat struktur ekonomi nasional. Hal ini menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh konsumsi, tetapi juga oleh ekspansi kapasitas produksi dan peningkatan kepercayaan dunia usaha.
- Konsep pendekatan pengeluaran, ekspor neto merupakan salah satu komponen penting yang mencerminkan kinerja sektor eksternal suatu negara. Adanya peningkatan ekspor barang dan jasa memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika permintaan global terhadap komoditas unggulan meningkat. Ketika nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor, maka terjadi surplus perdagangan yang memperkuat pertumbuhan PDB.



- d. Pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN dilakukan melalui transformasi tata kelola, restrukturisasi bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan investasi di sektor prioritas. BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan penyediaan layanan publik strategis. Peningkatan kinerja korporasi BUMN serta kontribusi terhadap penerimaan negara dan aktivitas ekonomi nasional turut memperkuat struktur perekonomian.
- e. Ekonomi digital memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan transaksi elektronik, digitalisasi proses bisnis, serta pertumbuhan sektor jasa berbasis teknologi. Perkembangan platform perdagangan daring, layanan keuangan digital, serta pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor produksi telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi digital menjadi sumber pertumbuhan baru (*engine of growth*) untuk memperkuat perekonomian.
- f. Digitalisasi juga berperan dalam memperluas akses pasar internasional bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui pemanfaatan platform digital dan perdagangan lintas batas (*cross-border e-commerce*). Selain itu, peningkatan ekspor jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan kontribusi terhadap neraca perdagangan nasional.
- g. Penguatan daya saing kawasan dilaksanakan melalui sinkronisasi program lintas sektor, percepatan pembangunan infrastruktur strategis,

serta pengembangan kawasan prioritas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut mendorong peningkatan konektivitas, kelancaran arus logistik, dan peningkatan minat investasi di daerah.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target

Dalam pencapaian target kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2025, meskipun berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan dengan optimal, tetap terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Kendala-kendala ini perlu diidentifikasi dan ditangani dengan baik agar Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi selama pencapaian target kinerja:

- a. Belum optimalnya upaya yang dilakukan dalam program percepatan dikarenakan adanya pemenuhan terkait persyaratan dasar dan perizinan usaha. Sulitnya pemenuhan dokumen tersebut karena adanya perubahan struktur organisasi tata kelola Kementerian/Lembaga terkait.
- b. Salah satu kendala utama berasal dari kondisi ekonomi global yang melambat dan ketidakpastian geopolitik. Tidak hanya tekanan proteksionisme dan pembatasan perdagangan, tetapi juga perlambatan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama turut mengurangi permintaan ekspor Indonesia. Adanya perang dagang antara US dan China, serta kondisi geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan Amerika Latin turut menghambat kontribusi surplus neraca perdagangan terhadap PDB.
- c. Bank Indonesia melaporkan revisi target pertumbuhan kredit perbankan turun dari 11–13 % menjadi 8–11 %. Penurunan laju kredit ini menunjukkan adanya pengetatan

- likuiditas dan risiko yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi kemampuan sektor usaha — terutama UMKM — untuk berinvestasi atau memperluas usahanya.
- d. Meskipun konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, kecepatannya kadang lambat mengikuti perlambatan pendapatan riil masyarakat dan kenaikan harga barang tertentu. Hal ini mempengaruhi permintaan domestik yang seharusnya menjadi penopang utama PDB.
 - e. Sektor riil menghadapi hambatan seperti produktivitas rendah, kebutuhan peningkatan teknologi, serta perubahan struktur industri. Meskipun sektor manufaktur tumbuh, masih banyak tantangan dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas seiring otomasi dan perubahan permintaan global.
 - b. Mendorong dilakukannya sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong percepatan ekonomi. Di tengah tantangan global dan perlambatan beberapa sektor domestik, kebijakan yang diambil difokuskan pada penguatan permintaan dalam negeri, peningkatan investasi, serta stabilitas sistem keuangan.
 - c. Penguatan stabilitas ekonomi makro, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus memastikan sistem keuangan tetap stabil. Pengendalian inflasi, penguatan nilai tukar rupiah, serta dorongan terhadap penyaluran kredit produktif menjadi bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk menopang pertumbuhan.
 - d. Menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi menjadi prioritas agar konsumsi rumah tangga tetap tumbuh. Selain itu, berbagai program bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, serta penciptaan lapangan kerja terus diperkuat guna mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat.
 - e. Mendorong dilakukannya peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi fokus utama melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan program peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri serta transformasi struktur industri diarahkan pada hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi tinggi serta ekonomi hijau.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam upaya mencapai target Pertumbuhan Ekonomi tahun selanjutnya yang semakin baik, beberapa kendala telah teridentifikasi yang mempengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, pemerintah telah merancang serangkaian upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Berikut ini adalah beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi:

- a. Mendorong dilakukannya pemangkasan birokrasi dengan menerbitkan regulasi yang mampu mempermudah perizinan usaha agar proses setiap tahap perizinan bisa dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga mampu dengan cepat memberikan dampak terhadap perekonomian.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja Pertumbuhan Ekonomi yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025, efisiensi dalam penggunaan sumber daya menjadi faktor penting yang mendukung pencapaian tersebut. Efisiensi ini tidak hanya terlihat pada pengelolaan



anggaran, tetapi juga dalam penerapan teknologi yang mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat serta tepat. Dalam menghadapi tantangan Pertumbuhan Ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang terukur untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mendukung efisiensi dalam mencapai target kinerja:

- a. Pengelolaan anggaran dan belanja pemerintah harus tepat sasaran, fokus pada program yang memberikan dampak ekonomi terbesar, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor riil, dan pemberdayaan UMKM.
- b. Memanfaatkan adopsi teknologi modern, digitalisasi proses produksi, dan

peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat menghasilkan output lebih besar dengan input yang sama atau lebih sedikit.

- c. Penguatan koordinasi antar-lembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan pelaku usaha memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar, meminimalkan tumpang tindih program, dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya.
- d. Integrasi kebijakan fiskal dan moneter berperan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif seperti: pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah membantu menjaga daya beli masyarakat, sementara insentif investasi mendorong efisiensi alokasi modal di sektor produktif.



B.2.2**BIAYA LOGISTIK**

Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa. Pencapaian biaya logistik menggambarkan seberapa besar pengaruh biaya pengiriman dan penyimpanan barang terhadap perekonomian suatu negara. Biaya logistik yang tinggi dapat mengurangi daya saing negara tersebut dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini, penurunan biaya logistik yang efisien dapat menghasilkan harga barang yang lebih kompetitif di pasar global. Dengan kata lain, semakin efisien biaya logistik suatu negara, semakin besar peluang negara tersebut untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama BAPPENAS dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen yakni Biaya Transportasi, Biaya Pergudangan, Biaya Penyimpanan Persediaan (*Inventory*), dan Biaya Administrasi. Biaya logistik diukur dengan menghitung total biaya logistik yang diperlukan untuk mendistribusikan barang dari titik asal hingga konsumen akhir, yang mencakup beberapa komponen biaya penting. Menurut

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BAPPENAS dan BPS, pengukuran biaya logistik dilakukan secara makro, mencakup biaya transportasi, pergudangan, penyimpanan persediaan, dan administrasi. Komponen-komponen biaya ini dihitung dalam persentase terhadap PDB suatu negara, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai beban logistik dalam perekonomian.

Tujuan utama dari pengukuran biaya logistik adalah untuk menentukan seberapa efisien sistem logistik suatu negara. Indikator biaya logistik ini membantu pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi biaya logistik secara keseluruhan, seperti memperbaiki sistem transportasi, meningkatkan infrastruktur pergudangan, dan mengurangi hambatan administratif. Dengan demikian, pengukuran biaya logistik berfungsi untuk menilai dan meningkatkan efisiensi sistem distribusi barang dalam suatu negara, yang pada gilirannya akan memperbaiki daya saing ekonomi nasional.

Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global.



CAPAIAN KINERJA BIAYA LOGISTIK

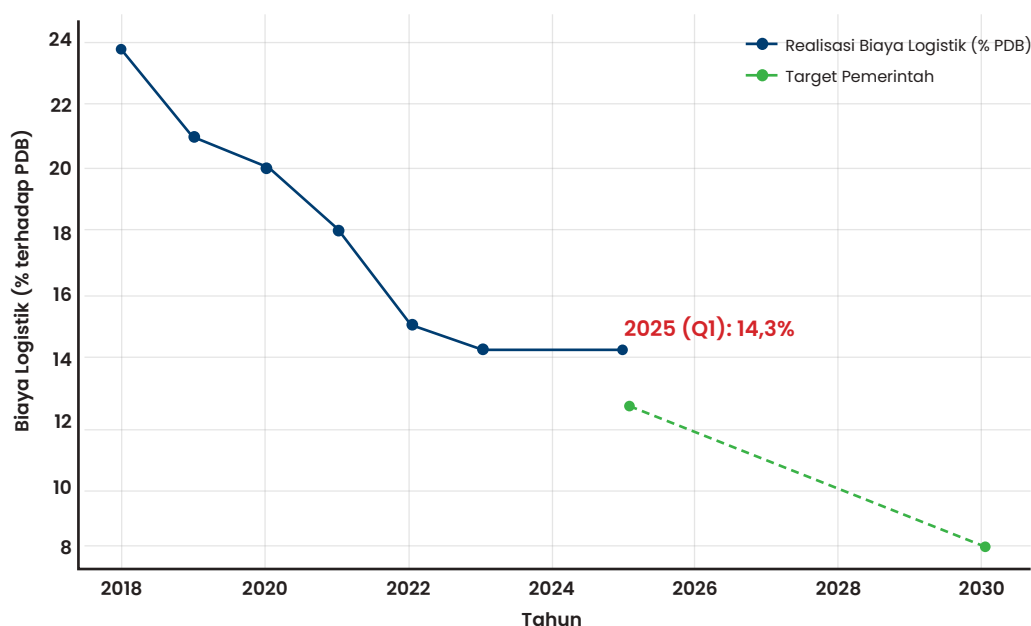
Tabel 3.5. Capaian Biaya Logistik Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.2	Biaya Logistik	Persentase	13,52% terhadap PDB	N/A	N/A

Hingga saat laporan ini disusun data resmi terkait realisasi biaya logistik Tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik belum tersedia, sehingga pengukuran capaian indikator masih bersifat sementara dan mengacu pada data periode sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja biaya logistik dilakukan dengan menggunakan data triwulanan terakhir yang telah dipublikasikan sebagai gambaran sementara kondisi biaya logistik nasional. Realisasi biaya logistik terakhir dirilis Pada Tahun 2023, biaya logistik Indonesia tercatat berada pada kisaran 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan bahwa beban logistik nasional masih relatif tinggi jika dibandingkan

dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang pada umumnya telah mampu menekan biaya logistik hingga berada di bawah 10 persen dari PDB. Meskipun demikian, terdapat tren perbaikan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada Tahun 2018 biaya logistik Indonesia masih berada pada level yang sangat tinggi, yaitu sekitar 23,8 persen terhadap PDB. Penurunan tersebut mencerminkan adanya upaya perbaikan sistem logistik nasional, namun hingga saat ini tantangan struktural dan operasional—seperti keterbatasan infrastruktur, kompleksitas distribusi wilayah kepulauan, serta efisiensi rantai pasok masih menjadi faktor yang membebani kinerja logistik nasional.

Grafik 3.1. Biaya Logistik Indonesia terhadap PDB (2018–2025) dan Target Penurunan



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga 2025. Pada Tahun 2018, persentase biaya logistik nasional tercatat masih sangat tinggi, yaitu sekitar 23,8 persen terhadap PDB, yang mencerminkan belum optimalnya sistem logistik nasional pada saat itu. Seiring dengan berbagai upaya perbaikan kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan efisiensi rantai pasok, biaya logistik nasional secara bertahap mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hingga Tahun 2025, biaya logistik Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 14,29 persen terhadap PDB, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam penguatan sistem logistik nasional, meskipun masih berada di atas target jangka panjang yang diharapkan pemerintah.

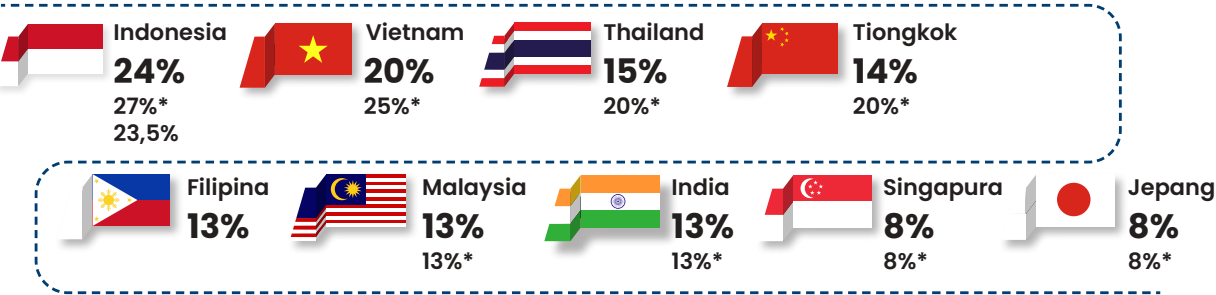
Namun demikian, grafik juga menunjukkan adanya lonjakan biaya logistik pada periode triwulan tertentu, yang antara lain disebabkan oleh pembatasan mobilitas truk saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya kelancaran distribusi barang dan meningkatnya biaya operasional logistik. Tingginya biaya logistik nasional tersebut berimplikasi pada menurunnya daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor, karena harga produk menjadi kurang kompetitif. Selain itu, biaya logistik yang tinggi menghambat efisiensi rantai pasok dan berpotensi menurunkan minat investasi, khususnya di sektor perdagangan dan manufaktur. Inefisiensi distribusi juga memicu disparitas harga antarwilayah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan inflasi serta mengganggu stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Gambar 3.14. National Logistics Ecosystem (NLE) Biaya Logistik di Beberapa Negara

National Logistics Ecosystem (NLE)

Biaya Logistik di Beberapa Negara

Sumber:
World Bank (2020)
*Bahagia SN (2013)
**ALFI (2017)



Latar Belakang

Biaya logistik Indonesia lebih tinggi dari negara tetangga; performa LPI dan Trading Across Border stagnan mengindikasikan inefisiensi.

Kondisi

- Biaya logistik/PDB tinggi, bahkan tertinggi di kawasan.
- Skor LPI dan EoDB stagnan (2016–2020).
- Reliability dan timeliness, sebagai indikator utama dari efisiensi logistik perlu ditingkatkan.

Penyebab

- Duplikasi repetisi dokumen.
- Asymmetric Information dalam supply & demand.
- Ketiadaan platform hulu-hilir.
- Kualitas infrastruktur belum memadai.

Urgensi

Perlu terobosan tata kelola logistik nasional.

Sumber: World Bank (2023)



Analisis ini menggunakan data Tahun 2023 sebagai rujukan utama karena hingga saat ini data biaya logistik nasional yang terukur secara makro dan dapat dibandingkan lintas negara terakhir kali dirilis pada periode tersebut. Keterbatasan ketersediaan data resmi Tahun 2024–2025 menjadikan penggunaan data Tahun 2023 sebagai pendekatan paling relevan untuk menggambarkan posisi relatif Indonesia dalam ekosistem logistik regional dan global. Berdasarkan data tersebut, biaya logistik Indonesia tercatat berada pada kisaran 24 persen terhadap PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti Vietnam sekitar 20 persen, Thailand 15 persen, dan Tiongkok 14 persen, serta tertinggal signifikan dari negara dengan sistem logistik yang lebih efisien seperti Malaysia dan Filipina yang berada di kisaran 13 persen, serta Singapura dan Jepang yang telah mampu menekan biaya logistik hingga sekitar 8 persen terhadap PDB. Perbedaan ini mencerminkan masih adanya kesenjangan efisiensi sistem logistik Indonesia, baik dari sisi tata kelola, integrasi layanan, maupun kualitas infrastruktur dan aliran informasi logistik. Oleh karena itu, meskipun data yang digunakan berasal dari Tahun 2023, perbandingan ini tetap relevan sebagai dasar analisis kebijakan karena mencerminkan tantangan struktural yang masih dihadapi Indonesia dan menjadi pijakan dalam merumuskan agenda reformasi logistik nasional, termasuk melalui penguatan *National Logistics Ecosystem* (NLE), untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi ke depan.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET BIAYA LOGISTIK NASIONAL

a. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut

Biaya transportasi logistik memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian

negara. Tingginya biaya transportasi akan berimplikasi pada tingginya harga barang dan menurunnya daya saing produk domestik di pasar global. Oleh karena itu, pengelolaan biaya transportasi yang efisien sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung sektor perdagangan. Dengan memperbaiki infrastruktur transportasi dan kebijakan yang ada, Indonesia dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Target biaya transportasi logistik terhadap PDB Tahun 2025 adalah 8,7% yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin rendah biaya logistik berarti semakin baik kinerjanya. Capaian proyeksi biaya transportasi logistik secara keseluruhan terealisasi sebesar 10,26% pada tahun 2025. Secara lebih spesifik, sampai dengan akhir tahun 2025 Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB sebesar 6,61% dari PDB atau telah tercapai sebesar 54,16% dari target tahunan yaitu 3,58%.

Bauran Kebijakan Penurunan Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut

Pada Tahun 2025, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Penguatan Logistik Nasional melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan pilar strategi sebagai berikut:

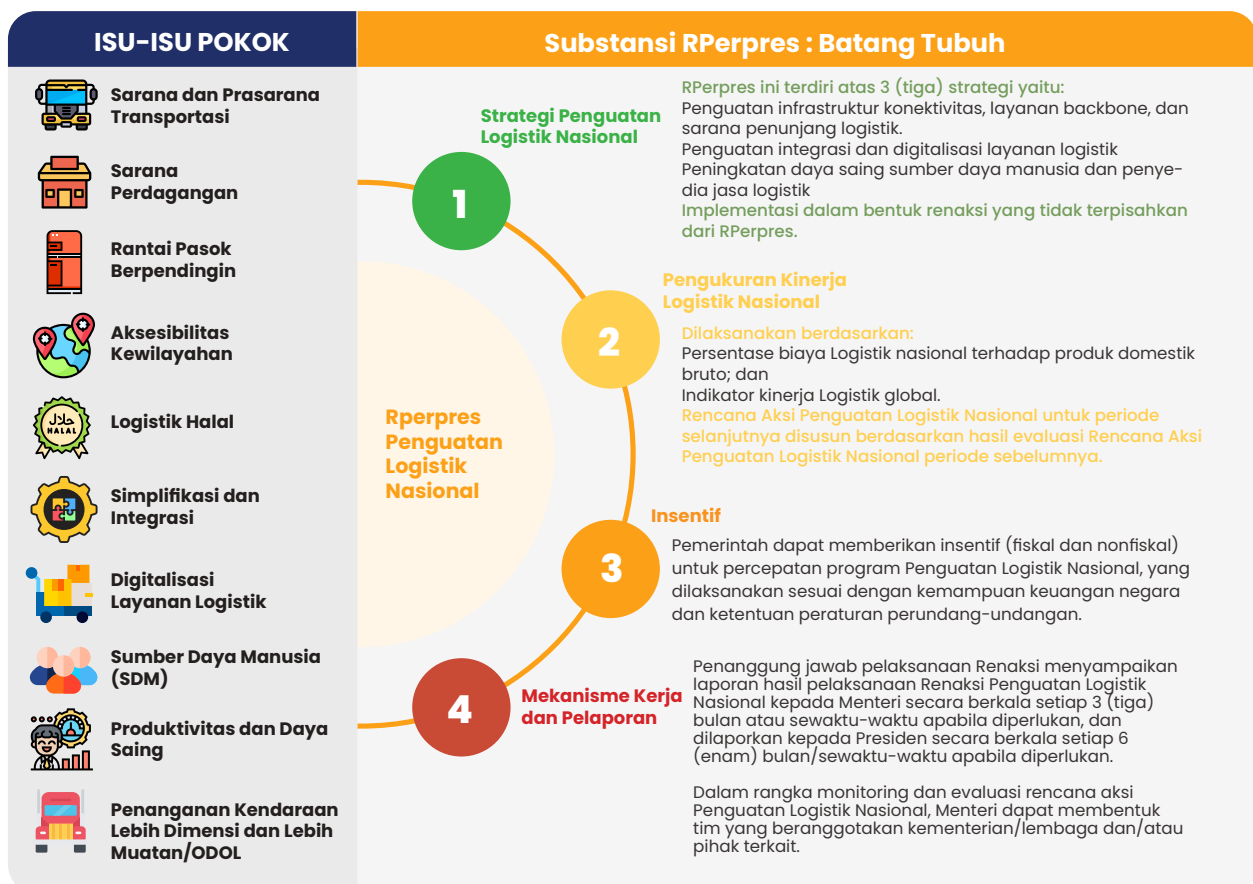
- penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang Logistik
- penguatan integrasi dan digitalisasi Layanan Logistik
- peningkatan daya saing sumber daya manusia dan Penyedia Jasa Logistik

Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah juga sangat penting dalam mendukung efisiensi biaya transportasi. Kebijakan yang mempermudah investasi infrastruktur, mempercepat perizinan, dan mengurangi biaya operasional angkutan dapat menciptakan sistem logistik yang lebih efisien. Secara rutin, pengukuran biaya transportasi logistik terhadap PDB dilakukan untuk menilai kinerja sektor transportasi dalam perekonomian. Evaluasi ini membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung pencapaian target Indeks Biaya Logistik yang lebih rendah dan lebih efisien.

Perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional

Perumusan RPerpres tentang Penguatan Logistik Nasional pada Tahun 2025 diarahkan

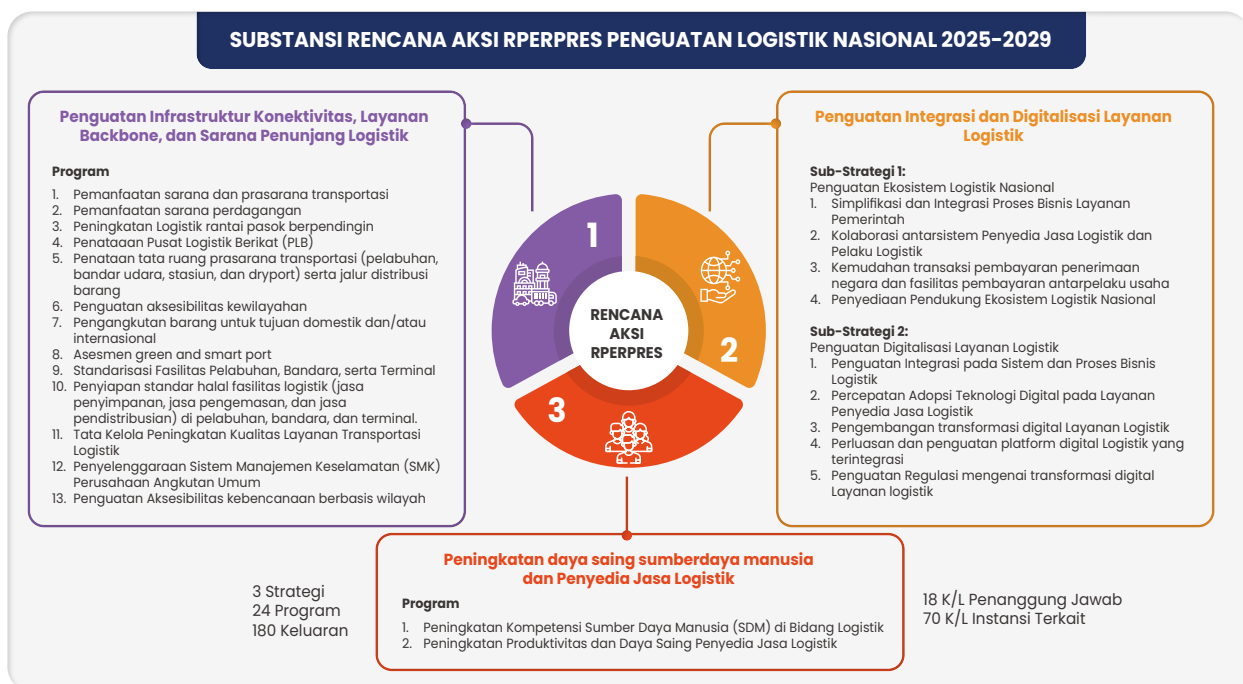
sebagai instrumen kebijakan utama untuk menurunkan biaya logistik nasional, khususnya biaya transportasi angkutan darat dan laut terhadap PDB, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional. Penyusunan RPerpres ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat konektivitas logistik, integrasi layanan logistik, dan peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan utama ekspor-impor seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. RPerpres juga dirancang untuk menjadi payung koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelarasan kebijakan logistik nasional, termasuk penguatan sistem logistik berbasis digital, peningkatan daya saing jasa logistik, serta dukungan terhadap kinerja perdagangan dan industri nasional





Perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional diawali dengan penyusunan kerangka kebijakan penguatan logistik yang memuat strategi, program, indikator kinerja, serta rencana aksi lintas kementerian/lembaga untuk periode 2025–2029, termasuk pengaturan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan (ODOL). Tahap selanjutnya difokuskan pada perumusan substansi batang tubuh dan lampiran rencana aksi, yang kemudian dibahas dan disepakati bersama kementerian dan lembaga terkait hingga naskah RPerpres dinyatakan final. Pada akhir Tahun 2025, naskah RPerpres telah diparaf oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Keuangan, serta Menteri Perhubungan, dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Negara. Pada Februari 2026, disampaikan kebutuhan penyesuaian terhadap rincian kegiatan dan keluaran rencana aksi yang ditargetkan selesai pada Tahun 2025 agar selaras dengan tahapan implementasi dan dapat diproses lebih lanjut menuju penetapan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahap terkini dilakukan persiapan pembahasan lanjutan untuk penyempurnaan rincian rencana aksi sebagai bagian akhir dari proses perumusan sebelum penetapan resmi.



Implementasi Rencana Aksi Nasional penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan (ODOL)

Pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui penguatan pengendalian angkutan barang guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dimensi dan muatan kendaraan. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada peningkatan pengawasan dan penegakan ketentuan di simpul-simpul logistik utama, optimalisasi fungsi jembatan timbang, serta pemanfaatan teknologi

pemantauan untuk mendukung pengawasan berbasis data. Pemerintah juga mendorong penataan tata kelola angkutan barang melalui integrasi sistem informasi pengangkutan dan peningkatan pemahaman pelaku usaha transportasi terhadap ketentuan ODOL. Implementasi rencana aksi ini bertujuan menekan dampak ODOL terhadap keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan, sekaligus mendukung efisiensi biaya logistik dan keberlanjutan sistem logistik nasional.

Penguatan Kerja Sama Regional

Penguatan kerja sama regional terus dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum dan mekanisme kerja sama ekonomi kawasan yang strategis. Sepanjang periode pelaporan, telah dilaksanakan rapat pembahasan kerja sama ekonomi dan teknis dalam kerangka ASEAN–Hong Kong, China *Free Trade Agreement* (AHKFTA) melalui program ECOTECH yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan dukungan teknis bagi negara anggota ASEAN. Selain itu, dilakukan rapat tindak lanjut penandatanganan protokol peningkatan ASEAN–China *Free Trade Area* (ACFTA) 3.0 guna memastikan kesiapan implementasi komitmen yang telah disepakati, khususnya dalam mendukung kelancaran perdagangan dan integrasi ekonomi kawasan. Upaya penguatan kerja sama regional juga diwujudkan melalui partisipasi dalam pertemuan ASEAN *Coordinating Committee on Services* (CCS) serta *Logistics and Transport Services Sectoral Working Group* (LTSSWG) sebagai forum strategis untuk membahas pengembangan sektor jasa, logistik, dan transportasi regional, sekaligus memperkuat sinergi kebijakan antar negara anggota ASEAN.

b. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Waktu perputaran (*turnaround time*) di pelabuhan merujuk pada durasi yang dibutuhkan sebuah kapal untuk menyelesaikan satu siklus penuh, mulai dari kedatangan, bersandar, proses bongkar muat, hingga kapal berlayar kembali. Waktu perputaran ini menjadi indikator utama dalam menilai efisiensi operasional pelabuhan, karena berhubungan langsung dengan kecepatan alur barang dan kapal yang masuk dan keluar. Efisiensi waktu perputaran akan mempengaruhi produktivitas pelabuhan dan kelancaran arus barang ekspor-impor yang menjadi salah satu pilar penting dalam perdagangan internasional.

Penilaian terhadap rata-rata waktu perputaran di pelabuhan memberikan gambaran mengenai seberapa cepat kapal dapat beroperasi di pelabuhan tanpa mengalami penundaan yang signifikan. Waktu perputaran yang efisien akan membantu mengurangi antrian kapal yang menunggu untuk bongkar muat, mempercepat proses distribusi barang, dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta daya saing pelabuhan tersebut. Sebaliknya, waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan masalah seperti penumpukan kapal, keterlambatan pengiriman barang, dan dampak negatif terhadap logistik nasional.

Target rata-rata waktu perputaran kapal di pelabuhan pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 1,7 hari sebagai batas maksimum yang harus dicapai, dengan prinsip bahwa semakin singkat waktu perputaran maka semakin baik kinerja pelayanan pelabuhan. Sepanjang Tahun 2025, realisasi waktu perputaran kapal tercatat sebesar 1,32 hari,



yang berarti lebih cepat dari target yang ditetapkan dan mencerminkan capaian kinerja sebesar 120 persen. Capaian ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional pelabuhan yang konsisten sepanjang tahun, sekaligus menegaskan keberhasilan upaya pemerintah dalam mempercepat arus barang dan mengurangi hambatan logistik.

Bauran Kebijakan Penguatan Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja logistik nasional, khususnya penurunan rata-rata lama waktu perputaran di pelabuhan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola logistik, meningkatkan kelancaran arus barang, serta memperkuat integrasi kebijakan transportasi dan perdagangan guna menciptakan sistem kepelabuhanan yang lebih efisien dan berdaya saing. Adapun kebijakan yang telah dikoordinasikan antara lain sebagai berikut:

Pengembangan Dashboard Kinerja Logistik Nasional

Untuk mendukung fokus kebijakan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi pembangunan *Dashboard* Kinerja Logistik Nasional dengan asistensi Bank Dunia, yang berfungsi memantau kinerja logistik domestik dan internasional dari sisi efisiensi berbasis waktu. *Dashboard* ini dikembangkan dengan mengacu pada praktik terbaik internasional, khususnya pendekatan *Supply Chain Tracking Data* dan indikator *Logistics Performance Index (LPI)*, sehingga mampu menjadi dasar perumusan kebijakan logistik yang lebih presisi dalam rangka menurunkan

biaya logistik nasional terhadap PDB. Indikator kinerja logistik internasional yang digunakan mencakup kinerja pelabuhan melalui *Ship Turnaround Time*, kinerja peti kemas melalui *Container Dwell Time* impor dan ekspor, kinerja pos melalui *Postal Delivery Time*, serta kinerja bandara melalui *Aviation Dwell Time* impor. Sementara itu, indikator logistik domestik meliputi *Ship Turnaround Time Domestic* dan *Container Dwell Time* antar-pulau, yang secara komprehensif menggambarkan efisiensi sistem logistik nasional sepanjang Tahun 2025.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional

Kebijakan penguatan logistik nasional di sektor pelabuhan dilaksanakan melalui sejumlah langkah konkret, antara lain percepatan waktu perputaran kapal dan barang melalui penerapan *single submission* layanan kepelabuhanan, integrasi layanan kepabeuan, karantina, dan perizinan pelabuhan dalam satu sistem digital, serta optimalisasi *port operation* berbasis teknologi informasi. Pemerintah juga mendorong penataan jadwal sandar kapal dan bongkar muat untuk mengurangi waktu tunggu, peningkatan pemanfaatan *truck appointment system* di kawasan pelabuhan utama, serta penguatan pengawasan operasional terminal guna meningkatkan kepastian layanan. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pelabuhan, pengembangan konektivitas pelabuhan dengan kawasan industri dan pusat distribusi, serta standarisasi pelayanan pelabuhan sebagai upaya menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing pelabuhan nasional.

Analisis Faktor Penunjang Pencapaian

Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target logistik nasional pada Tahun 2025 menunjukkan efektivitas koordinasi kebijakan lintas sektor dalam meningkatkan efisiensi sistem logistik. Capaian ini tidak hanya tercermin dari terpenuhinya target indikator kinerja, tetapi juga dari perbaikan struktural dan operasional yang berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang serta penurunan hambatan logistik nasional. Adapun faktor lain yang menunjang capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan investasi sektor logistik dan transportasi, yang mendorong modernisasi armada angkutan, peralatan bongkar muat, serta fasilitas pergudangan sehingga meningkatkan efisiensi operasional.
- Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi oleh pelaku usaha logistik, khususnya dalam pengelolaan rute distribusi, manajemen persediaan, dan pemantauan pengiriman barang, yang membantu menekan biaya operasional dan waktu tempuh.
- Perbaikan konektivitas infrastruktur antar wilayah sebagai hasil pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, yang memperlancar arus distribusi barang dan mengurangi biaya logistik jarak jauh.
- Stabilitas pasokan energi dan relatif terkendalinya harga bahan bakar, yang berkontribusi dalam menjaga biaya operasional transportasi logistik tetap stabil.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor logistik, seiring dengan meningkatnya kebutuhan

industri dan berkembangnya praktik logistik yang lebih efisien.

- Membaiknya iklim usaha dan aktivitas perdagangan, yang mendorong skala ekonomi dalam distribusi barang sehingga biaya logistik per unit dapat ditekan

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian

Target Kinerja

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja logistik nasional, berbagai upaya perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem logistik. Namun demikian, proses pencapaian target tersebut tidak terlepas dari sejumlah tantangan dan hambatan yang bersifat struktural maupun operasional. Kendala-kendala tersebut meliputi :

- Pembatasan mobilitas angkutan barang pada periode tertentu, khususnya saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yang menyebabkan terganggunya kelancaran distribusi barang dan meningkatnya waktu serta biaya logistik.
- Keterbatasan kapasitas dan kualitas infrastruktur logistik di beberapa wilayah, terutama di luar kawasan utama, yang berdampak pada belum meratanya efisiensi sistem logistik nasional.
- Kompleksitas koordinasi lintas sektor dan lintas daerah, mengingat sistem logistik melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga penyelarasan kebijakan dan implementasi di lapangan memerlukan waktu dan penyesuaian.
- Ketergantungan pada pelabuhan utama, yang berpotensi menimbulkan kepadatan arus barang dan mempengaruhi kinerja logistik secara keseluruhan ketika terjadi lonjakan aktivitas.



- Keterbatasan data kinerja logistik yang terintegrasi secara real-time, sehingga pada tahap awal pemantauan kinerja masih memerlukan proses konsolidasi data dari berbagai sumber.
- Tantangan operasional dan teknis, seperti perbedaan standar pelayanan, kesiapan sumber daya manusia, serta adopsi teknologi di sektor logistik yang belum merata.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja logistik nasional, pemerintah akan melakukan upaya perbaikan secara terarah dan berkelanjutan guna menjaga momentum peningkatan efisiensi logistik. Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Penyempurnaan kebijakan pengaturan mobilitas angkutan barang, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), melalui pengaturan waktu operasional yang lebih fleksibel dan mitigasi distribusi agar tidak mengganggu kelancaran arus logistik.
- Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur logistik di berbagai wilayah, terutama di luar kawasan utama, untuk mengurangi kesenjangan efisiensi logistik antarwilayah.
- Penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, guna memastikan keselarasan kebijakan logistik dari tingkat pusat hingga daerah serta mempercepat implementasi di lapangan.
- Diversifikasi dan penguatan peran pelabuhan alternatif, untuk mengurangi ketergantungan pada pelabuhan utama

dan meminimalkan risiko kepadatan arus barang pada titik-titik tertentu.

- Pengembangan dan integrasi sistem data logistik nasional, melalui optimalisasi *Dashboard* Kinerja Logistik Nasional agar pemantauan kinerja dapat dilakukan secara lebih *real-time*, akurat, dan komprehensif.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi logistik, termasuk standarisasi pelayanan dan pemanfaatan sistem digital, guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan logistik.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Efisiensi dalam mencapai target kinerja logistik menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan sumber daya yang digunakan mampu memberikan hasil yang optimal. Adapun bentuk efisiensi dalam pencapaian target kinerja logistik antara lain sebagai berikut:

- Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur eksisting, khususnya pelabuhan dan terminal peti kemas, sehingga peningkatan kinerja dapat dicapai tanpa kebutuhan investasi fisik yang besar dalam jangka pendek.
- Penerapan sistem pemantauan berbasis data melalui *Dashboard* Kinerja Logistik Nasional, yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat sasaran serta meminimalkan pemborosan waktu dan sumber daya.
- Pelaksanaan koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara terintegrasi, sehingga kebijakan dan program logistik dapat diselaraskan dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.

- Penggunaan pendekatan best practice internasional, seperti indikator *Logistics Performance Index (LPI)* dan *Supply Chain Tracking Data*, yang meningkatkan akurasi pengukuran kinerja sekaligus efisiensi evaluasi kebijakan.
- Pemanfaatan mekanisme kerja yang fleksibel dan digital, termasuk rapat koordinasi secara daring dan hybrid, sehingga menekan biaya operasional serta mempercepat proses pengambilan kebijakan.
- Fokus pada perbaikan proses dan tata kelola, seperti penyederhanaan alur pelayanan kepelabuhanan dan penguatan manajemen operasional, yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja logistik.
- Sinergi kebijakan regulatif dan teknis, melalui penyusunan regulasi penguatan logistik nasional yang memastikan keberlanjutan perbaikan sistem logistik tanpa menambah beban administrasi yang tidak diperlukan.





B.2.3

PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merujuk pada total pengeluaran untuk barang-barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan termasuk barang konsumsi. Barang modal ini mencakup berbagai aset yang digunakan dalam proses produksi, seperti bangunan, mesin, dan peralatan. PMTB mencerminkan investasi yang dilakukan oleh produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai dari aset yang tidak diproduksi. Dengan demikian, PMTB menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas produksi suatu negara dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penilaian terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto menggambarkan seberapa besar suatu negara mengalokasikan investasi dalam aset yang dapat meningkatkan kapasitas produksinya di masa depan. Semakin besar investasi dalam PMTB, semakin besar pula potensi negara tersebut untuk mengembangkan sektor-sektor produktif dan infrastruktur. Selain itu, penilaian ini memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah, serta potensi

pertumbuhannya di masa depan. PMTB juga menunjukkan seberapa besar sektor swasta dan pemerintah berkontribusi dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui investasi jangka panjang.

Pengukuran PMTB dilakukan dengan menghitung total nilai barang modal yang diinvestasikan dalam periode tertentu. Ini mencakup pembelian atau pembuatan berbagai jenis barang modal yang digunakan dalam kegiatan ekonomi, termasuk bangunan, mesin, kendaraan, dan alat produksi lainnya. Data PMTB dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumpulkan informasi terkait dengan investasi dalam barang-barang modal yang digunakan oleh sektor publik dan swasta. Hasil pengukuran ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tren investasi dan kontribusinya terhadap perekonomian.

CAPAIAN KINERJA PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB pada Tahun 2025 adalah sebesar 29,4 persen. Hingga saat ini, pengukuran capaian kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik:

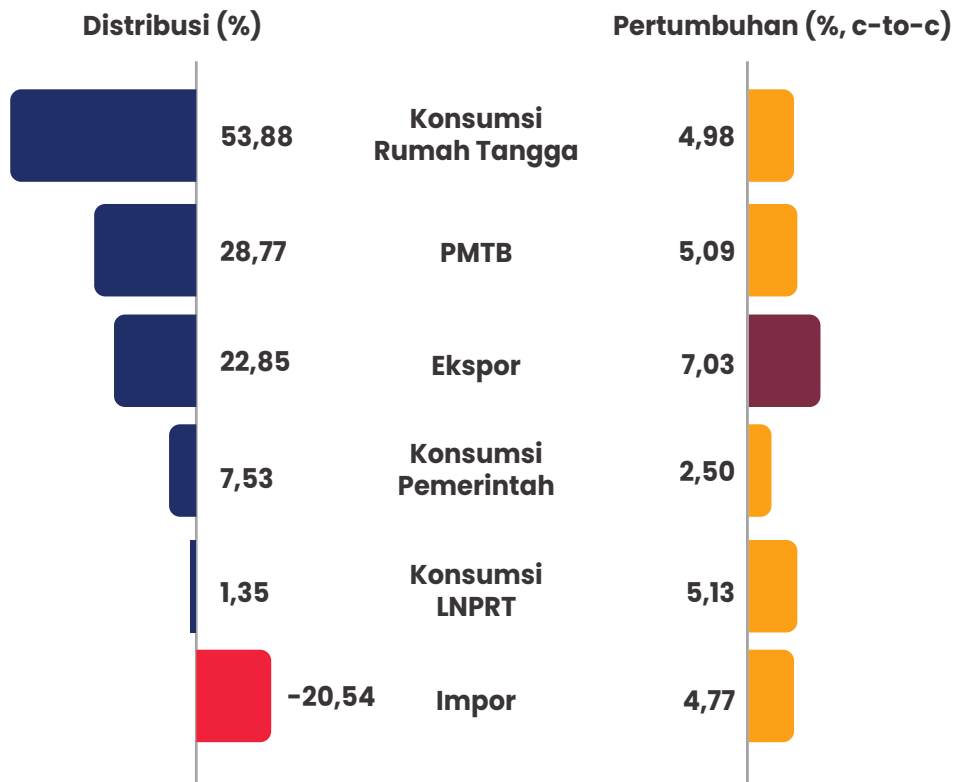
Tabel 3.6. Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Presentase	29,4% terhadap PDB	28,77	97,86%

Kontribusi PMTB terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa realisasi capaian berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Target kontribusi PMTB terhadap PDB pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 29,4%, sementara realisasi yang berhasil dicapai adalah 28,77%,

sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 97,86%. Meskipun belum memenuhi target secara penuh, capaian ini tetap mencerminkan peran PMTB yang signifikan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional melalui aktivitas investasi dan pembangunan kapasitas produksi.

Gambar 3.15. Distribusi dan Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran



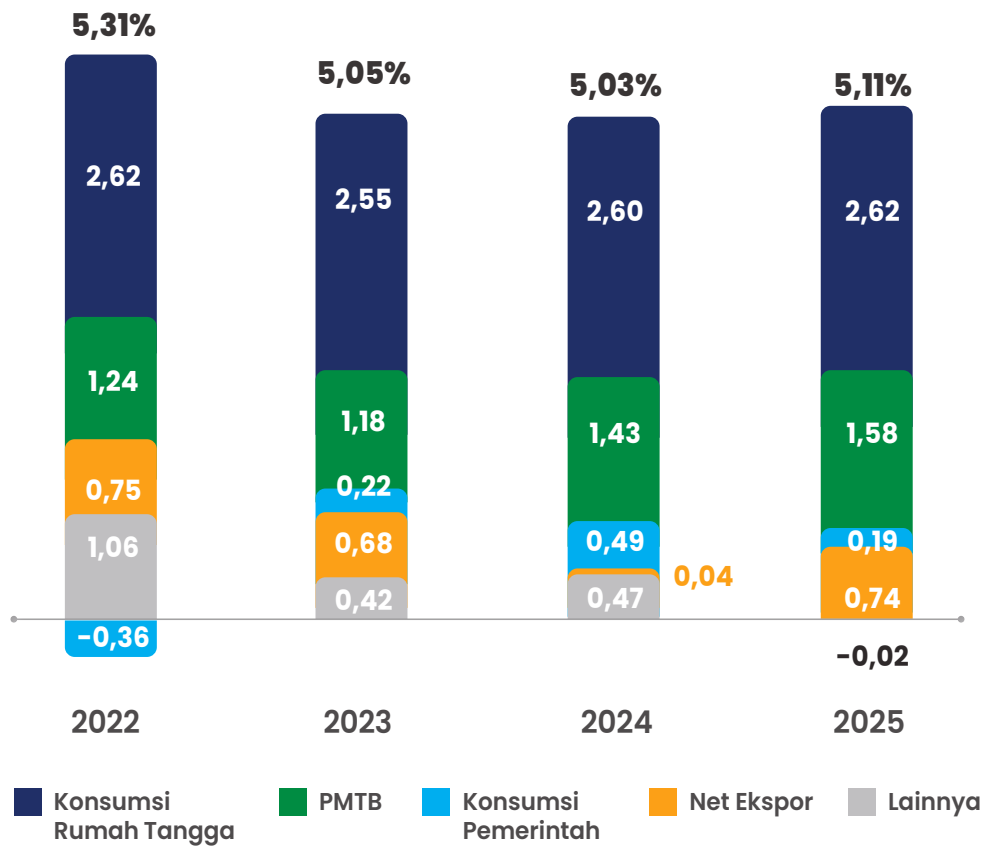
Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap menjadi salah satu penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan grafik, PMTB memiliki kontribusi distribusi sebesar 28,77%, menjadikannya komponen terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 53,88%. Capaian ini menegaskan peran strategis investasi dalam menopang aktivitas ekonomi nasional, khususnya melalui pembangunan infrastruktur, pengadaan mesin dan peralatan, serta ekspansi kapasitas produksi. Dari sisi kinerja, PMTB mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,09% (c-to-c), yang

menunjukkan tetap terjaganya momentum investasi di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa investasi tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Dengan kontribusi yang besar dan pertumbuhan yang relatif solid, PMTB berperan krusial dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, serta mendukung penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia.



Gambar 3.16. Sumber Pertumbuhan Ekonomi

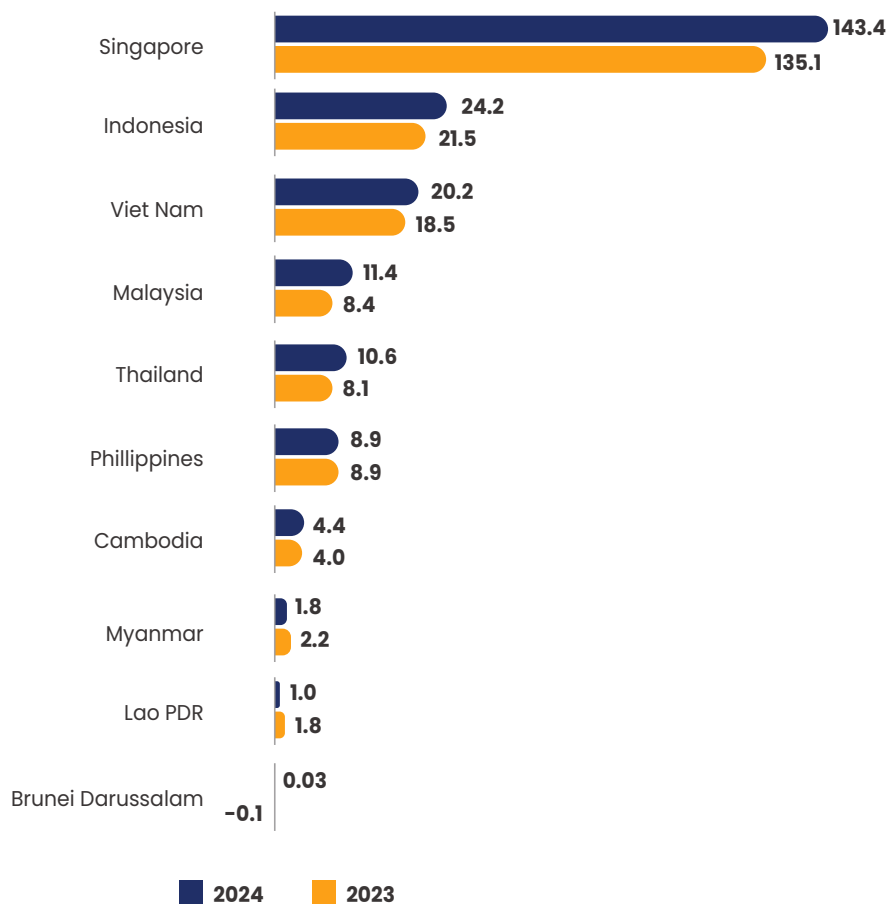


Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan peran yang semakin signifikan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dalam periode 2022–2025. Kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi tercatat relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, yakni sebesar 1,24 poin persentase pada Tahun 2022, kemudian 1,18 poin persentase pada Tahun 2023, meningkat menjadi 1,43 poin persentase pada Tahun 2024, dan kembali menguat hingga 1,58 poin persentase pada Tahun 2025. Pola ini mencerminkan terjaganya momentum investasi di tengah dinamika perekonomian global, seiring dengan berlanjutnya

pembangunan infrastruktur, ekspansi kapasitas produksi, serta penanaman modal pada sektor-sektor strategis. Menguatnya kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek perekonomian nasional serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga iklim investasi. Dengan kontribusi yang konsisten dan cenderung meningkat, PMTB berperan tidak hanya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing nasional, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Gambar 3.17. FDI in ASEAN Member States, 2023 and 2024 (Billions of Dollars)



Sumber: Asean Invesment Report (2026)

Dalam analisis kinerja investasi tahun 2025, keterbatasan data resmi PMTB/*Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) lintas negara menjadikan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai proxy untuk menggambarkan posisi Indonesia di kawasan ASEAN. Data FDI tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua penerima FDI terbesar di ASEAN setelah Singapura, dengan nilai FDI meningkat dari USD 21,5 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 24,2 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kuatnya daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, didukung oleh skala pasar domestik yang besar, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi di sektor-sektor strategis. Tren kenaikan

FDI tersebut memberikan indikasi positif terhadap kinerja investasi dan PMTB Indonesia pada tahun 2025, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai salah satu motor utama pertumbuhan investasi di kawasan ASEAN.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Untuk mendukung pencapaian target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan berbagai indikator pendukung yang bersifat strategis dan lintas sektor. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan iklim usaha dan



kemudahan berinvestasi, kerja sama ekonomi guna memperluas potensi pasar, percepatan realisasi infrastruktur nasional, serta reformasi struktural. Seluruh indikator pendukung tersebut dilaksanakan secara terintegrasi sebagai bagian dari upaya menjaga momentum investasi nasional agar tetap berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peran PMTB dalam struktur PDB nasional.

a. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan peningkatan iklim usaha dan kemudahan berinvestasi,

Peningkatan iklim usaha dan kemudahan berinvestasi merupakan salah satu sasaran strategis dalam mendukung percepatan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya ini ditempuh melalui penguatan pengendalian kebijakan lintas kementerian/ lembaga serta pemangku kepentingan terkait, guna memastikan keselarasan regulasi dan program yang mendukung kemudahan berusaha. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif melalui regulasi yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hambatan struktural dan administratif yang berpotensi menghambat realisasi investasi dapat diminimalkan secara sistematis.

Pengendalian kebijakan peningkatan iklim usaha dilaksanakan melalui harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan lintas sektor, serta pengendalian implementasi kebijakan kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi. Proses ini mencakup pelaksanaan evaluasi kebijakan, penyusunan

rekomendasi perbaikan regulasi, serta monitoring terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, termasuk kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengendalian kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan selaras dengan tujuan kebijakan nasional serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar instansi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Kemudahan berinvestasi yang didorong melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha berdampak langsung terhadap peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pengukuran nilai realisasi PMA dan PMDN dilakukan dengan menghitung komponen-komponen pembentuk investasi secara komprehensif, sehingga mampu menggambarkan aliran modal yang masuk secara lebih akurat. Nilai PMA dihitung dari penjumlahan ekuitas asing, pinjaman luar negeri, serta reinvestasi laba asing, sedangkan PMDN dihitung dari ekuitas domestik, pinjaman dalam negeri, dan re-investasi laba domestik. Pendekatan pengukuran ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi masing-masing sumber modal terhadap pembangunan sektor-sektor prioritas dan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan kemudahan berinvestasi yang telah diterapkan.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kemudahan berinvestasi memberikan dampak signifikan terhadap capaian realisasi investasi nasional. Sepanjang Tahun 2025, total

realisasi investasi nasional tercatat mencapai Rp 1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target sebesar Rp 1.905,6 triliun, mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia. Dari sisi komposisi, PMDN berkontribusi sebesar 53,4 persen atau Rp 1.030,3 triliun, sementara PMA menyumbang 46,6 persen atau Rp 900,9 triliun, yang menunjukkan peran seimbang antara modal domestik dan asing dalam mendorong pembentukan modal tetap bruto. Peningkatan realisasi investasi tersebut juga memberikan dampak ekonomi yang nyata melalui penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 2,7 juta tenaga kerja, serta penguatan investasi di sektor hilirisasi yang berorientasi pada nilai tambah, sehingga semakin menegaskan bahwa kebijakan kemudahan berinvestasi berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bauran Kebijakan peningkatan iklim usaha dan kemudahan berinvestasi

Penetapan PP Nomor 28 Tahun 2025

Tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko

Peningkatan iklim usaha dan kemudahan berinvestasi terus diperkuat melalui penyempurnaan kerangka regulasi perizinan berusaha berbasis risiko. Kebijakan ini sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang memperkenalkan pendekatan perizinan berbasis tingkat risiko usaha guna menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kepastian berusaha. Seiring dengan dinamika pelaksanaan di lapangan serta kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan sektor usaha, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi PP 5/2021, termasuk efektivitas sistem OSS, kesiapan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, serta konsistensi penerapan standar perizinan.

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Penyempurnaan dari PP 5 Tahun 2021 untuk memperkuat sistem perizinan berbasis risiko di Indonesia



Pemindahan Risiko
Pengelompokan usaha berdasarkan tingkat risiko



Peningkatan Ketentuan
Aturan perizinan berbasis risiko yang lebih jelas



Kepastian Berusaha
Mendorong iklim investasi dan kepastian hukum

MANFAAT & DAMPAK POSITIF

Penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025



1 Manfaat Bagi Pelaku Usaha

- Proses perizinan lebih cepat dan transparan
- Kepastian hukum usaha
- Biaya administrasi lebih efisien
- Dukungan terhadap UMKM

2 Manfaat Bagi Pemerintah

- Integrasi data perizinan nasional
- Peningkatan koordinasi lintas instansi
- Pengawasan berbasis risiko
- Peningkatan koordinasi lintas instansi

3 Manfaat Bagi Masyarakat

- Perlindungan lingkungan dan kesehatan
- Transparansi informasi publik
- Dampak sosial - ekonomi positif
- Presparansi informasi publik

4 Dampak Jangka Panjang

- Peningkatan Ease of Doing Business (EoDB)
- Transformasi Digital Layanan Publik



Sebagai tindak lanjut atas evaluasi tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai penyempurnaan kebijakan sebelumnya. PP ini menegaskan penguatan pengendalian pelaksanaan perizinan, penyederhanaan persyaratan dasar dan perizinan berusaha, serta penajaman pembagian peran antar instansi agar proses perizinan menjadi lebih jelas, terukur, dan akuntabel. Selain itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 juga menekankan peningkatan kepastian layanan perizinan melalui penguatan standar pelayanan, integrasi sistem perizinan, serta penyesuaian norma dan prosedur yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa perizinan berusaha tidak lagi menjadi hambatan, melainkan instrumen strategis dalam mendorong investasi yang berkualitas, memperkuat kepercayaan investor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Optimalisasi Online Single Submission (OSS)

Optimalisasi sistem *Online Single Submission* (OSS) pada tahun 2025 mengalami penguatan signifikan pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jika pada periode sebelumnya OSS lebih berfokus sebagai sarana digitalisasi proses perizinan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, maka melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 peran OSS diperkuat sebagai instrumen pengendalian kebijakan perizinan secara menyeluruh. Penguatan tersebut mencakup

penegasan OSS sebagai sistem utama dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko, peningkatan konsistensi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta penguatan keterhubungan OSS dengan sistem perizinan sektoral dan pemerintah daerah. Dengan demikian, OSS tidak hanya berfungsi sebagai platform layanan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas proses perizinan.

Selain itu, optimalisasi OSS pada tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kepastian dan kualitas pelayanan perizinan melalui penyederhanaan alur proses, penajaman klasifikasi tingkat risiko usaha, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi pasca-izin. PP Nomor 28 Tahun 2025 memberikan landasan yang lebih kuat bagi integrasi data perizinan, pemutakhiran perizinan secara berkelanjutan, serta penyesuaian persyaratan usaha yang lebih adaptif terhadap dinamika kegiatan usaha. Perubahan ini diharapkan mampu mengurangi potensi hambatan administratif, mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem OSS, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan iklim usaha dan realisasi investasi nasional.

b. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperluas akses pasar, menarik investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang semakin

kompleks, diperlukan pengelolaan kebijakan kerja sama internasional yang terarah, terintegrasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengampu tiga kebijakan kerja sama ekonomi internasional, yaitu kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral, sebagai kerangka dalam memperkuat kontribusi kerja sama internasional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kerangka kerja sama ekonomi bilateral, kebijakan diarahkan untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara mitra utama melalui perundingan, forum dialog ekonomi, serta tindak lanjut implementasi kesepakatan di bidang perdagangan dan investasi. Kerja sama bilateral difokuskan pada pencapaian komitmen konkret yang mampu mendorong peningkatan nilai perdagangan dan arus investasi, sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan teknis yang dihadapi pelaku usaha. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa kerja sama bilateral tidak hanya menghasilkan kesepakatan formal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Pada tingkat regional, kebijakan kerja sama ekonomi diarahkan untuk mendorong penguatan integrasi kawasan dan peningkatan daya saing regional. Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum kerja sama regional dimanfaatkan untuk memperkuat harmonisasi kebijakan ekonomi, memperlancar arus barang, jasa, dan investasi, serta mendorong reformasi struktural yang mendukung kemudahan berusaha. Kerja sama regional juga menjadi sarana strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi kawasan

dan memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha nasional di tengah dinamika perdagangan global.

Sementara itu, dalam kerangka kerja sama ekonomi multilateral, kebijakan difokuskan pada penguatan peran Indonesia dalam forum-forum ekonomi global guna memastikan kepentingan nasional terakomodasi dalam perumusan kebijakan internasional. Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama multilateral diarahkan untuk menghasilkan komitmen global yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta reformasi tata kelola ekonomi internasional. Melalui pengelolaan kebijakan yang terkoordinasi dan terkendali, kerja sama ekonomi multilateral diharapkan mampu memberikan manfaat strategis bagi perekonomian nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global.

Bauran Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Internasional

Penyelesaian Akses Indonesia ke OECD

Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses akses OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan. Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, akses Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Urgensi akses OECD tercantum dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, pada bagian Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Huruf c: “perlu mempercepat akses dan keanggotaan pada organisasi internasional yang dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi

Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas, seperti OECD". Urgensi akses OECD juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029, pada bagian narasi mengenai Asta Cita 2: "Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui salah satu serangkaian intervensi kebijakan proses akses Indonesia ke OECD."

Dalam rangka pelaksanaan proses akses, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD yang kemudian direvisi melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025, menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana. Selanjutnya, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 menetapkan struktur pelaksana Tim Nasional OECD, termasuk pembagian ke dalam 26 bidang sesuai dengan Peta Jalan Akses Indonesia. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral bertindak sebagai anggota Sekretariat Tim Nasional OECD, dengan tanggung jawab utama mengoordinasikan kementerian/

lembaga dalam pelaksanaan penilaian mandiri terhadap instrumen hukum OECD dan penyusunan dokumen Initial Memorandum.

Berdasarkan Peta Jalan Akses dan daftar instrumen hukum yang diterbitkan oleh Sekretariat OECD, terdapat 240 instrumen hukum yang harus dianalisis kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi nasional. Proses ini mencakup pelaksanaan penilaian mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga, pengumpulan dan konsolidasi hasil asesmen, penyusunan dokumen Initial Memorandum, hingga pengorganisasian penyampaiannya kepada Sekretariat OECD. Indonesia telah menyerahkan dokumen Initial Memorandum akses OECD kepada Sekretaris Jenderal OECD dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis, pada tanggal 3 Juni 2025. Proses akses Indonesia akan dilanjutkan dengan tahap *Technical Review* oleh Komite dan Sekretariat OECD dengan Kementerian/Lembaga Bidang terkait. *Technical Review* akan dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyampaian kuesioner, wawancara pemangku kepentingan, hingga *fact finding missions*.

Gambar 3.18. Menko Airlangga Temui Sekjen OECD Guna Serahkan *Initial Memorandum*



Proses penilaian mandiri dan penyusunan *Initial Memorandum* mendorong harmonisasi regulasi nasional dengan standar OECD, khususnya dalam aspek tata kelola, iklim usaha, perlindungan investasi, dan kepastian hukum. Penyampaian dokumen tersebut menjadi sinyal komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi struktural yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor asing dan domestik. Meningkatnya kepercayaan dan persepsi positif terhadap iklim investasi Indonesia pada akhirnya mendorong masuknya penanaman modal baru maupun ekspansi investasi yang telah ada, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan investasi produktif dan akumulasi aset tetap. Dengan demikian, alur pelaksanaan penilaian mandiri hingga penyampaian *Initial Memorandum* kepada OECD berperan sebagai fondasi institusional yang memperkuat arus investasi dan mendukung pencapaian target PMTB secara berkelanjutan.

Di tahun 2025 ini, penyelesaian dokumen *Initial Memorandum* merupakan bagian krusial dari proses awal akses OECD. Proses ini meliputi pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap kesesuaian kebijakan dan praktek Indonesia dengan standar dan instrumen OECD, serta penyusunan dokumen *Initial Memorandum* yang mencerminkan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam proses menjadi anggota OECD. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan Indonesia dalam proses akses dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis

dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

Penyelesaian Tarif Resipokal Indonesia USA

Penyelesaian perundingan tarif resipokal antara Indonesia dan Amerika Serikat telah melalui serangkaian tahapan penting sepanjang Tahun 2025, dimulai dari respon atas pengumuman tarif “resipokal” AS yang semula mencapai 32 persen terhadap produk Indonesia. Pemerintah Indonesia merespons melalui perundingan intensif yang dimulai sejak April 2025 dengan melibatkan delegasi teknis dan pimpinan dari kedua negara, termasuk pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan perwakilan dagang AS untuk membahas isu teknis, hambatan perdagangan non-tarif, serta saling mengidentifikasi kepentingan kedua pihak dalam kerangka *Agreements on Reciprocal Trade* (ART). Pada 22 Juli 2025, kedua pihak menerbitkan *Joint Statement* yang menjadi pijakan awal, antara lain dengan kesepakatan menurunkan tarif resipokal Indonesia di pasar AS dari 32 persen menjadi 19 persen, sekaligus membuka ruang bagi pembahasan substansi yang lebih komprehensif seputar akses pasar, hambatan non-tarif, serta kerja sama di bidang perdagangan digital dan komersial.

Hasil terbaru dari rangkaian perundingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan AS telah menyepakati seluruh substansi utama perjanjian perdagangan resipokal yang dirancang untuk menciptakan hubungan perdagangan yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup pengaturan tarif, tetapi juga memperluas kerja sama perdagangan,



termasuk akses pasar bagi produk AS dan pengecualian tarif untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS. Setelah substansi lengkap disepakati pada akhir Desember 2025, kedua negara menargetkan tahap final seperti *legal scrubbing* dan pembersihan dokumen selesai pada awal Januari 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan resmi perjanjian oleh Presiden Indonesia dan Presiden AS sesuai jadwal yang direncanakan

Penguatan Kerja Sama Bilateral

Pada Tahun 2025, penguatan kerja sama ekonomi bilateral difokuskan pada pencapaian komitmen konkret yang berdampak langsung terhadap peningkatan perdagangan dan investasi dengan negara mitra utama Indonesia. Sepanjang tahun tersebut, telah terealisasi 23 komitmen kerja sama ekonomi bilateral, melampaui target awal sebanyak 20 komitmen. Komitmen tersebut dicapai melalui berbagai mekanisme, antara lain pertemuan komite bersama, *senior officials meeting*, perundingan perjanjian perdagangan, serta forum ekonomi bilateral dengan negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Uni Eropa, Rusia, Korea, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan kerja sama bilateral dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional, yang tercermin dari tingkat efektivitas kerja sama ekonomi bilateral mencapai 107 persen dari target Tahun 2025.

Dari sisi nilai perdagangan dan investasi, kerja sama bilateral sepanjang 2025 menunjukkan kontribusi yang signifikan. Nilai perdagangan

Indonesia dengan negara mitra utama tercatat mencapai sekitar USD 324,8 miliar hingga Oktober 2025, jauh melampaui proyeksi tahunan sebesar USD 177,3 miliar. Sementara itu, realisasi investasi dari negara mitra utama mencapai sekitar USD 28,0 miliar hingga September 2025, mendekati target tahunan sebesar USD 32,3 miliar. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kerja sama bilateral tidak hanya menghasilkan kesepakatan formal, tetapi juga mendorong realisasi ekonomi yang nyata, baik dalam bentuk peningkatan arus perdagangan maupun investasi. Secara keseluruhan, penguatan kerja sama ekonomi bilateral pada Tahun 2025 berperan penting dalam menjaga kepercayaan mitra internasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan ekonomi global.

Penguatan Kerja Sama Regional

Kerja sama ekonomi regional diarahkan untuk memastikan tercapainya komitmen kawasan yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui forum-forum utama seperti ASEAN, sub kawasan, dan APEC. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian dan implementasi berbagai kesepakatan strategis, antara lain melalui *ASEAN Economic Community* (AEC), penguatan integrasi sub kawasan BIMP-EAGA dan IMT-GT, serta partisipasi aktif Indonesia dalam forum APEC. Berbagai pertemuan tingkat menteri dan kepala negara sepanjang tahun 2025 menghasilkan sejumlah joint statement, rekomendasi kebijakan, serta kesepakatan substansial yang mendukung fasilitasi perdagangan, peningkatan investasi, transformasi digital, dan penguatan konektivitas rantai pasok regional. Hingga

Triwulan IV Tahun 2025, seluruh target jumlah komitmen kerja sama ekonomi regional yang ditetapkan telah tercapai secara penuh, mencerminkan efektivitas pelaksanaan agenda kerja sama kawasan.

Selain pada level kawasan ASEAN, kerja sama regional juga diperkuat melalui peran aktif Indonesia dalam forum APEC, khususnya pada isu reformasi struktural dan kemudahan berusaha. Partisipasi Indonesia dalam APEC *Structural Reform Ministerial Meeting* (SRMM) menghasilkan adopsi pernyataan bersama yang menegaskan komitmen negara anggota terhadap agenda reformasi struktural lanjutan, termasuk penguatan iklim usaha, inovasi digital, dan inklusivitas ekonomi. Di tingkat sub kawasan, kerja sama BIMP-EAGA dan IMT-GT sepanjang 2025 diarahkan pada percepatan proyek infrastruktur prioritas, peningkatan konektivitas lintas batas, serta penguatan ekosistem investasi dan pariwisata. Keseluruhan capaian tersebut menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi regional tidak hanya berfungsi sebagai forum diplomasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing nasional, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

c. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan percepatan infrastruktur nasional

Percepatan pembangunan infrastruktur nasional merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), karena investasi infrastruktur secara langsung membentuk aset tetap produktif yang menopang aktivitas

ekonomi jangka panjang. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sarana fisik, tetapi juga sebagai katalis bagi investasi sektor riil, peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, serta pengembangan kawasan ekonomi baru. Oleh karena itu, kebijakan percepatan infrastruktur memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian PMTB dan menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan percepatan infrastruktur nasional di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian difokuskan pada pengawalan dan pengendalian Proyek Strategis Nasional (PSN) lintas sektor serta pengembangan kawasan ekonomi prioritas guna memastikan realisasi investasi infrastruktur berkontribusi optimal terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan penyelesaian proyek infrastruktur transportasi, sumber daya air, energi, dan kawasan industri yang bernilai investasi besar, disertai pengendalian pelaksanaan proyek melalui pemantauan kemajuan, fasilitasi penyelesaian hambatan seperti permasalahan lahan dan pendanaan, serta penyelarasan kebijakan antara kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Pendekatan pengendalian yang terarah dan berkelanjutan ini memastikan investasi infrastruktur dapat segera terealisasi menjadi aset produktif, sekaligus memperkuat daya tarik investasi, memperluas pusat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pemerataan pembangunan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.



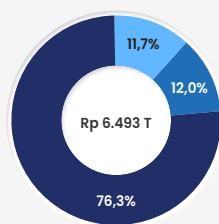
Bauran Kebijakan Infrastruktur Nasional Penyelesaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Sebaran Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan **Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025** dan **Permenko Perekonomian Nomor 19 Tahun 2025**, terdapat **226 Proyek** dan **26 Program** sebagai PSN dengan estimasi nilai investasi (Capex) **Rp 6.493 Triliun.***
*belum termasuk nilai investasi & program direktif Presiden dan Program Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional yang berasal dari hasil penertiban kawasan hutan sesuai pemutakhiran RKP 2025



Porsi Skema Rencana
Pendanaan Investasi



Rp 4.953,6 T
(76,3%)
Swasta



Rp 778,8 T
(12,0%)
BUMN/D



Rp 761,1 T
(11,7%)
APBN/D

14 Sektor PSN

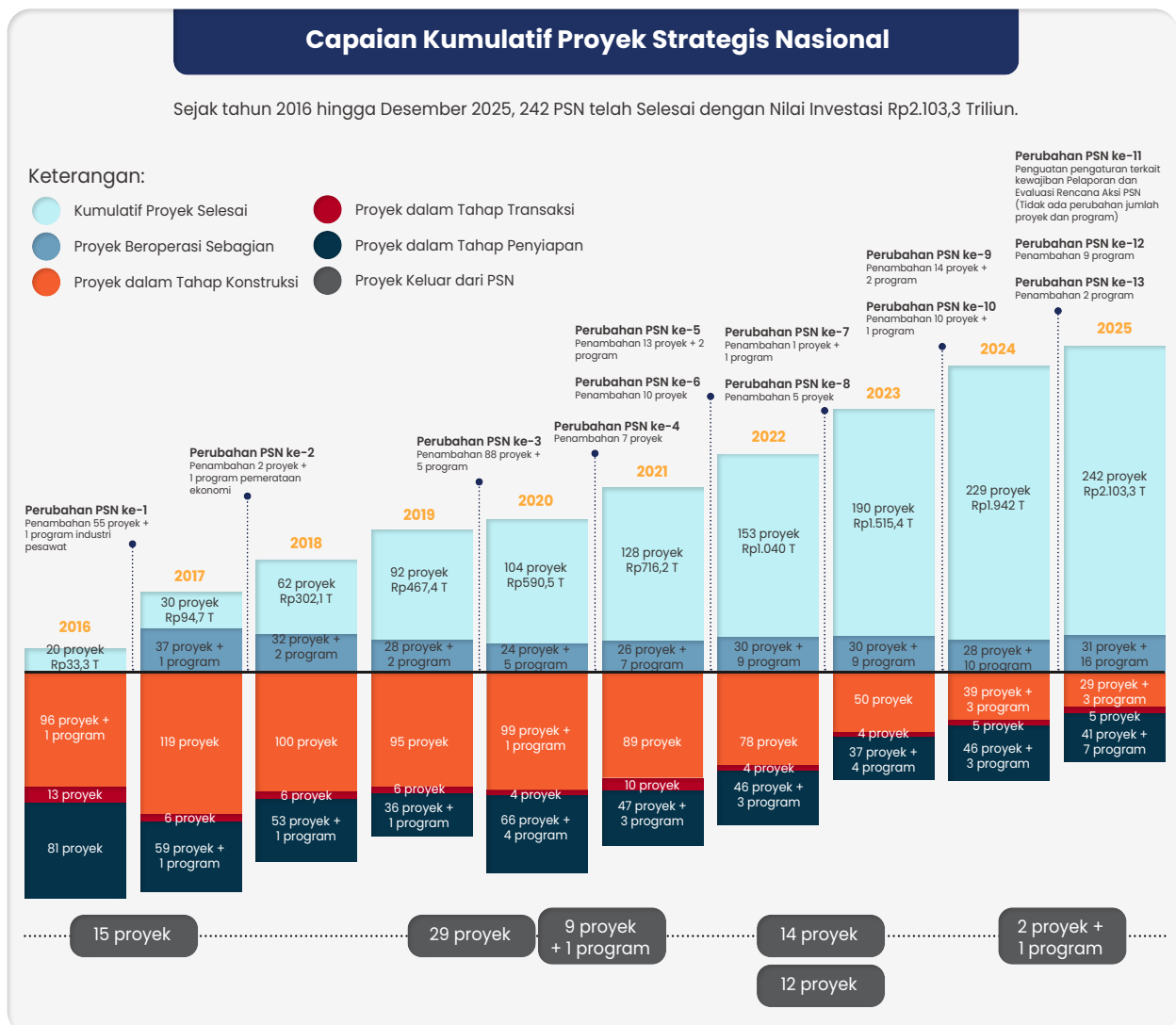


26 Program



Percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) diarahkan untuk memastikan realisasi investasi infrastruktur dapat segera terbentuk menjadi aset tetap produktif yang berkontribusi langsung terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pengendalian dan pemantauan kemajuan konstruksi PSN, koordinasi dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) terkait penyelesaian tahapan pembangunan, serta fasilitasi percepatan pengadaan tanah melalui

koordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap PSN eksisting dan usulan PSN baru guna memastikan kesinambungan investasi infrastruktur yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas produksi, konektivitas, dan efisiensi logistik nasional. Rangkaian rencana aksi tersebut bertujuan agar belanja modal dan investasi infrastruktur tidak tertahan pada tahap perencanaan, tetapi dapat terealisasi secara fisik dan tercatat sebagai komponen PMTB.



Hasil dari pelaksanaan rencana aksi tersebut menunjukkan bahwa hingga akhir Tahun 2025 telah didorong penyelesaian 6 dari 12 PSN yang ditargetkan selesai pada Tahun 2025 dengan total nilai



investasi mencapai Rp63,71 triliun. Proyek-proyek yang telah mencapai tahap penyelesaian dan progres signifikan antara lain Kawasan Industri Pulau Penebang, Kawasan Industri Tanah Kuning, Pelabuhan Benoa, Bendungan Meninting, SPAM Wasusokas, dan Kawasan Industri Alumina Toba. Penyelesaian dan kemajuan proyek-proyek tersebut memperkuat kontribusi investasi infrastruktur terhadap PMTB melalui pembentukan aset tetap berupa kawasan industri, pelabuhan, bendungan, dan sistem penyediaan air minum yang mendukung aktivitas ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, tingkat capaian pembangunan PSN pada Tahun 2025 mencapai 85,83 persen, yang mencerminkan efektivitas pengendalian kebijakan dalam mendorong realisasi investasi infrastruktur sebagai pengungkit utama PMTB dan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Proyek Strategis Nasional Selesai 2025

Terdapat 12 proyek yang diproyeksikan selesai pada tahun 2025,, sementara itu status realisasinya sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4 proyek sudah selesai, serta terdapat tambahan 1 proyek selesai di luar 12 proyek yang ditargetkan. Sehingga pada tahun 2025 terdapat total 5 proyek selesai dengan total estimasi investasi sebesar Rp17,38 Triliun.

No	Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor	Lokasi	Nilai Estimasi Investasi	Status	Kendala Pelaksanaan
A. Proyek Selesai						
1	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritim Tourism Hub)	Jalan dan Jembatan	Bali	6,14 T	Selesai	-
2	Kawasan Industri Pulau Penebang	Kawasan	Kalbar	5,10 T	Selesai	-
3	Bendungan Meninting	Bendungan dan Irigasi	NTB	0,82 T	Selesai	-
4	Kawasan Industri Alumina Toba	Kawasan	Kalbar	3,2 T	Selesai	-
5	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas	Air Bersih dan Sanitasi	Jateng	2,12 T	Selesai	-
B. Proyek Belum Selesai						
1	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh-bagian dari Trans Sumatera	Jalan dan Jembatan	Aceh	16,54 T	Beroperasi Sebagian	Terkendala pembebasan lahan
2	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Kawasan	Sumut	28,87 T	Penyiapan sarana dan prasarana dalam kawasan	Terkendala pemenuhan pengadaan lahan dan kelengkapan infrastruktur dalam kawasan

No	Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor	Lokasi	Nilai Estimasi Investasi	Status	Kendala Pelaksanaan
3	Kawasan Industri Bantaeng	Kawasan	Sulsel	155 T		Terkendala izin lingkungan dan kelengkapan infrastruktur dalam kawasan
4	Kawasan Industri Tanah Kuning (PT ISI)	Kawasan	Kaltara	4,01 T		Terkendala pemenuhan pengadaan lahan dan kelengkapan infrastruktur dalam kawasan
5	Kawasan Industri Kendari	Kawasan	Sultra	17,90 T		Terkendala pengadaan lahan untuk memenuhi luas minimal 50 Ha dan kemampuan finansial Badan Usaha
6	Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart- Eco Industrial Park (GESEIP)	Kawasan	Kepri	22,60 T		Terkendala izin lingkungan dan kelengkapan infrastruktur dalam kawasan
7	Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran	Kawasan	Kepri	12,05 T		Terkendala izin lingkungan dan kelengkapan infrastruktur dalam kawasan
8	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Air Bersih dan Sanitasi	Bengkulu	0,91 T	Konstruksi	Kendala teknis sehingga kapasitas yang ditargetkan baru tercapai 418 lt/det (68,42%)

Penyelesaian Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi

Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) karena seluruh aktivitas pengembangan kawasan membentuk aset tetap produktif yang menopang kegiatan ekonomi jangka panjang. Pembangunan kawasan industri, fasilitas produksi, infrastruktur pendukung, serta utilitas kawasan



secara nyata meningkatkan akumulasi modal tetap dan memperkuat kapasitas produksi nasional. Investasi yang masuk ke dalam KSEP tidak hanya mendorong peningkatan nilai investasi, tetapi juga meningkatkan kualitas PMTB melalui penguatan struktur industri dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, penyelesaian progres pengembangan KSEP pada tahun 2025 difokuskan pada percepatan kesiapan kawasan agar investasi yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan secara efektif. Capaian utama meliputi penyelesaian pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE Gresik, KEK Galang Batang, serta Kawasan Industri Konawe, yang seluruhnya telah memasuki tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif dengan bobot capaian 100 persen. Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batang berhasil mendorong realisasi investasi sebesar Rp23 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 16.808 orang, serta keterlibatan 39 tenant industri yang telah beroperasi dan berkomitmen melakukan kegiatan produksi. Indikator kinerja Persentase Pengembangan KSEP yang Berdaya Saing merupakan indikator baru pada unit kerja sehingga belum tersedia pembandingan capaian sebelumnya, namun pelaksanaan rencana aksi telah memenuhi target tahun 2025 dan menunjukkan kontribusi nyata pengembangan kawasan terhadap peningkatan PMTB, penguatan struktur industri, dan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Koordinasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara rutin menyelenggarakan koordinasi

kebijakan yang spesifik mencakup bidang perumahan, pertanahan, dan strategi pembiayaan infrastruktur. Hal ini ditujukan untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan akuntabel guna mendukung pembangunan nasional. Adapun salah satu skema yang diusung adalah Akselerasi Skema Non-APBN (PINA & KPBU). Fokus utama skema ini adalah mengurangi ketergantungan pada anggaran negara dengan mengkoordinasikan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek infrastruktur tetap berjalan melalui pendanaan kreatif (*creative financing*).

d. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Reformasi Struktural

Kebijakan reformasi struktural berperan penting dalam memperkuat iklim investasi dan mendorong peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur serta pemanfaatan sistem digital SIMERSI. Perbaikan kualitas tata kelola tersebut memberikan dampak positif terhadap kepastian regulasi, efisiensi proses perizinan, serta kelancaran pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Dengan birokrasi yang semakin adaptif dan responsif, realisasi investasi dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan, sehingga memperkuat peran PMTB sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional

Bauran Kebijakan Reformasi Struktural

Revisi PP 5/2021

Revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyederhanakan kerangka perizinan dan memperbaiki koordinasi kebijakan investasi di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya memperkuat *ease of doing business*, revisi ini kemudian dituangkan dalam PP No. 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP 5/2021, dengan fokus pada harmonisasi ketentuan perizinan dan penguatan implementasi melalui sistem OSS RBA. Proses revisi dilakukan melalui evaluasi teknis terhadap penerapan regulasi, konsultasi antar-lembaga, serta

penyelarasan dengan UU Cipta Kerja dan prinsip reformasi struktural yang menekankan kepastian hukum dan efisiensi pelayanan perizinan. Pasca revisi, pemerintah perlu menyusun dan menyesuaikan sejumlah aturan turunan seperti peraturan perizinan sektoral di kementerian/lembaga, pedoman teknis OSS RBA, dan standar pelayanan baru untuk menggantikan regulasi yang masih merujuk pada PP 5/2021. Penyusunan aturan turunan ini penting agar ketentuan yang lebih sederhana dan harmonis pada PP 28/2025 dapat dioperasionalkan secara konsisten di seluruh sektor, serta memastikan integrasi lintas instansi dalam pelayanan perizinan dan pengawasan.



Pasca diterbitkannya PP 28/2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggungjawab untuk mengawal Revisi aturan turunan yang terdampak. Adapun beberapa aturan turunan yang harus dikawal (1) Peraturan Menteri Teknis Sektoral (standar Usaha): Permenparekraf tentang Standar Usaha Pariwisata, Permen ESDM tentang Perizinan Berusaha Sektor Energi, Permen Perindustrian tentang Penyesuaian standar kawasan industri dan izin industri logam dasar, (2) Peraturan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Peraturan BKPM tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BKPM tentang Pedoman Pengawasan, (3) Peraturan



Terkait Insentif dan Fasilitas: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait *Tax Holiday/Allowances*, dan Peraturan Dewan Nasional KEK terkait Revisi aturan mengenai kemudahan berusaha di dalam kawasan ekonomi khusus, (4) Peraturan Daerah (Perda) dan Perkada: Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) & RDTR dan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.



Dampak kebijakan revisi PP dan aturan turunannya terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) bersifat positif dan multipel, antara lain: (1) meningkatkan kepastian investasi melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan yang mendorong investor mempercepat keputusan investasi; (2) mengurangi biaya dan waktu pemenuhan regulasi, sehingga biaya non-produksi yang dibebankan pada proyek modal tetap menjadi lebih efisien; (3) mempercepat realisasi proyek infrastruktur dan investasi manufaktur/modernisasi industri, karena persyaratan teknis dan administratif lebih cepat dipenuhi; serta (4) memperluas partisipasi sektor swasta, termasuk investasi asing, yang berdampak pada peningkatan aliran modal fisik ke dalam negara. Secara agregat, perbaikan regulasi ini akan memperkuat kontributor utama PMTB dalam PDB, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan kualitas investasi yang lebih produktif.

Penguatan Implementasi UU Cipta Kerja

Penguatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui pengawasan aspek hukum guna menjaga kepastian regulasi dan keberlanjutan kebijakan strategis di bidang perekonomian. Salah satu bentuk penguatan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan advokasi dan pendampingan *judicial review* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Kegiatan ini mencakup penyusunan dan pembahasan respon pemerintah, penyiapan alat bukti, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan posisi hukum pemerintah tersampaikan secara komprehensif dan konsisten. Pengawasan *judicial review* tersebut berperan penting dalam menjaga keberlakuan dan efektivitas UU Cipta Kerja sebagai kerangka utama reformasi struktural, sehingga implementasi kebijakan perizinan berusaha, investasi, dan kegiatan ekonomi strategis dapat terus berjalan dengan kepastian hukum yang memadai

Analisis Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sepanjang periode pelaporan didukung oleh sejumlah faktor struktural dan kebijakan yang memperkuat iklim investasi serta mempercepat realisasi investasi fisik. Berbagai upaya reformasi regulasi, perbaikan tata kelola, dan penguatan kepastian hukum yang tercermin dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pondasi penting dalam mendorong akumulasi modal tetap produktif. Adapun faktor-faktor penunjang keberhasilan PMTB tersebut antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan kepastian regulasi dan hukum, seiring dengan implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang berjalan optimal serta pengawalan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, termasuk melalui advokasi dan pendampingan *judicial review*, sehingga memberikan rasa aman bagi investor dalam merealisasikan investasi.
- Penyederhanaan dan harmonisasi perizinan berusaha, khususnya melalui penerapan perizinan berbasis risiko dan penyempurnaan regulasi turunan, yang mempercepat proses administrasi dan mengurangi hambatan non-teknis dalam pelaksanaan proyek investasi.
- Perbaikan efektivitas birokrasi dan sistem kerja, ditandai dengan mekanisme kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, serta pemanfaatan sistem digital dalam monitoring dan evaluasi kebijakan, sehingga mendukung kelancaran realisasi investasi menjadi aset tetap produktif.
- Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan investasi, yang mendorong percepatan realisasi proyek strategis, khususnya di sektor infrastruktur dan industri, sebagai kontributor utama PMTB.
- Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha, baik domestik maupun asing, terhadap stabilitas kebijakan dan iklim usaha

nasional, yang tercermin dari berlanjutnya komitmen dan realisasi investasi fisik.

- Konsistensi kebijakan makro dan struktural, yang menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung keputusan investasi jangka menengah dan panjang, sehingga secara bertahap meningkatkan kontribusi PMTB terhadap PDB.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Terdapat beberapa kendala utama yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target PMTB sepanjang periode pelaporan, yaitu:

- Ketergantungan yang relatif tinggi pada belanja modal pemerintah, sehingga fluktuasi realisasi belanja modal terutama setelah selesainya proyek strategis pada semester sebelumnya berdampak pada perlambatan laju pertumbuhan PMTB.
- Tantangan iklim usaha domestik, termasuk kendala birokrasi, proses perizinan, kepastian hukum, serta isu konsistensi kebijakan yang masih menjadi faktor penghambat dalam menarik dan merealisasikan investasi swasta secara optimal.
- Keterbatasan pembiayaan investasi, khususnya bagi sektor-sektor tertentu yang membutuhkan modal besar dan berjangka panjang, sehingga mempengaruhi kecepatan realisasi pembentukan aset tetap.
- Perlambatan realisasi investasi pada beberapa subsektor, seiring meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dalam merespons ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar.
- Irisan tugas dan fungsi antar unit kerja, yang menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.



Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang dihadapi selama pencapaian target kinerja, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan sejumlah upaya perbaikan yang terarah dan berkelanjutan, antara lain:

- Mengurangi ketergantungan pada belanja modal pemerintah dengan mendorong peningkatan peran investasi swasta dan BUMN melalui penguatan skema pembiayaan alternatif, kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta fasilitasi investasi sektor prioritas agar pertumbuhan PMTB lebih seimbang dan berkelanjutan.
- Memperbaiki iklim usaha domestik melalui penyederhanaan birokrasi, percepatan perizinan berusaha, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan konsistensi kebijakan lintas sektor guna meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat realisasi investasi.
- Memperluas akses pembiayaan investasi, khususnya untuk sektor-sektor strategis dan proyek berjangka panjang, melalui penguatan koordinasi dengan lembaga pembiayaan, perbankan, dan lembaga keuangan non bank, serta optimalisasi peran pembiayaan pembangunan.
- Mempercepat realisasi proyek investasi dan pembentukan aset tetap, dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), agar investasi yang telah terealisasi dapat segera terkonversi menjadi PMTB.
- Memperkuat koordinasi dan penegasan tugas antar unit kerja, melalui harmonisasi struktur, klarifikasi mandat, dan pembagian peran yang lebih terukur guna meminimalkan tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
- Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam promosi investasi dan pelaksanaan proyek prioritas,

agar pelaksanaan investasi lebih merata dan memberikan kontribusi optimal terhadap PMTB nasional.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Efisiensi dalam mencapai target kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan sumber daya yang digunakan mampu memberikan dampak optimal terhadap peningkatan investasi produktif. Adapun bentuk efisiensi dalam pencapaian target PMTB antara lain sebagai berikut:

- Optimalisasi koordinasi lintas kementerian/ lembaga, sehingga kebijakan dan program investasi lebih terarah dan saling mendukung dalam mendorong pembentukan aset tetap produktif.
- Pemfokusan kegiatan pada sektor prioritas, seperti hilirisasi industri, infrastruktur, dan industri pengolahan, agar realisasi investasi memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap peningkatan PMTB.
- Pemanfaatan mekanisme kerja yang lebih efisien, termasuk pelaksanaan rapat dan koordinasi secara hybrid serta penggunaan platform digital, yang mampu menekan biaya operasional dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- Digitalisasi dan penyederhanaan proses perizinan serta pemantauan investasi, sehingga hambatan administratif dapat diminimalkan dan realisasi investasi lebih cepat terkonversi menjadi pembentukan modal tetap.
- Pengendalian dan sinkronisasi program secara berkelanjutan, untuk menghindari duplikasi kegiatan dan memastikan penggunaan sumber daya yang tepat sasaran.
- Penerapan prinsip efisiensi anggaran, dengan mengalokasikan hasil penghematan sumber daya ke kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

B.2.4**RASIO PDB INDUSTRI PENGOLAHAN**

Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan atau *Manufacturing GDP* adalah bagian dari PDB yang secara khusus mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam periode tertentu. Sektor ini mencakup kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Di Indonesia, industri pengolahan memegang peranan strategis sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian karena kontribusinya yang besar terhadap PDB, kemampuannya menciptakan lapangan kerja, serta tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Rasio PDB Industri Pengolahan merupakan indikator yang menunjukkan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDB nasional. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perekonomian suatu negara ditopang oleh aktivitas industri manufaktur serta tingkat transformasi struktural ekonomi dari sektor primer menuju sektor bernilai tambah tinggi. Rasio yang tinggi mencerminkan kuatnya basis industri nasional, meningkatnya daya saing ekonomi, serta kemampuan perekonomian untuk tumbuh secara lebih berkelanjutan dan inklusif. Sebaliknya, rasio yang menurun dapat mengindikasikan melemahnya peran industri pengolahan dalam struktur ekonomi.

Pengukuran Rasio PDB Industri Pengolahan dilakukan dengan membandingkan nilai PDB sektor industri pengolahan terhadap total PDB, kemudian dikalikan seratus persen. Secara

matematis, rasio ini dihitung dengan rumus: $\text{Rasio PDB Industri Pengolahan} = (\text{PDB Industri Pengolahan} / \text{Total PDB}) \times 100\%$. Apabila nilai PDB industri pengolahan meningkat lebih cepat dibandingkan total PDB, maka rasio akan meningkat, yang menandakan penguatan peran industri manufaktur. Sebaliknya, jika pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, maka rasio tersebut akan menurun.

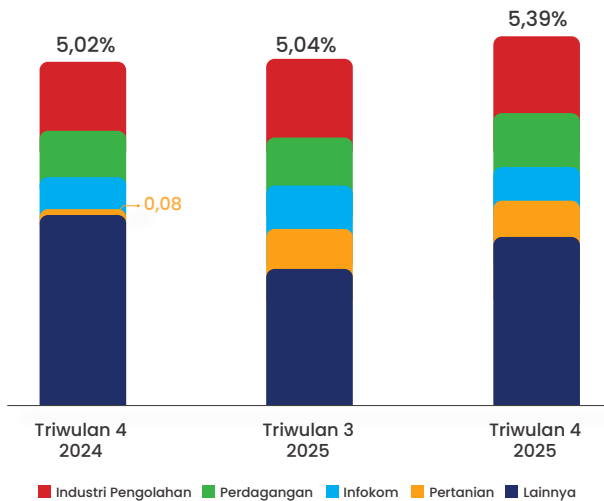
Tujuan utama pengukuran Rasio PDB Industri Pengolahan adalah untuk menilai kontribusi sektor industri pengolahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Indikator ini bersifat *ultimate outcome*, karena mencerminkan hasil akhir dari berbagai kebijakan, program, serta proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan pemerintah di bidang perekonomian. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan target Rasio PDB Industri Pengolahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan peran strategis dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, memperkuat iklim investasi, mendorong hilirisasi industri, serta memastikan sektor industri pengolahan tetap menjadi pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia.

**CAPAIAN KINERJA RASIO PDB
INDUSTRI PENGOLAHAN**

Dalam struktur PDB nasional, industri pengolahan tetap menjadi bagian dari lima sektor utama penyumbang nilai tambah bruto nasional, bersama dengan sektor pertanian, perdagangan,



konstruksi, dan pertambangan. Ini mencerminkan konsistensi peran sektor manufaktur sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis produksi.



Sektor industri pengolahan secara konsisten menjadi salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun yang diamati, yaitu dari Tahun 2024 hingga 2025. Pada Tahun 2024, industri pengolahan memberikan sumbangan sekitar 1,00 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, yang mencerminkan peran strategis sektor manufaktur dalam menopang aktivitas ekonomi nasional. Memasuki Tahun 2025, kontribusi industri pengolahan meningkat menjadi sekitar 1,13 poin persentase pada paruh tahun dan tetap berada pada level yang tinggi hingga akhir tahun, sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan kinerja sektor industri pengolahan yang didorong oleh peningkatan kapasitas produksi, perbaikan permintaan domestik, serta keberlanjutan investasi dan kebijakan hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih besar terhadap perekonomian.

Sepanjang Tahun 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada kisaran 1,10 poin persentase, bersamaan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,39%. Meskipun terjadi dinamika dan penyesuaian dalam kontribusinya, sektor industri pengolahan tetap menunjukkan ketahanan dan peran kunci sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Stabilitasnya kontribusi tersebut mencerminkan kemampuan sektor manufaktur dalam beradaptasi terhadap tantangan eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi biaya produksi, sekaligus menegaskan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Dengan demikian, sepanjang tahun pengamatan, industri pengolahan tetap menjadi pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih produktif, berkelanjutan, dan inklusif.

Target Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 20,8 persen, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran sektor industri pengolahan sebagai pilar utama struktur perekonomian nasional. Penetapan target tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah, memperkuat daya saing industri, serta memastikan bahwa proses transformasi ekonomi menuju sektor-sektor produktif bernilai tinggi dapat berjalan secara berkelanjutan. Hingga saat laporan kinerja ini disusun, capaian Rasio PDB Industri Pengolahan sepanjang Tahun 2025 telah diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut :

Tabel 3.7. Capaian Rasio PDB Industri Pengolahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.4	Rasio PDB Industri Pengolahan	Persentase	20,08%	19,07%	91,63%

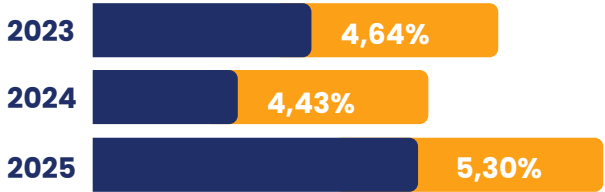
Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan sepanjang Tahun 2025 tercatat sebesar 19,07 persen. Angka ini menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional selama periode pelaporan. Meskipun sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian, realisasi tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 20,08 persen, sehingga secara nominal terdapat selisih capaian yang mencerminkan belum optimalnya peran industri pengolahan dalam struktur PDB nasional.

Dari sisi kinerja, capaian Rasio PDB Industri Pengolahan pada Tahun 2025 mencapai 91,63 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja sektor industri pengolahan masih berada pada level yang relatif baik, namun belum sepenuhnya memenuhi sasaran strategis yang diharapkan. Persentase kinerja tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar program dan kebijakan penguatan industri telah berjalan, termasuk upaya mendorong industrialisasi, peningkatan nilai tambah, serta pengembangan sektor manufaktur. Namun demikian, capaian yang belum optimal menandakan masih adanya ruang perbaikan untuk memperkuat kontribusi industri pengolahan agar sejalan dengan arah transformasi ekonomi nasional.

Tidak tercapainya target Rasio PDB Industri Pengolahan pada Tahun 2025 dipengaruhi

oleh beberapa faktor, antara lain dinamika perekonomian global yang berdampak pada permintaan eksternal dan kinerja ekspor manufaktur, serta tekanan biaya produksi yang mempengaruhi daya saing industri. Selain itu, pertumbuhan sektor-sektor lain di luar industri pengolahan yang relatif lebih cepat turut menyebabkan porsi kontribusi industri pengolahan terhadap total PDB menjadi relatif menurun. Faktor struktural domestik, seperti keterbatasan kapasitas produksi pada subsektor tertentu, tantangan rantai pasok, serta perlambatan realisasi investasi industri, juga berkontribusi terhadap belum optimalnya capaian rasio tersebut. Dengan demikian, ketidaktercapaian target lebih mencerminkan adanya tantangan struktural dan dinamika ekonomi, bukan melemahnya peran industri pengolahan secara fundamental.

Pertumbuhan Industri Pengolahan

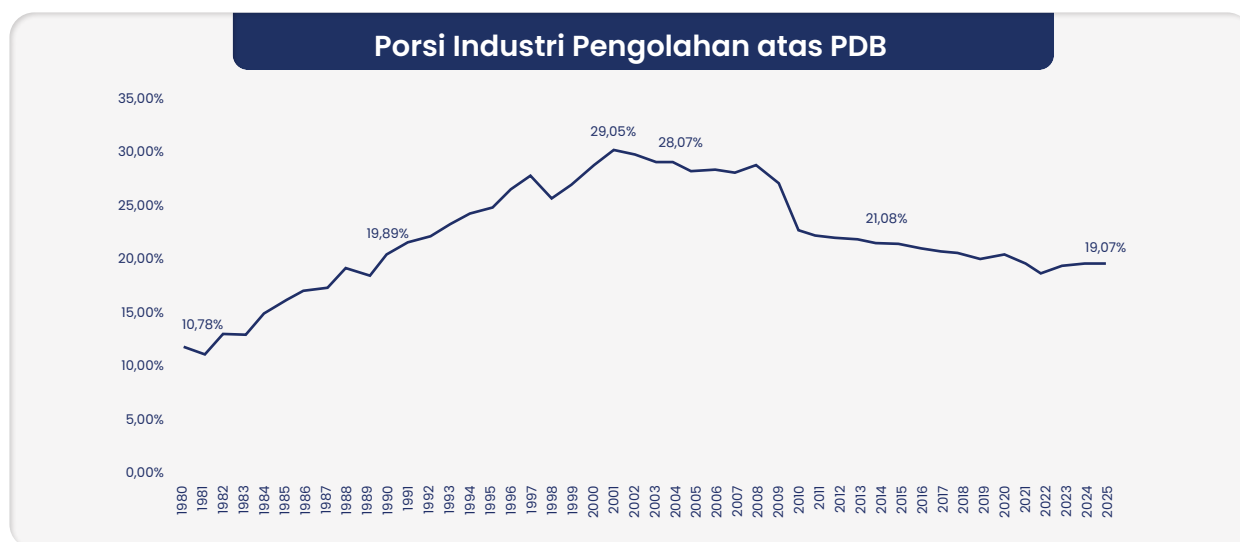


Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2026)

Pertumbuhan industri pengolahan mengalami penguatan yang signifikan dalam periode 2023–2025 dan pada Tahun 2025 tercatat melampaui pertumbuhan PDB nasional. Pada tahun 2023,



industri pengolahan tumbuh sebesar 4,64 persen, kemudian mengalami sedikit perlambatan pada Tahun 2024 menjadi 4,43 persen, seiring dengan dinamika ekonomi global dan penyesuaian permintaan. Namun demikian, pada Tahun 2025 pertumbuhan industri pengolahan meningkat tajam hingga mencapai 5,30 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nasional Tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,11 persen. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya peran sektor industri pengolahan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, didorong oleh peningkatan aktivitas manufaktur, berlanjutnya realisasi investasi, serta dampak positif kebijakan hilirisasi dan penguatan industri bernilai tambah. Pertumbuhan industri pengolahan yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional tersebut menunjukkan adanya perbaikan struktur ekonomi, di mana sektor-sektor produktif dengan nilai tambah tinggi semakin dominan dalam mendorong kinerja perekonomian Indonesia secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Porsi Industri Pengolahan atas PDB menggambarkan dinamika kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Sejak awal periode pengamatan, porsi industri pengolahan menunjukkan tren peningkatan yang kuat, dari sekitar 10,78 persen pada awal 1980-an hingga mencapai puncaknya pada kisaran 29,05 persen pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan proses industrialisasi yang menjadikan sektor manufaktur sebagai tulang punggung

perekonomian nasional pada periode tersebut. Setelah mencapai titik tertinggi, porsi industri pengolahan cenderung mengalami penurunan secara bertahap seiring dengan pergeseran struktur ekonomi, menguatnya sektor jasa, serta berbagai tantangan global dan domestik yang mempengaruhi kinerja industri. Hingga Tahun 2024, kontribusi industri pengolahan berada pada kisaran 19,07 persen, yang menunjukkan bahwa sektor ini tetap memiliki peran penting meskipun belum kembali ke level kontribusi tertingginya.

Data Skor Purchasing Managers' Index (PMI) 2025



Sumber: S&P Global (2026)

Pada level global terdapat perhitungan rasio atau skor Purchasing Managers' Index (PMI) merupakan indikator ekonomi yang mengukur tingkat aktivitas sektor manufaktur berdasarkan survei terhadap manajer pembelian, mencakup komponen produksi, pesanan baru, ketenagakerjaan, waktu pengiriman, dan persediaan, dengan skala 0–100 poin, di mana nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi aktivitas dan di bawah 50 mencerminkan kontraksi. Berdasarkan data PMI manufaktur negara-negara ASEAN, terlihat bahwa kinerja Indonesia berada pada level 51,2, yang menempatkannya di atas ambang ekspansi dan relatif sejalan dengan rata-rata ASEAN sebesar 52,7, meskipun masih berada di bawah Thailand (57,4), Singapura (54,1), dan Vietnam (53,0). Posisi Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan Myanmar (50,6), Filipina (50,2), dan Malaysia (50,1) mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur domestik masih menunjukkan ketahanan dan arah ekspansi yang moderat. Kondisi ini memperkuat analisis bahwa sektor industri pengolahan Indonesia tetap bergerak positif, meskipun laju ekspansinya belum sekuat beberapa negara ASEAN lain, dan selaras dengan capaian Rasio PDB Industri Pengolahan serta peran sektor manufaktur sebagai penopang pertumbuhan Ekonomi.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA RASIO PDB INDUSTRI PENGOLAHAN

Dalam konteks makroekonomi, industri pengolahan merupakan indikator ekonomi yang sangat penting karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja. Kinerja sektor industri pengolahan tidak hanya mencerminkan kekuatan basis produksi nasional, tetapi juga menjadi penentu utama daya saing ekonomi dan ketahanan struktur PDB. Perubahan porsi industri pengolahan terhadap PDB memberikan sinyal penting mengenai arah transformasi ekonomi, tingkat industrialisasi, serta keberhasilan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan peran industri pengolahan menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan bahwa pertumbuhan PDB didukung oleh sektor-sektor produktif dengan nilai tambah tinggi. Untuk mencapai target Rasio PDB Industri Pengolahan sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja sektor industri secara langsung, tetapi juga melakukan penguatan terhadap berbagai



indikator pendukung yang memiliki keterkaitan erat dengan kinerja industri pengolahan sebagai berikut:

a. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kinerja Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas

Pada Tahun 2025, kinerja sub-sektor industri batubara dan migas menunjukkan capaian yang relatif positif dan menjadi pondasi penting bagi penguatan industri pengolahan energi nasional. Produksi batubara hingga Tahun 2025 mencapai sekitar 72,5 persen dari target tahunan atau setara dengan 535,8 juta ton dari target 739 juta ton. Berdasarkan data sementara hingga Agustus 2025, realisasi produksi batubara tercatat sebesar 68,9 persen atau 509,3 juta ton, sementara realisasi pemenuhan kebutuhan domestik (*Domestic Market Obligation/DMO*) batubara mencapai 73,1 persen dari target tahunan atau sekitar 135 juta ton. Capaian tersebut mencerminkan terjaganya pasokan batubara untuk kebutuhan industri dalam negeri, khususnya sektor industri pengolahan energi dan manufaktur berbasis energi, yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan aktivitas produksi nasional.

Dari sisi hulu migas, kinerja *lifting* minyak bumi Tahun 2025 menunjukkan hasil yang melampaui target. Rata-rata capaian *lifting* minyak bumi mencapai 605,3 ribu barrel per hari (BOPD), atau sekitar 100,05 persen dari target tahunan sebesar 605 ribu BOPD. Capaian ini didukung oleh berbagai proyek strategis hulu migas yang berfokus pada optimalisasi lapangan eksisting dan percepatan pengembangan lapangan baru. Blok Rokan tetap menjadi kontributor utama melalui kegiatan pemboran sumur pengembangan, *workover*, *well services*, serta reaktivasi

sumur tidak aktif yang mampu menahan laju penurunan produksi lapangan matang. Selain itu, Blok Cepu, khususnya Lapangan Banyu Urip, serta Blok Mahakam juga memberikan kontribusi signifikan melalui peningkatan keandalan fasilitas produksi, pengelolaan reservoir berkelanjutan, dan optimalisasi fasilitas eksisting. Upaya ini diperkuat oleh dukungan kebijakan pemerintah, termasuk percepatan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, dan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberikan fleksibilitas pengelolaan wilayah kerja untuk mendorong peningkatan produksi migas nasional.

Sementara itu, kinerja gas bumi dan penyaluran energi domestik juga menunjukkan peran strategis dalam mendukung aktivitas industri pengolahan. Pada Tahun 2025, rata-rata capaian *lifting* gas bumi tercatat sebesar 951,8 ribu BOEPD, meskipun masih berada di bawah target APBN sebesar 1.005 ribu BOEPD. Di sisi hilir, realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga Desember 2025 mencapai 95,89 persen dari kuota tahunan atau sebesar 18,61 juta kiloliter, yang mencerminkan terjaganya pasokan energi bagi sektor industri dan masyarakat. Secara keseluruhan, capaian produksi batubara, *lifting* migas, dan distribusi energi tersebut memberikan dukungan langsung terhadap kinerja industri pengolahan, khususnya sub-sektor energi, melalui ketersediaan bahan baku dan energi yang stabil. Kondisi ini memperkuat kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional dan menjadi salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, di mana peningkatan nilai tambah sektor energi hilir berperan

penting dalam mendorong rasio PDB industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bauran Kebijakan Hilirisasi Industri Batubara dan Pengilangan Migas

Dalam rangka mendukung kinerja industri pengolahan industri pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas telah dilakukan berbagai kegiatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola sektor ekstraktif, meningkatkan kepastian kebijakan, mendorong praktik industri yang berkelanjutan, serta memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara sektor hulu dan industri pengolahan sub-sektor industri batu bara dan pengilangan migas

Implementasi Aglomerasi Industri

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di dalam maupun luar Kawasan Industri (KI) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas. Fasilitasi ini dilakukan untuk mendukung aktivitas rantai pasok antara kilang migas dan pabrik petrokimia. Adapun wujud fasilitasi yang dilakukan melalui Program Proyek Strategis Nasional dan Program Infrastruktur Prioritas yang tata kelolanya dibawah kendali KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) dan merupakan unit yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian.

Akselerasi Proyek Gasifikasi Batubara (Coal-to-DME)

Sepanjang Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kepastian investasi dan insentif untuk proyek

gasifikasi guna substitusi LPG. Kepastian investasi dan insentif untuk proyek gasifikasi dilakukan melalui Penetapan skema harga khusus batubara (*Domestic Market Obligation*) untuk hilirisasi dan koordinasi pemberian *tax holiday* bagi proyek gasifikasi di Tanjung Enim dan Kalimantan.

Penyelesaian Operasional Kilang RDMP Balikpapan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan koordinasi intensif guna memastikan *mechanical completion* dan transisi ke fase operasional penuh. Adapun fokus koordinasi diarahkan pada fasilitasi *debottlenecking* perizinan impor katalis dan integrasi logistik distribusi BBM hasil kilang ke wilayah Indonesia Timur. Dampak dari koordinasi yang dilakukan adalah meningkatnya kapasitas kilang menjadi menjadi 360.000 barel per hari.

Transformasi Kilang menjadi Chemical Refinery

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong perubahan model bisnis kilang dari yang sebelumnya hanya memproduksi BBM menjadi kilang yang terintegrasi dengan produksi bahan baku petrokimia (seperti olefin dan aromatik).

Hilirisasi Batubara menjadi Amonia dan Pupuk

Perluasan hilirisasi batubara tidak hanya untuk energi (DME), tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2025 telah melakukan Koordinasi sinkronisasi kebutuhan gas bumi dengan gasifikasi batubara untuk pabrik pupuk di Papua Barat dan Kalimantan Timur.



b. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar

Dari sisi kapasitas dan produksi, sepanjang Tahun 2025 kapasitas smelter nikel mencapai 36,22 juta ton, melampaui target yang ditetapkan sebesar 33,64 juta ton. Capaian ini terutama ditopang oleh dominasi smelter nikel berbasis pirometalurgi yang mencapai 22,89 juta ton, sementara smelter berbasis hidrometalurgi berkontribusi 3,46 juta ton, menunjukkan mulai berimbangnya teknologi pengolahan nikel. Produksi nikel elektrolisis meskipun masih relatif kecil, yakni 0,12 juta ton, menunjukkan arah penguatan produk bernilai tambah tinggi. Selain itu, produksi produk hilir nikel seperti *stainless steel*, slab, billet, HRC, dan CRC yang mencapai 9,76 juta ton menegaskan semakin dalamnya proses hilirisasi nikel di dalam negeri. Pada komoditas bauksit, kapasitas smelter sepanjang Tahun 2025 tercatat 7,00 juta ton, lebih tinggi dari target 6,27 juta ton, dengan dominasi produksi alumina sebesar 6,30 juta ton sebagai fondasi industri aluminium nasional, disertai produksi aluminium ingot, billet, serta produk hilir lainnya yang menunjukkan peningkatan diversifikasi dan nilai tambah.

Sementara itu, kapasitas smelter tembaga sepanjang Tahun 2025 mencapai 735 ribu ton, masih berada di bawah target 1.195 ribu ton, namun telah menghasilkan produk hilir berupa katoda tembaga sebesar 325 ribu ton, tembaga foil 50 ribu ton, serta tembaga rod dan wire 360 ribu ton yang mencerminkan kuatnya permintaan sektor kelistrikan dan manufaktur. Pada sub-sektor timah, kapasitas smelter tercatat 134,3 ribu ton, mendekati target 142,1 ribu ton, dengan dominasi produk

hilir berupa timah solder dan anode solder sebesar 125,9 ribu ton, yang menunjukkan orientasi industri timah nasional pada produk antara dan hilir. Secara keseluruhan, capaian sepanjang Tahun 2025 ini mengindikasikan bahwa pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam bernilai tambah telah berjalan sesuai arah kebijakan. Dampak yang dihasilkan mencakup peningkatan nilai tambah domestik, penguatan substitusi impor, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja, sekaligus menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi industri pertambangan.

Bauran Kebijakan Hilirisasi Industri Logam Dasar

Sepanjang Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memperluas fokus hilirisasi dari sekadar nikel menuju ekosistem industri logam dasar yang lebih kompleks, terutama untuk mendukung rantai pasok global kendaraan listrik (EV) dan digitalisasi:

Pengembangan Ekosistem Hilirisasi Bauksit ke Aluminium

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan percepatan penyelesaian fasilitas pemurnian (*smelter*) bauksit setelah pemberlakuan larangan ekspor bijih mentah. Fokus Sinkronisasi sepanjang Tahun 2025 diarahkan pada pembangunan smelter alumina seperti di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Pembangunan smelter ini diharapkan dapat mendorong ketersediaan pasokan bahan baku industri otomotif dan kemasan domestik.

Hilirisasi Tembaga Terintegrasi

Tahun 2025 merupakan fase operasional penuh bagi smelter tembaga *single line* terbesar di dunia yang berlokasi di Gresik. Capaian ini tidak terlepas dari hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengarah pada fasilitasi integrasi antara hasil olahan tembaga (katoda tembaga) dengan industri manufaktur kabel dan komponen elektronik dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah lebih dari 10 kali lipat.

Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik (Hilirisasi Nikel ke Prekursor)

Fokus koordinasi sepanjang Tahun 2025 diarahkan pada upaya untuk mendorong industri nikel naik kelas dari sekadar NPI (*Nickel Pig Iron*) menjadi komponen baterai. Sejumlah koordinasi lintas kementerian (Investasi/BKPM dan Kemenperin) telah dilaksanakan untuk memberikan insentif pajak (*Tax Holiday*) pada pabrik pemurnian nikel dengan teknologi HPAL (*High Pressure Acid Leaching*) yang menghasilkan MHP (*Mixed Hydroxide Precipitate*).

Hilirisasi Pasir Besi dan Industri Baja (Iron & Steel)

Memastikan ketersediaan baja berkualitas tinggi merupakan faktor penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Pada tahun 2025, melalui SETDENAS KEK yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelesaikan sinkronisasi kebijakan impor gas bumi dengan harga tertentu (HGBT) untuk industri baja di Cilegon agar biaya produksi kompetitif dibandingkan baja impor.

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2024 Industri IAKFT memberikan kontribusi sebesar 63,37 persen terhadap PDB sektor industri pengolahan, yang menegaskan perannya sebagai kontributor utama dalam struktur industri nasional. Industri agro berperan sebagai pemasok bahan baku utama bagi industri makanan, minuman, dan tekstil; industri kimia dan farmasi menyediakan input penting bagi berbagai sektor produksi; sementara industri tekstil dan produk tekstil memiliki dampak sosial ekonomi yang luas melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pengukuran peningkatan kontribusi Industri IAKFT terhadap PDB dilakukan dengan menghitung kontribusi kumulatif sembilan sub-bidang industri IAKFT terhadap PDB nasional, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Secara konseptual, peningkatan kontribusi IAKFT terhadap PDB dihitung sebagai penjumlahan kontribusi masing-masing sub-bidang industri IAKFT terhadap PDB, berdasarkan data statistik resmi yang dipublikasikan oleh BPS. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target persentase realisasi rencana aksi yang telah ditetapkan.

Bauran Kebijakan Optimalisasi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Penguatan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan P3DN

Peningkatan penyerapan output industri agro, kimia, farmasi, dan tekstil (IAKFT) dalam belanja pemerintah serta rantai pasok



nasional. Kebijakan ini berperan mendorong substitusi impor, memperluas pasar domestik bagi produk industri IAKFT, serta meningkatkan utilisasi kapasitas produksi industri pengolahan. Dengan meningkatnya permintaan domestik terhadap produk dalam negeri, industri manufaktur dapat beroperasi lebih optimal, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap nilai tambah dan memperkuat peran sektor industri pengolahan dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR)

Instrumen ekonomi sirkular yang relevan bagi industri kimia, farmasi, dan tekstil dalam mendorong efisiensi penggunaan input material dan pengelolaan limbah berbasis nilai tambah. Implementasi EPR mendorong pelaku industri untuk mengadopsi proses produksi yang lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing industri dalam jangka menengah dan panjang. Melalui peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan pengembangan model bisnis berkelanjutan, kebijakan EPR mendukung penguatan kinerja industri pengolahan dan berkontribusi terhadap peningkatan rasio PDB sektor manufaktur.

c. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kinerja Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka

Sektor ILMATEA memiliki peran strategis dalam struktur industri pengolahan non-migas karena menghasilkan berbagai produk antara dan barang modal yang menjadi input utama bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Pada awal Tahun 2025, kontribusi sektor ILMATEA

terhadap PDB nasional tercatat sebesar 4,37 persen, yang menunjukkan signifikansi sektor ini dalam menopang aktivitas ekonomi nasional. Meskipun laju pertumbuhan sektor ILMATEA masih sedikit berada di bawah pertumbuhan PDB nasional dan industri pengolahan non-migas secara keseluruhan, sektor ini tetap memiliki potensi besar untuk menjadi akselerator pertumbuhan melalui peningkatan kapasitas produksi, substitusi impor, serta penguatan industri manufaktur berorientasi ekspor.

Pengembangan sektor ILMATEA dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan yang menitikberatkan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor, khususnya dalam industri pengolahan non-migas. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian memegang peran utama sebagai pelaksana teknis pengembangan industri, sementara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan fungsi koordinatif untuk memastikan keselarasan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Pendekatan ini bertujuan menghindari fragmentasi kebijakan, mempercepat implementasi program strategis, serta memastikan bahwa pengembangan sektor ILMATEA memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kontribusinya terhadap PDB nasional.

Bauran Kebijakan Optimalisasi Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka

Penguatan industri teknologi semikonduktor

Pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru, termasuk penyempurnaan Draft Rancangan Peraturan Presiden.

Kegiatan ini diperkuat dengan penyusunan *Joint Declaration of Intent* (JDol) kerja sama promosi perdagangan bagi industri kecil dan menengah dengan Jerman, serta koordinasi kerjasama *business-to-business* (B2B) bidang semikonduktor dengan mitra internasional seperti Belanda (High Tech NL), yang difokuskan pada penguatan rantai pasok global, riset dan inovasi, pengembangan *photonic integrated circuits* (PIC), serta penciptaan *enabling environment* industri. Upaya ini menjadi pondasi penting bagi peningkatan nilai tambah, investasi berteknologi tinggi, dan kontribusi jangka panjang industri pengolahan terhadap PDB.

Pengamanan pasokan bahan baku industri logam dan baja nasional

Melalui penanganan isu impor scrap besi baja yang berkaitan dengan paparan radionuklida Cesium-137 (Cs-137). Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang aman, berkelanjutan, dan sesuai standar, sekaligus menjaga kelancaran operasional industri logam dan baja sebagai tulang punggung sektor ILMATEA. Kepastian pasokan bahan baku tersebut berperan penting dalam menjaga kontinuitas produksi, meningkatkan utilisasi kapasitas industri, dan mendorong peningkatan output industri pengolahan yang berkontribusi langsung terhadap PDB.

d. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular

Ekonomi sirkular menjadi bagian integral pembangunan nasional yang secara eksplisit dinyatakan dalam RPJMN 2025–2029 khususnya dalam PN 2 yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi

digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Adapun PN indeks ekonomi hijau diterjemahkan dalam 3 indikator PN yaitu pembangunan rendah karbon, pembangunan ekosistem ekonomi sirkular, dan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Berdasarkan studi global, telah teridentifikasi tingkat penggunaan input material sirkular saat ini berada di tingkat 7–8%. Secara nasional, penyusunan baseline perhitungan Indikator Dasar Nasional Terintegrasi (ANBI) dibangun berdasarkan nilai perhitungan sektoral, baik dalam hal tingkat input material sirkular, daya tahan produk, dan tingkat daur ulang. Perhitungan tingkat nasional menggunakan metode tertimbang, dimana faktor pembobotan yang digunakan adalah kontribusi sektor terhadap PDB. Dari sektor utama fokus Ekonomi Sirkular, sektor/ industri dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah Plastik (10.7%) dan Konstruksi (10,1%). Namun secara sektoral, sektor dengan penggunaan input material terbesar adalah sektor/industri Konstruksi (73%) dan Elektronik (18.25%). Perhitungan pencapaian indikator tingkat penggunaan input material RPJMN 2025–2029 akan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku penghasil data perhitungan baseline tingkat input material sirkular dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, namun demikian ke depan dapat berubah jika terdapat transfer knowledge perhitungan.

Peran Kemenko Perekonomian dalam ekonomi sirkular dapat diimplementasikan melalui sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk deregulasi kemudahan untuk industri dalam melakukan daur ulang, mengkoordinasikan kebijakan yang dapat mengubah paradigma produsen dalam mendesain produk agar



mempertimbangkan seluruh siklus hidup suatu barang produksi (*Extended Producer Responsibility*), memastikan keberlanjutan kebijakan atau rencana kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi sirkular, menciptakan ekosistem sirkular melalui mekanisme insentif dan disinsentif, dan mendorong kerja sama dengan sektor publik dan swasta untuk dukungan pembiayaan maupun keahlian.

Bauran Kebijakan Implementasi penggunaan input material

Penguatan Kerjasama Asia Zero Emission Community (AZEC)

Asia Zero Emission Community (AZEC) merupakan inisiatif kerja sama regional yang diprakarsai oleh Pemerintah Jepang sejak tahun 2022 dalam kerangka *Green Transformation* (GX) untuk mendorong transisi energi, dekarbonisasi industri, serta penggunaan input material dan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan di kawasan Asia. Dalam konteks ekonomi sirkular, AZEC berperan sebagai platform kerja sama yang mendorong pemanfaatan teknologi rendah karbon, peningkatan efisiensi energi, dan optimalisasi penggunaan sumber daya melalui pendekatan *one goal, various pathways* yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara mitra. Implementasi kerja sama AZEC di Indonesia menunjukkan capaian yang sangat baik, tercermin dari Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek JCM dan AZEC. Hingga tahun 2025, tercatat terdapat 118 kesepakatan proyek kerja sama AZEC antara Jepang dan negara mitra, dengan 21 proyek di antaranya melibatkan Indonesia, yang tersebar pada sektor energi bersih dan industri, termasuk

pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi, kelistrikan, peningkatan kapasitas transmisi dan distribusi, serta proyek PLTS Rooftop berkapasitas sekitar 4,2 MW yang terpasang di 13 lokasi pabrik dan fasilitas industri. Melalui peningkatan efisiensi energi, penurunan biaya produksi, dan penguatan daya saing industri manufaktur, implementasi AZEC turut mendukung peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, sehingga berkontribusi terhadap penguatan peran industri pengolahan dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan industri pengolahan telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menjaga dan memperkuat kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun dihadapkan pada dinamika ekonomi global dan domestik, kinerja sektor industri pengolahan mampu tetap tumbuh dan mempertahankan perannya sebagai motor utama perekonomian nasional. Keberhasilan ini tercermin dari tercapainya target Rasio PDB Industri Pengolahan serta kontribusinya yang konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian tersebut antara lain:

- Terjaganya permintaan domestik melalui kebijakan stabilisasi konsumsi dan dukungan terhadap sektor-sektor padat karya, sehingga permintaan produk manufaktur tetap tumbuh dan menopang output industri pengolahan.

- Ketahanan industri terhadap tekanan global, di mana meskipun terjadi perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian perdagangan internasional, industri pengolahan nasional mampu beradaptasi melalui diversifikasi pasar, penguatan pasar domestik, serta pemanfaatan kebijakan perdagangan dan pengamanan industri dalam negeri.
- Pengendalian biaya produksi secara bertahap, khususnya melalui koordinasi kebijakan energi, logistik, dan efisiensi rantai pasok, yang membantu menjaga daya saing industri pengolahan di tengah tekanan biaya global.
- Penguatan substitusi impor dan pengendalian ketergantungan bahan baku, yang dilakukan melalui pengembangan industri hulu, kebijakan P3DN, serta pengendalian impor tertentu, sehingga risiko fluktuasi nilai tukar dan harga global dapat diminimalkan.
- Peningkatan utilisasi kapasitas industri, terutama pada subsektor unggulan seperti makanan dan minuman, kimia, farmasi, serta logam dasar, yang menunjukkan bahwa kapasitas produksi nasional semakin optimal dalam menciptakan nilai tambah domestik.
- Percepatan diversifikasi dan pendalaman struktur industri, melalui pengembangan industri bernilai tambah tinggi, transformasi teknologi, serta penguatan industri berbasis inovasi dan manufaktur modern, yang mulai memperluas basis kontribusi industri pengolahan terhadap PDB.
- Kemajuan hilirisasi industri strategis, yang meskipun belum sepenuhnya merata, telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan nilai tambah domestik,

memperluas rantai pasok nasional, dan memperkuat fondasi industri pengolahan jangka menengah.

- Meningkatnya efektivitas sinkronisasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor, khususnya antara kementerian/lembaga pusat dan pemerintah daerah, yang mempercepat realisasi investasi, ekspansi usaha, serta implementasi kebijakan industri secara lebih terarah.
- Dukungan insentif fiskal dan nonfiskal yang semakin tepat sasaran, terutama bagi industri padat karya, industri berorientasi ekspor, serta industri berteknologi menengah dan tinggi, sehingga mendorong peningkatan output dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Dalam proses pencapaian target kinerja Rasio PDB Industri Pengolahan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan industri menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi optimalisasi hasil yang dicapai. Adapun kendala yang dialami selama pencapaian target :

- Perlambatan permintaan global dan domestik, yang berdampak pada penurunan permintaan produk manufaktur, khususnya pada subsektor industri berorientasi ekspor dan barang konsumsi.
- Ketidakpastian ekonomi global, termasuk fluktuasi harga komoditas, geopolitik, dan kebijakan proteksionisme perdagangan, yang mempengaruhi kinerja ekspor dan keputusan investasi sektor industri pengolahan.
- Tingginya biaya produksi industri, terutama biaya energi dan logistik, yang menurunkan



daya saing produk industri pengolahan dalam negeri dibandingkan negara pesaing.

- Ketergantungan terhadap bahan baku impor, sehingga industri pengolahan rentan terhadap volatilitas nilai tukar dan kenaikan harga bahan baku internasional.
- Utilisasi kapasitas produksi yang belum optimal, terutama pada industri padat karya, yang menyebabkan potensi nilai tambah belum sepenuhnya terealisasi.
- Belum meratanya implementasi hilirisasi industri, sehingga dampak peningkatan nilai tambah domestik terhadap rasio PDB industri pengolahan masih terbatas pada subsektor tertentu.
- Kompleksitas regulasi dan keterbatasan sinkronisasi kebijakan lintas sektor, yang berpotensi menghambat percepatan investasi dan ekspansi usaha industri pengolahan.
- Keterbatasan dukungan insentif yang bersifat langsung, khususnya bagi industri berteknologi menengah dan tinggi, sehingga transformasi struktural industri berjalan lebih lambat dari target yang ditetapkan.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Rasio PDB Industri Pengolahan, pemerintah akan melakukan upaya perbaikan secara terarah dan berkelanjutan untuk memperkuat kinerja sektor industri pengolahan. Upaya perbaikan ini difokuskan pada penguatan daya saing industri, perbaikan iklim usaha, serta percepatan transformasi struktural industri agar kontribusi industri pengolahan terhadap

PDB nasional dapat meningkat secara optimal. Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Mendorong penguatan permintaan domestik dan ekspor manufaktur, melalui kebijakan peningkatan daya beli, promosi ekspor, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional guna memperluas akses pasar produk industri pengolahan.
- Memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global, dengan diversifikasi pasar ekspor dan penguatan industri berbasis pasar domestik untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.
- Menurunkan biaya produksi industri, khususnya biaya energi dan logistik, melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan efisiensi sistem logistik, serta penyediaan energi yang andal dan berdaya saing.
- Mengurangi ketergantungan bahan baku impor, dengan mendorong pengembangan industri hulu dan substitusi impor berbasis sumber daya domestik.
- Meningkatkan utilisasi kapasitas industri, melalui fasilitasi investasi, insentif bagi ekspansi usaha, serta penguatan keterkaitan industri hulu-hilir.
- Mempercepat dan memperluas implementasi hilirisasi industri, agar peningkatan nilai tambah domestik tidak hanya terkonsentrasi pada subsektor tertentu, tetapi merata di seluruh industri pengolahan.
- Menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi lintas sektor, guna mempercepat proses perizinan, meningkatkan kepastian usaha, dan menarik investasi industri pengolahan.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja Rasio PDB Industri Pengolahan, pemerintah menekankan pendekatan efisiensi melalui optimalisasi sumber daya, penguatan koordinasi kebijakan, serta perbaikan proses tanpa menambah beban fiskal yang berlebihan. Pendekatan ini bertujuan agar setiap program dan kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan nilai tambah industri pengolahan, sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan ekonomi. Efisiensi pencapaian target kinerja tersebut diwujudkan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- Optimalisasi kebijakan hilirisasi industri yang telah berjalan, dengan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas produksi dan infrastruktur industri eksisting untuk meningkatkan nilai tambah domestik.
- Penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan industri pengolahan berjalan

selaras dan terhindar dari tumpang tindih program maupun regulasi.

- Pemanfaatan data dan indikator kinerja makro ekonomi secara terintegrasi, khususnya data PDB menurut lapangan usaha, sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
- Fokus intervensi kebijakan pada subsektor industri dengan kontribusi terbesar, agar sumber daya dan upaya pemerintah diarahkan pada sektor yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan rasio PDB industri pengolahan.
- Penyederhanaan proses koordinasi dan monitoring kebijakan, melalui forum koordinasi rutin dan mekanisme evaluasi berkala guna mempercepat pengambilan keputusan dan tindak lanjut kebijakan.
- Penguatan kebijakan non-fiskal, seperti deregulasi dan fasilitasi investasi, untuk mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas industri pengolahan tanpa menambah beban anggaran pemerintah.





B.2.5

DEvisa PARIWISATA

Devisa Pariwisata adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam perekonomian nasional. Devisa ini diperoleh dari pengeluaran wisatawan mancanegara yang berkunjung ke suatu negara, khususnya melalui sektor pariwisata yang mencakup penginapan, makanan dan minuman, transportasi, serta berbagai layanan lainnya yang mendukung kegiatan pariwisata. Devisa pariwisata mencerminkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian negara, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Devisa Pariwisata menggambarkan sejauh mana sektor pariwisata berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan asing. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pengeluaran untuk akomodasi, makan, transportasi lokal, serta berbagai kegiatan wisata lainnya. Pencapaian yang lebih tinggi dalam devisa pariwisata menunjukkan bahwa sektor ini semakin produktif, mampu menarik lebih banyak wisatawan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Secara sederhana, devisa pariwisata menggambarkan besarnya pemasukan negara dari pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berkunjung ke Indonesia. Adapun sumber utama pembentuk devisa pariwisata sebagai berikut:

1. Akomodasi Pengeluaran wisatawan untuk penginapan adalah salah satu kontributor terbesar devisa pariwisata. Hal ini mencakup

pembayaran hotel, vila, resort, guesthouse, hingga homestay. Tingginya permintaan terhadap akomodasi berkualitas mendorong pengembangan industri perhotelan dan membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

2. Makanan dan Minuman (Kuliner) Kuliner Indonesia yang kaya cita rasa turut menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Dari restoran berbintang hingga warung kaki lima, pengeluaran wisatawan pada sektor makanan dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa, sekaligus mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.
3. Transportasi Lokal Setelah tiba di Indonesia, wisatawan membutuhkan transportasi untuk menjelajahi destinasi wisata. Belanja devisa pada sektor ini mencakup sewa kendaraan, tiket pesawat domestik, angkutan umum, kapal wisata, hingga jasa pemandu. Kualitas dan keterjangkauan moda transportasi mempengaruhi kenyamanan dan lama tinggal wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya pengeluaran mereka.
4. Belanja dan Oleh-oleh Kegiatan berbelanja menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wisata. Wisatawan biasanya membeli cendera mata, produk kerajinan tangan, pakaian, perhiasan, atau produk khas daerah lainnya. Pengeluaran ini menjadi ladang penghasilan bagi UMKM lokal, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah tujuan wisata.
5. Atraksi dan Rekreasi Wisatawan juga mengeluarkan uang untuk menikmati berbagai atraksi wisata, seperti tiket masuk objek wisata, pertunjukan budaya, taman hiburan, paket wisata bahari, dan kegiatan

petualangan alam. Semakin banyak pilihan atraksi berkualitas, maka semakin besar peluang devisa yang dihasilkan.

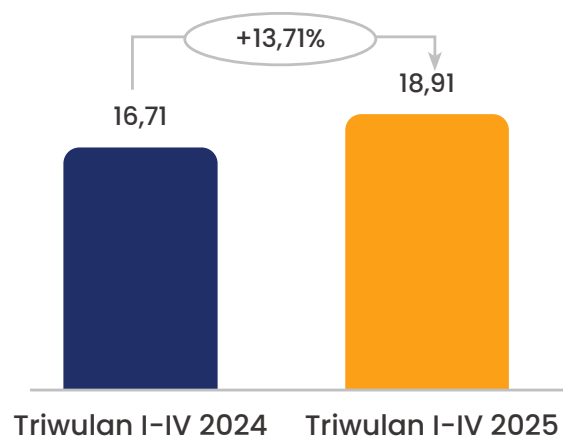
6. **Jasa Lainnya** Komponen ini mencakup berbagai layanan pendukung seperti jasa tur dan travel, fotografi profesional, spa dan wellness, komunikasi, dan layanan pribadi lainnya. Walaupun porsi ini tidak sebesar komponen utama lainnya, jasa ini turut memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus memberikan kontribusi tambahan terhadap devisa.

Dalam perumusannya, Devisa Pariwisata ini terdiri dari dua komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam periode tertentu, biasanya dihitung secara tahunan. Angka ini mencerminkan

volume wisatawan yang berhasil ditarik oleh daya tarik destinasi, promosi internasional, serta kemudahan akses masuk ke Indonesia. Komponen kedua adalah rata-rata pengeluaran per wisatawan mancanegara selama kunjungan mereka. Pengeluaran ini mencakup berbagai aktivitas seperti akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, transportasi lokal, rekreasi, belanja oleh-oleh, serta jasa lainnya. Kombinasi dari kedua komponen tersebut jumlah wisatawan dan besarnya pengeluaran mereka menghasilkan nilai devisa pariwisata yang digunakan sebagai indikator keberhasilan program pembangunan sektor pariwisata nasional. Penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja kementerian terkait, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan ekonomi nasional serta pembentukan kebijakan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

CAPAIAN KINERJA DEvisa PARIWISATA

**Devisa Pariwisata dari
Wisatawan Mancanegara**
(Dalam miliar dolar AS)



Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

Pada Tahun 2025, sektor pariwisata Indonesia mencatatkan pencapaian yang signifikan, dengan devisa pariwisata yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang tersedia, pada periode Januari – Desember 2025, rata-rata pengeluaran per kunjungan wisatawan mancanegara



tercatat mencapai US\$1.267, menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah wisatawan yang berkunjung. Peningkatan pengeluaran per wisatawan ini mencerminkan keberhasilan sektor pariwisata dalam memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pertumbuhan devisa pariwisata Indonesia tercatat naik sebesar 13,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan perilaku wisatawan yang lebih cenderung memilih perjalanan singkat, sektor pariwisata tetap memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Target Devisa Pariwisata terhadap adalah sebesar 19,00 Miliar USD – 22,10 Miliar USD pada Tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Devisa Pariwisata pada Tahun 2025, adapun angka proyeksi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar:

Tabel 3.8. Capaian Devisa Pariwisata Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.5	Devisa Pariwisata	Satuan Mata Uang	19,00–22,10 miliar USD	19,5 miliar USD	100%

Sepanjang Tahun 2025, kinerja devisa pariwisata Indonesia menunjukkan tren yang positif, khususnya pada Triwulan IV. Peningkatan ini tercermin dari capaian devisa pariwisata yang mencapai sekitar USD 18,91 Miliar, mengalami kenaikan signifikan dibandingkan capaian Tahun 2024 yang berada pada kisaran USD 16,71 Miliar. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya pemulihan dan penguatan sektor pariwisata nasional, yang didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, perpanjangan lama tinggal, serta pertumbuhan belanja wisata di berbagai destinasi unggulan Indonesia. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata kembali berperan strategis sebagai salah satu penyumbang utama devisa negara.

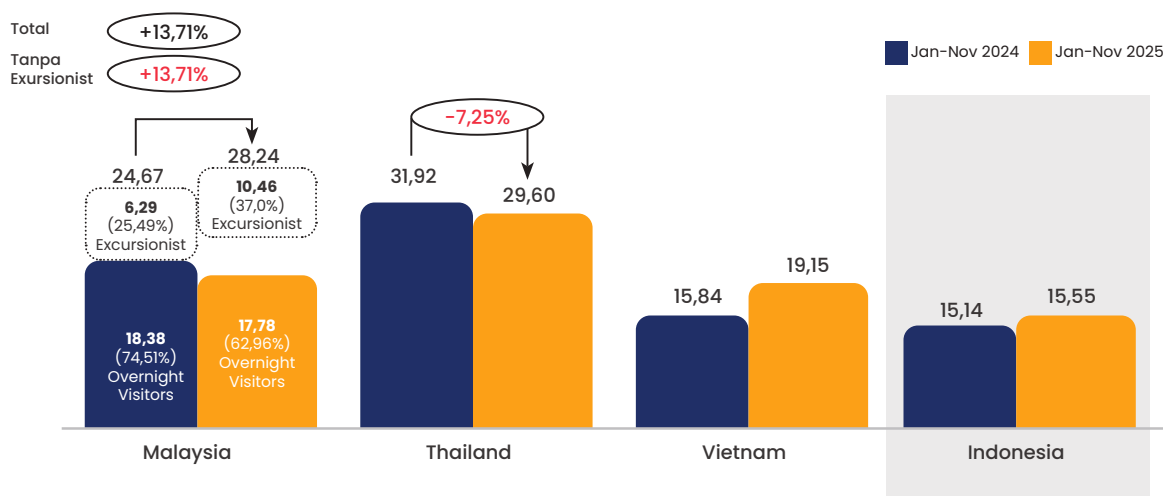
Namun demikian, perlu dicatat bahwa hingga laporan ini disusun dan diselesaikan, capaian indikator ekonomi makro untuk devisa pariwisata Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Bank

Indonesia. Namun, Kementerian Pariwisata mengeluarkan proyeksi capaian Devisa Pariwisata Tahun 2025 sebesar 19,5 Miliar USD. Hal ini diproyeksikan akan melampaui target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025. Oleh karena itu, data yang disajikan masih bersifat sementara dan mengacu pada estimasi serta tren perkembangan triwulanan yang tersedia. Pembaruan dan validasi lebih lanjut diperlukan setelah rilis resmi dilakukan, agar capaian devisa pariwisata dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan dijadikan dasar perumusan kebijakan serta evaluasi kinerja sektor pariwisata secara akurat.

Kenaikan ini mencerminkan peningkatan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional, yang didorong oleh berbagai upaya promosi yang lebih intensif serta perbaikan kualitas layanan di sektor pariwisata. Selain itu, kontribusi sektor ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata itu sendiri, tetapi juga

memberikan dampak positif pada sektor-sektor terkait lainnya, seperti akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, serta hiburan, yang semuanya menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Dengan pencapaian ini, sektor pariwisata diharapkan dapat berkontribusi sebesar 4,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada akhir tahun 2025. Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah terus mendorong diversifikasi destinasi wisata, penguatan desa wisata, dan memperluas promosi internasional untuk menarik wisatawan mancanegara dengan daya beli tinggi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi sektor ini sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Indonesia
(Jan-Nov 2024 dan Jan-Nov 2025) dalam juta kunjungan



Merupakan data Januari-Agustus 2025 karena data November belum dipublikasikan, data termasuk excursionist

Sumber: Kementerian Pariwisata (2025)

Pencapaian devisa pariwisata sepanjang Tahun 2025 menunjukkan tren positif di kawasan Asia Tenggara, meskipun terdapat perbedaan signifikan antara negara-negara yang bersangkutan. Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 10,44%, dengan total kunjungan mencapai 13,98 Juta wisatawan pada periode Januari hingga November Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan sektor pariwisata yang stabil dan pertumbuhan signifikan dibandingkan dengan negara lain di kawasan tersebut. Di sisi lain, Thailand, yang selama ini menjadi salah satu destinasi utama bagi wisatawan internasional, diperkirakan akan mengalami penurunan kunjungan sebesar 7,25%, dengan total kunjungan yang diproyeksikan

mencapai 29,60 juta wisatawan. Penurunan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Thailand dalam mempertahankan daya tariknya bagi wisatawan mancanegara, meskipun tetap menjadi negara dengan jumlah kunjungan tertinggi di kawasan ini.

Sementara itu, negara-negara lainnya menunjukkan peningkatan yang bervariasi. Malaysia diperkirakan akan mencatatkan kenaikan kunjungan sebesar 14,50%, dengan total kunjungan mencapai 28,24 Juta wisatawan. Meskipun demikian, Malaysia mengalami penurunan dalam kategori "excursionists" atau wisatawan yang hanya singgah tanpa menginap, yang menunjukkan adanya perubahan pola perjalanan wisata. Negara dengan peningkatan



terbesar adalah Vietnam, dengan peningkatan kunjungan sebesar 20,90%, yang diperkirakan akan mencapai 19,15 Juta wisatawan pada Tahun 2025. Singapura, meskipun mengalami kenaikan moderat sebesar 2,73%, diperkirakan akan mencapai 15,55 Juta wisatawan.

Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam sektor pariwisata, dengan peningkatan yang stabil, sementara negara-negara lainnya menghadapi dinamika yang beragam dalam menghadapi pemulihan pariwisata global pasca pandemi. Capaian devisa pariwisata didukung oleh kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Peningkatan jumlah wisman ini berperan sebagai salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan di sektor-sektor terkait, seperti akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung, pengeluaran mereka memberikan kontribusi langsung pada devisa pariwisata negara.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET DEvisa

PARIWISATA TAHUN 2025

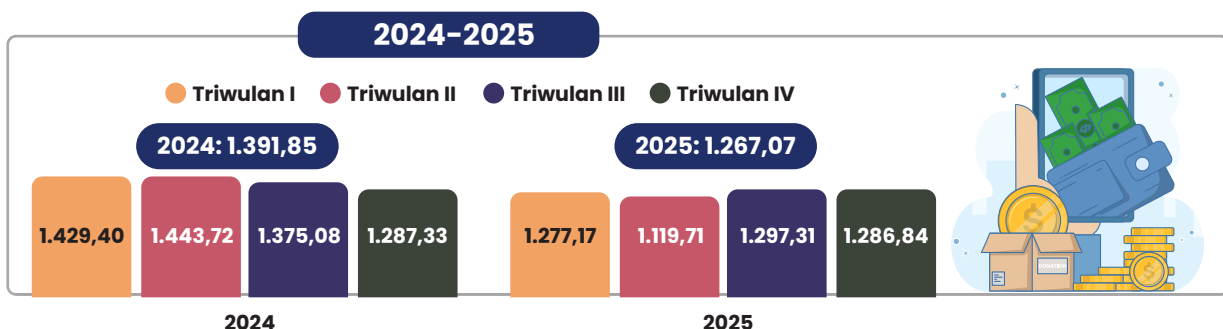
Dalam rangka mencapai indikator ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal beberapa indikator turunan yang berkontribusi secara akumulasi dalam pelaksanaan program sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan. Berikut merupakan beberapa indikator

kunci yang mendukung pencapaian target tersebut, antara lain adalah:

a. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Angka capaian rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara diperoleh dari perhitungan *Average Spending Per Arrival* (ASPA) wisatawan mancanegara dari data yang diperoleh dari BPS. Pengeluaran atau pengeluaran wisatawan mancanegara adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan. Pengeluaran wisatawan mancanegara antara lain untuk akomodasi, makan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal, belanja, cinderamata, hiburan, kesehatan/kecantikan, kursus/ pelatihan, rekreasi, paket wisata lokal, jasa pemandu wisata, dan pengeluaran lainnya. Data rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara terdapat dalam statistik pengeluaran wisatawan mancanegara, yang dipublikasikan oleh BPS. Data rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden (wisatawan mancanegara) menggunakan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) di pintu keberangkatan internasional bandar udara/ pelabuhan/pos lintas batas.

Tren Rata-Rata Pengeluaran Per Kunjungan (US \$)



Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

Grafik tersebut menggambarkan tren rata-rata pengeluaran per kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Tahun 2024 hingga Tahun 2025 yang disajikan secara triwulanan. Secara umum, terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kunjungan pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kunjungan tercatat sebesar US\$1.391,85, sedangkan pada Tahun 2025 menurun menjadi US\$1.267,07, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap tingkat belanja wisatawan meskipun arus kunjungan relatif terjaga.

Pada Tahun 2024, tren pengeluaran wisatawan menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan stabil. Pada Triwulan I, rata-rata pengeluaran tercatat sebesar US\$1.429,40, kemudian meningkat pada Triwulan II menjadi US\$1.443,72, yang merupakan nilai tertinggi sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini mencerminkan kuatnya permintaan wisata serta meningkatnya aktivitas wisata bernilai tambah tinggi, seperti MICE dan liburan musim puncak. Namun demikian, pada Triwulan III terjadi penurunan pengeluaran menjadi US\$1.375,08, dan kembali menurun pada Triwulan IV menjadi US\$1.287,33, yang mengindikasikan adanya perlambatan belanja wisatawan pada paruh kedua tahun, seiring dengan berakhirnya musim liburan utama dan mulai melemahnya kondisi ekonomi global.

Memasuki Tahun 2025, tren pengeluaran per kunjungan menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan berada pada level yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Triwulan I 2025, rata-rata pengeluaran tercatat sebesar US\$1.277,17, relatif lebih rendah dibandingkan Triwulan I 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada Triwulan II

2025, dimana rata-rata pengeluaran turun menjadi US\$1.199,71, mencerminkan kehati-hatian wisatawan dalam membelanjakan pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi global, inflasi di negara asal wisatawan, serta perubahan preferensi wisata ke arah efisiensi biaya. Selanjutnya, pada Triwulan III 2025, terjadi sedikit pemulihan dengan peningkatan pengeluaran menjadi US\$1.297,31, sebelum kembali mengalami koreksi tipis pada Triwulan IV 2025 menjadi US\$1.286,84.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata Indonesia masih mampu menarik wisatawan mancanegara, tantangan utama pada tahun 2025 terletak pada menurunnya rata-rata pengeluaran per kunjungan, yang berdampak langsung terhadap capaian devisa pariwisata. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan yang berfokus tidak hanya pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas wisatawan (*quality tourism*) melalui pengembangan produk pariwisata bernilai tambah tinggi, perpanjangan lama tinggal, serta penguatan belanja wisatawan di sektor akomodasi, kuliner, dan ekonomi kreatif. Dalam konteks tersebut, peran sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan pariwisata nasional mampu merespons dinamika global dan mendorong kontribusi devisa yang lebih optimal.

Bauran Kebijakan Pendongkrak

Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas

Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan pembukaan rute penerbangan langsung (*direct flights*) dari pasar potensial dengan



daya beli tinggi. Arah Koordinasi yang dilakukan adalah mempertemukan Kemenhub, Kemenlu, dan maskapai internasional untuk menambah frekuensi penerbangan dari Australia, Amerika Utara, dan Eropa Barat ke Bali serta 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Adapun dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini adalah Wisatawan dari pasar jarak jauh (*long-haul*) secara statistik memiliki masa tinggal (*length of stay*) lebih lama, yang secara otomatis meningkatkan total pengeluaran mereka selama di Indonesia

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Sepanjang tahun 2025, terdapat dua KEK yang menjadi strategi pemerintah untuk menggenjot devisa turis mancanegara terutama segmen *high-end* yaitu KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali. KEK kura-kura Bali merupakan kawasan yang menjanjikan pariwisata berkualitas tinggi, pembangunan *International Marina*, serta perpaduan harmoni antara alam, manusia, dan budaya. Adapun KEK Kesehatan Sanur berfokus pada pengembangan destinasi pariwisata kesehatan terintegrasi kelas dunia, yang menggabungkan layanan medis canggih (Bali International Hospital) dengan fasilitas *wellness* dan pariwisata

Penguatan Event Internasional dan MICE

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pengembangan produk pariwisata premium dan tematik yang memiliki daya tarik belanja tinggi, seperti wisata MICE, *wellness tourism*, *sport tourism*, pariwisata halal, pariwisata budaya kelas dunia, serta *eco-luxury tourism*. Fokus kegiatan koordinasi adalah manajemen kalender *event* berskala global untuk mengurangi fenomena *low season*, menjamin dukungan pendanaan

dan kemudahan visa (bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi) untuk peserta pertemuan internasional, pameran, dan ajang olahraga seperti MotoGP Mandalika dan berbagai konferensi bisnis di Jakarta dan Bali.

Peningkatan Kualitas Destinasi dan Amenitas

Meningkatkan kualitas amenities pariwisata, termasuk akomodasi berstandar internasional, restoran, pusat belanja, dan fasilitas pendukung wisata lainnya. Upaya ini mencakup peningkatan standar pelayanan, kebersihan, keamanan, serta kenyamanan destinasi, sehingga wisatawan memiliki insentif untuk memperpanjang lama tinggal dan meningkatkan konsumsi selama berada di Indonesia.

Diversifikasi Aktivitas dan Paket Wisata

Mendorong pengembangan paket wisata terpadu lintas destinasi dan lintas sektor yang mengkombinasikan pariwisata, ekonomi kreatif, kuliner, dan produk lokal. Diversifikasi ini bertujuan untuk memperkaya pilihan aktivitas wisatawan, meningkatkan frekuensi belanja, serta memperluas sebaran manfaat ekonomi ke pelaku usaha lokal, khususnya UMKM.

Penguatan Ekonomi Kreatif dan Produk Lokal

Mengintegrasikan sektor ekonomi kreatif, seperti fesyen, kriya, seni pertunjukan, dan kuliner unggulan, ke dalam rantai nilai pariwisata. Penguatan branding produk lokal, peningkatan kualitas desain dan kemasan, serta fasilitasi akses pasar di kawasan wisata diharapkan dapat mendorong peningkatan belanja wisatawan pada produk bernilai tambah tinggi.

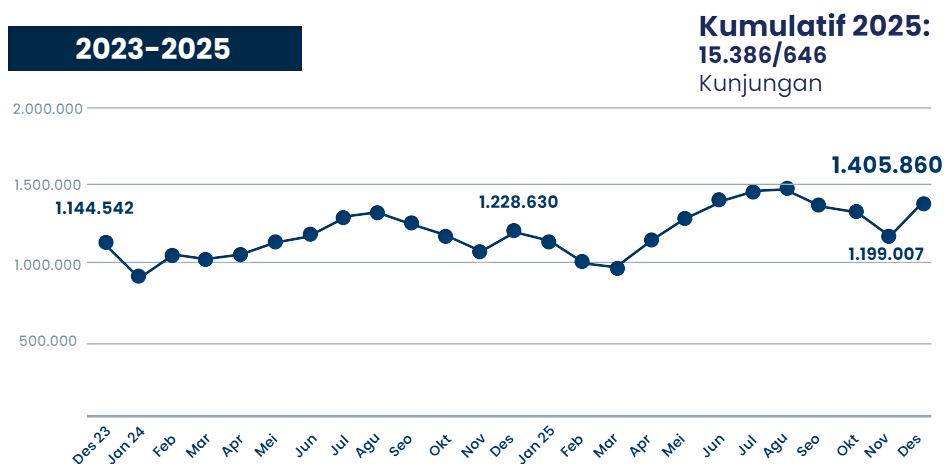
b. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Jumlah kunjungan wisman berfungsi untuk menilai kinerja sektor pariwisata nasional, menggambarkan sejauh mana Indonesia dapat menarik wisatawan internasional untuk berkunjung. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang datang, semakin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian negara melalui devisa yang dihasilkan. Selain itu, angka kunjungan wisman juga mencerminkan daya saing Indonesia di pasar global pariwisata. Selain itu, peningkatan jumlah wisman dapat menggambarkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mempromosikan destinasi wisata Indonesia, meningkatkan konektivitas transportasi, serta memperbaiki aksesibilitas ke destinasi wisata prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata

yang memiliki potensi besar.

Pengukuran jumlah kunjungan wisman dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Indonesia selama periode tertentu, biasanya dihitung secara tahunan. Data ini mencakup jumlah kedatangan wisatawan yang terdaftar melalui berbagai pintu masuk negara, baik melalui bandara internasional, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas darat. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi performa pariwisata Indonesia, serta sebagai dasar bagi pemerintah untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan pariwisata yang dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di mata dunia internasional.

Grafik 3.2. Tren Kunjungan Bulanan



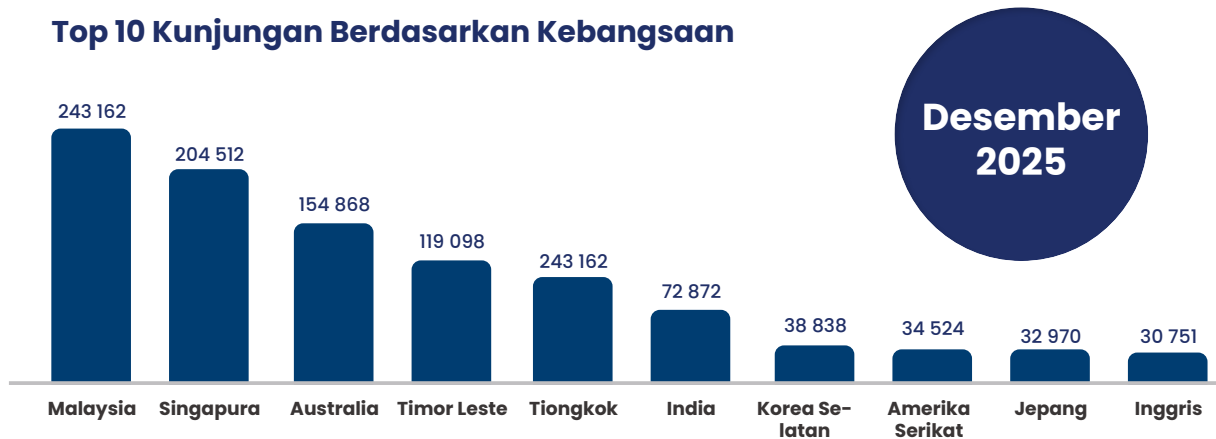
Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

Data Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang periode Tahun 2023 hingga Tahun 2025 menandakan adanya fluktuasi jumlah kunjungan bulanan, dengan puncak tertinggi terjadi pada Bulan Desember 2025, yaitu mencapai lebih dari 1,4 juta kunjungan. Peningkatan yang signifikan terlihat pada akhir Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata Indonesia, terutama dari wisatawan internasional, mengalami pemulihan yang pesat. Secara kumulatif,



total kunjungan pada Tahun 2025 diperkirakan mencapai 15,38 juta kunjungan, mencerminkan tren positif yang menunjukkan Kunjungan sementara wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebesar 14,43% pada bulan Desember 2025 dibandingkan Desember Tahun 2024 dan peningkatan sebesar 17,25% dibandingkan bulan sebelumnya.

Top 10 Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan



Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

Dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terdapat 10 negara asal wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia yang mendominasi pada Bulan Desember 2025. Malaysia mencatatkan angka kunjungan tertinggi dengan 243.162 wisatawan, diikuti oleh Singapura dengan 204.512 kunjungan dan Australia dengan 154.868 kunjungan. Selain itu, negara-negara seperti Timor Leste, Tiongkok, India, Korea Selatan, Amerika Serikat,

Jepang, dan Inggris juga tercatat dalam daftar sepuluh besar dengan jumlah kunjungan yang signifikan. Data ini menggambarkan potensi besar bagi Indonesia dalam menarik wisatawan dari negara-negara terdekat seperti Malaysia dan Singapura, serta dari negara-negara dengan pasar besar seperti Australia dan Amerika Serikat. Sektor pariwisata Indonesia semakin menunjukkan pemulihan yang kuat, dengan kedatangan wisatawan dari berbagai negara yang beragam.

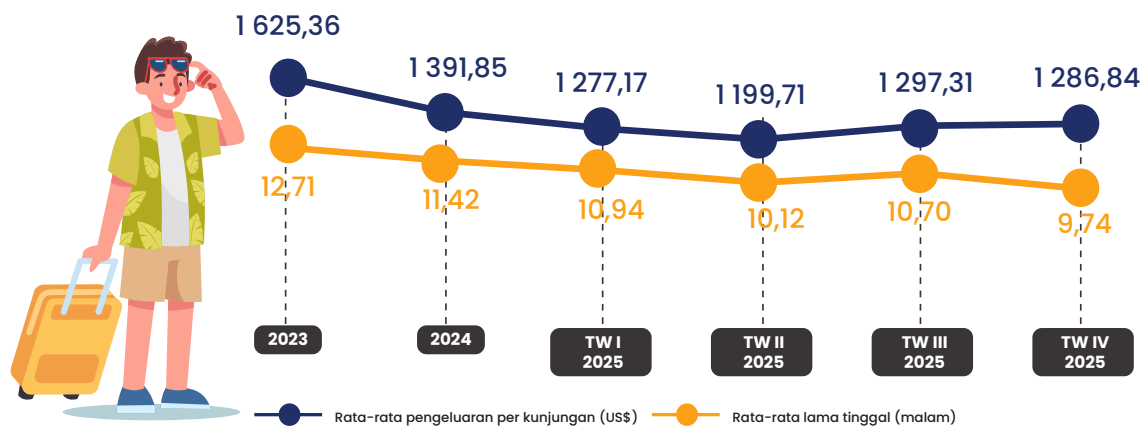
Top 10 Kunjungan Berdasarkan Pintu Masuk



Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

Distribusi kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan terdapat 10 jalur masuk yang diakses oleh wisatawan mancanegara meliputi Soekarno-Hatta di Jakarta tetap menjadi pintu masuk utama dengan 2.381.381 wisatawan, diikuti oleh Ngurah Rai di Bali yang mencatatkan 558.799 kunjungan. Selain itu, Juanda di Surabaya, Batam, dan Tanjung Balai Karimun juga menempati posisi teratas dengan jumlah kunjungan yang signifikan, mencerminkan pentingnya konektivitas antar wilayah. Pintu masuk seperti Atambua dan Jayapura yang terletak di Indonesia Timur juga mencatatkan angka kunjungan yang menunjukkan peningkatan minat wisatawan internasional untuk mengeksplorasi lebih banyak destinasi di luar Bali dan Jakarta. Dengan meningkatnya kunjungan ke berbagai pintu masuk ini, sektor pariwisata Indonesia semakin menunjukkan keberagaman dan daya tariknya bagi wisatawan dari berbagai negara.

Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran per Kunjungan & Rata-rata lama tinggal Wisman, 2023–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Kontribusi terhadap devisa pariwisata dapat dilihat dari perkembangan jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara (Wisman) dan rata-rata lama tinggal mereka di Indonesia. Berdasarkan data yang tersedia, rata-rata pengeluaran per kunjungan Wisman pada Triwulan IV 2025 tercatat mencapai US\$ 1.286,84, menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan Triwulan III 2025 yang tercatat sebesar US\$ 1.277,17. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata lama tinggal mengalami penurunan, pengeluaran per kunjungan tetap memberikan

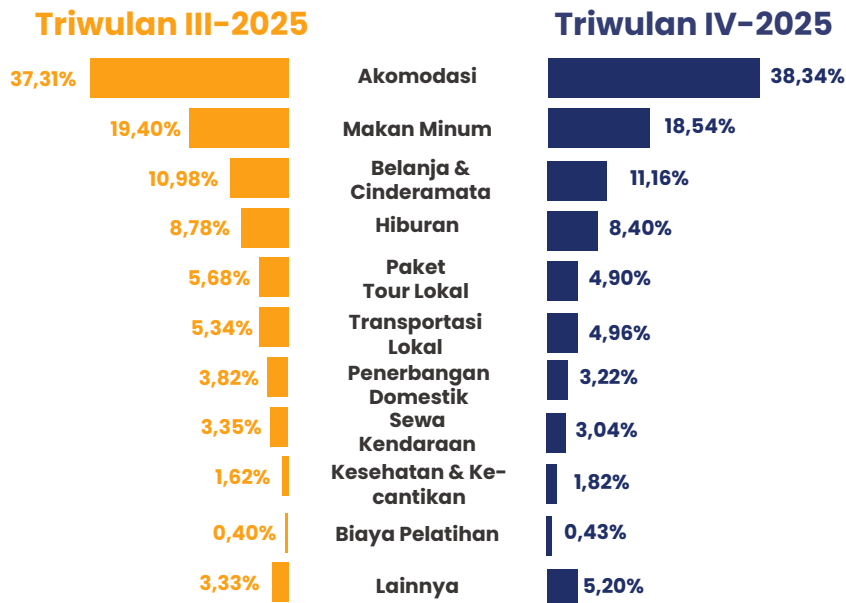
kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Secara keseluruhan, meskipun pengeluaran cenderung fluktuatif sepanjang tahun, sektor pariwisata tetap memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian.

Selain itu, rata-rata lama tinggal Wisman juga mengalami penurunan yang konsisten, dari 11,42 malam pada 2024 menjadi 10,70 malam pada Triwulan III 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa wisatawan lebih memilih kunjungan singkat, namun dengan pengeluaran yang tetap tinggi. Meskipun



durasi tinggal semakin singkat, jumlah pengeluaran tetap memberikan dampak yang positif terhadap sektor pariwisata dan devisa negara. Data ini memperlihatkan adanya pergeseran dalam preferensi wisatawan, di mana mereka lebih memilih perjalanan dengan waktu yang lebih efisien namun tetap mengeluarkan dana yang besar selama kunjungan.

Proporsi Pengeluaran Wisman per Kunjungan berdasarkan Jenis Pengeluaran, Triwulan III dan Triwulan IV 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

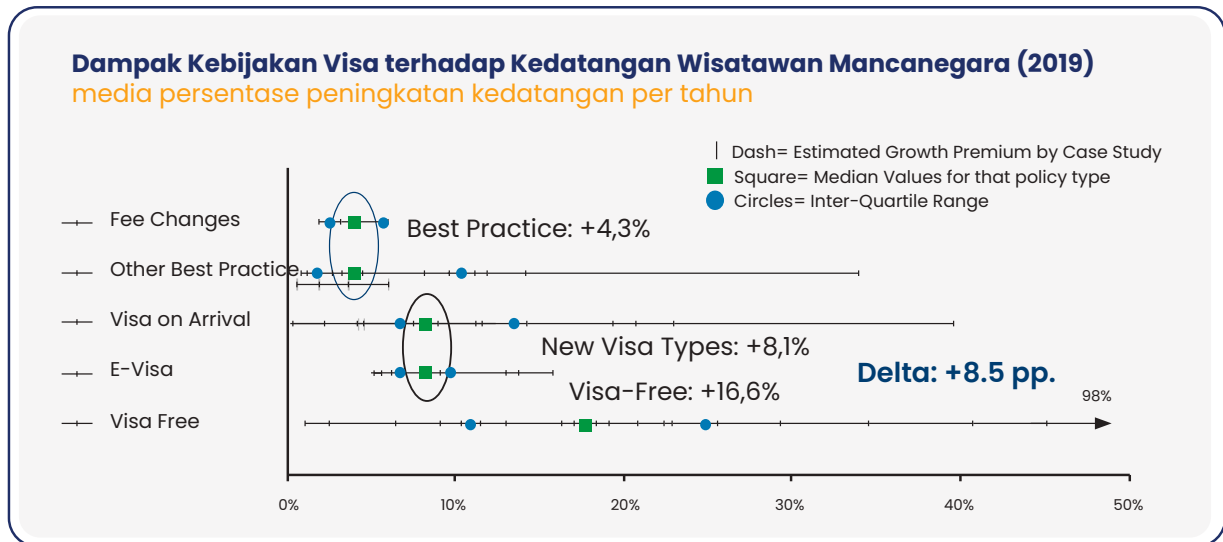
Di sisi lain, proporsi pengeluaran Wisman per kunjungan berdasarkan jenis pengeluaran menunjukkan pola yang menarik pada Triwulan IV 2025. Sektor akomodasi masih mendominasi pengeluaran, dengan kontribusi sebesar 38,34%, diikuti oleh makan dan minum yang menyumbang 18,54%. Sementara itu, sektor belanja dan cinderamata berkontribusi 11,16%, dan hiburan menyumbang 7,80%. Data ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi tetap menjadi komponen utama dalam pengeluaran Wisman, diikuti oleh kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman. Angka-angka ini memberikan wawasan penting mengenai sektor-sektor mana yang paling mendominasi dalam pengeluaran wisatawan, serta memberikan dasar yang kuat untuk

merencanakan kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih terarah dan efektif. Pemerintah dan sektor terkait dapat menggunakan data ini untuk mengoptimalkan sektor-sektor yang paling banyak

Bauran Kebijakan Pendongkrak Jumlah Wisatawan Mancanegara Kebijakan Kunjungan Visa

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mendorong kualitas belanja wisatawan pada Tahun 2025, Pemerintah Indonesia menerapkan bauran kebijakan kunjungan visa yang lebih adaptif, selektif, dan berbasis pasar. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk mempermudah akses masuk wisatawan asing, tetapi juga untuk

menarik wisatawan berkualitas dengan potensi pengeluaran yang lebih tinggi dan lama tinggal yang lebih panjang. Pemerintah memperluas cakupan negara penerima fasilitas *Visa on Arrival* (VoA) dan e-VoA, khususnya dari negara-negara dengan kontribusi spending besar seperti Australia, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, optimalisasi sistem visa elektronik dilakukan untuk mempercepat proses pengajuan, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan hambatan administratif di pintu masuk menyumbang pada ekonomi dan devisa negara.



Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap devisa pariwisata Indonesia. Setiap kunjungan wisman menghasilkan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, seperti akomodasi, transportasi, makan, dan kegiatan rekreasi. Pengeluaran ini menjadi sumber utama pemasukan negara melalui sektor pariwisata, yang langsung berkontribusi pada peningkatan devisa. Selain itu, pengeluaran wisatawan asing juga memberikan dampak positif bagi ekonomi domestik, karena sektor-sektor terkait seperti hotel, restoran, dan agen perjalanan menerima manfaat langsung dari konsumsi wisatawan tersebut.

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia akan berbanding lurus dengan peningkatan devisa pariwisata yang diterima negara. Setiap transaksi yang dilakukan oleh wisman, baik untuk penginapan, makanan, transportasi, maupun belanja souvenir, menambah pemasukan negara. Pemasukan ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memperluas dampaknya ke sektor ekonomi lokal lainnya, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung bisnis lokal. Dengan demikian, kontribusi jumlah wisman yang terus meningkat akan semakin memperkuat posisi sektor pariwisata sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.



POTENSI DEvisa PARIWISATA YANG DAPAT DIHASILKAN DARI KUNJUNGAN WISMAN JUAH MELAMPAUI PNBp VISA KUNJUNGAN

SKENARIO AGRESIF: DAMPAK BEBAS VISA KUNJUNGAN 100% DIRASAKAN



Asumsi:

1. Baseline proyeksi kunjungan 2026 dari 20 negara = kunjungan Jan-Okt 2025 disetahunkan + growth rate Jan-Okt 2024 ke 2025
2. ASPA yang digunakan adalah ASPA per negara (data 2024) yang direkalibrasi dengan mempertimbangkan perbandingan rata-rata ASPA 2024 dan 2025 y-t-d
3. Asumsi nilai tukar Rp16.500/USD

Sumber: World Travel & Tourism Council, SatuDJA (data PNBp Kementerian Imipis 2025), Kementerian Pariwisata

Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

Perijinan Event Lewat Portal Terintegrasi

Digitalisasi proses perizinan event telah lama menjadi aspirasi, namun implementasinya masih terkendala. Platform perizinan event terpadu dibutuhkan guna mengatasi kendala yang dirasakan pelaku usaha. Saat ini, pemerintahan telah menjalankan pilot project digitalisasi perizinan di tujuh venue melalui sistem OSS untuk konser musik di tingkat nasional, namun inisiatif tidak berlanjut dan pengajuan izin keramaian kembali dilakukan manual (*offline*) mengingat belum terdapat dasar hukum bagi K/L untuk menindaklanjuti pengembangannya. Dengan demikian, platform perizinan event terpadu dibutuhkan guna mengatasi kendala yang dirasakan pelaku usaha karena proses perizinan melibatkan multiinstansi, kurangnya standarisasi alur serta waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan izin, terbatasnya transparansi dan standarisasi biaya perizinan.

Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Pemerintah saat ini telah merumuskan isu strategis dan kebutuhan pengembangan di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) baik yang DPP Percepatan seperti Danau Toba, Borobudur, Lombok-Gili Tramen, dan Labuan Bajo maupun DPP Pengembangan seperti Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, Manado-Likupang, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat hingga DPP Regeneratif seperti Kep. Riau, Greater Jakarta, dan Bali. Isu strategis dan kebutuhan pengembangan tersebut diselaraskan dengan peranan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada masing-masing daerah sehingga mampu memperkuat infrastruktur destinasi, amenitas dan atraksi untuk DAK Fisik dan meningkatkan kapasitas kualitas pelayanan destinasi dengan menggunakan DAK Non-Fisik.

Peningkatan Keselamatan Berwisata

Melalui koordinasi lintas kementerian lembaga dan pemerintah daerah, akan dilakukan peningkatan keselamatan berwisata diantaranya melalui peningkatan pengawasan ijin berusaha dan kelaikan operasi sarana prasarana, peningkatan efektivitas dan responsivitas komunikasi terkait aspek keselamatan, penyiapan penanganan keadaan darurat dan mitigasi bencana, dan memastikan ketersediaan SDM yang mumpuni dalam ketanggapdaruratan sesuai dengan UU No 9 Tahun 2014.

Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga tengah melakukan keseriusan dalam pengelolaan daya tarik wisata khususnya pada daerah DPP yang menjadi penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara seperti terbatasnya *mooring buoy* di Raja Ampat yang berujung lepas jangkar dan kerusakan bahari, kartu kuning *geopark kaldera* Toba, dan terbatasnya sarana prasarana di Daya Tarik Wisata (DTW) termasuk pada DTW berbayar.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Selain bauran kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa faktor lain yang turut berkontribusi pada capaian yakni:

- pembukaan bandara internasional terhadap sektor pariwisata dan industri dan peningkatan konektivitas transportasi melalui kerja sama strategis dilakukan dengan maskapai penerbangan untuk

meningkatkan frekuensi penerbangan internasional ke destinasi wisata utama.

- alternatif skema pembiayaan untuk percepatan dan penguatan daya saing destinasi pariwisata.
- implementasi rencana aksi dalam sektor pariwisata berjalan dengan baik, serta memonitor progres yang telah dicapai terhadap kebijakan yang ditetapkan, seperti pengembangan destinasi wisata dan infrastruktur pendukungnya.
- Promosi dan branding internasional untuk menarik wisatawan internasional dengan daya beli tinggi, berbagai upaya promosi dilakukan melalui kampanye global yang menonjolkan kekayaan budaya, alam, dan keragaman Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata dunia sebagai destinasi wisata yang berkualitas.
- Peningkatan kualitas infrastruktur dan akomodasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pariwisata, termasuk fasilitas akomodasi dan transportasi. Peningkatan kualitas layanan wisata, baik di hotel maupun restoran, turut mendukung kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi tinggal mereka di Indonesia.
- Monitoring dan evaluasi peningkatan rata-rata lama tinggal wisman yang mendorong wisatawan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Indonesia. Inovasi dalam atraksi wisata, seperti pertunjukan budaya, wisata alam, dan kuliner, menjadi daya tarik yang membuat wisatawan lebih lama tinggal dan menghabiskan lebih banyak anggaran mereka.



Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja Devisa Pariwisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja pada Tahun 2025, berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun:

- Bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim menghambat kelancaran destinasi wisata, yang mengarah pada pengurangan sejumlah atraksi penting, seperti event tahun baru, yang berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan.
- Dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, termasuk tekanan inflasi di negara-negara sumber wisatawan utama, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta fluktuasi nilai tukar, yang berdampak pada menurunnya daya beli dan kecenderungan masyarakat global untuk menunda perjalanan wisata internasional.
- Konektivitas dan aksesibilitas yang belum optimal dan masih menghadapi beberapa kendala terkait konektivitas transportasi yang terbatas, yang menghambat aliran kunjungan wisatawan dari luar negeri.
- Perubahan preferensi wisatawan pasca pandemi, yang semakin menuntut aspek keberlanjutan, keamanan, kesehatan, serta pengalaman wisata bernilai tambah tinggi, sementara kesiapan sebagian destinasi di Indonesia dalam memenuhi standar tersebut masih belum merata.
- Ketergantungan sektor pariwisata pada musim dan hari libur nasional menyebabkan

ketidakstabilan aliran kunjungan wisatawan sepanjang tahun, mempengaruhi perencanaan dan estimasi jumlah kunjungan serta devisa yang dihasilkan.

- Tantangan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor dan lintas daerah, khususnya dalam pengembangan destinasi prioritas, penyediaan amenities, perizinan usaha pariwisata, serta penguatan peran UMKM lokal dalam rantai nilai pariwisata.
- Beberapa daerah wisata yang potensial masih kurang mendapat investasi yang memadai untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas, yang dapat mengurangi daya tarik dan potensi destinasi tersebut untuk menarik wisatawan mancanegara.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian target kinerja Devisa Pariwisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara melibatkan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan sektor pariwisata Indonesia. Kendala yang dihadapi, seperti dampak perubahan iklim ekstrim, masalah keamanan, keterbatasan konektivitas, dan ketergantungan pada musim tertentu, memerlukan perhatian khusus. Untuk itu, pemerintah akan melakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

- Penyiapan mitigasi risiko akibat perubahan iklim ekstrem pada destinasi wisata yang rentan terhadap bencana. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan atraksi wisata yang dapat mendukung kunjungan wisatawan dan mengurangi dampak negatif yang dapat memengaruhi sektor pariwisata.

- Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan upaya peningkatan konektivitas transportasi melalui berbagai kebijakan seperti penambahan penerbangan internasional dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik di destinasi prioritas . Peningkatan ini bertujuan untuk mempermudah wisatawan dalam mengakses destinasi pariwisata Indonesia, terutama untuk daerah yang memiliki potensi tinggi seperti Belitung .
- Untuk mengurangi ketergantungan pada musim dan hari libur nasional, sektor pariwisata dapat didorong untuk menawarkan berbagai atraksi dan festival sepanjang tahun, serta meningkatkan promosi destinasi wisata non-musiman. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarkan event secara merata, menawarkan paket wisata khusus di luar musim puncak, dan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi, sehingga aliran kunjungan wisatawan menjadi lebih stabil dan devisa yang dihasilkan lebih konsisten.
- Revitalisasi infrastruktur di destinasi wisata prioritas seperti Bandara HAS Hanandjoeddin, akan diperhatikan dengan meningkatkan standar internasional untuk mendukung kelancaran penerbangan internasional dan mempercepat waktu kedatangan serta keberangkatan wisatawan.
- Peningkatan kualitas dan diferensiasi produk pariwisata bernilai tambah tinggi, termasuk pengembangan pariwisata minat khusus (*wellness tourism, ecotourism, sport tourism, gastronomi, dan wisata halal*), MICE, serta event internasional untuk meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan mancanegara.
- Penguatan strategi promosi pariwisata yang lebih tersegmentasi dan berbasis pasar prioritas, dengan fokus pada wisatawan berkualitas (*high value tourists*), pemanfaatan pemasaran digital, kolaborasi dengan maskapai dan pelaku industri global, serta penguatan nation branding pariwisata Indonesia.
- Peningkatan kualitas SDM dan layanan pariwisata, melalui sinergi program pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dan UMKM, guna meningkatkan standar pelayanan dan kepuasan wisatawan.
- Penguatan integrasi UMKM lokal dalam rantai nilai pariwisata, termasuk fasilitasi sertifikasi (halal, CHSE, dan standar kualitas lainnya), pembiayaan, digitalisasi usaha, serta kemitraan dengan pelaku industri pariwisata skala besar.
- Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan, dengan mendorong praktik ramah lingkungan, pengelolaan destinasi berbasis *carrying capacity*, dan pengembangan ekonomi sirkular untuk menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan destinasi.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja Devisa Pariwisata, upaya efisiensi dalam penggunaan sumber daya telah memainkan peran yang sangat penting. Berikut ini merupakan beberapa langkah efisiensi yang dilakukan antara lain:

- Penerapan teknologi digital dalam koordinasi menghasilkan efisiensi yang juga tercapai melalui penggunaan aplikasi *teleconference* untuk melakukan rapat



koordinasi mengenai kebijakan konektivitas dan pengembangan destinasi. Langkah ini berhasil menghemat biaya operasional, yang dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih strategis, seperti monitoring dan evaluasi sektor pariwisata.

- Optimalisasi konektivitas dan aksesibilitas seperti peningkatan frekuensi penerbangan seperti yang dilakukan oleh Citilink, yang menambah jumlah penerbangan dari 5 menjadi 7 kali per minggu menuju Belitung, berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisman dengan biaya yang lebih terjangkau. Ini menunjukkan bagaimana efisiensi transportasi dapat meningkatkan mobilitas wisatawan, yang pada gilirannya mendorong jumlah kunjungan dan devisa pariwisata.

- Efisiensi infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas dan pengembangan destinasi wisata yang lebih terhubung dengan daerah-daerah potensial. Hal ini diikuti oleh peningkatan konektivitas internasional, yang mendorong lebih banyak wisatawan internasional untuk mengunjungi Indonesia.
- Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan surat-menyurat dan administrasi juga berperan dalam mengurangi pengeluaran, seperti pengurangan belanja alat tulis kantor. Efisiensi pengelolaan anggaran ini memungkinkan lebih banyak sumber daya dialokasikan untuk inisiatif penting yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara.



B.2.6**RASIO PDB PARIWISATA**

Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya per tahun. Rasio ini mencerminkan seberapa besar peran sektor pariwisata dalam perekonomian nasional, dengan memperhitungkan aspek nilai tambah yang dihasilkan dari sektor-sektor yang langsung terlibat dalam kegiatan wisata. Melalui rasio ini, dapat diketahui kontribusi ekonomi yang diberikan oleh sektor pariwisata terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Pengukuran Rasio PDB Pariwisata mengacu pada pendekatan *Tourism Satellite Account* (TSA) yang dikembangkan oleh organisasi internasional seperti *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), OECD, dan Eurostat. TSA adalah suatu sistem akuntansi yang memperhitungkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB hanya dari kegiatan yang secara langsung terkait dengan permintaan wisatawan. Oleh karena itu, dalam perhitungan rasio ini, hanya aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi langsung antara wisatawan dan sektor-sektor pariwisata yang dihitung sebagai bagian dari kontribusi sektor tersebut.

Sektor-sektor yang menjadi komponen utama dalam perhitungan Rasio PDB Pariwisata meliputi nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti: Akomodasi, Makanan dan minuman,

Transportasi, Agen perjalanan dan tour operator, Aktivitas budaya dan rekreasi, Industri souvenir dan kerajinan terkait wisata.

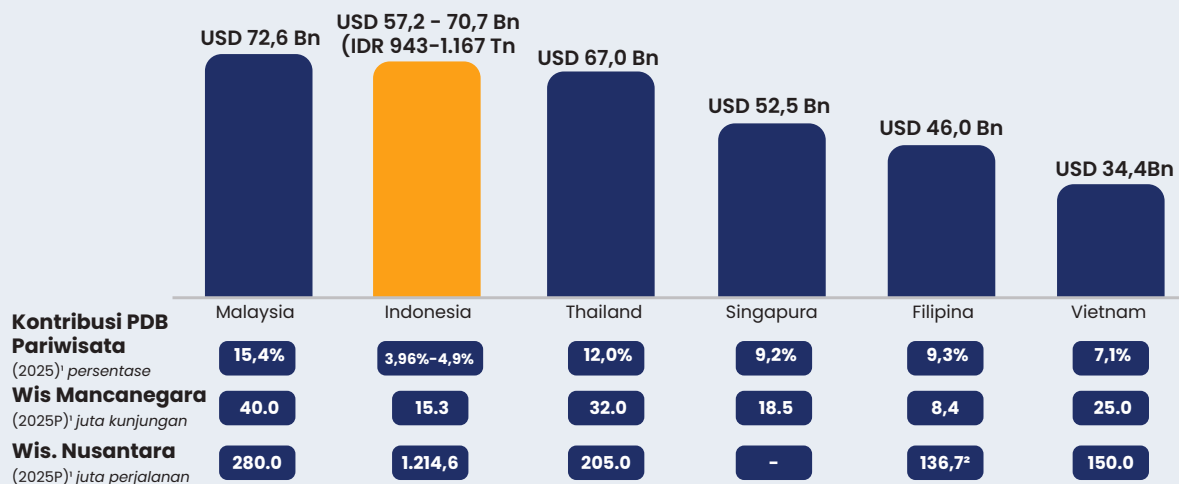
Rasio ini tidak hanya menggambarkan jumlah wisatawan yang datang ke suatu daerah, tetapi lebih kepada nilai tambah ekonomi yang tercipta melalui interaksi wisatawan dengan sektor-sektor yang mendukungnya. Oleh karena itu, indikator ini menjadi lebih relevan dalam menilai dampak ekonomi nyata dari sektor pariwisata dibandingkan dengan sekadar menghitung jumlah wisatawan. Pencapaian kinerja sektor pariwisata melalui rasio ini dapat digunakan untuk menentukan apakah sektor tersebut berkembang dengan baik atau perlu adanya peningkatan dalam kebijakan pengembangan pariwisata.

Tujuan utama dari pencapaian kinerja Rasio PDB Pariwisata adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional dan lokal. Indikator ini juga digunakan sebagai parameter dalam evaluasi kebijakan pembangunan pariwisata, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dengan memonitor rasio ini, pembuat kebijakan dapat merencanakan langkah-langkah strategis dalam memaksimalkan potensi sektor pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tercermin dari kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada akhir Tahun 2025, meskipun Indonesia mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04%, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 3,96% terhadap total PDB nasional. Angka ini menunjukkan bagaimana sektor pariwisata tidak



hanya sebagai penggerak penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan devisa, tetapi juga sebagai katalisator bagi perkembangan sektor-sektor lain yang terkait, seperti perhotelan, transportasi, dan perdagangan. Dengan adanya kontribusi tersebut, pariwisata menjadi salah satu sektor utama yang mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global, memperkuat ekonomi domestik, serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dengan terus menarik wisatawan mancanegara dan domestik.

Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Nasional Negara di Asia Tenggara (Estimasi/Target 2025) dalam miliar Dolar AS



Sumber: Kementerian Pariwisata (2026)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dalam hal kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) pariwisata, Malaysia diperkirakan akan mencatatkan kontribusi tertinggi di kawasan ini, dengan 15,4% dari total PDB mereka, yang setara dengan USD 72,6 miliar. Indonesia, dengan proyeksi kontribusi sebesar 3,96%-4,9%, diperkirakan menghasilkan USD 57,2-70,7 Miliar (sekitar IDR 943 Triliun hingga 1.167 Triliun), yang mencerminkan peran penting sektor pariwisata dalam perekonomian Indonesia, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Thailand dan Singapura diperkirakan akan menyumbang 12,0% dan 9,2% dari PDB mereka masing-masing, dengan kontribusi sektor pariwisata sebesar USD 67,0 Miliar untuk Thailand dan USD 52,5 Miliar untuk Singapura. Filipina dan

Vietnam juga menunjukkan kontribusi signifikan, dengan masing-masing sebesar 9,3% dan 7,1% terhadap PDB mereka, dengan total pemasukan sektor pariwisata USD 46,0 Miliar dan USD 34,4 Miliar.

Dalam pencapaian kinerja sektor pariwisata Indonesia, kontribusi PDB yang signifikan didorong oleh dua komponen utama, yaitu jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman). Berdasarkan proyeksi Tahun 2025, jumlah Wisnus Indonesia diperkirakan mencapai 280 juta perjalanan, sementara Wisman diharapkan mencapai 15,3 juta kunjungan. Keterlibatan Wisnus memainkan peran besar dalam meningkatkan volume perjalanan domestik dan memperkuat sektor pariwisata domestik, yang turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan devisa negara.

Pemasukan dari Wisman, meskipun lebih kecil dalam jumlah kunjungan dibandingkan Wisnus, tetap memberikan kontribusi penting pada devisa pariwisata, khususnya dalam menarik wisatawan dengan daya beli tinggi. Proyeksi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan kedua sumber pendapatan ini guna mencapai target kontribusi PDB pariwisata yang lebih tinggi, serupa dengan negara-negara tetangga yang lebih maju dalam hal pendapatan sektor pariwisata.

CAPAIAN KINERJA RASIO PDB PARIWISATA

Sepanjang Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat capaian kinerja Rasio PDB Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 3.9. Capaian Rasio PDB Pariwisata Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.6	Rasio PDB Pariwisata	Persentase	4,5 – 4,6	4,9	106,52%

Sepanjang Tahun 2025, kinerja Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pariwisata menunjukkan capaian yang sangat positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang tersedia, rasio PDB pariwisata tercatat mencapai 4,9 persen, lebih tinggi dibandingkan target pada kisaran 4,5 – 4,6 %, dengan capaian kinerja sebesar 106,52%. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor pariwisata kembali menunjukkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kontribusi tersebut didorong oleh pulihnya aktivitas pariwisata, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta tumbuhnya berbagai usaha penunjang pariwisata seperti akomodasi, transportasi, kuliner, dan ekonomi kreatif.

Pada periode Tahun 2025, sektor pariwisata Indonesia kembali menunjukkan pencapaian yang signifikan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Dalam rangka

mencapai target kinerja Rasio PDB Pariwisata yang telah ditetapkan, berbagai kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Untuk mencapai target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional yang semakin meningkat, capaian Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Jumlah perjalanan wisatawan domestik yang terus meningkat menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan konsumsi domestik, tetapi juga membantu mendukung sektor pariwisata di berbagai daerah, memperkuat daya tarik destinasi wisata lokal, dan membuka peluang bagi pengembangan infrastruktur serta fasilitas wisata yang lebih baik.



Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan angka yang terus meningkat, mencerminkan semakin tingginya minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, baik untuk tujuan wisata alam, budaya, maupun bisnis. Lonjakan ini berkontribusi pada peningkatan devisa negara dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata global yang menarik. Dukungan dari kedua sektor ini, baik wisnus maupun wisman, berperan besar dalam pencapaian target pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi nasional.

a. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif yang salah satunya adalah sektor pariwisata harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Dalam pengembangan sektor pariwisata, aspek utama yang menunjukkan perkembangan kinerjanya adalah penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan sektor jasa yang diperkirakan akan terus tumbuh dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kinerja sektor akomodasi makanan dan minuman dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik.

Dalam penghitungannya sektor akomodasi makanan dan minuman mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk

pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi langsung. Sektor ini menjadi indikator kinerja utama dari sektor pariwisata dikarenakan sektor ini merupakan sektor dengan share atau kontribusi terbesar terhadap PDB (sebesar 2,64% pada Tahun 2024) dibandingkan sektor lain yang terkait dengan pariwisata, seperti jasa perjalanan, hiburan yang masuk dalam sektor jasa lainnya (sebesar 2,05%). Pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan persentase (%) peningkatan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun tertentu (t1) yang dibandingkan dengan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun sebelumnya (t-1).

Hingga Tahun 2025, Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman yang telah terealisasi sebesar 7,41% atau tercapai 77,75% dari target Tahun 2025 sebesar 9,53%. Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 77,75% dari target Tahun 2025. Kinerja indikator sektor akomodasi makanan dan minuman sangat didukung oleh kunjungan wisatawan, terutama wisatawan nusantara. Secara akumulatif, total kunjungan wisatawan nusantara hingga Desember 2025 telah mencapai 1,059 miliar kunjungan hingga Desember 2025, meningkat 4,84% dibandingkan tahun sebelumnya.

Bauran Kebijakan Pendongkrak Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

Penguatan Sisi Penawaran (*Supply Side Policies*)

Pemerintah telah memprogramkan beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka penguatan sisi penawaran di sektor akomodasi makanan dan minuman. Peningkatan Standar

dan Sertifikasi Usaha seperti Sertifikasi CHSE, sertifikasi halal, dan standarisasi layanan hospitality untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing global. Selain itu, revitalisasi dan modernisasi sarana akomodasi menggunakan insentif fiskal/non-fiskal untuk renovasi hotel, homestay, dan restoran agar lebih ramah lingkungan dan berbasis digital. Penguatan rantai pasok lokal juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan melalui integrasi UMKM pangan dan produk lokal dalam ekosistem hotel dan restoran guna meningkatkan *multiplier effect* terhadap PDB. Selain itu, saat ini pemerintah juga terus mendorong digitalisasi layanan perhotelan dan restoran melalui adopsi sistem reservasi digital, pembayaran non-tunai, manajemen inventori berbasis teknologi, dan integrasi dengan platform *online travel agent*.

Penguatan Sisi Permintaan (*Demand Side Policies*)

Strategi penguatan sektor pariwisata diarahkan melalui pendekatan *quality tourism* yang berfokus pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, antara lain melalui pengembangan MICE, penyelenggaraan event internasional, sport tourism, serta festival kuliner yang mampu menarik wisatawan dengan daya beli tinggi. Selain itu, promosi digital berbasis market intelligence diperkuat melalui pemanfaatan big data dan kampanye digital yang tersegmentasi guna menyasar segmen wisatawan premium. Di sisi domestik, pemerintah juga mendorong stimulus konsumsi melalui kampanye Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dan pemberian insentif untuk kegiatan MICE domestik guna

meningkatkan tingkat okupansi hotel serta konsumsi di sektor restoran dan ekonomi kreatif.

Kebijakan Pembiayaan dan Investasi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor akomodasi serta makanan dan minuman, pemerintah memperkuat kemudahan perizinan berusaha melalui optimalisasi sistem OSS-RBA guna mempercepat proses investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha hotel dan restoran. Di sisi pembiayaan, akses permodalan bagi UMKM makanan dan minuman diperluas melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pariwisata, pembiayaan ultra mikro, serta skema penjaminan kredit yang lebih inklusif bagi pelaku usaha kuliner. Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata terpadu terus didorong melalui pemberian insentif investasi di Destinasi Kawasan Wisata Super Prioritas (DKWSP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, yang mencakup pembangunan hotel, restoran, dan pusat kuliner sebagai bagian dari ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi.

b. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Peningkatan Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) merujuk pada jumlah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia ke berbagai destinasi wisata di dalam negeri, baik untuk tujuan wisata, rekreasi, maupun kegiatan pribadi lainnya. Kunjungan ini dilakukan di luar rutinitas sehari-hari dan dalam kurun



waktu tertentu. Yang penting untuk dicatat, perjalanan ini tidak termasuk aktivitas yang bertujuan untuk bekerja, bersekolah, atau menempuh pendidikan formal, serta tidak dimaksudkan untuk berpindah domisili. Definisi ini memastikan bahwa yang dihitung adalah kunjungan wisata yang berfokus pada kegiatan bersifat rekreasi atau hiburan, dan bukan kegiatan ekonomi atau sosial lainnya.

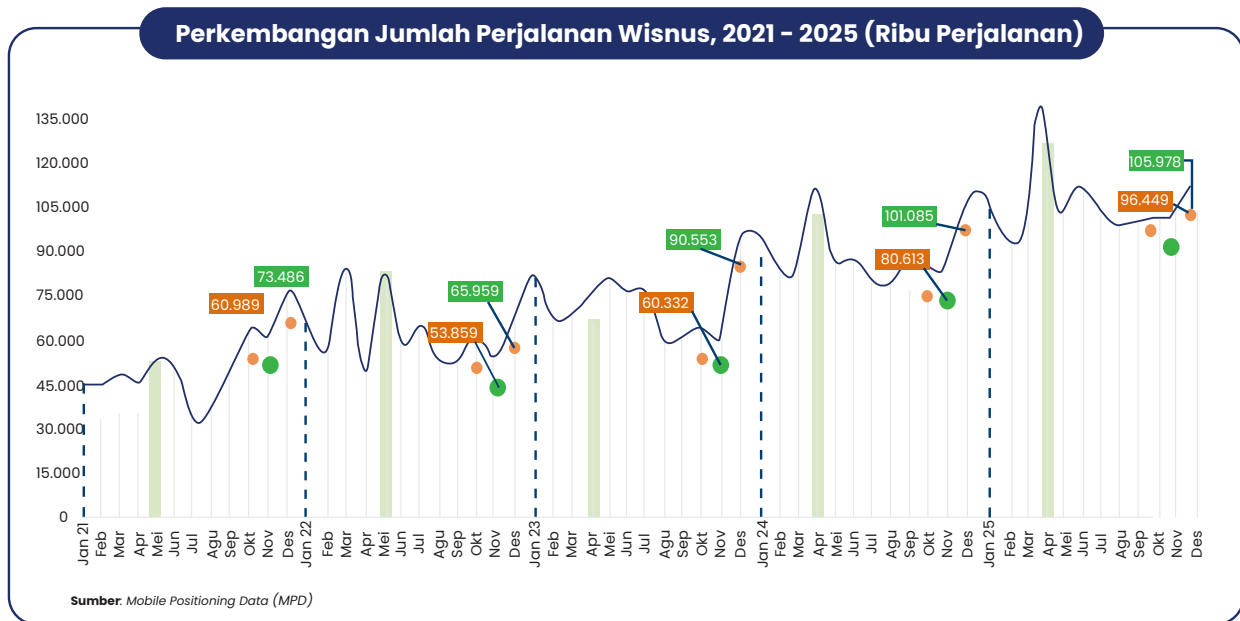
Cara mengukur jumlah wisatawan nusantara dilakukan dengan menghitung total perjalanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ke destinasi wisata domestik. Pengukuran ini mengandalkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan perjalanan wisatawan nusantara, yang mencakup jumlah perjalanan yang dilakukan setiap bulannya, baik yang dilakukan dalam rangka liburan atau perjalanan pribadi. Selain itu, sistem digitalisasi layanan perizinan yang diterapkan juga memungkinkan penyelenggara kegiatan untuk lebih mudah mengelola dan melaporkan data terkait jumlah wisatawan, yang akhirnya turut mendukung peningkatan keakuratan data yang dihasilkan.

Indikator jumlah wisatawan nusantara ini menggambarkan perkembangan sektor pariwisata domestik, terutama dalam hal pergerakan wisatawan dari satu daerah ke daerah lainnya. Melalui jumlah kunjungan wisatawan nusantara, kita dapat memperoleh gambaran tentang minat dan preferensi masyarakat terhadap destinasi wisata yang ada di dalam negeri. Selain itu, indikator ini juga mencerminkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap produk dan jasa wisata domestik. Artinya, semakin banyak wisatawan

nusantara yang berkunjung, semakin besar pula kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.

Tujuan dari mengukur jumlah wisatawan nusantara adalah untuk memahami seberapa besar partisipasi masyarakat Indonesia dalam kegiatan pariwisata domestik dan untuk mengetahui distribusi serta potensi ekonomi sektor pariwisata antarwilayah. Indikator ini juga berguna untuk merencanakan dan menetapkan target pembangunan sektor pariwisata, dengan mempertimbangkan minat, preferensi, serta daya beli masyarakat terhadap produk-produk wisata domestik. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan nusantara, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan jumlah perjalanan Wisnus (Wisatawan Nusantara) dari Tahun 2021 hingga Tahun 2025, dengan menunjukkan fluktuasi perjalanan tahunan. Garis oranye mewakili total jumlah perjalanan dalam ribuan, sementara indikator hijau dan merah menandakan periode puncak selama liburan Idul Fitri, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam perjalanan. Pada Tahun 2021, terlihat penurunan jumlah perjalanan pada bulan-bulan awal, dengan puncak tertinggi tercatat pada periode Idul Fitri Mei (12-13 Mei), yang mencapai sekitar 73.486 ribu perjalanan. Pada akhir Tahun 2021, jumlah perjalanan kembali turun ke level yang lebih rendah, seperti yang terlihat pada Bulan Desember dengan sekitar 60.989 ribu perjalanan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Pada Tahun 2022, tren perjalanan menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan pertumbuhan yang konsisten menuju bulan-bulan pertengahan tahun. Liburan Idul Fitri pada Bulan April (1-2 Mei) 2022 mencatatkan lonjakan signifikan sebesar sekitar 65.959 ribu perjalanan. Seperti pada Tahun 2021, liburan ini menandai titik tertinggi dalam aktivitas perjalanan, dengan fluktuasi antara bulan-bulan liburan dan bulan biasa. Pada akhir Tahun 2022, perjalanan masih lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, meskipun tidak mencapai puncak yang tercatat pada Tahun 2021. Kuartal pertama Tahun 2023 juga mengikuti pola yang sama, dengan peningkatan positif dalam perjalanan.

Lonjakan terbesar dalam jumlah perjalanan terjadi pada Tahun 2025, dengan peningkatan tajam yang mencapai puncaknya pada periode Idul Fitri Bulan Maret-April (31 Maret

– 1 April). Total perjalanan tercatat mencapai 105.978 ribu perjalanan, yang merupakan angka tertinggi yang tercatat dalam grafik ini. Angka ini diikuti dengan sedikit penurunan pada bulan-bulan berikutnya, tetapi tren perjalanan tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Grafik ini menunjukkan bagaimana pola perjalanan mengikuti siklus tahunan, dengan lonjakan yang signifikan selama hari libur besar, terutama Idul Fitri, yang sangat mempengaruhi mobilitas wisatawan domestik.

Alur kontribusi jumlah wisatawan nusantara terhadap rasio PDB pariwisata terletak pada dampaknya terhadap sektor-sektor terkait dalam ekonomi. Jumlah wisatawan nusantara yang tinggi akan meningkatkan konsumsi domestik di sektor pariwisata, mulai dari akomodasi, makanan dan minuman, hingga transportasi dan kegiatan rekreasi.



Semua ini berkontribusi pada nilai tambah bruto sektor pariwisata, yang kemudian dihitung untuk menentukan kontribusi sektor tersebut terhadap PDB nasional. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan nusantara, sektor pariwisata dapat terus berkembang, sehingga memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan rasio PDB pariwisata.

Bauran Kebijakan Mendongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara

Alur kontribusi jumlah wisatawan nusantara terhadap rasio PDB pariwisata terletak pada dampaknya terhadap sektor-sektor terkait dalam ekonomi. Jumlah wisatawan nusantara yang tinggi akan meningkatkan konsumsi domestik di sektor pariwisata, mulai dari akomodasi, makanan dan minuman, hingga transportasi dan kegiatan rekreasi. Semua ini berkontribusi pada nilai tambah bruto sektor pariwisata, yang kemudian dihitung untuk menentukan kontribusi sektor tersebut terhadap PDB nasional. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan nusantara, sektor pariwisata dapat terus berkembang, sehingga memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan rasio PDB pariwisata.

Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5: Koordinasi Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik

Salah satu hambatan utama Wisnus adalah biaya transportasi udara. Kemenko Perekonomian melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meninjau komponen biaya penerbangan. Koordinasi dilakukan dengan Kemenhub, Pertamina, dan Kementerian Keuangan untuk membahas penurunan harga avtur, efisiensi rantai pasok suku cadang, dan peninjauan pajak tiket pesawat. Penurunan

harga selanjutnya menjadi *baseline* dalam kebijakan diskon tiket pesawat.

Koordinasi Penetapan Hari Libur Nasional dan “Harpitnas”

Sebagai upaya untuk memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata jarak jauh tanpa mengganggu produktivitas nasional, Kemenko Perekonomian menginisiasikan dan mengoordinasikan penataan kalender libur untuk mendorong *long weekend*. Koordinasi dilakukan dengan menggandeng Kemenpan-RB dan Kemnaker untuk mengevaluasi hari libur nasional dan cuti bersama yang lebih strategis guna mendorong mobilitas masyarakat.

Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Perdesaan (Desa Wisata)

Kemenko Perekonomian mendorong diversifikasi destinasi agar wisatawan tidak hanya menumpuk di kota-kota besar atau Bali. Salah satu upaya untuk mengembangkan Destinasi wisata di pesesaan adalah dengan mengoordinasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pariwisata untuk pengelola Desa Wisata dan homestay melalui koordinasi dengan perbankan nasional (Himbara).

IQTF (Indonesia Quality Tourism Fund)

IQTF (Indonesia Quality Tourism Fund) adalah instrumen pendanaan yang baru saja dibentuk pemerintah untuk menggeser paradigma pariwisata Indonesia dari kuantitas menjadi **kualitas**. IQTF dirancang untuk memberikan dukungan finansial bagi penyelenggaraan event dunia yang memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan mancanegara melalui kepastian pendanaan (*bidding fund*) agar Indonesia bisa menarik konser kelas dunia, kejuaraan olahraga internasional (seperti MotoGP, F1 Powerboat), dan konferensi bisnis global.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja Rasio PDB Pariwisata hingga Tahun 2025 didorong oleh berbagai faktor utama, dengan kontribusi signifikan dari peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara. Beberapa faktor pendorong utama pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pembahasan terkait masalah yang ada dan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas stimulus berupa diskon transportasi libur nataru berupa diskon tiket kereta, angkutan laut, angkutan penyeberangan, dan tiket pesawat.
- Koordinasi implementasi asuransi pariwisata yang direncanakan akan dilaksanakan pilot project untuk destinasi Labuan Bajo
- Koordinasi dalam pembahasan berbasis riset mengenai tren pariwisata, daya dukung lingkungan dan sosial, serta model bisnis berkelanjutan untuk sektor amenitas di sekitar destinasi utama seperti candi.
- Koordinasi terkait pembahasan RPermenko Tata Kelola Candi Borobudur
- Koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi Progress dan Kendala yang dihadapi KEK Pariwisata Tahun 2025.
- Sinkronisasi melalui RDP Pembahasan DIM RUU Kepariwisata.
- Koordinasi melalui diskusi potensi pengembangan pariwisata bersama ADB.
- Penghitungan Indikator *Quality Tourism*
- Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Belitung

dilaksanakan melalui penyelenggaraan event sport tourism sebagai upaya sinergi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya tarik dan kesiapan destinasi. Kegiatan ini dilanjutkan dengan dukungan terhadap penyelenggaraan Event Gempita Belitung, termasuk *Aquabike Championship* sebagai sarana promosi pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan, serta penguatan citra Belitung sebagai destinasi *sport tourism* unggulan.

- Koordinasi terkait Potensi dan Alternatif Skema Pembiayaan untuk Percepatan dan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja Rasio PDB Pariwisata, berbagai langkah efisiensi telah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung hasil sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pencapaian ini mencerminkan peran pariwisata sebagai motor penggerak sektor jasa Indonesia yang terus berkembang, meskipun kontribusinya belum sebesar sektor-sektor utama seperti industri pengolahan dan perdagangan. Beberapa langkah efisiensi yang telah dilakukan antara lain:

- Penggunaan aplikasi *teleconference* dalam rapat koordinasi mengenai kebijakan konektivitas dan pengembangan destinasi wisata terbukti memberikan efisiensi biaya operasional. Langkah ini memungkinkan anggaran yang lebih besar dialokasikan untuk kegiatan penting lainnya, seperti monitoring dan evaluasi sektor pariwisata, yang mendukung pencapaian target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB.
- Pengembangan dan perbaikan aksesibilitas ke destinasi wisata yang lebih terhubung,



serta peningkatan konektivitas internasional, turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Pemerintah terus memperkuat jaringan transportasi dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas wisatawan, yang berdampak langsung pada peningkatan output ekonomi sektor pariwisata dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

- Perubahan strategi dari *quantity tourism* (jumlah kunjungan) menjadi *quality tourism* (peningkatan lama tinggal dan pengeluaran per wisatawan) untuk menghasilkan dampak ekonomi lebih besar dengan biaya promosi yang lebih terukur.
- Optimalisasi Destinasi Prioritas (DKWSP) melalui pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun secara maksimal guna meningkatkan daya tarik dan aktivitas ekonomi tanpa membutuhkan investasi baru yang besar.
- Penggunaan platform digital, *data analytics*, dan *market intelligence* untuk menargetkan pasar wisatawan potensial secara lebih tepat sasaran dan efisien.
- Penyederhanaan kebijakan visa dan layanan Keimigrasian dengan optimalisasi kebijakan visa (VoA, e-VoA, bebas visa tertentu) untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan mancanegara tanpa menambah beban fiskal signifikan.
- Kemitraan strategis dengan maskapai dan industri pariwisata melalui kerja sama promosi bersama (*co-branding*) dan bundling paket wisata untuk memperluas pasar dengan pembiayaan yang lebih efisien melalui skema sharing cost.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Kendala yang terjadi selama pencapaian target kinerja Rasio PDB Pariwisata pada 2025 mencakup beberapa tantangan yang

mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sektor pariwisata dalam berkontribusi terhadap PDB. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

- Perubahan iklim yang ekstrem menyebabkan bencana alam di beberapa daerah, yang mengurangi daya tarik dan menghambat penyelenggaraan acara pariwisata di destinasi-destinasi tertentu. Sebagai contoh, beberapa event tahun baru 2026 di destinasi tertentu harus dikurangi atau bahkan dibatalkan akibat dampak dari bencana alam yang terjadi.
- Persaingan destinasi global yang semakin ketat dimana negara-negara lain di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik agresif melakukan promosi dan insentif pariwisata, sehingga meningkatkan kompetisi dalam menarik wisatawan mancanegara.
- Tantangan dalam implementasi *quality tourism* dimana pergeseran strategi ke arah peningkatan pengeluaran per wisatawan membutuhkan kesiapan industri dalam menyediakan produk dan layanan bernilai tambah tinggi, yang belum sepenuhnya merata.
- Sebagian destinasi wisata, termasuk kawasan prioritas, masih menghadapi tantangan pada aspek amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang mempengaruhi pengalaman wisatawan.
- Belum optimalnya frekuensi dan rute penerbangan langsung dari pasar potensial menyebabkan biaya perjalanan relatif lebih tinggi dan menurunkan daya saing destinasi.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Rasio PDB Pariwisata pada Tahun 2025, sejumlah upaya yang selaras dan strategis telah dilakukan guna mendorong pertumbuhan sektor

pariwisata Indonesia. Beberapa upaya penting tersebut antara lain:

- Meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia, penyelenggaraan event skala nasional maupun internasional menjadi kunci. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi internasional, untuk menyelenggarakan berbagai acara besar yang menarik wisatawan internasional, seperti konferensi, festival budaya, dan pameran internasional, akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata global
- Memperkuat dan memperluas konektivitas ke tempat-tempat wisata potensial di seluruh Indonesia adalah upaya yang sangat penting untuk meningkatkan mobilitas wisatawan. Peningkatan konektivitas transportasi, baik melalui udara, laut, maupun darat, menjadi prioritas untuk memudahkan akses wisatawan menuju destinasi-destinasi unggulan yang belum maksimal diakses.
- Mendorong pembukaan dan penambahan rute penerbangan langsung dari pasar prioritas melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai, termasuk skema insentif terbatas dan kerja sama promosi bersama.
- Memperkuat pengembangan Destinasi Kawasan Wisata Super Prioritas (DKWSP) melalui penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas SDM pariwisata, dan penguatan event internasional.
- Mengarahkan kebijakan dan program pada peningkatan lama tinggal (*length of stay*) dan pengeluaran per wisatawan (*spending per visitor*) melalui pengembangan paket wisata tematik, *MICE*, *sport tourism*, dan *wellness tourism*.
- Penguatan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas wisata di seluruh Indonesia sangat diperlukan. Pemerintah juga perlu mendorong ekosistem industri pariwisata yang melibatkan berbagai sektor terkait seperti akomodasi, transportasi, dan layanan lainnya, sehingga tercipta sebuah ekosistem yang saling mendukung dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata.





B.2.7

INDEKS KETAHANAN ENERGI

Indeks ketahanan energi adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah yang menjamin pasokan energi yang handal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata guna mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menggambarkan kinerja sistem energi dari berbagai aspek strategis, seperti ketersediaan energi, aksesibilitas, keterjangkauan harga, ketahanan pasokan, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengukur faktor-faktor tersebut, indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa siap negara atau wilayah menghadapi tantangan energi yang semakin kompleks.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), ketahanan energi didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk memantau kondisi ketahanan energi tersebut, pemerintah melakukan penilaian secara berkala untuk melihat tingkat kedinamisannya, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability*. Terkait *affordability*, Indonesia masih memberikan harga subsidi baik batubara untuk PT PLN (Persero), elpiji, serta bensin masih pemerintah yang menetapkan harga.

Adapun status Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam penilaian ketahanan energi ditentukan oleh nilai indeks yang tercantum dalam skala berikut ini:

Tabel 3.10. Status Indeks Ketahanan Energi

SKALA	$N \leq 2$	$2 < N \leq 4$	$4 < N \leq 6$	$6 < N \leq 8$	$8 < N \leq 10$
	SANGAT RENTAN	RENTAN	KURANG TAHAN	TAHAN	SANGAT TAHAN

Sumber: Dewan Energi Nasional (2026)

Skala ini menggambarkan sejauh mana ketahanan energi Indonesia dapat bertahan terhadap berbagai tantangan yang ada. Penilaian yang lebih tinggi menunjukkan ketahanan energi yang lebih baik, sementara nilai yang lebih rendah mencerminkan ketahanan yang rentan dan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk perbaikan dan penguatan.

CAPAIAN KINERJA INDEKS KETAHANAN ENERGI

Capaian Indeks Ketahanan Energi menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pemerintah di sektor energi, serta menunjukkan sejauh mana ketahanan energi nasional mampu menopang stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pada Tahun 2025 capaian Indeks Ketahanan Energi tercantum sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian Indeks Ketahanan Energi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.7	Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,77	7,00	103,3%

Indonesia terus memperkuat ketahanan energi nasional sebagai wujud komitmen dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang. Sejalan dengan capaian kinerja pada tabel sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat bahwa Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia pada Tahun 2025 (prognosis) berada pada kategori tahan dengan nilai 7,00, yang tidak hanya menunjukkan peningkatan sebesar 0,26 dibandingkan Tahun 2024, tetapi juga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini setara dengan 103,30% dari target kinerja, yang mencerminkan efektivitas

kebijakan dan program di sektor energi yang terus dioptimalkan. Keberhasilan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai upaya strategis dalam rangka mencapai tingkat ketahanan energi yang lebih ideal, dengan sasaran indeks minimal 7 dan secara bertahap menuju skor yang lebih tinggi hingga 10. Dalam mengukur indeks ketahanan energi, para pakar energi menggunakan 4 aspek (4A) yakni, *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability* yang capaiannya dapat dilihat sebagai berikut pada Tahun 2025:

ASPEK	BOBOT ASPEK	INDIKATOR	BOBOT INDIKATOR	2024			Prognosis 2025*		
				NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	INDEKS	NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	INDEKS
Availability	32,80%	A.1. Cadangan dan Produktivitas Energi	22.66	8,10	6,76	6,74	8,74	7,68	
		A.2. Impor Energi	6.97%	3,90			4,70		
		A.3. Cadangan Energi Nasional	26.21%	6,23			7,58		
		A.4. Komitmen Pemenuhan Kebutuhan Energi Dalam Negeri	24.79%	7,35			7,12		
		A.5. Diversifikasi Energi Primer	19.37%	6,22			8,37		
Accessibility	26,30%	B.1. Infrastruktur dan Layanan Listrik	41.82%	6,98	6,70	6,74	7,40	7,04	7,00
		B.2. Infrastruktur dan Layanan BBM	28.75%	6,80			7,04		
		B.3. Infrastruktur dan Layanan Gas Bumi	12.07%	5,68			5,96		
		B.4. Infrastruktur dan Layanan LPG	17.36%	6,56			6,89		
Affordability	22,40%	C.1. Disparitas Harga Energi	39.57%	6,24	6,92	6,92	6,29	6,79	
		C.2. Biaya Pengeluaran Energi Terhadap Pengeluaran Total	39.94%	7,38			7,00		
		C.3. Energi yang disubsidi	20.49%	7,33			7,33		



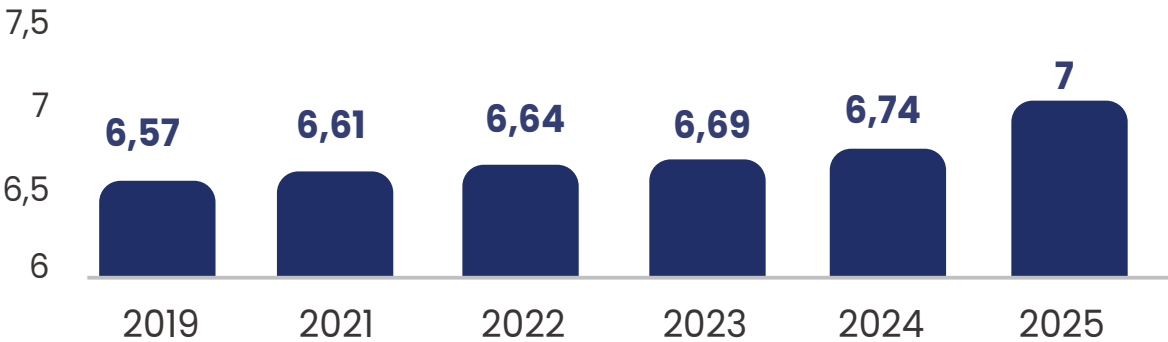
ASPEK	BOBOT ASPEK	INDIKATOR	BOBOT INDIKATOR	2024			Prognosis 2025*		
				NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	INDEKS	NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK	INDEKS
Acceptability	18,50%	D.1. Porsi EBT (dalam Bauran Energi)	29.12%	6,36	6,55	6,74	6,13	5,97	7,00
		D.2. Intensitas Energi	27.66%	7,19			4,52		
		D.3. Penurunan Emisi Karbon	20.51%	6,18			6,94		
		D.4. Capaian Diversifikasi Energi Bersih	22.71%	6,34			6,66		

Sumber: Dewan Energi Nasional, 2026

Penilaian terhadap empat aspek utama dalam sektor energi untuk Tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2025, dengan bobot dan indikator yang jelas. Aspek yang dinilai meliputi *Availability*, *Accessibility*, *Affordability*, dan *Acceptability*, yang masing-masing memiliki bobot berbeda. Untuk aspek *Availability*, indikator terkait cadangan dan produktivitas energi memiliki nilai indikator 8,10 dengan proyeksi 8,74 pada Tahun 2025, sedangkan *Accessibility* mencatatkan nilai 6,74 di Tahun 2024 dan proyeksi meningkat menjadi 7,00 pada Tahun 2025. Pada aspek *Affordability*,

meskipun nilai indikator pada Tahun 2024 tercatat cukup tinggi di 7,38, proyeksi untuk Tahun 2025 menunjukkan penurunan menjadi 7,33. Adapun *Acceptability*, yang mencakup nilai keberlanjutan energi dan dampak lingkungan, menunjukkan penurunan dengan nilai indikator 6,34 pada Tahun 2024 dan proyeksi hanya mencapai 5,97 pada Tahun 2025, mengindikasikan tantangan dalam mencapai diversifikasi energi bersih. Tabel ini memberikan gambaran tentang perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target keberlanjutan energi di Indonesia.

Gambar 3.19. Indeks Ketahanan Energi (IKE)



Sumber: Dewan Energi Nasional (2026)

Perkembangan Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia dari Tahun 2019 hingga proyeksi Tahun 2025, dengan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada Tahun 2019, IKE tercatat sebesar 6,57, yang kemudian meningkat secara bertahap menjadi 6,61 pada Tahun 2021, dan sedikit meningkat lagi menjadi

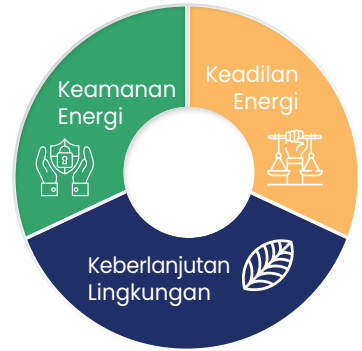
6,64 pada Tahun 2022. Angka ini terus naik hingga 6,69 pada Tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 6,74 pada Tahun 2024. Peningkatan yang terus berlanjut mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung keberlanjutan sektor energi, seperti diversifikasi sumber energi, peningkatan infrastruktur, dan penguatan sektor transportasi energi. Pada Tahun 2025, IKE diproyeksikan mencapai 7,00, menandakan bahwa Indonesia semakin mampu mengatasi tantangan ketahanan energi dan lebih siap menghadapi perubahan serta ketidakpastian global yang terkait dengan pasokan dan permintaan energi. Proyeksi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan ketahanan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas energi dalam jangka panjang.

Dalam hal pengukuran ketahanan energi, selain menggunakan empat aspek utama (*availability, affordability, accessibility, dan acceptability*), Indonesia juga menerapkan metode pembobotan melalui *Analisa Hierarchy Process (AHP)*. Dengan mempertimbangkan pencapaian infrastruktur energi dan kebijakan yang telah diimplementasikan hingga akhir Tahun 2025, diperkirakan bahwa ketahanan energi nasional Indonesia tetap berada pada kategori **“Tahan”** dengan potensi peningkatan menuju kategori ideal sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional. Upaya ini menunjukkan tekad Indonesia untuk mencapai ketahanan energi yang lebih tinggi, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi domestik, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

Gambar 3.20. Indeks Trilema Negara ASEAN 2024

Indeks Trilema Negara ASEAN 2024

Pada tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-5 di ASEAN dalam Indeks Trilema Energi, dengan skor 60,5 yang mencerminkan performa di aspek keamanan energi, keadilan energi, dan keberlanjutan lingkungan.



Sumber : World Energy Council (2025)

Peringkat Dunia (peringkat ASEAN)		Negara	Skor Trilema	Skor Keamanan Energi	Skor Keadilan Energi	Skor Keberlanjutan Lingkungan	
31 (5)	1)	Singapura	70,1	38,90	98,40	98,4	68,40
35 (2)	2)	Malaysia	69,00	66,50	79,30	79,30	63,10
45 (3)	3)	Brunei	64,80	49,40	95,00	70,50	52,40
56 (4)	4)	Vietnam	61,90	61,90	70,50	57,70	57,70
58 (5)	5)	Indonesia	60,50	66,40	57,00	60,60	60,60
60 (6)	6)	Thailand	60,1	55,90	55,90	55,90	55,20
72 (7)	7)	Filipina	56,90	59,30	71,90	49,40	66,40
80 (8)	8)	Kamboja	47,70	53,20	53,20	53,20	46,00
Rata-rata ASEAN		61,38	56,44	56,44	69,16	69,16	60,15



Selanjutnya, dalam capaian kinerja Indeks Ketahanan Energi melalui alat ukur ketahanan energi yang sah dan diakui secara global, yaitu Indeks Trilema Energi Dunia (*World Energy Trilemma Index*) yang dirilis setiap tahun sejak 2010 oleh *World Energy Council* (WEC), posisi Indonesia pada rilis terakhir Tahun 2024 menunjukkan capaian yang perlu dicermati secara komprehensif. Pada Tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-58 dunia atau peringkat ke-5 di kawasan ASEAN dengan skor Trilema Energi sebesar 60,50. Sebagai perbandingan, capaian Indonesia tersebut masih berada di bawah negara-negara dengan kinerja terbaik di kawasan ASEAN. Singapura menempati peringkat pertama ASEAN dengan skor Trilema Energi 70,10 yang unggul pada aspek keadilan energi, diikuti Malaysia dengan skor 69,00 yang relatif seimbang antara keamanan dan keadilan energi. Brunei berada di peringkat ketiga ASEAN dengan skor 64,80 yang ditopang oleh tingkat keadilan energi yang sangat tinggi, sementara Vietnam menempati peringkat keempat dengan skor 61,90 yang menunjukkan kinerja cukup merata pada ketiga dimensi. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, posisi Indonesia di peringkat kelima ASEAN mencerminkan kinerja ketahanan energi yang masih kompetitif, namun memerlukan penguatan lebih lanjut terutama pada aspek keadilan energi dan keberlanjutan lingkungan agar mampu mendekati capaian negara-negara dengan peringkat lebih tinggi di kawasan.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA INDEKS KETAHANAN ENERGI

Pencapaian kinerja Indeks Ketahanan Energi tidak terlepas dari dukungan berbagai indikator

kunci yang saling terintegrasi dalam sistem energi nasional. Seluruh factor pembentuk ini kemudian menjadi lokus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan peran sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian sepanjang Tahun 2025.

a. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pasokan Energi Primer

Pasokan energi primer adalah jumlah energi yang tersedia dalam bentuk yang dapat langsung digunakan atau diproses lebih lanjut untuk menghasilkan energi sekunder. Energi primer ini terdiri dari sumber daya alam yang belum melalui proses pengolahan lebih lanjut, seperti batubara, minyak bumi, gas alam, energi terbarukan (seperti PLTA, geothermal, biomassa, dan biofuel), dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pasokan energi primer merupakan salah satu indikator untuk mengukur ketersediaan energi yang mencakup aspek keberlanjutan, keterjangkauan, dan efisiensi, yang mendukung ketahanan energi nasional.

Pengukuran pasokan energi primer dilakukan dengan menghitung total produksi energi domestik yang tersedia, ditambah dengan impor energi, dikurangi ekspor, dan ditambah/ dikurangi perubahan stok. Proses ini mencakup berbagai sumber energi primer, seperti batubara, minyak bumi, gas alam, dan energi terbarukan. Untuk mendapatkan angka pasokan energi primer yang akurat, data yang terkait dengan produksi dalam negeri, impor, ekspor, dan perubahan stok energi perlu dikumpulkan secara sistematis. Namun, data terkait bunker energi tidak selalu tersedia, yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran.

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Lifting Minyak dan Gas Bumi

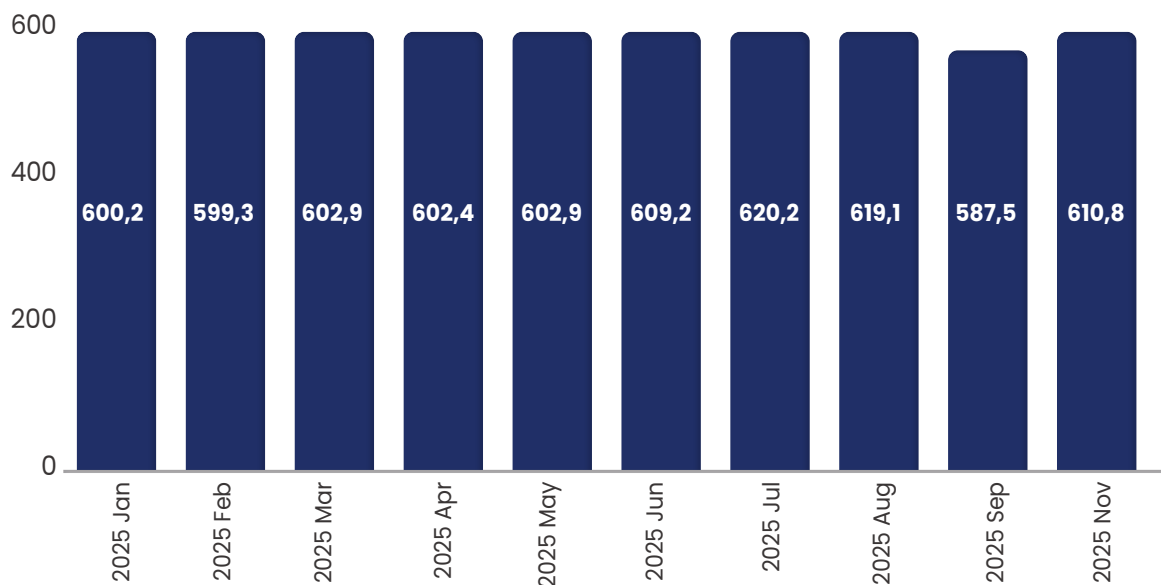
Dengan meningkatnya lifting minyak dan gas bumi, sektor energi Indonesia diharapkan dapat tetap menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi yang bergantung pada pasokan energi yang handal. Hal ini juga akan memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan daya saing industri dalam negeri, serta mendorong upaya diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan energi terbarukan. Secara keseluruhan, kebijakan hulu migas yang tepat dan terintegrasi tidak hanya penting untuk menciptakan ketahanan energi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 3.21. Produksi Minyak Bumi

Produksi Minyak Bumi

MBOPD



Sumber: SKK Migas (2025)

Pencapaian dalam pasokan energi primer sangat dipengaruhi oleh *lifting* minyak dan gas bumi, yang menjadi agenda strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Berdasarkan data yang tersedia, grafik pertama menggambarkan tren *lifting* minyak bumi selama beberapa bulan terakhir, dengan hasil yang menunjukkan fluktuasi relatif kecil namun konsisten. Pada Bulan Januari 2023, *lifting* minyak bumi tercatat sebesar 6.867 ribu barel, dan meskipun terdapat sedikit penurunan di bulan-bulan berikutnya, angka *lifting* tetap berada dalam kisaran yang stabil, seperti 6.652 ribu barrel pada Februari dan 6.913 ribu barrel pada Maret. Namun, terlihat

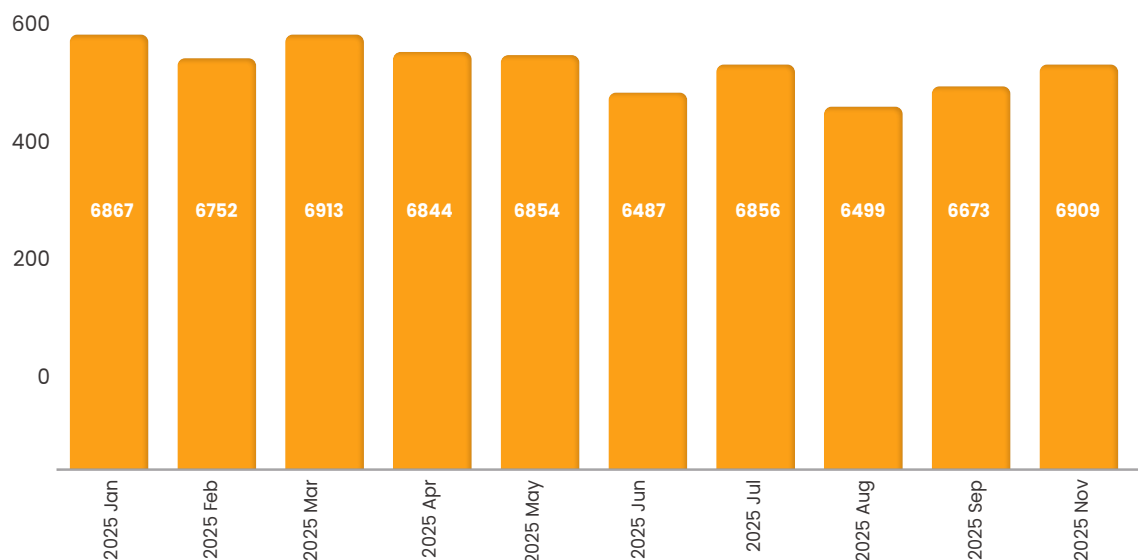


bahwa lifting minyak bumi mengalami sedikit penurunan pada bulan Mei dan Juni, tetapi berhasil kembali meningkat pada bulan Juli, yang menunjukkan adanya respons terhadap kebijakan yang diterapkan untuk memaksimalkan produksi.

Gambar 3.22. Produksi Gas Bumi

Produksi Gas Bumi

MMSCBD



Sumber: SKK Migas (2025)

Sementara itu, grafik kedua yang menggambarkan lifting gas bumi juga menunjukkan hasil yang relatif stabil, meskipun ada beberapa fluktuasi kecil di sepanjang periode tersebut. Lifting gas bumi tercatat sebesar 600,2 ribu ton pada Januari 2023, dan sedikit menurun menjadi 599,3 ribu ton pada Februari. Namun, lifting gas bumi kembali mengalami sedikit peningkatan di bulan Maret hingga Juni, dengan nilai tertinggi mencapai 620,4 ribu ton pada bulan Juni. Meskipun ada penurunan kecil di Bulan Juli dan Agustus, data ini menunjukkan bahwa sektor gas bumi mampu menjaga angka produksi pada level yang stabil dan dapat mendukung ketahanan energi nasional

dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Realisasi rata-rata lifting minyak bumi sepanjang Tahun 2025 tercatat sebesar 605,3 ribu barrel per hari, atau mencapai 100,05% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2025. Capaian ini menandai kenaikan pertama kalinya dalam sembilan tahun terakhir. Di sisi lain, realisasi rata-rata lifting gas bumi pada Tahun 2025 mencapai 951,8 ribu barrel per hari, atau 94,71% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2025. Meskipun demikian, seluruh kebutuhan gas pada Tahun 2025 dipenuhi sepenuhnya dari produksi gas domestik, tanpa ada pasokan yang berasal dari impor.

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Penyaluran BBM Bersubsidi

Berdasarkan data BPH Migas, realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga Desember 2025 menunjukkan bahwa penyaluran JBKP (Pertalite) telah mencapai 88,7% dari kuota yang ditetapkan, JBT Minyak Tanah sebesar 96,8%, dan JBT Solar sebesar 98,2% dari total kuota penyaluran. Angka realisasi tersebut disusun berdasarkan data terverifikasi hingga November 2025 serta data periode 1–25 Desember 2025 yang masih bersifat *unverified*.

Gambar 3.23. Capaian dan Target Sektor Migas



Sumber: SKK Migas (2025)

Secara umum, capaian tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi sepanjang Tahun 2025 masih berada dalam koridor kuota yang telah ditetapkan, dengan tingkat serapan yang relatif tinggi terutama pada JBT Solar dan JBT Minyak Tanah, yang mencerminkan tingginya kebutuhan sektor transportasi, logistik, serta rumah tangga tertentu terhadap kedua jenis BBM tersebut. Lebih lanjut, realisasi penyaluran yang berada di bawah kuota tidak dapat dimaknai sebagai indikasi kinerja penyaluran yang kurang optimal. Sebaliknya, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan subsidi energi, yang didorong oleh penguatan kebijakan pengendalian konsumsi, perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi, serta implementasi

berbagai instrumen pengawasan guna memastikan subsidi disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Produksi Batu Bara

Batubara sebagai sumber energi primer utama dalam bauran energi nasional Indonesia. Tingginya tingkat produksi batubara nasional, yang diimbangi dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*), menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi, khususnya bagi sektor ketenagalistrikan dan industri. Melalui pengaturan proporsi antara produksi untuk ekspor dan alokasi untuk kebutuhan domestik, pemerintah memastikan bahwa



ketersediaan energi primer tetap terjaga secara berkelanjutan, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, keseimbangan produksi dan konsumsi batubara tidak hanya mencerminkan kinerja sektor energi, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pasokan energi nasional di tengah tantangan fluktuasi permintaan dan dinamika global.

Sepanjang Tahun 2025, peran batubara terhadap ketahanan pasokan energi primer nasional tercermin dari keseimbangan antara tingkat produksi dan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*). Pada tahun 2025, target produksi batubara nasional ditetapkan sebesar 739 juta ton, dengan realisasi produksi sepanjang tahun 2025 data terkini produksi batu bara mencapai sekitar 509,3 juta . Sementara itu, kebutuhan batubara dalam negeri (DMO) ditargetkan sebesar sekitar 184,75 juta ton dan telah terealisasi sekitar 135 juta ton atau 73,1%, sehingga tingkat pemenuhan DMO mencapai 100,8%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian produksi batubara nasional secara konsisten dialokasikan untuk menjamin pasokan energi domestik, khususnya bagi sektor ketenagalistrikan, industri, dan sektor strategis lainnya, sebelum kelebihan produksi diarahkan untuk ekspor. Dengan terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri di atas target, batubara tetap berfungsi sebagai tulang punggung energi primer nasional dalam menjaga keandalan pasokan energi, menekan resiko defisit energi, serta mendukung stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional di tengah dinamika pasar global.

Bauran Kebijakan Menjaga Pasokan Energi Primer

Penguatan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor

Devisa Hasil Ekspor (DHE) merupakan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha dalam negeri yang wajib ditempatkan dalam sistem keuangan nasional sesuai ketentuan pemerintah. Pengelolaan DHE berperan penting dalam memperkuat cadangan devisa, yang menjadi sumber pembiayaan impor strategis, termasuk minyak mentah, bahan bakar minyak, dan gas bumi. Ketersediaan cadangan devisa yang memadai meningkatkan kemampuan negara dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi, khususnya ketika produksi energi domestik belum mencukupi kebutuhan nasional. Selain itu, pengelolaan DHE yang efektif memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga energi global dan tekanan nilai tukar, sehingga turut mendukung stabilitas pasokan dan ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

Pengawasan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan oleh Pemerintah Indonesia sebagai respons atas kebutuhan penguatan cadangan devisa dan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, yang mewajibkan penempatan DHE sumber daya alam dalam sistem keuangan domestik dalam jangka waktu tertentu guna memperkuat likuiditas valas nasional. Dalam implementasinya, pemerintah secara aktif melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap dunia usaha, stabilitas nilai tukar, dan ketahanan pembiayaan

impor strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar penyempurnaan regulasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023, yang menegaskan penguatan mekanisme penempatan, pengelolaan, serta fleksibilitas pemanfaatan DHE tanpa mengurangi tujuan utama kebijakan. Rangkaian pengawalan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan stabilitas makroekonomi, daya saing pelaku usaha, serta ketahanan pasokan energi dan ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan

Penguatan Kebijakan Subsidi BBM

Penguatan kebijakan subsidi BBM dilakukan melalui koordinasi pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, sebagai respons atas dinamika harga energi global, tekanan fiskal, serta kebutuhan peningkatan ketepatan sasaran subsidi. Koordinasi ini dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan jenis BBM tertentu (JBT) dan BBM khusus penugasan (JBKP), mekanisme penetapan harga, serta kriteria konsumen penerima subsidi agar lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika harga minyak dunia, nilai tukar, serta kondisi fiskal nasional. Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat, keberlanjutan APBN, serta kepastian distribusi energi di seluruh wilayah Indonesia.

Implementasi hasil revisi Perpres ini berdampak langsung terhadap penjagaan pasokan energi primer, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM

sebagai komponen utama energi nasional. Penajaman sasaran subsidi dan penguatan sistem pengendalian distribusi membantu mengurangi potensi penyimpangan dan konsumsi berlebih, sehingga alokasi BBM subsidi dapat lebih terjaga dan sesuai kebutuhan riil. Selain itu, pengendalian beban subsidi dan kompensasi turut menjaga ruang fiskal negara untuk pembiayaan impor minyak mentah dan BBM ketika produksi domestik belum mencukupi, sehingga stabilitas pasokan energi primer tetap terjamin di tengah fluktuasi pasar energi global.

Implementasi Front-End Engineering Design (FEED)

Sebagai upaya memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional ini, serangkaian kegiatan pengendalian ketat telah dilaksanakan, mulai dari peninjauan kembali *Plan of Development* guna mengintegrasikan teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS), hingga percepatan perizinan lahan di Kepulauan Tanimbar. Koordinasi intensif ini memuncak pada peluncuran tahap *Front-End Engineering Design* (FEED) di Agustus 2025 dengan tujuan mematangkan desain teknis serta estimasi biaya fasilitas darat berkapasitas 9,5 juta ton LNG per tahun secara akurat. hingga akhir tahun *Front-End Engineering Design* (FEED) tersebut telah mencapai progres signifikan guna mengejar target rampung di awal 2026. Keberhasilan pengendalian pada fase FEED ini menjadi fondasi krusial bagi penandatanganan *Final Investment Decision* (FID) dan dimulainya lelang EPC pada 2026, demi menjaga target operasional (*onstream*) tetap berjalan sesuai jadwal pada Tahun 2029.



Implementasi tahap *Front-End Engineering Design* (FEED) pada proyek Abadi Blok Masela merupakan langkah fundamental dalam mentransformasi desain konseptual menjadi cetak biru teknis yang presisi, mencakup integrasi fasilitas kilang LNG darat (onshore), jaringan pipa bawah laut, hingga penerapan teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS) untuk memastikan standar produksi yang rendah emisi. Secara operasional, FEED memainkan peran krusial dalam menetapkan parameter kapasitas produksi sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun dan 150 MMSCFD gas pipa, yang secara langsung akan memperkuat neraca gas nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Dampak sistemiknya sangat signifikan terhadap pasokan energi domestik, di mana alokasi gas tersebut diproyeksikan menjadi penggerak utama bagi hilirisasi industri di Indonesia Timur, memasok kebutuhan bahan baku pabrik pupuk, serta menjamin ketersediaan energi bersih bagi pembangkit listrik strategis nasional. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, keberhasilan fase FEED ini memberikan kepastian volume pasokan dan stabilitas harga gas jangka panjang, yang pada akhirnya memposisikan Indonesia secara kompetitif dalam peta energi global sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hingga masa berakhirnya kontrak pada Tahun 2055.

Pengelolaan Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi mengatur mekanisme dan kerangka kerja sama dalam pengelolaan wilayah kerja migas guna mendorong peningkatan produksi nasional.

Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kerja sama pengelolaan wilayah kerja melalui optimalisasi aset, penerapan teknologi, dan kolaborasi antar pelaku usaha hulu migas, khususnya pada wilayah kerja yang menghadapi penurunan produksi atau belum dioptimalkan secara maksimal.

Dalam kaitannya dengan pasokan energi primer, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam tersebut berperan penting dalam memperkuat ketersediaan minyak dan gas bumi domestik sebagai sumber energi primer nasional. Melalui peningkatan produksi migas dari dalam negeri, kebijakan ini mendukung pengurangan ketergantungan terhadap impor energi, menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional, serta memperkuat ketahanan energi dalam jangka menengah dan panjang.

b. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Ketahanan energi nasional yang berkelanjutan diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

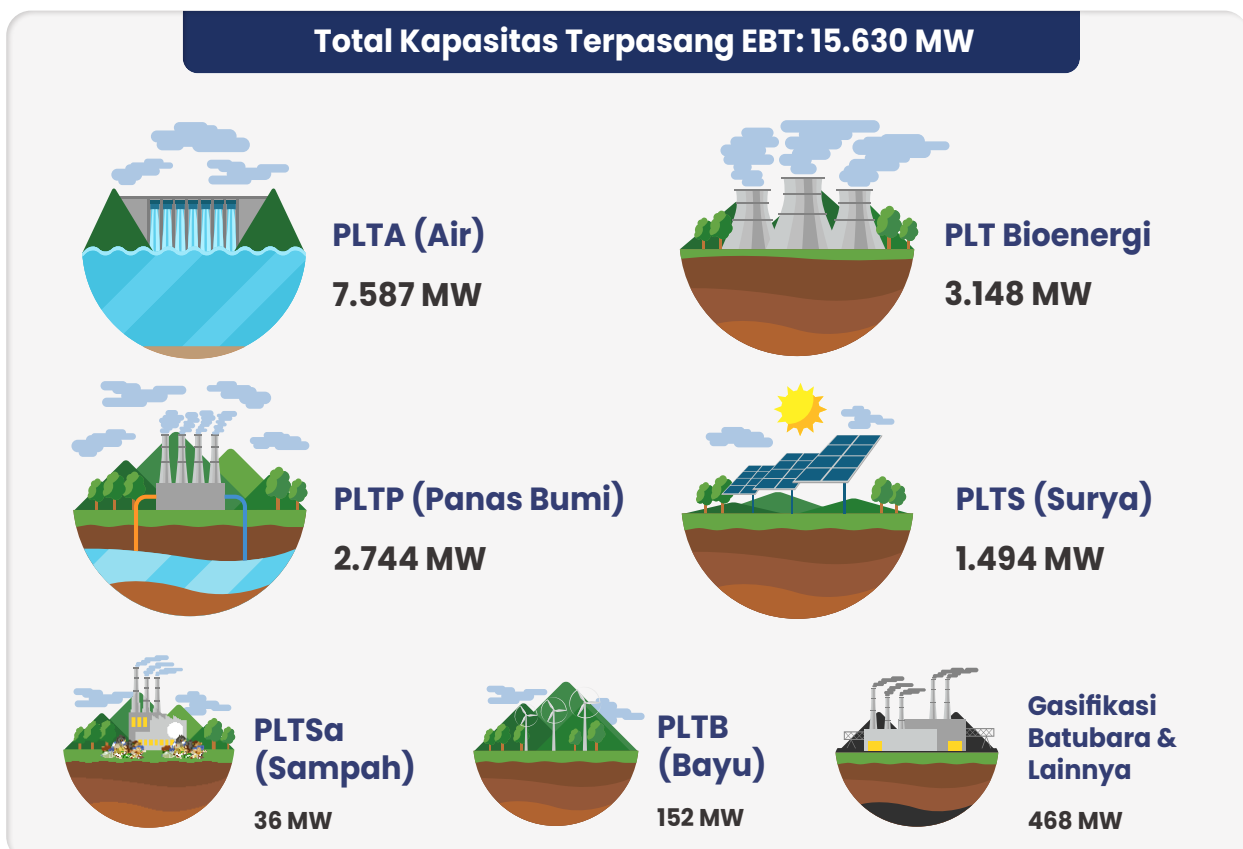
Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer merupakan indikator yang mengukur kontribusi energi terbarukan terhadap total pasokan energi primer suatu

negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sumber energi baru adalah energi yang dihasilkan dari teknologi baru yang mencakup baik sumber energi terbarukan maupun tak terbarukan, seperti nuklir, hidrogen, dan gas metana batubara. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak habis, seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, dan aliran air. Porsi EBT ini menunjukkan seberapa besar negara beralih ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pengukuran porsi EBT dalam bauran energi primer dilakukan dengan menghitung total kontribusi energi terbarukan terhadap total pasokan energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas, batubara, dan energi terbarukan.

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Produksi Listrik Energi Terbarukan

Bauran energi terbarukan di sektor listrik berhasil mencapai 16,3 persen, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebesar 15,9 persen. Keberhasilan ini tidak terlepas dari banyaknya penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan sepanjang Tahun 2025, di mana total kapasitas terpasang mencapai lebih dari 15.630 MW rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Realisasi bauran energi terbarukan yang melampaui target di sektor ketenagalistrikan mencerminkan efektivitas strategi pengembangan EBT, sekaligus menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemanfaatan sumber energi bersih mampu mendorong capaian yang lebih tinggi, meskipun tantangan dari dominasi pembangkit berbasis fosil masih tetap ada.

Gambar 3.24. Total Kapasitas Terpasang EBT: 15.630 MW



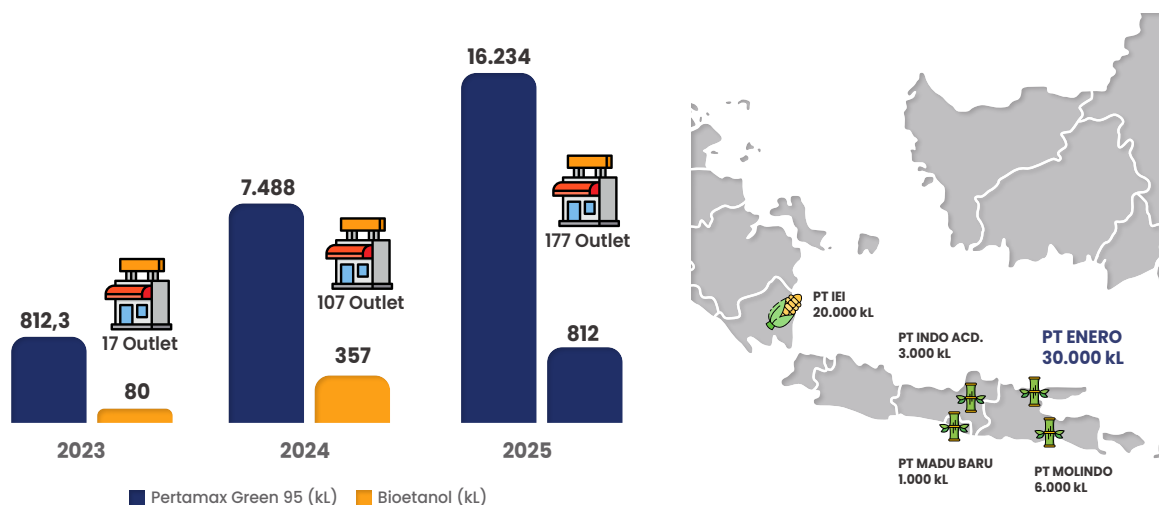
Sumber : Kementerian ESDM (2025)

Selanjutnya untuk mencapai produksi Listrik Energi Terbarukan pada tahun 2025 total kapasitas EBT Indonesia mencapai 15.630 MW yang ditopang terutama oleh PLTA sebesar 7.587 MW, diikuti bioenergi 3.148 MW, panas bumi 2.744 MW, dan surya 1.494 MW, serta kontribusi tambahan dari PLTB, PLTSa, dan gasifikasi batubara. Struktur bauran ini menunjukkan alur penguatan ketahanan energi yang dimulai dari peningkatan keamanan energi melalui diversifikasi sumber energi domestik yang mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor, kemudian mendukung keadilan energi melalui pemanfaatan EBT yang tersebar di berbagai wilayah dan berpotensi memperluas akses energi, serta berujung pada penguatan keberlanjutan lingkungan melalui penurunan emisi dan pemanfaatan sumber energi rendah karbon. Dengan demikian, pengembangan EBT secara terintegrasi tidak hanya meningkatkan kapasitas pasokan energi nasional, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian Indeks Ketahanan Energi, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara keamanan pasokan, pemerataan akses, dan keberlanjutan lingkungan secara berkelanjutan.

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Target Konsumsi Biofuel

Target konsumsi biofuel merupakan upaya strategis pemerintah dalam memastikan pemanfaatan energi terbarukan berbasis bahan bakar nabati berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan kebijakan energi nasional. Pemanfaatan bioetanol diharapkan semakin optimal, mendukung transisi energi yang lebih bersih, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya dalam sektor transportasi. Peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati ini menjadi bagian integral dari upaya mencapai target *Net Zero Emission* yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Keberhasilan dalam pemanfaatan bioetanol juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan mengurangi dampak lingkungan dari sektor energi. Dengan langkah ini, Indonesia semakin bergerak menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan, berfokus pada pengurangan emisi dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan.

Gambar 3.25. Capaian Distribusi Pertamina Green dan Bioetanol 2025



Catatan: Realisasi pemanfaatan bioetanol di Pertamina pada tahun 2023 s.d 2025 hanya disuplai dari PT ENERO.

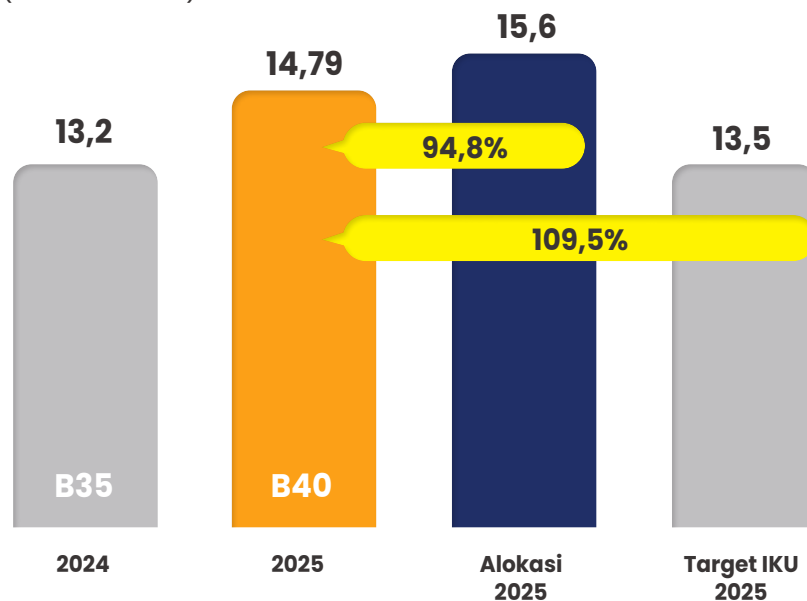
Sumber: KESDM (2025)

Pada Tahun 2025 terdapat peningkatan signifikan konsumsi dan distribusi biofuel, khususnya Pertamina Green 95 dan bioetanol, dalam periode 2023–2025 sebagai hasil penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan biofuel. Volume Pertamina Green 95 meningkat dari 812,3 kL pada 2023 menjadi 16.234 kL pada 2025, seiring dengan bertambahnya jumlah outlet dari 17 menjadi 177 outlet, sementara konsumsi bioetanol naik dari 80 kL menjadi 812 kL pada periode yang sama. Peta sebaran fasilitas produksi bioetanol yang tersebar di beberapa wilayah menunjukkan kesiapan pasokan hulu untuk mendukung perluasan konsumsi, sehingga secara keseluruhan mencerminkan upaya terintegrasi dalam memperkuat

pemanfaatan biofuel sebagai bagian dari diversifikasi energi dan peningkatan ketahanan pasokan energi nasional.

Berikutnya untuk meningkatkan capaian konsumsi biofuel pemerintah melakukan Penerapan mandatori B40 merupakan kebijakan strategis Pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih. Melalui pemanfaatan biodiesel berbahan baku kelapa sawit, kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor solar, menekan emisi karbon, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya terbarukan domestik.

(dalam Juta kL)



Sumber : Kementerian ESDM (2025)

Grafik ini memperlihatkan konsistensi pengendalian target konsumsi biodiesel nasional dalam rangka mendukung bauran energi terbarukan. Pada Tahun 2024, realisasi konsumsi biodiesel B35 mencapai 13,2 juta kL dan meningkat pada Tahun 2025 seiring penerapan B40 dengan proyeksi sebesar 14,79 juta kL. Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan alokasi biodiesel Tahun 2025 sebesar 15,6 juta kL, yang setara dengan 94,8% kebutuhan B40 dan telah melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 sebesar 13,5 juta kL atau



mencapai 109,5%. Capaian ini menegaskan kesiapan pasokan biofuel nasional serta efektivitas sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam memperkuat ketahanan pasokan energi secara berkelanjutan.

Bauran Kebijakan Menjaga Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer **Percepatan Transisi Energi melalui Pengembangan Ketenagalistrikan**

Penguatan Transisi Energi melalui Pengembangan Ketenagalistrikan Rendah Karbon, ditetapkannya *Design Approach Paris Agreement* (DAPA) merupakan kebijakan yang memberikan kerangka implementasi kerja sama bilateral sesuai Pasal 6 Paris Agreement, khususnya untuk pemanfaatan mekanisme kerja sama internasional dalam penurunan emisi. Melalui DAPA, Indonesia menetapkan tata cara perancangan proyek, penghitungan emisi, tracking hasil mitigasi, serta pengelolaan hasil pengurangan emisi (*Internationally Transferred Mitigation Outcomes/ITMOs*) agar tetap menjaga integritas lingkungan dan kepentingan nasional. Implementasi DAPA antara lain diarahkan pada pengembangan pembangkit listrik rendah karbon, seperti PLTS terapung di bendungan, yang terintegrasi dengan sistem ketenagalistrikan nasional. Dampaknya, kebijakan ini mendorong percepatan investasi energi bersih, memperluas pemanfaatan EBT dalam bauran energi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam transisi energi global tanpa mengurangi kedaulatan pencapaian target penurunan emisi nasional.

Kebijakan Mandatori B40

Kegiatan penyaluran BIOO untuk mendukung mandatori biodiesel B40 merupakan

instrumen utama dalam menjaga dan meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi primer. Implementasi mandatori B40, yang mewajibkan pencampuran 40% biodiesel berbasis minyak nabati ke dalam bahan bakar solar, secara langsung meningkatkan konsumsi energi terbarukan di sektor transportasi. Penyaluran BIOO yang dilakukan secara terencana dan terkontrol memastikan ketersediaan pasokan biodiesel di seluruh wilayah, menjaga kesinambungan distribusi, serta mendukung pencapaian target bauran energi nasional. Dampaknya, kebijakan ini tidak hanya menurunkan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, tetapi juga memperkuat ketahanan energi, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, dan mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan.

Penguatan Kebijakan Bioetanol Pasca Perubahan Perpres 40/2023

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada prinsipnya dimaksudkan untuk memperkuat, menyempurnakan, dan mempercepat pelaksanaan kebijakan yang mengintegrasikan agenda ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional, khususnya melalui optimalisasi komoditas tebu sebagai sumber gula sekaligus bahan baku bioetanol. Substansi perubahan ini mencakup penguatan dasar hukum percepatan swasembada gula, penajaman target dan tahapan pengembangan bioetanol, penegasan peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta, serta penyelarasan kebijakan

perizinan, pembiayaan, dan tata kelola lahan agar investasi tebu dan bioetanol dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Selain itu, perubahan Perpres juga menekankan peningkatan produktivitas dan efisiensi hulu-hilir, mulai dari pengembangan bibit unggul, perluasan dan intensifikasi lahan tebu, modernisasi pabrik gula, hingga pemanfaatan produk samping tebu untuk energi, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani. Implementasinya di lapangan dilakukan melalui pembentukan dan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, percepatan penetapan dan pemanfaatan lahan potensial, pemberian kemudahan perizinan dan dukungan pembiayaan bagi proyek gula dan bioetanol terintegrasi, serta pengembangan industri bioetanol yang terhubung dengan kebijakan bauran energi nasional, termasuk persiapan penerapan campuran bioetanol pada BBM. Dengan demikian, perubahan Perpres ini menjadi instrumen strategis untuk mendorong pencapaian target persentase biofuel secara bertahap dan terukur, sekaligus mengurangi ketergantungan impor gula dan bahan bakar fosil, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan energi nasional secara berkelanjutan.

c. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Konsumsi Energi Final per Kapita

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Ketahanan Energi didefinisikan sebagai kondisi di mana ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi dapat terjamin dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hal ini diukur

melalui enam indikator, yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*). Konsumsi energi final merujuk pada jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir, termasuk sektor rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial, serta penggunaan non-energi.

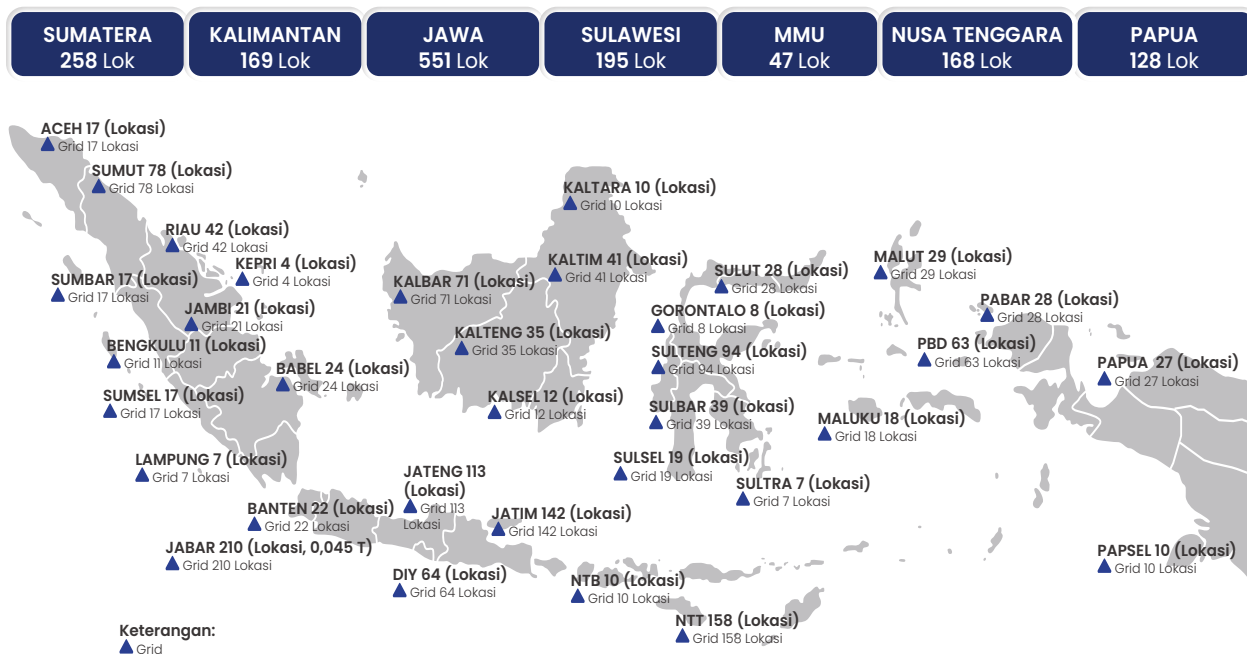
Konsumsi energi final per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan energi nasional, karena mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial mereka. Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Sebagai hasilnya, semakin tinggi konsumsi energi final per kapita, biasanya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi energi dan transisi menuju energi bersih. Pengukuran konsumsi energi final per kapita dilakukan dengan menghitung total konsumsi energi yang digunakan oleh konsumen akhir, kemudian dibagi dengan jumlah total penduduk. Dalam perhitungan ini, energi yang digunakan di sektor rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial dihitung, termasuk konsumsi non-energi.

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Konsumsi Energi Listrik per Kapita

Untuk peningkatan konsumsi energi final per kapita pemerintah melakukan pelaksanaan



untuk mendukung konsumsi energi melalui Program Listrik Perdesaan (Lisdes) merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mengalirkan listrik ke lokasi yang belum berlistrik dalam kurun waktu empat tahun, sebagaimana disampaikan pada peresmian PLTA Jatigede dan PLTP Ijen. Perluasan akses listrik rumah tangga dilakukan melalui sistem kelistrikan PLN, dengan rasio elektrifikasi mencapai 98,5%. Berdasarkan pemetaan berbasis spasial menggunakan citra satelit, masih terdapat 10.068 lokasi yang belum berlistrik. Pembangunan transmisi, listrik desa, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) direncanakan di seluruh Wilayah Usaha PLN dan terhubung dengan jaringan eksisting, serta dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Pada Tahun 2025, pelaksanaan Program Lisdes skema ABT telah memasuki tahap konstruksi, penyelesaian konstruksi, serta pembangunan jaringan distribusi. Hingga 2 Januari 2026, sebanyak 296 dari 1.516 lokasi (19,5%) telah menyelesaikan konstruksi, terdiri atas 82 lokasi yang telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) atau telah menyala, serta 214 lokasi yang telah selesai konstruksi dan dalam proses pengurusan SLO. Sementara itu, sebanyak 1.220 lokasi (81,5%) masih dalam tahap konstruksi dan pembangunan jaringan transmisi serta distribusi, dengan target penyelesaian pada akhir Maret 2026.

Bauran Kebijakan Menjaga Konsumsi Energi Final per Kapita

Percepatan Akses Listrik Perdesaan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan konsumsi energi final per kapita yang berkeadilan, pemerintah memperkuat kebijakan percepatan akses listrik melalui koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Koordinasi ini mencakup percepatan penyelesaian skema ABT Kementerian ESDM untuk memperluas akses listrik ke wilayah yang belum berlistrik, sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik rumah tangga. Program ini berperan

langsung dalam meningkatkan konsumsi energi final per kapita, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan memastikan masyarakat memperoleh akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Penguatan Keamanan Pasokan Energi melalui Penugasan Impor Energi

Pemerintah melakukan penguatan keamanan pasokan energi melalui penyusunan kebijakan penugasan impor energi strategis dari Amerika Serikat. Langkah ini didasarkan pada kebutuhan diversifikasi sumber pasokan energi primer guna mengurangi risiko ketergantungan pada pasar tertentu, menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika geopolitik global, serta menjamin ketersediaan energi yang andal bagi sektor rumah tangga, industri, dan transportasi. Penyusunan konsep naskah urgensi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) penugasan pembelian energi dari Amerika Serikat menjadi fondasi awal kebijakan ini, yang menegaskan urgensi pengamanan pasokan energi untuk mendukung kesinambungan konsumsi energi final per kapita nasional.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan izin prakarsa atas RPerpres penugasan impor energi dari Amerika Serikat serta menyelesaikan proses harmonisasi RPerpres tersebut. Proses ini memastikan keselarasan kebijakan lintas sektor, kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta integrasi kebijakan impor energi dengan arah kebijakan ketahanan energi nasional. Implementasi kebijakan penugasan impor energi ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pasokan energi primer, menstabilkan harga energi domestik, serta mendukung peningkatan konsumsi energi final

per kapita secara berkelanjutan, khususnya dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional dan kualitas hidup masyarakat.

d. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

Reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi adalah upaya sistematis untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas energi. Gas rumah kaca, baik yang bersifat alami maupun antropogenik, terdapat di atmosfer dan berperan dalam menyerap serta memancarkan kembali radiasi inframerah, yang pada gilirannya menyebabkan pemanasan global. Dalam konteks sektor energi, gas rumah kaca dihasilkan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi energi pada area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 22 Tahun 2019, upaya ini menjadi bagian penting dalam kebijakan mitigasi perubahan iklim yang ditargetkan untuk mencapai pengurangan emisi yang substansial dalam sektor energi.

Melalui reduksi emisi GRK yang terus dilakukan dan dilaporkan secara transparan, Indonesia dapat mengoptimalkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, mendukung keberlanjutan sektor energi, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, keberhasilan dalam pengurangan emisi ini turut memperkuat komitmen Indonesia dalam pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) di masa depan. Reduksi emisi ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif, menguntungkan masyarakat serta mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lebih bijaksana.



Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan /Just Energy Transition Partnership (JETP)

Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan instrumen strategis bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi sistem energi rendah karbon sekaligus memastikan transisi yang berkeadilan. Melalui JETP, penurunan emisi sektor ketenagalistrikan

diintegrasikan dengan penguatan ketahanan energi, pembangunan wilayah, serta mitigasi dampak sosial dan ekonomi bagi kelompok dan daerah rentan, sekaligus mendukung target puncak emisi sektor ketenagalistrikan maksimal 290 MTC₂ pada 2030 dan percepatan bauran energi terbarukan sebagai platform pembiayaan dan koordinasi lintas sektor.

JETP Indonesia: dari Komitmen ke Realisasi Pendanaan

Komitmen meningkat dari USD 20 miliar (2022) menjadi USD 21,4 miliar (2025) dengan pendanaan yang mulai termobilisasi

USD 3,1 Miliar pendanaan JETP telah termobilisasi hingga November 2025 melalui pinjaman, ekuitas, hibah, dan jaminan

Mobilisasi pendanaan JETP Indonesia



JETP bertransformasi dari kerangka perencanaan menuju platform implementasi transisi energi

Proyek strategis yang didukung JETP

- MRT Jakarta Utara-Selatan & Timur Barat
- PLTS Terapung Saguling 60MW Floating – Solar Power
- Panas Bumi Muara Laboh 83MW

Quick wins JETP 2026

Estimasi pendanaan: USD 782 juta

- Dedieselisasi (Klaster Barat & Timur) (GECS) USD 490 juta
- Green Energy Corridor Sulawesi

JETP Indonesia diluncurkan pada 16 November 2022 di sela KTT G20 Bali sebagai kemitraan Pemerintah Indonesia dan *International Partners Group* (IPG) dengan dukungan pembiayaan publik serta mobilisasi sektor swasta melalui *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ). Meski Amerika Serikat menarik diri pada awal 2025, JETP tetap berlanjut dengan kepemimpinan Jerman dan Jepang serta dukungan mitra IPG dan lembaga keuangan multilateral, namun hingga kini pendanaannya masih didominasi pinjaman komersial dan konsesional dengan porsi terbatas hibah, penjaminan, dan skema berbagi risiko, sehingga memperlambat konversi komitmen menjadi investasi riil, khususnya bagi proyek berisiko tinggi, wilayah terpencil, dan agenda transisi energi berkeadilan.

Tahun 2025 menandai pergeseran JETP dari perencanaan menuju implementasi melalui pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) berdasarkan

Kepmenko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 serta penguatan Sekretariat JETP menjadi JETP Delivery Unit (JDU) untuk mempercepat koordinasi dan eksekusi proyek. Hingga November 2025, pembiayaan JETP yang termobilisasi mencapai sekitar USD 3,1 miliar, sementara total komitmen meningkat dari USD 20 miliar menjadi sekitar USD 21,4 miliar, didukung penyusunan *Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP) dalam Laporan JETP 2025 guna menyelaraskan transisi energi dengan prioritas pembangunan nasional, meski percepatan konversi komitmen menjadi investasi riil masih perlu diperkuat.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

keberhasilan capaian Indeks Ketahanan Energi Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa aspek yang mencerminkan kemampuan negara dalam menjaga pasokan energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata. Berikut adalah analisis pencapaian di masing-masing area tersebut:

- Peningkatan kontribusi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan geotermal dalam bauran energi nasional. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperkuat ketahanan energi, serta mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan.
- Peningkatan distribusi energi yang lebih merata, melalui penyaluran BBM Subsidi terutama di wilayah-wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur energi yang lebih baik menjadi prioritas, dengan upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah guna memastikan pasokan energi yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

- Promosi dan branding energi bersih yang menonjolkan potensi sumber daya alam Indonesia dalam produksi energi terbarukan, serta memanfaatkan teknologi hijau untuk menarik investor dan meningkatkan kesadaran global akan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim. Kampanye ini bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai pemain utama dalam sektor energi terbarukan di dunia.
- Kemitraan dengan industri untuk meningkatkan kualitas infrastruktur energi, termasuk pengembangan teknologi energi bersih dan efisiensi energi. Peningkatan kualitas fasilitas energi, seperti pembangkit listrik dan sistem distribusi, turut mendukung keberlanjutan pasokan energi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat pemanfaatan energi terbarukan.
- Peningkatan efisiensi penggunaan energi untuk mengurangi emisi karbon, dengan mendorong industri dan masyarakat untuk mengadopsi teknologi yang lebih efisien. Inovasi dalam teknologi energi seperti smart grids dan teknologi penyimpanan energi menjadi faktor penting yang akan memperpanjang masa pakai infrastruktur energi dan mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi energi.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Dalam pencapaian Indeks Ketahanan Energi Indonesia, beberapa kendala telah mempengaruhi pencapaian target yang ditetapkan. Meskipun sudah ada kemajuan dalam berbagai aspek, masih ada tantangan yang harus dihadapi agar Indonesia dapat mencapai target kinerja yang lebih baik. Berdasarkan dokumen yang tersedia, berikut adalah kendala utama yang dihadapi:



- Ketergantungan terhadap impor energi, terutama bahan bakar fosil, tetap menjadi tantangan. Hal ini berpotensi menambah beban biaya energi dan mengurangi ketahanan energi domestik. Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi masih memerlukan strategi yang lebih terintegrasi, terutama dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
- Infrastruktur distribusi energi di beberapa wilayah Indonesia masih belum optimal. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem distribusi, tantangan terkait dengan ketidakmerataan infrastruktur, terutama di wilayah luar Jawa, terus menghambat pasokan energi yang efisien dan merata. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan merata menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pencapaian target ketahanan energi.
- Biaya yang tinggi, dan tantangan dalam hal kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung percepatan transisi ini. Perubahan regulasi yang tidak konsisten serta ketidakpastian kebijakan terkait energi terbarukan menjadi hambatan dalam upaya mencapai target ketahanan energi yang lebih berkelanjutan.
- Fluktuasi harga energi global, terutama harga minyak dan gas, berpengaruh terhadap stabilitas biaya energi domestik. Kenaikan harga energi global yang tidak terduga menghambat upaya untuk menurunkan biaya energi dalam negeri, terutama bagi sektor-sektor yang masih bergantung pada impor energi. Ketergantungan pada harga energi global menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang dan pengelolaan pasokan energi nasional.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Berdasarkan kendala yang terjadi dalam pencapaian Indeks Ketahanan Energi

Indonesia, berikut adalah beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada, sehingga Indonesia dapat mencapai target kinerja yang lebih baik:

- Mengurangi ketergantungan pada energi fosil menjadi prioritas utama. Pemerintah berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, geotermal, dan biomassa. Kolaborasi dengan sektor swasta dan penyedia teknologi energi terbarukan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan, guna menggantikan ketergantungan pada energi fosil yang berisiko terhadap ketahanan energi jangka panjang.
- Untuk mengatasi kendala terkait infrastruktur energi yang belum optimal, upaya perbaikan dapat dilakukan dengan mempercepat pembangunan jaringan distribusi energi yang lebih merata, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau dengan baik. Pengembangan sistem smart grids dan sistem penyimpanan energi akan membantu memastikan pasokan energi yang lebih efisien dan dapat diandalkan di seluruh Indonesia.
- Dalam menghadapi ketidakpastian regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung transisi energi terbarukan, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih konsisten dan transparan. Penyesuaian insentif fiskal dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk proyek energi terbarukan akan mendorong investasi dan mempercepat transisi energi di Indonesia. Kebijakan yang jelas akan memberikan kepastian kepada investor dan memperkuat sektor energi terbarukan dalam jangka panjang.

- Untuk mengatasi dampak fluktuasi harga energi global yang mempengaruhi biaya energi domestik, Indonesia harus mempercepat transisi ke energi terbarukan yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga global. Pengelolaan cadangan energi domestik yang memadai serta pengembangan teknologi penyimpanan energi akan membantu menjaga stabilitas pasokan energi dan mengurangi ketergantungan pada harga energi internasional yang tidak stabil.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja Indeks Ketahanan Energi, langkah-langkah efisiensi yang diterapkan telah memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pencapaian ini mencerminkan kemampuan Indonesia dalam mengelola pasokan energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata. Berikut adalah beberapa langkah efisiensi yang telah dilakukan:

- Peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan geotermal merupakan langkah efisien yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan memaksimalkan potensi energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi biaya energi jangka panjang sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. Efisiensi ini juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon, yang sejalan dengan target keberlanjutan energi.
- Membangun dan memperbaiki infrastruktur distribusi energi, termasuk sistem jaringan listrik yang lebih efisien. Penggunaan teknologi smart grids memungkinkan pengelolaan pasokan energi yang lebih baik dan efisien, mengurangi pemborosan,

serta mempermudah distribusi energi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Efisiensi infrastruktur ini turut mendukung pencapaian target ketahanan energi dengan memastikan pasokan energi merata dan terjangkau di seluruh Indonesia.

- Mengurangi ketergantungan pada impor energi, Indonesia dapat menekan biaya energi dan memperkuat ketahanan energi domestik. Diversifikasi sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian target ketahanan energi. Hal ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan harga energi global yang fluktuatif.
- Penggunaan teknologi energi yang lebih efisien, seperti pembangkit listrik tenaga surya berbasis *fotovoltaik* (PV) dan sistem penyimpanan energi (*energy storage*), merupakan bagian dari strategi efisiensi dalam sektor energi. Dengan mengadopsi teknologi yang lebih canggih, Indonesia dapat mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efektivitas penggunaan energi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi dengan lebih efisien dan ramah lingkungan.
- Mengoptimalkan pemberian subsidi energi, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin dan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan memfokuskan subsidi pada sektor yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran energi digunakan secara efisien, tanpa memberikan beban yang berlebihan pada anggaran negara.



B.2.8 INDEKS DAYA SAING DIGITAL DI TINGKAT GLOBAL

Indeks Daya Saing Digital merupakan instrumen pengukuran komparatif yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kesiapan suatu negara dalam mengembangkan, mengadopsi, serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional. Indeks ini juga menggambarkan sejauh mana transformasi digital telah terintegrasi dalam sistem ekonomi, pemerintahan, dunia usaha, dan kehidupan sosial masyarakat suatu negara. Dalam konteks global yang semakin terdigitalisasi, indeks daya saing digital menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai posisi relatif suatu negara dibandingkan dengan negara lain dalam menghadapi dinamika ekonomi berbasis teknologi.

Salah satu indeks daya saing digital yang paling banyak digunakan sebagai rujukan internasional adalah *IMD World Digital Competitiveness Ranking* (WDCR) yang diterbitkan secara berkala oleh *IMD World Competitiveness Center* di Swiss. Indeks ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu negara mampu menciptakan lingkungan yang

konduusif bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital, serta kemampuan negara tersebut dalam menyiapkan sumber daya, kebijakan, dan ekosistem yang mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan dengan mengombinasikan data statistik nasional dan hasil survei persepsi pelaku usaha, sehingga memberikan gambaran yang relatif menyeluruh mengenai kondisi daya saing digital suatu negara.

Dalam metodologinya, IMD membagi penilaian ke dalam tiga pilar utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), teknologi (*technology*), dan kesiapan masa depan (*future readiness*). Pilar pengetahuan mencerminkan kapasitas sumber daya manusia, kualitas sistem pendidikan, serta kemampuan riset dan inovasi yang menjadi fondasi utama pengembangan ekonomi digital. Pilar teknologi menilai ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital, kerangka regulasi, tingkat investasi teknologi, serta dukungan pembiayaan terhadap pengembangan dan adopsi teknologi digital. Sementara itu, pilar kesiapan masa depan menggambarkan tingkat kesiapan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam menerima, mengadopsi, dan memanfaatkan teknologi digital, termasuk fleksibilitas organisasi, budaya inovasi, serta pemanfaatan teknologi baru dalam kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

CAPAIAN KINERJA INDEKS DAYA SAING DIGITAL TAHUN 2025

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.8	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Peringkat	43	51	84,31%

Berdasarkan data yang dirilis *IMD World Competitiveness Center*, terlihat bahwa capaian indeks daya saing digital tahun 2025 mendapatkan peringkat 51 dari 69 negara yang dinilai. Capaian tahun 2025 lebih rendah dibandingkan 2024 dimana Indonesia mendapatkan peringkat 43 dunia dari 67 negara yang dinilai. Meskipun secara peringkat menurun akan tetapi pada kondisi nyata

perkembangan daya saing digital di Indonesia mengalami perbaikan hanya saja kondisi negara lain mengalami kenaikan yang lebih baik dari Indonesia.

Pada Tahun 2025, Indeks Daya Saing Digital Indonesia menunjukkan peningkatan kondisi riil yang mencerminkan kemajuan nyata dalam kesiapan nasional menghadapi era ekonomi digital dan persaingan global berbasis teknologi. Kinerja Indonesia pada tahun 2025 dipengaruhi oleh perbaikan pada sejumlah dimensi utama, antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia digital, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya pemanfaatan teknologi digital di sektor publik dan sektor produktif. Secara lebih rinci data yang dirilis oleh *Institute for Management Development* (IMD) menerangkan capaian tiga pilar utama indeks daya saing digital yaitu:

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pada pilar ini menilai kemampuan Indonesia dalam menghasilkan dan mengembangkan talenta digital, Pendidikan, serta aktivitas ilmiah dan riset teknologi. Untuk pilar ini capaian Indonesia menurun secara signifikan. Posisi global pada pilar ini merosot dari posisi sebelumnya 53 menjadi sekitar 62 dunia pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan tantangan di aspek Pendidikan, pelatihan, dan tenaga ahli digital masih nyata. Masih terdapat peningkatan pada indikator *scientific concentration* dikarenakan adanya produktivitas publikasi riset dan usage robot di bidang Pendidikan/R&D.

b. Teknologi (*Technology*)

Pada pilar ini mengukur kualitas infrastruktur teknologi digital, kerangka regulasi yang mendukung inovasi, serta tersedianya

modal untuk teknologi dan start-up. Capaian Indonesia di pilar teknologi menunjukkan penurunan untuk Indonesia, dari posisi sekitar 40 dunia menjadi sekitar 48 dunia pada Tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan adanya kelemahan pada kerangka kebijakan teknologi, legalitas perlindungan kekayaan intelektual, kemudahan memulai bisnis digital, serta permodalan bagi inovasi. Meskipun ada beberapa aspek yang mengalami peningkatan seperti hukum imigrasi yang dinilai memadai, namun belum mampu menaikkan nilai teknologi secara keseluruhan.

c. Kesiapan Masa Depan (*Future Readiness*)

Pada pilar ini menilai sejauh mana negara bisa mengantisipasi dan memanfaatkan teknologi masa depan, melalui adaptasi Masyarakat, kelincahan bisnis, dan integrasi teknologi informasi. Capaian Indonesia di pilar kesiapan masa depan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa adanya adopsi teknologi dalam beberapa sektor, akan tetapi kemampuan Indonesia untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan teknologi mutakhir secara luas masih menurun dibanding negara lain. Seperti aspek business agility atau adaptasi bisnis terhadap teknologi lanjut kurang maksimal dibandingkan negara lain di dunia pada tahun yang sama.

Dalam konteks global, posisi daya saing digital Indonesia Tahun 2025 menunjukkan tantangan kompetitif dibandingkan sejumlah negara, baik dikawasan Asia maupun dunia. Berdasarkan *IMD World Digital Competitiveness Ranking 2025* capaian Indonesia masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara seperti Singapura peringkat teratas di Asia, diikuti Hong Kong dan



Taiwan dalam Kawasan Asia-Pasifik, menandakan kepemimpinan kuat dalam kesiapan digital dan inovasi teknologi. Sementara itu, Malaysia (sekitar peringkat 9 di regional Asia-Pasifik dan Thailand diatas Indonesia, dan Filipina menempati peringkat lebih rendah dari Indonesia.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET KINERJA INDEKS DAYA SAING DIGITAL TAHUN 2025

Capaian Indeks Daya Saing Digital Indonesia mencerminkan adanya potensi yang cukup besar, ditopang oleh skala ekonomi nasional, besarnya pasar digital, serta meningkatnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan dunia usaha. Di Tingkat nasional, berbagai inisiatif penguatan ekosistem digital terus menunjukkan perkembangan, termasuk peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai daerah. Berikut ragam upaya yang telah dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menguatkan daya saing digital nasional:

a. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Digital

Penguatan sumber daya manusia sebagai komponen dalam Indeks Daya Saing Digital dilakukan melalui program pengembangan talenta digital, baik melalui pendidikan formal, pelatihan vokasi, maupun program peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan industri. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mencetak tenaga kerja digital yang adaptif turut memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi berbasis teknologi. Namun demikian, tantangan masih terlihat pada kesenjangan kualitas SDM digital antarwilayah serta kebutuhan peningkatan

kompetensi lanjutan di bidang teknologi strategis seperti kecerdasan buatan, big data, dan keamanan siber.

Bauran Kebijakan Penguatan SDM Digital Implementasi Gig Economy

Koordinasi terkait pengembangan *Gig Economy* sebagai pendukung paket stimulus ekonomi nasional dimana program *Gig Economy* ini merupakan inisiatif pemerintah dalam menyerap tenaga kerja yang lebih spesifik kearah digital dan target dari gig economy ini merupakan Gen Z. Program yang akan dijalankan dalam *Gig Economy* ini merupakan pelatihan terkait pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. Sampai dengan akhir Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menginisiasi launching *Gig Economy* di 2 (dua) kota yaitu Jakarta dengan persentase peserta 79,4% dari target selama 3 hari pelaksanaan dan kota Jogja dengan persentase peserta 91,7% dari target selama 3 hari.

Implementasi Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2025-2045: Penguatan SDM

Pada strategi nasional yang sudah dirancang, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang sebagai "mesin" utama. Tanpa talenta yang kompeten, infrastruktur digital yang dibangun tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan ini dirancang dengan pendekatan *end-to-end*, mulai dari pendidikan dasar hingga pemenuhan kebutuhan tenaga ahli tingkat tinggi. Berikut adalah penjelasan rincinya:



1. Strategi "Massive Digital Talent" (2025–2030)

Untuk mencapai target ekonomi digital, Indonesia membutuhkan setidaknya **9 juta talenta digital** hingga tahun 2030. Strateginya dibagi menjadi tiga tingkatan:

- **Digital Literacy (Dasar):** Memastikan seluruh masyarakat (terutama di wilayah 3T) memiliki kemampuan dasar menggunakan perangkat digital dan internet secara aman dan produktif.
- **Digital Upskilling/Reskilling (Menengah):** Menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang *Cloud Computing*, *Cyber Security*, *Data Analytics*, dan *Artificial Intelligence (AI)*. Ini berkaitan erat dengan **Perpres 68/2022** tentang revitalisasi vokasi.
- **Digital Specialist (Tinggi):** Menciptakan para ahli, peneliti, dan inovator yang mampu menciptakan teknologi, bukan sekadar menjadi pengguna.

2. Integrasi Kurikulum dan Link and Match

Pemerintah mendorong transformasi kurikulum di sekolah formal dan perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan industri digital:

- **Coding as a Basic Skill:** Pengenalan logika pemrograman sejak pendidikan dasar.
- **Kampus Merdeka Digital:** Mendorong mahasiswa untuk mengambil program magang di perusahaan teknologi (*Startup* maupun *Big Tech*) yang diakui sebagai SKS.
- **Vocational Transformation:** SMK diarahkan untuk memiliki jurusan spesifik seperti animasi, pengembangan *game*, dan teknisi pusat data

Penguatan Peran Industri dan Swasta

Dalam rangka menjaring minat pihak swasta dan industri untuk berperan lebih dalam pengembangan SDM digital, Kemenko Perekonomian telah mengikuti berbagai forum kerja sama ekonomi seperti 8th NEXT Summit 2025 dimana ini merupakan forum kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok yang bertujuan untuk mempertemukan tokoh pemerintah dan bisnis global bersama para pakar industri guna memfasilitasi dialog antar peradaban, meningkatkan kerja sama

ekonomi, dan bersama-sama mengeksplorasi jalur global baru.

b. Sinkronisasi, Koordinasi Dan Pengendalian Infrastruktur Digital

Sepanjang tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berupaya menguatkan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian perluasan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas konektivitas internet, serta pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan



menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan daya saing digital Indonesia. Pembangunan infrastruktur digital yang semakin merata mendukung peningkatan aktivitas ekonomi digital, termasuk *e-commerce*, layanan keuangan digital, serta digitalisasi UMKM. Meskipun demikian, ketimpangan akses dan kualitas infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih inklusif.

Bauran Kebijakan Penguatan Infrastruktur Digital

Implementasi Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2025–2045: Infrastruktur Digital

Dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2025–2045, infrastruktur digital diposisikan sebagai "pondasi fisik" yang harus tuntas sebelum transformasi ekonomi lainnya dapat berjalan optimal. Pemerintah menyadari bahwa tanpa konektivitas yang merata dan andal, ketimpangan ekonomi digital antarwilayah akan semakin lebar. Berikut adalah penjelasan rincinya:

1. Konektivitas Menyeluruh (Pilar Utama)

Fokus utama periode 2025–2030 adalah memastikan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), memiliki akses internet cepat.

- **Penyelesaian "Tol Langit":** Mengoptimalkan pemanfaatan **Satelit SATRIA-1** dan penambahan satelit berikutnya untuk menjangkau titik-titik layanan publik yang belum terjamah kabel optik.
- **Akselerasi Jaringan 5G:** Melakukan efisiensi spektrum frekuensi agar implementasi 5G dapat dipercepat, khususnya di kawasan industri strategis dan pusat kota besar, guna mendukung teknologi *Internet of Things* (IoT).
- **Pembangunan Jaringan Tulang Punggung (Backbone):** Melengkapi pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring agar memiliki redundansi (jalur cadangan) yang kuat untuk meminimalisir gangguan koneksi.

2. Infrastruktur Data dan Cloud (Kedaulatan Data)

Buku Putih ini menekankan pentingnya Indonesia memiliki kendali atas datanya sendiri melalui:

- **Pusat Data Nasional (PDN):** Membangun dan mengoperasikan PDN berstandar global untuk mengintegrasikan ribuan aplikasi pemerintah ke dalam satu platform (**GovTech Indonesia**). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan keamanan data nasional.
- **Sovereign Cloud:** Mendorong pengembangan penyedia layanan *cloud* lokal agar data-data strategis nasional tetap berada di dalam negeri, sekaligus menurunkan biaya operasional bagi UMKM digital.

3. Infrastruktur Keamanan Siber dan Trust

Untuk menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan, kepercayaan (*trust*) masyarakat harus dijaga.

- **Penguatan Keamanan Siber:** Memperkuat peran BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dalam melindungi infrastruktur informasi vital nasional dari serangan siber.
- **Identitas Digital (Digital ID):** Pengembangan identitas digital tunggal yang aman untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik dan privat (seperti perbankan) secara instan tanpa perlu verifikasi fisik berulang kali.

Penguatan Kerja Sama Internasional dan Regional

Dalam rangka memperkuat perekonomian digital nasional dan regional pemerintah membuat kerangka ekonomi digital yang disebut *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA). DEFA adalah sebuah perjanjian kerangka ekonomi digital yang dirancang untuk mempercepat integrasi dan pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN. DEFA merupakan bagian dari *Priority Economic Deliverables ASEAN 2025* dan menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi digital regional. DEFA dirancang untuk menjadi perjanjian ekonomi digital komprehensif pertama di kawasan yang mengatur berbagai aspek penting digitalisasi seperti arus data lintas batas, pembayaran elektronik, identitas digital, perlindungan data, keamanan siber, mobilitas talenta digital, serta kerja sama teknologi baru.

c. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Teknologi dan Inovasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memndorong peningkatan adopsi teknologi digital oleh dunia usaha dan pemerintah sepanjang Tahun 2025. Digitalisasi

proses bisnis, pemanfaatan teknologi dalam rantai pasok, serta penerapan sistem digital dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan kebijakan menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, tingkat intensitas riset dan pengembangan (R&D), komersialisasi inovasi digital, serta sinergi antara ekosistem riset dan industri masih memerlukan penguatan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga produsen inovasi digital yang berdaya saing global.

Bauran Kebijakan Penguatan Teknologi dan Inovasi

Implementasi Strategi Nasional

Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2025–2045: Teknologi dan Inovasi

Dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2025–2045, kebijakan penguatan teknologi dan inovasi dipandang sebagai lompatan dari sekadar "pengguna" (*user*) menjadi "pencipta" (*creator*). Pemerintah menyadari bahwa keunggulan kompetitif Indonesia di masa depan bergantung pada penguasaan teknologi mutakhir (*Deep Tech*) dan ekosistem riset yang matang. Berikut adalah empat pilar utamanya:



1. Fokus pada Teknologi Prioritas (Deep Tech & Emerging Tech)

Untuk periode 2025–2030, pemerintah memprioritaskan riset dan penerapan teknologi yang memiliki dampak ekonomi tinggi:

- **Artificial Intelligence (AI):** Pengembangan AI untuk otomasi industri, layanan kesehatan, dan optimalisasi kebijakan publik.
- **Blockchain:** Digunakan untuk meningkatkan transparansi rantai pasok (terutama hilirisasi komoditas) dan keamanan transaksi keuangan.
- **Internet of Things (IoT) & 5G:** Mendukung *Smart Manufacturing* dan *Smart Agriculture* agar produktivitas sektor primer meningkat.
- **Cloud & Edge Computing:** Memastikan pengolahan data dilakukan secara lokal, cepat, dan aman.

2. Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi (R&D)

Buku Putih ini mendorong kolaborasi yang lebih erat antara akademisi, industri, dan pemerintah (*Triple Helix*):

- **Dana Abadi Penelitian:** Optimalisasi pendanaan riset yang berfokus pada komersialisasi produk digital lokal.
- **Sandboxing & Regulatory Sandbox:** Penyediaan “ruang uji coba” bagi inovasi teknologi baru (seperti *fintech* atau *healthtech*) agar bisa diuji di lingkungan terbatas tanpa terbentur regulasi yang kaku, namun tetap aman bagi konsumen.
- **Transfer Teknologi:** Mewajibkan perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan kolaborasi riset dengan lembaga atau universitas lokal.

Penguatan Ekonomi Keuangan Digital

Menyelenggarakan forum penguatan ekonomi keuangan digital yaitu Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE 2025) yang diselenggarakan di Jakarta merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang sinergi nasional untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital, menampilkan inovasi, seminar, dan diskusi Bersama regulator serta industri fintech. Pada forum ini pemerintah

menegaskan komitmennya untuk memperluas digitalisasi transaksi, memperkuat sistem pembayaran digital seperti QRIS, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif dan berkelanjutan Bersama dengan Bank Indonesia, OJK, serta Industri Fintech. Digitalisasi ini telah terbukti meningkatkan efisiensi, memperluas kanal pembayaran, dan memperluas inklusi keuangan di berbagai lapisan Masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah bisa dilihat melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang merupakan program nasional di Indonesia yang bertujuan mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan dan layanan publik, terutama pada transaksi pembayaran. Dalam hal ini pemerintah pusat mendorong kepada Pemerintah Daerah agar beralih dari cara kerja manual ke cara digital agar lebih cepat, transparan, dan efisien. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara rutin melakukan koordinasi dengan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas kebijakan yang telah diimplementasikan untuk penguatan ETPD. Sampai saat ini jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi pada P2DD telah mencapai 97,4% melampaui target yang telah ditetapkan.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan, terutama dalam mencapai Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global yang diharapkan, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong tercapainya target tersebut. Ketercapaian target yang ada membutuhkan koordinasi dari banyak pihak yang selama ini mendorong optimalisasi kinerja dalam meningkatkan Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global:

- a. Pemanfaatan data besar (*big data*) dan digitalisasi layanan keuangan yang kuat. Dua faktor ini menjadi faktor kunci yang berkontribusi signifikan terhadap

peningkatan indeks daya saing digital di Tingkat global, karena keduanya mencerminkan tingkat kematangan ekosistem digital suatu negara. *Big data* berperan dalam mendukung pengambilan kebijakan dan Keputusan berbasis data, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Digitalisasi layanan keuangan berperan dalam menunjukkan tingkat inklusivitas, efisiensi, dan kesiapan teknologi suatu negara dalam mendukung ekonomi digital.

- b. Tingginya Investasi pada sektor telekomunikasi serta aktivitas pendanaan inovasi oleh pelaku swasta dan negara merupakan faktor penting yang mendukung peningkatan skor indeks daya saing digital di tingkat global, karena mencerminkan kesiapan infrastruktur, iklim inovasi, dan keberlanjutan ekosistem digital nasional. Investasi berkelanjutan di sektor telekomunikasi berperan langsung dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur digital yang menjadi indikator utama dalam penilaian daya saing digital. Pendanaan inovasi menunjukkan Tingkat dukungan terhadap riset, pengembangan, dan komersialisasi teknologi digital, yang berkontribusi pada daya saing jangka menengah dan panjang.
- c. Penerapan transformasi digital nasional melalui partisipasi swasta lewat keterlibatan aktif perusahaan dan pelaku usaha swasta mendukung percepatan adopsi teknologi, baik ditingkat bisnis maupun Masyarakat umum, sehingga berdampak langsung.
- d. Implementasi kebijakan kerja sama yang telah dilakukan seperti EGP, SMEs, dan DEFA sehingga mampu meningkatkan



daya saing digital Indonesia terutama perannya dalam aktivitas ekonomi dimana mampu berpengaruh positif terhadap perekonomian.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian

Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja Indeks Daya Saing Digital di tingkat global pada Tahun 2025, meskipun berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan dengan optimal, tetap terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Kendala-kendala ini perlu diidentifikasi dan ditangani dengan baik agar Indeks Daya Saing Digital di tingkat global semakin meningkat. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi selama pencapaian target kinerja:

- a. Belum maksimalnya akses terhadap data transaksi *e-commerce* secara periodik karena tersebar di berbagai Kementerian/ Lembaga seperti Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, serta instansi lainnya yang memiliki mandat berbeda-beda, sehingga konsolidasi belum optimal.
- b. Keterbatasan pengembangan talenta digital, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dampak lain dari adanya kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam bidang teknologi informasi, sains data, kecerdasan buatan, dan keamanan siber belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
- c. Belum optimalnya kapasitas riset dan inovasi yang dikarenakan relatif terbatasnya pendanaan, rendahnya hilirisasi hasil

penelitian, serta lemahnya kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha sehingga menghambat pemanfaatan inovasi digital secara luas.

- d. Masih terdapatnya kesenjangan infrastruktur jaringan dan pusat data, terutama di luar wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, membatasi pemanfaatan teknologi digital secara merata. Kemudian masih belum optimalnya integrasi sistem digital lintas sektor dan antarinstitusi pemerintah sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas transformasi digital.
- e. Belum tersedianya kerangka regulasi yang adaptif sehingga berpotensi menahan laju inovasi khususnya bagi pelaku usaha dan startup digital serta iklim investasi di sektor teknologi mengingat perkembangan teknologi digital bertransformasi dengan cepat.
- f. Masih rendahnya Tingkat implementasi teknologi digital oleh dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih relatif terbatas. Tingkat literasi digital yang masih rendah, terbatasnya akses pembiayaan serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam upaya mencapai target Indeks Daya Saing Digital di tingkat global tahun selanjutnya yang semakin baik, beberapa kendala telah teridentifikasi yang memengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, pemerintah telah merancang serangkaian upaya

perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam rangka meningkatkan Indeks Daya Saing Digital di tingkat global. Berikut ini adalah beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi:

- a. Penguatan system Pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri, termasuk peningkatan kualitas Pendidikan berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), perluasan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital, serta penguatan Pendidikan vokasi dan upskilling tenaga kerja.
- b. Mendorong adanya skema kolaboratif antara Lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan startup digital dari sisi pendanaan riset berbasis teknologi, penguatan ekosistem inovasi, serta percepatan hilirisasi hasil penelitian. Percepatan pemanfaatan inovasi digital dalam kegiatan ekonomi dan pelayanan publik guna meningkatkan produktivitas dan daya saing digital nasional.
- c. Mendorong percepatan Pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital yang andal dan terjangkau, termasuk jaringan telekomunikasi, pusat data, dan sistem pendukung teknologi informasi. Diperlukan juga penguatan interoperabilitas dan integrasi sistem digital lintas sektor dan antarinstansi pemerintah menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik berbasis digital.
- d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia digital, melalui program peningkatan keterampilan, pelatihan talenta digital, serta kolaborasi dengan dunia pendidikan dan industri.
- e. Penyelarasan dan penguatan kebijakan serta regulasi ekonomi digital, untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi, investasi, dan adopsi teknologi.
- f. Penguatan ekosistem riset, inovasi, dan teknologi digital, termasuk dukungan terhadap startup, industri digital, dan kolaborasi riset lintas sektor.
- g. Peningkatan literasi dan adopsi digital UMKM, melalui pendampingan, insentif kebijakan, serta pemanfaatan platform digital secara inklusif.
- h. Penguatan keamanan siber dan perlindungan data, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi digital.
- i. Mendorong penyederhanaan dan harmonisasi kebijakan terkait transformasi digital, serta penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penguatan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga menjadi penting untuk memastikan konsistensi kebijakand an efektivitas implementasi.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja Indeks Daya Saing Digital di tingkat global yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025, efisiensi dalam penggunaan sumber daya menjadi faktor penting yang mendukung pencapaian tersebut. Efisiensi ini tidak hanya terlihat pada pengelolaan anggaran, tetapi juga dalam penerapan teknologi yang mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat serta tepat. Dalam menghadapi tantangan indeks daya saing digital ditingkat global, pemerintah telah melakukan berbagai



upaya yang terukur untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mendukung efisiensi dalam mencapai target kinerja:

- a. Integrasi Aplikasi Layanan Publik: Efisiensi dilakukan dengan mengintegrasikannya ke dalam satu portal nasional atau membangun satu aplikasi yang dapat diimplementasikan secara nasional.
- b. Penguatan Implemementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik): Optimalisasi penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) dibandingkan pembangunan data center di setiap lembaga.

- c. Pemanfaatan Infrastruktur Pasif Bersama: Mendorong kebijakan infrastructure sharing antar operator telekomunikasi agar pembangunan tower (BTS) di daerah terpencil lebih efisien secara biaya dan operasional.
- d. Standardisasi Kurikulum Digital: Melakukan efisiensi pada anggaran pelatihan dengan menyelaraskan kurikulum Digital Talent Scholarship langsung dengan kebutuhan industri 2026 (seperti keahlian AI dan Cybersecurity), upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di sektor teknologi.





B.3 SASARAN STRATEGIS 2: TERKENDALINYA TINGKAT INFLASI NASIONAL SESUAI DENGAN FUNDAMENTAL EKONOMI

Sasaran Strategis Terkendalnya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi merupakan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro secara berkelanjutan. Sasaran ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memastikan keterpaduan kebijakan lintas kementerian dan lembaga di bidang perekonomian, khususnya kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan harga dan inflasi. Pencapaian sasaran strategis ini mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkendalnya tingkat inflasi nasional dimaknai sebagai kondisi di mana laju inflasi berada pada tingkat yang stabil, rendah, dan dapat diprediksi, serta sejalan dengan kondisi dan kapasitas fundamental perekonomian nasional. Inflasi yang sesuai dengan fundamental ekonomi mencerminkan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran, kapasitas produksi nasional, kelancaran distribusi, serta efektivitas kebijakan moneter dan fiskal. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan agar inflasi tidak berada pada tingkat yang terlalu tinggi sehingga menurunkan daya beli masyarakat, namun juga tidak terlalu rendah yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan investasi.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian inflasi didukung melalui penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan antar kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan fungsi koordinatif dalam memfasilitasi sinergi kebijakan, memantau perkembangan inflasi nasional dan daerah, serta mendorong langkah-langkah pengendalian yang responsif dan terukur. Pendekatan koordinatif tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat meredam tekanan inflasi secara efektif tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

B.3.1 TINGKAT INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kestabilan ekonomi makro suatu negara, yang mencerminkan fluktuasi harga barang dan jasa dalam perekonomian. Tingkat inflasi diukur melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan data realisasi inflasi tahunan yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ketika tingkat inflasi terkendali sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memelihara stabilitas ekonomi secara umum. Kondisi inflasi yang stabil juga menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



Kebijakan untuk mengendalikan inflasi umumnya terkoordinasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang dirumuskan dengan cermat, untuk memastikan bahwa inflasi tidak berada pada tingkat yang merugikan perekonomian. Pengelolaan inflasi yang sukses akan menjaga kestabilan daya beli masyarakat dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Proses pengendalian inflasi ini memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat merespons dengan tepat faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, baik yang berasal dari sisi permintaan maupun penawaran. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola kebijakan secara fleksibel, agar mampu meredam potensi inflasi yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi.

CAPAIAN KINERJA TINGKAT INFLASI DI KISARAN SASARAN

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Tingkat Inflasi Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1	Tingkat Inflasi	Persentase	2,5 ± 1 %	2,92%	100%

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IHK Desember 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,64% (mtm), sehingga secara tahunan IHK 2025 mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy), meningkat dari 2024 yang sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan inflasi tahunan Desember 2025 juga meningkat bulan sebelumnya sebesar 2,72% (yoy) disumbang terutama oleh kelompok *volatile food* (VF) dan inti. Kelompok VF mengalami inflasi sebesar 6,21% (yoy), meningkat dari Desember 2024 yang sebesar 0,12% (yoy) maupun November 2025 sebesar 5,48% (yoy). Inflasi inti tercatat sebesar 2,38% (yoy), lebih tinggi dari Desember 2024 yang sebesar 2,26% (yoy) maupun November 2025 sebesar 2,36% (yoy). Sementara itu, kelompok *administered price* (AP) mengalami inflasi sebesar 1,93% (yoy), meningkat dari Desember 2024 yang sebesar 0,56% (yoy) maupun November 2025 yang sebesar 1,58% (yoy). Inflasi sepanjang 2025 yang tetap terjaga dalam kisaran sasarnya merupakan hasil

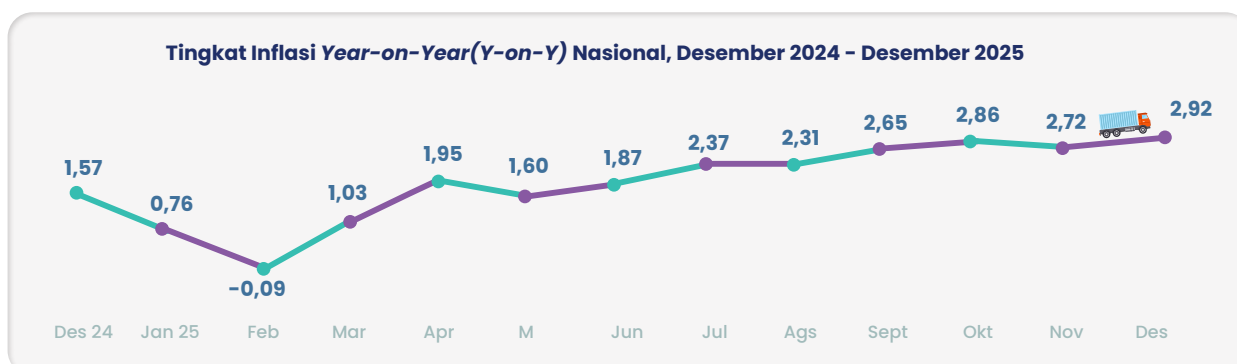
dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Stabilitas tingkat inflasi yang sesuai dengan target berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berperan penting dalam pengendalian inflasi serta stabilisasi harga, yang pada gilirannya berpengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran utama bagi masyarakat miskin umumnya dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Tahun 2025, sasaran inflasi ditetapkan pada 2,5±1%, sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) terkait sasaran inflasi 2025 adalah PMK Nomor 31 Tahun 2024, yang menetapkan sasaran inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) tahun 2025 adalah 2,5% dengan deviasi ±1%, atau dalam kisaran 1,5% – 3,5% untuk Tahun 2025 hingga 2027, sebagai bagian dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia.

Tingkat inflasi nasional Indonesia sepanjang Tahun 2025 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari Bulan Desember 2024 hingga Desember 2025. Dimulai dengan inflasi yang cukup tinggi pada Bulan Desember 2024, yaitu 1,57% (yoy), inflasi mengalami penurunan signifikan pada Bulan Januari 2025, dengan angka 0,76% (yoy). Namun, inflasi kembali mengalami fluktuasi sepanjang tahun, dengan periode bulan Februari mencatatkan penurunan inflasi sebesar -0,09% (yoy), yang kemudian diikuti oleh kembali meningkatnya inflasi pada bulan Maret, dengan angka 1,03% (yoy).

Inflasi terus menunjukkan tren kenaikan yang relatif stabil hingga Bulan November 2025, mencapai 2,72% (yoy), dan berakhir dengan inflasi yang sedikit lebih tinggi pada bulan Desember 2025, yakni 2,92% (yoy). Secara keseluruhan, meskipun inflasi tetap berada dalam kisaran yang lebih tinggi dibandingkan awal tahun, angka inflasi di akhir tahun menunjukkan peningkatan yang lebih stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa terus melakukan pemantauan perkembangan inflasi secara umum untuk menjaga agar inflasi tetap terkontrol dalam batas yang ditargetkan, sesuai dengan sasaran kebijakan ekonomi makro yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3. Gambar Ringkasan Tingkat Inflasi Bulanan Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Tingkat inflasi yang relatif terkendali pada awal tahun dengan angka yang lebih rendah mencerminkan keberhasilan awal dalam kebijakan pengendalian inflasi oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Namun, peningkatan inflasi pada paruh kedua Tahun 2025 mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam menjaga kestabilan harga, terutama di sektor pangan dan energi. Pemerintah dan Bank Indonesia harus tetap waspada terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kestabilan harga,

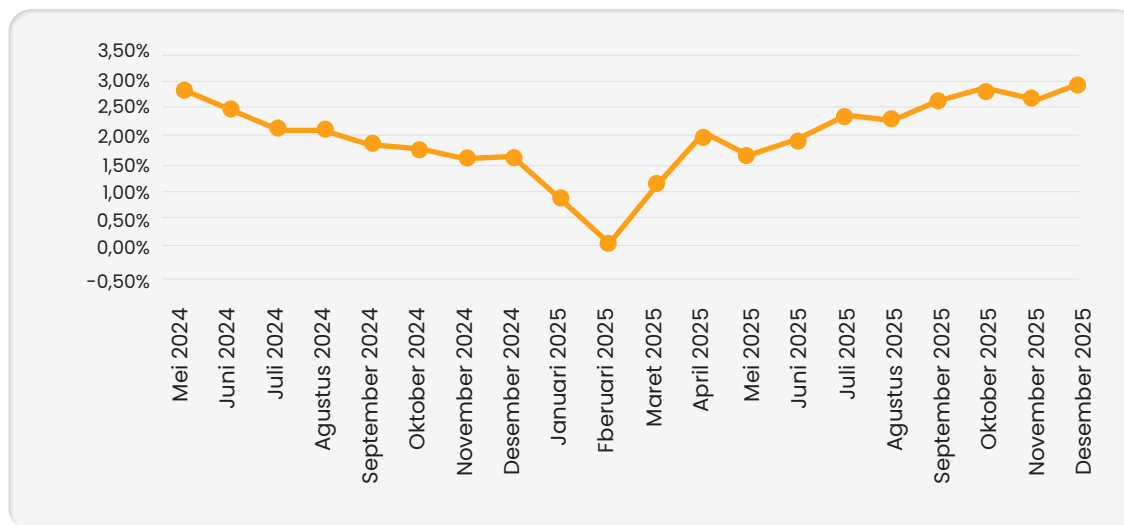
seperti fluktuasi harga komoditas global dan gangguan pasokan.

Tingkat inflasi di Indonesia sepanjang Tahun 2025 menunjukkan bahwa inflasi Indonesia relatif terkendali jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G7 dan G20. Sebagai pembandingan, tingkat inflasi di Indonesia tercatat sebesar 2,92%, yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat (2,7%), Inggris (3,4%), dan Australia (3,4%). Bahkan,



Indonesia memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lain seperti Brasil (4,26%) dan Rusia (5,6%). Jika dibandingkan dengan Argentina dan Turki, yang mencatatkan inflasi sangat tinggi di atas 30%, Indonesia berada pada posisi yang relatif stabil. Selain itu, Indonesia juga memiliki inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara dengan inflasi terendah, seperti China (0,8%) dan Perancis (0,8%). Dengan demikian, tingkat inflasi Indonesia di 2025 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu mengelola tekanan harga lebih baik daripada sebagian besar negara anggota G20.

Grafik 3.4. Gambar Tingkat Inflasi Inti Bulanan Tahun 2024 - 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

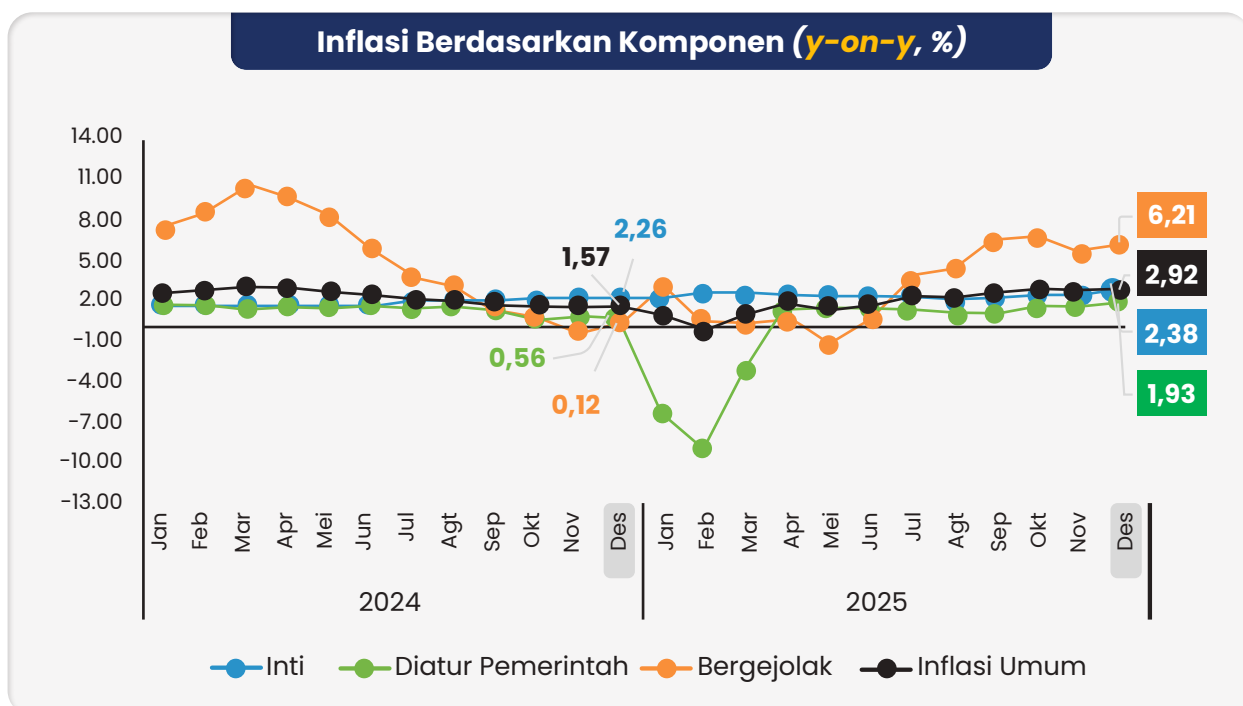
Pada Desember 2025, komponen inti mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 2,38 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 105,35 pada Desember 2024 menjadi 107,86 pada Desember 2025. Sementara itu, komponen yang harganya diatur pemerintah dan komponen yang harganya bergejolak mengalami inflasi *y-on-y* masing-masing sebesar 1,93 persen dan 6,21 persen. Komponen inti mengalami inflasi *m-to-m* dan *y-to-d* masing-masing sebesar 0,20 persen dan 2,38 persen. Komponen yang harganya diatur pemerintah dan harganya bergejolak mengalami inflasi *m-to-m* masing-masing sebesar 0,37

persen dan 2,74 persen; serta inflasi *y-to-d* masing-masing sebesar 1,93 persen dan 6,21 persen. Komponen inti, komponen yang harganya diatur pemerintah, dan komponen yang harganya bergejolak memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* masing-masing sebesar 1,53 persen; 0,38 persen; dan 1,01 persen. Di sisi lain, komponen inti, komponen yang harganya diatur pemerintah, dan komponen yang harganya bergejolak memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* masing-masing sebesar 0,12 persen; 0,07 persen; dan 0,45 persen.

Tabel 3.14. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2025

Rincian Inflasi	Inflasi	Andil inflasi
Inflasi Umum	0,64	0,64
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,66	0,48
Pakaian dan Alas Kaki	-0	-0
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,06	0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0	-0
Kesehatan	0,09	-0
Transportasi	0,55	0,07
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,03	-0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,03	-0
Pendidikan	0,01	-0
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,13	0,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,00	0,07

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Komponen inti inflasi merupakan komponen yang harganya diatur pemerintah dan komponen yang harganya bergejolak memberikan andil/ sumbangan inflasi y-on-y masing-masing sebesar 2,38 persen, 1,93 persen, dan 6,21 persen. Komponen inti dan komponen yang harganya bergejolak



memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* masing-masing sebesar 0,20 persen dan 0,33 persen. Sedangkan komponen yang harganya diatur pemerintah tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi *m-to-m* nasional. Tabel di atas menggambarkan kontribusi masing-masing kelompok pengeluaran terhadap inflasi umum sebesar 0,64% secara *month-to-month*. Berikut adalah rincian penjelasan setiap kelompok pengeluaran:

- Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami kenaikan inflasi sebesar 1,66%, dengan andil inflasi sebesar 0,48%. Hal ini memberikan dampak signifikan pada inflasi umum, terutama dari bahan makanan pokok yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi, seperti beras, minyak goreng, dan kopi bubuk.
- Kelompok Kesehatan mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,09%, dengan andil inflasi sebesar 0,00%. Kenaikan ini mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa di sektor kesehatan, meskipun kontribusinya terhadap inflasi secara keseluruhan masih sangat kecil.
- Kelompok Pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Transportasi, Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; serta Pendidikan hampir tidak memberikan proporsi yang signifikan dalam andil tingkat inflasi, dengan pengaruh yang sangat kecil terhadap inflasi keseluruhan. Sebagian besar kelompok ini mengalami kenaikan inflasi yang minimal atau tidak memberikan kontribusi yang berarti.

38 Provinsi Mengalami Inflasi



Sumatera

Inflasi Tertinggi

3,60%

Aceh

Inflasi Terendah

0,43%

Bengkulu

Kalimantan

Inflasi Tertinggi

1,04%

kalimantan
Tengah

Inflasi Terendah

0,28%

kalimantan
Barat

Sulawesi

Inflasi Tertinggi

0,88%

Gorontalo

Inflasi Terendah

0,14%

Sulawesi Tengah

Jawa

Inflasi Tertinggi

0,76%

Jawa Timur

Inflasi Terendah

0,33%

DKI Jakarta

Bali Nusra

Inflasi Tertinggi

0,81%

Nusa Tenggara
Timur

Inflasi Terendah

0,70%

Bali

Maluku Papua

Inflasi Tertinggi

177%

Papua

Inflasi Terendah

0,05%

Maluku Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Pada Desember 2025, Indonesia mengalami inflasi *year-on-year* (y-on-y) sebesar 2,92 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,92. Inflasi provinsi tertinggi y-on-y terjadi di Provinsi Aceh sebesar 3,60 persen, dengan IHK sebesar 114,40, sementara inflasi provinsi terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,05 persen, dengan IHK sebesar 108,60. Sementara itu, inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli dengan angka 10,84 persen, mencapai IHK sebesar 119,24, dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Minahasa Utara serta Maumere, masing-masing dengan inflasi sebesar 0,38 persen dan IHK sebesar 111,03 dan 109,62.

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat telah mengoordinasikan berbagai kebijakan untuk mengendalikan laju inflasi selama Tahun 2025. Pengendalian inflasi ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan dan nota dinas yang berkaitan dengan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, yang antara lain mencakup:

a. Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi (TPIP dan TPID)

Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) telah menyelenggarakan Rakornas bersamaan dengan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah bersama dengan pelaksanaan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, 28 November 2025 di Bank Indonesia. Lebih lanjut, arahan dalam Rakornas telah dilaksanakan Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2025 pada 8 Desember 2025. Beberapa rekomendasi dalam Rakorpusda oleh

TPID dalam upaya pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meliputi:

- Menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta mengintensifkan program stabilisasi harga pangan untuk meminimal-kan tekanan harga pada akhir tahun jelang nataru.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada simpul-simpul transportasi dan meningkatkan kesiap-siagaan daerah dalam menghadapi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- Melakukan mitigasi risiko bencana hidrometrologi.
- Memastikan ketersediaan dan kecukupan suplai bahan pangan daerah untuk mendukung program prioritas Pemerintah.
- Mempercepat realisasi APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan prioritas alokasi pada belanja program produktif.
- Menyediakan alokasi anggaran APBD untuk mendukung program prioritas ketahanan pangan 2026, guna memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung stabilitas harga.

Selain forum Rakornas, Tim Pengendali Inflasi Pusat juga menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM) TPIP pada Januari 2025. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada pertemuan ini merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat koordinasi untuk menjaga inflasi 2025 dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$, termasuk:



- Menjaga keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi di seluruh wilayah.
- Memperkuat data pasokan pangan untuk kebijakan yang lebih responsif.
- Memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi publik.
- Menetapkan *Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027* sebagai panduan implementasi kebijakan di pusat dan daerah.

Bauran Kebijakan Memperkuat Peran TPID Orkestrasi TPID dan Koordinasi Weekly Regional

Koordinasi pengendalian inflasi di tingkat daerah dilakukan secara teratur dengan melibatkan instansi pusat dan daerah, termasuk *weekly coordination meetings* yang memperkuat peran TPID untuk mengatasi fluktuasi harga komoditas pangan yang rentan. Hal ini mencerminkan implementasi strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) dalam konteks pengendalian inflasi di berbagai wilayah.

Penyelarasan Program Kerja TPID dan TPID

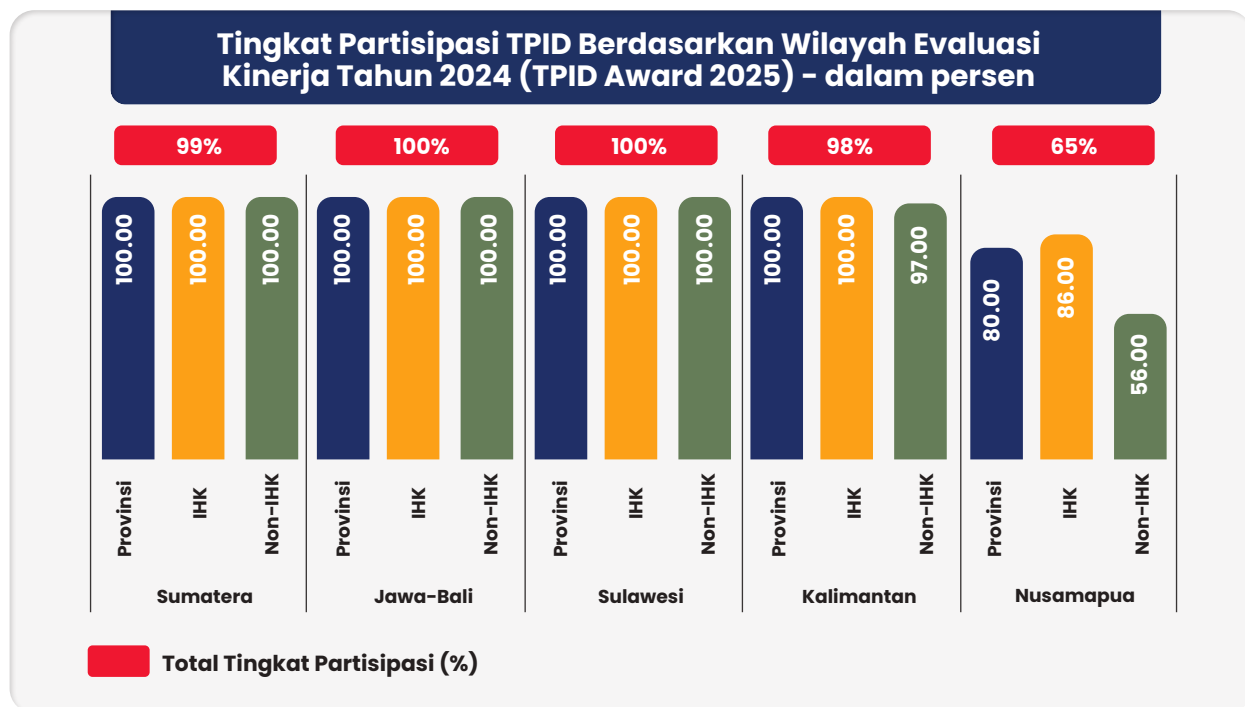
Sesuai tugas fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencoba menyelaraskan arahan kebijakan dan program kerja antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui penyelenggaraan Rapat koordinasi TPID di beberapa provinsi (misalnya Bali, Bangka Belitung, Sulawesi, dan Jawa) telah dilakukan sepanjang 2025 sebagai tindak lanjut forum pusat dan sarana berbagi praktik terbaik

pengendalian inflasi di tingkat lokal. Rakor ini sering menggabungkan evaluasi harga pangan, strategi penyediaan pasokan, dan sinergi antar instansi pemerintah daerah.

Penghargaan dan Apresiasi Kinerja TPID 2025

TPID Award 2025: Dalam Rakornas 2025, Presiden dan/atau instansi terkait merencanakan pemberian *TPID Award 2025* kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan performa terbaik dalam pengendalian inflasi. Partisipasi dalam evaluasi kinerja TPID 2024 (Award 2025) semakin meningkat. Wilayah Jawa-Bali dan Sulawesi telah mencapai 100%, diikuti oleh Sumatera sebesar 99% dan Kalimantan sebesar 98%. Sementara itu wilayah NusaMaPua mencapai 65%. Secara spasial, seluruh wilayah mengalami kenaikan nilai kinerja. Pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota IHK (nominasi TPID Terbaik Provinsi dan Kabupaten/Kota), tingkat keandalan cukup tinggi 82,87 atau rata-rata capaian kinerja yakni 81,71. Sementara itu, pada tingkat Kabupaten/Kota Non-IHK (nominasi TPID Berprestasi Kabupaten/Kota), tingkat keandalan yakni 60,15 atau rata-rata capaian kinerja telah meningkat yakni 59,75. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas:

- Kepatuhan pelaporan kinerja TPID di tingkat daerah.
- Efektivitas kolaborasi antar sektor dalam menjaga inflasi pangan dan umum tetap terkendali.
- Inovasi program daerah untuk menstabilkan harga pangan yang bergejolak sepanjang 2025.



Sumber: Sekretariat TPIP (2025)

Tabel 3.15. Juara TPID Award 2025

No	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	1. Provisi Sumatera Selatan 2. Provinsi Bengkulu 3. Provinsi Riau	1. Kota Palembang 2. Kabupaten Ogan Komering Ilir 3. Kota Pekanbaru	1. Kabupaten Tanah Datar 2. Kabupaten Tapanuli Selatan 3. Kabupaten Sarolangun
2	Kawasan Jawa – Bali	1. Provisi Jawa Tengah 2. Provinsi DI Yogyakarta 3. Provinsi Jawa Barat	1. Kota Tasikmalaya 2. Kabupaten Banyuwangi 3. Kota Semarang	1. Kabupaten Tasikmalaya 2. Kabupaten Kebumen 3. Kabupaten Pangandaran
3	Kawasan kaimantan	1. Provisi Kalimantan Timur 2. Provinsi Kalimantan Selatan 3. Provinsi Kalimantan Tengah	1. Kota Banjarmasin 2. Kota Samarinda 3. Kota Tarakan	1. Kabupaten Kutai Katanegara 2. Kabupaten Landak 3. Kabupaten Bontang
4	Kawasan Sulawesi	1. Provisi Sulawesi Barat 2. Provinsi Gorontalo 3. Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Kota Palu 2. Kota Gorontalo 3. Kota Bau-Bau	1. Kabupaten Minahasa 2. Kabupaten Bombana 3. Kabupaten Muna Barat
5	Kawasan Nusa Tenggara – Maluku – Papua	1. Provisi Papua 2. Provinsi Maluku 3. Provinsi Papua Barat	1. Kota Mataram 2. Kota Bima 3. Kabupaten Maluku Tengah	1. Kabupaten Lombok Timur 2. Kabupaten Lombok Barat 3. Kabupaten Buru Selatan

Sumber: Sekretariat TPIP (2025)



b. Implementasi dan Pengendalian Strategi 4K

Berdasarkan kebijakan yang diterapkan pada Tahun 2025, strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) tetap digunakan sebagai kerangka penting dalam pengendalian inflasi. Meskipun terdapat penyesuaian dalam implementasi kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi ekonomi dan tantangan baru, prinsip dasar dari strategi 4K masih relevan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan strategi ekonomi holistik dengan menggabungkan kebijakan fiskal yang bijaksana dan pendekatan moneter yang responsif untuk menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Bauran Kebijakan Implementasi 4K Paket Stimulus Ekonomi: Peningkatan Daya Beli

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2025 mengawal beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli rumah tangga dan pekerja. Beberapa program yang dikawal terkait aspek ini adalah (a) **Bantuan Pangan Beras:** Pemerintah melanjutkan bantuan beras (10 kg per bulan) untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan menahan laju inflasi bahan pangan (volatile foods), (b) **Subsidi Upah (BSU):** Bantuan subsidi upah senilai Rp300.000 – Rp600.000 per bulan diberikan kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta atau di bawah UMP/UMK untuk menjaga konsumsi rumah tangga, dan (c) **Insentif PPh DTP (Ditanggung Pemerintah):** Perluasan insentif PPh 21 DTP untuk sektor-sektor labor-

intensive (padat karya) guna meningkatkan pendapatan bersih pekerja.

Paket Stimulus Ekonomi: Diskon Transportasi

Pada tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mengawal pemberian stimulus di sektor transportasi, adapun bentuk stimulus yang diberikan adalah melalui (a) **Diskon Tiket & Transportasi:** Stimulus untuk sektor transportasi meliputi diskon tiket pesawat domestik hingga 16%, potongan tarif kereta api 30%, dan diskon tol 20% selama periode libur (misal: Nataru) untuk menekan inflasi sektor transportasi, dan (b) **Insentif Avtur & Bandara:** Pemerintah memberikan insentif pajak bandara dan avtur bagi maskapai untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diharapkan, terutama dalam mencapai Tingkat Inflasi yang diharapkan, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong tercapainya target tersebut. Ketercapaian target yang ada membutuhkan koordinasi dari banyak pihak yang selama ini mendorong optimalisasi kinerja dalam menekan angka inflasi. Faktor-faktor pendorong tercapainya target inflasi dalam kisaran sasaran antara lain adalah:

- Koordinasi kebijakan yang efektif kolaboratif antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah melalui TPIP dan TPID memastikan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan data yang valid.
- Implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang

berhasil mengatasi fluktuasi harga pangan dengan langkah-langkah preventif dan responsif yang efektif.

- c. Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) melalui Peran Bulog dan kebijakan impor pangan tertentu berkontribusi dalam menjaga kestabilan harga komoditas pangan penting di pasaran.
- d. Optimalisasi distribusi logistik melalui peningkatan distribusi logistik, khususnya di daerah terpencil, sehingga membantu mengurangi gangguan dalam rantai pasok barang kebutuhan pokok.
- e. Alokasi subsidi energi dan pangan yang tepat sasaran Subsidi yang diberikan dengan tepat sasaran berperan dalam menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok.
- f. Langkah-langkah stabilisasi harga pangan strategis melalui pengelolaan pasokan, operasi pasar, dan penguatan cadangan pangan pemerintah mampu menekan volatilitas harga komoditas pangan utama. Hal ini menjadi faktor kunci dalam menjaga inflasi tetap terkendali, mengingat besarnya kontribusi pangan terhadap inflasi nasional.
- g. Dukungan pada program diversifikasi pangan dengan mengadakan program diversifikasi pangan yang mendorong pengurangan ketergantungan pada komoditas tertentu, seperti beras, berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
- h. Penyesuaian harga *administered prices* dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi. Kebijakan kompensasi dan perlindungan sosial turut berperan dalam meredam dampak lanjutan terhadap daya beli masyarakat.
- i. Pemanfaatan data dan pemantauan harga secara berkala memungkinkan deteksi dini

terhadap potensi tekanan inflasi. Respons kebijakan yang cepat dan adaptif mampu mencegah eskalasi tekanan inflasi.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja pengendalian inflasi pada Tahun 2025, meskipun berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan dengan optimal, tetap terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Kendala-kendala ini perlu diidentifikasi dan ditangani dengan baik agar inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi selama pencapaian target kinerja:

- a. Fluktuasi pada kelompok *Volatile Food* (VF) Inflasi pada kelompok ini dipengaruhi oleh anomali cuaca ekstrem yang menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, khususnya pada komoditas cabai, bawang, dan sayuran lainnya.
- b. Inflasi pada *Administered Prices* (AP) dimana kenaikan harga pada kelompok ini, terutama akibat penyesuaian tarif BBM dan angkutan udara, turut memberikan dampak signifikan pada inflasi secara keseluruhan.
- c. Tantangan ekonomi global dan ketidakpastian ekonomi global, seperti ketegangan geopolitik dan ketidakstabilan harga energi, berkontribusi pada kenaikan harga komoditas internasional yang mempengaruhi perekonomian domestik.
- d. Gangguan pasokan pangan pada beberapa komoditas pangan sehingga mengalami kenaikan harga akibat gangguan pada rantai pasok yang dipicu oleh faktor cuaca buruk dan kendala distribusi terutama pada komoditas pangan hortikultura.
- e. Peningkatan konsumsi masyarakat pada momen tertentu (musiman dan kebijakan



stimulus) dan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan jangka pendek mengakibatkan tekanan inflasi dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*).

- f. Keterbatasan data harga yang bersifat real time di beberapa wilayah dan keterlambatan dalam mendeteksi potensi lonjakan harga tertentu menjadikan mengurangi ketepatan waktu intervensi kebijakan pengendalian inflasi.
- g. Persepsi masyarakat terhadap potensi kenaikan harga yang dapat memicu perilaku spekulatif dan informasi yang tidak terkelola secara optimal dapat meningkatkan tekanan inflasi melalui ekspektasi harga.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam upaya mencapai target pengendalian inflasi tahun selanjutnya, beberapa kendala telah teridentifikasi yang memengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, pemerintah telah merancang serangkaian upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan kestabilan harga. Berikut adalah beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi:

- a. Penguatan sinergi pengendalian inflasi dengan agenda pembangunan nasional untuk menjaga inflasi rendah dan stabil sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan
- b. Koordinasi yang lebih efektif yang akan difokuskan pada penjadwalan terintegrasi sejak awal, penunjukan PIC untuk tiap

kegiatan, serta pemanfaatan teknologi rapat virtual guna meningkatkan efisiensi koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah.

- c. Penguatan infrastruktur dan mekanisasi untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem yang memengaruhi produksi pangan, pemerintah akan memperkuat infrastruktur pertanian dan mekanisasi pertanian agar dapat meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi kerugian, dan meminimalisir dampak perubahan cuaca terhadap hasil pertanian.
- d. Penguatan sistem digitalisasi daerah mengingat pentingnya data yang akurat dan cepat sehingga pemerintah akan memperkuat sistem digitalisasi daerah melalui penyediaan panduan teknis dan bimbingan teknis kepada daerah, serta penggunaan form standar yang memudahkan pengumpulan data dan memastikan keterlibatan daerah dalam pengelolaan inflasi.
- e. Diversifikasi sumber pangan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas utama yang rentan terhadap fluktuasi pasokan, pemerintah akan memperkuat program diversifikasi pangan untuk meningkatkan keberagaman produk pangan lokal dan memastikan ketahanan pangan yang lebih stabil.
- f. Penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam merespons tekanan inflasi dan penyesuaian belanja pemerintah agar tidak menimbulkan tekanan permintaan berlebihan

- g. Memperkuat Peranan TPIN dan TPID dalam rangka meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan *evidence based* dalam menyelesaikan persoalan *debottlenecking* dalam penyelesaian hambatan terkait pencapaian tingkat inflasi keseluruhan.
- h. Peningkatan koordinasi lintas kementerian/ lembaga dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis dan penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi gangguan pasokan.
- i. Penguatan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dengan juga melakukan penajaman kebijakan impor–ekspor pangan secara terukur dan tepat waktu.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja pengendalian inflasi yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025, efisiensi dalam penggunaan sumber daya menjadi faktor penting yang mendukung pencapaian tersebut. Efisiensi ini tidak hanya terlihat pada pengelolaan anggaran, tetapi juga dalam penerapan teknologi yang mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat serta tepat. Dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang terukur untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mendukung efisiensi

dalam mencapai target kinerja:

- a. Pemanfaatan teknologi seperti video conference dan platform daring lainnya memungkinkan koordinasi antara TPIP, TPID, serta kementerian terkait dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kualitas. Hal ini mengurangi biaya perjalanan dan penggunaan sumber daya lainnya, serta memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan.
- b. Pengurangan biaya yang diperlukan untuk pertemuan fisik dilakukan melalui pertemuan daring dan *hybrid*. Pemerintah dapat menghemat anggaran yang sebelumnya digunakan untuk biaya perjalanan dinas, akomodasi, dan logistik lainnya, sambil tetap menjaga kelancaran koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah.
- c. Proses monitoring dan evaluasi kebijakan inflasi yang lebih efisien dilakukan dengan sistem berbasis digital, memungkinkan pengumpulan data lebih cepat dan akurat, serta pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap dinamika harga, tanpa membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak.
- d. Pengalokasian subsidi pangan dan energi yang lebih tepat sasaran membantu mengurangi pemborosan dan memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang membutuhkan. Ini membantu mengendalikan biaya yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengurangi tekanan inflasi.
- e. Penggunaan sistem berbasis data dalam pengambilan keputusan memfasilitasi



- perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih cepat dan tepat, memungkinkan pemerintah untuk segera merespons fluktuasi harga pangan dengan langkah-langkah preventif dan responsif tanpa menunggu laporan yang memakan waktu.
- f. Peningkatan efisiensi distribusi logistik, khususnya untuk kebutuhan pangan,

memainkan peran besar dalam memastikan pasokan tetap stabil. Pengelolaan jaringan distribusi yang lebih efisien memungkinkan pengurangan biaya operasional dan meningkatkan efektivitas pengiriman barang, termasuk ke daerah terpencil.





B.4 SASARAN STRATEGIS 3: **TERWUJUDNYA PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN**

Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan” dalam RPJMN 2025–2029 merupakan bagian penting dari agenda pembangunan yang diusung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Fokus utama dari sasaran ini adalah menciptakan lapangan kerja yang tidak hanya mencakup jumlah tenaga kerja yang cukup, tetapi juga memiliki kualitas yang memadai. Kualitas kerja diukur dengan indikator kesejahteraan pekerja, yang mencakup penghasilan yang layak, kesejahteraan sosial, serta kemampuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perhatian diberikan pada pengurangan ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan, yang menjadi tantangan utama dalam memanfaatkan potensi tenaga kerja secara optimal. Penyediaan lapangan kerja yang berkualitas juga berarti menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan standar internasional.

Untuk mengukur capaian dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencerminkan seberapa besar kontribusi sektor formal dalam menciptakan peluang kerja yang stabil dan memenuhi standar ketenagakerjaan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menggambarkan jumlah tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan kesempatan, menjadi indikator utama dalam

B.4.1

PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL

Lapangan kerja merujuk pada kesempatan atau tempat yang memungkinkan seseorang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, baik dalam sektor formal maupun informal, sesuai dengan keahlian, pendidikan, atau keterampilan yang dimiliki. Sementara itu, lapangan kerja formal adalah jenis pekerjaan yang diakui oleh pemerintah secara resmi dan biasanya dilengkapi dengan perlindungan hukum serta hak-hak tenaga kerja yang jelas. Beberapa karakteristik lapangan kerja formal meliputi status hukum yang jelas, adanya perjanjian kerja tertulis, pemberian upah minimum, jaminan sosial, pengaturan jam kerja dan cuti, serta pembayaran pajak dan iuran. Keberadaan lapangan kerja formal ini penting karena selain memberikan rasa aman bagi pekerja, juga mendukung keberlanjutan ekonomi melalui sistem yang lebih terstruktur dan terjamin.

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal menggambarkan sejauh mana sektor formal berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Secara spesifik, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ini mengukur persentase pekerja yang terlibat dalam pekerjaan yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yang dilengkapi dengan hak-hak tenaga kerja yang jelas seperti jaminan sosial, upah minimum, serta perlindungan hukum lainnya. Melalui pengukuran ini, kita dapat melihat kemajuan dalam memperbesar sektor pekerjaan formal, yang memiliki dampak

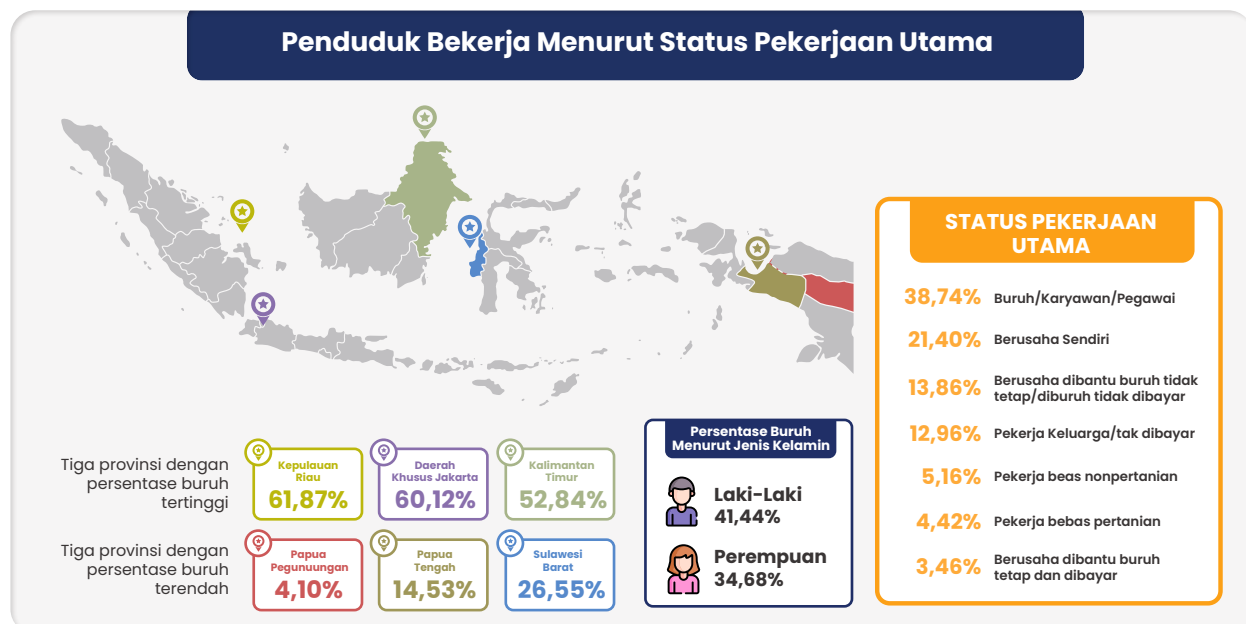


langsung pada kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi proporsi pekerja yang berada di sektor formal, semakin besar pula kontribusi sektor ini terhadap stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli, dan terciptanya lapangan kerja baru yang lebih berkualitas.

CAPAIAN KINERJA PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah

dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih terstruktur dan terjamin. Dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sakernas, proporsi pekerja formal dibandingkan dengan total pekerja dihitung untuk memberikan gambaran mengenai kualitas lapangan kerja yang tersedia. Hal ini tidak hanya menunjukkan seberapa banyak pekerjaan yang tersedia, tetapi juga seberapa banyak pekerjaan yang memenuhi standar ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah.



Sumber: Sakernas (2025)

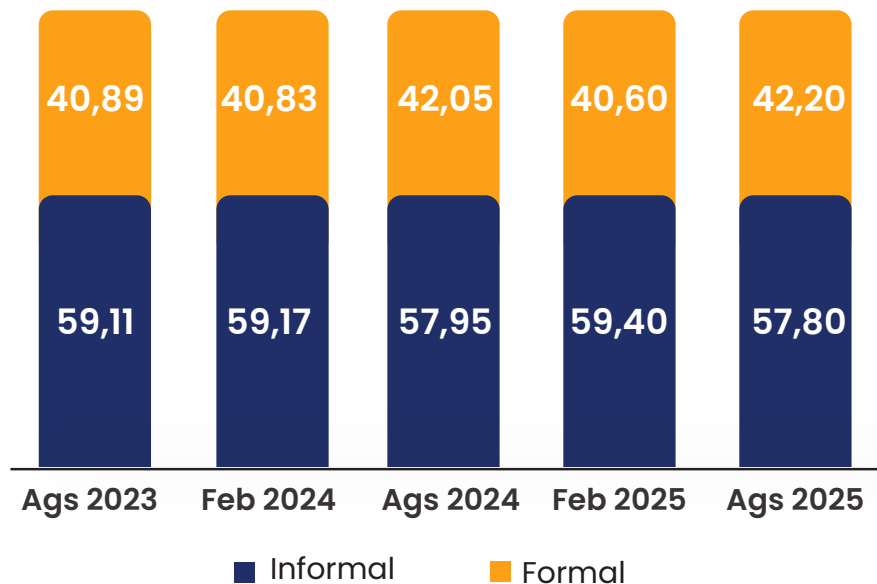
Berdasarkan status pekerjaan utama, struktur penduduk bekerja di Indonesia masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai dengan proporsi sebesar 38,74 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja berada dalam hubungan kerja dengan pihak pemberi kerja, baik di sektor formal maupun informal. Selanjutnya, pekerja yang berusaha sendiri mencapai 21,40 %, diikuti oleh pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar sebesar 13,86 %, yang mencerminkan besarnya peran usaha skala kecil dan keluarga dalam perekonomian nasional. Sementara itu, pekerja keluarga atau tidak dibayar tercatat sebesar 12,96 %, yang mengindikasikan masih tingginya keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga. Adapun pekerja bebas nonpertanian dan pekerja bebas pertanian masing-masing sebesar 5,16 % dan 4,42 %, sedangkan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar hanya mencapai 3,46 %, menunjukkan masih terbatasnya skala usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara formal dan berkelanjutan.

Dari sisi wilayah, provinsi dengan persentase buruh tertinggi adalah Kepulauan Riau (61,87 %), DKI Jakarta (60,12 %), dan Kalimantan Timur (52,84 %), yang umumnya memiliki struktur ekonomi berbasis industri dan jasa. Sebaliknya, persentase buruh terendah tercatat di Papua Pegunungan (4,10 %), Papua Tengah (14,53 %), dan Sulawesi Barat (26,55 %). Ditinjau dari jenis kelamin, persentase buruh laki-laki sebesar 41,44 %, lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 34,68 %, yang menunjukkan adanya perbedaan struktur ketenagakerjaan berdasarkan gender. Grafik di bawah ini menggambarkan proporsi pekerja formal dan informal dari Bulan Agustus 2023 hingga Agustus 2025, dimana menunjukkan tren positif dalam penciptaan

lapangan kerja formal. Pada Bulan Agustus 2023, proporsi pekerja formal mencapai 40,89%, yang kemudian sedikit menurun pada Bulan Februari 2024 menjadi 40,83%, namun kembali meningkat pada Bulan Agustus 2024 menjadi 42,05%. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbesar sektor pekerjaan yang terjamin dan berkelanjutan. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada Bulan Februari 2025 menjadi 40,60%, tren ini berbalik meningkat lagi pada Bulan Agustus 2025 menjadi 42,20%. Peningkatan proporsi pekerja formal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan yang berfokus pada penguatan sektor formal, yang memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan terstruktur.

Gambar 3.26. Perbandingan Proporsi Pekerja Formal dan Informal 2023 – 2025

PROPORSI PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL Agustus 2023–Agustus 2025 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)



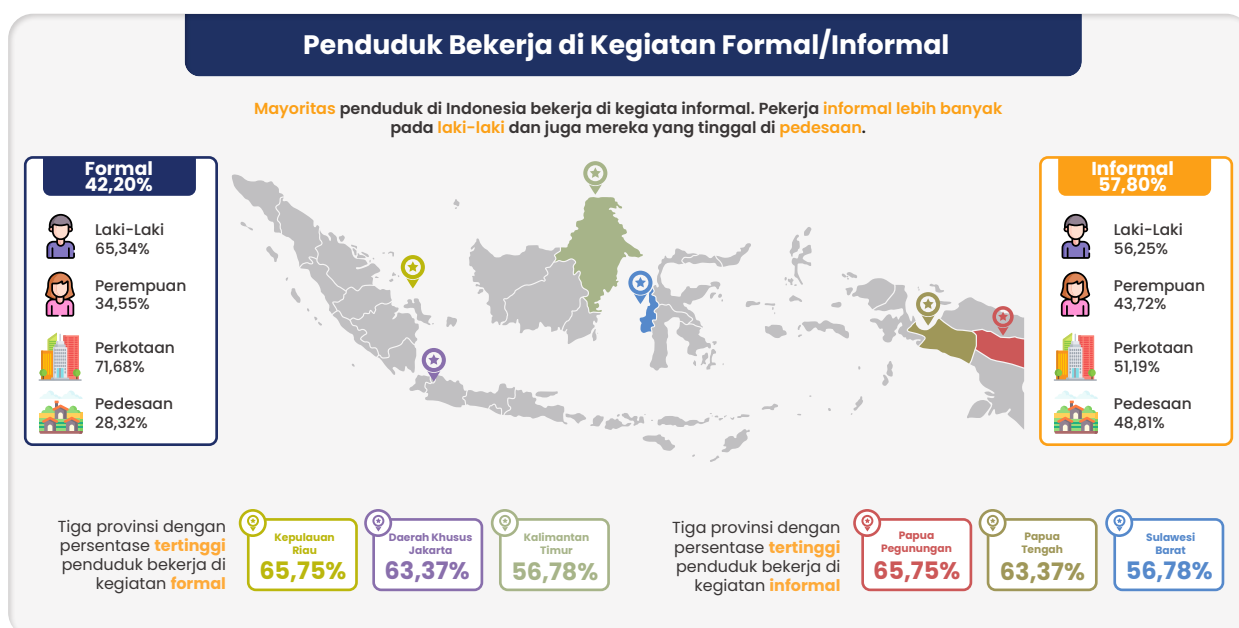
Target kinerja Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal pada tahun 2025 sebesar 35 persen, data kinerja terkait Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sakernas. Berikut merupakan capaian indikator kinerja utama Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal:

Tabel 3.16. Capaian Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase	35%	42,20%	120%

Sepanjang Tahun 2025, proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2025, proporsi pekerja formal terhadap total penduduk bekerja mencapai 42,20% lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 35% di Tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi sepanjang Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 120%. Dalam proses pencapaian Target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal sepanjang

Tahun 2025 yang berkualitas memerlukan dukungan dari berbagai indikator dan koordinasi pemangku kepentingan yang saling terkait. Pada 31 Desember 2025, kredit program yang telah disalurkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp 275,82 triliun atau 92,27% dari target. Dari sisi dampak ekonomi, penyaluran Kredit Program juga ikut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada Tahun 2025, penyaluran kredit program memberikan *multiplier effect* terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 13,83 juta tenaga kerja.



Sumber: Sakernas (2025)

Ditinjau dari karakteristik demografis, pekerja informal lebih banyak ditemukan pada laki-laki (56,28 %) dibandingkan perempuan (43,72 %), serta terkonsentrasi di wilayah perdesaan (48,81 %) dibandingkan perkotaan (51,19 %). Sebaliknya, pekerja formal lebih dominan di wilayah perkotaan (71,68 %), dengan komposisi pekerja laki-laki sebesar 65,34 persen dan perempuan 34,66 %. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan spasial dan gender dalam akses terhadap pekerjaan formal, yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan, struktur ekonomi wilayah, dan ketersediaan lapangan kerja berbasis industri dan jasa modern.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal sejumlah indikator turunan proporsi penciptaan lapangan kerja formal yang

melalui efektivitas perumusan, penetapan dan pengendalian kebijakan yang diterapkan dalam menciptakan lapangan kerja formal. Berikut hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian indikator kunci yang mendukung pencapaian target tersebut, antara lain adalah:

a. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Penguatan keahlian menengah tinggi akan mendorong transformasi ekonomi menuju struktur ekonomi yang lebih modern, berbasis pada industri, teknologi, dan jasa bernilai tambah tinggi, yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, proporsi pekerja dengan keahlian menengah tinggi pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 62,97%. Berdasarkan data Sakernas Bulan Agustus 2025, total pekerja Indonesia adalah 146.542.264 orang dengan rincian jenis pekerjaan utama sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Total Pekerja
Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang sejenis	10.709.245
Tenaga Kepemimpinan dan ketatalaksanaan	1.711.206
Tenaga Tata usaha dan yang sejenis	8.236.084
Tenaga Tata Usaha Penjualan	30.802.132
Tenaga Usaha Jasa	8.221.183
Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan	40.607.600
Tenaga Produksi, Operator Alat Alat Angkutan dan Pekerja Kasar	43.041.936
Lainnya	2.441.794

Sumber: Sakernas (2025)



Pada Tahun 2025, total jumlah pekerja berkeahlian menengah tinggi di Indonesia tercatat sebanyak 100.287.450 orang, yang mencakup pekerja dengan total jumlah pekerja di Indonesia yang mencapai 145.771.180 orang, maka persentase pekerja berkeahlian menengah tinggi dapat dihitung dengan membagi jumlah pekerja tersebut dengan total pekerja, menghasilkan angka sebesar 68,79%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang relevan dengan sektor-sektor yang lebih produktif dan berdaya saing, yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal.



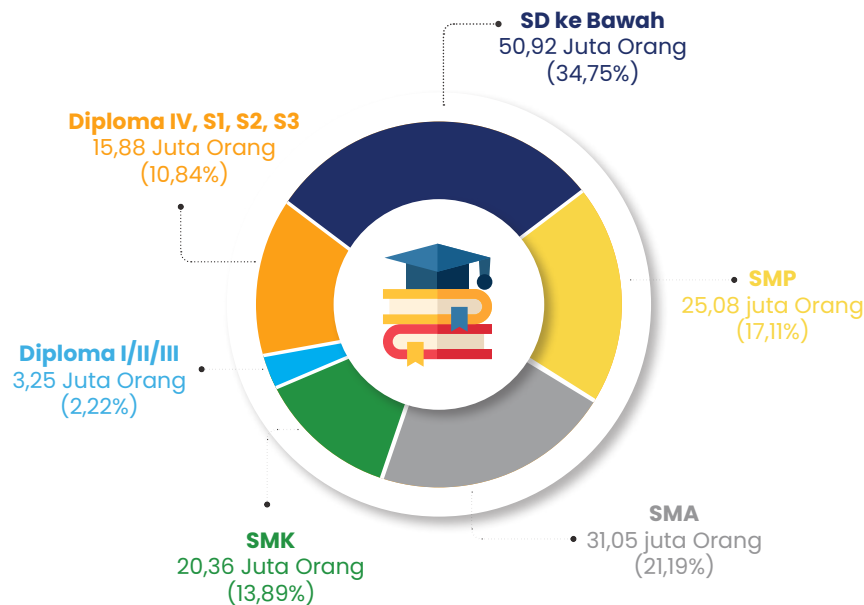
Sumber: Sakernas (2025)

Berdasarkan distribusi penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan utama, mayoritas tenaga kerja di Indonesia bekerja sebagai tenaga produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar dengan proporsi sebesar 30,05 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi oleh pekerjaan yang bersifat operasional dan berintensitas keterampilan menengah ke bawah. Jenis pekerjaan terbanyak berikutnya adalah tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 27,19 %, yang mencerminkan masih besarnya peran sektor primer dalam penyerapan tenaga kerja nasional.

Selanjutnya, tenaga usaha penjualan menempati posisi ketiga dengan 20,63 %, diikuti oleh tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis sebesar 7,50 %, serta tenaga usaha jasa sebesar 6,44 %. Sementara itu, proporsi tenaga kerja di bidang tata usaha dan yang sejenis relatif lebih kecil, yakni 5,30 %. Adapun penduduk bekerja pada kategori lainnya dan tenaga kepemimpinan serta ketatalaksanaan masing-masing hanya sebesar 1,70 % dan 1,19 %, yang menunjukkan bahwa pekerjaan pada level manajerial dan pengambil keputusan masih merupakan porsi yang sangat terbatas dalam struktur ketenagakerjaan nasional. Data tersebut mengindikasikan perlunya penguatan

kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, guna mendorong transformasi struktural ketenagakerjaan menuju sektor-sektor yang lebih produktif dan berdaya saing.

Sekitar 13,06% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke Atas)



Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Namun, saat ini yang menjadi tantangan utama dalam pencapaian target tersebut adalah masih minimnya jumlah pekerja dengan level keahlian tinggi (*skilled labor*). Sementara itu, sebagian besar pekerja masih berada pada level menengah (*semi-skilled labor*) dan rendah (*basic skill labor*). Berdasarkan data yang tersedia, sekitar 34,75% angkatan kerja memiliki pendidikan rendah (SD ke bawah), sementara 17,11% memiliki pendidikan menengah (SMP), 21,9% memiliki pendidikan menengah atas (SMA), 13,89% memiliki pendidikan vokasi (SMK), 2,22% memiliki pendidikan Diploma I/II/III, dan sekitar 10,84% memiliki pendidikan tinggi (Diploma IV, S1, S2, S3). Kendala lain yang dihadapi adalah revitalisasi pendidikan vokasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang

diinginkan (*outcome-based*), serta belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghubungkan pencari kerja dengan peluang yang ada di pasar tenaga kerja.

Bauran Kebijakan Mendorong Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi
Paket Stimulus Ekonomi: Program Magang Lulusan

Program magang khusus bagi lulusan perguruan tinggi (*fresh graduate*) merupakan salah satu komponen penting dari Paket Stimulus Ekonomi Indonesia tahun 2025, yang dirancang untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pengalaman kerja, dan memperkuat konektivitas antara pendidikan tinggi dan dunia kerja nyata.



Program ini diluncurkan di bawah arahan Pemerintah sebagai bagian dari rangkaian upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang kerja di tengah dinamika pasar tenaga kerja nasional. Pelaksanaan program magang lulusan perguruan tinggi *fresh graduate* untuk menyiapkan tenaga kerja dengan capaian 102.696 orang. Berikut merupakan data statistik dari pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025:

- 1. Batch 1** – Pada Batch 1 ini ditargetkan mampu menyerap 20.000 peserta magang bagi lulusan baru. Batch pertama secara resmi diluncurkan pada 20 Oktober 2025 dan peserta mulai bekerja pada tanggal tersebut. Adapun anggaran pertama yang dipersiapkan sekitar Rp198 miliar untuk membiayai stipend peserta magang setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama periode magang.
- 2. Batch 2** – Pada Batch 2 ini, Pemerintah kemudian membuka program magang yang direncanakan melibatkan sekitar 80.000 peserta, bertujuan mencapai target total 100.000 peserta nasional sesuai arahan Presiden. Batch ini banyak terserap oleh pelamar kira-kira sekitar 62.754 peserta telah resmi mengikuti magang pada periode kedua.
- 3. Batch 3** – Pemerintah menyiapkan batch ketiga dengan target peserta menuju 100.000 total magang pada akhir 2025, di mana pendaftaran peserta dan lowongan magang telah dibuka sejak Desember 2025 dan jumlah kuota dilanjutkan untuk mencapai target nasional.

Secara total, dari Batch 1 hingga Batch 3, program magang telah menjaring ± 102.696 peserta dari total pendaftar lebih dari 724.880 pelamar, melebihi target awal yang semula dipatok 100.000 peserta.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Vokasi merupakan salah satu faktor pengungkit kualitas tenaga kerja nasional yang menjadi fokus sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tertuang pada Perpres Nomor 68 Tahun 2022 adalah peraturan tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Implementasi Perpres ini di Tahun 2025 dilaksanakan melalui penguatan tata kelola dan sinergi antar K/L tanpa mengubah struktur Perpres No 68/2022, serta mengembangkan *dashboard monitoring* secara *real time* untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan penyelarasan kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar sistem pendidikan dan pelatihan vokasi lebih *demand-driven*, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta selaras dengan kebutuhan sektor-sektor prioritas perekonomian. Fokus revitalisasi mencakup penguatan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara satuan pendidikan vokasi, lembaga pelatihan kerja, dan industri, termasuk melalui perluasan skema pemagangan, peningkatan keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum, serta sertifikasi kompetensi yang diakui pasar kerja.

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong integrasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dalam kerangka kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan SDM nasional, termasuk melalui sinergi dengan program peningkatan kompetensi tenaga kerja, Program Magang Nasional, serta berbagai inisiatif pelatihan berbasis kebutuhan industri dan wilayah. Upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat akses dan kualitas pelatihan vokasi bagi kelompok usia produktif, lulusan baru, dan pencari kerja, sehingga mampu meningkatkan *employability* dan produktivitas tenaga kerja.

Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pada Tahun 2025 juga ditopang oleh penguatan tata kelola dan koordinasi program, termasuk penyelarasan perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja lintas sektor. Melalui peran koordinatif tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian memastikan bahwa kebijakan vokasi tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam mendukung sasaran pembangunan ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan daya saing nasional.

Link and Match antara Lulusan dan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2025 berfokus pada (1) Perbaikan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, agar para lulusan siap menghadapi dunia kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), (2) pelaksanaan pelatihan, pemagangan, dan penguatan

Sistem Informasi Pasar Kerja Kemnaker, (3) Penyusunan proyeksi tenaga kerja dan percepatan penerapan konsep *link and match* untuk penguatan *Labor Market Information System* (LMIS), (4) Penyiapan program pelatihan pelatihan welder dan hospitality dengan target 500.000 orang (100.000 *welder* dan 400.000 tenaga *hospitality*), (5) Melakukan analisis dan monitoring untuk Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, (6) Menyusun matriks identifikasi awal usulan Program Pelatihan Paket Ekonomi Penyediaan Platform dan Training *Gig Economy*.

Penguatan Kerja Sama dengan Pihak Swasta dan Industri

Beberapa kerja sama yang telah dihasilkan pada Tahun 2025 di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diantaranya (1) Penyiapan kerjasama dengan Russell Group untuk pendirian universitas di Indonesia dengan fokus pada jurusan STEM dengan usulan sektor prioritas antara lain Kesehatan, Digitalisasi, *Green Economy* dan Transisi Energi serta *Care Economy*, (2) Melaksanakan sinkronisasi Draft MoC *Employment Skill Development* (ESDP) Indonesia-Jepang. Selain itu terdapat beberapa program kerja sama yang dilakukan dengan pihak swasta dan industri seperti: (1) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; (3) Pelaksanaan program Tech:X Indonesia-Singapura (*Digital Talent*). Penguatan kerja sama dengan pihak swasta dan industri juga diarahkan untuk mendorong praktik ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan perlindungan tenaga kerja, kepastian



hubungan kerja, dan kesempatan peningkatan keterampilan. Melalui peran koordinatifnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja secara kuantitatif, tetapi juga pada kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, penguatan kerja sama dengan pihak swasta dan industri pada Tahun 2025 memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan proporsi lapangan kerja formal di Indonesia. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan dinamika ekonomi global dan penyesuaian dunia usaha, kinerja kolaborasi ini dinilai relatif baik dan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

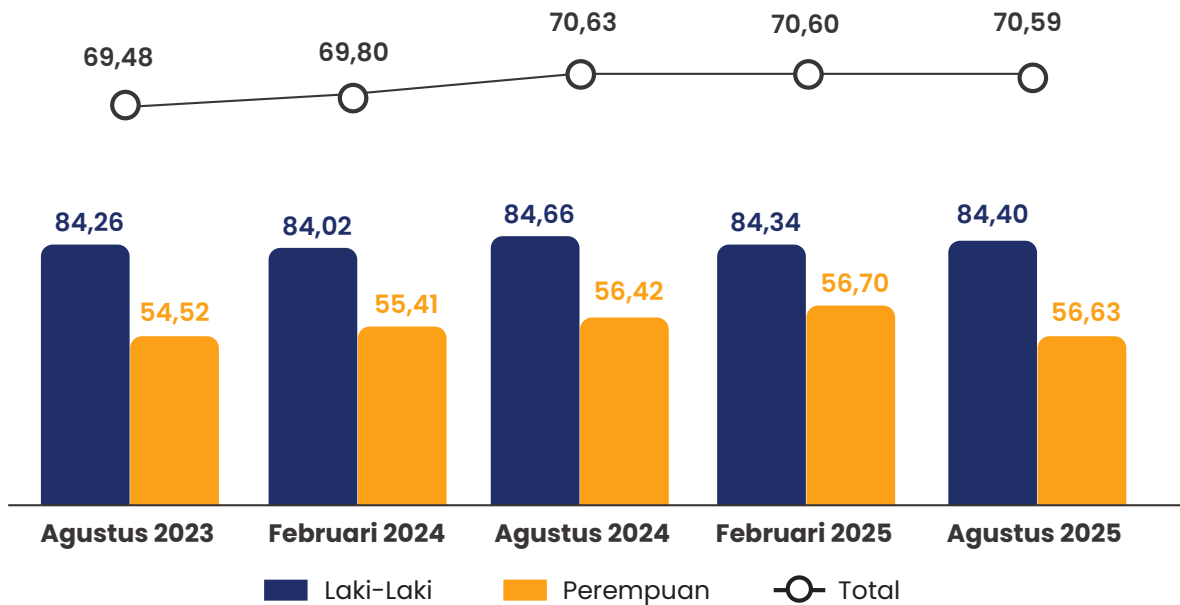
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan menggambarkan tingkat keterlibatan perempuan usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi perempuan usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi dibandingkan dengan seluruh jumlah perempuan dalam kelompok usia kerja. TPAK perempuan penting untuk mengukur kontribusi dan peran perempuan dalam perekonomian, serta menjadi dasar evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan kesetaraan gender.

Nilai TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang memperoleh akses terhadap pasar tenaga kerja dan berkontribusi secara langsung

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, nilai TPAK yang rendah dapat mencerminkan adanya hambatan struktural atau sosial, seperti beban kerja domestik, diskriminasi gender, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, atau kurangnya dukungan kebijakan yang memungkinkan perempuan bekerja secara produktif. TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.

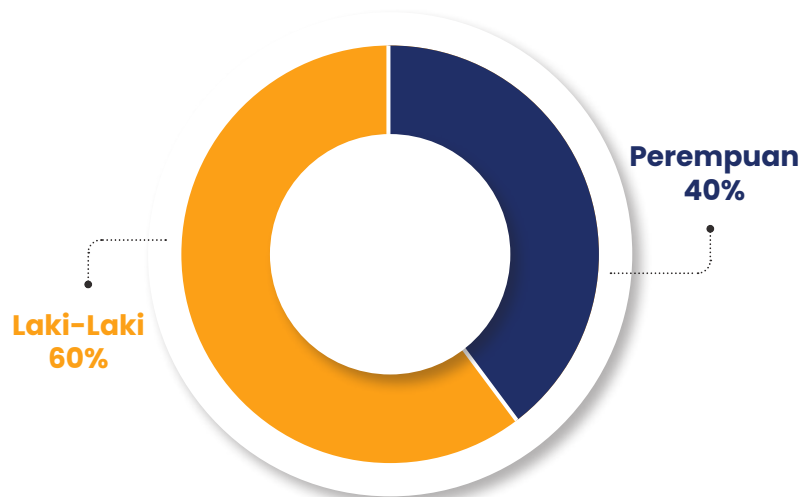
Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan mengukur seberapa besar proporsi perempuan usia 15 tahun ke atas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. TPAK yang tinggi mencerminkan adanya kemudahan akses perempuan ke pasar kerja, sementara TPAK yang rendah mengindikasikan adanya hambatan struktural seperti beban domestik, diskriminasi gender, dan kurangnya dukungan kebijakan yang memadai. Selama beberapa dekade terakhir, TPAK perempuan Indonesia mengalami stagnasi. Pada Bulan Agustus 2025, TPAK perempuan hanya mencapai 56,63%, jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 84,4%. Hal ini berbanding terbalik dengan target RPJPN 2025–2045 yang menginginkan TPAK perempuan mencapai 70% pada tahun 2045, yang memerlukan peningkatan minimal 1% setiap tahunnya.

Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Agustus 2023–Agustus 2025 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



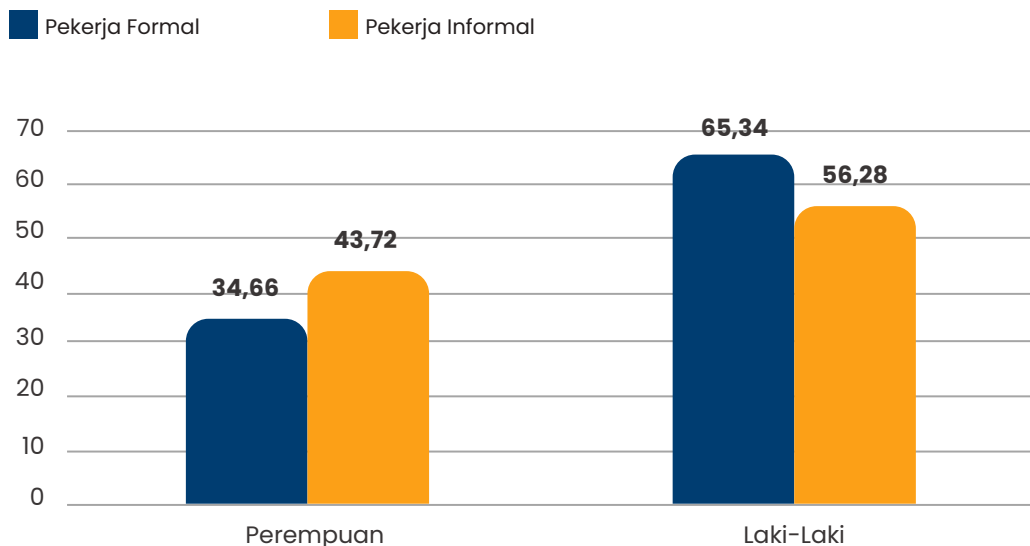
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (2025)

Kesenjangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki ini sebagian besar disebabkan oleh beban ganda yang harus ditanggung perempuan dalam mengurus rumah tangga dan keluarga. Menurut data ILO, perempuan menghabiskan waktu tiga kali lebih banyak untuk pekerjaan domestik dibandingkan dengan laki-laki, yang membatasi kesempatan mereka untuk terlibat



dalam pekerjaan berbayar. Diskriminasi dalam hal usia rekrutmen juga menjadi masalah, karena seringkali perempuan menghadapi kesulitan untuk kembali bekerja setelah melahirkan. Selain itu, perempuan cenderung lebih banyak bekerja di sektor informal, bahkan dalam pekerjaan yang tidak dibayar, yang semakin memperburuk kesenjangan tersebut.

Proporsi Partisipasi Kerja



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (2025)

Bauran Kebijakan Pendorong Proporsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Dalam mencapai target tersebut beberapa program telah dilaksanakan dan menjadi penunjang pencapaian target sebagai berikut:

Penguatan Akses Perempuan terhadap Pekerjaan Formal

Mendorong penciptaan dan perluasan lapangan kerja formal bagi perempuan melalui pengembangan sektor-sektor padat karya dan bernilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan, pariwisata, ekonomi digital, dan jasa modern. Upaya ini dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan, investasi, dan pengembangan sektor riil agar mampu menyerap tenaga kerja perempuan secara lebih optimal. Selain itu, penguatan akses kerja formal juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan perempuan

melalui penyediaan kesempatan kerja yang layak, berkelanjutan, dan terlindungi secara hukum. Melalui koordinasi lintas kementerian/ lembaga dan kolaborasi dengan dunia usaha, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan partisipasi kerja perempuan, memperluas kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional, serta memperkuat struktur pasar tenaga kerja yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing Tenaga Kerja Perempuan

Mengoordinasikan perluasan program pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan (*upskilling* dan *reskilling*), serta pemagangan berbasis industri yang responsif gender dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Fokus pengembangan diarahkan pada keterampilan teknis dan non-teknis yang relevan dengan perkembangan sektor-sektor prioritas, seperti

industri pengolahan, pariwisata, ekonomi digital, dan jasa modern. Selain itu, penguatan kapasitas tenaga kerja perempuan juga dilakukan melalui perluasan akses terhadap program reskilling dan upskilling, peningkatan literasi digital, serta dukungan terhadap sertifikasi kompetensi. Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan kemitraan dengan dunia usaha, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang kerja formal, serta memperkuat posisi perempuan dalam pasar tenaga kerja nasional yang semakin kompetitif.

Penguatan Ekosistem Kerja Ramah Perempuan

Mendorong penerapan kebijakan kerja fleksibel, perlindungan ketenagakerjaan, serta lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi perempuan melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan asosiasi industri. Upaya ini mencakup dukungan terhadap kebijakan fleksibilitas kerja, penyediaan fasilitas pendukung bagi pekerja perempuan, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja, serta penguatan jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. Selain itu, Kemenko Bidang Perekonomian mendorong peran dunia usaha dalam mengadopsi standar kerja ramah perempuan sebagai bagian dari peningkatan produktivitas dan daya saing. Melalui ekosistem kerja yang aman, adil, dan mendukung keseimbangan peran kerja dan keluarga, diharapkan partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal dapat meningkat secara berkelanjutan serta berkontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan dan UMKM

Mendorong penguatan peran perempuan sebagai pelaku usaha melalui fasilitasi

akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan integrasi UMKM perempuan ke dalam rantai pasok nasional dan global. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan perempuan, termasuk penguatan manajemen usaha, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi UMKM perempuan ke dalam rantai pasok nasional dan global. Selain itu, pengembangan ekosistem pendukung seperti kemudahan perizinan, fasilitasi sertifikasi, dan penguatan kemitraan dengan dunia usaha besar turut didorong guna meningkatkan daya saing UMKM perempuan. Melalui pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan, perempuan diharapkan tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas, nilai tambah ekonomi, dan ketahanan ekonomi nasional.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Berbasis Data Gender

Mendorong penggunaan data terpilah gender dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan guna memastikan efektivitas bauran kebijakan dalam meningkatkan TPAK Perempuan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penyelarasan indikator kinerja, integrasi data ketenagakerjaan dan kewirausahaan perempuan, serta peningkatan kualitas sistem pelaporan kinerja yang responsif gender. Selain itu, pemanfaatan data berbasis bukti (*evidence based policy*) diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan secara lebih akurat. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berbasis data gender, kebijakan yang dihasilkan



diharapkan lebih tepat sasaran, adaptif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional.

c. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional

Dalam rangka melindungi pekerja, Indonesia telah memiliki serangkaian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang programnya terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan yang terbaru adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jaminan sosial ketenagakerjaan berperan penting dalam melindungi pekerja dari risiko sosial seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Namun, tingkat kepesertaan masih belum optimal, Data Sakernas per Februari 2025 mencatat Jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang yang terdiri dari pekerja formal sebanyak 59,18 juta pekerja (40,60%) dan pekerja informal sebanyak 86,58 juta pekerja (59,40%). Total peserta jaminan sosial sebanyak 55,11 juta pekerja yang terdiri dari 45,48 juta pekerja merupakan penerima upah (PU/pekerja formal) dan 9,62 juta pekerja merupakan bukan penerima upah (BPU/pekerja informal). Dapat disimpulkan bahwa dari jumlah angkatan kerja, kepesertaan jaminan sosial baru mencapai 37,81%.

Dari jumlah pekerja formal, kepesertaan jaminan sosial baru mencapai 76,86% untuk pekerja. Penerima Upah (PU). Dari jumlah pekerja informal, kepesertaan jaminan sosial baru mencapai 11,12% untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) Ketidadaan jaminan sosial membuat pekerja rentan jatuh miskin saat menghadapi guncangan ekonomi atau kondisi darurat, yang pada gilirannya membebani

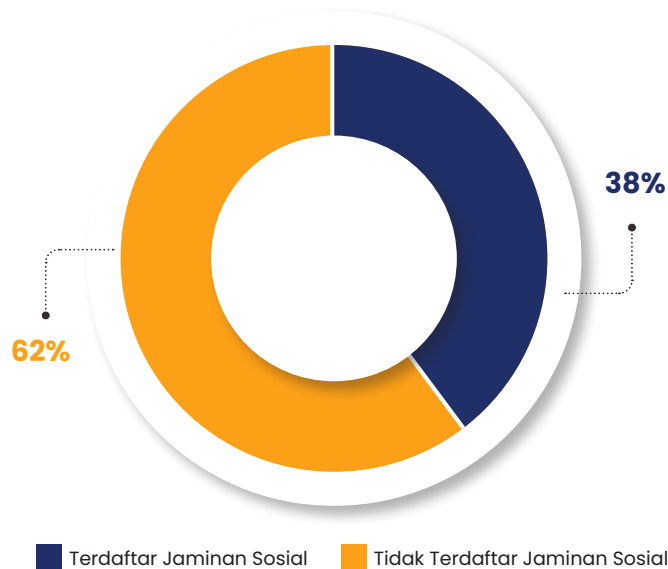
keuangan negara dan menghambat produktivitas. Sistem jaminan sosial yang kuat tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memperkuat daya beli, menciptakan stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik dan kepercayaan pasar tenaga kerja.

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja dari risiko sosial, seperti kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Namun, tingkat kepesertaan jaminan sosial masih jauh dari optimal. Berdasarkan data Sakernas per Bulan Februari 2025, hanya sekitar 37,81% dari total angkatan kerja Indonesia yang terdaftar dalam program jaminan sosial, sementara jumlah angkatan kerja mencapai 145,7 juta orang. Tanpa adanya perlindungan jaminan sosial, pekerja menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan dan krisis ekonomi, yang pada gilirannya dapat menghambat produktivitas serta kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Tingkat kepesertaan tenaga kerja pada jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum optimal, Data Sakernas per Bulan Februari 2025 mencatat Jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang yang terdiri dari pekerja formal sebanyak 59,18 juta pekerja (40,60%) dan pekerja informal sebanyak 86,58 juta pekerja (59,40%). Total peserta jaminan sosial sebanyak 55,11 juta pekerja yang terdiri dari 45,48 juta pekerja merupakan penerima upah (PU/ Pekerja Formal) dan 9,62 juta pekerja merupakan bukan penerima upah (BPU/ Pekerja Informal). Dapat disimpulkan bahwa dari jumlah angkatan kerja, kepesertaan jaminan sosial baru mencapai 37,81%. Dari jumlah pekerja formal, kepesertaan jaminan

sosial baru mencapai 76,86% untuk pekerja Penerima Upah (PU). Dari jumlah pekerja informal, kepesertaan jaminan sosial baru mencapai 11,12% untuk pekerja bukan penerima upah (BPU).

Persentase Pekerja Terdaftar Jaminan Sosial dan Tidak Terdaftar Jaminan Sosial



Sumber : Sakernas (2025)

Bauran Kebijakan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional Efektivitas Pelaksanaan Inpres No 2 Tahun 2021

Inpres 2 Tahun 2021 bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Inpres tersebut berharap agar seluruh pekerja di Indonesia dapat terlindungi oleh jaminan sosial dan mendorong kepatuhan pemberi kerja dalam memberikan hak-hak pekerja. Penting untuk dicatat bahwa jaminan sosial merupakan hak yang harus diberikan kepada pekerja, bukan sekadar fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam meningkatkan kepesertaan, seperti tingginya angka PHK yang tercatat mencapai 88.519 pekerja pada Tahun 2025, lebih tinggi dari Tahun 2024 yang tercatat 77.965 pekerja. Selain itu, dominasi sektor informal, dengan penghasilan yang

tidak stabil, turut mempengaruhi keberlanjutan pembayaran iuran jaminan sosial. Sebagai implementasi dari Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan kehadiran Pemerintah untuk mendorong kesejahteraan pekerja, pada Tahun 2025 Pemerintah telah melakukan:

- Telah ditetapkan PP 6/2025 tentang Perubahan atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tanggal 7 Februari 2025 dalam rangka penguatan program untuk peningkatan manfaat dan perluasan cakupan kepesertaan
- Telah dilakukan koordinasi penyusunan PP Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)
- Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Pelindungan Pekerja Berbasis Platform Digital



- Koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan
- Telah dilakukan koordinasi pemberian diskon iuran JKK dan JKM untuk Ojek online, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik.
- Telah dilakukan koordinasi penyusunan PP No. 6/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta evaluasi upah minimum 2025.
- Pemberian stimulus ekonomi berupa relaksasi iuran JKK, peningkatan manfaat JKP, pemberian bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan, dan stimulus sektor informal kepada pekerja BPU.
- Peningkatan peserta aktif BPJS TK salah satunya berasal dari kontribusi pelaksanaan program magang perguruan tinggi yang menyasar kepada 100.000 orang yang juga didaftarkan dalam Program JKK dan JKM.
- Pengintegrasian pelaksanaan program pemerintah dengan Jamsostek dengan melaksanakan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang menargetkan jumlah peserta magang sebanyak 100.000. Seluruh peserta magang dalam program ini didaftarkan ke dalam Program Jamsostek untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan kepesertaan Jamsostek.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal yang telah ditetapkan, berbagai faktor penting telah mendorong tercapainya hasil yang lebih tinggi dari target yang diharapkan. Keberhasilan

pencapaian tersebut membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan berbagai lembaga terkait yang terus bekerja sama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Berikut merupakan program kegiatan koordinasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- Kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan sektor swasta memastikan kebijakan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan dengan baik.
- Koordinasi perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, sinkronisasi kebijakan perlindungan pekerja formal, dan sosialisasi manfaat kerja formal bagi pekerja dan pelaku usaha sehingga meningkatkan keberlanjutan dan daya tarik pekerjaan formal.
- Inisiatif penyediaan lapangan kerja melalui Infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) berhasil menciptakan banyak lapangan kerja, khususnya di sektor konstruksi dan logistik serta penyelesaian hambatan perizinan dan regulasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengawalan investasi sektor padat karya dan bernilai tambah tinggi.
- Sinkronisasi program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, dukungan kebijakan upskilling dan reskilling tenaga kerja, dan fasilitasi kemitraan dunia usaha dan lembaga pelatihan dalam mengurangi *skills mismatch* dan meningkatkan penempatan kerja formal.
- Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri membantu meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan peluang kerja di sektor formal.
- Dukungan pada sektor industri dan wirausaha yang mendukung sektor

industri dan wirausaha berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

- Koordinasi program padat karya produktif dan berorientasi formal, sinkronisasi program bantuan pemerintah dengan tujuan penciptaan kerja formal, dan penguatan keberlanjutan hasil program penciptaan kerja sehingga memperluas basis penciptaan lapangan kerja formal
- Optimalisasi kebijakan investasi melalui kebijakan yang mempermudah iklim investasi membuka peluang kerja formal, terutama di sektor-sektor padat karya.
- Subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran melalui program subsidi yang tepat sasaran mendukung stabilitas sosial-ekonomi dan memperkuat penciptaan lapangan kerja formal.
- Penguatan iklim usaha dan kepastian regulasi melalui penyelarasan kebijakan perizinan dan ketenagakerjaan, pengurangan hambatan regulasi yang berdampak pada penciptaan kerja formal, dan penguatan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sehingga mampu mendorong dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja secara formal.
- Pemanfaatan data dan monitoring ketenagakerjaan dalam pemantauan perkembangan ketenagakerjaan formal secara berkala dan sebagai dasar penajaman kebijakan penciptaan kerja sehingga mampu meningkatkan ketepatan dan efektivitas intervensi kebijakan.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal, berbagai kendala telah dihadapi yang menghambat pelaksanaan program-program strategis. Meskipun telah ada upaya signifikan untuk

mempercepat pengembangan ekosistem ketenagakerjaan, beberapa tantangan struktural dan administratif masih memerlukan perhatian lebih. Kendala-kendala ini mencakup masalah koordinasi antara kementerian dan lembaga, keterlambatan dalam regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan program-program, serta tantangan sosial yang menghambat pengembangan kapasitas tenaga kerja, khususnya pada sektor-sektor tertentu sebagai berikut:

- Stagnasi produktivitas nasional yang disebabkan oleh dominasi angkatan kerja di sektor informal dengan nilai tambah rendah serta adanya kesenjangan kompetensi (*skills mismatch*).
- Ketidakoptimalan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.
- Program pemagangan untuk lulusan perguruan tinggi yang semula dijadwalkan pada 1 Oktober 2025 mengalami penundaan.
- Kendala dalam melaksanakan kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor tertentu, terutama terkait dengan partisipasi perempuan di pasar kerja.
- Beberapa kebijakan krusial, seperti revisi Perpres Program Kartu Prakerja, belum dapat diterapkan karena masih menunggu keputusan mengenai substansi yang akan dituangkan dalam peraturan tersebut.
- Kesenjangan keterampilan tenaga kerja dimana ketersediaan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri menyebabkan terbatasnya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal, khususnya pada sektor bernilai tambah tinggi.
- Tingginya proporsi sektor informal yang mana struktur pasar tenaga kerja nasional



yang masih didominasi sektor informal menjadi tantangan dalam meningkatkan proporsi pekerja formal secara signifikan dalam jangka pendek.

- Adanya hambatan regulasi dan administrasi seperti proses perizinan usaha, kepatuhan ketenagakerjaan, serta beban administrasi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, masih menjadi faktor yang menghambat transisi usaha dan tenaga kerja menuju sektor formal.
- Keterbatasan daya serap investasi terhadap tenaga kerja dimana masuknya investasi baru belum seluruhnya berorientasi pada sektor padat karya, sehingga dampaknya terhadap peningkatan lapangan kerja formal relatif terbatas.
- Perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah menyebabkan penciptaan lapangan kerja formal belum merata, terutama di luar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama.
- Meningkatnya fleksibilitas kerja dan model kerja berbasis digital belum seluruhnya terakomodasi dalam skema formal ketenagakerjaan yang berlaku.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam rangka mencapai target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal, beberapa kendala telah teridentifikasi yang mempengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, pemerintah telah merancang serangkaian upaya perbaikan yang bertujuan untuk mengatasi masalah koordinasi, percepatan pelaksanaan program pemagangan, peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja, serta penyelesaian regulasi yang tertunda. Berikut adalah upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi:

- Mengingat ketidakoptimalan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, upaya perbaikan akan difokuskan pada penjadwalan koordinasi yang lebih terintegrasi sejak awal. Pemerintah juga akan menunjuk PIC (*Person in Charge*) untuk tiap kegiatan dan memanfaatkan teknologi rapat virtual untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antar lembaga, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk koordinasi.
- Mengatasi penundaan program pemagangan akibat terlambatnya penerbitan Permenaker, pemerintah akan segera menetapkan Kepmenaker dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diperlukan dan memastikan bahwa semua persiapan administrasi terkait program pemagangan sudah selesai lebih awal, sehingga program dapat diluncurkan sesuai jadwal tanpa hambatan regulasi yang menghalangi.
- Kendala sosial dan budaya yang menghambat partisipasi perempuan di pasar kerja, seperti beban ganda dalam pekerjaan domestik dan produktif, akan diatasi dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan beban kerja, seperti program cuti keluarga yang lebih inklusif dan fleksibilitas jam kerja. Selain itu, pelatihan keterampilan yang lebih banyak dan terfokus untuk perempuan akan diperluas untuk meningkatkan akses mereka ke sektor pekerjaan formal.
- Beberapa kebijakan penting, seperti revisi Perpres Program Kartu Prakerja, masih tertunda karena menunggu keputusan mengenai substansi yang akan dituangkan dalam peraturan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan mempercepat penyusunan regulasi yang

tertunda dengan penunjukan tim khusus untuk menyelesaikan revisi tersebut dan mempercepat implementasi program yang mendukung peningkatan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal. Dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, pemerintah dapat mencapai target yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung efisiensi dalam pencapaian target tersebut :

- Penggunaan teknologi seperti platform daring dan *video conference* memungkinkan koordinasi yang lebih efisien antar kementerian dan lembaga tanpa mengurangi kualitas. Hal ini mengurangi biaya perjalanan dan memastikan semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan.
- Penyederhanaan proses koordinasi teknis melalui pelaksanaan koordinasi teknis melalui forum lintas K/L yang telah eksisting, integrasi agenda penciptaan lapangan kerja formal ke dalam rapat sektoral rutin, dan pengurangan rapat ad hoc yang bersifat duplikatif.

- Sistem berbasis data dalam pengambilan keputusan memungkinkan pemerintah merespons dinamika pasar dengan langkah-langkah preventif dan responsif lebih cepat, tanpa menunggu laporan yang memakan waktu.
- Integrasi data ketenagakerjaan dan investasi melalui pemanfaatan data ketenagakerjaan, investasi, dan sektor usaha dari K/L teknis, pengolahan data secara terpadu untuk analisis kebijakan, penghindaran pengumpulan data primer yang memerlukan biaya tambahan sehingga dapat meningkatkan pengurangan duplikasi pengumpulan data dan peningkatan akurasi analisis.
- Penajaman fokus intervensi teknis melalui penentuan sektor prioritas penciptaan kerja formal berdasarkan analisis dampak, konsentrasi intervensi pada sektor dengan potensi serapan tenaga kerja tinggi, dan pembatasan ruang lingkup kegiatan teknis agar tetap relevan dengan IKU sehingga pemanfaatan sumber daya teknis secara tepat sasaran.
- Standarisasi proses kerja teknis melalui penggunaan pedoman dan standar operasional yang seragam, penyusunan format analisis dan pelaporan yang terstandar, dan meminimalkan penyesuaian teknis yang berulang.





B.4.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran. TPT mengukur persentase jumlah pengangguran yang aktif mencari pekerjaan dari total angkatan kerja dalam suatu wilayah atau negara pada periode tertentu. Angka TPT yang tinggi menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja yang tidak dapat terserap di pasar kerja cukup besar, yang dapat menjadi indikasi adanya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPT yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja berhasil terserap dalam pasar kerja, mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang sehat. TPT juga memberikan gambaran mengenai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menanggulangi pengangguran. Jika TPT tinggi, bisa jadi ada masalah struktural dalam perekonomian atau pasar tenaga kerja yang memerlukan perhatian dan kebijakan lebih lanjut.

Sebagai indikator makroekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka mencerminkan

kondisi perekonomian secara keseluruhan dan menjadi faktor penting dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pengangguran yang tinggi tidak hanya mengurangi kapasitas produktif tenaga kerja, tetapi juga dapat menghambat tercapainya tujuan sosial dan ekonomi negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pencapaian target TPT yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi sebuah ultimate outcome yang menunjukkan kinerja kebijakan ketenagakerjaan yang telah dijalankan. Dalam rangka mengurangi TPT, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

CAPAIAN KINERJA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

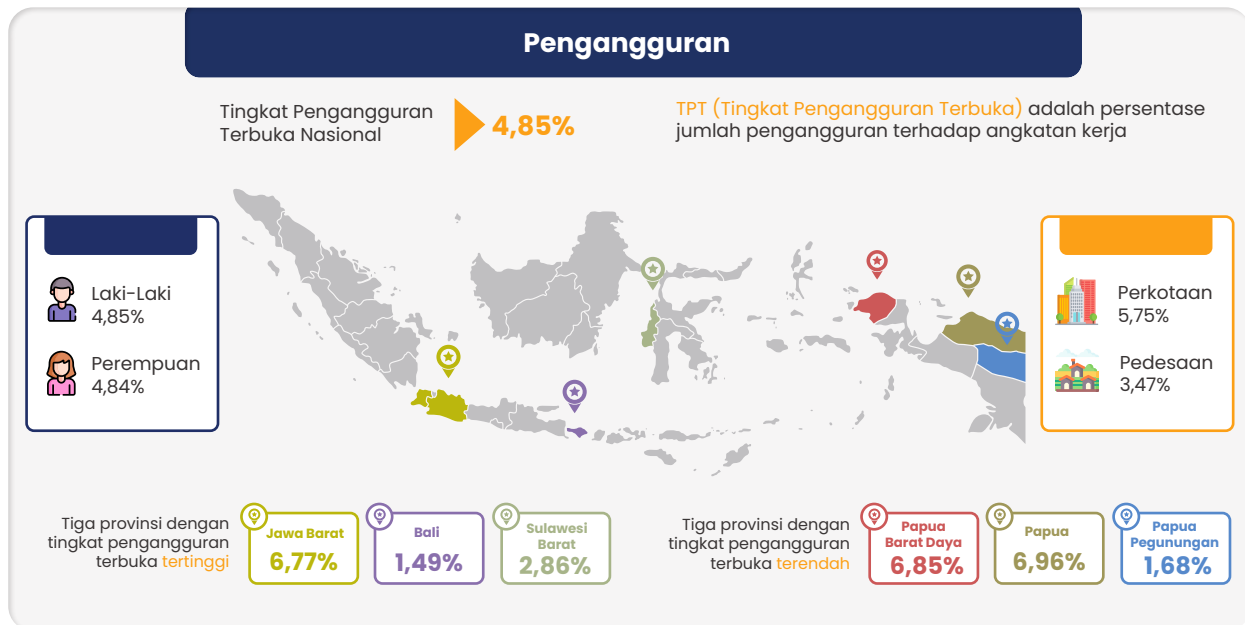
Target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka ini pada Tahun 2025 sebesar 4,5 – 5 persen, dimana data capaian kinerja terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sakernas. Berikut ini merupakan tabel capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025:

Tabel 3.17. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,5 – 5 %	4,85%	100%

Sepanjang Tahun 2025, proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia menunjukkan tren positif. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85% dan

berada di dalam rentang target Tahun 2025 sebesar 4,5 – 5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja Tahun 2025 telah tercapai yaitu sebesar 100%. Dalam proses pencapaian Target Tingkat Pengangguran Terbuka sepanjang Tahun 2025 yang berkualitas memerlukan dukungan dari berbagai indikator yang saling terkait.



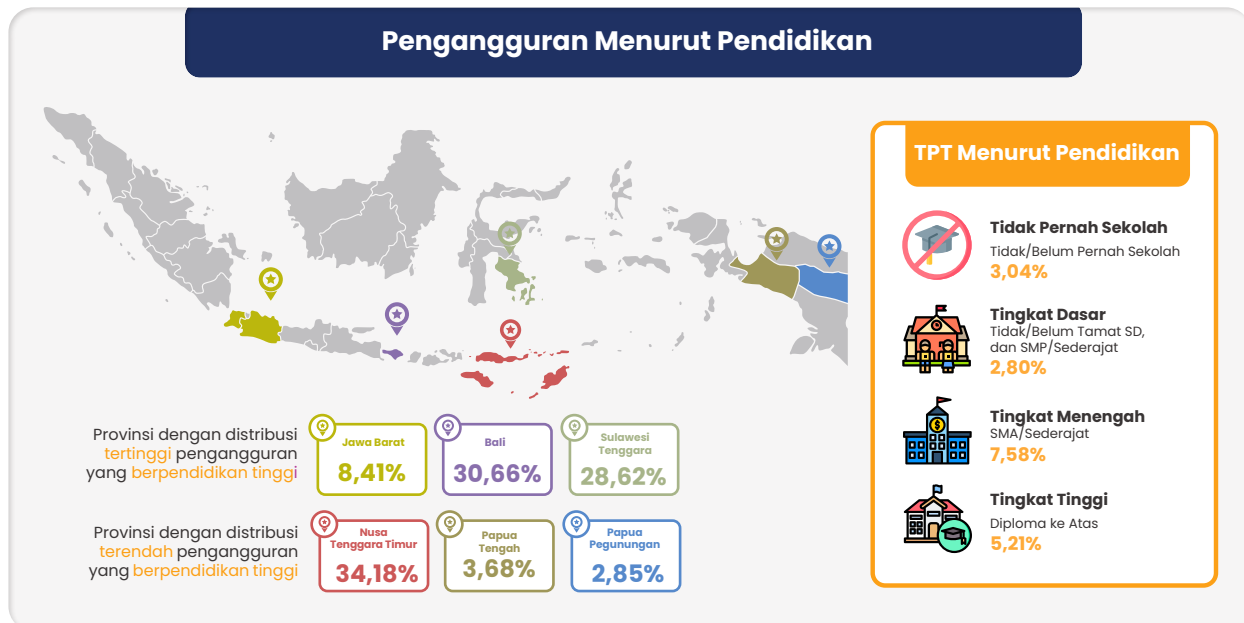
Sumber: Sakernas (2025)

Grafik pengangguran menunjukkan bahwa pada periode pengamatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional tercatat sebesar 4,85%. Angka ini mencerminkan proporsi penduduk dalam angkatan kerja yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi. Ditinjau dari jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 4,85 %, relatif sebanding dengan TPT perempuan yang berada pada 4,84 %, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan berada pada kisaran yang hampir setara secara nasional. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi, yakni sebesar 5,75 %, dibandingkan dengan wilayah pedesaan sebesar 3,47 %. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik pasar kerja perkotaan yang lebih kompetitif serta tingginya arus pencari kerja, termasuk lulusan baru, yang belum sepenuhnya terserap oleh lapangan kerja formal. Sebaliknya, wilayah pedesaan cenderung

memiliki tingkat pengangguran lebih rendah karena dominasi pekerjaan berbasis keluarga dan sektor informal, meskipun sering kali dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah.

Secara regional, terdapat variasi yang cukup signifikan antarprovinsi. Papua (6,96 %), Papua Barat Daya (6,85 %), dan Jawa Barat (6,77 %) tercatat sebagai provinsi dengan TPT tertinggi, yang mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Sementara itu, provinsi dengan TPT terendah adalah Bali (1,49%), Papua Pegunungan (1,68%), dan Sulawesi Barat (2,86 %), yang umumnya ditopang oleh aktivitas ekonomi berbasis sektor pariwisata, pertanian, dan kegiatan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran nasional berada pada level yang relatif terkendali, upaya

penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan masih perlu terus diperkuat, terutama di wilayah perkotaan dan provinsi dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor-sektor produktif menjadi kunci dalam menurunkan tingkat pengangguran secara berkelanjutan.



Sumber: Sakernas (2025)

Grafik pengangguran menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sangat dipengaruhi oleh karakteristik pendidikan tenaga kerja. Pengangguran tertinggi masih terkonsentrasi pada kelompok berpendidikan menengah, khususnya lulusan SMA/ sederajat sebesar 7,58 % dan SMK/ sederajat sebesar 5,21 %. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi lulusan pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja, terutama pada sektor formal yang semakin menuntut keterampilan spesifik dan adaptif.

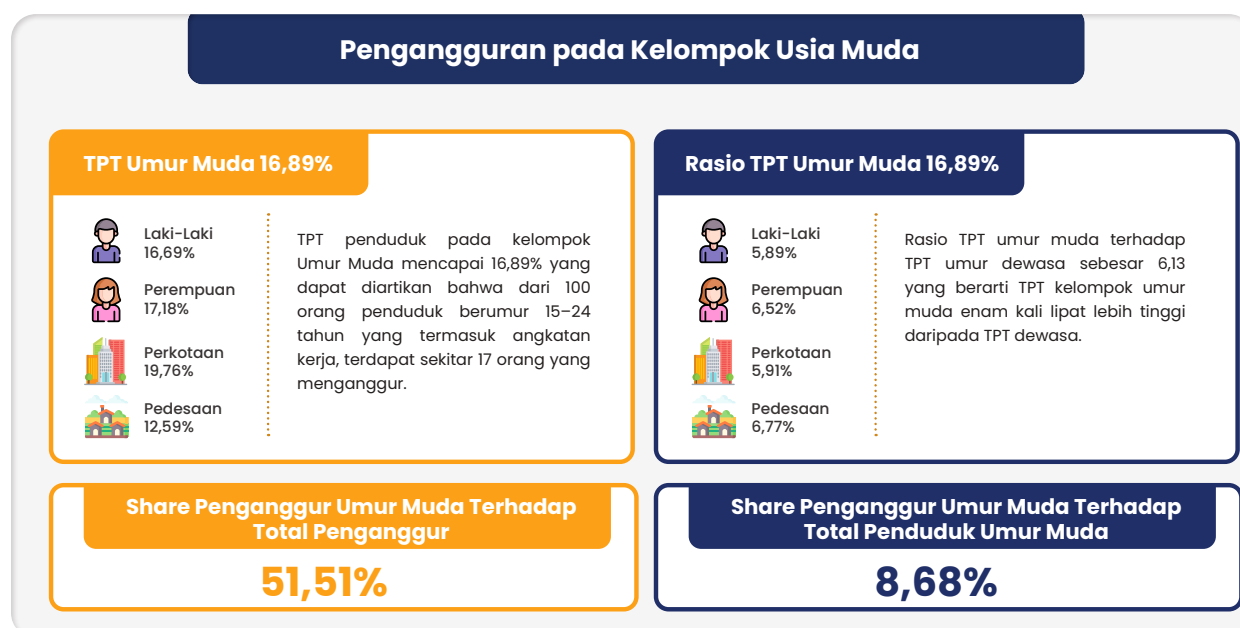
Sementara itu, TPT pada kelompok berpendidikan tinggi tercatat sebesar 5,21 %, yang menunjukkan bahwa meskipun pendidikan tinggi memberikan peluang kerja yang lebih baik, tantangan penyerapan lulusan perguruan tinggi masih

terap ada, khususnya bagi lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja. Di sisi lain, TPT terendah terdapat pada penduduk yang tidak pernah/ belum pernah sekolah (3,04 %) serta pendidikan dasar (2,80 %). Rendahnya TPT pada kelompok ini lebih mencerminkan keterlibatan mereka dalam sektor informal dan pekerjaan berbasis keluarga, bukan semata-mata kualitas penyerapan kerja yang tinggi.

Secara spasial, terdapat variasi distribusi pengangguran berpendidikan tinggi antarprovinsi. Nusa Tenggara Timur (34,18 %), Bali (30,66 %), dan Sulawesi Tenggara (28,62 %) tercatat sebagai provinsi dengan proporsi pengangguran berpendidikan tinggi yang relatif besar, yang mengindikasikan keterbatasan lapangan kerja berkualitas di daerah tersebut. Sebaliknya, Papua Pegunungan (2,85 %) dan Papua Tengah (3,68

%) menunjukkan proporsi yang lebih rendah, sejalan dengan struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer dan informal.

Hal ini dapat memperkuat capaian TPT nasional yang relatif terkendali, namun sekaligus menegaskan bahwa tantangan utama ke depan bukan hanya menurunkan angka pengangguran, melainkan meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penguatan link and match antara pendidikan dan dunia kerja, peningkatan kualitas pelatihan vokasi, serta penciptaan lapangan kerja produktif yang mampu menyerap lulusan pendidikan menengah dan tinggi secara berkelanjutan.



Sumber: Sakernas (2025)

Data pengangguran pada kelompok usia muda menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15–24 tahun masih relatif tinggi, yakni mencapai 16,89 %. Artinya, dari setiap 100 penduduk usia muda yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 17 orang yang belum terserap dalam pasar kerja. Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural dalam proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, terutama bagi angkatan kerja muda yang baru memasuki pasar tenaga kerja.

Secara demografis, TPT usia muda pada perempuan (17,18 %) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (16,69 %), yang menunjukkan masih

adanya kesenjangan akses dan peluang kerja bagi perempuan muda. Dari sisi wilayah, pengangguran usia muda lebih terkonsentrasi di perkotaan (19,76 %) dibandingkan perdesaan (12,59 %), sejalan dengan tingginya arus pencari kerja muda ke kawasan perkotaan yang tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Dibandingkan dengan kelompok usia dewasa, tingkat pengangguran usia muda jauh lebih tinggi. Rasio TPT usia muda terhadap TPT dewasa tercatat sebesar 6,13, yang berarti pengangguran pada kelompok usia muda enam kali lebih besar dibandingkan kelompok usia dewasa. Hal ini menegaskan bahwa usia muda merupakan kelompok paling rentan terhadap



pengangguran, khususnya pada fase awal memasuki pasar kerja.

Lebih lanjut, kontribusi penganggur usia muda terhadap total pengangguran nasional juga sangat signifikan. Sebesar 51,51 % dari total pengangguran nasional berasal dari kelompok usia muda, meskipun proporsi penduduk usia muda terhadap total penduduk hanya 8,68 %. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran nasional sangat terkonsentrasi pada kelompok usia muda, sehingga capaian TPT nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika penyerapan tenaga kerja pada kelompok usia ini. Secara keseluruhan, capaian TPT nasional perlu dipahami tidak hanya sebagai hasil agregat, tetapi juga sebagai refleksi dari tantangan struktural ketenagakerjaan usia muda. Oleh karena itu, pengendalian TPT ke depan memerlukan penguatan kebijakan yang berfokus pada peningkatan employability tenaga kerja muda, melalui penguatan pendidikan vokasi, perluasan program magang dan transisi kerja, serta penciptaan lapangan kerja produktif yang mampu menyerap angkatan kerja muda secara berkelanjutan.

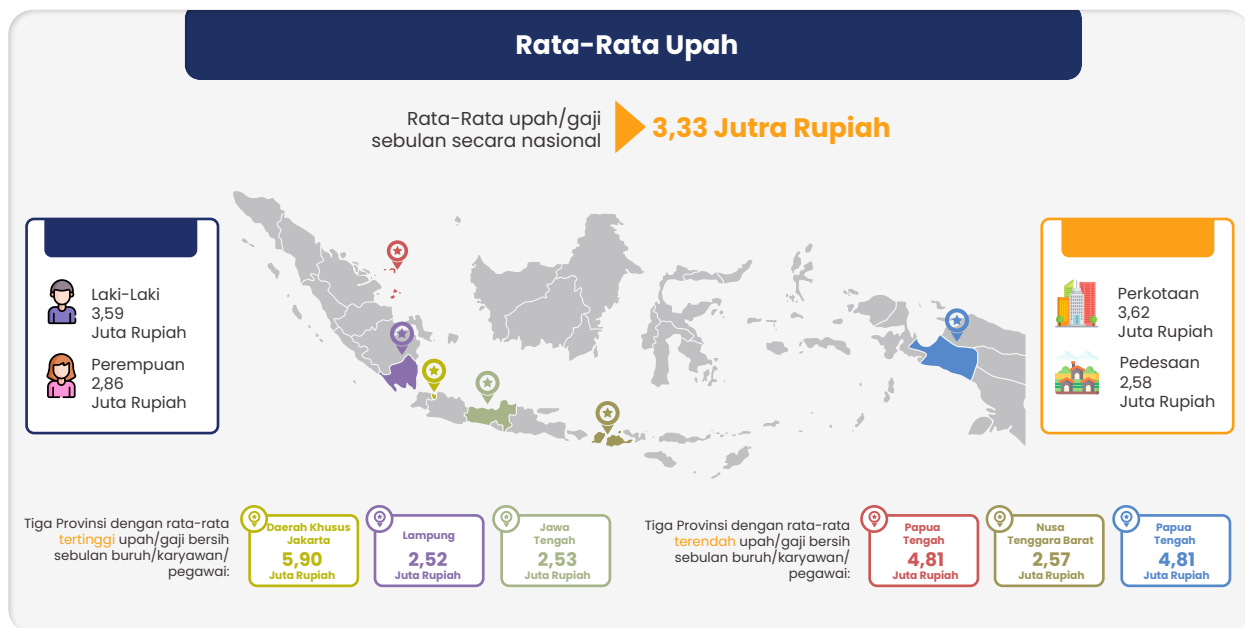
Sementara itu, apabila ditinjau dari sisi rata-rata pengupahan, perkembangan rata-rata upah/gaji bulanan nasional merupakan salah satu indikator penting yang berkaitan erat dengan dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada periode pengamatan, rata-rata upah nasional tercatat sebesar Rp3,33 juta per bulan, yang mencerminkan daya serap pasar tenaga kerja serta kualitas pekerjaan yang tersedia. Stabilitas dan peningkatan upah ini berperan dalam memperkuat insentif bagi angkatan kerja untuk tetap berpartisipasi dalam pasar kerja formal, sehingga turut mendukung penurunan TPT.

Dari sisi demografi, rata-rata upah pekerja laki-laki (Rp3,59 juta) masih lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan (Rp2,86 juta). Perbedaan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan upah berdasarkan gender, yang sekaligus menjadi tantangan struktural dalam penciptaan pasar kerja yang inklusif. Namun demikian, peningkatan kesempatan kerja yang lebih merata dan kebijakan afirmatif di sektor formal berpotensi memperkecil kesenjangan tersebut dan memperluas partisipasi angkatan kerja perempuan, yang pada akhirnya berkontribusi pada perbaikan TPT.

Secara spasial, rata-rata upah di wilayah perkotaan (Rp3,62 juta) lebih tinggi dibandingkan perdesaan (Rp2,58 juta). Kondisi ini sejalan dengan konsentrasi kegiatan ekonomi dan lapangan kerja formal di perkotaan. Meski demikian, penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, termasuk melalui pengembangan kawasan industri dan ekonomi lokal, menjadi strategi penting untuk memperluas kesempatan kerja produktif di luar perkotaan dan menekan tekanan pengangguran di wilayah urban.

Dari perspektif antarprovinsi, terdapat variasi yang cukup signifikan. DKI Jakarta, Papua, dan Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi dengan rata-rata upah tertinggi bagi buruh/karyawan/pegawai, mencerminkan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor bernilai tambah tinggi. Sementara itu, Lampung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat berada pada kelompok provinsi dengan rata-rata upah terendah. Perbedaan ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan ketenagakerjaan yang lebih berimbang antar wilayah guna menciptakan lapangan kerja berkualitas dan merata.

Secara keseluruhan, capaian rata-rata upah nasional yang relatif stabil dan menunjukkan perbaikan kualitas pekerjaan menjadi faktor pendukung dalam pengendalian TPT. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, disertai dengan penciptaan lapangan kerja formal dengan upah yang layak, akan memperkuat penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan dan menjaga TPT tetap dalam rentang sasaran nasional.



Sumber: Sakernas (2025)

UPAYA PENCAPAIAN TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 2025

Dalam rangka mencapai indikator ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal beberapa indikator turunan yang berkontribusi secara akumulasi dalam pelaksanaan program sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan. Berikut merupakan beberapa indikator kunci yang mendukung pencapaian target tersebut, antara lain adalah:

a. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Penguatan Pendapatan Per Kapita Laki-laki dan Perempuan

Salah satu indikator RPJMN 2025–2029 adalah Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP), yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian. PPLP tercantum dalam Prioritas Nasional 4, Program

Prioritas ke-19, dan menjadi indikator ke-6 yang mencerminkan capaian kesejahteraan berbasis gender. Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan merupakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan jenis kelamin kepala rumah tangga (L/P) yang dihitung berdasarkan paritas daya beli dengan mempertimbangkan perbedaan harga antar daerah dan pembobotan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2023, capaian pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp 16.736 ribu, sedangkan perempuan mencapai Rp 9.579 ribu. Sementara pada tahun 2025 tingkat pengeluaran tersebut diharapkan dapat meningkat dengan target sebesar Rp 16.891 ribu (laki-laki) dan Rp 9.920 ribu (perempuan). Selanjutnya pada tahun 2029 ditargetkan mencapai Rp 17.899 ribu (laki-laki)



dan Rp 10.603 ribu (perempuan). Peningkatan pengeluaran per kapita baik laki-laki maupun perempuan diharapkan meningkat dari tahun 2025 hingga 2029

Apabila merujuk ke definisi dari indikator ini maka faktor pembeda pengeluaran berdasarkan gender tersebut adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki maupun perempuan. Di mana secara historis TPAK laki-laki lebih besar dari perempuan. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki mencapai 84,66%, sementara perempuan hanya 56,42%. Maka peningkatan pengeluaran per kapita berdasarkan gender tentu akan mengalami peningkatan bila ekonomi (PDB) meningkat. Namun, untuk meningkatkan pengeluaran per kapita perempuan diperlukan upaya lebih karena TPAK-nya yang masih rendah.

Bauran Kebijakan Pendongkrak Pendapatan Perempuan dan Laki-Laki Paket Stimulus Ekonomi: Insentif Pajak PPh 21 DTP

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal pelaksanaan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5. Dalam komponen “4 Program Keberlanjutan”, pemerintah memperpanjang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pendapatan Laki-laki & Perempuan melalui penghilangan potongan pajak penghasilan. Hal ini secara langsung meningkatkan *disposable income* (pendapatan yang siap dibelanjakan) individu, yang berkontribusi pada kenaikan pendapatan per kapita di tingkat rumah tangga.

Paket Stimulus Ekonomi: Penyerapan Tenaga Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal pelaksanaan paket stimulus ekonomi 8+4+5. Dalam komponen “5 Program Penyerapan Tenaga Kerja”, fokus diberikan pada modernisasi sektor primer diantaranya (1) **Revitalisasi Tambak & Kapal Nelayan:** Dominan menyerap tenaga kerja laki-laki untuk meningkatkan produktivitas hasil laut, dan (2) **Perkebunan Rakyat:** Membuka jutaan lapangan kerja yang melibatkan unit keluarga (laki-laki dan perempuan) dalam rantai pasok hilirisasi komoditas.

Pengendalian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong berbagai pelaksanaan program pemberdayaan perempuan lintas Kementerian dan Lembaga yaitu (1) Literasi Digital (Kemenkominfo): Program Digital Talent Academy dan Pandu Literasi Digital menjangkau ribuan peserta, termasuk perempuan, untuk meningkatkan keterampilan digital, (2) Literasi Keuangan (OJK): Program “Gencarkan” menjangkau 187.140 perempuan melalui 1.535 kegiatan edukasi keuangan hingga Mei 2025, (3) Pemberdayaan UMKM (Kemen UMKM): Program LAKSMI dan Entrepreneur Hub mendukung UMKM perempuan, meskipun belum sepenuhnya spesifik untuk Perempuan, (4) *Care Economy* (KPPPA): Program Rumah Bersama Indonesia dan peta jalan ekonomi perawatan memperkuat partisipasi perempuan, (5) Pariwisata Halal (Kemenpar): Pelatihan pemandu wisata dan digital marketing melibatkan 35–45% peserta Perempuan, (6) Ekonomi Inklusif (Bank Indonesia): Program

Strive Indonesia menargetkan 300.000 UMKM, dengan 190.000 tercapai hingga 2025, banyak melibatkan perempuan.

Implementasi *Care Economy Industry*

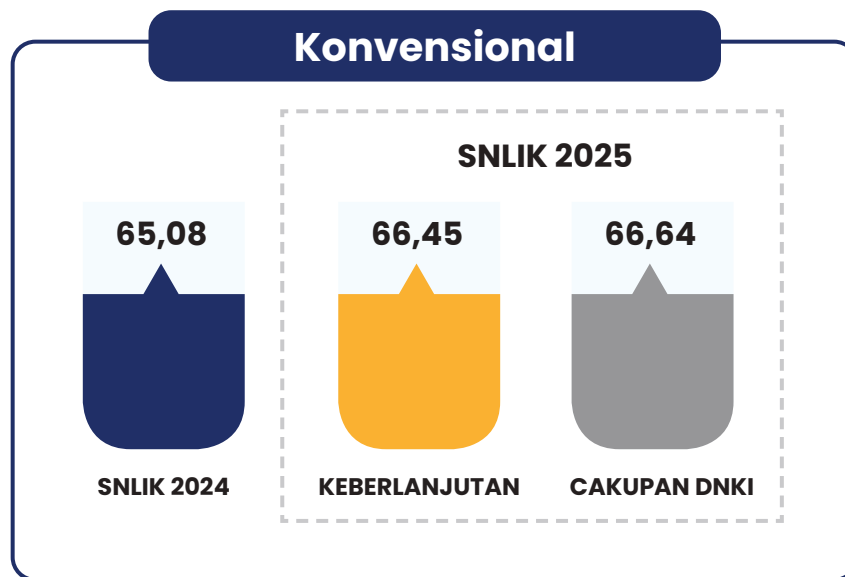
Care economy industry atau yang disebut dengan ekonomi perawatan merupakan salah satu sektor yang dapat dioptimalisasikan dalam meningkatkan pendapatan perkapita laki-laki dan perempuan. Sektor ini yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang diharapkan dapat menghasilkan *outcome* berupa peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan perluasan lapangan kerja di sektor perawatan bagi perempuan dan laki-laki. Kebijakan ekonomi perawatan ini sangat menunjang upaya penghapusan kesenjangan gender dan mendobrak budaya patriarki melalui penguatan kapasitas perempuan, pembagian kerja perawatan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dan peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.

b. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Tingkat Literasi Keuangan **Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Tingkat Literasi Keuangan Konvensional**

Tingkat Literasi Keuangan Konvensional mengukur kemampuan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan konvensional. Literasi ini sangat penting dalam mendukung pengurangan tingkat pengangguran terbuka karena memberikan individu kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih baik, membuat keputusan investasi yang tepat, dan mengakses peluang

kredit yang dapat mendukung kewirausahaan. Masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang peluang ekonomi yang tersedia, termasuk akses ke dana atau kredit yang dapat digunakan untuk memulai usaha atau mendapatkan pelatihan keterampilan yang relevan, sehingga mengurangi pengangguran.

Peningkatan literasi keuangan konvensional secara nasional tercatat mengalami dinamika positif: hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan meningkat menjadi sekitar 66,46 %, meningkat dari tingkat sebelumnya, dan indeks inklusi keuangan juga meningkat menjadi 80,51 %. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat semakin memahami, mengakses, dan menggunakan produk serta layanan keuangan konvensional secara lebih luas. Dengan begitu, peningkatan literasi keuangan konvensional berperan penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mendorong penurunan TPT karena masyarakat yang lebih cerdas secara finansial memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, serta memiliki kemampuan untuk meraih peluang kerja dan kewirausahaan yang lebih luas. Pemberdayaan ini mengurangi hambatan dalam pasar tenaga kerja, membuka peluang lebih banyak bagi individu untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Peningkatan tingkat literasi keuangan konvensional juga berperan dalam mengembangkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memfasilitasi akses kepada informasi keuangan yang lebih luas, individu dapat lebih mudah memanfaatkan berbagai peluang usaha atau pekerjaan, serta memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan Tingkat Literasi Keuangan Konvensional dapat menjadi faktor pendukung yang penting untuk mencapai penurunan tingkat pengangguran terbuka, karena meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik dan keterampilan finansial yang lebih kuat.

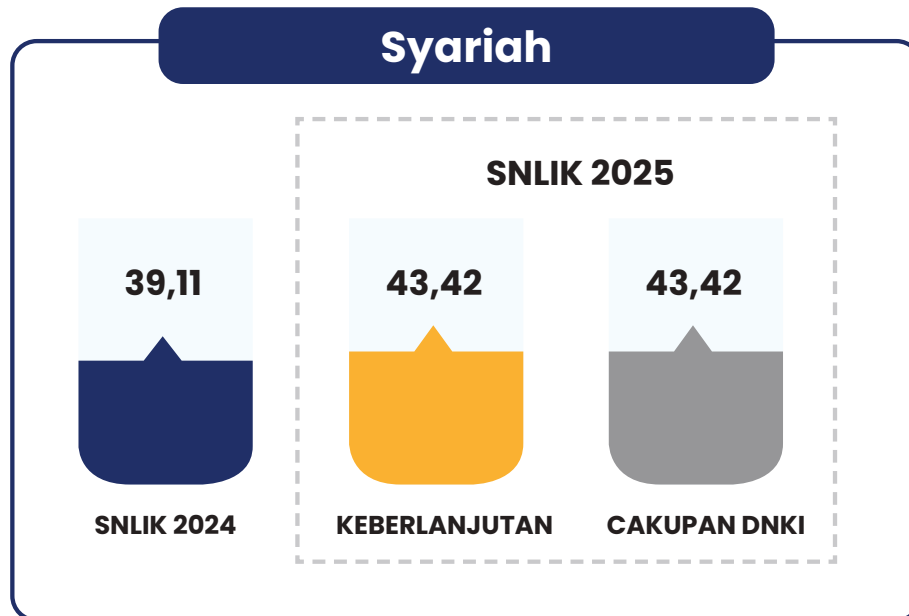
Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Literasi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap serta perilaku individu dalam mengelola

keuangan syariah. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Salah satu cara untuk mengukur tingkat literasi ini adalah melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini berperan penting dalam mengevaluasi sejauh mana masyarakat memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 dan 2025 yang ditampilkan pada gambar, terdapat peningkatan signifikan dalam literasi keuangan syariah. Pada Tahun 2024, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 39,11%, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah masih terbatas. Namun, pada SNLIK Tahun 2025, terjadi peningkatan

yang signifikan dengan indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,42%, yang menunjukkan bahwa pemahaman dan adopsi masyarakat terhadap produk keuangan syariah semakin berkembang.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Pencapaian literasi keuangan syariah memiliki relevansi langsung dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka secara lebih efisien dan bijak, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kemampuan untuk berwirausaha. Individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik akan lebih mampu memanfaatkan peluang usaha, mengelola risiko dengan lebih baik, dan mengakses berbagai produk keuangan syariah yang mendukung kegiatan ekonomi mereka. Hal ini turut berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka, karena semakin banyak orang yang beralih ke sektor wirausaha atau terlibat dalam ekonomi produktif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan

syariah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, dengan fokus pada pengurangan pengangguran melalui peningkatan keterampilan keuangan yang relevan.

Bauran Kebijakan Pendongkrak Tingkat Literasi Keuangan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif mengamanatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Sebagai Ketua Harian DNKI, pada awal Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penguatan arah program 7 kelompok kerja. Ketujuh kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut:



1. Pokja Edukasi Keuangan	2. Pokja Hak Properti Masyarakat	3. Pokja Fasilitas Transaksi Ekonomi
• Tugas: Meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai produk serta layanan keuangan formal. • Fokus: Sosialisasi cara mengelola keuangan dan pengenalan risiko produk keuangan agar masyarakat tidak terjebak investasi bodong atau pinjol ilegal.	• Tugas: Mempercepat proses sertifikasi tanah dan aset masyarakat. • Fokus: Membantu masyarakat agar memiliki aset yang <i>bankable</i> (dapat dijadikan agunan) guna mendapatkan akses pembiayaan dari bank.	• Tugas: Mendorong digitalisasi pembayaran dan perluasan agen bank (Laku Pandai). • Fokus: Memastikan masyarakat di daerah terpencil bisa melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang (elektronifikasi transaksi).

4. Pokja Pemetaan Informasi Keuangan	5. Pokja Kebijakan dan Regulasi	6. Pokja Perantara dan Saluran Distribusi	7. Pokja Perlindungan Konsumen
• Tugas: Menyediakan data dan sistem informasi mengenai profil masyarakat yang <i>unbanked</i>. • Fokus: Membantu lembaga keuangan dalam memetakan potensi nasabah baru dan mempermudah verifikasi data calon debitur.	• Tugas: Menyusun rancangan regulasi dan harmonisasi aturan antar lembaga. • Fokus: Memastikan kebijakan dari BI, OJK, dan Kementerian terkait sinkron dalam mendukung target inklusi keuangan (seperti penyederhanaan syarat pembukaan rekening).	• Tugas: Memperkuat lembaga keuangan mikro (LKM), koperasi, dan peran BUMDes. • Fokus: Memperbanyak “pintu masuk” layanan keuangan di tingkat desa agar lebih dekat dengan masyarakat.	• Tugas: Menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa keuangan. • Fokus: Menyusun mekanisme pengaduan nasabah dan memastikan lembaga keuangan menerapkan prinsip transparansi serta perlakuan yang adil.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara rutin menyelenggarakan Forum Koordinasi melalui Rapat Koordinasi per Pokja atau lintas Pokja. Beberapa program yang sudah dilaksanakan dibawah koordinasi Dewan Nasional Inklusi Keuangan di Tahun 2025 adalah:

- Akselerasi Kepemilikan Akun Bank**

Program akselerasi kepemilikan akun bank difokuskan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya bagi kelompok *unbanked* dan *underbanked* seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, perempuan, dan masyarakat di wilayah terpencil. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan perbankan, lembaga

keuangan, serta pemerintah daerah untuk mendorong pembukaan rekening secara massal dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya terjangkau. Akselerasi ini juga diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial non-tunai, pembiayaan UMKM, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara berkelanjutan.

- Edukasi Keuangan**

Edukasi keuangan pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai program strategis yang menasar kelompok masyarakat rentan dan pelaku ekonomi kecil. Kegiatan ini meliputi peluncuran dan sosialisasi Program PINTAR dalam Pengentasan Kemiskinan, yang bertujuan

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk keuangan formal, serta perencanaan keuangan yang sehat. Selain itu, edukasi keuangan juga diberikan kepada anggota koperasi wanita untuk memperkuat kapasitas pengelolaan usaha dan keuangan keluarga, serta melalui sosialisasi Program Pembiayaan Ultra Mikro guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap akses pembiayaan yang legal, aman, dan berkelanjutan. Edukasi ini diharapkan dapat mendorong penggunaan produk keuangan secara lebih bijak dan produktif.

- **Penguatan Penyaluran bagi UMKM**

Penguatan penyaluran pembiayaan bagi UMKM diarahkan untuk meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan formal, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Di bawah koordinasi DNKI, upaya ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan pembiayaan UMKM, penguatan skema kredit dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha. Program ini juga mendorong pemanfaatan skema pembiayaan inklusif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro, guna memperluas jangkauan pembiayaan dan mendukung peningkatan skala usaha UMKM.

- **Penguatan Lembaga Keuangan Mikro di Pesantren**

Penguatan lembaga keuangan mikro di pesantren bertujuan untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat dan perluasan inklusi keuangan berbasis komunitas. Kegiatan

ini difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta literasi keuangan pengelola lembaga keuangan mikro di lingkungan pesantren. Melalui penguatan ini, lembaga keuangan mikro pesantren diharapkan mampu menyediakan layanan keuangan yang inklusif, mendukung pembiayaan usaha santri dan masyarakat sekitar, serta berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

- **Inisiasi Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI**

Inisiasi perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 dilakukan untuk memperkuat efektivitas tata kelola DNKI dalam menghadapi dinamika dan tantangan inklusi keuangan yang semakin kompleks. Perubahan ini diarahkan untuk menyesuaikan tugas, fungsi, serta susunan keanggotaan Kelompok Kerja DNKI agar lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan kebijakan nasional. Dengan penyempurnaan regulasi ini, diharapkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berdampak nyata bagi peningkatan inklusi keuangan nasional.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan dalam mencapai target pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada Tahun 2025 menunjukkan upaya signifikan dari pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Capaian kinerja pengangguran terbuka yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang optimal dalam



mengurangi pengangguran. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong tercapainya hasil tersebut, antara lain:

- Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan melalui regulasi ketenagakerjaan. Selama periode tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang mendukung terciptanya perlindungan tenaga kerja dan penguatan ekosistem ketenagakerjaan. Beberapa regulasinya antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, PP Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), dan PP 36/2025 tentang Perubahan atas PP 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025.
- Pencapaian TPT yang lebih rendah dari target disebabkan oleh efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kebijakan yang terkoordinasi dengan baik menghasilkan program-program yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor strategis.
- Monitoring pelaksanaan penyaluran Bantuan Subsidi Upah, dan Pemanfaatan program jaminan kehilangan pekerjaan.
- Upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan program pendidikan teknis juga berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran. Program ini memastikan tenaga kerja siap untuk memasuki pasar kerja, terutama di sektor industri dan jasa yang berkembang pesat.
- Keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk

memastikan setiap kebijakan dan anggaran bergerak ke arah tujuan pembangunan yang sama sehingga mempercepat pencapaian target.

- Penciptaan lapangan kerja yang signifikan terjadi melalui berbagai proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah. Proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor konstruksi.
- Stabilitas ekonomi yang tercipta melalui kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja. Sektor manufaktur dan perdagangan menjadi sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja formal, memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan pengangguran.
- Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif mendorong peningkatan aktivitas produksi dan investasi, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
- Meningkatnya realisasi investasi, baik PMDN maupun PMA, khususnya pada sektor padat karya, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru.
- Implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta fleksibilitas pasar tenaga kerja berperan penting dalam menurunkan TPT.
- Sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama bagi angkatan kerja baru.
- Program pelatihan, peningkatan keterampilan, dan fasilitasi penempatan kerja membantu mengurangi mismatch tenaga kerja dan mempercepat penyerapan tenaga kerja.

- Pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif, serta ekonomi digital membuka peluang kerja baru dan menyerap tenaga kerja lintas tingkat keterampilan.
- Pertumbuhan angkatan kerja yang dapat diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru akan berdampak positif terhadap penurunan TPT.
- Kemampuan perekonomian nasional dalam merespons guncangan global turut menentukan stabilitas pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Kendala yang Terjadi Selama Pencapaian Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat pengangguran terbuka, sejumlah tantangan signifikan telah dihadapi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program-program yang dirancang untuk mengurangi pengangguran. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan mempercepat penciptaan lapangan kerja, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selama periode Januari s.d. Desember 2025 terdapat 88.519 orang tenaga kerja ter-PHK yang mencapai 63.947 orang per Oktober 2025 (Satu Data Kemnaker). Kondisi ini menjadi pertanda terjadinya perlambatan pada sektor-sektor produktif. Kejadian ini didominasi oleh sektor manufaktur di wilayah sentra industri seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran tenaga kerja ke sektor informal dengan nilai tambah rendah. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah, yang belum merata membatasi kemampuan masyarakat

dalam mengakses pembiayaan usaha dan peluang kerja produktif.

- Fenomena *Skills Mismatch*, terjadi ketika dunia pendidikan seringkali tidak selaras dengan kebutuhan industri yang berkembang sangat cepat. Di lapangan, masih banyak lulusan SMK atau Perguruan Tinggi memiliki keahlian yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri digital dan otomasi saat ini. Hal ini berdampak pada angka pengangguran yang didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan tinggi (pengangguran terdidik).
- Sektor informal yang masih dominan, hal ini terjadi dikarenakan struktur pasar kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal yang rentan. Di lapangan, lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal (pedagang kaki lima, pekerja lepas, dll). Hal ini mengakibatkan pekerja informal tidak terhitung sebagai pengangguran terbuka, namun mereka memiliki produktivitas rendah dan penghasilan tidak stabil.
- Hambatan Investasi di Sektor Padat Karya, Tren Investasi belakangan ini cenderung bersifat Padat Modal (seperti *smelter* atau pusat data) daripada Padat Karya (seperti tekstil atau sepatu). Hal ini berakibat pada Nilai investasi yang tinggi namun penyerapan tenaga kerja lebih sedikit apabila dibandingkan dengan industri manufaktur tradisional.
- Terbatasnya akses informasi dan edukasi literasi keuangan, khususnya di wilayah non-perkotaan dan kelompok rentan, menghambat pemanfaatan instrumen keuangan untuk peningkatan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja.
- Kompleksitas produk keuangan serta perbedaan prinsip antara keuangan konvensional dan syariah menyulitkan



masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang mendukung kemandirian ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam rangka mencapai target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, telah teridentifikasi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan literasi keuangan konvensional dan syariah sebagai instrumen pendukung peningkatan akses pembiayaan, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Kendala tersebut mencakup keterbatasan pemahaman masyarakat, akses edukasi yang belum merata, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah merancang serangkaian upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan literasi keuangan yang terintegrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut adalah upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- Meningkatkan program literasi keuangan terpadu yang mengaitkan pemahaman keuangan konvensional dan syariah dengan akses pembiayaan usaha, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja.
- Meningkatkan koordinasi lintas kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah agar kebijakan investasi, industri, ketenagakerjaan, dan UMKM saling terintegrasi dan berorientasi pada perluasan kesempatan kerja.
- Mengarahkan kebijakan dan insentif agar investasi yang masuk lebih berfokus pada sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja tinggi, khususnya industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- Memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan

industri melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja dan peningkatan program *reskilling* dan *upskilling*.

- Mendukung pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, termasuk kewirausahaan, UMKM, dan ekonomi digital, sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru.
- Mendorong harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perizinan usaha guna meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong penciptaan lapangan kerja formal.
- Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan program penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal dan karakteristik wilayah.
- Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dengan fokus pada dampak nyata terhadap penurunan TPT.
- Meningkatkan komunikasi kebijakan kepada pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
- Memperluas jangkauan edukasi literasi keuangan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, khususnya di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi
- Menyederhanakan materi literasi keuangan agar lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pencari kerja, pelaku UMKM, dan wirausaha pemula.
- Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi literasi keuangan yang terintegrasi dengan program peningkatan keterampilan kerja dan pemagangan.

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaksana literasi keuangan melalui pelatihan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
- Memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan program literasi keuangan dengan kebijakan penurunan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja
- Upaya penurunan TPT difokuskan pada sektor-sektor dengan potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga intervensi kebijakan lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan.
- Pembahasan isu ketenagakerjaan dilakukan melalui forum koordinasi rutin, sehingga tidak memerlukan pembentukan forum baru atau kegiatan tambahan yang berbiaya tinggi.
- Melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, pemerintah dapat memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja secara lebih efisien. Program pelatihan berbasis kebutuhan industri meminimalkan pemborosan dan memastikan tenaga kerja yang dilatih dapat langsung diserap oleh sektor yang membutuhkan.
- Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program penciptaan lapangan kerja dengan model pendanaan yang efisien, meminimalkan pemborosan administrasi dan mengutamakan investasi pada proyek yang memiliki dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Program-program tersebut juga disesuaikan dengan potensi sektor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.
- Dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, seperti sektor konstruksi dan manufaktur, pemerintah dapat memfokuskan upaya penciptaan lapangan kerja pada sektor-sektor tersebut. Ini mengurangi pemborosan sumber daya yang seharusnya diarahkan untuk sektor dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), efisiensi dalam penggunaan sumber daya memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan hasil yang optimal dengan biaya yang terkendali. Pemerintah telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk memaksimalkan hasil dengan meminimalkan pemborosan, baik dari segi anggaran, waktu, maupun sumber daya manusia. Beberapa faktor yang mendukung efisiensi dalam mencapai target kinerja TPT adalah:

- Penggunaan teknologi, seperti sistem berbasis digital untuk monitoring dan pelaporan data, memungkinkan pengumpulan informasi lebih cepat dan akurat. Hal ini mempermudah pemerintah dalam memantau perkembangan pasar kerja dan membuat keputusan yang lebih cepat tanpa memerlukan banyak sumber daya.
- Pemantauan difokuskan pada sektor dan wilayah yang memiliki risiko peningkatan pengangguran, sehingga alokasi waktu dan sumber daya lebih proporsional.
- Koordinasi lintas K/L dilakukan dengan penyederhanaan proses administrasi, sehingga efektivitas kebijakan dapat dicapai tanpa meningkatkan beban birokrasi.



B.5 SASARAN STRATEGIS 4: **TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEREKONOMIAN YANG BERKUALITAS**

Dalam rangka menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas diarahkan untuk mewujudkan kebijakan kementerian yang berkualitas, selaras, dan efektif, khususnya melalui penguatan proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Sasaran ini mencerminkan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengampu fungsi koordinatif yang memastikan agar kebijakan sektoral yang dirumuskan oleh kementerian teknis berjalan searah dengan tujuan pembangunan nasional serta tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Dengan demikian, kualitas kebijakan kementerian tidak hanya dilihat dari keluaran regulasi, tetapi juga dari keterpaduan proses perumusan dan implementasinya.

Dalam pelaksanaannya, sasaran strategis tersebut menekankan pentingnya keselarasan kebijakan lintas sektor dalam mendukung agenda strategis perekonomian nasional, termasuk penguatan industri, perdagangan, investasi, energi, ketahanan ekonomi, serta transformasi ekonomi digital. Melalui proses koordinasi yang efektif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memastikan bahwa kebijakan kementerian teknis disusun berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi secara komprehensif, dibahas melalui forum lintas kementerian/lembaga, serta dikawal pelaksanaannya agar konsisten dengan kebijakan makro dan prioritas nasional. Dengan demikian,

dalam mengukur pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas”, ditetapkan Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian.

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian digunakan untuk menilai keberhasilan proses koordinasi kebijakan yang dilakukan, mencakup tahapan identifikasi permasalahan kebijakan, penyusunan alternatif rekomendasi, formulasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Melalui pengukuran indeks tersebut, diperoleh gambaran objektif mengenai kualitas proses kebijakan kementerian yang dikoordinasikan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan peran koordinatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola kebijakan kementerian melalui koordinasi yang lebih terstruktur, responsif, dan akuntabel. Dengan tercapainya sasaran ini, kebijakan kementerian yang dihasilkan tidak hanya selaras secara substansi, tetapi juga efektif dalam implementasi dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional.

B.5.1

INDEKS EFEKTIVITAS SINKRONISASI, KOORDINASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Dalam upaya mewujudkan perekonomian yang unggul, sinergi dan kolaborasi dari seluruh sektor

terkait merupakan prasyarat yang tidak dapat dihindarkan. Namun demikian, dalam praktiknya masih kerap dijumpai kurangnya keselarasan antar sektor yang berpotensi menghambat perbaikan kondisi perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan peran pengkoordinasian yang kuat untuk menyatukan langkah dan mengarahkan kinerja seluruh sektor perekonomian secara terpadu. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan tugas sebagai berikut:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/ lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- i. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. serta fungsi lain sebagaimana tertera pada peraturan presiden dimaksud. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 ini sebagai dasar penetapan Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai entitas bidang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

CAPAIAN KINERJA INDEKS EFEKTIVITAS SINKRONISASI, KOORDINASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan Perekonomian atau Indeks SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Perekonomian. Proses



sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui 4 proses tahapan yakni: Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Selain itu, indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bisnis yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (kedeputan). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain:

- Tahapan 1: Pada tahapan ini dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait kebijakan perekonomian dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun kedepan.
- Tahapan 2: Pada tahapan ini dilakukan penyusunan alternatif rekomendasi yang berisikan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk

menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama.

- Tahapan 3: Pada Tahapan ini dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan.
- Tahapan 4: Pada tahapan ini evaluasi dan monitoring kebijakan dilakukan terhadap rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dalam proses sinkronisasi dan koordinasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi kebijakan dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Selanjutnya, dengan didasarkan pada perhitungan realisasi persentase keberhasilan Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan Perekonomian pada 5 sektor berikut ini, maka Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diperoleh sebesar:

Tabel 3.18. Capaian Tingkat Efektivitas SKP Kebijakan Perekonomian Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3,4	113,3%

Berikut ini merupakan penjabaran dari Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang didasarkan pada 5 (lima) bauran kebijakan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

Tabel 3.19. Capaian Bauran Tingkat Efektivitas SKP Kebijakan Perekonomian Tahun 2025

Kategori Program Kebijakan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Persentase Keberhasilan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengelolaan dan pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara	3 dari 4	3	100
Persentase Keberhasilan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4	3	100
Persentase Keberhasilan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3	100
Persentase Keberhasilan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	4	120
Persentase Keberhasilan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	4	120
Indeks Total Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian		3,4	113,3%

Nilai tersebut diperoleh dengan ditentukan melalui sejauh mana unit kerja melaksanakan suatu kebijakan dan sampai pada tahapan berapa sehingga capaian itu yang akan di klaim sebagai nilai yang diperoleh. Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Ekonomi yang Berkualitas yang digunakan untuk melihat bagaimana peran tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Sasaran strategis ini merujuk kepada 5 sektor kategori kebijakan dari Kementerian yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET INDEKS EFEKTIVITAS SINKRONISASI, KOORDINASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

a. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara

Program Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha

Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan keterpaduan kebijakan lintas kementerian/lembaga serta efektivitas pelaksanaan program strategis BUMN. Sebagai alat ukur kinerja, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan proses koordinasi kebijakan di bidang perekonomian.

Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dinilai efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah melalui empat tahapan utama, yaitu Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup antara lain rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, serta



dokumen kebijakan pendukung seperti kertas posisi, buku putih, dan dokumen relevan lainnya. Dalam lingkup Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, berbagai isu strategis yang menjadi objek pengukuran indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:

1. Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Penyelesaian Penugasan Pemerintah
4. Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di dalam lingkup Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah dilaksanakan sinkronisasi kebijakan pada berbagai sektor strategis sebagai berikut:

- Sinkronisasi kebijakan pengembangan BUMN di bidang pariwisata, khususnya dalam penyelenggaraan event strategis nasional dan penguatan konektivitas destinasi pariwisata super prioritas;
- Sinkronisasi kebijakan pengembangan BUMN di bidang telekomunikasi melalui pengendalian dan koordinasi investasi perluasan jaringan telekomunikasi;
- Sinkronisasi pembentukan *Integrated Bullion Market Association* (IBMA) dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem bullion nasional;
- Sinkronisasi kebijakan pengembangan *bioetanol* sebagai bahan bakar nabati untuk mendukung transisi energi;

- Sinkronisasi kebijakan hilirisasi mineral, khususnya pembangunan *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) Fase I;
- Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program strategis BUMN bidang energi dan sumber daya mineral;
- Sinkronisasi kebijakan penguatan ketersediaan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN.
- Sinkronisasi kebijakan pengembangan industri baja nasional oleh BUMN.
- Sinkronisasi kebijakan peningkatan sumber bahan baku berbasis tebu guna mendukung ketahanan industri agro.
- Sinkronisasi kebijakan integrasi transportasi multimoda untuk meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional.
- Sinkronisasi kebijakan kerja sama antar-daerah dalam mendorong pengembangan infrastruktur dan logistik daerah.
- Sinkronisasi kebijakan inovasi pembiayaan daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
- Sinkronisasi kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat (KUA), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
- Sinkronisasi kebijakan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion.
- Sinkronisasi dan pengendalian kebijakan stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis, melalui penguatan peran dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID).
- Sinkronisasi kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil yang berorientasi pada nilai tambah dan padat karya.

- Sinkronisasi kebijakan sektor eksternal, termasuk penguatan neraca transaksi berjalan serta antisipasi dampak kebijakan eksternal seperti tarif ekspor-impor negara mitra dagang dan dinamika geopolitik global.
 - Sinkronisasi kebijakan digitalisasi daerah melalui peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mendorong efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik.
 - Selanjutnya untuk mendukung capaian efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN telah melaksanakan berbagai kegiatan kebijakan, antara lain:
 - Koordinasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN melalui rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan dialog kinerja dengan Kementerian BUMN.
 - Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan BUMN, termasuk penyelarasan target, indikator, dan tindak lanjut kebijakan strategis.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan BUMN secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi.
 - Penguatan mekanisme pengendalian kebijakan, melalui penajaman agenda koordinasi dan pemanfaatan forum koordinasi yang lebih terstruktur.
 - Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung komunikasi, koordinasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan koordinasi.
 - Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
- b. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi**
- Program Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan program sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun pembahasan isu strategis yang termasuk koordinasi di lingkup bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sebagai berikut:
- Penyelesaian berbagai kesepakatan perdagangan internasional, termasuk *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).
 - Koordinasi dan tindak lanjut kesepakatan pada forum kerja sama ekonomi bilateral dan regional yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 - Pengendalian dan pengawalan implementasi kerja sama ekonomi bilateral dan regional untuk memastikan kesesuaian dengan kepentingan nasional serta komitmen yang telah disepakati.
 - Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam proses penyusunan Initial Memorandum OECD, termasuk penyusunan narasi posisi Indonesia terhadap instrumen OECD, harmonisasi substansi lintas komite, serta tindak lanjut atas hasil revidu Sekretariat Tim Nasional OECD.
 - Perumusan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global, konsolidasi substansi kebijakan lintas kementerian/lembaga, serta tindak lanjut hasil pertemuan pada forum Sherpa Track G20.



- Penyusunan dan pengawalan rekomendasi kebijakan kemudahan berinvestasi guna meningkatkan daya tarik investasi nasional.
- Koordinasi kebijakan akselerasi hilirisasi untuk mendorong penciptaan nilai tambah dan penguatan struktur industri nasional
- Pelaporan secara berkala terkait *Investor Relations Unit* (IRU) dan *Recent Economic Development* (RED) sebagai bahan komunikasi kebijakan ekonomi.
- Pemantauan dan analisis perkembangan ekonomi global dan domestik.
- Penyusunan analisis mengenai prospek dan tantangan perekonomian, termasuk perumusan strategi kebijakan dan substansi ekonomi makro lainnya sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Program Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi telah dilaksanakan berbagai kegiatan strategis secara terencana dan berkesinambungan sepanjang Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan keterpaduan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional, serta meningkatkan efektivitas pengendalian implementasi kebijakan kerja sama ekonomi dan investasi. adapun beberapa kegiatan bilateral (kegiatan multilateral dan regional telah dijelaskan pada bab sebelumnya) yang sudah tercapai sebagai berikut:

- Penandatanganan MoU Pengembangan SDM Bidang Cybersecurity antara Indonesia dan Australia bekerja sama dengan RMIT Australia, Infinite Learning, dan Innov8;
- Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) Indonesia–Vietnam tentang kerja sama

peningkatan kapasitas di bidang teknik dan ekonomi digital;

- Penyelesaian *Letter of Intent* Proyek PLTA Kayan sebagai bagian dari kerja sama investasi dan energi lintas negara;
- Kesepakatan pada *Forum Public–Private Dialogue Track* (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia–Jepang yang menghasilkan Joint Media Statement;
- Kesepakatan pada *Working Group on Trade, Industry, and Investment* (WGII) ke-6 Indonesia–Rusia yang menghasilkan Protocol WGII ke-6
- Penyelenggaraan Indonesia–Australia Cybersecurity Symposium dan Workshop pada 16–17 Juni 2025 di Jakarta sebagai tindak lanjut MoU kerja sama bilateral.
- Koordinasi dan pengawalan pelaksanaan kesepakatan hasil pertemuan tingkat tinggi RI–Singapura, termasuk Senior Official Meeting (SOM) dan Six Bilateral Economic Working Groups (6WG).

c. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Program Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk memastikan keterpaduan kebijakan lintas kementerian/lembaga pada isu perniagaan dan ekonomi digital, sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian implementasi kebijakan agar selaras dengan target pembangunan nasional. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian berjalan sesuai tahapan, dimulai dari konsolidasi awal hingga penguatan monitoring dan evaluasi.

Program Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital lebih memfokuskan pada sejumlah isu strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong kinerja sektor perniagaan dan ekonomi digital nasional. Isu-isu strategis tersebut merefleksikan area kebijakan prioritas yang memerlukan keterpaduan perumusan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan agar sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional dan mampu memberikan dampak yang optimal. Adapun pembahasan isu strategis yang termasuk koordinasi di lingkup Program Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

- Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
- Pengembangan Ekspor Nasional
- Penguatan Ekosistem Logistik Nasional
- Pengembangan Ekonomi Digital
- Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Dalam rangka memastikan tercapainya sasaran kinerja serta terjaganya efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perniagaan dan ekonomi digital, Program Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah dilaksanakan serangkaian kegiatan utama yang dirancang dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup seluruh tahapan proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya terkoordinasi dengan baik, tetapi juga dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Adapun kegiatan utama yang telah dilaksanakan untuk menopang capaian kinerja tersebut meliputi:

- Koordinasi Persiapan Pelaksanaan *Business Matching* P3DN Tahun 2025
- Koordinasi Hambatan dan Permasalahan Sektor Ritel (Isu Perpajakan)
- Koordinasi Rencana Penyelenggaraan FGD Hambatan Perpajakan di Sektor Ritel dan Inventarisasi Daftar Masalah Hambatan Perpajakan
- Koordinasi Pembahasan Insentif untuk Sektor Ritel
- Koordinasi Tax Refund untuk Mendorong Program Belanja di Indonesia Aja (BINA)
- Koordinasi Pemaparan Data Pendukung Usulan Insentif PPh 21 DTP Sektor Ritel
- Monitoring dan evaluasi integrasi Pelabuhan Patimban dengan Jaringan Transportasi Multimoda
- Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera Tahun 2025
- Koordinasi Harmonisasi Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional dan Implementasi Rencana Aksi nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ ODOL
- Monitoring dan Koordinasi Proses Bisnis *Turn Around Time* dan *Container Dwell Time* pada Pelabuhan Pelindo Tanjung Priok
- Koordinasi Pembahasan Digitalisasi Logistik Pelabuhan dan Pembahasan Dashboard Logistik Nasional
- Koordinasi pembahasan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks Infrastruktur
- Pembahasan Potensi Penerapan *Circular Management Platform* (CMP) di Indonesia
- Koordinasi dan Permintaan Masukkan Terhadap Draft MoU sebagai Tindak Lanjut IK-CEPA *Digital Economy Working Group*
- Koordinasi Peta jalan Pengembangan Kecerdasan Buatan dan sinkronisasi



dengan rencana pembentukan Satgas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan AI

- Pelaksanaan Forum Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pembahasan Rancangan Strategi Nasional Kesejahteraan Keuangan (SNKK)
- Koordinasi dan Pembahasan Penguatan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK)

d. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral secara konsisten telah dilaksanakan sebagai bagian dari proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/ lembaga sepanjang Tahun 2025. Pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan diarahkan agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui tahapan identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi, formulasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi dapat berjalan utuh dan berdampak nyata pada pengendalian kebijakan sektor ESDM. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun pembahasan isu strategis yang termasuk di lingkup Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

- Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

- Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis serta Mineral Ikutannya
- Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri
- Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
- Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
- Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
- Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
- Kebijakan Pengembangan Biofuel
- Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)
- Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
- Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sepanjang Tahun 2025, berbagai kegiatan yang telah mendorong terwujudnya efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain seperti:

- Koordinasi penyusunan dan penajaman kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk kebijakan migas, minerba, ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan (EBT).
- Pembahasan dan penyepakatan alternatif kebijakan terkait: pengaturan dan pembinaan sumur minyak masyarakat, percepatan pengembangan PLTS dengan

penyesuaian kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penguatan kebijakan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, pengaturan *Domestic Market Obligation* (DMO) komoditas pendukung energi.

- Formulasi dan pengawalan regulasi strategis sektor ESDM, termasuk penyusunan dan perubahan peraturan presiden dan peraturan menteri yang mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional.
- Pengendalian dan pengawalan program strategis sektor ESDM, meliputi: program transisi energi, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi mineral dan batubara, stabilitas pasokan dan harga energi.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan sektor ESDM secara berkala untuk memastikan konsistensi tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Program Koordinasi di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian perumusan serta pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan pengembangan industri pengolahan non-migas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan sektor pariwisata. Pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dilakukan melalui tahapan identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan, formulasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi, yang menjadi dasar pengukuran Indeks Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan di antaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun isu-isu strategis yang termasuk di dalam lingkup Program Koordinasi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata adalah:

- Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
- Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
- Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
- Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
- Pengembangan Pariwisata.

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Selanjutnya, dalam mendorong pencapaian target kinerja tersebut, telah dilaksanakan berbagai Program Koordinasi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata bersama lintas kementerian/ lembaga dan stakeholder terkait lainnya antara lain:

- Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Permohonan Prakarsa SNI Kemasan Aseptik Multilapis dari Kertas dan Karton
- Koordinasi Pembahasan Revisi Neraca Komoditas Jagung dari P3JI
- Koordinasi Pembahasan Penajaman Pilar Peningkatan Dukungan Pembiayaan dan Investasi untuk Komoditas Rumput Laut
- Koordinasi Penetapan RPP tentang Penyelenggaraan Swasembada garam Nasional dan Ketersediaan Hasil Perikanan



- Koordinasi dan Kunjungan Kerja Potensi Peran BUMN Holding DEFEND ID dalam Pengembangan Industri Manufaktur Bernilai Tambah Tinggi
- Penyusunan Strategi Hilirisasi dalam Mendukung Arah Pengembangan Ekosistem Semikonduktor Nasional
- Diluncurkan Peta Jalan Pengembangan *Green Jobs* bersama-sama dengan KemenPPN/Bappenas
- Melaksanakan Indonesia Productivity Summit 2025 untuk menghadirkan perspektif lintas sektor mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan produktivitas nasional, menggali strategi implementasi terbaik dari industri, lembaga internasional dan pemerintah guna menghasilkan rekomendasi strategis untuk mendukung penyusunan peta gerakan nasional dalam upaya peningkatan produktivitas, inovasi dan daya saing tenaga kerja
- Pengusulan proses likuidasi satker BUN MPPKP
- Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan PDSK untuk Pembangunan Bendungan Riam Kiwa
- Koordinasi Lintas Kementerian / Lembaga Terhadap Penyelesaian Penetapan Nilai Penggantian Biaya Investasi (PBI) pada Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani untuk Pembangunan SUTT 150 Kv KIT Batang – Incomer (Batang New – Weleri)
- Disusunnya 3 draft RPerpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores.
- Telah diselenggarakan beberapa rapat pembahasan mengenai tata kelola kompleks Candi Borobudur, meliputi pembahasan: 1) kerja destinasi pariwisata
- sama pengelolaan Kompleks Candi Borobudur; 2) penyempurnaan Pedoman

Teknis Tata Kelola Candi Borobudur; dan 3) rencana penerapan flexible pricing di Kompleks Candi Borobudur.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Tercapainya Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak terlepas dari sejumlah faktor teknis yang saling mendukung dan terintegrasi. Faktor-faktor tersebut mencerminkan penguatan fungsi koordinatif yang semakin sistematis, berbasis data, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan lintas sektor. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan arah dan fokus kebijakan perekonomian nasional menjadi faktor substansial utama. Penetapan prioritas kebijakan yang jelas terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan produktivitas, transformasi struktural, serta penciptaan lapangan kerja memberikan kerangka acuan yang kuat bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan sektoral.
- b. Keselarasan substansi kebijakan lintas kementerian/ lembaga turut berperan signifikan dalam pencapaian indeks. Melalui koordinasi yang intensif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa kebijakan sektoral tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dan memperkuat.
- c. Relevansi kebijakan terhadap isu strategis dan dinamika perekonomian menjadi faktor pendukung penting. Substansi kebijakan yang dikawal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian responsif terhadap

tantangan aktual, seperti perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar, transformasi digital, transisi energi, serta kebutuhan peningkatan daya saing dan kualitas tenaga kerja.

- d. Penguatan integrasi kebijakan hulu-hilir dalam berbagai sektor perekonomian turut mendukung keberhasilan indeks. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong keterpaduan antara kebijakan perencanaan, regulasi, fasilitasi, hingga implementasi program di lapangan.
- e. Konsistensi kebijakan dalam mendukung program prioritas nasional menjadi faktor substansi yang memperkuat efektivitas koordinasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara aktif mengawal agar kebijakan yang disusun dan diimplementasikan oleh K/L tetap sejalan dengan agenda prioritas nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi. Konsistensi ini menciptakan kesinambungan kebijakan antar waktu dan antar program, sehingga hasil koordinasi dapat dirasakan secara nyata.
- f. Orientasi kebijakan pada hasil dan dampak ekonomi turut meningkatkan kualitas substansi koordinasi dan pengendalian. Pendekatan yang menekankan pada outcome dan impact mendorong kementerian/lembaga untuk tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan ekonomi yang terukur.

Kendala yang Dihadapi Dalam Mencapai Target Kinerja

Sampai dengan akhir Tahun 2025, dalam pelaksanaan tugas sinkronisasi, koordinasi,

dan pengendalian kebijakan pada berbagai bidang strategis perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural, teknis, dan dinamis, seiring dengan kompleksitas isu lintas sektor yang dikoordinasikan. Kendala-kendala tersebut muncul pada berbagai tahapan proses kebijakan, mulai dari perencanaan, perumusan rekomendasi, hingga pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, identifikasi kendala ini menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja untuk memastikan perbaikan berkelanjutan pada periode selanjutnya. Adapun kendala utama yang dihadapi selama Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- a. Keterbatasan ketersediaan dan ketepatan waktu data, khususnya data yang bersumber, Pusat Data dan Informasi kementerian teknis, serta data sektoral lainnya, yang pada beberapa isu strategis belum sepenuhnya tersedia sesuai kebutuhan analisis kebijakan.
- b. Adanya perbedaan pemahaman dan perspektif antar pemangku kepentingan terkait substansi kebijakan yang dibahas, baik pada tahap perumusan maupun implementasi, sehingga memerlukan proses koordinasi dan penyelarasan yang lebih intensif untuk mencapai kesepakatan bersama.
- c. Pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya berjalan optimal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring, dan pendalaman substansi kebijakan.
- d. Kompleksitas koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dengan mandat, prioritas, dan kerangka regulasi yang berbeda, sehingga



- mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan dan tindak lanjut hasil koordinasi.
- e. Perubahan dinamika kebijakan dan lingkungan strategis yang cepat, baik di tingkat nasional maupun global, yang menuntut penyesuaian agenda dan fokus koordinasi secara berkelanjutan, sehingga berdampak pada konsistensi pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - f. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan koordinasi, seiring dengan padatnya agenda lintas sektor dan tingginya intensitas pembahasan isu strategis, yang membatasi ruang pendalaman substansi kebijakan secara lebih komprehensif.
 - g. Belum optimalnya integrasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital antar instansi, yang pada beberapa kasus mempengaruhi kelancaran pertukaran data dan efektivitas koordinasi berbasis digital.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan sejumlah upaya perbaikan yang bersifat adaptif, terukur, dan berorientasi pada penguatan proses kebijakan. Upaya perbaikan ini diarahkan untuk memastikan bahwa keterbatasan yang muncul tidak menghambat pencapaian target kinerja, sekaligus menjadi dasar penyempurnaan tata kelola koordinasi lintas sektor pada periode selanjutnya. Adapun upaya perbaikan yang telah dan sedang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi penyediaan data melalui peningkatan komunikasi dengan, Pusat Data dan Informasi kementerian

- teknis, serta optimalisasi pemanfaatan data sektoral dan hasil kajian sebagai bahan pendukung perumusan kebijakan.
- b. Peningkatan intensitas forum koordinasi dan diskusi teknis lintas kementerian/ lembaga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman substansi kebijakan, baik pada tahap perumusan maupun implementasi.
- c. Penyesuaian pelaksanaan rencana aksi dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku.
- d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital melalui pelaksanaan rapat daring dan hibrida, pertukaran data elektronik, serta penguatan dokumentasi digital untuk menjaga efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan.
- e. Penajaman mekanisme koordinasi lintas sektor dengan penyederhanaan agenda rapat, penetapan fokus isu strategis, dan penguatan tindak lanjut hasil koordinasi agar implementasi kebijakan lebih terarah dan terukur.
- f. Penguatan fleksibilitas perencanaan dan respons kebijakan guna mengantisipasi dinamika kebijakan nasional dan global yang berkembang cepat, tanpa mengesampingkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- g. Pengelolaan waktu dan penjadwalan kegiatan koordinasi secara lebih efektif, termasuk pengaturan prioritas agenda dan pendalaman substansi kebijakan pada isu-isu strategis.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan berbagai langkah efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang

tersedia, tanpa mengurangi pencapaian target kinerja, khususnya terkait indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang perekonomian. Adapun langkah-langkah efisiensi yang telah diterapkan secara internal oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan alur koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan mengurangi tahapan administratif yang tidak bernilai tambah dan penggabungan agenda koordinasi yang memiliki keterkaitan substansi kebijakan sehingga mengurangi waktu proses koordinasi dan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan.
- b. Penggunaan rapat koordinasi terpadu untuk membahas multi-isu lintas sektor secara simultan dan peningkatan kualitas rapat dengan fokus pada penyelesaian isu (*problem solving oriented*) mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas koordinasi.
- c. Digitalisasi layanan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan melalui pemanfaatan sistem informasi koordinasi kebijakan untuk pencatatan agenda, hasil rapat, dan tindak lanjut, digitalisasi dokumentasi dan arsip
- d. kebijakan untuk mempercepat akses informasi, dan penggunaan platform daring untuk rapat dan koordinasi teknis.
- e. Penunjukan *focal point* kebijakan pada masing-masing sektor untuk mempercepat komunikasi lintas unit dan pemberdayaan tim teknis internal untuk pra-pembahasan isu sebelum forum koordinasi mampu mempercepat penyelesaian isu teknis dan mengoptimalkan peran pimpinan.
- f. Standardisasi produk dan output koordinasi seperti melalui penetapan format baku notulensi, matriks tindak lanjut, dan rekomendasi kebijakan, penyederhanaan bentuk output koordinasi agar mudah dipahami dan ditindaklanjuti dapat mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan konsistensi output kebijakan.
- g. Meningkatkan produktivitas SDM tanpa penambahan sumber daya melalui penyesuaian beban kerja aparatur sesuai kompetensi dan fungsi koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur melalui on the job learning dan berbagi pengetahuan, dan pengurangan ketergantungan pada kegiatan pendukung non-substansi.





B.6 SASARAN STRATEGIS 5: **TERWUJUDNYA LAYANAN SINKRONISASI, KOORDINASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN YANG BERKUALITAS**

Dalam meningkatkan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian sebagaimana dirasakan oleh para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya kementerian/ lembaga, diperlukan suatu sarana pengukuran yang mampu menjelaskan seberapa baik layanan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Sasaran Strategis Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas memiliki fokus yang terletak pada tingkat kepuasan pengguna layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang menggambarkan sejauh mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mampu memberikan layanan koordinatif yang responsif, jelas, dan bermanfaat dalam mendukung perumusan serta pelaksanaan kebijakan kementerian dan lembaga di bidang perekonomian. Dengan demikian, keberhasilan sasaran strategis ini tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian tetapi juga oleh kualitas layanan yang diterima dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan.

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk kejelasan mekanisme sinkronisasi kebijakan, efektivitas komunikasi, ketepatan waktu tindak lanjut, serta konsistensi pengendalian kebijakan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai fasilitator dan penyedia layanan koordinasi kebijakan yang memastikan bahwa

kebutuhan pemangku kepentingan dapat terakomodasi secara tepat. Oleh karena itu, kualitas kebijakan perekonomian tidak hanya diukur dari keselarasan substansi kebijakan, tetapi juga dari kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses dan layanan koordinasi yang diberikan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian. Indeks kepuasan ini digunakan untuk menilai persepsi pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan koordinasi yang diberikan, mencakup aspek kejelasan informasi, kemudahan koordinasi, responsivitas, serta manfaat layanan yang diterima. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan menjadi dasar evaluasi kinerja layanan koordinasi sekaligus sarana perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator kebijakan perekonomian yang berorientasi pada kualitas layanan dan kepuasan pemangku kepentingan.

B.6.1

INDEKS KEPUASAN LAYANAN SINKRONISASI, KOORDINASI, DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke kementerian/ lembaga/ stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam penilaian indeks kepuasan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian menjadi tiga elemen fundamental yang berperan penting dalam mendukung kelancaran pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan program-program ekonomi. Koordinasi menggambarkan tingkat keterpaduan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi, baik di lingkungan pemerintah pusat dan daerah maupun sektor swasta. Koordinasi yang berjalan secara optimal dapat mencegah terjadinya tumpang tindih maupun konflik kebijakan yang berpotensi menghambat perkembangan ekonomi.

Sinkronisasi menggambarkan tingkat keterpaduan antara kebijakan, program, dan langkah-langkah yang diterapkan di berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks perekonomian, sinkronisasi berperan penting dalam menjaga keselarasan antara kebijakan fiskal, moneter, serta sektor lainnya seperti perdagangan, industri, dan investasi. Sementara itu, pengendalian menitikberatkan pada sistem pengawasan dan evaluasi yang digunakan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi berlangsung

sesuai dengan perencanaan. Pengendalian yang berjalan secara efektif memungkinkan identifikasi permasalahan secara dini serta mendukung pencapaian target ekonomi yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

Indeks kepuasan diukur melalui pelaksanaan survei dan evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Hasil pengukuran indeks kepuasan tersebut memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang perekonomian, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan upaya perbaikan ke depan. Survei kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang perekonomian dilaksanakan menggunakan instrumen pertanyaan tertutup dengan skala Likert 1 sampai 4. Pengumpulan data survei dilakukan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi dan segera setelah rapat setingkat menteri selesai, dengan responden berasal dari pemangku kepentingan terkait. Melalui pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan tersebut, diharapkan dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif serta berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perekonomian, sehingga mendukung penguatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 3.20. Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3,53	117,7%



Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian sebesar 3,39 berada di atas target yang telah ditetapkan yaitu 3. Dengan demikian, capaian kinerja dari pengukuran indeks ini sebesar 113%. Hal ini mencerminkan bahwa kementerian/ lembaga atau stakeholder yang terkait dengan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan puas dengan layanan yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsi utama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian.

Adapun apabila Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan penjabaran dari setiap sektor koordinasi yang dilakukan, tersaji dalam tabel indeks kepuasan layanan di bawah ini:

Tabel 3.21. Indeks Kepuasan Layanan Berdasarkan Kategori Layanan SKP Tahun 2025

Jenis Kategori Layanan	Indeks	Capaian
Layanan SKP Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara	3,69	120%
Layanan SKP Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3,00	100%
Layanan SKP Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3,43	114%
Layanan SKP Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3,78	120%
Layanan SKP Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3,76	120%
Indeks Kepuasan Layanan SKP Total	3,53	117,7%

Berdasarkan rangkuman hasil survei di atas, Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian yang berhasil mendukung kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini dilakukan dan didukung oleh seluruh unit kerja ke deputian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dimana seluruh unit kerja jika diakumulasikan berhasil mencatatkan capaian kinerja sebesar 117,7% dan tentunya ini akan memberikan pengaruh terhadap keseluruhan kinerja dari Indeks Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan yang dimiliki oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di

Bidang Perekonomian adalah 3 dari 4. Nilai akhir indeks kepuasan layanan sebesar 3,39 dan mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 117,7%. Nilai Indeks ini merupakan nilai akhir yang didapatkan berdasarkan nilai dari rata-rata setiap kategori layanan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

Pencapaian target indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian merupakan hasil dari berbagai langkah yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam aspek teknis penyelenggaraan survei

maupun dalam peningkatan mutu layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang diberikan kepada para pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan tersebut, sepanjang Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Dilakukannya penguatan kapasitas sumber daya manusia internal dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan melalui kegiatan pelatihan, sehingga aparatur memahami prosedur kelembagaan dan alur kerja koordinasi lintas kementerian/ lembaga secara komprehensif.
- b. Dilakukannya penunjukan *Person in Charge* (PIC) pada setiap unit kerja berbasis kebijakan untuk memperjelas peran, tanggung jawab, serta meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan isu strategis perekonomian.
- c. Pembentukan dan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan, sehingga proses penyelesaian isu dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terstandarisasi.
- d. Dilakukannya analisis hasil survei kepuasan layanan guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam penyelenggaraan layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan perekonomian.
- e. Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mendukung pemantauan, dokumentasi, dan pelaporan proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan secara real-time dan berbasis data.
- f. Menjamin terselenggaranya kepastian layanan dan konsistensi kualitas proses koordinasi yang

dirasakan oleh pengguna layanan sehingga mampu mendorong kepuasan pemangku kepentingan terhadap kualitas hasil koordinasi kebijakan.

- g. Meningkatkan persepsi efisiensi dan profesionalisme layanan koordinasi dan kepuasan pengguna layanan terhadap fungsi pengendalian dan kepastian hasil koordinasi.
- h. Menjamin keberlanjutan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dengan meningkatkan transparansi dan kemudahan akses layanan yang berdampak pada kepuasan pengguna.
- i. Implementasi platform kolaborasi daring untuk memudahkan komunikasi, pertukaran informasi, dan tindak lanjut hasil koordinasi antar unit kerja dan kementerian/ lembaga terkait secara lebih cepat dan akuntabel.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Tercapainya Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian didukung oleh kualitas substansi layanan kebijakan yang semakin relevan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa fungsi koordinatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak hanya berjalan efektif secara prosedural, tetapi juga memberikan nilai tambah substantif bagi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut merupakan beberapa faktor yang mendorong berhasilnya pencapaian target kinerja yang ditetapkan:

- a. Relevansi substansi layanan terhadap kebutuhan kebijakan sektor perekonomian menjadi faktor utama dalam meningkatkan tingkat kepuasan



- b. Kejelasan arah kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses koordinasi turut meningkatkan kepuasan pengguna layanan
- c. Konsistensi substansi layanan dengan prioritas nasional dan agenda pembangunan ekonomi menjadi faktor pendukung penting. Layanan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan senantiasa diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional dan sasaran pembangunan ekonomi.
- d. Kemampuan layanan dalam mengintegrasikan perspektif lintas sektor turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat kepuasan. Substansi koordinasi yang difasilitasi Kemenko Perekonomian mampu menjembatani kepentingan sektoral yang beragam, mengharmoniskan kebijakan yang berpotensi tumpang tindih, serta menghasilkan solusi kebijakan yang komprehensif
- e. Orientasi substansi layanan pada penyelesaian masalah (*problem solving*) menjadi faktor penting dalam pencapaian indeks.
- f. Keselarasan substansi layanan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi kebijakan turut mendukung tingkat kepuasan.

Kendala yang Dihadapi Dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam upaya mencapai target kinerja, khususnya terkait tingkat kepuasan terhadap layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, terdapat sejumlah kendala yang muncul sepanjang tahun berjalan. Beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian target kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran indeks kepuasan layanan tidak dilakukan secara triwulanan, tetapi secara periodik sesuai dengan perencanaan survei.

Kondisi ini menyebabkan keterbatasan data pembandingan antar- triwulan, sehingga pemantauan dinamika kepuasan pengguna layanan belum dapat dilakukan secara lebih responsif sepanjang tahun berjalan.

- b. Tingkat partisipasi responden dalam pengisian survei kepuasan masih dipengaruhi oleh ketersediaan waktu dan aktivitas masing-masing pemangku kepentingan. Variasi jumlah responden berpotensi memengaruhi kekeluasan representasi persepsi pengguna layanan, meskipun secara umum hasil survei tetap mencerminkan tingkat kepuasan yang baik.
- c. Sebagai kementerian koordinator, pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan melibatkan beragam kementerian dan lembaga dengan karakteristik, prioritas, dan mekanisme kerja yang berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi mempengaruhi kecepatan tindak lanjut hasil koordinasi dan persepsi kepuasan layanan, khususnya pada isu-isu strategis yang bersifat lintas sektor.
- d. Padatnya agenda koordinasi dan dinamika kebijakan nasional berdampak pada keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan koordinasi secara mendalam, khususnya pada periode tertentu. Kondisi ini menuntut pengelolaan waktu dan prioritas yang lebih optimal agar kualitas layanan koordinasi tetap terjaga.
- e. Adaptasi teknologi digital, meskipun pemanfaatan teknologi digital telah diterapkan secara luas, proses adaptasi pengguna layanan terhadap berbagai platform digital masih memerlukan waktu. Perbedaan tingkat literasi digital antar pemangku kepentingan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan efektivitas komunikasi dan koordinasi secara daring.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Untuk terus meningkatkan tingkat kepuasan terhadap layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada tahun mendatang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun beberapa langkah perbaikan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan secara berkelanjutan. Adapun beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti keterbatasan frekuensi pengukuran indeks kepuasan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penguatan monitoring internal melalui pengumpulan umpan balik informal dalam setiap kegiatan koordinasi. Mekanisme ini dimanfaatkan sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas layanan sebelum survei kepuasan formal dilaksanakan.
- b. Dilakukan upaya perbaikan berupa penyederhanaan instrumen survei kepuasan dan optimalisasi penggunaan media digital agar survei lebih mudah diakses dan diisi. Selain itu, sosialisasi kepada pemangku kepentingan dilakukan secara lebih intensif guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya umpan balik dalam peningkatan kualitas layanan.
- c. Dilakukannya penyempurnaan pola koordinasi melalui penjadwalan forum koordinasi yang lebih terstruktur, penajaman agenda rapat, serta penetapan tindak lanjut yang lebih jelas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan hasil koordinasi dan mempercepat respons antar kementerian dan lembaga.
- d. Dilakukan penguatan manajemen waktu

dan penentuan prioritas kegiatan dengan memfokuskan pembahasan pada isu-isu strategis dan berdampak langsung. Optimalisasi pemanfaatan rapat daring juga terus dilakukan guna menjaga efektivitas koordinasi di tengah padatnya agenda kerja.

- e. Dilaksanakannya pendampingan dan pembiasaan penggunaan platform digital dalam pelaksanaan koordinasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi secara optimal dan menjaga efektivitas komunikasi dalam kegiatan koordinasi dan pengendalian kebijakan.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan berbagai langkah efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi pencapaian target kinerja, khususnya terkait indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang perekonomian. Adapun langkah-langkah efisiensi yang telah diterapkan secara internal oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk penggunaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi serta sarana komunikasi berbasis digital, telah diterapkan untuk mempermudah proses sinkronisasi dan koordinasi antar unit kerja maupun lintas kementerian dan lembaga. Penggunaan media komunikasi digital tersebut mampu mengurangi waktu dan biaya melalui *online meeting* yang menghemat anggaran yang dibutuhkan dalam proses koordinasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan.



- b. Penyederhanaan mekanisme koordinasi dimana mekanisme rapat koordinasi dan pembahasan teknis disederhanakan tanpa mengurangi substansi, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan lintas kementerian/lembaga.
- c. Peningkatan keterpaduan kebijakan (*outcome*) melalui efisiensi yang tercermin dari meningkatnya konsistensi dan keterpaduan kebijakan perekonomian lintas sektor, yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara lebih efektif.
- d. Optimalisasi pemanfaatan anggaran, SDM, dan sarana pendukung dilakukan secara selektif dan terfokus pada isu-isu strategis perekonomian prioritas, sehingga mencegah pemborosan sumber daya dan kegiatan koordinasi yang bersifat repetitif.
- e. Penguatan mekanisme tindak lanjut dan pengendalian kebijakan dimana setiap hasil koordinasi ditindaklanjuti melalui mekanisme pemantauan yang terstruktur, sehingga memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai kesepakatan tanpa intervensi tambahan yang berulang.
- f. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara rutin melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional yang berlaku guna memastikan seluruh proses kerja berjalan secara efektif dan efisien. Penyempurnaan prosedur ini dilakukan dengan menghilangkan tahapan yang tidak diperlukan serta menyederhanakan alur kerja, sehingga pelaksanaan tugas-tugas, sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.
- g. Upaya efisiensi juga dilakukan melalui penguatan mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan forum koordinasi yang terstruktur dan terjadwal. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan program, mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan, serta menciptakan alur komunikasi yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja.





B.7 SASARAN STRATEGIS 6: TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN YANG BERKUALITAS

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu didukung oleh tata kelola organisasi yang berkualitas, efektif, dan akuntabel. Tata kelola yang baik menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya koordinasi kebijakan yang optimal, pengambilan keputusan yang tepat sasaran, serta pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas” diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan tata kelola yang berkualitas juga dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap peran kementerian sebagai pengkoordinasi kebijakan perekonomian nasional.

Dengan terwujudnya tata kelola kementerian yang berkualitas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya secara lebih efektif dan adaptif dalam merespons dinamika ekonomi global dan nasional, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional

B.7.1

NILAI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai tolok ukur strategis untuk menilai keberhasilan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi fondasi utama bagi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengkoordinasi kebijakan perekonomian nasional.

Penetapan IKU Nilai Reformasi Birokrasi sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas dalam pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan kebijakan reformasi birokrasi tematik. Melalui penguatan reformasi birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola internal, memperkuat integritas aparatur, serta menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan.

CAPAIAN NILAI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan pengukuran dan penilaian langsung oleh Kementerian



Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dengan didasarkan oleh kriteria yang telah ditetapkan. Sampai dengan disusunnya LAKIP Kementerian Tahun 2025 ini selesai dibuat, Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Kementerian belum dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan tren peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi di beberapa tahun terakhir, Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.22. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 6.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Nilai	90,77	91,52*	100,83 %

Nilai RB Tahun 2025 sebesar 91,52 merupakan proyeksi nilai RB setelah hasil sanggah atas nilai sementara. Adapun nilai sementara yang diperoleh dari Portal RB KemenPAN-RB adalah sebesar 87,79 dengan rincian nilai RB General sebesar 80,05 dan RB Tematik 7,74. Sampai dengan laporan ini disusun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengajukan sanggah kepada Kementerian PAN-RB dan berdasarkan tren kenaikan setelah masa sanggah pada tahun-tahun sebelumnya maka diproyeksikan bahwa Nilai RB akan mengalami kenaikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 3.23. Target dan Proyeksi Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Tahun 2025

No	Nilai Reformasi Birokrasi	2022	2023	2024	2025	2026
A.	Target	77	80	83	90,77	92
B.	Realisasi/Proyeksi Realisasi Menko Perekonomian	78,63	78,63	88,62	91,52*	-
C.	Realisasi RB Nasional tingkat K/L	75,48	76,81	82,98	84*	-
Persentase Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Menko Perekonomian		102,12%	103,33%	102,50%	101,08%	-

*realisasi nilai RB masih bersifat proyeksi

Peningkatan ini didasarkan pada berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun dalam hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup membanggakan yakni sebesar 2,90 poin atau 91,52 (A-) dengan predikat “Memuaskan dengan Catatan” dan diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Nasional. Peningkatan ini terjadi akibat perubahan komponen penilaian Reformasi Birokrasi.

Penilaian Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 terdiri atas RB General dan RB Tematik. RB General terdiri atas 28 indeks yang nantinya masing-masing indeks memiliki bobot yang berbeda, sedangkan

RB Tematik terdiri atas 6 fokus tema utama yakni Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Mendorong Hilirisasi, Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, dan Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan.

Berikut ini merupakan rincian lebih lanjut terkait Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General yang masih bersifat estimasi berdasarkan penilaian mandiri dan proyeksi tren capaian kinerja, maka Nilai Reformasi Birokrasi General setelah masa sanggah di Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.24. Target dan Proyeksi Nilai RB General Tahun 2025

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025	Skor Index	Gap Bobot
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,78	2,55	2,55	2,55	0,45
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	94,26	100	100	7	-
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	93,29	100	100	2	-
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	5	5	2	-
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,51	3,55	3,58	2,86	1,14
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3	0,5	0,5	1	1	2
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	72,53	73,32	75	3	1
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	94,24	96,01	97	1,94	0,06
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	3	3	1,2	0,8
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	98,38	98,09	90	1,8	0,2
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	94,78	97,56	95	1,9	0,1
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,79	3,87	3,6	1,8	0,2
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	1	3	4	1,2	0,3



Tabel 3.24. Target dan Proyeksi Nilai RB General Tahun 2025

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024	Nilai 2025	Skor Index	Gap Bobot
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	98,77	98,77	95	1,43	0,07
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	87,85	96,98	90	1,35	0,15
16	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	1,97	2,45	2,6	0,78	0,72
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	64,43	75,76	85	1,7	0,3
18	Indeks Sistem Merit	4	345,5	345,5	345,5	3,37	0,63
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,72	4,48	4,5	1,35	0,15
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	-	-	-	-	-
21	Indeks SPBE	9	3,72	4	4,2	7,56	1,44
22	Capaian Prioritas Nasional	3	3,72	89,57	100	3	-
23	Capaian IKU	7	100	100	100	5,5	1,5
24	Opini BPK	5	5	5	5	5	-
25	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	70,7	63,76	75	3	1
26	Indeks BerAkhlaq	4	60,6	82,67	85	3,4	0,6
27	Survei Penilaian Integritas	10	76,24	81,81	92	8,2	1,8
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	91,58	89,62	95	7,6	0,4
Nilai Total RB General		100				83,49*	
Normalisasi Nilai		98,5				84,76*	

*realisasi Nilai RB General masih bersifat proyeksi

Dari Tabel diatas dapat terlihat bawah pada Tahun 2025, hampir seluruh indikator Nilai Reformasi Birokrasi General yang bersifat proyeksi selalu mengalami kenaikan. Meski demikian terdapat beberapa Indikator yang perlu diperbaiki di Tahun 2025 dan perlu didorong pencapaiannya di Tahun 2026. Sementara itu, Nilai RB Tematik juga turut menjadi faktor utama dalam kenaikan Nilai Reformasi Birokrasi yang signifikan di Tahun 2025. Angka yang disajikan pada tabel bawah masih merupakan angka

penilaian RB Tematik Tahun 2024. Adapun nilai RB Tematik sementara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 sebelum dilakukannya sanggah terhadap hasil penilaian RB sementara adalah sebesar 7,74. Pada Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak melakukan penilaian terhadap capaian RB Tematik, namun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun langkah-langkah rencana aksi pelaksanaannya sebagaimana tertuang di dalam

Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025. Berikut detail proyeksi yang dilakukan dari perolehan Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025:

Tabel 3.25. Proyeksi Capaian Nilai RB Tematik Tahun 2025

No	Capaian	Bobot	Nilai	Skor Index
	Net Koefisien	10		
Komponen RB Tematik				
1	Pengentasan Kemiskinan			
2	Peningkatan Investasi			
3	Mendorong Hilirisasi			
4	Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	10	6,76	6,76
5	Mendukung Ketahanan Pangan Nasional			
6	Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan			
Nilai Total RB Tematik		10	6,76*	6,76*

*) Nilai RB Tematik bersifat proyeksi dan didasarkan pada penilaian tahun sebelumnya

KEGIATAN YANG MENUNJANG CAPAIAN TARGET

Upaya Peningkatan RB General

Arah perbaikan Nilai Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mengacu pada hasil penilaian dan rekomendasi pada tahun sebelumnya. Sebagai upaya perbaikan Reformasi Birokrasi, sepanjang Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Melaksanakan penguatan manajemen perubahan dan komitmen pimpinan melalui internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi melalui arahan pimpinan, sosialisasi RB kepada seluruh unit kerja, serta penguatan peran pimpinan sebagai *agent of change*.
- Melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran *Roadmap* Reformasi Birokrasi yang selaras dengan kebijakan nasional, Renstra Kementerian, serta arah reformasi birokrasi tematik.

- Penyempurnaan perencanaan dan manajemen kinerja (SAKIP) melalui penyelarasan sasaran strategis, IKU, dan target kinerja, penguatan *cascading* kinerja, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi.
- Penataan dan penyederhanaan regulasi internal melalui inventarisasi dan harmonisasi regulasi internal untuk mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
- Penyempurnaan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan pemetaan dan perbaikan proses bisnis utama dan pendukung, serta penyusunan dan pembaruan SOP guna meningkatkan efisiensi dan transparansi tata laksana organisasi.
- Penguatan manajemen SDM aparatur berbasis merit melalui pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, pengembangan kompetensi SDM,



serta penataan pengelolaan SDM sesuai prinsip meritokrasi.

- g. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pendukung manajemen kinerja dan RB meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan kinerja.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala, termasuk penyiapan *evidence* dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.
- i. Penguatan budaya kinerja dan integritas dengan kegiatan berorientasi kinerja, integritas, dan profesionalisme sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas birokrasi.

Upaya Peningkatan RB Tematik

Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap pelaksanaan RB tematik tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025. Adapun berbagai rencana aksi yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendorong pencapaian pada target-target yang telah ditetapkan di dalam rencana aksi:

- a. Tema Pengentasan Kemiskinan: penyusunan laporan identifikasi program pemberdayaan, dan penetapan lokus sasaran; penyusunan laporan sosialisasi kebijakan KIPK; pelaksanaan relaksasi penyaluran KUR yang diatur di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan menyusun laporan sosialisasi kebijakan KUR; penyusunan rekomendasi kebijakan pengaturan penggunaan BBM bersubsidi,

serta penyusunan laporan atas pelaksanaan kebijakan paket stimulus ekonomi pada sektor ketenagakerjaan.

- b. Tema Peningkatan Investasi: penyusunan laporan hasil koordinasi atas penetapan PMK untuk PPNDTP Perumahan; penyusunan laporan rapat koordinasi tentang kredit program perumahan dan pengembangan ekosistem usaha bullion; penyusunan Rancangan PP Perubahan ke-4 PP 46/2007 tentang KPBPB Batam; menyusun laporan hasil rapat koordinasi atas peraturan tentang PBBR; penetapan rancangan peraturan perubahan Kepres No. 17 tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan OECD; Penerbitan Dokumen JCM Elektronik Decision; pelaksanaan kegiatan program belanja Masyarakat tahun 2025 dan program ASN menggunakan produk lokal; penyusunan laporan monitoring dan evaluasi perbaikan CGCP dan SAP; pelaksanaan koordinasi kebijakan terkait peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi terbarukan.
- c. Tema Mendorong Hilirisasi: penyusunan laporan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pengembangan bioethanol; dan melaksanakan koordinasi percepatan pengembangan industri KBLBB.
- d. Tema Mendorong Ketahanan Pangan Nasional: menyusun laporan sosialisasi kebijakan kredit usaha alsintan; penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat; penyusunan dokumen penetapan Permenko Bidang Perekonomian tentang Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; penyusunan Dokumen Penetapan Permenko Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite, Unit Kerja Pendukung, dan Sekretariat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

- e. Tema Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan: melaksanakan *groundbreaking* Rumah Sakit bertaraf Internasional Mayapada Apollo Batam Internasional Hospital (MABIH) di KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional (Parkes) Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan terdaftarnya Pelaku Usaha Sektor Kesehatan di KEK ETKI Banten.
- f. Tema Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Layanan Pendidikan: penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komnas LIK; pelaksanaan penerimaan King's College London (KCL) tahap 3 di KEK Singhasari.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak terlepas dari kuatnya komitmen pimpinan dan tingginya awareness seluruh pegawai terhadap pentingnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi telah terinternalisasi sebagai budaya kerja yang mendorong peningkatan kinerja organisasi, akuntabilitas, dan kualitas layanan. Hal ini tercermin dari meningkatnya kepatuhan terhadap standar tata kelola, penguatan manajemen kinerja berbasis hasil, serta penerapan sistem kerja yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Selain itu, sinergi lintas unit kerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, turut memastikan implementasi reformasi berjalan optimal. Dengan dukungan kepemimpinan yang kuat dan partisipasi aktif pegawai, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mampu menjaga konsistensi pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dan mendorong pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi yang mencerminkan kemajuan nyata dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja yang telah diterapkan terutama dalam mencapai Nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari adanya beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun berjalan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja Nilai Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kementerian koordinator, pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada proses internal, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi lintas kementerian/ lembaga, sehingga pengukuran dan pembuktian kinerja reformasi birokrasi memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar sebagai dampak atas adanya kompleksitas peran dan fungsi koordinator.
- b. Dinamika kebijakan reformasi birokrasi di tingkat nasional, termasuk penyesuaian indikator dan metodologi penilaian reformasi birokrasi kementerian/ lembaga, menuntut adaptasi yang cepat dan berdampak pada proses penyiapan dokumen serta pemenuhan *evidence* kinerja.
- c. Perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas SDM terkait implementasi reformasi birokrasi dan penyusunan *evidence* kinerja masih menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja.
- d. Keterbatasan integrasi antar sistem informasi pendukung manajemen kinerja dan reformasi birokrasi menyebabkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kinerja belum sepenuhnya efisien dan terstandar.



- e. Proses penyiapan *evidence* reformasi birokrasi memerlukan ketelitian dan validasi lintas unit kerja, yang dalam praktiknya menghadapi keterbatasan waktu, terutama pada periode pelaporan dan evaluasi.
- f. Meskipun komitmen terhadap reformasi birokrasi telah terbangun, internalisasi budaya kinerja dan orientasi hasil belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja, sehingga memerlukan penguatan yang berkelanjutan.
- g. Tingginya intensitas pelaksanaan tugas koordinasi kebijakan perekonomian prioritas nasional berdampak pada keterbatasan fokus dan sumber daya dalam optimalisasi pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.

Upaya Perbaikan yang Akan Dilakukan

Dalam rangka semakin meningkatkan nilai reformasi birokrasi kementerian yang merupakan gambaran umum dalam tata kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun yang akan datang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memetakan beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk semakin meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian. Adapun beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran pimpinan sebagai *role model* reformasi birokrasi melalui penguatan komitmen, internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi, serta pengelolaan perubahan yang terstruktur dan berkelanjutan guna membangun budaya kerja berorientasi kinerja dan integritas.
- b. Melakukan penataan regulasi internal agar lebih sederhana, konsisten, dan tidak tumpang tindih, sehingga mendukung kelancaran proses koordinasi kebijakan dan meningkatkan kepastian serta efektivitas pelaksanaan tugas kementerian.
- c. Menyempurnakan struktur organisasi agar lebih adaptif dan selaras dengan mandat koordinatif kementerian, termasuk penguatan fungsi perumusan rekomendasi kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi lintas sektor.
- d. Melakukan pemetaan dan penyempurnaan proses bisnis secara *end-to-end*, termasuk standarisasi SOP dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
- e. Meningkatkan kualitas *cascading* kinerja, keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.
- f. Mendorong penguatan sistem manajemen SDM berbasis merit melalui peningkatan kompetensi aparatur, pengelolaan kinerja individu yang terukur, serta pengembangan talenta dan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan strategis kementerian.
- g. Meningkatkan sistem pengaduan dan umpan balik dari masyarakat dan stakeholder untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan harapan publik.
- h. Meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan peran aparat pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan serta memastikan kepatuhan dan akuntabilitas organisasi.
- i. Mengoptimalkan keterbukaan informasi kinerja melalui pelaporan yang tepat waktu, akurat, dan mudah diakses, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.
- j. Memastikan bahwa agenda reformasi birokrasi terintegrasi secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas kementerian, sehingga reformasi birokrasi tidak bersifat administratif semata, tetapi berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

- k. Menjamin pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan SAKIP secara konsisten dan terukur, sebagai bagian dari mekanisme *continuous improvement* dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
- l. Implementasi sistem penilaian kinerja yang transparan, berbasis pada hasil kerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Efisiensi dalam Mencapai Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicapai melalui pendekatan adaptif yang menekankan sinergi, integrasi, dan responsivitas kebijakan di tengah dinamika nasional yang terus berkembang, meskipun belum tersusunnya roadmap Reformasi Birokrasi secara komprehensif. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengoptimalkan pemanfaatan SIMERSI sebagai instrumen utama dalam mengintegrasikan perencanaan,

pelaksanaan, serta pemantauan kinerja dan reformasi birokrasi secara lebih terukur dan transparan. Selain itu, fleksibilitas dalam penyesuaian rencana aksi Reformasi Birokrasi menjadi kunci keberhasilan, di mana setiap unit kerja mampu melakukan penyesuaian langkah implementasi sesuai dengan perubahan kebijakan nasional, prioritas pemerintah, dan tantangan aktual perekonomian.

Pendekatan ini didukung oleh komitmen pimpinan serta kesadaran pegawai yang tinggi terhadap pentingnya reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi. Dengan mengedepankan prinsip adaptif dan berbasis kinerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tetap mampu menjaga konsistensi implementasi Reformasi Birokrasi dan mencapai hasil yang positif, meskipun dilaksanakan dalam kondisi yang dinamis dan tanpa kerangka roadmap Reformasi Birokrasi yang bersifat statis.





C AKUNTABILITAS KEUANGAN

PAGU DAN REVISI ANGGARAN TAHUN 2025

Total pagu anggaran T.A 2025 setelah dilakukannya proses pemblokiran anggaran yang berlaku untuk seluruh kementerian/ lembaga sebesar Rp 572.083.630.000. Pada Tahun 2025, dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali revisi atas DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jumlah revisi DIPA pada Tahun 2025 hampir sama apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 dan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, sebagaimana yang terlihat pada data berikut:

Tabel 3.26. Jumlah Revisi DIPA BA-035 Tahun 2025 per Satuan Kerja

Kode	Satuan Kerja	2023	Jumlah Revisi	2024	Jumlah Revisi	2025	Jumlah Revisi
		Total Pagu (Ribu Rp)		Total Pagu (Ribu Rp)		Total Pagu (Ribu Rp)	
427752	Menko Bidang Perekonomian	466.418.924	16	430.777.471	10	572.083.630	11

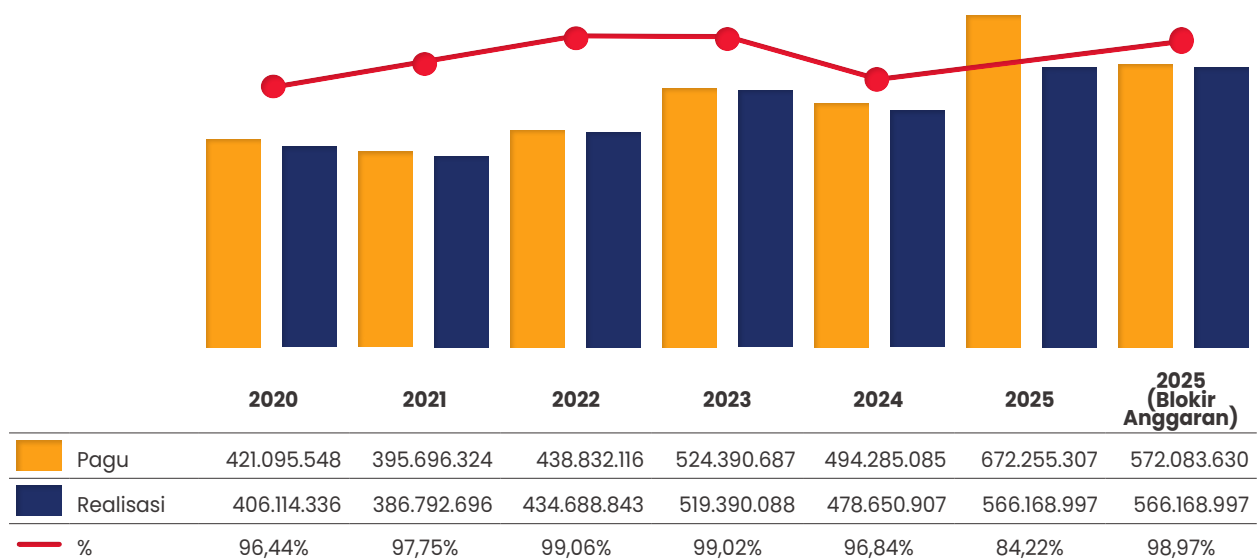
Sumber: Kementerian Keuangan

Revisi anggaran yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah dialokasikan secara responsif terhadap dinamika ekonomi dan perubahan prioritas nasional. Secara substantif, langkah ini diambil untuk mengatasi diskoneksi antara perencanaan awal dengan realitas lapangan, seperti adanya kebutuhan mendesak (*unforeseen circumstances*), perubahan kebijakan fiskal, atau optimalisasi penyerapan anggaran yang terhambat pada program tertentu. Dengan melakukan realokasi ke sektor yang memiliki daya ungkit (*multiplier effect*) lebih tinggi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik, menjaga kredibilitas fiskal, serta

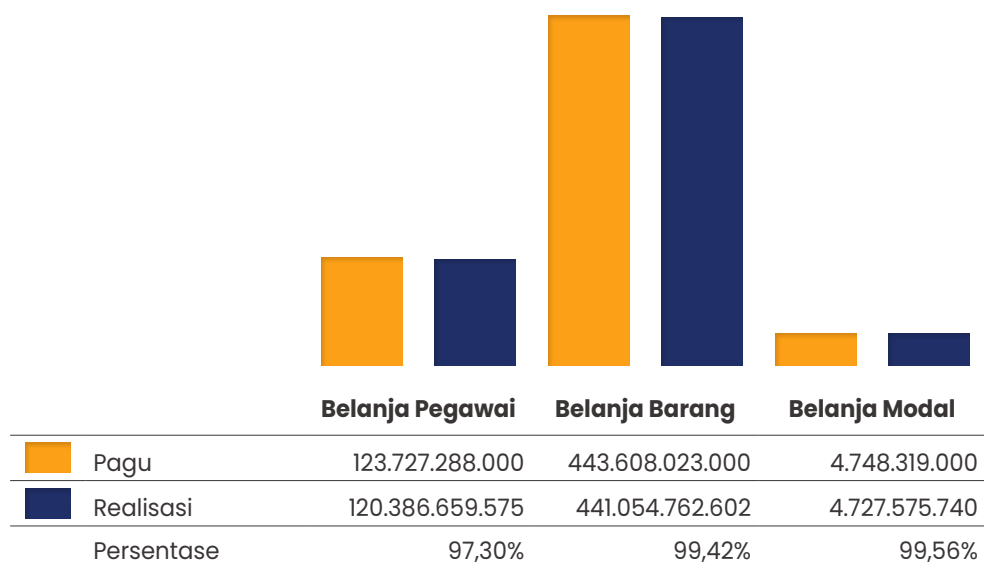
menjamin bahwa output pembangunan tetap tercapai secara maksimal di tengah keterbatasan ruang anggaran yang ada.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan blokir anggaran adalah sebesar Rp 566.168.997.917 atau mencapai 98,97% dari alokasi pagu anggaran, dengan persentase capaian realisasi belanja yang relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan pagu anggaran dan realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam lima tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.5. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 – 2025 (dalam ribuan Rupiah)**REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA**

Struktur anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai tidak tetap yang diangkat sebagai pegawai yang bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang habis pakai maupun pembayaran atas jasa yang diterima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya adalah belanja perjalanan. Sementara, Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran, dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Grafik 3.6. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025



Dari realisasi tersebut, persentase Belanja Modal merupakan realisasi belanja yang paling tinggi, yakni sebesar 99,56%, sedangkan kedua jenis belanja lainnya seperti Belanja Barang terealisasi sebesar 99,42% dan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 97,30%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Belanja Modal Tahun 2025 cenderung sedikit lebih rendah, sedangkan untuk realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2024. Namun, secara keseluruhan realisasi Tahun 2025 relatif lebih tinggi dalam hal realisasi anggaran jika dibandingkan dengan Tahun 2024 meskipun diberlakukan adanya blokir anggaran untuk seluruh kementerian/ lembaga.

REALISASI ANGGARAN PAGU PRIORITAS NASIONAL

Sejak tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan anggaran belanja berdasarkan

money follows program, hal ini dilakukan guna memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat bukan sekadar untuk pembiayaan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. RKP merupakan dokumen kebijakan nasional 1 tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pada tahun 2025, penyusunan program dan kegiatan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 berpengaruh dalam penentuan kegiatan prioritas pada seluruh K/L, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Alokasi kegiatan Prioritas Nasional (PN) pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp 50.939.449.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.27. Pagu Prioritas Nasional Tahun 2025

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2025
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7.121.943
03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	4.485.000
04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	9.500.000
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	28.922.645
07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	909.961
TOTAL		50.939.649

Sumber: Kementerian Keuangan (2025)

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran kegiatan-kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung Program Prioritas pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.28. Pagu dan Realisasi Kegiatan Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Nasional

(Dalam Ribuan Rupiah)

Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Pagu Setelah Blokir	Realisasi Anggaran	% Realisasi	TVRO	RVRO	% RVRO
2491. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	PBA.001. Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	5.000.000.000	1.662.483.000	1.662.157.632	99,98%	2,00	3,00	150%
2500. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	PBA. 001. Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	2.000.000.000	954.945.000	1.044.868.561	99,98%	2,00	2,00	100%
4539. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	PBA. 001. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	4.485.000.000	1.333.449.000	1.333.276.225	99,99%	1,00	1,00	100%
2521. Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan	PBB.001. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	1.000.000.000	750.850.000	750.844.140	100,00%	1,00	1,00	100%
4541. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	PBA.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	200.000.000	200.000.000	199.969.384	99,98%	1,00	1,00	100%
4542. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	PBA.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	260.000.000	260.000.000	259.331.652	99,74%	1,00	1,00	100%
2500. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	ABA.001. Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	2.000.000.000	954.945.000	1.044.868.561	52,24%	2,00	2,00	100%



(Dalam Ribuan Rupiah)

Kegiatan	Output	Pagu Anggaran	Pagu Setelah Blokir	Realisasi Anggaran	% Realisasi	TVRO	RVRO	% RVRO
6920 Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK	Rekomendasi Perencanaan dan Pembentukan KEK	1.971.951.000	543.781.000	543.020.760	27,54%	1,00	1,00	100%
6921 Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	2.072.260.000	1.035.828.000	1.035.817.371	49,98%	1,00	1,00	100%
6922 Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK	Rekomendasi Peningkatan Investasi Kerjasama Komunikasi dan Sistem Informasi di KEK	2.042.140.000	783.275.000	782.695.278	38,33%	1,00	1,00	100%
6923 Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian Pembangunan KEK	Pelayanan Investasi Administrator KEK Tipe A	2.516.782.000	2.516.782.000	2.494.094.899	99,10%	1,00	1,00	100%
	Pelayanan Investasi Administrator KEK Tipe B	1.345.670.000	1.345.670.000	1.340.482.455	99,61%	1,00	1,00	100%
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	900.000.000	620.470.000	613.052.582	98,80%	1,00	1,00	100%
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika	PBK.002. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	900.000.000	305.810.000	305.714.280	99,97%	1,00	1,00	100%

REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM

Pagu anggaran Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi menjadi dua: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan yang merupakan program teknis berupa kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian, dan Program

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan pelaksanaan tugas unit pendukung, berupa Sekretariat, Staf Ahli, dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memberikan pelayanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya. Pembagian alokasi pagu dan realisasi belanja masing-masing program pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran Setelah Blokir	Realisasi Setelah Blokir	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						
1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Biaya Logistik 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Rasio PDB Industri Pengolahan 5. Devisa Pariwisata 6. Rasio PDB Pariwisata 7. Indeks Ketahanan Energi 8. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	310.570.336.000	310.385.487.109	99,94%	106,25%
2	Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi	Tingkat Inflasi				
3	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Tingkat Pengangguran Terbuka				
4	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian				
5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian				
Program Dukungan Manajemen						
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	261.513.294.000	255.783.510.808	97,81%	100,83%



REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SS 1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan						
IKS 1.1	Pertumbuhan Ekonomi	14,996,161,000	14,960,085,137	99.972	5,3	5,11	97,17
SP 1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas						
IKP 1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	1,788,935,000	1,786,475,948	99.962	224,64	373,58	120
	SK Meningkatkan Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi						
	IKK Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Pariwisata & Telekomunikasi				35.59 Triliun	51.49 Triliun	120
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi	324,245,000	324,191,213	99.98	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	SK Meningkatkan Produktivitas BUMN di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral						
	IKK Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				141.39 Triliun	194.24 Triliun	120
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi	594,541,000	594,532,071	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	SK Meningkatkan Produktivitas BUMN di Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan						
	IKK Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan				16,56 Triliun	14,62 Triliun	88,29

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur dan Agro	375,870,000	375,847,087	99.98	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
SK	Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik					
IKK	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik				21,55 Triliun	47,97 Triliun
	RO REVISI Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur	294,279,000	293,905,577	99.87	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
SK	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis					
IKK	Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis				9,55 Triliun	16,0 Triliun
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan	200,000,000	198,000,000	99.98	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
IKP 1.2	Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	428,328,000	428,229,127	99.965	80	100
SK	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis					
IKK	Persentase capaian penyaluran KUR di sektor produksi				54%	60,71%
IKK	Persentase Debitur KUR Baru				40%	53,47%
IKK	Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas				20%	28,7%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
IKK Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)				255 Triliun	270,08 Triliun
					106
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	290,878,000	290,874,751	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
					100
SK Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif					
IKK Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah				50%	50%
					100%
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bisnis	137,450,000	137,354,376	99.93	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
					100
IKP 1.3 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	1,687,554,000	1,686,527,072	99.96	80	100
					120
SK Meningkatkan Produktivitas BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi					
IKK Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi				80%	80%
					100%
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata	292,395,000	292,382,562	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
					100
SK Meningkatkan Produktivitas BUMN di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
IKK Persentase penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				80%	80%
					100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Sumber Daya Mineral	233,215,000	233,117,715	99.96	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
SK	Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan					
IKK	Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan				80%	94,61%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Farmasi dan Kesehatan	348,214,000	348,212,777	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
SK	Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik					
IKK	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik				60%	150%
	RO REVISI Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Logistik	559,313,000	558,397,018	99.84	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
SK	Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis					
IKK	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis				80%	80%
						100%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SP 2	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan	254,417,000	254,417,000	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	Terwujudnya penguatan nilai transaksi dan daya saing perdagangan						
	IKP.2.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	1,773,139,000	1,772,793,494	99.98	8-9	8-9	100
	SK Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan						
IKK	Jumlah Volume Transaksi E-Commerce				2,4	2,73	113,75
	IKK Persentase Penyelesaian Legal Drafting DEFA				100%	73,85%	73,85%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital	110,656,000	110,635,862	99.98	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	1,662,483,000	1,662,157,632	99.98	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
IKP.2.2	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	945,116,000	945,109,640	100	21,7	23,64	108,9
	SK Terwujudnya Kebijakan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas						
	IKK Nilai Ekspor Barang Nasional						
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan	10,186,000	10,186,000	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan terkait Sistem Monitoring Pengendalian Impor dan Ekspor Terintegrasi	6,530,000	6,530,000	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKP.2.3	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	750,850,000	750,844,140	100	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO Rekomendasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)	177,550,000	177,549,500	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	739,508,000	739,238,786	99.965	13,07	13,22	101,15
SK	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Dalam Negeri						
IKK	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera				12,10	13,57	112,15
IKK	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa				13,31	15,73	118,18
SP.3	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Retail dan Pemanfaatan Pasar Dalam Negeri	557,032,000	556,811,786	99.96	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk	182,476,000	182,427,000	99.97	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi						
IKP.3.1	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	7,209,025,000	7,182,651,203	99.63	4 KSEP dari 4 KSEP	4 KSEP dari 4 KSEP	100
SK	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing						



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		%	Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi		Target	Realisasi	%
IKK	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing				100%	100%	100%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	7,209,025,000	7,182,651,203	99,63	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
IKP.3.2	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	424,556,000	419,059,867	98,71	83	60	72,28
SK	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing						
IKK	Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional				80	85,83	120%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPBPB, KSPN)	424,556,000	419,059,867	98,71	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100
SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan						
IKS.1.2	Biaya Logistik	1,045,055,000	1,044,868,561	100	13,52	N/A	N/A
SP.4	Terwujudnya Ekosistem Nasional yang Berkualitas Logistik						
IKP.4.1	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	500,000,000	500,000,000	100	8,27	10,26	80,60
SK	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas						
IKK	Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB				3,58	6,61	54,16

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	500,000,000	500,000,000	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
IKP.4.2	Rata-Rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	545,055,000	544,868,561	99,98	1,7 hari	1,32 hari	120
	SK Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas						
	IKK Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor Impor				1,3 – 1,8 Hari	1,55 Hari	100%
	IKK Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Import				1,3 – 1,8 Hari	1,09	100%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	545,055,000	544,868,561	99,98	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan						
SS.1.3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	281,939,361,000	281,848,273,218	99.9676924	29,4% terhadap PDB	28,77% terhadap PDB	97,86
SP.5	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD						
IKP.5.1	Persentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses ke OECD	266,233,890,000	266,178,882,140	99,98	100%	100%	100%
	SK Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD						



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja			
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKK	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD				100%	100%	100%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Keanggotaan OECD	266,233,890,000	266,178,882,140	99,98	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100
	SP.6	Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi					
IKP.6.1	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	597,694,000	597,690,106	100	Rp1.905,6Triliun	Rp1.931,2 Triliun	101,32%
SK	Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi						
IKK	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi				-	584,1	112
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha yang Berdaya Saing	311,309,000	311,306,595	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Sistem Perizinan dan Penyelesaian Masalah yang Terkait Perizinan	286,385,000	286,383,511	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SP.7	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi						
IKP.7.1	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	111,616,000.00	111,615,835.00	100	82%	94,32%	105,02%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SK	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
IKK	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi				85	107	120
	RO REVISI Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Bilateral	0	0	0	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
IKK	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi				80	100	120
	RO REVISI Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Internasional	0	0	0	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi						
IKK	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20				100	100	100
IKK	Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)				80	100	125



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
	RO Revisi Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis untuk Tingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan di Forum Ekonomi Multilateral	111,616,000	111,615,835	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
						100
SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan					
IKS.1.4	Rasio PDB Industri Pengolahan	9,340,002,000	8,327,616,873	89.16076113	20,8%	19,07%
SP.8	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas					
IKP.8.1	Tingkat Input Material Sirkular	6,783,275,000	5,778,798,217	85,19	9,2%	9,2%
	SK Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
	IKK Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular				70%	100%
	RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Penguatan Hubungan Diplomasi Strategis	6,783,275,000	5,778,798,217	85,19	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
						100
SP.9	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan SubSektor Pertambangan					
IKP.9.1	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub- Sektor Pertambangan	917,674,000	911,968,669	99.3782835	2,95	2,95
	SK Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar					
	IKK Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub- Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas				100%	98,33%
	IKK Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub- Sektor Industri Logam Dasar				100%	118%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		%	Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi		Target	Realisasi	%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel	574,902,000	571,872,191	99,47	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Alumina	342,772,000	340,096,478	99,22	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Penyusunan Hilirisasi Tembaga	0	0	0	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SP.10	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas						
IKP.10.1	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	1,639,053,000	1,636,849,987	99,90333333	N/A	N/A	N/A
SK	Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas						
IKK	Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB				-	N/A	N/A
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro dan Tekstil	657,023,000	657,019,935	100	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas						
IKK	Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB				1,37	2,27	120
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Mesin dan Alat Transportasi	233,350,000	233,339,894	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Target	%
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Industri Elektronika dan ANEKA	748,680,000	746,490,158	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SS.1 Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan				
IKS.1.5 Devisa Pariwisata	1,077,065,000	1,073,780,515	19,00 – 22,10 miliar USD	100
SP.11 Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata				
IKP.11.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/kunjungan)	967,456,000	964,561,074	USD 1.300 - 1.381,3	99,78
SK Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan				
IKK Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara			14,6-16 Juta	95,8
RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Pariwisata yang Berkualitas	967,456,000	964,561,074	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SS.1 Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan				
IKS.1.6 Rasio PDB Pariwisata				
SP.12 Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata				
IKP.12.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	109,609,000	109,219,441	9,53	8,80
SK Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan				
IKK Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara			1.084 Juta	997,91 Juta
				92

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan	109,609,000	109,219,441	99,64	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan						
IKS.1.7	Indeks Ketahanan Energi	3,443,346,000	3,439,815,011	99.89745471	6,77	7	103,40
SP.13	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan						
IKP.13.1	Pasokan Energi Primer	956,583,000	953,831,889	99.71240227	312	291,84	93,53
SK	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi						
IKK	Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi				100%	120,03%	120%
IKK	Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi				100%	118,38%	120%
IKK	Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi				100%	95,89%	95,89%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Minyak Bumi	541,244,000	539,691,632	99,71	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Gas Bumi	340,475,000	339,285,306	99,65	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Batubara						
IKK	Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara				100%	106,90%	106,90%
IKK	Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)				100%	106,28%	106,28%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKP.13.2	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara	74,864,000	74,854,951	99,99	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	1,179,594,000	1,179,281,243	99.97348605	20	15,75	78,75
	SK Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi						
	Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan				100	120	1120
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan	454,809,000	454,654,771	99,97	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Geologi	454,809,000	454,654,771	99,97	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
IKP.13.3	SK Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor EB						
	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel				-	95% (14,8 Juta kl)	95% (14,8 Juta kl)
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Biofuel	269,976,000	269,971,701	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
	Konsumsi Energi Final per Kapita	795,494,000	795,036,972	99.9425479	0,75	0,56	74,67
	SK Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi						
	Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita				100	108,2	108,2

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan terkait Pengembangan Transmisi Listrik	97,349,000	96,893,222	99,53	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri						
IKK	Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri				100%	124,8%	120%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral	698,145,000	698,143,750	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SP.14	Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global						
IKP.14.1	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	511,675,000	511,664,907	100	164	165,31	100,80
SK	Terwujudnya Implementasi Kebijakan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkelanjutan						
IKK	Presentasi Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / Just Energy Transition Partnership (JETP)				40% (USD 1.728.000.000)	41.5% (USD 1.791.500.000)	71% (USD 3.066.277,752)
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dalam rangka Mendorong Ketahanan dan Swasembada	511,675,000	511,664,907	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan						
IKS.1.8	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	200,000,000	199,969,384	99,98	43	51	84,31



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Target	%
SP.15	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah			
IKP.15.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	200,000,000	199,969,384	99,98
			92	100
SK	Tercapainya Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran			
IKK	Persentase Jumlah Pemda yang Mampu Menyediakan Layanan ETPD Melalui Berbagai Kanal Pembayaran		82%	85%
				104%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan yang terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	200,000,000	199,969,384	99,98
			2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
				100
SS.2	Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional Sesuai dengan Fundamental Ekonomi			
IKS.2.1	Tingkat Inflasi	260,000,000	259,331,652	99,74
			2,5 ± 1	2,92
SP.16	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran			
IKP.16.1	Tingkat Inflasi	260,000,000	259,331,652	99,74
			2,5 ± 1	2,92
SK	Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran			
IKK	Tingkat Inflasi			
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	260,000,000	259,331,652	99,74
			2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
				100
SS.3	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan			
IKS.3.1	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	661,905,000	635,158,328	95.95913734
			35%	42,20%
SP.17	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing			
IKP.17.1	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	661,905,000	635,158,328	95.95913734
			3,30	3,66
				110,82

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SK	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas						
IKK	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi				62,97	68,24	108,37
IKK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				56,30–58,80	56,63	100
IKK	Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional				32,15	33,20	103,26
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	50,940,000	37,669,580	73,95	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	504,250,000	497,080,665	98,58	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO REVISI Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	106,715,000	100,408,083	94,09	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SS.3	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan						
IKS.3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,357,635,000	8,258,358,259	98.81214314	4,5% – 5%	4,85%	100
IKP.8.2	Pengeluaran Perkapita laki – laki dan Perempuan	7,024,186,000	6,925,010,034	98,59	Laki-laki **16.891; Perempuan **9.920	Laki-laki **16.891; Perempuan **9.920	100
SK	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas						



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Target	%
Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki - Laki dan Perempuan			70	100
IKK				
RO Revisi Rekomendasi Koordinasi kebijakan pemerintahan ekonomi	7,024,186,000	6,925,010,034	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SP.19	terwujudnya peningkatan inklusi dan literasi keuangan			
IKP.19.1	Indeks Literasi Keuangan	1,333,449,000	57,25	116
SK	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan			
IKK	Tingkat Literasi Keuangan konvensional		57%	117%
IKK	Tingkat Literasi Keuangan Syariah		39%	111%
RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	1,333,449,000	1,333,348,225	1 Rekomendasi Kebijakan	100
SS.4	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas			
IKS.4.1	Indeks Efektivitas sinkronisasi,koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian	14,468,508,000	14,009,047,565	393.8121037
SP.21	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif			
IKP.21.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	7,240,099,000	6,862,268,362	94.78141614
SK	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif			
IKK	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti		90%	100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		%	Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi		Target	Realisasi	%
	RO Revisi Rekomendasi koordinasi kebijakan percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi	4,690,950,000	4,341,470,048	92,55	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
	RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Percepatan Implementasi Jaminan Produk Halal	205,295,000	177,155,066	86,29	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif						
IKK	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja				95%	95%	100%
	RO Revisi Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	2,343,854,000	2,343,643,248	99,99	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
SP.22	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi yang berkualitas						
IKP.22.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	2,966,000,000	2,960,898,454	99,82799912	3 dari 4	3 dari 4	100
SK	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang berkualitas						



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)				100%	100%
					100%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal				100%	100%
					100%
	279,418,000	276,968,078	99,12	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
SK Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berkualitas					100
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan Pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia				75%	100%
					120%
	982,879,000	982,854,242	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
					100
	0	0	0	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
SK Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang berkualitas					100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan Pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional				75%	75%
					100%
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	772,839,000	772,277,559	99,93	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan
SK Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral					
IKK Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Aksi Indonesia ke OECD				100%	100%
					100%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional				80%	100%
					12%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)				80%	100%
					125%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
*RO REVISI Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis untuk Tingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan di Forum Ekonomi Multilateral	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan
RO REVISI Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Disepakati oleh K/L	131,795,000	130,835,455	99,27	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan
SK Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas					
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi				80%	80%
RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyusunan Roadmap Hilirisasi	361,672,000	361,671,850	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
SK Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang berkualitas					
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)				100%	100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal				100%	100%
	IKK					100%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	437,397,000	436,291,270	99,75	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
						100
SP.23	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas					
	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	303,591,000	303,581,562	99,99689121	3 dari 4	3
						100
SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas					
	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata Dalam Penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas				80%	80%
	IKK					100%
	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi Melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi				80%	80%
	IKK					100%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan	*100
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pembentukan IBMA Dalam Rangka Mendukung Ekosistem Bullion				80%	80%	100%
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati				80%	80%	100%
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1				80%	80%	100%
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				80%	80%	100%
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Smelter Grade Alumina	64,587,000	64,585,115	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kilang Bioethanol	51,932,000	51,931,743	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas						
IKK	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN				80%	80%	100%
IKK	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Industri Baja oleh BUMN				80%	80%	100%
IKK	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu				80%	80%	100%
	*RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur dan Agro	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan	*100
	*RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Farmasi dan Kesehatan	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan	*100
SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas						



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda				80%	80%	100%
RO REVISI Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Transit Oriented Development	63,572,000	63,571,329	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SK Terwujudnya Kegiatan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas						
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion				80%	80%	100%
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion	123,500,000	123,493,375	99,99	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
IKP.23.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	*	*	*	3 dari 4	3 dari 4	100
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas						
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Partisipasi Pemda Dalam Survey Indeks ETPD				80%	80%	100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan yang terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas					
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Stabilitas Harga				80%	80%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Sektor Eksternal				80%	80%
*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas					
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah				80%	80%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Inovasi Pembiayaan Daerah				80%	80%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
*RO REVISI Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Transit Oriented Development	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan	*100
SK Terwujudnya Kegiatan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas						
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyaluran KUR, KUA, dan KIPK				80%	80%	100%
*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan	*100
SP.24 Terwujudnya Kebijakan Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas						
IKP.24.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	*	*	*	3 dari 4	3	100
SK Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas						
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel				80%	80%	100%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan				80%	80%	100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Target	%
*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	*	*	*1 Rekomendasi Kebijakan	*100
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas				
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut			80%	100%
IKK				
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Import di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak			80%	100%
IKK				
*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*100
SK Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas				
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi			80%	100%
IKK				



Uraian		Belanja		Capaian Kinerja			
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKK	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA				80%	80%	100%
	*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	*	*	*	*1 Rekomendasi Kebijakan	*1 Rekomendasi Kebijakan	*100
SK	Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas						
IKK	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan				80%	80%	100%
IKK	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah				80%	80%	100%
	*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	*	*	*	*1 Rekomendasi Kebijakan	*1 Rekomendasi Kebijakan	*100
SK	Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas						
IKK	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor						

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan						
	IKK						
	*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	*	*	*	*1 Rekomendasi Kebijakan	*1 Rekomendasi Kebijakan	100
SP.25	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				3 dari 4	4	120
	IKP.25.1						
SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas						
	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi				80%	80%	100%
	IKK						
	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi				80%	80%	100%
	IKK						
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan dalam Koordinasi Pembangunan Jaringan Gas dan Pabrik LPG	0	0	0	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan terkait Regulasi Perpajakan Eksplorasi Minyak Bumi	0	0	0	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas						
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis serta Mineral Ikutannya				100%	100%	100%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri				100%	100%	100%
*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan	*100
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas						
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik				100%	88,57%	88,57%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik				100%	100%	100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional				100%	90,63%
IKK					90,63%
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan				100%	82,50%
IKK					82,50%
*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan				*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan
SK					*100
Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas					
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel				100%	100%
IKK					100%
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)				100%	100%
IKK					100%
Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS					
IKK					



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
*RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dalam rangka Mendorong Ketahanan dan Swasembada	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas					
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara				100%	100%
IKK Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis				100%	100%
*RO REVISI Rekomendasi Penyusunan Hilirisasi Tembaga	*	*	*	*2 Rekomendasi Kebijakan	*2 Rekomendasi Kebijakan
SP.26 Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	2,262,044,000	2,244,078,784	99,20579723	3 dari 4	4 dari 4
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Yang Berkualitas					
IKK Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro				80%	80%
					100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
IKK Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri				80%	83%
					100%
IKK Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global				80%	84%
					100%
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi	572,576,000	572,154,147	99,93	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
					100
RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	1,040,000	1,040,000	100	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
					100
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas					
IKK Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA				80%	100%
					120%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam	175,402,000	175,389,549	99,99	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
IKK Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka				80%	100%
					120%
RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	314,660,000	307,338,302	97,67	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	305,810,000	305,714,280	99,97	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
SK Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas					
IKK Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja				80%	80%
					100%
IKK Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan				80%	80%
					100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	560,053,000	553,091,172	98,76	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas						
IKK	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi				80%	100%	120%
	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional				80%	100%	120%
	RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021	365,564,000	362,400,463	99,13	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan						
IKK	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				80%	80%	100%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata IKK				80%	80%
			100		100%
SP.27 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas	142,341,000	142,340,420	100	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
IKP.27.1 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian	295,772,000	248,880,046	84,15	100%	100%
RO Revisi Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang regulasi, penegakan hukum dan ketahanan ekonomi	295,772,000	248,880,046	84,15	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
SP.28 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas					
IKP.28.1 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian	510,291,000	503,616,807	98,69	100%	100%
RO Revisi Rekomendasi kebijakan atas isu-isu strategis di bidang pembangunan daerah	510,291,000	503,616,807	98,69	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
SP.29 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas					

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		%	Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi		Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa yang Diterima Menko Perekonomian	558,351,000	555,589,223	99,51	100%	100%	100%
IKP.29.1						
RO Revisi Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Konektivitas, pengembangan jasa dan SDA	558,351,000	555,589,223	99,51	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
SP.30	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas					
Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Transformasi digital, kreativitas dan SDM yang Diterima Menko Perekonomian	24,380,000	24,246,000	99,45	100%	100%	100%
IKP.30.1						
RO Revisi Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Transformasi digital, kreativitas dan SDM	24,380,000	24,246,000	99,45	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
SP.31	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis yang Berkualitas					
Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-Isu Strategis di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian	307,980,000	305,888,327	99,32	100%	100%	100%
IKP.31.1						
RO Revisi Rekomendasi kebijakan atas isu-isu strategis di bidang produktivitas dan daya saing	307,980,000	305,888,327	99,32	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian		Belanja		Capaian Kinerja				
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS.5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas							
IKS.5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian		247,739,833,000	243,623,967,740	98,33	3 dari 4	3,40	113,30
SP.27	Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas							
IKP.27.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat		238,768,960,000	234,660,798,912	100	3 dari 4	3,54	118
	SK	Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas						
	IKK	Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama				3 dari 4	3,52	117,33%
		RO Revisi Layanan Data dan Informasi	1,630,000,000	1,567,377,567	96,16	1 Layanan	1 Layanan	100
		RO Revisi Layanan Fasilitasi Penguatan Kinerja	962,640,000	955,489,607	99,26	7 Dokumen	7 Dokumen	100
		RO Revisi Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,226,984,000	1,091,746,049	88,98	9 Dokumen	9 Dokumen	100
		RO Revisi Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	8,561,085,000	8,358,723,530	97,64	2 Unit	2 Unit	100
		RO Revisi Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	546,060,000	506,886,484	92,83	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	100
SK	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas							

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi				3 dari 4	3 dari 4	100%
	RO Revisi Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Fiskal PNPB, Pengembangan Usaha BUMN, ESDM, Hilirisasi Pertanian, Perniagaan, Industri, Investasi, Sekretariat Kementerian, dan Inspektorat	503,446,000	503,194,074	99,95	1 Layanan	1 Layanan	100
	RO Revisi Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Fiskal Pajak, Ketenagakerjaan, Kerja Sama Ekonomi, Pariwisata, Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Proyek Strategis	433,975,000	433,653,001	99,93	1 Layanan	1 Layanan	100
	RO Revisi Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	469,145,000	469,133,173	100	1 Layanan	1 Layanan	100
	RO Revisi Layanan Reformasi Birokrasi	490,671,000	490,543,224	99,97	1 Dokumen	1 Dokumen	100
SK	Terwujudnya layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dalam dukungan manajemen yang berkualitas						
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia				N/A	4 dari 4	120%
	RO Revisi Layanan Protokol	630,803,000	628,605,145	99,65	1 Layanan	1 Layanan	100
	RO Revisi Layanan Umum	1,199,931,000	1,184,976,950	98,75	1 Layanan	1 Layanan	100
	RO Revisi Layanan Perkantoran	208,871,522,000	205,297,138,389	98,29	2 Layanan	2 Layanan	100
	RO Revisi Layanan Sarana Internal	4,784,980,000	4,775,971,500	99,81	37 Paket	37 Paket	100



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	RO Revisi Layanan Manajemen SDM	1,636,546,000	1,598,672,734	97,69	750 Orang	750 Orang	100
	RO Revisi Layanan Manajemen Keuangan	367,836,000	358,886,602	97,57	1 Dokumen	1 Dokumen	100
SK	Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas						
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan				3	3	100%
	Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi	3,747,365,000	3,745,816,549	99,96	1 Layanan	1 Layanan	100
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,503,874,000	1,500,116,230	99,75	1 Layanan	1 Layanan	100
	RO Revisi Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	207,687,000	207,491,261	99,91	1 Layanan	1 Layanan	100
	RO Revisi Layanan Penyediaan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	102,957,000	102,119,450	99,19	1 Layanan	1 Layanan	100
SK	Terwujudnya Transformasi APIP Sebagai Trusted Advisor dan Strategic Partner						
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat				3 dari 4	3,65	91,25
IKK	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi				90%	100%	111%
	RO REVISI Layanan Sarana Sistem Informasi Inspektorat	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100
	RO REVISI Layanan Audit Internal	891,453,000	884,257,393	99,19	10 Dokumen	10 Dokumen	100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
SP.28	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas					
IKP.28.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	865,818,000	865,811,796	100	3 dari 4	4
SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas					
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi				3 dari 4	4 dari 4
	RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	865,818,000	865,811,796	100	1 Layanan	1 Layanan
SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				3 dari 4	3,79 dari 4



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas						
IKK Indeks kepuasan layanan sinkronisasi koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan badan usaha milik negara bidang industri manufaktur, agro, farmasi dan kesehatan				3 dari 4	4	120
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas						
IKK Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik				3 dari 4	3,71	100
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
	SK Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas					
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis				3 dari 4	3,79
	IKK					120%
	*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	*	*	*	*1 Layanan	*100
SP.29	Terwujudnya layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas					
	Indeks Kepuasan layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	5,662,259,000	5,659,198,164	99,95	3 dari 4	3 dari 4
IKP.29.1						100
SK	Terwujudnya layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas					
	Indeks Kepuasan layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral				3	3
	IKK					100%
	RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri	5,662,259,000	5,659,198,164	99,95	*1 Layanan	*1 Layanan
						*100
SK	Terwujudnya layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas					



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional				3 dari 4	3,66	120%
IKK						
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang kerja sama ekonomi multilateral yang profesional						
Indeks Kepuasan layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral				3 dari 4	3	100
IKK						
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK Terwujudnya layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas						
Indeks Kepuasan layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi				3 dari 4	3,75	125%
IKK						
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal						

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal				3 dari 4	3 dari 4
	IKK					100
	*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	*	*	*	*1 Layanan	*100
SP.30	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	875,502,000	875,500,718	100	3 dari 4	3,43
	IKP.30.1					100
SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas					
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga				3 dari 4	3,59 dari 4
	IKK					100
	RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	875,502,000	875,500,718	100	1 Layanan	1 Layanan
	IKK					100
SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas					



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor						
IKK						
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas						
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional						
IKK				3 dari 4	3,35	100%
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas						
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital						
IKK				N/A	N/A	N/A
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas						

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan				3 dari 4	3,56	119
	*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SP.31	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	478,385,000	475,232,344	99,34	3 dari 4	3,7 dari 4	120
IKP.31.1	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas						
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi				3 dari 4	3,82	120%
	RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	478,385,000	475,232,344	99,34	1 Layanan	1 Layanan	100
SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas						



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara				3 dari 4	3,61 dari 4	100%
IKK						
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK						
Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas						
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi				3 dari 4	3,71	120%
IKK						
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK						
Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas						
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi				3 dari 4	3,86 dari 4	96,5%
IKK						
*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral				*1 Layanan	*1 Layanan	*100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas						
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan				3 dari 4	4	120
	*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SP.32	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas						
IKP.32.1	Indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang koordinasi industri ketenagakerjaan dan pariwisata	1,088,909,000	1,087,425,806	99,86	3 dari 4	3,76 dari 4	125%
SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas						
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil				3 dari 4	3,53	100%
	RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	1,088,909,000	1,087,425,806	99,86	1 Layanan	1 Layanan	100



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
SK IKK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas				
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka				
	*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan
SK IKK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas				
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan				
	*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan
SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas				

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis				3 dari 4	3,93 dari 4	120%
	IKK						
	*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK	terwujudnya layanan sinkronisasi koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan pariwisata						
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata				3 dari 4	3,91 dari 4	100%
	IKK						
	*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SS.6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas						
IKS.6.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4,646,265,000	4,641,229,299	100	90,77	91,52	100,83
SP.33	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing						
IKP.33.1	Nilai Reformasi Birokrasi General	4,646,265,000	4,641,229,299	100	84,01	84,01	100
SK	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai						



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKK Tingkat Maturitas SPIP				3,58	3,886	108,55%
IKK Tindak Lanjut Rekomendasi BPK				75%	85,78%	114,37%
IKK Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas				0,50	N/A	N/A
IKK Opini BPK				WTP	WTP	100%
IKK Survey Penilaian Integritas (SPI)				82	81,77	99,72%
IKK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)				3	N/A	N/A
IKK Nilai Kapabilitas APIP (IACM)				3,27	3,28	100,31%
*RO REVISI Layanan Audit Internal	*	*	*	*10 Dokumen	*10 Dokumen	*100
SK Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama						
IKK Nilai AKIP				73,5	73,5	100%
IKK Indeks Kualitas Kebijakan				95%	95%	100%
IKK Indeks SPBE				3,9	4,00	102,56%
IKK Indeks Perencanaan				97%	97%	100%
IKK Capaian Prioritas Nasional				100%	100%	100%
IKK Capaian Indikator Kinerja Utama				100%	100%	100%
IKK Nilai Kinerja Anggaran				>90	>90	100%
*RO Revisi Layanan Data dan Informasi	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	*RO Revisi Layanan Fasilitas Penguatan Kinerja	*	*	*	*7 Dokumen	*7 Dokumen	*100
	*RO Revisi Layanan Perencanaan dan Penganggaran	*	*	*	*9 Dokumen	*9 Dokumen	*100
	*RO Revisi Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	*	*	*	*2 Unit	*2 Unit	*100
	*RO Revisi Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	*	*	*	*4 Rekomendasi Kebijakan	*4 Rekomendasi Kebijakan	*100
SK	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Hukum dan Organisasi						
IKK	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi				100%	100%	100%
IKK	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi				100%	100%	100%
IKK	Tingkat Capaian Sistem Kerja				5	5 dari skala 5	100%
IKK	Indeks Reformasi Hukum				90	98,10	109%
	*RO Revisi Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Fiskal PNB, Pengembangan Usaha BUMN, ESDM, Hilirisasi Pertanian, Perniagaan, Industri, Investasi, Sekretariat Kementerian, dan Inspektorat	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	*RO Revisi Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Fiskal Pajak, Ketenagakerjaan, Kerja Sama Ekonomi, Pariwisata, Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Proyek Strategis	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO Revisi Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO Revisi Layanan Reformasi Birokrasi	*	*	*	*1 Dokumen	*1 Dokumen	*100
IKP.33.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik				6,76	6,76	100
SK	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan						
IKK	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian di Media Massa				70%	81,28%	116%
IKK	Persentase Penyelesaian Risalet Rapat Koordinasi Tepat Waktu				90%	100%	100%
	*Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO Revisi Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	*RO Revisi Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia						
IKK	Indeks Penyelenggaraan Arsip				98,42	98,42	109,4%
IKK	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)				Nilai diukur tahunan	Baik	100%
IKK	Indeks Pengelolaan Aset				100%	100%	100%
IKK	Indeks NSPK Manajemen ASN				Nilai diukur tahunan	100% capaian internal	100%
IKK	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa				N/A	75,76	89,12%
	*RO Revisi Layanan Umum	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO Revisi Layanan Perkantoran	*	*	*	*2 Layanan	*2 Layanan	*100
	*RO Revisi Layanan Sarana Internal	*	*	*	*37 Paket	*37 Paket	*100
	*RO Revisi Layanan Manajemen SDM	*	*	*	*750 Orang	*750 Orang	*100
	*RO Revisi Layanan Manajemen keuangan	*	*	*	*1 Dokumen	*1 Dokumen	*100
SP.34	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan standar Nasional						
IKP.34.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan				100	100	100



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SK Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerjasama yang berkualitas						
IKK Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja				100%	100%	100%
IKK Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran				100%	100%	100%
IKK persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja				100%	100%	100%
IKK Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan				100%	100%	100%
IKK Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi				100%	100%	100%
*RO Revisi Layanan Data dan Informasi	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
*RO Revisi Layanan Fasilitasi Penguatan Kinerja	*	*	*	*7 Dokumen	*7 Dokumen	*100
*RO Revisi Layanan Perencanaan dan Penganggaran	*	*	*	*9 Dokumen	*9 Dokumen	*100
*RO Revisi Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	*	*	*	*2 Unit	*2 Unit	*100
*RO Revisi Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	*	*	*	*4 Rekomendasi Kebijakan	*4 Rekomendasi Kebijakan	*100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SK Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas						
IKK Persentase Penyelesaian Dokumen Koordinasi Perumusan Produk Hukum				95%	97,55%	102,68%
IKK Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum				95%	100%	105,26%
IKK Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi				100%	100%	100%
IKK Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Sistem Kerja				100%	100%	100%
IKK Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik				100%	100%	100%
IKK Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General				100%	100%	100%
*RO Revisi Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Fiskal PNB, Pengembangan Usaha BUMN, ESDM, Hilirisasi Pertanian, Perniagaan, Industri, Investasi, Sekretariat Kementerian, dan Inspektorat	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
*RO Revisi Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Fiskal Pajak, Ketenagakerjaan, Kerja Sama Ekonomi, Pariwisata, Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Proyek Strategis	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
*RO Revisi Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
*RO Revisi Layanan Reformasi Birokrasi	*	*	*	*1 Dokumen	*1 Dokumen	*100
SK Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif						
IKK Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang Terealisasi Tepat Waktu				90%	98%	109%
IKK Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan				3 Paket Dokumen	3 Paket Dokumen	100%
IKK Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu				3 Paket Dokumen	3 Paket Dokumen	100%
*Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
*Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
*RO Revisi Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	*RO Revisi Layanan Penyajian Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK	Terwujudnya Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang/Jasa Bidang Perekonomian yang Efektif						
IKK	Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu				Nilai diukur tahunan	100%	100%
IKK	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan				Nilai diukur tahunan	5 dari 5	100%
IKK	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik				98,09%	98,09%	109%
IKK	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu				100%	100%	100%
IKK	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan				N/A	22,9%	97%
IKK	Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa				N/A	12,86%	60%
	*RO Revisi Layanan Umum	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO Revisi Layanan Perkantoran	*	*	*	*2 Layanan	*2 Layanan	*100
	*RO Revisi Layanan Sarana Internal	*	*	*	*37 Paket	*37 Paket	*100



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
*RO Revisi Layanan Manajemen SDM	*	*	*	*750 Orang	*750 Orang	*100
*RO Revisi Layanan Manajemen Keuangan	*	*	*	*1 Dokumen	*1 Dokumen	*100
SK Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang Agile						
IKK Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan				80%	83,33%	104,17%
IKK Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti				80%	81,15%	101,43%
*RO REVISI Layanan Audit Internal	*	*	*	*10 Dokumen	*10 Dokumen	*100
SP.35 Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik						
IKP.35.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat				100%	103%	103%
SK Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian						
IKK Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Manajemen Kinerja dan Kerja Sama				85%	85%	100%
IKK Nilai AKIP Sekretariat				82	78,95	96,28%
*RO REVISI Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	*	*	*	*4 Rekomendasi Kebijakan	*4 Rekomendasi Kebijakan	*100
*RO REVISI Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	*	*	*	*2 Unit	*2 Unit	*100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	*RO REVISI Layanan Data dan Informasi	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Manajemen Kinerja Internal	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Perencanaan dan Penganggaran	*	*	*	*9 Dokumen	*9 Dokumen	*100
SK	Terwujudnya Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik						
IKK	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi				100%	100%	100%
	*RO REVISI Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Fiskal PNB, Pengembangan Usaha BUMN, ESDM, Hilirisasi Pertanian, Perniagaan, Industri, Investasi, Sekretariat Kementerian, dan Inspektorat	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Fiskal Pajak, Ketenagakerjaan, Kerja Sama Ekonomi, Pariwisata, Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Proyek Strategis	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Reformasi Birokrasi	*	*	*	*1 Dokumen	*1 Dokumen	*100
SK	Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yang Baik						



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKK Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan						
	*RO REVISI Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
SK Terwujudnya Tata Kelola di Unit Umum dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian						
IKK Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia						
	*RO REVISI Layanan Protokol	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Umum	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Perkantoran	*	*	*2 Layanan	*2 Layanan	*100
	*RO REVISI Layanan Sarana Internal	*	*	*37 Paket	*37 Paket	*100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
	*RO REVISI Layanan Manajemen SDM	*	*	*	*750 Orang	*750 Orang
	*RO REVISI Layanan Manajemen Keuangan	*	*	*	*1 Dokumen	*1 Dokumen
SK	Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik					
IKK	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat				85%	92,73%
	*RO REVISI Layanan Sarana Sistem Informasi Inspektorat	*	*	*	*1 Unit	*1 Unit
	*RO REVISI Layanan Audit Internal	*	*	*	*10 Dokumen	*10 Dokumen
SP.36	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas					
IKP.36.1	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	865,818,000	865,811,796	100	85	100
SK	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi yang Berkualitas					
IKK	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi				85%	85%
						100%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Target	%
SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas				
IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			85%	100%
SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas				
IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan			85%	100%
SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas				

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik	IKK			85%	85%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas	SK					
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	IKK			85%	85%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Baik	SK					
Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	IKK			100%	100%	100%
Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	IKK			100%	100%	100%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN				100%	100%
IKK					100%
Tingkat Ketepatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN				100%	100%
IKK					100%
Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy				100%	100%
IKK					100%
Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN				70%	105,20%
IKK					120%
Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN				3 dari 4	4
IKK					120
*RO REVISI Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan
					*100
RO REVISI Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	865,818,000	865,811,796	100	*2 Layanan	*2 Layanan
					*100
SP.37	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas				

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
IKP.37.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	554,007,000	553,786,516	99,96	85%	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Profesional					
	SK					
	IKK				85%	100%
	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Bilateral					
IKK	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional					
	SK					
	IKK				85%	100%
	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional					
	SK					
SK	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional					
	SK					
	IKK				85%	100%
	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral					
	SK					
SK	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Profesional					
	SK					
	IKK				85%	100%
	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Profesional					
	SK					



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) IKK Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi				85%	100%	100%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional SK						
Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) IKK Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal				85%	100%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang baik SK						
Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi IKK				100%	100%	100%
Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi IKK				100%	100%	100%
Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi IKK				100%	100%	100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
IKK Tingkat Ketataan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi				100%	100%
IKK Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi				100%	100%
IKK Persentase Pembangunan Zona Integrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi				70%	80%
IKK Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi				3 dari 4	3,77 dari 4
RO REVISI Layanan Sarana Sistem Informasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)	0	0	0	1 Unit	1 Unit
RO REVISI Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	554,007,000	553,786,516	99,96	1 Layanan	1 Layanan
*RO REVISI Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan
SP.38 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
IKP.38.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang PERNiagaan dan Ekonomi Digital	1,765,240,000	1,765,237,429	100	85%	85%
					100%
SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas					
IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga				80%	80%
					100%
SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas					
IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor					
SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas					

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional IKK				85%	85%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas SK						
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital IKK				85%	85%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas SK						
Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan IKK				85%	85%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Baik SK						
Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital IKK				100%	100%	100%



Uraian		Belanja		Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	%
IKK	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			100%	100%	100%
IKK	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			100%	100%	100%
IKK	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			100%	100%	100%
IKK	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy			100%	100%	100%
IKK	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			85%	101,93%	120%
IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			3 dari 4	3,24	108%
RO REVISI Layanan Sarana Sistem Informasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)		9,479,000	9,478,290	99,99	1 Unit	100

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

	Uraian	Belanja		%	Capaian Kinerja		
		Pagu Anggaran	Realisasi		Target	Realisasi	%
	RO REVISI Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	880,259,000	880,258,421	100	1 Layanan	1 Layanan	100
	RO REVISI Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	875,502,000	875,500,718	100	1 Layanan	1 Layanan	100
SP.39	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas						
IKP.39.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	738,296,000	735,734,924	99,65	85%	90,91%	106,95%
	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas						
	SK						
	IKK				85	85	100
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi						
	SK						
	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas						
	SK						
	IKK				85%	100%	118%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas SK						
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi IKK				85%	85%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas SK						
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi IKK				85%	85%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas SK						
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan IKK				85%	85%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik SK						

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	IKK			100%	100%	100%
Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	IKK			100%	100%	100%
Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	IKK			100%	100%	100%
Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	IKK			100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	IKK			100%	100%	100%
Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	IKK			80%	77,18%	96,4%
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	IKK			3 dari 4	3,63	100%



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
*RO REVISI Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	*	*	*	*1 layanan	*1 layanan
RO REVISI Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	738,296,000	735,734,924	99,65	1 Layanan	1 Layanan
SP.40 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	722,904,000	720,658,634	99,69	85%	85%
SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil				85%	85%
IKK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas					
SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas					

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Target	%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka			85%	94,7% 114%
IKK				
Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas				
SK				
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan			85%	98,25% 120%
IKK				
Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas				
SK				
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis			85%	100% 120%
IKK				
Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata				
SK				



Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Target	%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata IKK			85%	100%
Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik SK				
Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata IKK			100%	100%
Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata IKK			100%	100%
Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata IKK			100%	100%
Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata IKK			100%	100%
Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi IKK			100%	100%

Evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Uraian	Belanja		Capaian Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy IKK Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				100%	106,35%
					106,35%
Indeks kepuasan layanan sekretariat deputy bidang koordinasi industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata				3 dari 4	3,2 dari 4
					106%
RO REVISI Layanan Sarana Sistem Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	0	0	0	1 Unit	1 Unit
					100
RO REVISI Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	722,904,000	720,658,634	99,69	1 Layanan	1 Layanan
					100
*RO REVISI Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*	*	*	*1 Layanan	*1 Layanan
					*100

Keterangan Rincian Output

RO mendukung satu sasaran Kegiatan
RO mendukung lebih dari satu sasaran Kegiatan, dan jumlah anggaran yang disebutkan hanya satu kali di RO tersebut
RO telah disebutkan sebelumnya dan rincian anggaran tidak disebutkan



ANALISIS EFISIENSI PEMANFAATAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan Capaian Keluaran (CKK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Adapun rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Berdasarkan hasil perhitungan Capaian Kinerja Keluaran (*output*) Kegiatan pada bagian sebelumnya, tingkat efisiensi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pencapaian kinerja di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30. Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025

(dalam ribuan rupiah)

Kode	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Jumlah Blokir	Pagu Anggaran Setelah Blokir	Realisasi Anggaran Setelah Blokir	%	Efisiensi
427752	Menko Bidang Perekonomian	627.255.307	100.171.677	572.083.630	566.168.997	98,97	1,03

Sumber: Kementerian Keuangan (2026)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penghitungan capaian efisiensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 adalah sebesar 1,03. Dalam pelaksanaan kegiatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2025 telah melakukan beberapa program efisiensi baik kepada internal maupun eksternal. Hal ini mengindikasikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan efisiensi dengan menekan realisasi anggaran tanpa mengurangi kinerja kementerian. Kebijakan pemblokiran anggaran tidak menghalangi komitmen Kementerian Koordinator Perekonomian untuk senantiasa mempertahankan capaian kinerja organisasi. Dengan demikian, meningkatnya efisiensi sumber daya organisasi tidak memberikan dampak yang negatif terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Selain dengan menggunakan pendekatan di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2025 telah melakukan beberapa efisiensi dalam proses bisnisnya yang tentu berdampak pada efisiensi anggaran. Beberapa efisiensi proses bisnis yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025 diantaranya adalah: (1) Pemanfaatan Dashboard Kinerja ekon-GO dalam

proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring evaluasi kinerja kementerian dan unit kerja; (2) Pemanfaatan Dashboard Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan dalam rangka memperkuat perdagangan internasional, melalui sistem ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat melakukan efisiensi anggaran dalam hal pengumpulan dan pengintegrasian data lintas K/L; (3) Pemanfaatan Portal TPIN (Tim Pengendali Inflasi Nasional) dalam rangka memonitoring perkembangan inflasi di setiap daerah secara nasional dan *real-time* sehingga memudahkan dalam pemantauan dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat; (4) Portal Akses OECD yang dibangun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengawal proses akses/ keanggotaan penuh Indonesia

ke dalam OECD baik dalam hal pemenuhan dokumen dan sinergi yang dilakukan oleh lintas K/L untuk mencapai target bergabungnya secara penuh Indonesia ke dalam keanggotaan OECD; (6) Pemanfaatan Dashboard Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk memantau progres pelaksanaan program strategis nasional secara langsung (daring/ online) sehingga memastikan ketepatan sasaran program. Melalui efisiensi yang dilakukan ini, diperkirakan dapat memangkas anggaran sebesar Rp 6.131.787.960,00 dari pos biaya rapat di luar kantor dan biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan. Adapun hasil dari efisiensi ini telah dialihkan untuk pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi internasional sehingga pangsa pasar Indonesia semakin luas.





KREDIT USAHA RAKYAT 2025 CETAK KINERJA SOLID, SELURUH KREDIT PROGRAM PEMERINTAH SIAP TAKE-OFF DI TAHUN 2026



Pemerintah terus memperkuat pembiayaan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kapasitas usaha. Hingga menjelang akhir tahun 2025, realisasi penyaluran mencapai Rp240,09 triliun atau 83,77% dari target Rp286,61 triliun. Dana tersebut telah mengalir kepada 4,07 juta pelaku UMKM dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga rendah di level 2,18% per 31 Oktober 2025.

“Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96% dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Sejalan dengan penguatan perekonomian dari sisi produksi, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7%, melampaui target 60%. Pemerintah menegaskan

komitmen untuk meningkatkan peran KUR dalam mendukung penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja. Hingga akhir tahun 2025, diperkirakan penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang.

Lebih lanjut, untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha produktif yang terus berkembang, Pemerintah menetapkan arah kebijakan KUR tahun 2026 dengan target penyaluran sebesar Rp295 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran. Target penyaluran sektor produksi juga ditingkatkan menjadi minimal 65% dari total penyaluran. Adapun relaksasi kebijakan yang sedang difinalisasi khususnya untuk penerima KUR kriteria tertentu antara lain: (i) penetapan suku bunga/margin KUR sebesar 6% (enam persen) flat per tahun; dan (ii) penghapusan batasan frekuensi akses KUR. Kebijakan ini direncanakan akan memperluas relaksasi yang sebelumnya hanya berlaku bagi sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (4P) menjadi mencakup industri pengolahan, konstruksi, manufaktur, dan seluruh sektor ekonomi kegiatan produksi lainnya.

SEKTOR MANUFAKTUR INDONESIA TEMBUS EKSPANSI 3 BULAN BERTURUT-TURUT: PELUANG DAN TANTANGAN



Sektor manufaktur merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan rantai pasok industri nasional. Kinerja sektor ini menjadi indikator vital bagi arah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi di tengah dinamika global yang tidak menentu. *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur sendiri telah menjadi salah satu tolok ukur utama untuk menilai kekuatan aktivitas produksi dan permintaan di sektor ini dari waktu ke waktu.

"Tren ekspansi manufaktur yang konsisten menjadi sinyal bahwa perekonomian nasional berada pada jalur pertumbuhan yang semakin kuat. Ke depan, kami percaya peningkatan permintaan domestik dan kestabilan harga akan menjadi fondasi berharga untuk mempertahankan momentum pertumbuhan," tutur Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto di Jakarta, pada Senin (3/11). Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, PMI manufaktur Indonesia meningkat ke level 51,2 pada Oktober 2025, naik dari posisi 50,4 pada bulan sebelumnya. Angka di atas level 50 menunjukkan ekspansi aktivitas manufaktur oleh survei S&P Global. Capaian tersebut menegaskan keberlanjutan

momentum ekspansi sektor manufaktur selama 3 bulan berturut-turut sejak Agustus. Tren positif ini mencerminkan bahwa industri pengolahan nasional telah mengalami pemulihan dan kembali meningkat menjelang akhir tahun.

Peningkatan kinerja manufaktur utamanya didorong oleh menguatnya permintaan domestik. Stabilitasnya konsumsi rumah tangga, kebijakan stimulus fiskal, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang berorientasi pada produk dalam negeri turut menopang pertumbuhan pesanan baru selama tiga bulan terakhir. Lebih lanjut, kondisi pasar tenaga kerja juga menunjukkan perbaikan pada bulan Oktober. Peningkatan aktivitas industri mendorong kebutuhan tenaga kerja baru yang meningkat. Perkembangan ini menjadi indikasi bahwa pelaku usaha mulai meningkatkan kapasitas produksinya guna mengantisipasi kenaikan permintaan di Kuartal IV-2025. Meskipun tren ekspansi terjaga, Indonesia tetap mewaspadaai sejumlah tantangan guna menjaga keberlanjutan sektor manufaktur. Peningkatan biaya input akibat kenaikan harga bahan baku masih menjadi perhatian, namun sebagian besar pelaku usaha mampu beradaptasi di tengah kondisi tersebut.





04

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
- Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP KemenPANRB
- Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja



A EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Proses pengelolaan kinerja organisasi tidak terlepas dari adanya proses evaluasi kinerja. Melalui proses evaluasi kinerja tersebut, akan diketahui tindakan korektif dan langkah-langkah perbaikan yang harus diambil ke depan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik. Dokumen perencanaan kinerja yang dijadikan acuan dalam pengelolaan kinerja adalah Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target yang harus dicapai oleh Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dalam rentang waktu Tahun 2025 sampai dengan 2029.

TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025– 2029 DAN PENYESUAIAN TARGET KINERJA PADA RENCANA KERJA (RENJA) DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 – 2029, terdapat 3 (tiga) Tujuan Strategis, 6 (enam) Sasaran Strategis (SS), yang diukur melalui 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing SS diukur pencapaiannya melalui IKU dengan target tahunan untuk periode 2025 – 2029 yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2025–2029

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan							
SS.1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	6,3	7,5	7,7	8
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,4	29,5	29,6	29,8	29,9
		Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	21,20	21,52	21,75	21,9
		Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5–4,6	4,6–4,7	4,7–4,8	4,8–4,9	4,9–5,0
		Devisa Pariwisata (Miliar USD)	19,00–22,01	22,00–24,70	25,50–28,60	29,30–32,90	32,00–39,4
		Biaya Logistik/PDB (% PDB)	13,52	13,3	13,0	12,8	12,5
		Indeks Daya Saing Digital di tingkat global	43	43	42	41	40
		Indeks Ketahanan Energi	6,77	6,82	6,86	6,91	6,95

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis	2025	2026	2027	2028	2029
SS.2	Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
Tujuan 2 Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan							
SS.3	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35,0	37,95	40,81	43,57	46,0
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0	4,44-4,96	4,30-4,87	4,15-4,79	4,0-4,77
Tujuan 3 Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel							
SS.4	Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
		Indeks Kepuasan Stakeholders dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
SS.5	Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi	90,77	91,27	91,77	92,27	92,77



Seluruh Indikator dan Target Kinerja yang tertuang pada Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun 2025 telah sejalan dengan Renstra 2025-2029 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Perbandingan Target Kinerja dalam Renstra dan Renja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja		Keterangan
	Renstra	Renja/PK	
Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	5,3%	Tidak Berubah
Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,4% PDB	29,4% PDB	Tidak Berubah
Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8% PDB	20,8% PDB	Tidak Berubah
Rasio PDB Pariwisata	4,5-4,6%	4,5-4,6%	Tidak Berubah
Devisa Pariwisata	19,0-22,1 Miliar USD	19,0-22,1 Miliar USD	Tidak Berubah
Biaya Logistik	13,52% PDB	13,52% PDB	Tidak Berubah
Indeks Daya Saing Digital di tingkat global	43	43	Tidak Berubah
Indeks Ketahanan Energi	6,77	6,77	Tidak Berubah
Tingkat Inflasi	2,5±1	2,5±1	Tidak Berubah
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35%	35%	Tidak Berubah
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5,0%	4,5-5,0%	Tidak Berubah
Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4	3 dari 4	Tidak Berubah
Indeks Kepuasan <i>Stakeholders</i> dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4	3 dari 4	Tidak Berubah
Nilai Reformasi Birokrasi	90,77	90,77	Tidak Berubah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Indikator seluruh Rencana Kerja (Renja) termutakhir Tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2025-2029 dengan tidak adanya perubahan target pada setiap Indikator Kinerja Utama. Hal ini menandakan bahwa kesamaan target tersebut mencerminkan kesinambungan antara perencanaan jangka

menengah dan perencanaan tahunan, sehingga arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan berada pada koridor yang sama. Dengan keselarasan ini, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat lebih fokus, terukur, serta efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN TERHADAP TARGET RPJMN 2025–2029 DAN RKP 2025

Pada dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat beberapa indikator yang merupakan amanat dalam RPJMN 2025–2029 untuk dilakukan pengawalan pencapaian target kinerja ekonomi secara makro. Adapun target yang terdapat dalam RPJMN 2025–2029 tersebut, diturunkan

kepada dokumen perencanaan turunannya hingga pada sampai level Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025. Berikut ini merupakan perbandingan capaian target dan realisasi antara yang target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2025–2029 dan RKP 2025 dengan capaian yang telah diperoleh oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tabel 4.3. Perbandingan Target dan Realisasi Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Target RPJMN 2025–2029	Target RKP 2025	Target Renstra 2025	Realisasi Kinerja 2025
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	5,3–5,6%	5,3%	5,11%
	Biaya Logistik	13,52% PDB	13,5% PDB	13,52% PDB	N/A
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,4% PDB	30,1–30,2% PDB	29,4% PDB	28,77% PDB
	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,80%	20,8%	20,8%	19,07%
	Devisa Pariwisata	19,00–22,10 Miliar USD	22,10 Miliar USD	19,0–22,1 Miliar USD	19,5 Miliar USD*
	Rasio PDB Pariwisata	4,50–4,60 %	4,60%	4,5–4,6	4,9%*
	Indeks Ketahanan Energi	6,77	6,77	6,77	7
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43	45	43	51
Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi	Tingkat Inflasi	2,5±1%	2,5±1%	2,5±1%	2,92%
Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35%	Tidak Tersedia	35%	42,20%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50–5,00%	4,5–5,0%	4,5–5,0%	4,85%

Keterangan: (*) masih bersifat proyeksi



Berdasarkan pada tabel perbandingan antara pencapaian realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025 – 2029, target dalam RKP Tahun 2025, dan Renstra Kementerian Tahun 2025 – 2029, maka hanya satu indikator yang belum terdapat rilis capaian hingga akhir terselesaikannya Laporan AKIP Kementerian Tahun 2025 ini yaitu Biaya Logistik terhadap PDB. Sementara itu terdapat 4 indikator yang belum mampu memenuhi target yang ditetapkan yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB, Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global, dan Rasio Industri Pengolahan terhadap PDB. Namun untuk target kinerja kementerian yang lain seperti Tingkat Inflasi, Indeks Ketahanan Energi, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio PDB Pariwisata, dan Devisa Pariwisata telah berhasil memenuhi ekspektasi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025 – 2029.

Pada Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,11%, namun capaian tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun perekonomian nasional tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global, laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai tantangan eksternal dan domestik. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, serta masih terbatasnya pemulihan permintaan ekspor menahan kinerja sektor-sektor berorientasi luar negeri. Dari sisi domestik, pertumbuhan investasi dan konsumsi belum meningkat secara optimal, seiring dengan kehati-hatian dunia usaha dalam melakukan ekspansi serta masih adanya tekanan biaya produksi dan penyesuaian kebijakan. Selain itu, kinerja beberapa sektor produktif, khususnya industri pengolahan, belum mampu memberikan dorongan pertumbuhan yang signifikan. Kondisi

tersebut menyebabkan akselerasi pertumbuhan ekonomi belum mencapai sasaran yang direncanakan, meskipun tetap mencerminkan stabilitas dan fondasi ekonomi nasional yang relatif terjaga sepanjang Tahun 2025.

Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Indonesia Tahun 2025 tercatat sebesar 28,77% terhadap PDB, namun angka tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan masih ketatnya kondisi pembiayaan. Dari sisi domestik, kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi kapasitas produksi, tertundanya sebagian proyek investasi, serta proses penyesuaian kebijakan dan perizinan turut mempengaruhi laju pembentukan modal. Selain itu, peningkatan biaya produksi dan fluktuasi harga komoditas tertentu juga menekan minat investasi pada beberapa sektor strategis. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kontribusi PMTB terhadap PDB belum meningkat secara signifikan, sehingga belum mampu mencapai target yang direncanakan pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, rasio PDB Industri Pengolahan Indonesia tercatat sebesar 19,07%, namun capaian tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kinerja ini dipengaruhi oleh perlambatan permintaan global yang menekan ekspor manufaktur, serta masih terbatasnya pemulihan kinerja industri berorientasi nilai tambah tinggi. Dari sisi domestik, industri pengolahan menghadapi berbagai tantangan, antara lain kenaikan biaya input dan energi, keterbatasan pasokan bahan baku tertentu, serta belum optimalnya peningkatan produktivitas dan adopsi teknologi. Selain itu, realisasi investasi baru dan ekspansi kapasitas produksi di sektor manufaktur belum berjalan sesuai harapan,

sehingga kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional belum meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan peran industri pengolahan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya optimal, sehingga rasio PDB industri pengolahan pada Tahun 2025 belum mencapai target yang direncanakan.

Rasio PDB Pariwisata Indonesia diproyeksikan mencapai 4,9%, dan capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja positif ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, pemulihan permintaan wisata domestik dan mancanegara, serta membaiknya konektivitas transportasi dan infrastruktur pendukung pariwisata. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan destinasi prioritas, peningkatan kualitas layanan, serta promosi pariwisata yang lebih terarah turut memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Meningkatnya belanja wisatawan dan berkembangnya ekosistem usaha pariwisata juga memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait. Kondisi tersebut menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga rasio PDB pariwisata pada Tahun 2025 tidak hanya sesuai, tetapi juga melampaui target yang direncanakan.

Pada Tahun 2025, Indeks Ketahanan Energi Indonesia tercatat sebesar 7 dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan semakin membaiknya kemampuan Indonesia dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan energi nasional. Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan diversifikasi sumber energi, optimalisasi pasokan energi domestik, serta langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat infrastruktur dan tata kelola sektor energi. Selain itu, percepatan pengembangan energi baru dan

terbarukan, peningkatan efisiensi energi, serta koordinasi lintas sektor yang semakin solid turut memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Kondisi ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya transisi energi dan menjadikan ketahanan energi sebagai salah satu fondasi penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2025.

Indeks Daya Saing Digital Indonesia pada Tahun 2025 di tingkat global tercatat turun ke peringkat 51 dari target yang ditetapkan yaitu 43 dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi posisi Indonesia dalam persaingan digital global. Dari sisi eksternal, percepatan transformasi digital yang sangat agresif di sejumlah negara lain, khususnya negara maju dan emerging economies, menyebabkan peningkatan skor dan peringkat negara-negara tersebut melampaui Indonesia, meskipun Indonesia tetap mencatatkan kemajuan secara absolut. Dari sisi internal, penurunan indeks dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam implementasi agenda transformasi digital, ketimpangan kualitas infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia digital antarwilayah, serta masih terbatasnya peningkatan riset, inovasi, dan adopsi teknologi digital berteknologi tinggi. Ke depan, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital secara inklusif dan berkelanjutan menjadi faktor kunci yang menjadikan capaian indeks ini tidak hanya sesuai, tetapi melampaui target pada tahun selanjutnya.

Disisi lain, tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,92% dan melampaui target yang telah ditetapkan dimana tingkat inflasi dapat ditekan lebih rendah. Capaian ini mencerminkan terjaganya stabilitas harga di tengah dinamika



perekonomian global dan domestik. Pengendalian inflasi didukung oleh koordinasi kebijakan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia, khususnya melalui penguatan pengendalian inflasi pangan, kelancaran distribusi, serta pengelolaan ekspektasi inflasi yang baik. Selain itu, stabilnya pasokan barang dan jasa, terjaganya daya beli masyarakat, serta respons kebijakan yang tepat terhadap potensi gejolak harga turut menjaga inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali.

Sementara itu, proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 42,2% dan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,85%, di mana kedua indikator tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja nasional sebagai hasil dari pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya aktivitas sektor-sektor padat karya serta sektor formal. Peningkatan

investasi, penguatan industri pengolahan dan jasa modern, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas turut berkontribusi terhadap bertambahnya penyerapan tenaga kerja formal. Di sisi lain, penguatan program peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja juga berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan pada Tahun 2025.

CAPAIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TAHUN 2025–2029

Ringkasan dan perbandingan capaian pada Tahun 2025 atas target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian di Tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4. Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Target Renstra 2025	Realisasi Kinerja 2025
SS1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	5,11%
	Biaya Logistik	13,52% PDB	N/A
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,4% PDB	28,77% PDB
	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8%	19,07%
	Devisa Pariwisata	19,0–22,1 Miliar USD	19,5 Miliar USD*
	Rasio PDB Pariwisata	4,5–4,6	4,9%*
	Indeks Ketahanan Energi	6,77	7
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43	51
SS2. Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional Sesuai dengan Fundamental Ekonomi	Tingkat Inflasi	2,5±1%	2,92%

Sasaran Strategis	IKU	Target Renstra 2025	Realisasi Kinerja 2025
SS3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35%	42,20%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5,0%	4,85%
SS4. Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4	3,40
SS5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4	3,53
SS6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	90,77	91,52

Keterangan: (*) masih bersifat proyeksi

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan dokumen perencanaan nasional, yakni RPJMN 2025-2029. Adapun pada Tahun 2025 ini, menurut capaian perbandingan realisasi target dengan target renstra yang telah ditetapkan, terdapat beberapa target ekonomi makro yang belum dapat tercapai yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB, Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global, dan Rasio Industri Pengolahan terhadap PDB. Sementara terdapat 1 (satu) indikator capaian yang belum dapat diketahui hasilnya hingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kementerian Tahun 2025 ini telah terselesaikan, mengingat belum ada rilis data mengenai Biaya Logistik terhadap PDB oleh kementerian terkait.

Kondisi ini dikarenakan oleh berbagai faktor ekonomi riil dan gejolak pasar yang terjadi pada tingkat nasional dan internasional. Dari sisi eksternal, perlambatan ekonomi global, tingginya ketidakpastian geopolitik, serta masih ketatnya kondisi keuangan global menekan arus

investasi dan permintaan ekspor, khususnya pada sektor industri pengolahan yang sangat bergantung pada pasar internasional. Dari sisi domestik, realisasi investasi belum optimal akibat tertundanya sejumlah proyek strategis, proses perizinan yang masih memerlukan penyederhanaan lebih lanjut, serta kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi kapasitas produksi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan PMTB yang berperan penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kinerja industri pengolahan juga menghadapi tantangan struktural, antara lain kenaikan biaya produksi, keterbatasan pasokan bahan baku tertentu, serta belum meratanya adopsi teknologi dan peningkatan produktivitas industri bernilai tambah tinggi. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB belum meningkat secara signifikan, sehingga secara keseluruhan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan menyebabkan indikator-indikator makro tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.



Akan tetapi di tengah kondisi global ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Asia. Banyaknya faktor penghambat yang muncul ini menyebabkan **perlunya evaluasi target indikator-indikator kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya**, khususnya indikator yang ada pada Sasaran Strategis 1. Tentunya, revisi target ini dilakukan dengan tetap memperhatikan arah kebijakan makro nasional, kondisi permintaan dan penawaran pasar domestik, situasi geopolitik internasional serta kondisi perekonomian global pada periode yang akan datang. **Capaian ekonomi makro yang terjadi pada Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi baseline dalam penetapan target kinerja di Tahun 2026** nanti mengingat menjadi tahun kedua dalam pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029 dan menjadi pendorong dalam mendukung ketercapaian target nasional sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2025–2029 maupun RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka **terdapat kemungkinan bahwa target Indikator Sasaran Strategis – 1 di tahun akhir RPJMN 2029 akan mengalami perubahan, mengingat ketidaktercapaian di tahun awal yang akan mempengaruhi pencapaian di 4 tahun mendatang**.

Dengan menjadikan capaian ekonomi makro Tahun 2025 sebagai *baseline*, penetapan target kinerja Tahun 2026 akan dilakukan secara lebih terukur, realistis, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penyesuaian target kinerja dimaksud tetap mempertimbangkan hasil evaluasi capaian IKU, proyeksi kondisi ekonomi global dan domestik, serta kapasitas implementasi kebijakan lintas kementerian/lembaga. Dalam konteks tersebut, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi krusial dalam

memastikan kesinambungan arah kebijakan, penguatan sinergi program, serta keterpaduan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional agar kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dapat dioptimalkan. Melalui pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dampak, diharapkan target kinerja Tahun 2026 tidak hanya mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi juga memperkuat akselerasi pencapaian sasaran RPJMN 2025–2029 dan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

EVALUASI KINERJA TAHUN 2025 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2026

Pada Bab III, telah dijelaskan mengenai Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 yang memperoleh nilai sebesar 106,5% atau berada pada kategori memenuhi ekspektasi. NKO pada Tahun 2025 telah memenuhi ekspektasi meskipun terdapat 4 (empat) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB, Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global, dan Rasio Industri Pengolahan terhadap PDB yang belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pada Nilai Sasaran Strategis (NSS-1). Sebagai langkah korektif atas ketidaktercapaian beberapa Indikator tersebut, maka di tahun 2026 akan dilakukan peningkatan pada bagian perencanaan untuk mengatasi kondisi-kondisi tak terduga pada masa yang akan datang.

Pada Tahun 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja kementerian dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Indikator Kinerja Utama yang merupakan amanat RPJMN 2025 – 2029 yang bersifat makro sama seperti tahun lalu yaitu Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi, Biaya Logistik, Pembentukan Modal

- Tetap Bruto, Rasio PDB Industri Pengolahan, Devisa Pariwisata, Rasio PDB Pariwisata, Indeks Ketahanan Energi, Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global, Tingkat Inflasi, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target capaian didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
- Melakukan penyesuaian target kinerja dari setiap Indikator Kinerja dengan mendasarkan pada capaian yang diperoleh pada Tahun 2025, RPJMN 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan Advetorial APBN 2026;
 - Mempertahankan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian untuk mengukur tingkat kepuasan layanan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai kementerian koordinator kepada para K/L di bawahnya ataupun stakeholder terkait lainnya;
 - Mempertahankan Indikator Kinerja Utama Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dengan menggunakan formulasi yang berbeda dan lebih terukur sehingga lebih memberikan gambaran pengukuran kepada bidang-bidang kebijakan tertentu secara lebih spesifik yang menjadi bidang koordinasi unggulan dan prioritas bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Mempertahankan Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memberikan gambaran seberapa baik pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara menyeluruh;
- Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025–2029 serta capaian kinerja dan evaluasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2025, arah perencanaan kinerja Tahun 2026 sebagaimana yang akan tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Target Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2026
Sasaran Strategis 1 (SS-1): Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,4%
	Biaya Logistik	13,30% terhadap PDB
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,50% terhadap PDB
	Rasio PDB Industri Pengolahan	21,20%
	Devisa Pariwisata	22,0 – 24,70 Miliar USD
	Rasio PDB Pariwisata	4,60 – 4,70%
	Indeks Ketahanan Energi	6,86
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43



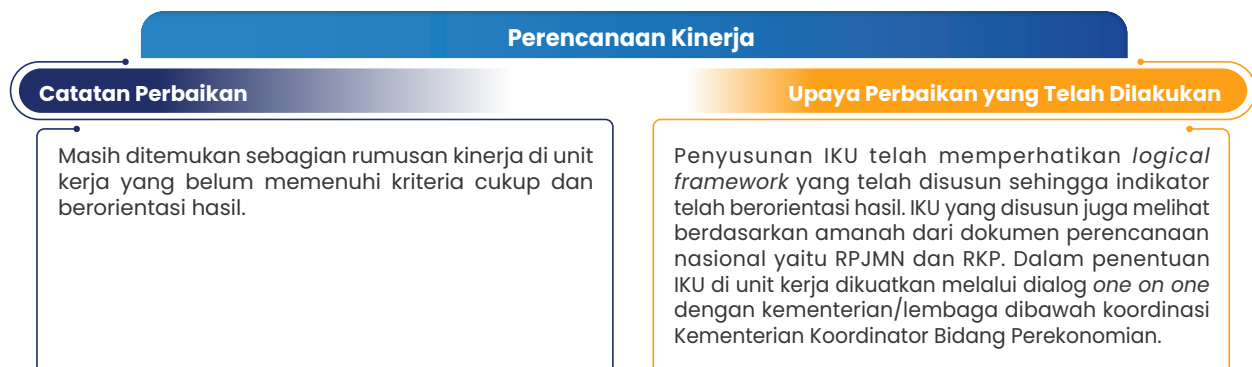
Tabel 4.5. Target Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2026
Sasaran Strategis 2 (SS-2): Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional Sesuai dengan Fundamental Ekonomi	Tingkat Inflasi	(2,5±1) %
Sasaran Strategis 3 (SS-3): Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	37,95%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44 – 4,96%
Sasaran Strategis 4 (SS-4): Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
Sasaran Strategis 5 (SS-5): Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
Sasaran Strategis 6 (SS-6): Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	92

B TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP KEMENPAN-RB

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi SAKIP di seluruh instansi pemerintah dilakukan setiap tahun. Hasil akhir

dari evaluasi SAKIP adalah diperolehnya nilai SAKIP Kementerian serta rekomendasi ataupun strategi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh instansi yang dinilai agar nilai SAKIP tahun mendatang dapat meningkat.



Penjenjangan kinerja yang dimiliki masih perlu disempurnakan. Hal ini disebabkan pada penjabaran kinerja dari level strategis ke taktikal maupun ke operasional belum sepenuhnya dikaitkan dengan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja.

Telah dilakukan identifikasi awal dan pemetaan ulang CSF mulai dari level Menteri hingga unit Eselon II dengan menekankan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta outcome yang diharapkan. Sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, telah disusun Matriks Peran Hasil yang menggambarkan pola hubungan antara kinerja organisasi dengan kontribusi individu.

Identifikasi *crosscutting* kinerja telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan mulai memetakan potensi peran kementerian/ lembaga lain yang bersinggungan dengan kinerja yang dikawal oleh kementerian. Namun, masih terdapat beberapa kinerja strategis, utamanya di level eselon I, yang belum sepenuhnya dipetakan potensi *crosscutting* kinerjanya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan pemetaan awal dan selanjutnya disusun Pohon Kinerja yang dimulai dari tingkat *Ultimate Outcome* hingga tingkat *Output* serta menggambarkan *crosscutting* kinerja baik lintas unit kerja maupun lintas kementerian/ lembaga. Langkah integrasi program dan indikator *crosscutting* ke dalam dokumen perencanaan sudah dilakukan dengan mengacu pada hasil matriks kinerja *crosscutting*.

Pengukuran Kinerja

Catatan Perbaikan

Masih terdapat Indikator kinerja yang belum dilengkapi dengan formulasi penghitungan yang spesifik. Hal ini dapat berakibat adanya ketidakandalan data yang digunakan pada saat proses pengukuran kinerja.

Kualitas Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan melalui aplikasi masih perlu dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena penginformasian kendala dan upaya mewujudkan kinerja tiap triwulan sebagai bahan pengukuran dan evaluasi kinerja masih belum spesifik dalam menjelaskan ketidak capaian realisasi kinerja triwulanan.

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian dalam rencana aksi unit kerja, dan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.

Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan

Telah disusun draft penyempurnaan formulasi indikator kinerja dengan memperhatikan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Draft ini juga mencakup identifikasi sumber data yang lebih valid serta frekuensi pengukuran yang realistis.

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama secara konsisten telah melakukan reviu internal terhadap laporan monev triwulanan yang disampaikan oleh unit Eselon I. Reviu difokuskan pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Unit kerja telah didorong untuk lebih aktif mengunggah capaian kinerja dan bukti dukung kegiatan melalui aplikasi ekon-Go. Sampai saat ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi.

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama secara konsisten telah melakukan reviu internal terhadap laporan monev triwulanan yang disampaikan oleh unit Eselon I. Reviu difokuskan pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Unit kerja telah didorong untuk lebih aktif mengunggah capaian kinerja dan bukti dukung kegiatan melalui aplikasi ekon-Go. Sampai saat ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi.



Pelaporan Kinerja

Catatan Perbaikan

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja kementerian belum dikaitkan dengan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja yang sudah diperoleh dengan target dalam RPJMN ataupun RKP nasional.

Laporan kinerja eselon 1 (satu) belum dilengkapi dengan informasi akan upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisir faktor kegagalan/ kendala dalam merealisasikan kinerja yang diperjanjikan.

Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya maupun, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya.

Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan

Pada bagian analisis komparatif telah disusun ke dalam Laporan Kinerja tingkat Kementerian, kemudian untuk monitoring periodik terhadap indikator kinerja yang terkait langsung dengan target RPJMN dan RKP telah dilakukan setiap triwulan, dan hasil monitoring tersebut sebagai bahan melihat dasar analisis gap capaian.

Telah disusun laporan kinerja dengan format terbaru yang menampilkan komponen khusus memuat kendala dan langkah mitigasi yang dilakukan. Komponen menginformasi bagaimana kendala serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan oleh unit kerja sebagai upaya mencapai tujuan indikator.

Telah dilakukan rewiu laporan kinerja secara rutin setiap triwulan yang mencakup analisis pencapaian indikator kinerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan. Hasil rewiu telah di-align dengan dokumen perencanaan tahunan khususnya Renja dan PK dan hasil dari alignment ini tertuang dalam Bab 4 Laporan Kinerja tahunan pada bagian perencanaan kinerja tahun selanjutnya (Perjanjian Kinerja tahun selanjutnya) hal ini dilakukan agar strategi ke depan lebih adaptif terhadap hambatan yang dihadapi.

Pelaporan Kinerja

Catatan Perbaikan

Pemanfaatan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan perencanaan belum optimal dimanfaatkan oleh unit kerja dan biro yang mengawal perencanaan kinerja.

Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan

Telah dilakukan proses klasifikasi temuan berdasarkan kategori kelemahan (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja). Mekanisme rewiu berkala sudah mulai diterapkan melalui rapat monitoring capaian kinerja atau forum lainnya. Dalam forum ini, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama bersama unit kerja terkait menelaah progres tindak lanjut dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

C RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, sejumlah rencana aksi terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi telah dilaksanakan secara berkesinambungan (*continuous improvement*). Pada periode berikutnya, rencana tindak lanjut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan rewiu rumusan kinerja yang dimiliki saat ini pada setiap jenjang jabatan sebagai upaya memastikan bahwa setiap kinerja dikawal dengan indikator kinerja yang cukup dan berorientasi hasil, sehingga terdapat perbaikan rumusan kinerja pada periode selanjutnya.

2. Memperkuat analisis *critical success factor* dalam menentukan penjenjangan kinerja sehingga hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja mampu mendukung tercapainya tujuan strategis. Kemudian hal ini menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan tahun depan.
3. Mengoptimalkan potensi *crosscutting* kinerja yang memiliki dampak terhadap kinerja dalam penyelesaian isu strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya pada level eselon I yang memiliki hubungan kinerja lintas instansi pemerintah yang merupakan tupoksi koordinasinya sehingga kolaborasi yang dilakukan efektif dan konkrit.
4. Memperbaiki rumusan indikator kinerja pada bagian formulasi penghitungan sehingga lebih presisi dalam capaian yang akan dilaporkan pada dokumen pelaporan.
5. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran IKU secara berkala untuk memastikan indikator yang digunakan relevan, terukur, dan mencerminkan peran koordinatif kementerian, serta mampu menggambarkan kontribusi nyata terhadap capaian pembangunan ekonomi nasional.
6. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja untuk mendukung integrasi perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara lebih efisien dan transparan.
7. Memperkuat ketajaman analisis proses monitoring dan evaluasi yang dituangkan ke dalam dokumen pelaporan yang diunggah ke dalam aplikasi, terutama terkait dengan kendala dan upaya pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana mampu menggambarkan secara spesifik kondisi nyata dari faktor kunci pada setiap periode dalam mencapai sasaran tujuan.
8. Mendorong pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi, aktivitas penyesuaian antara kinerja dan anggaran, dan rencana aksi baik unit kerja maupun individu.
9. Mengoptimalkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja secara periodik melalui pemanfaatan data yang handal, tepat waktu, dan terintegrasi, guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja.
10. Mengoptimalkan informasi dalam evaluasi AKIP internal sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja secara berkala di seluruh unit kerja, sehingga meminimalisir temuan yang berulang dan kualitas SAKIP pada seluruh unit kerja meningkat.
11. Menjamin pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP secara konsisten dan terukur, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja kementerian secara berkelanjutan.
12. Meningkatkan kompetensi aparatur di bidang perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja melalui pelatihan dan pendampingan, serta mendorong penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas.



PANTAU PENYALURAN BLTS KESRA DI KANTOR POS JAKARTA TIMUR, MENKO AIRLANGGA: JAGA DAYA BELI DAN DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV



Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks tersebut, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) menjadi salah satu intervensi penting yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah juga akan terus memastikan penyaluran BLTS Kesra berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

“BLTS Kesra adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan dan turut menopang pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pos Jakarta Timur, sekaligus memantau penyerahan BLTS Kesra kepada masyarakat.

BLTS Kesra merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi nasional pada Triwulan IV Tahun 2025. Program ini dirancang agar bantuan dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga 3 Desember 2025, secara nasional BLTS Kesra telah diterima oleh 26 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 75% dari total target. Penyaluran dilakukan melalui Bank Penyalur serta PT Pos Indonesia, yang memegang peran strategis dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses layanan perbankan.

PEMERINTAH PASTIKAN KESIAPAN IMPLEMENTASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI 2025



Guna menjamin perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Untuk memastikan berbagai program unggulan tersebut dapat segera dijalankan secara optimal sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan QIV-2025 bersama sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait, di Wisma Danantara Indonesia.

Terkait dengan program akselerasi di 2025, untuk program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate 1 tahun, Pemerintah telah menyiapkan mekanisme melalui sistem SIAPKerja. Saat ini, Pemerintah tengah mengumpulkan

kebutuhan dari sisi perusahaan (demand side), baik BUMN maupun swasta. Selanjutnya, sistem akan dibuka untuk pendaftaran peserta mulai 15 Oktober 2025, sehingga lulusan dapat segera mengakses kesempatan magang yang tersedia. Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan mengenai program untuk mendorong penyerapan tenaga kerja seperti program Koperasi Merah Putih, penguatan sektor pertanian dan kelautan-perikanan, pengembangan desa nelayan, serta program revitalisasi tambak di kawasan Pantura seluas 20 ribu hektare.

Untuk transportasi udara, Pemerintah juga akan memberikan diskon tiket pesawat melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), diskon fuel surcharge, hingga penurunan harga avtur sehingga masyarakat dapat menikmati penurunan harga tiket sebesar 12–14%. Pemberlakuan kebijakan tersebut akan dilakukan untuk periode pembelian 22 Oktober 2025 – 10 Januari 2026, serta periode penerbangan 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026.



A close-up photograph of a person's hands constructing a wooden structure using rectangular blocks. The hands are positioned on the left side of the frame, with one hand holding a block and the other supporting the structure. The background is blurred, showing a window with light coming through. A blue semi-transparent overlay covers the right half of the image, featuring the text '05 PENUTUP' in white. Below the text is a thin white horizontal line. In the foreground, a spiral-bound notebook and a pen are visible on a white surface.

05

PENUTUP



05 PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tahun pertama dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan mendatang. Laporan Kinerja ini disajikan dengan memberikan jawaban atas janji kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025, yang terdiri atas 6 (enam) Sasaran Strategis yang diwakili 14 Indikator Kinerja Utama Kementerian. Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 sebesar 105,35%. Nilai ini menunjukkan keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang memiliki fundamental yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan momentum yang penting bagi perekonomian nasional di masa yang akan datang sebagai bekal menghadapi tantangan yang baru dalam merealisasikan Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dimana hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, biaya logistik, pembentukan modal tetap bruto, rasio PDB industri pengolahan, devisa pariwisata, rasio PDB pariwisata, indeks ketahanan energi, indeks daya saing digital di tingkat global, tingkat inflasi, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan tingkat pengangguran terbuka.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2025 mencapai 5,11% dimana meskipun pada Tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi belum memenuhi target RPJMN yang telah ditetapkan oleh Bappenas maupun dalam Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diperjanjikan, namun dalam periode yang sama pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Tingginya laju pertumbuhan perekonomian ini didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat, pulihnya mobilitas masyarakat serta bauran kebijakan yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menghadapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di tahun 2029, menjadi tantangan bagi internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengkoordinasikan beberapa sektor unggulan seperti sektor manufaktur (hilirisasi), industri otomotif, konstruksi, jasa, dan investasi.

Indikator lain yang menunjukkan kondisi perekonomian yang baik adalah inflasi. Indonesia mampu menjaga kenaikan harga sejumlah komoditas di tengah isu inflasi dan ketidakpastian global seperti situasi geopolitik yang tidak menentu di berbagai negara seperti masih berlanjutnya perang antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina, ketegangan negara-negara di Timur Tengah maupun ketegangan situasi di kawasan Laut China Selatan. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi Tahun 2025 sebesar 2,92% dimana capaian ini masih berada pada kisaran yang ditetapkan. Inflasi yang terjaga dalam kisaran sasaran merupakan hasil dari konsistensi koordinasi, sinkronisasi, dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan berbagai pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Pada Tahun 2025, capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Indonesia sebesar 28,77% terhadap PDB belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja investasi nasional masih menghadapi tantangan, baik dari sisi global maupun domestik. Ketidakpastian perekonomian dunia dan kondisi pembiayaan yang relatif ketat mempengaruhi arus investasi, sementara di dalam negeri, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi akibat penyesuaian kebijakan, proses perizinan, serta meningkatnya biaya produksi. Meskipun demikian, kinerja PMTB Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang relatif baik dan berada pada tingkat yang kompetitif dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya yang mengalami perlambatan investasi lebih dalam.

Sejalan dengan itu, rasio PDB Industri Pengolahan Indonesia pada Tahun 2025 tercatat sebesar

19,07%, yang juga belum mencapai target yang direncanakan. Perlambatan permintaan global berdampak pada ekspor manufaktur, sementara di dalam negeri sektor industri masih menghadapi tantangan struktural seperti kenaikan harga input, keterbatasan bahan baku, serta belum optimalnya transformasi teknologi dan produktivitas. Walaupun demikian, kontribusi industri pengolahan Indonesia tetap relatif stabil dan menunjukkan daya tahan yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain yang mengalami kontraksi sektor manufaktur akibat tekanan global.

Di sisi lain, rasio PDB sektor pariwisata diproyeksikan mencapai 4,9% dan berhasil melampaui target. Kinerja ini mencerminkan pemulihan sektor pariwisata yang kuat, didukung oleh meningkatnya pergerakan wisatawan domestik dan mancanegara, perbaikan konektivitas, serta penguatan infrastruktur dan layanan pariwisata. Kebijakan pengembangan destinasi prioritas dan promosi pariwisata yang lebih terarah turut memperkuat peran sektor ini sebagai sumber pertumbuhan baru, menjadikan pariwisata Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan banyak negara lain di kawasan. Sementara itu, capaian Devisa Pariwisata Tahun 2025 diproyeksikan sebesar USD 19,5 miliar sehingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Kendati masih bersifat proyeksi, capaian ini tidak dipungkiri dipengaruhi oleh mulai berkembangnya destinasi pariwisata baru di Indonesia. Namun juga tetap diwaspadai bahwa daya saing pariwisata di negara-negara tetangga yang sedang tumbuh dan berkembang seperti Vietnam dan Thailand. Kedepan, pemerintah akan terus berfokus pada pengembangan pariwisata nasional guna meningkatkan nilai devisa pariwisata di waktu yang akan datang.

Selanjutnya, Indeks Ketahanan Energi Indonesia pada Tahun 2025 mencapai angka 7 dan



melampaui target. Capaian ini menunjukkan peningkatan kapasitas nasional dalam menjamin ketersediaan dan keberlanjutan energi, melalui diversifikasi sumber energi, penguatan pasokan domestik, serta kemajuan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Di tengah ketidakpastian energi global, posisi Indonesia tergolong lebih solid dibandingkan sejumlah negara yang masih menghadapi tekanan pasokan dan volatilitas harga energi.

Capaian kinerja Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global turun ke peringkat 51 pada Tahun 2025 dan belum mencapai target peringkat yang telah ditetapkan oleh RPJMN 2025 – 2029. Penurunan ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi posisi Indonesia dalam persaingan digital global. Dari sisi eksternal, percepatan transformasi digital yang sangat agresif di sejumlah negara lain, khususnya negara maju dan *emerging economies*, menyebabkan peningkatan skor dan peringkat negara-negara tersebut melampaui Indonesia, meskipun Indonesia tetap mencatatkan kemajuan secara absolut. Dari sisi internal, penurunan indeks dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam implementasi agenda transformasi digital, ketimpangan kualitas infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia digital antarwilayah, serta masih terbatasnya peningkatan riset, inovasi, dan adopsi teknologi digital berteknologi tinggi. Selain itu, tantangan dalam harmonisasi regulasi digital, penguatan keamanan siber, serta pemanfaatan teknologi digital oleh dunia usaha khususnya UMKM turut mempengaruhi daya saing digital nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya transformasi digital terus berjalan, kecepatan dan efektivitas implementasi kebijakan perlu ditingkatkan agar Indonesia mampu menjaga dan memperbaiki posisinya dalam persaingan digital global pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, proporsi penciptaan lapangan kerja formal yang mencapai 42,2% serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85% juga melampaui target. Capaian ini menunjukkan perbaikan nyata pada kondisi pasar tenaga kerja nasional, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan efektivitas kebijakan penciptaan lapangan kerja. Dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang masih menghadapi tingkat pengangguran tinggi pasca pandemi, kinerja ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan hasil yang relatif lebih positif dan inklusif.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berkontribusi kepada capaian indikator perekonomian nasional melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional. Pada tingkat unit kerja, kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dilakukan untuk mengawal capaian sasaran strategis yang lebih spesifik, yang dibungkus dalam Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian. Sampai dengan akhir Tahun 2025, persentase capaian Nilai Sasaran Strategis ini mencapai 113,30%. Hal ini berarti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mewujudkan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang berkualitas di berbagai bidang perekonomian yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain itu, dalam rangka melakukan pengendalian kualitas dalam memberikan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan satu indikator kinerja utama yang menilai perihal kualitas tersebut. Adapun pengukuran ini terlihat di dalam Sasaran Strategis Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas.

Sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian. Indeks tersebut tercapai dengan nilai 3,53 atau bernilai Baik. Dengan demikian, hasil pengukuran capaian hingga akhir Tahun 2025 menunjukkan bahwa Nilai Sasaran Strategis ini mencapai 117,7%.

Capaian organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan cerminan dari keberhasilan atas pengelolaan sumber daya organisasi yang baik. Pengelolaan sumber daya organisasi menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2025 yang terangkum dalam Sasaran Strategis 6, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas. Sasaran ini diukur melalui satu indikator yaitu menggunakan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nilai tersebut digunakan karena di dalamnya telah memiliki berbagai aspek penilaian tata kelola organisasi secara menyeluruh yakni Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil pengukuran capaian hingga akhir Tahun 2025 menunjukkan bahwa Nilai Sasaran Strategis ini mencapai 100,83%.

Berdasarkan keseluruhan capaian kinerja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan mandatnya secara efektif dan akuntabel. Capaian IKU yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja sebagian besar telah terpenuhi, bahkan melampaui target pada beberapa

indikator strategis. Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari:

1. Penguatan mekanisme sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian lintas kementerian/lembaga;
2. Peningkatan kualitas perumusan rekomendasi kebijakan berbasis data;
3. Optimalisasi peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai *policy integrator* dalam isu-isu strategis perekonomian;
4. Dukungan tata kelola internal yang semakin akuntabel dan adaptif.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyadari bahwa pencapaian kinerja Tahun 2025 adalah hasil dukungan dan kerja sama dengan banyak pihak. Pada 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempererat jalinan koordinasi dengan banyak pihak terutama pada program kegiatan yang bersifat *crosscutting* dengan kementerian/ lembaga terkait lainnya sehingga terobosan-terobosan kebijakan yang dikeluarkan dapat dilakukan untuk terus mengawal berbagai indikator perekonomian nasional. Terhadap peningkatan kualitas dan kinerja internal organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui penguatan koordinasi kebijakan, peningkatan kualitas rekomendasi strategis, serta penyempurnaan tata kelola kinerja. Dengan demikian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan perekonomian nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



KONSISTEN MENJAGA DISIPLIN FISKAL, S&P GLOBAL PERTAHANKAN PERINGKAT BBB UNTUK INDONESIA



Lembaga pemeringkat S&P Global kembali mengafirmasi peringkat kredit jangka panjang Indonesia pada BBB dan jangka pendek pada A-2 dengan outlook stabil pada Selasa, (29/07). Hal ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kesinambungan disiplin fiskal Indonesia dan prospek ekonomi yang tetap positif, meskipun menghadapi ketidakpastian eksternal yang meningkat. Lembaga S&P menilai Pemerintah akan terus menjaga defisit tahunan dalam batas maksimal 3% terhadap PDB. Selain itu, pembangunan di industri berbasis komoditas dan investasi di sektor hilir dapat berkontribusi menjaga ketahanan eksternal dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Lembaga S&P juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat, sekitar 5% per tahun selama 2-3 tahun ke depan, meski pertumbuhan pada tahun 2025 diperkirakan sedikit melambat akibat penurunan belanja infrastruktur. Permintaan domestik diprediksi akan menjadi motor utama pertumbuhan didukung oleh program Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah serta potensi investasi

dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara. Menko Airlangga menyampaikan Pemerintah menyiapkan serangkaian langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II tahun 2025, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional sekaligus untuk memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut, guna mencapai target pertumbuhan tahun 2025, diperlukan sinergi kebijakan melalui APBN dan non-APBN.

Sedangkan di bidang investasi, Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas data serta aksesibilitas informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) melalui sinergi dengan BPS. Selain itu, langkah percepatan juga didorong dalam pelaksanaan Kredit Investasi Padat Karya, peningkatan sasaran Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), percepatan realisasi Kredit Program Perumahan, serta optimalisasi penyerapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP (JETP) SIAPKAN RP350 TRILIUN UNTUK PEMBIAYAAN RENEWABLE ENERGY DI INDONESIA



Menko Airlangga menekankan bahwa transisi energi telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan dalam Asta Cita, khususnya penguatan ketahanan energi dan pangan melalui pembangunan ekonomi hijau. Agenda tersebut juga penting guna menopang target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Hingga November 2025, Indonesia telah berhasil memobilisasi USD3.1 miliar melalui skema JETP, sementara USD5.5 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek konkret. Selain itu, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland juga menyampaikan dua studi terkait Just Framework yang memberikan langkah-langkah implementatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam transisi energi Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas kontribusinya melalui Sekretariat JETP, serta kepada seluruh donor IPG atas dukungannya dalam penyusunan JETP Progress Report 2025 yang saat ini sedang difinalisasi. Laporan ini menjadi fondasi untuk memperkuat fase implementasi proyek dan program transisi energi ke depan, yang akan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Pemerintah Jerman dan Jepang melalui JETP Delivery Unit (JDU). Adapun dalam pipeline transisi energi, saat ini pemerintah menyoroti 2 (dua) proyek prioritas yang ditargetkan memiliki progres dan dampak signifikan, yaitu Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan program Dedieselisasi yang menjadi perhatian mitra internasional. Keduanya memerlukan dukungan erat antara pemerintah, mitra internasional, lembaga keuangan, dan industri.



JELANG CONFERENCE AND EXHIBITION ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA, MENKO AIRLANGGA TEKANKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI SEKTOR LOGISTIK



Di tengah gejolak ketidakpastian global, neraca perdagangan Indonesia bulan Mei 2025 tetap kokoh dengan torehan surplus mencapai USD4,3 miliar. Selain mengalami peningkatan 2,609% (mtm), kinerja positif tersebut juga memperpanjang tren surplus selama 61 bulan berturut-turut. Kinerja apik tersebut ditopang oleh surplus sektor nonmigas yang membukukan capaian USD5,83 miliar, sementara sektor migas mengalami defisit USD1,53 miliar. Salah satu tantangan utama yang terus menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja perdagangan yakni terkait biaya logistik nasional. Pemerintah terus mendorong transformasi logistik sebagai bagian integral dari implementasi program Pemerintah untuk mendukung kelancaran proses perdagangan.

“Dengan ekspor yang masih positif, hari ini dilakukan kegiatan untuk mendorong logistik kita agar biaya logistik yang hari ini berada di kisaran 14,5%, diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5% dan terus turun ke 8%. Dan Pemerintah juga akan terus berupaya termasuk deregulasi di sektor logistik agar kita bisa single digit,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Peluncuran Asosiasi Logistik dan Forwarder

Indonesia (ALFI) Conference and Exhibition (CONVEX) 2025, Rabu (2/07).

Secara global, indeks logistik Indonesia saat ini berada pada peringkat 61 dari 139 negara yang tercermin dari Logistics Performance Index (LPI) tahun 2023. Guna meningkatkan performa logistik nasional secara berkelanjutan, upaya deregulasi di sektor logistik perlu untuk terus diakselerasi Pemerintah. Di samping melalui penyempurnaan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE), keberadaan ALFI CONVEX diharapkan dapat menjadi instrumen pelengkap dalam mendukung penguatan logistik nasional. Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional yang bertujuan menurunkan persentase biaya logistik nasional terhadap PDB dan meningkatkan kinerja logistik global Indonesia. Rancangan Perpres tersebut memuat tiga strategi utama yakni Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik, Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Logistik, dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik.

AKSELERASI RENEWABLE ENERGY DAN NET ZERO EMISSION, MENKO AIRLANGGA DORONG KEMANDIRIAN ENERGI DAN HILIRISASI



Dalam delapan Prioritas Nasional (PN) Asta Cita Presiden 2025 – 2029, pengelolaan sumber daya alam menjadi poin utama pembangunan, khususnya di bidang pertambangan yang tercermin dalam PN 2 tentang kemandirian dan ketahanan energi serta PN 5 tentang hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Agenda Asta Cita yang telah ditetapkan juga sejalan dengan sasaran utama dalam RPJPN 2025 – 2045, yang diantaranya berfokus pada intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *Net Zero Emission*. Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan cadangan batubara yang besar, tidak hanya mengandalkan batubara sebagai sumber energi, tetapi juga mendorong hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Salah satunya yaitu pengembangan Dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dan beban subsidi pemerintah. Selain itu, pengembangan metanol yang dibutuhkan dalam produksi biodiesel juga perlu untuk didorong.

Pemerintah telah menetapkan roadmap untuk 28 komoditas pilihan yang akan menjadi fokus program

hilirisasi. Potensi investasi dapat mencapai USD618,1 miliar dan menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja hingga 2040. Nilai ekspor diperkirakan mencapai USD857,9 miliar dan PDB mencapai USD235,9 miliar. Investasi pada proyek-proyek hilirisasi minerba diperkirakan mencapai USD20 miliar. Dengan adanya investasi, pengembangan teknologi tinggi untuk pemanfaatan batubara dapat ditingkatkan, termasuk melalui kombinasi dengan pembakaran amonia atau hidrogen, sehingga ke depan teknologi *clean coal* diharapkan menjadi andalan energi Indonesia.

“Bagi industri oil and gas, *carbon capture and storage* juga bisa dilakukan untuk *enhanced gas recovery*. Dengan *carbon capture and storage* itu menambah produksi gas. Pemerintah juga terus mendorong kegiatan hilirisasi mineral dengan mengedepankan prinsip *environment, social, and governance*. Ini menjadi satu tantangan juga bagi industri agar *good mining practice* dan juga *green mining practice* ini bisa terus didorong,” ujar Menko Airlangga.

Lampiran





Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

PERJANJIAN KINERJA

TA . 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, fluid strokes that form the name Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%
		1.2	Biaya Logistik	13,52% terhadap PDB
		1.3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,4% terhadap PDB
		1.4	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8%
		1.5	Devisa Pariwisata	19,00 – 22,10 miliar USD
		1.6	Rasio PDB Pariwisata	4,5% - 4,6%
		1.7	Indeks Ketahanan Energi	6,77
		1.8	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43
2.	Terkendalnya Tingkat Inflasi Nasional Sesuai dengan Fundamental Ekonomi	2.1	Tingkat Inflasi	(2,5 ± 1)%
3.	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan	3.1	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35%
		3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5% - 5%
4.	Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 dari 4 (Baik)
6.	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas	6.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	90,77



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp 165.935.416.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 293.830.838.000
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Rp 459.766.254.000

Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah

Jakarta, Januari 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Airlangga Hartarto



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

MANUAL IKU

TA . 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.1

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Deskripsi IKU	:	Definisi Salah satu agenda pembangunan yang teramanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas tersebut didorong oleh capaian pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga jasa-jasa. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali terdapat isu dan masalah yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing sektor serta tidak dapat diselesaikan antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi saling berbenturan satu sama lain atau overlapping. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diamanatkan pada RPJMN, maka diperlukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam kurun periode 1 tahun. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Formula Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut: $\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \left(\frac{\text{PDB/PDRB tahun ini} - \text{PDB/PDRB tahun lalu}}{\text{PDB/PDRB tahun lalu}} \right) \times 100\%$ Keterangan: Gt = Pertumbuhan ekonomi periode t (year on year) PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB(t-1) = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya t-1 (berdasarkan harga konstan) Sebagai pendapatan nasional, PDB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan. Sementara ukuran pertumbuhan ekonomi bukanlah dalam satuan rupiah, melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan negatif, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan nasional riil yang diperoleh negara pada periode

tertentu lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan periode yang lalu. Pengukuran realisasi kinerja IKU Pertumbuhan Ekonomi didasarkan pada perbandingan pertumbuhan ekonomi yang dihitung (realisasi) dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dikalikan 100%.
Tujuan
Untuk mengetahui besaran pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan yang merupakan indikator perwujudan dari perekonomian indonesia yang unggul. Besaran pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan berjalan akan dijalankan sebagai basis data untuk membuat kebijakan perekonomian yang berkualitas.

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (....) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	5,3%	5,3%
s.d. Triwulan I	5,3%	-
s.d. Triwulan II	5,3%	-
s.d. Triwulan III	5,3%	-
s.d. Triwulan IV	5,3%	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.2

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth					
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan					
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).					
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.2. Biaya Logistik					
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td> Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa. Menurut BAPPENAS bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara Makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu: 1. Biaya Transportasi 2. Biaya Pergudangan 3. Biaya Penyimpnana Persediaan (Inventory) 4. Biaya Administrasi </td></tr><tr><td> Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global. Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Biaya Logistik merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Biaya Logistik nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Biaya Logistik. </td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td> Adapun formula perhitungan rasio Biaya Logistik terhadap PDB sebagai berikut: Rasio Biaya Logistik terhadap PDB (%) = Total Biaya Logistik Nasional Produk Domestik Bruto (PDB) × 100% dimana: • Total Biaya Logistik Nasional: akumulasi seluruh biaya logistik di tingkat nasional dalam periode tertentu (biasanya per tahun), meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, inventory, dan administrasi logistik. • PDB (Produk Domestik Bruto): total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya per tahun). </td></tr></table>	Definisi	Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa. Menurut BAPPENAS bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara Makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu: 1. Biaya Transportasi 2. Biaya Pergudangan 3. Biaya Penyimpnana Persediaan (Inventory) 4. Biaya Administrasi	Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global. Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Biaya Logistik merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Biaya Logistik nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Biaya Logistik.	Formula	Adapun formula perhitungan rasio Biaya Logistik terhadap PDB sebagai berikut: Rasio Biaya Logistik terhadap PDB (%) = Total Biaya Logistik Nasional Produk Domestik Bruto (PDB) × 100% dimana: • Total Biaya Logistik Nasional: akumulasi seluruh biaya logistik di tingkat nasional dalam periode tertentu (biasanya per tahun), meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, inventory, dan administrasi logistik. • PDB (Produk Domestik Bruto): total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya per tahun).
Definisi							
Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa. Menurut BAPPENAS bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara Makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu: 1. Biaya Transportasi 2. Biaya Pergudangan 3. Biaya Penyimpnana Persediaan (Inventory) 4. Biaya Administrasi							
Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global. Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Biaya Logistik merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Biaya Logistik nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Biaya Logistik.							
Formula							
Adapun formula perhitungan rasio Biaya Logistik terhadap PDB sebagai berikut: Rasio Biaya Logistik terhadap PDB (%) = Total Biaya Logistik Nasional Produk Domestik Bruto (PDB) × 100% dimana: • Total Biaya Logistik Nasional: akumulasi seluruh biaya logistik di tingkat nasional dalam periode tertentu (biasanya per tahun), meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, inventory, dan administrasi logistik. • PDB (Produk Domestik Bruto): total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya per tahun).							

Satuan Hasil Persentase (%) — menunjukkan seberapa besar proporsi biaya logistik terhadap total ekonomi nasional. Secara khusus, Perhitungan Rasio Biaya Logistik terhadap PDB dikeluarkan melalui kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara tahunan.
Tujuan
Pengukuran Rasio Biaya Logistik terhadap PDB bertujuan untuk menunjukkan berapa besar proporsi biaya logistik terhadap total output ekonomi nasional. Semakin rendah rasionya, semakin efisien sistem logistik suatu negara atau wilayah.

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Perniagaan dan Ekonomi Digital
Sumber Data	Berita Resmi Statistik Disagresi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Stok Kapital
Tingkat Kendali IKU	(...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	13,52% terhadap PDB	13,52% terhadap PDB
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.3

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth		
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan		
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto		
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td> Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, mencakup bangunan, mesin dan peralatan. PMTB meliputi investasi produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai aset yang tidak diproduksi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24 jenis barang modal yang termasuk PMTB, yaitu: 1. Bangunan Tempat Tinggal 2. Bangunan bukan tempat tinggal 3. Konstruksi lainnya 4. Mesin pembangkit dan penggerak mula 5. Peralatan informasi dan teleokomunikasi 6. Mesin lainnya 7. Pesawat terbang dan sejenisnya 8. Kapal dan sejenisnya 9. Kereta api dan sejenisnya 10. Kendaraan bermotor 11. Alat pengangkut lainnya 12. Ternak besar 13. Hewan lainnya 14. Tanaman perkebunan 15. Tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya 16. Tanaman lainnya 17. Barang-barang dari kayu, rotan & bambu 18. Peralatan dari logam 19. Barang dari kain & kulit 20. Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur 21. Peralatan kedokteran dan kesehatan 22. Peralatan lainnya 23. Produk kekayaan intelektual 24. Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi Beberapa manfaat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negara, antara lain: • Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memliki peran sangat penting bagi negara karena menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat termasuk kebijakan pengalokasian anggaran dan investasi sehingga mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. • Peningkatan PMTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dalam aset tetap (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi. </td></tr></table>	Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, mencakup bangunan, mesin dan peralatan. PMTB meliputi investasi produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai aset yang tidak diproduksi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24 jenis barang modal yang termasuk PMTB, yaitu: 1. Bangunan Tempat Tinggal 2. Bangunan bukan tempat tinggal 3. Konstruksi lainnya 4. Mesin pembangkit dan penggerak mula 5. Peralatan informasi dan teleokomunikasi 6. Mesin lainnya 7. Pesawat terbang dan sejenisnya 8. Kapal dan sejenisnya 9. Kereta api dan sejenisnya 10. Kendaraan bermotor 11. Alat pengangkut lainnya 12. Ternak besar 13. Hewan lainnya 14. Tanaman perkebunan 15. Tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya 16. Tanaman lainnya 17. Barang-barang dari kayu, rotan & bambu 18. Peralatan dari logam 19. Barang dari kain & kulit 20. Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur 21. Peralatan kedokteran dan kesehatan 22. Peralatan lainnya 23. Produk kekayaan intelektual 24. Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi Beberapa manfaat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negara, antara lain: • Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memliki peran sangat penting bagi negara karena menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat termasuk kebijakan pengalokasian anggaran dan investasi sehingga mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. • Peningkatan PMTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dalam aset tetap (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.
Definisi				
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, mencakup bangunan, mesin dan peralatan. PMTB meliputi investasi produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai aset yang tidak diproduksi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24 jenis barang modal yang termasuk PMTB, yaitu: 1. Bangunan Tempat Tinggal 2. Bangunan bukan tempat tinggal 3. Konstruksi lainnya 4. Mesin pembangkit dan penggerak mula 5. Peralatan informasi dan teleokomunikasi 6. Mesin lainnya 7. Pesawat terbang dan sejenisnya 8. Kapal dan sejenisnya 9. Kereta api dan sejenisnya 10. Kendaraan bermotor 11. Alat pengangkut lainnya 12. Ternak besar 13. Hewan lainnya 14. Tanaman perkebunan 15. Tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya 16. Tanaman lainnya 17. Barang-barang dari kayu, rotan & bambu 18. Peralatan dari logam 19. Barang dari kain & kulit 20. Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur 21. Peralatan kedokteran dan kesehatan 22. Peralatan lainnya 23. Produk kekayaan intelektual 24. Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi Beberapa manfaat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negara, antara lain: • Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memliki peran sangat penting bagi negara karena menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat termasuk kebijakan pengalokasian anggaran dan investasi sehingga mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. • Peningkatan PMTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dalam aset tetap (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.				

- Berguna sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis bagi pihak swasta, karena memberikan informasi tentang posisi dan kondisi perekonomian suatu wilayah Negara dan menjadi perkiraan dalam menentukan nilai investasi.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi nilai Pembentukan Modal Tetap Buro (PMTB)

Formula

$$\text{Rasio PMTB terhadap PDB (\%)} = \left(\frac{\text{Nilai PMTB}}{\text{PDB atas dasar harga berlaku}} \right) \times 100\%$$

dimana:

- PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto): nilai investasi untuk aset tetap baru (bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, kendaraan, dll.) dalam suatu periode
- PDB (Produk Domestik Bruto): Total nilai output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode yang sama, atas dasar harga berlaku

Perhitungan Pembentukan Modal Tetap Bruto dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana BPS selalu mengeluarkan data PDB dan PDRB yang dihitung dari 2 sisi yaitu produksi dan pengeluaran, sementara itu PMTB merupakan salah satu data komponen PDRB Pengeluaran.

Tujuan

Mengukur PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui tingkat investasi dalam aset tetap produktif dalam suatu perekonomian dan sejauh mana investasi tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio ini merupakan salah satu indikator kunci dalam analisis makroekonomi dan perencanaan pembangunan.

Satuan Pengukuran

Persentase (%)

Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pusat Statistik

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Sumber Data

Berita Resmi Statistik Disagresi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Stok Kapital

Tingkat Kendali IKU

: (...) High (...) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct (...) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

: (....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	29,4% PDB	29,4% PDB
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.4

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Strategis		Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.4. Rasio PDB Industri Pengolahan
Deskripsi IKU	:	Definisi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Badan Pusat Statistik adalah ukuran ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur kinerja atau performa pembangunan, khususnya di bidang ekonomi makro. PDB merupakan ukuran ekonomi makro yang menggambarkan nilai total output akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. PDB digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan (<i>Manufacturing GDP</i>) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah atau negara selama periode tertentu (biasanya per tahun atau triwulan). Industri Pengolahan ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Sektor Industri Pengolahan di Indonesia menjadi salah satu penggerak utama ekonomi sehingga industri ini mampu menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas relatif tinggi. Rasio PDB Industri Pengolahan adalah persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah atau negara. Indikator ini mengukur sejauh mana sektor industri pengolahan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Rasio PDB Industri Pengolahan merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Rasio PDB Industri Pengolahan yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Rasio PDB Industri Pengolahan. Formula Rasio PDB Industri Pengolahan dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut: $\text{Rasio PDB Industri Pengolahan} = \left(\frac{\text{PDB Industri Pengolahan}}{\text{Total PDB}} \right) \times 100\%$ Pengukuran realisasi kinerja IKU Rasio PDB Indonesia didasarkan pada perbandingan total PDB Industri Pengolahan dengan Total PDB secara keseluruhan dan hasilnya dikalikan 100%. Jika Rasio PDB Industri Pengolahan mengalami kenaikan maka kontribusi Industri Pengolahan terhadap total PDB semakin besar. Sebaliknya jika Rasio PDB Industri Pengolahan menurun maka kontribusi Industri Pengolahan terhadap total PDB menurun.

Tujuan
Mengukur rasio PDB Industri Pengolahan bertujuan untuk mengetahui kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau daerah. Rasio ini penting untuk memahami peran dan bobot sektor manufaktur dalam struktur ekonomi secara keseluruhan.

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
Sumber Data	Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	: (...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	20,8% PDB	20,8% PDB
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.5

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.5. Devisa Pariwisata
Deskripsi IKU	:	Definisi Devisa Pariwisata adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam menghasilkan devisa negara, khususnya melalui pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) selama kunjungan mereka ke Indonesia dalam periode tertentu. Devisa pariwisata merupakan salah satu indikator strategis dalam menilai kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Secara sederhana, devisa pariwisata menggambarkan besarnya pemasukan negara dari pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berkunjung ke Indonesia. Adapun sumber utama pembentuk devisa pariwisata sebagai berikut: 1. Akomodasi Pengeluaran wisatawan untuk penginapan adalah salah satu kontributor terbesar devisa pariwisata. Hal ini mencakup pembayaran hotel, vila, resort, guesthouse, hingga homestay. Tingginya permintaan terhadap akomodasi berkualitas mendorong pengembangan industri perhotelan dan membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal. 2. Makanan dan Minuman (Kuliner) Kuliner Indonesia yang kaya cita rasa turut menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Dari restoran berbintang hingga warung kaki lima, pengeluaran wisatawan pada sektor makanan dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa, sekaligus mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. 3. Transportasi Lokal Setelah tiba di Indonesia, wisatawan membutuhkan transportasi untuk menjelajahi destinasi wisata. Belanja devisa pada sektor ini mencakup sewa kendaraan, tiket pesawat domestik, angkutan umum, kapal wisata, hingga jasa pemandu. Kualitas dan keterjangkauan moda transportasi mempengaruhi kenyamanan dan lama tinggal wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya pengeluaran mereka. 4. Belanja dan Oleh-oleh Kegiatan berbelanja menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wisata. Wisatawan biasanya membeli cendera mata, produk kerajinan tangan, pakaian, perhiasan, atau produk khas daerah lainnya. Pengeluaran ini menjadi ladang penghasilan bagi UMKM lokal, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah tujuan wisata. 5. Atraksi dan Rekreasi Wisatawan juga mengeluarkan uang untuk menikmati berbagai atraksi wisata, seperti tiket masuk objek wisata, pertunjukan budaya, taman hiburan, paket wisata bahari, dan kegiatan petualangan alam. Semakin banyak pilihan atraksi berkualitas, maka semakin besar peluang devisa yang dihasilkan. 6. Jasa Lainnya Komponen ini mencakup berbagai layanan pendukung seperti jasa tur dan travel, fotografi profesional, spa dan wellness, komunikasi, dan layanan pribadi lainnya. Walaupun porsi tidak sebesar komponen utama lainnya, jasa ini turut memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus memberikan kontribusi tambahan terhadap devisa.

Dalam perumusannya, IKU ini terdiri dari dua komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam periode tertentu, biasanya dihitung secara tahunan. Angka ini mencerminkan volume wisatawan yang berhasil ditarik oleh daya tarik destinasi, promosi internasional, serta kemudahan akses masuk ke Indonesia. Komponen kedua adalah rata-rata pengeluaran per wisatawan mancanegara selama kunjungan mereka. Pengeluaran ini mencakup berbagai aktivitas seperti akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, transportasi lokal, rekreasi, belanja oleh-oleh, serta jasa lainnya. Kombinasi dari kedua komponen tersebut—jumlah wisatawan dan besarnya pengeluaran mereka—menghasilkan nilai devisa pariwisata yang digunakan sebagai indikator keberhasilan program pembangunan sektor pariwisata nasional. IKU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja kementerian terkait, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan ekonomi nasional serta pembentukan kebijakan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.
Formula
Devisa Pariwisata = Jumlah Wisman × Rata – rata Pengeluaran per Wisman per Kunjungan Keterangan: • Jumlah Wisman: jumlah kunjungan wisatawan mancanegara • Rata-rata Pengeluaran: pengeluaran rata-rata per kunjungan, termasuk akomodasi, makanan, transportasi, rekreasi, dll. • Satuan devisa umumnya dalam juta atau miliar USD
Tujuan
Tujuan mengukur devisa pariwisata Indonesia adalah untuk mengetahui kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional, terutama dari sisi pendapatan valuta asing (mata uang asing) yang masuk ke negara

Satuan Pengukuran	Miliar USD (Nominal Mata Uang)
Unit/Pihak Penyedia Data	Bank Indonesia
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
Sumber Data	Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Bank Indonesia
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(...) Maximize (....) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	19 – 22,1 miliar USD	19 – 22,1 miliar USD
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.6

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth				
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan				
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).				
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.6 Rasio PDB Pariwisata				
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td> Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang digunakan untuk mengukur kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi signifikansi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian nasional dan sebagai parameter keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis output riil. IKU ini didasarkan pada pendekatan Tourism Satellite Account (TSA), sebuah kerangka statistik internasional yang dikembangkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bersama lembaga-lembaga global seperti OECD dan Eurostat. Dalam TSA, hanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permintaan wisatawan yang diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi PDB pariwisata. Dengan demikian, IKU Rasio PDB Pariwisata tidak hanya mencerminkan jumlah wisatawan, melainkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari interaksi konsumsi wisatawan dengan industri-industri yang menyediakan barang dan jasa wisata. Nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti: a. Akomodasi b. Makanan dan minuman c. Transportasi d. Agen perjalanan dan tour operator e. Aktivitas budaya dan rekreasi f. Industri souvenir dan kerajinan terkait wisata Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik permintaan wisatawan (manacanegara dan domestik), sehingga indikator ini benar-benar menggambarkan kontribusi ekonomi nyata (real economic impact) dari sektor pariwisata. </td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td> Rasio PDB Pariwisata = PDB Sektor Pariwisata PDB Nasional × 100% Dimana: • PDB Sektor Pariwisata: nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung terkait dengan industri pariwisata. Nilai ini dihitung berdasarkan pendekatan Tourism Satellite Account (TSA) dan mencakup berbagai subsektor seperti: Akomodasi (hotel, penginapan); Makanan dan minuman; Transportasi wisata (darat, laut, udara); Agen perjalanan dan tour operator; Jasa hiburan dan rekreasi; Industri kerajinan dan souvenir terkait pariwisata • PDB Nasional: total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (biasanya tahunan), termasuk sektor industri, pertanian, jasa, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. </td></tr></table>	Definisi	Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang digunakan untuk mengukur kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi signifikansi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian nasional dan sebagai parameter keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis output riil. IKU ini didasarkan pada pendekatan Tourism Satellite Account (TSA), sebuah kerangka statistik internasional yang dikembangkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bersama lembaga-lembaga global seperti OECD dan Eurostat. Dalam TSA, hanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permintaan wisatawan yang diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi PDB pariwisata. Dengan demikian, IKU Rasio PDB Pariwisata tidak hanya mencerminkan jumlah wisatawan, melainkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari interaksi konsumsi wisatawan dengan industri-industri yang menyediakan barang dan jasa wisata. Nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti: a. Akomodasi b. Makanan dan minuman c. Transportasi d. Agen perjalanan dan tour operator e. Aktivitas budaya dan rekreasi f. Industri souvenir dan kerajinan terkait wisata Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik permintaan wisatawan (manacanegara dan domestik), sehingga indikator ini benar-benar menggambarkan kontribusi ekonomi nyata (real economic impact) dari sektor pariwisata.	Formula	Rasio PDB Pariwisata = PDB Sektor Pariwisata PDB Nasional × 100% Dimana: • PDB Sektor Pariwisata: nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung terkait dengan industri pariwisata. Nilai ini dihitung berdasarkan pendekatan Tourism Satellite Account (TSA) dan mencakup berbagai subsektor seperti: Akomodasi (hotel, penginapan); Makanan dan minuman; Transportasi wisata (darat, laut, udara); Agen perjalanan dan tour operator; Jasa hiburan dan rekreasi; Industri kerajinan dan souvenir terkait pariwisata • PDB Nasional: total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (biasanya tahunan), termasuk sektor industri, pertanian, jasa, perdagangan, konstruksi, dan lainnya.
Definisi						
Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang digunakan untuk mengukur kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi signifikansi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian nasional dan sebagai parameter keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis output riil. IKU ini didasarkan pada pendekatan Tourism Satellite Account (TSA), sebuah kerangka statistik internasional yang dikembangkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bersama lembaga-lembaga global seperti OECD dan Eurostat. Dalam TSA, hanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permintaan wisatawan yang diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi PDB pariwisata. Dengan demikian, IKU Rasio PDB Pariwisata tidak hanya mencerminkan jumlah wisatawan, melainkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari interaksi konsumsi wisatawan dengan industri-industri yang menyediakan barang dan jasa wisata. Nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti: a. Akomodasi b. Makanan dan minuman c. Transportasi d. Agen perjalanan dan tour operator e. Aktivitas budaya dan rekreasi f. Industri souvenir dan kerajinan terkait wisata Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik permintaan wisatawan (manacanegara dan domestik), sehingga indikator ini benar-benar menggambarkan kontribusi ekonomi nyata (real economic impact) dari sektor pariwisata.						
Formula						
Rasio PDB Pariwisata = PDB Sektor Pariwisata PDB Nasional × 100% Dimana: • PDB Sektor Pariwisata: nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung terkait dengan industri pariwisata. Nilai ini dihitung berdasarkan pendekatan Tourism Satellite Account (TSA) dan mencakup berbagai subsektor seperti: Akomodasi (hotel, penginapan); Makanan dan minuman; Transportasi wisata (darat, laut, udara); Agen perjalanan dan tour operator; Jasa hiburan dan rekreasi; Industri kerajinan dan souvenir terkait pariwisata • PDB Nasional: total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (biasanya tahunan), termasuk sektor industri, pertanian, jasa, perdagangan, konstruksi, dan lainnya.						

Rasio PDB pariwisata juga digunakan untuk **membandingkan daya saing antar negara dalam sektor pariwisata**. Negara dengan kontribusi pariwisata tinggi terhadap PDB biasanya dianggap memiliki ekosistem pariwisata yang sehat dan produktif, serta mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan penerimaan devisa.

Tujuan

Mengukur rasio PDB pariwisata atau kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pariwisata berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Rasio ini menjadi indikator penting untuk menilai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik.

Salah satu tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk memberikan gambaran kuantitatif atas kontribusi ekonomi sektor pariwisata, yang meliputi industri jasa akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, hiburan, serta jasa-jasa terkait lainnya. Dengan memahami kontribusi pariwisata terhadap PDB, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data, mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, serta menentukan prioritas investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor ini.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Sumber Data

Laporan Bulanan BPS, Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata, Neraca Satelit Pariwisata Nasional

Tingkat Kendali IKU

:

(...) High (...) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct (...) Indirect

Polarisasi IKU

(...) Maximize (...) Minimize (X) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	4,5 – 4,6 %	4,5 – 4,6 %
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.7

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.7. Indeks Ketahanan Energi
Deskripsi IKU	:	Definisi Indeks Ketahanan Energi adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin pasokan energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata, guna mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Indeks ini merepresentasikan kinerja sistem energi dari berbagai aspek strategis, seperti ketersediaan energi (availability), aksesibilitas dan keterjangkauan (accessibility and affordability), ketergantungan energi terhadap luar negeri (security), efisiensi dan keberlanjutan lingkungan (sustainability), serta diversifikasi sumber energi. 1. Availability (Ketersediaan): menilai sejauh mana cadangan dan pasokan energi (primer dan final) cukup untuk kebutuhan nasional. 2. Accessibility: mengukur keterjangkauan infrastruktur dan distribusi energi oleh masyarakat dan industri. 3. Affordability (Keterjangkauan Harga): menilai kemampuan masyarakat untuk membeli energi dengan harga yang wajar. 4. Security (Ketahanan Pasokan): mengukur ketergantungan terhadap impor energi dan kemampuan menghadapi gangguan eksternal. 5. Sustainability & Efficiency: mengukur proporsi energi baru terbarukan, efisiensi penggunaan energi, dan dampak lingkungan dari sistem energi. 6. Diversifikasi Energi: menilai tingkat variasi sumber energi nasional untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis sumber. Indeks Ketahanan Energi bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor seperti berikut: memberikan alat ukur yang objektif dan komprehensif untuk mengevaluasi ketahanan energi nasional dari sisi teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan; mendukung perumusan kebijakan energi yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi masa depan, termasuk dalam perencanaan transisi energi nasional; memfasilitasi monitoring dan evaluasi program serta investasi energi agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna; mengantisipasi risiko dan gangguan pasokan energi, serta meningkatkan kapasitas respons dan mitigasi melalui diversifikasi dan efisiensi; memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial nasional dengan sistem energi yang handal, adil, dan berkelanjutan; mendorong investasi dan inovasi di sektor energi, dengan memberikan kepastian dan gambaran risiko kepada pelaku usaha. Formula Indeks Ketahanan Energi (Energy Security Index) adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai seberapa aman dan andalnya suatu negara atau wilayah dalam memenuhi kebutuhan energinya. Rumus dan komponen indeks ini bisa bervariasi tergantung pada lembaga atau pendekatan yang digunakan, tapi secara umum mencakup beberapa dimensi utama: 1. Ketersediaan energi (Availability) 2. Aksesibilitas atau keterjangkauan (Accessibility / Affordability) 3. Diversifikasi sumber energi 4. Ketahanan terhadap gangguan pasokan (Reliability) 5. Dampak lingkungan dan efisiensi (Environmental sustainability & Efficiency)

$$IKE = w_1 \cdot A + w_2 \cdot B + w_3 \cdot C + w_4 \cdot D + w_5 \cdot E$$

Keterangan:

A = Indeks ketersediaan energi

B = Indeks keterjangkauan energi

C = Indeks diversifikasi energi

D = Indeks keandalan sistem energi

E = Indeks dampak lingkungan energi

$W_1, W_2, \dots, W_5$ = bobot koefisien masing-masing indeks

Tujuan

Indeks Ketahanan Energi bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi untuk mendukung pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.

Indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai seberapa tangguh sistem energi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan — baik dari sisi pasokan energi, harga, ketergantungan impor, diversifikasi sumber energi, hingga dampak lingkungan.

Satuan Pengukuran

Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data

Dewan Energi Nasional

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber Data

Laporan Dewan Energi Nasional

Tingkat Kendali IKU

: (...) High (...) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(X) Direct (...) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

: (...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	6,77	6,77
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.8

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth				
Sasaran Strategis	:	SS 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan				
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara konsisten dan inklusif, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan Ekonomi yang konsisten mampu Mendorong peningkatan output dan produktivitas nasional/regional secara berkelanjutan. Inklusivitas dalam perekonomian merupakan pedoman dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang keberlanjutan lingkungan dimana mengelola sumber daya alam secara bijak agar tidak habis atau rusak oleh kegiatan ekonomi. Selain itu, efisiensi dan inovasi dalam penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal (krisis global, bencana, perubahan iklim).				
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.1.8 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global				
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td> IKU Indeks Daya Saing Digital adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas digital suatu negara—termasuk Indonesia—dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi di era transformasi digital global. Diukur oleh lembaga internasional seperti IMD (International Institute for Management Development) dan WEF (World Economic Forum), indeks ini merefleksikan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal digitalisasi ekonomi, teknologi, SDM digital, dan kesiapan infrastruktur. Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kualitas sumber daya manusia digital, ekosistem inovasi digital, kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Melalui pengukuran ini, Indonesia dapat mengetahui posisi relatifnya dibandingkan negara lain di dunia dalam hal perkembangan dan daya saing digital. Indeks ini menjadi alat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, serta program yang bertujuan meningkatkan ekosistem digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, dan mempercepat inklusi digital secara berkelanjutan. Dengan kata lain, Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global adalah parameter strategis yang menilai efektivitas dan kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika teknologi global. </td></tr><tr><th>Formula</th></tr><tr><td> Indeks Daya Saing Digital Indonesia dihitung dengan menggabungkan beberapa dimensi atau pilar utama yang menggambarkan berbagai aspek penting dalam kemampuan digital sebuah negara. Setiap pilar ini mewakili satu area kritis, seperti infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM) digital, ekosistem inovasi, kebijakan dan regulasi digital, serta tingkat penggunaan teknologi digital. Untuk menghitung indeks ini, terlebih dahulu masing-masing pilar diberi skor berdasarkan capaian atau performa yang diukur melalui berbagai indikator turunan. Skor ini biasanya dinyatakan dalam angka yang sudah dinormalisasi agar berada dalam skala yang sama, misalnya dari 0 sampai 100. Setelah mendapatkan skor pada setiap pilar, skor tersebut dikalikan dengan bobot atau tingkat kepentingan pilar tersebut dalam keseluruhan indeks. Bobot ini merefleksikan seberapa besar kontribusi pilar tersebut terhadap daya saing digital secara menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa jumlah semua bobot harus sama dengan 1 (atau 100%). Selanjutnya, hasil perkalian skor dan bobot untuk semua pilar dijumlahkan. Penjumlahan inilah yang menghasilkan nilai akhir dari Indeks Daya Saing Digital. Nilai ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan kemampuan Indonesia dalam kompetisi digital di tingkat global. </td></tr></table>	Definisi	IKU Indeks Daya Saing Digital adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas digital suatu negara—termasuk Indonesia—dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi di era transformasi digital global. Diukur oleh lembaga internasional seperti IMD (International Institute for Management Development) dan WEF (World Economic Forum), indeks ini merefleksikan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal digitalisasi ekonomi, teknologi, SDM digital, dan kesiapan infrastruktur. Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kualitas sumber daya manusia digital, ekosistem inovasi digital, kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Melalui pengukuran ini, Indonesia dapat mengetahui posisi relatifnya dibandingkan negara lain di dunia dalam hal perkembangan dan daya saing digital. Indeks ini menjadi alat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, serta program yang bertujuan meningkatkan ekosistem digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, dan mempercepat inklusi digital secara berkelanjutan. Dengan kata lain, Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global adalah parameter strategis yang menilai efektivitas dan kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.	Formula	Indeks Daya Saing Digital Indonesia dihitung dengan menggabungkan beberapa dimensi atau pilar utama yang menggambarkan berbagai aspek penting dalam kemampuan digital sebuah negara. Setiap pilar ini mewakili satu area kritis, seperti infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM) digital, ekosistem inovasi, kebijakan dan regulasi digital, serta tingkat penggunaan teknologi digital. Untuk menghitung indeks ini, terlebih dahulu masing-masing pilar diberi skor berdasarkan capaian atau performa yang diukur melalui berbagai indikator turunan. Skor ini biasanya dinyatakan dalam angka yang sudah dinormalisasi agar berada dalam skala yang sama, misalnya dari 0 sampai 100. Setelah mendapatkan skor pada setiap pilar, skor tersebut dikalikan dengan bobot atau tingkat kepentingan pilar tersebut dalam keseluruhan indeks. Bobot ini merefleksikan seberapa besar kontribusi pilar tersebut terhadap daya saing digital secara menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa jumlah semua bobot harus sama dengan 1 (atau 100%). Selanjutnya, hasil perkalian skor dan bobot untuk semua pilar dijumlahkan. Penjumlahan inilah yang menghasilkan nilai akhir dari Indeks Daya Saing Digital. Nilai ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan kemampuan Indonesia dalam kompetisi digital di tingkat global.
Definisi						
IKU Indeks Daya Saing Digital adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas digital suatu negara—termasuk Indonesia—dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi di era transformasi digital global. Diukur oleh lembaga internasional seperti IMD (International Institute for Management Development) dan WEF (World Economic Forum), indeks ini merefleksikan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal digitalisasi ekonomi, teknologi, SDM digital, dan kesiapan infrastruktur. Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kualitas sumber daya manusia digital, ekosistem inovasi digital, kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Melalui pengukuran ini, Indonesia dapat mengetahui posisi relatifnya dibandingkan negara lain di dunia dalam hal perkembangan dan daya saing digital. Indeks ini menjadi alat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, serta program yang bertujuan meningkatkan ekosistem digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, dan mempercepat inklusi digital secara berkelanjutan. Dengan kata lain, Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global adalah parameter strategis yang menilai efektivitas dan kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.						
Formula						
Indeks Daya Saing Digital Indonesia dihitung dengan menggabungkan beberapa dimensi atau pilar utama yang menggambarkan berbagai aspek penting dalam kemampuan digital sebuah negara. Setiap pilar ini mewakili satu area kritis, seperti infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM) digital, ekosistem inovasi, kebijakan dan regulasi digital, serta tingkat penggunaan teknologi digital. Untuk menghitung indeks ini, terlebih dahulu masing-masing pilar diberi skor berdasarkan capaian atau performa yang diukur melalui berbagai indikator turunan. Skor ini biasanya dinyatakan dalam angka yang sudah dinormalisasi agar berada dalam skala yang sama, misalnya dari 0 sampai 100. Setelah mendapatkan skor pada setiap pilar, skor tersebut dikalikan dengan bobot atau tingkat kepentingan pilar tersebut dalam keseluruhan indeks. Bobot ini merefleksikan seberapa besar kontribusi pilar tersebut terhadap daya saing digital secara menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa jumlah semua bobot harus sama dengan 1 (atau 100%). Selanjutnya, hasil perkalian skor dan bobot untuk semua pilar dijumlahkan. Penjumlahan inilah yang menghasilkan nilai akhir dari Indeks Daya Saing Digital. Nilai ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan kemampuan Indonesia dalam kompetisi digital di tingkat global.						

Secara matematis, formula tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Daya Saing Digital (IDD)} = \sum_{i=1}^n w_i \times S_i$$

Penjelasan:

- n = Jumlah pilar atau dimensi pengukuran (misalnya: Infrastruktur Digital, SDM Digital, Ekosistem Inovasi, Regulasi dan Kebijakan, dan Penggunaan Digital)
- Wi = Bobot atau berat masing-masing pilar ke dalam indeks total (dengan jumlah bobot $\sum W_i=1$ atau 100%)
- Si = Skor atau nilai capaian pada pilar ke-i, biasanya dinilai dari indikator-indikator turunan dengan rentang nilai standar (misal 0-100 atau 0-1)

Tujuan

IKU Indeks Daya Saing Digital ini diukur untuk menilai posisi dan kinerja digital Indonesia di kancah global. Selain itu, pengukuran ini berfungsi dalam memberi gambaran objektif tentang di mana posisi Indonesia dibandingkan dengan negara lain dalam hal kesiapan, kapasitas, dan keberhasilan transformasi digital serta mendorong benchmarking terhadap negara-negara pesaing dan mitra ekonomi, sehingga Indonesia dapat mengidentifikasi gap kompetitif dan peluang strategis.

Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	International Institute for Management Development (IMD), World Economic Forum (WEF)
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Sumber Data	International Institute for Management Development (IMD) World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), World Economic Forum (WEF)
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (....) Minimize (..) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	43	43
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 2.1

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth		
Sasaran Strategis	:	SS 2. Terkendalnya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi		
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan msii dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terkendalnya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi berarti tercapainya kondisi di mana laju inflasi berada dalam batas yang stabil dan terkendali, sesuai dengan kemampuan ekonomi nasional yang mencerminkan faktor-faktor fundamental seperti pertumbuhan ekonomi, produksi, permintaan agregat, dan kondisi moneter. Sasaran ini bertujuan menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi sehingga merusak daya beli masyarakat, namun juga tidak terlalu rendah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Adapun kondisi terkendalnya tingkat inflasi nasional tersebut, didukung oleh beberapa unsur kunci. Tingkat Inflasi yang terkendali mengindikasikan bahwa Inflasi berjalan pada level yang dapat diprediksi dan stabil dalam jangka menengah. Kondisi inflasi yang sesuai dengan fundamental ekonomi mencerminkan kondisi ekonomi nyata, seperti kapasitas produksi, konsumsi, dan suplai uang dalam rangka menjaga daya beli dan mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.		
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.2.1. Tingkat Inflasi		
Deskripsi IKU	:	<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td> Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi <i>supply</i>, sisi <i>demand</i>, dan ekspektasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan rill masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan. Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasayarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian. Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terbaganya inflasi di kisaran antara lain: A. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah B. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan C. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi. Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut: (1) Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target (2) Cadangan beras pemerintah (3) Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana </td></tr></table>	Definisi	Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi <i>supply</i>, sisi <i>demand</i>, dan ekspektasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan rill masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan. Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasayarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian. Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terbaganya inflasi di kisaran antara lain: A. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah B. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan C. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi. Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut: (1) Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target (2) Cadangan beras pemerintah (3) Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana
Definisi				
Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi <i>supply</i>, sisi <i>demand</i>, dan ekspektasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan rill masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan. Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasayarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian. Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terbaganya inflasi di kisaran antara lain: A. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah B. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan C. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi. Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut: (1) Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target (2) Cadangan beras pemerintah (3) Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana				

Formula
Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang terhubung ke metadata SEKI-IHK di Bank Indonesia. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. $\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{\text{Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode saat ini} - \text{IHK pada periode sebelumnya}}{\text{IHK pada periode sebelumnya}} \times 100\%$ Dalam pengukuran realisasi kinerja IKU didasarkan pada perbandingan nilai inflasi realisasi dengan nilai inflasi yang ditargetkan. Angka inflasi yang digunakan adalah angka inflasi tahun ke tahun (year on year/ tahun n terhadap tahun n-1).
Tujuan
Mengukur capaian kinerja pengendalian inflasi yang merupakan indikator dari perwujudan perekonomian yang unggul. Keberhasilan pengendalian inflasi akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi inflasi yang dipantau secara berkala menjadi dasar pembuatan kebijakan bagi tim TPIP untuk mengendalikan inflasi nasional sesuai kisaran sasaran yang ditetapkan

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
Sumber Data	Berita Resmi Statistik Inflasi
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (....) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(...) Maximize (....) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan	: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	2,5 ± 1%	2,5 ± 1%
s.d. Triwulan I	2,5 ± 1%	-
s.d. Triwulan II	2,5 ± 1%	-
s.d. Triwulan III	2,5 ± 1%	-
s.d. Triwulan IV	2,5 ± 1%	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.1

Perspektif	:	(X) Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan adalah kondisi di mana sistem ekonomi dan pasar tenaga kerja mampu menciptakan peluang kerja yang cukup, layak, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja secara berkelanjutan. Sasaran ini menekankan tidak hanya pada kuantitas pekerjaan yang tersedia, tetapi juga pada kualitas pekerjaan—yakni yang menjamin perlindungan hak pekerja, pendapatan yang memadai, kondisi kerja yang aman, serta prospek jangka panjang yang stabil dan adaptif terhadap perubahan struktural ekonomi. Sasaran strategis ini merujuk pada kondisi di mana kegiatan pembangunan ekonomi nasional dan kebijakan ketenagakerjaan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang tidak hanya tersedia dalam jumlah memadai, tetapi juga memiliki kualitas yang sesuai dengan standar pekerjaan layak (decent work) dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Lapangan kerja yang berkualitas mencakup pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak, menjamin perlindungan tenaga kerja, memberikan kepastian hubungan kerja dan kesempatan pengembangan diri, serta berada dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sementara itu, keberlanjutan mengacu pada kemampuan sistem ketenagakerjaan untuk secara terus-menerus menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja, seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, dan tantangan lingkungan global. Adapun Sasaran Strategis ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja utama (IKU) antara lain: (1) Tingkat pengangguran terbuka (TPT); (2) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK); (3) Persentase pekerja formal terhadap total pekerja; (4) Tingkat ketidaksesuaian (mismatch) pendidikan dan pekerjaan; (5) Jumlah penciptaan lapangan kerja baru per tahun.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.3.1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Deskripsi IKU	:	Definisi Lapangan kerja adalah kesempatan atau tempat bagi seseorang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, baik di sektor formal maupun informal, sesuai dengan keahlian, pendidikan, atau keterampilan yang dimilikinya. Sementara itu, Lapangan kerja formal adalah jenis pekerjaan yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan umumnya memiliki perlindungan hukum serta hak-hak tenaga kerja yang jelas. Beberapa ciri-ciri lapangan kerja formal: Status hukum jelas; perjanjian kerja tertulis; upah minimum dan jaminan sosial; jam kerja dan cuti diatur; pajak dan iuran dibayarkan. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal merupakan persentase peningkatan lapangan kerja formal dibandingkan dengan total peningkatan lapangan kerja (formal dan informal) dalam suatu periode waktu tertentu. Proporsi ini tidak hanya mengukur kuantitas lapangan kerja yang diciptakan, tetapi juga kualitasnya. Penyediaan lapangan kerja yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pekerjaan yang tersedia, tetapi juga seberapa banyak dari pekerjaan tersebut yang memenuhi standar formal. Proporsi lapangan kerja formal yang tinggi dapat menciptakan lingkaran positif. Pekerja formal memiliki daya beli yang lebih tinggi, yang mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal. Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Proporsi Lapangan Kerja Formal merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Proporsi Lapangan Kerja Formal yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Proporsi Lapangan Kerja Formal. Formula Perhitungan Proporsi Lapangan Kerja Formal dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). $\text{Proporsi Lapangan Kerja Formal (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah pekerja formal}}{\text{Jumlah total pekerja}} \right) \times 100\%$

Tujuan
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal adalah indikator yang mengukur seberapa besar bagian dari total lapangan kerja baru yang tercipta dalam periode tertentu berada di sektor formal—yakni sektor dengan status pekerjaan yang diatur secara hukum dan memberikan perlindungan ketenagakerjaan, seperti kontrak kerja, jaminan sosial, dan upah minimum

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Tingkat Kendali IKU	: (...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	: (...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	35%	35%
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.2

Perspektif : (X) *Stakeholder* (...) *Customer* (...) *Internal Business Process* (...) *Learning & Growth*

Sasaran Strategis : SS 3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan

Deskripsi Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian merupakan turunan langsung dari agenda pembangunan RPJMN 2025-2029 serta sebagai perwujudan misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung kesuksesan tercapainya sasaran pembangunan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, dan Rasio Gini. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan adalah kondisi di mana sistem ekonomi dan pasar tenaga kerja mampu menciptakan peluang kerja yang cukup, layak, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja secara berkelanjutan. Sasaran ini menekankan tidak hanya pada kuantitas pekerjaan yang tersedia, tetapi juga pada kualitas pekerjaan—yakni yang menjamin perlindungan hak pekerja, pendapatan yang memadai, kondisi kerja yang aman, serta prospek jangka panjang yang stabil dan adaptif terhadap perubahan struktural ekonomi. Sasaran strategis ini merujuk pada kondisi di mana kegiatan pembangunan ekonomi nasional dan kebijakan ketenagakerjaan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang tidak hanya tersedia dalam jumlah memadai, tetapi juga memiliki kualitas yang sesuai dengan standar pekerjaan layak (*decent work*) dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Lapangan kerja yang berkualitas mencakup pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak, menjamin perlindungan tenaga kerja, memberikan kepastian hubungan kerja dan kesempatan pengembangan diri, serta berada dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sementara itu, keberlanjutan mengacu pada kemampuan sistem ketenagakerjaan untuk secara terus-menerus menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja, seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, dan tantangan lingkungan global. Adapun Sasaran Strategis ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja utama (IKU) antara lain: (1) Tingkat pengangguran terbuka (TPT); (2) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK); (3) Persentase pekerja formal terhadap total pekerja; (4) Tingkat ketidaksesuaian (*mismatch*) pendidikan dan pekerjaan; (5) Jumlah penciptaan lapangan kerja baru per tahun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Deskripsi IKU

Definisi

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dihitung sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mencari kerja. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah/negara pada periode tertentu. Tingkat Pengangguran Terbuka mengukur seberapa besar persentase angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan adanya banyak orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan faktor penting yang mempengaruhi penyediaan lapangan kerja suatu negara. Ketika pengangguran tidak bisa teratasi dengan baik tentunya lapangan kerja akan semakin minim karena adanya ketidakseimbangan antara kedua faktor tersebut. Tingginya tingkat pengangguran tentunya pasti akan mempengaruhi lapangan kerja dan menjadi pengganggu bagi tercapainya tujuan negara.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat *ultimate outcome* serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka.

Formula

Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Ssurvei Angkatan Kerja Nasional (Saker/98nas).

$$TPT = \left(\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$$

- Pengangguran Terbuka: orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha/kegiatan ekonomi, dan aktif tersedia untuk bekerja dalam periode survei
- Angkatan Kerja: semua orang usia kerja (≥15 tahun) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan (termasuk pengangguran terbuka)
- TPT: Persentase dari angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tetapi sedang aktif mencarinya.

Tujuan

Mengukur efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja serta menilai kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Tingkat Kendali IKU	(...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (...) Indirect
Polarisasi IKU	(...) Maximize (...) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (...) Triwulanan (...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	4,5% - 5%	4,5% - 5%
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 4.1

Perspektif	: (...) Stakeholder (...) Customer (X) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	: SS 4. Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Peraturan Presiden Nomor 143 tahun 2024 mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan proses sinkronisasi, koordinasi serta pengendalian di bidang Perekonomian. Keberhasilan dalam mewujudkan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif akan mendorong tercapainya target-target ekonomi makro yang ditargetkan. Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas adalah kondisi di mana perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi dilakukan secara terencana, berbasis data dan analisis yang kuat, serta mampu menjawab dinamika dan tantangan ekonomi secara tepat dan adaptif. Kebijakan yang berkualitas ditandai dengan konsistensi antar sektor, responsif terhadap perubahan global dan domestik, serta memiliki efek nyata terhadap peningkatan stabilitas, pertumbuhan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini menggambarkan upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional dan sektoral dilakukan secara terintegrasi, berbasis data dan analisis mendalam, serta menghasilkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang berkualitas bukan hanya memenuhi standar administratif atau formalitas regulasi, tetapi juga memperhatikan aspek substansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, kesinambungan, serta konsistensi antarsektor dan antarwaktu. Kebijakan ini juga mampu merespons dinamika ekonomi domestik maupun global, termasuk perubahan teknologi, krisis keuangan, dan tantangan iklim.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: IKU.4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan Perekonomian
Deskripsi IKU	Definisi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam pelaksanaannya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Menteri yang bertanggung jawab atas Indeks Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi Pengendalian adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah: 1. Kebijakan terkait Realisasi Belanja Modal BUMN 2. Kebijakan terkait Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3. Kebijakan terkait Penyelesaian Penugasan Pemerintah 4. Kebijakan terkait Tingkat Inflasi 5. Kebijakan terkait Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital 6. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Bilateral 7. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Regional 8. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral 9. Kebijakan terkait Kerja Sama Investasi dan Hilirisasi 10. Kebijakan terkait Ekonomi Makro dan Fiskal 11. Kebijakan terkait Digital Economy Framework Agreement 12. Kebijakan terkait Program Belanja Masyarakat 13. Kebijakan terkait Pengendalian Impor 14. Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara, dan Rel 15. Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi 16. Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi 17. Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya 18. Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri 19. Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik 20. Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik 21. Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional 22. Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan 23. Kebijakan terkait Pengembangan Biofuel 24. Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) 25. Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS 26. Kebijakan terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara

					27. Kebijakan terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis 28. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka 29. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil 30. Kebijakan terkait Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan 31. Kebijakan terkait Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis 32. Kebijakan terkait Pengembangan Pariwisata Adapun Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator <i>internal bussiness</i> yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tahapan 1. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait kebijakan perekonomian dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun kedepan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini: 1. Dokumen Identifikasi dan Penetapan ruang lingkup yang diselesaikan 2. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy Brief 3. Telaah staf tentang urgensi penanganan isu Tahapan 2. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan alternatif rekomendasi yang berisikan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini: 1. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy brief 2. Telaah staf tentang kebijakan yang diambil Tahapan 3. Pada Tahapan ini dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini: 1. Bukti penyelenggaraan rapat koordinasi berupa Notula, surat deputi 2. Rancangan kebijakan seperti: RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko dan RPermen Tahapan 4. Pada tahapan ini evaluasi dan monitoring kebijakan dilakukan terhadap rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dalam proses sinkronisasi dan koordinasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi kebijakan dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini: 1. Laporan monitoring dan evaluasi kebijakan 2. Laporan hasil evaluasi kebijakan 3. Dokumen/kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan
					Formula Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh deputi dan dihitung dengan formulasi berikut: $\text{Indeks efektifitas SKP} = \sqrt[5]{SKP D 1 \times SKP D 2 \times SKP D 3 \times SKP D 4 \times SKP D 5}$ Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian.
					Tujuan Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target Indeks Ketahanan Energi, Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global, Tingkat Inflasi, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal, Rasio PDB Pariwisata, Devisa Pariwisata, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio PDB Industri Pengolahan, Biaya Logistik, Pembentukan Modal Tetap Bruto
Satuan Pengukuran					Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data					Seluruh Eselon I Kedeputan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data					Seluruh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data					BPS, BI, Kementerian terkait
Tingkat Kendali IKU	:	(...) High	(X) Moderate	(....) Low	
Tingkat Validitas IKU		(X) Exact	(...) Moderate	(....) Low	
Jenis Konsolidasi Periode		(...) Sum	(....) Average	(X) Take Last Known Value	

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (.....) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (...) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (....) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

:

(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan I	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan II	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan III	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan IV	3 dari 4 (Baik)	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 5.1

Perspektif	:	(...) Stakeholder (X) Customer (...) Internal Business Process (...) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang berkualitas merupakan sasaran strategis yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian
Deskripsi IKU	:	Definisi Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form. Formula Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut: $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right)$ Tujuan Mengukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan perekonomian sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.
Satuan Pengukuran	:	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pejabat Penanggung Jawab Data	:	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	:	Hasil Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian
Tingkat Kendali IKU	:	(X) High (...) Moderate (...) Low
Tingkat Validitas IKU	:	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	:	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	:	(...) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (X) Non-Cascading
Metode Cascading	:	(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize

Periode Pelaporan

:

☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Target
TAHUNAN	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)
s.d. Triwulan I	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan II	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan III	3 dari 4 (Baik)	-
s.d. Triwulan IV	3 dari 4 (Baik)	-

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 6.1

Perspektif	:	() Stakeholder (...) Customer (...) Internal Business Process (X) Learning & Growth
Sasaran Strategis	:	SS 6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kemenko Perekonomian dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, melalui penerapan prinsip-prinsip good governance, penguatan sistem manajemen, serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang profesional dan integratif, sehingga mampu mendorong koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional secara optimal. Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk menjalankan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional secara efisien, akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap dinamika global maupun nasional. ata kelola yang berkualitas berarti bahwa seluruh proses manajemen internal di Kemenko Perekonomian, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, dilaksanakan dengan: 1. Efektivitas kelembagaan, yaitu fungsi koordinasi antar kementerian/lembaga berjalan optimal. 2. Akuntabilitas kinerja, didasarkan pada indikator yang terukur dan hasil yang nyata. 3. Transparansi dan integritas, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. 4. Adaptabilitas organisasi, dalam merespons perubahan lingkungan strategis ekonomi nasional dan global, termasuk disrupsi teknologi, krisis ekonomi, dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama dari sasaran ini adalah untuk memperkuat peran Kemenko Perekonomian sebagai penggerak utama sinergi lintas sektor dalam kebijakan ekonomi, dengan tata kelola birokrasi yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis kebijakan yang kuat; peningkatan kualitas layanan dukungan kebijakan kepada kementerian/lembaga teknis; pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis pemerintahan yang transparan dan efisien; perbaikan sistem manajemen kinerja, SDM, dan pengelolaan keuangan negara; dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip <i>good governance</i> dan reformasi birokrasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	IKU.6.1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik
Deskripsi IKU	:	Definisi Reformasi Birokrasi merupakan proses perubahan dan pembaruan yang dilakukan dalam sistem dan struktur pemerintahan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas birokrasi. Reformasi birokrasi berupaya menyederhanakan proses bisnis dan menghilangkan hambatan birokrasi yang menghambat kinerja pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat maupun daerah) telah berhasil menerapkan prinsip dan program reformasi birokrasi. Indeks ini menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari Komponen RB General (60%) dan Komponen RB Tematik (40%), penilaian ini didasarkan kepada pedoman terbaru dari Kementerian PANRB (Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 dan Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024). Indeks RB dikategorikan dalam nilai sekaligus predikat tertentu. • Nilai >90 – 100 Kategori AA memiliki predikat Istimewa • Nilai >80 – 90 Kategori A memiliki predikat Sangat Baik • Nilai >70 – 80 Kategori BB memiliki predikat Baik • Nilai >60 – 70 Kategori B memiliki predikat Cukup Baik • Nilai >50 – 60 Kategori CC memiliki predikat Cukup • Nilai >30 – 50 Kategori C memiliki predikat Buruk • Nilai >0 – 30 Kategori D memiliki predikat Sangat Buruk Penilaian Indeks Refromasi Birokrasi dilakukan oleh evaluator yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya. Formula Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi yang tertuang didalam Kementerian PANRB (Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 dan Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024) . Indeks RB = (Nilai RB General × 60%) + (Nilai RB Tematik × 40%)

- Komponen RB General mewakili 60% dari total nilai dan menilai 10 area perubahan yang menjadi inti pelaksanaan reformasi birokrasi, seperti manajemen perubahan, penataan organisasi, penguatan pengawasan, dan kualitas layanan publik. Nilai ini menunjukkan bagaimana instansi melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. - RB Tematik menyumbang 40% dari nilai akhir dan berfokus pada kontribusi instansi terhadap agenda nasional seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, dan transformasi digital. Penilaian ini memastikan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar administrasi internal, tetapi juga mendukung hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Tujuan
Mengukur capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten, terarah, dan memberikan dampak nyata baik di tingkat internal pemerintahan maupun terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Satuan Pengukuran	Indeks
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian PAN RB
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Sumber Data	Kementerian PAN RB
Tingkat Kendali IKU	: (X) High (..) Moderate (..) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (..) Proxy (..) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(..) Sum (..) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (..) Cascading Non Peta (..) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct (..) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (..) Minimize (..) Stabilize
Periode Pelaporan	: (..) Bulanan (..) Triwulanan (..) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
TAHUNAN	90,77	90,77
s.d. Triwulan I	-	-
s.d. Triwulan II	-	-
s.d. Triwulan III	-	-
s.d. Triwulan IV	-	-



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Laporan Kinerja
Tahun Anggaran
2025

Sinergi untuk **AKSELERASI** PEMBANGUNAN EKONOMI

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 352 1835
Email. humas@ekon.go.id
Website. ekon.go.id

@PerekonomianRI  

Kemenko Perekonomian 

www.ekon.go.id 